



RPJMD JAKARTA

2025

2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS (IBUKOTA) JAKARTA TAHUN 2025-2029



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk menghasilkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sasaran pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan jangka panjang daerah, dengan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJMD.
14. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penjenjangan) kinerja.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran/*output*, hasil/*outcome*, dan dampak/*impact*).
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
17. Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat SIPJM adalah sistem informasi perencanaan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan:
 - a. RKPD; dan
 - b. Renstra PD;
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Renstra PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bappeda melaksanakan dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD kepada Gubernur.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun dengan memanfaatkan SIPJM.

Pasal 5

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
 - a. pemantauan; dan
 - b. supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi Kinerja RKPD dengan RPJMD.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. capaian Kinerja tujuan dan sasaran RPJMD;
 - b. capaian Kinerja Indikator Kinerja daerah;
 - c. analisis kondisi strategis dan fiskal daerah;
 - d. analisis efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
 - e. analisis efektivitas program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja daerah; dan
 - f. analisis efektivitas *output*/keluaran dalam mendukung pencapaian *outcome*/hasil pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pertimbangan penyesuaian target Kinerja dan pagu indikatif pada RKPD; dan
 - b. umpan balik perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi dasar perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.
- (3) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra PD dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Tata cara perubahan Renstra PD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) SIPJM merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun, melakukan supervisi, mengendalikan, dan mengevaluasi RPJMD dan Renstra PD yang terintegrasi dengan SIPD.
- (2) Hasil input pada SIPJM meliputi data tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target Kinerja dan pagu indikatif dituangkan ke dalam RPJMD dan Renstra PD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta beserta perubahannya, ketentuan tersebut berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

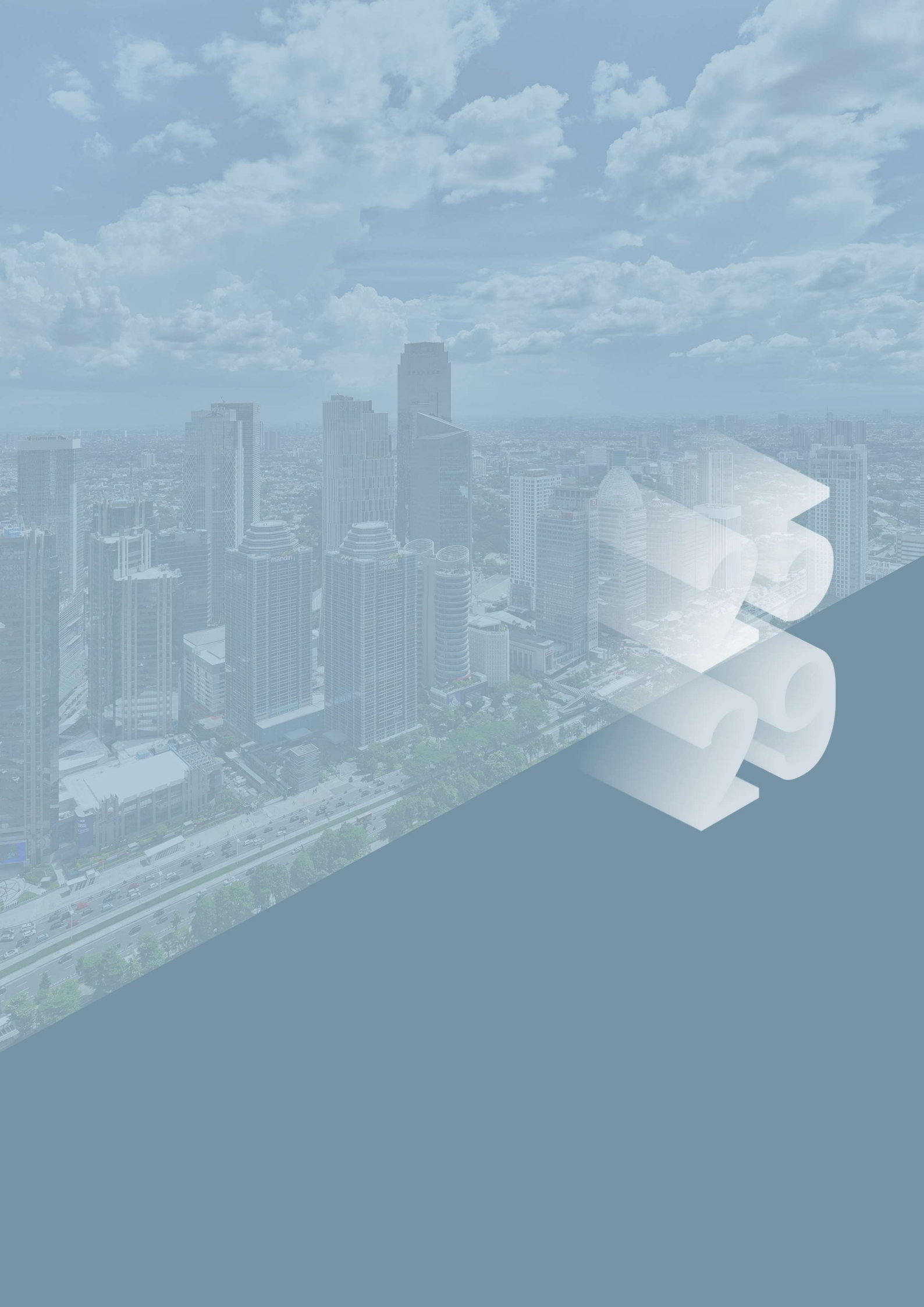
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (2-107/2025)



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	8
I. PENDAHULUAN	12
I.1. LATAR BELAKANG	12
I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	13
I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	14
I.4. MAKSUD DAN TUJUAN	15
I.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	16
II. GAMBARAN UMUM DAERAH	17
II.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	17
II.1.1. Sejarah Perkembangan Kota	17
II.1.2. Aspek Geografi Dan Demografi	19
A. Profil Administrasi dan Peran Strategis Daerah	19
B. Profil Sumber Daya Alam	20
C. Profil Kinerja Lingkungan Hidup	27
D. Profil Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	37
E. Profil Demografi	42
II.1.3. Aspek Kinerja Pembangunan Daerah	45
A. Profil Kesejahteraan Masyarakat	45
B. Profil Daya Saing Daerah	52
C. Profil Pelayanan Umum	59
II.1.4. Aspek Parameter Kota Global	91
A. Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	91
B. Evaluasi Indikator Kota Global	95
II.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	98
II.2.1. Kinerja dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	98
A. Realisasi APBD	98
B. Neraca Daerah	103
C. Analisis Pembiayaan	107
II.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah	108
A. Proyeksi Ekonomi Makro	108
B. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan	109
C. Kebijakan dan Proyeksi Belanja	112
D. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan	114

E. Proyeksi APBD 2025-2029-----	115
II.2.3. Kerangka Pendanaan Pembangunan -----	116
A. Pinjaman / Utang Daerah-----	120
B. Sinergi Pendanaan -----	122
C. Penugasan BUMD -----	122
D. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) -----	122
E. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Corporate Social Responsibility (CSR) -----	124
F. Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang -----	124
G. Optimalisasi Pemanfaatan Aset -----	130
H. Pembiayaan Berbasis Iklim / Climate Based Financing -----	130
I. Jakarta Collaboration Fund -----	131
J. Dana Abadi Daerah-----	132
K. Privatisasi Penuh / Full Privatisation-----	134
L. Best Practice Pendanaan Infrastruktur-----	134
II.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS -----	140
II.3.1. Permasalahan Pembangunan-----	140
II.3.2. Penyelarasan Isu Strategis-----	142
A. Identifikasi Isu Skala Global -----	142
B. Identifikasi Isu Skala Nasional -----	146
C. Identifikasi Isu Skala Regional-----	150
II.3.3. Isu Strategis 2025-2029 -----	167
A. Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani-----	171
B. Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan -----	174
C. Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraktif di Pasar Global -----	175
D. Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima -----	178
E. Ekosistem yang Seimbang dan Berketahanan Iklim -----	179
F. Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan -----	180
G. Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi yang Optimal-----	182
III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH-----	185
III.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN -----	185
III.1.1. Visi-----	185
III.1.2. Misi -----	186
III.1.3. Tujuan dan Sasaran-----	190
III.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	197
III.2.1. Strategi Pembangunan -----	197
III.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan -----	201
A. Tahapan Pembangunan -----	202
B. Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029) : Perbaikan Fundamental -----	203
C. Arah Kebijakan Rekomendasi KLHS RPJMD -----	206

D. Arah Kebijakan Kewilayahan-----	207
III.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH -----	244
III.3.1. Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan -----	247
A. Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua-----	248
B. Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan -----	251
C. Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender -----	254
D. Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat-----	256
III.3.2. Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan-----	260
A. Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi -----	261
B. Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi -----	268
C. Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik -----	271
III.3.3. Tercapainya Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak-----	273
A. Meningkatnya Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja -----	277
B. Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial -----	281
III.3.4. Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern-----	283
A. Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah -----	284
B. Berkembangnya Kapasitas dan Profesionalitas Kerja Aparatur -----	286
C. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi-----	287
III.3.5. Terbangunnya Infrastruktur Kota yang Layak -----	292
A. Meningkatnya Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan-----	292
B. Tersedianya Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak-----	297
III.3.6. Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan -----	299
A. Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon -----	300
B. Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim-----	304
III.3.7. Terwujudnya Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perkotaan Berbasis Transit-----	309
A. Optimalnya Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi -----	310
B. Meningkatnya Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit-----	314
LAMPIRAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH -----	317
IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH -----	318
IV.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH-----	318
LAMPIRAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH -----	319
IV.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH -----	320
IV.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) -----	320
IV.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)-----	322
V. PENUTUP -----	334
V.1. KAIDAH PELAKSANAAN DAN EVALUASI -----	334
V.2. KESIMPULAN -----	336

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pembagian Wilayah Jakarta -----	19
Tabel II.2 Detail Kelas Ekoregion -----	24
Tabel II.3 Tipe Ekosistem Jakarta -----	26
Tabel II.4 Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Jakarta -----	31
Tabel II.5 Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta -----	33
Tabel II.6 Jumlah Ketersediaan Air Wilayah Fungsional Jakarta -----	33
Tabel II.7 Potensi Risiko Bencana Alam Jakarta -----	38
Tabel II.8 Potensi Risiko Bencana Non Alam (Kebakaran) Jakarta -----	38
Tabel II.9 Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Jakarta Tahun 2020–2024 -----	51
Tabel II.10 Indikator Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2020–2024 -----	58
Tabel II.11 Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020–2024 -----	60
Tabel II.12 Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020–2024 -----	61
Tabel II.13 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020–2024 -----	63
Tabel II.14 Realisasi Penanganan RW Kumuh Sampai Tahun 2024 -----	65
Tabel II.15 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020–2024 -----	65
Tabel II.16 Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020–2024 -----	66
Tabel II.17 Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020–2024 -----	67
Tabel II.18 Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020–2024 -----	69
Tabel II.19 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020–2024 -----	70
Tabel II.20 Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020–2024 -----	70
Tabel II.21 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020–2024 -----	71
Tabel II.22 Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024 -----	72
Tabel II.23 Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020–2024 -----	73
Tabel II.24 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020–2024 -----	74
Tabel II.25 Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020–2024 -----	74
Tabel II.26 Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020–2024 -----	75
Tabel II.27 Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi, Informasi dan Statistik Tahun 2020–2024 -----	76
Tabel II.28 Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020–2024 -----	77
Tabel II.29 Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020–2024 -----	77
Tabel II.30 Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020–2024 -----	78
Tabel II.31 Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020–2024 -----	79
Tabel II.32 Realisasi Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020–2024 -----	79
Tabel II.33 Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024 -----	80
Tabel II.34 Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020–2024 -----	81
Tabel II.35 Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020–2024 -----	81
Tabel II.36 Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 -----	82
Tabel II.37 Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020 - 2024 -----	82
Tabel II.38 Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020–2024 -----	83
Tabel II.39 Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2020–2024 -----	84
Tabel II.40 Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020–2024 -----	85
Tabel II.41 Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020 - 2024 -----	86
Tabel II.42 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 - 2024 -----	86
Tabel II.43 Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Tahun 2020–2024 -----	87
Tabel II.44 Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020–2024 -----	87
Tabel II.45 Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2020 - 2024 -----	88
Tabel II.46 Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020–2024 -----	88
Tabel II.47 Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020–2024 -----	89
Tabel II.48 Realisasi Kinerja Urusan Inspektorat Tahun 2020 - 2024 -----	89

Tabel II.49 Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024	90
Tabel II.50 Indikator Aspek Pelayanan Umum Lainnya Tahun 2020-2024	90
Tabel II.51 Evaluasi Capaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB Periode 2019-2024	92
Tabel II.52 Persandingan Dimensi dan Metrik Pengukuran Kota Global	95
Tabel II.53 Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024	98
Tabel II.54 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Jakarta Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	99
Tabel II.55 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Jakarta Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	101
Tabel II.56 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Belanja Daerah Jakarta Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	102
Tabel II.57 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Jakarta Tahun 2020-2024	104
Tabel II.58 Analisis Rasio Keuangan Jakarta Tahun 2020-2024	107
Tabel II.59 Penutup Defisit Riil Anggaran Jakarta Tahun 2020-2024	107
Tabel II.60 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024	108
Tabel II.61 Proyeksi Asumsi Makroekonomi Tahun 2026-2030	109
Tabel II.62 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 (Miliar Rupiah)	112
Tabel II.63 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030 (Miliar Rupiah)	113
Tabel II.64 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030	114
Tabel II.65 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030 (Miliar Rupiah)	115
Tabel II.66 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Kota Global dan Potensi Skema Pendanaan/Pembiayaan (2025-2045)	117
Tabel II.67 Proyek Jakarta dengan Skema Pinjaman Daerah yang Bersumber Dari Luar Negeri	121
Tabel II.68 Estimasi Besaran Pembiayaan Pembangunan JSS	137
Tabel II.69 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1	137
Tabel II.70 Total Biaya Proyek JSS Zona 6 Fase 1	138
Tabel II.71 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1	138
Tabel II.72 Peta Jalan Pembangunan LRT Jakarta	139
Tabel II.73 Permasalahan Pembangunan Jakarta	140
Tabel II.74 Target Sasaran Pembangunan Jakarta dalam RPJMN 2025-2029	149
Tabel II.75 Proyek Strategis Nasional di Jakarta dalam RPJMN 2025-2029	150
Tabel II.76 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	155
Tabel II.77 Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kota dalam RTRW Jakarta 2044	158
Tabel II.78 Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	162
Tabel II.79 Isu Strategis 2025-2029	171
Tabel III.1 Penyelarasan Misi RPJMD dengan RPJMN dan RPJPD	186
Tabel III.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan tahun 2025-2029	194
Tabel III.3 Strategi Pembangunan Menurut Tujuan dan Sasaran	197
Tabel III.4 Perumusan Arah Kebijakan Menurut Misi	205
Tabel III.5 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS	206
Tabel III.6 Pemetaan Hasil Analisis LQ dan SS	211
Tabel III.7 Capaian Indikator Makro Jakarta Pusat	212
Tabel III.8 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Pusat	216
Tabel III.9 Capaian Indikator Makro Jakarta Utara	218
Tabel III.10 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Utara	221
Tabel III.11 Capaian Indikator Makro Jakarta Barat	224
Tabel III.12 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Barat	228
Tabel III.13 Capaian Indikator Makro Jakarta Selatan	230
Tabel III.14 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Selatan	233
Tabel III.15 Capaian Indikator Makro Jakarta Timur	236
Tabel III.16 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Timur	238
Tabel III.17 Capaian Indikator Makro Kepulauan Seribu	240
Tabel III.18 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kepulauan Seribu	243
Tabel III.19 Daftar Referensi Outcome Prioritas	245
Tabel III.20 Penentuan Program Prioritas Tujuan 1	247
Tabel III.21 Penentuan Program Prioritas Tujuan 2.1	260
Tabel III.22 Penentuan Program Prioritas Tujuan 2.2	273
Tabel III.23 Penentuan Program Prioritas Tujuan 3	283

Tabel III.24 Penentuan Program Prioritas Tujuan 4.1 -----	292
Tabel III.25 Rencana Penanganan RW Kumuh Jakarta 2025-2030 -----	298
Tabel III.26 Penentuan Program Prioritas Tujuan 4.2 -----	299
Tabel III.27 Penentuan Program Prioritas Tujuan 5 -----	309
Tabel III.28 Program Prioritas Daerah Disertai Pagu Indikatif -----	317
Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif -----	319
Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2025-2030 -----	320
Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Periode 2025-2030 -----	322

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Arsitektur Perencanaan Pembangunan Daerah -----	14
Gambar I.2 Linimasa Dokumen Perencanaan Pembangunan-----	15
Gambar II.1 Peta Penggunaan Ruang Jakarta -----	20
Gambar II.2 Peta Ketinggian Wilayah Jakarta -----	21
Gambar II.3 Kondisi Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Pengamatan Stasiun Meteorologi Kemayoran -----	22
Gambar II.4 Peta Curah Hujan Jakarta -----	22
Gambar II.5 Suhu Udara Rata-rata dan Anomali Suhu Udara Pengamatan Stasiun Meteorologi Kemayoran -----	23
Gambar II.6 Peta Ekoregion Wilayah Fungsional Jakarta -----	25
Gambar II.7 Peta Ekoregion Laut Jakarta -----	25
Gambar II.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jakarta -----	27
Gambar II.9 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Jakarta -----	28
Gambar II.10 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Air Jakarta -----	28
Gambar II.11 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Udara Jakarta -----	29
Gambar II.12 Peta Jasa Lingkungan Mitigasi Banjir-----	30
Gambar II.13 Peta Wilayah Sungai Aglomerasi Jabodetabekpunjur -----	31
Gambar II.14 Peta Cekungan Air Tanah -----	32
Gambar II.15 Peta SPAM Eksisting Jakarta-----	34
Gambar II.16 Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta -----	35
Gambar II.17 Intensitas Konsumsi Energi per Kapita Provinsi DKI Jakarta -----	36
Gambar II.18 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kota/Kab-----	36
Gambar II.19 Peta Timbulan Sampah -----	37
Gambar II.20 Grafik Indeks Risiko Bencana Jakarta dan Indonesia -----	37
Gambar II.21 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran-----	39
Gambar II.22 Peta Bahaya Banjir Jakarta -----	40
Gambar II.23 Peta Penurunan Muka Air Tanah -----	40
Gambar II.24 Peta Kerentanan Jakarta Terhadap Perubahan Iklim -----	41
Gambar II.25 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca -----	41
Gambar II.26 Kondisi Suhu Permukaan Jakarta -----	42
Gambar II.27 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2020–2030 (dalam ribu)-----	42
Gambar II.28 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2029 dan Perkembangan Kepadatan Penduduk Tahun 2020–2024 ----	43
Gambar II.29 Piramida Penduduk Jakarta Tahun 2024 dan Tahun 2030 -----	44
Gambar II.30 Grafik Angka Kelahiran dan Kematian Jakarta Tahun 2020–2024 -----	44
Gambar II.31 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, Provinsi Sekitar, Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2020–2024 -----	45
Gambar II.32 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Jakarta dan Provinsi Sekitar Tahun 2020–2024 -----	46
Gambar II.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta dan Sekitar serta Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Muda Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan-----	46
Gambar II.34 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Jakarta Tahun 2020–2024 -----	47
Gambar II.35 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Tahun 2020–2024-----	48
Gambar II.36 Indeks Gini, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan Jakarta Tahun 2020–2024-----	49
Gambar II.37 Indeks Pembangunan Manusia Jakarta Tahun 2020–2024 -----	50
Gambar II.38 Dimensi Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Jakarta Tahun 2020–2024 -----	51
Gambar II.39 Pemetaan Nilai Daya Saing Daerah Jakarta dengan Provinsi Sekitar Tahun 2022–2024-----	52
Gambar II.40 Persentase Angkatan Kerja Lulusan Perguruan Tinggi (D3–S3) Jakarta dan Sekitar Tahun 2020–2024 -----	53
Gambar II.41 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2020–2024 -----	54
Gambar II.42 Rasio Ketergantungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020–2030-----	55
Gambar II.43 Rasio Ekspor-Impor Terhadap PDRB Ekonomi Jakarta Tahun 2020–2024 -----	55
Gambar II.44 Ekspor dan Impor Jakarta Berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2020–2024 -----	56
Gambar II.45 Inflasi Jakarta, Provinsi di Jawa, dan Nasional Tahun 2020–2024-----	57

Gambar II.46 Angka Partisipasi Murni Tiap Jenjang Sekolah di Jakarta Tahun 2020–2024 -----	59
Gambar II.47 Grafik Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak-----	64
Gambar II.48 Distribusi Tenaga Kerja di Sektor Formal dan Non Formal di Jakarta Tahun 2020–2024-----	68
Gambar II.49 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jakarta dan Kompositnya Tahun 2020–2024 -----	72
Gambar II.50 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil -----	73
Gambar II.51 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Tahun 2020–2024 -----	77
Gambar II.52 Indeks Pembangunan Kebudayaan Jakarta dan Nasional-----	80
Gambar II.53 Capaian Ranking dan SDG Index Score Indonesia-----	91
Gambar II.54 Grafik Presentase Status Capaian Tujuan TPB Tahun 2023 -----	91
Gambar II.55 Dokumen Referensi Parameter Kota Global-----	97
Gambar II.56 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Jakarta Tahun 2020-2024 -----	100
Gambar II.57 Proporsi Komponen Pembentuk PAD Jakarta Tahun 2020-2024 -----	100
Gambar II.58 Grafik Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan-----	101
Gambar II.59 Proporsi Komponen Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024 -----	102
Gambar II.60 Alokasi Belanja Prioritas Tahun 2026–2030-----	113
Gambar II.61 Proyeksi Kebutuhan Belanja Jakarta 2025-2045 (Triliun Rupiah)-----	118
Gambar II.62 Proyeksi Defisit Anggaran Jakarta Tanpa Skema Pembiayaan Alternatif -----	119
Gambar II.63 Kerangka Alternatif Pendanaan yang dapat Diimplementasikan-----	119
Gambar II.64 Potensi SiLPA untuk Dana Abadi Daerah (dalam Miliar Rupiah)-----	133
Gambar II.65 Skema Pembiayaan Proyek MRT Koridor Utara-Selatan Fase 1 -----	135
Gambar II.66 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jakarta 2021 – 2050 -----	143
Gambar II.67 13th AIFED 2024 - Growth Strategies in Navigating Geoeconomic Shifts-----	143
Gambar II.68 Dampak Restrukturisasi Rantai Pasok Global Terhadap Prospek Ekonomi Antar Kawasan Dunia -----	144
Gambar II.69 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Pembangunan Nasional -----	148
Gambar II.70 Arah Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Kawasan Aglomerasi Jakarta-----	151
Gambar II.71 Konsep Pengembangan Spasial Rencana Tata Ruang Jakarta-----	157
Gambar II.72 Konsep Kota Berorientasi Transit-----	157
Gambar II.73 Kawasan Strategis Provinsi Jakarta -----	159
Gambar II.74 Tahapan Implementasi Rencana Jangka Panjang Jakarta 2025-2045 -----	161
Gambar II.75 Game Changers Tahap 1 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jakarta 2025-2045-----	162
Gambar II.76 Hasil Analisis Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan -----	163
Gambar II.77 CLD Dimensi Economy Business Activity-----	167
Gambar II.78 CLD Dimensi R&D Human Capital-----	168
Gambar II.79 CLD Dimensi Liveability Environment -----	168
Gambar II.80 CLD Dimensi Cultural Interaction and Experience -----	169
Gambar II.81 CLD Dimensi Accessibility and Information Exchange -----	169
Gambar II.82 Causal Loop Diagram Indikator Strategis Pembangunan Jakarta -----	170
Gambar III.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah -----	190
Gambar III.2 Perumusan Tujuan Pembangunan dan Keselarasan dengan Misi -----	191
Gambar III.3 Cascading Kinerja pada Misi 1-----	191
Gambar III.4 Cascading Kinerja pada Misi 2-----	192
Gambar III.5 Cascading Kinerja pada Misi 3-----	192
Gambar III.6 Cascading Kinerja pada Misi 4-----	193
Gambar III.7 Cascading Kinerja pada Misi 5-----	193
Gambar III.8 Pentahapan Pembangunan RPJMD -----	202
Gambar III.9 Tahapan RPJPD Jakarta 2025–2045 -----	203
Gambar III.10 Kontribusi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024 -----	208
Gambar III.11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024-----	208
Gambar III.12 Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024 -----	209
Gambar III.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024 -----	209
Gambar III.14 Tematik Arah Pembangunan Kewilayahan dan Target Indikator Strategis Kota/Kabupaten Administrasi ----	210
Gambar III.15 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Pusat-----	214
Gambar III.16 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Pusat -----	215
Gambar III.17 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Utara -----	219

Gambar III.18 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Utara -----	220
Gambar III.19 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Barat -----	226
Gambar III.20 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Barat-----	227
Gambar III.21 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Selatan -----	231
Gambar III.22 Peta pengembangan Wilayah Jakarta Selatan-----	232
Gambar III.23 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Timur-----	236
Gambar III.24 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Timur -----	237
Gambar III.25 Hasil analisis LQ dan SS Kabupaten Kepulauan Seribu-----	241
Gambar III.26 Peta Pengembangan Wilayah Kepulauan Seribu-----	242
Gambar III.27 Penyelarasan Isu Strategis dan Misi RPJMD dengan Program Kerja Janji Politik Gubernur -----	244
Gambar III.28 Skematik Penentuan Program Prioritas-----	244
Gambar III.29 Implementasi Kantin Sehat Jakarta Cerdas -----	250
Gambar III.30 Pasukan Putih Puskemas Kecamatan Cilandak-----	251
Gambar III.31 Ambulans Unit Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Terpadu (PK3D) -----	253
Gambar III.32 Lapangan Ingub Serdang Berstandar FIFA -----	253
Gambar III.33 Konsep Pembangunan Pemuda Holistik -----	255
Gambar III.34 Kerja Sama Jakarta Internasional Youth Program -----	256
Gambar III.35 Layanan Perpustakaan Keliling -----	257
Gambar III.36 Lebaran Betawi di Kawasan Monumen Nasional -----	258
Gambar III.37 Integrasi Gedung Cagar Budaya AA Maramis dengan Lapangan Banteng -----	259
Gambar III.38 Pilar dan Indikator Indeks Ekonomi Hijau -----	262
Gambar III.39 Prinsip 9R pada Ekonomi Sirkular -----	263
Gambar III.40 Kegiatan Business Matching Batch di Balaikota -----	264
Gambar III.41 Kawasan Urban Farming 'Pegangsaan Dua Menanam' -----	265
Gambar III.42 Lahan Pertanian di Jakarta Utara -----	266
Gambar III.43 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Ayu Bahari Binaan Sudin KPKP Kepulauan Seribu -----	267
Gambar III.44 Partisipasi Jakarta dalam UN High Level Political Forum terkait SDGs-----	269
Gambar III.45 Forum Internasional Investasi Tahunan Jakarta-----	270
Gambar III.46 Revitalisasi Blok M Hub -----	272
Gambar III.47 Kota Tua Sebagai Destinasi Wisata Unggulan -----	272
Gambar III.48 Intervensi Kunci dalam Mewujudkan Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak-----	276
Gambar III.49 Skema Graduasi Keluarga Miskin dan Rentan Menuju Kesejahteraan Lebih Tinggi -----	277
Gambar III.50 Pelaksanaan Job Fair di Gelanggang Olahraga -----	278
Gambar III.51 Mobile Training Unit Desain Grafis dan Operator Komputer-----	279
Gambar III.52 Kerja Sama Pangan Antar Daerah -----	281
Gambar III.53 Penambahan CCTV Keamanan Warga-----	289
Gambar III.54 Layanan Alpukat Betawi Jakarta -----	291
Gambar III.55 SPAM Mookervart Jakarta Barat-----	293
Gambar III.56 Instalasi Pengolahan Air Buaran III -----	293
Gambar III.57 Rencana Zona Jakarta Sewerage System -----	295
Gambar III.58 Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant Rorotan -----	296
Gambar III.59 Rusunawa Jagakarsa -----	297
Gambar III.60 Armada Bus Listrik (BRT) Transjakarta -----	300
Gambar III.61 Kampung Sadar Lingkungan di Cempaka Putih -----	301
Gambar III.62 Integrasi Ruang Terbuka Hijau dan Biru di Taman Setu Biru Cipayung-----	302
Gambar III.63 Pembukaan Taman Kota 24-Jam-----	302
Gambar III.64 Tebet Eco Park -----	303
Gambar III.65 Pembersihan Badan Air dan Pengerukan Kali -----	305
Gambar III.66 Embung Pekayon -----	305
Gambar III.67 Proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) Jakarta-----	306
Gambar III.68 Apel Gabungan Siaga Bencana -----	307
Gambar III.69 Jakarta Fire Fighter Challenge 2025 -----	308
Gambar III.70 Rencana Jaringan Kereta Api Perkotaan -----	311
Gambar III.71 Penerapan Konsep Complete Street -----	312

Gambar III.72 Dermaga Pelabuhan Muara Angke -----	314
Gambar III.73 Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) “Serambi Temu” Dukuh Atas-----	315
Gambar III.74 Blok M—Sisingamangaraja: Green Creative Hub di Jakarta -----	316
Gambar V.1 Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi-----	334
Gambar V.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029-----	335

The background of the entire page is an aerial photograph of a city skyline, featuring numerous skyscrapers and buildings. A semi-transparent blue overlay covers the entire image. In the top right corner, the text 'BAB' is displayed in white, followed by a large white number '1'. A dark blue diagonal band runs from the bottom left towards the middle right, containing the text 'PENDAHULUAN' in white. In the bottom left corner, there is a 3D white graphic of a stylized number '2' that appears to be made of thick, rounded lines.

BAB

1

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni 2027, Jakarta terus menguatkan peran barunya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan fungsi ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengembalikan kejayaan Jakarta sebagai pusat perdagangan maritim yang memiliki peran strategis dalam sejarah nusantara dan perdagangan global.

Hingga saat ini, Jakarta secara konsisten membuktikan potensinya sebagai pusat perekonomian dan sumber daya manusia yang unggul secara nasional. Berdasarkan data BPS, PDRB Jakarta pada tahun 2024 mencapai 3.697,36 triliun rupiah atau menyumbang sebesar 16,71 persen PDB Nasional. Hal ini didukung oleh masa bonus demografi yang sedang dialami Jakarta saat ini dimana 71,52 persen dari 10,67 juta penduduknya berada pada usia produktif. Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia di Jakarta pada tahun 2024 juga masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu mencapai 84,15 poin dan selalu tercatat menempati posisi tertinggi di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Namun demikian, masih terdapat isu-isu pembangunan yang perlu diselesaikan oleh Jakarta, diantaranya berupa pemenuhan layanan dasar, penanganan dampak perubahan iklim, degradasi kualitas lingkungan hidup, ketimpangan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian, serta tata kelola pemerintahan yang profesional. Selain itu, Jakarta juga perlu mengejar ketertinggalan dari kota-kota global lainnya di dunia, dimana pada tahun 2024 Jakarta hanya menempati peringkat ke-74 dari 156 kota menurut *Global Cities Index* dan peringkat ke-45 dari 48 kota menurut *Global Power City Index*. Selain itu menurut *Sustainable Cities Index 2024*, Jakarta menempati peringkat ke-75 dari 100 kota, namun meraih peringkat pertama pada pilar progres yang menggambarkan akselerasi yang baik dalam upaya menuju keberlanjutan (*sustainability*) pada pilar *planet*, *people*, dan *profit*. Hal ini memberikan keyakinan bahwa arah dan ritme pembangunan Jakarta saat ini perlu dipertahankan serta diakselerasi dengan langkah strategis untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus meningkatkan posisi dan citra positif Jakarta di kancah global.

Saat ini merupakan momentum pivotal dalam mentransformasi Jakarta, melalui upaya-upaya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2045. Dalam dokumen tersebut, dicanangkan visi Jakarta dalam 20 tahun ke depan berupa Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, yang merupakan mimpi besar serta komitmen untuk tetap mempertahankan momentum pertumbuhan dan kontribusi Jakarta dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029 ini merupakan periode pertama dalam operasionalisasi RPJPD 2025-2045 tersebut, sehingga berperan sebagai fondasi dan titik awal krusial dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global.

Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029 berpedoman pada visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini disusun berdasarkan data dan informasi pembangunan strategis, serta analisis sistemik menggunakan metode *system dynamics* yang bersifat holistik dan mengedepankan sinergi antar unsur yang berinteraksi dalam membangun kota Jakarta. Selain itu, hasil rekomendasi dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diintegrasikan untuk memastikan proses pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, disusun rekomendasi kebijakan secara objektif dan langkah konkret yang perlu dilakukan selama 5 tahun mendatang dalam mencapai visi jangka panjang Jakarta sebagai kota global. Dokumen RPJMD ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai instrumen dalam menyusun serta merumuskan kebijakan pembangunan Jakarta yang tepat sasaran, efektif, dan efisien selama periode tahun 2025-2029.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 diantaranya meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran negara Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Peringkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103);

16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);
17. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia

I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN



Gambar I.1 Arsitektur Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPN 2025-2045, RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta RTRW 2024-2044. Selanjutnya RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD tahunan. Hubungan antara RPJMD 2025-2029 dengan dokumen-dokumen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan sasaran visi, agenda pembangunan, arah pembangunan wilayah, dan dukungan sarana prasarana dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyesuaian yang dilakukan mencakup target kinerja yang mendukung pencapaian 8 Asta Cita/ Prioritas Nasional, 17 Program Prioritas, 8 Proyek Hasil Terbaik Cepat, dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada Dokumen RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang memiliki visi jangka panjang berupa Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. RPJMD 2025-2029 merupakan tahapan pertama dalam RPJPD 2025-2045 sehingga berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan visi jangka panjang tersebut. Untuk itu, RPJMD 2025-2029 menjadi terjemahan operasional fase pertama dalam mencapai cita-cita jangka panjang Jakarta serta menjembatani penjabaran teknis selanjutnya dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan selama periode tahun 2025-2029.

C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada dokumen RTRW 2024-2044 yang memiliki visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berkeadilan, Berketahanan, Berbasis Transit dan Digital. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan dalam RPJMD 2025-2029. Selain itu, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga menyelaraskan paradigma, konsep tata ruang serta indikasi program dalam dokumen RTRW tersebut ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan, arah kebijakan kewilayahan, serta program pembangunan jangka menengah daerah.

D. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang merupakan operasionalisasi dari dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan fokus pembangunan tahunan diselaraskan dengan rencana program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program, yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif, dapat disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi aktual daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi tahunan.

E. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) setiap urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Renstra juga menjabarkan dukungan dan kontribusi setiap PD terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
RPJPN																																					
RPJPD																																					
RPJMN																																					
RPJMD																																					
RENSTRA K/L																																					
RENSTRA PD																																					
RTRW																																					

Gambar I.2 Linimasa Dokumen Perencanaan Pembangunan

I.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:

- ☐ Penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang melandasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tahun 2030;
- ☐ Sebagai arah pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang relevan dan responsif terhadap perubahan; serta

- ❑ Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama periode tahun 2025-2029.

Selanjutnya tujuan RPJMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- ❑ Sebagai fondasi awal dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang merupakan visi jangka panjang Jakarta pada RPJPD 2025-2045;
- ❑ Menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- ❑ Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- ❑ Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- ❑ Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- ❑ Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
- ❑ Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- ❑ Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

I.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang penyusunan RPJMD berikut dasar hukum yang relevan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II - GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menjelaskan sejarah dan kekhususan Jakarta, potret serta analisis logis terhadap kondisi geografi dan demografi serta kinerja pembangunan masa lalu dalam aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, dan parameter kota global. Dijelaskan pula mengenai gambaran keuangan daerah disertai proyeksi APBD dan kerangka pendanaan pembangunan. Sebagai sintesis dari seluruh data yang disajikan telah teridentifikasi permasalahan pembangunan dan rumusan isu strategis daerah tahun 2025-2029.

BAB III – VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian mengenai visi dan misi yang merupakan janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target indikator kinerja. Selanjutnya dijabarkan mengenai program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

BAB IV – PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan seluruh program Perangkat Daerah beserta target kinerja dan pagu indikatifnya untuk periode 2025 hingga 2030, yang direncanakan dengan mempertimbangkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dari periode sebelumnya (2023-2026) dan periode berikutnya (2030-2034). Dijelaskan juga mengenai indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V – PENUTUP

Bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan evaluasi, serta kesimpulan dan harapan pencapaian RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025 – 2029 yang telah ditetapkan.

The background of the entire page is an aerial photograph of a city skyline, featuring numerous skyscrapers and buildings. A semi-transparent blue overlay covers the entire image. In the bottom-left corner, there is a large, white, 3D-rendered number '2' that appears to be floating or resting on the surface.

BAB

2

**GAMBARAN
UMUM DAERAH**

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

II.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1.1. Sejarah Perkembangan Kota

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka dan kawasan Asia Tenggara pada masa itu dikuasai oleh Bangsa Portugis. Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya Sunda Kelapa oleh Falatehan, selanjutnya nama Jayakarta disingkat menjadi ‘Jakarta’.

Pada tanggal 1 April 1905, Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi Gemeente Batavia dan diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia kurang lebih 125 km, tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu). Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia diambil alih oleh Tentara Jepang. Pemerintah Jepang menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). Di mana Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi). Pada masa pemerintahan militer Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia.

Setelah Kemerdekaan Indonesia, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945–1951), Syamsuridjal (1951–1953), dan Soediro (1953–1960). Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960–1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964–1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966–1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977–1982), R. Soeprapto (1982–1987), Wiyogo Atmodarminto (1987–1992), Soerjadi Soedirdja (1992–1997), Sutiyoso (1997–2007), Fauzi Bowo (2007–2012), Joko Widodo (2012–2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), Djarot Saiful Hidayat (2017), Anies Rasyid Baswedan (2017–2022), Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono (2022–2024), Pj Gubernur Teguh Setyabudi (2024–2025), dan Gubernur Pramono Anung (2025–sekarang).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak saat itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Soerjadi Soedirdja (1992–1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997–2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), diimplementasikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pengangkatan Deputi selaku pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan kekhususannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini tetap berlaku pada periode Gubernur Joko Widodo (2012–2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), dan Djarot Saiful Hidayat (2017).

Selanjutnya pada akhir masa jabatan Gubernur Anies Rasyid Baswedan (2017–2022) terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, di mana kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menindaklanjuti hal tersebut, pada periode Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono (2022–2024), ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dengan UU tersebut, secara resmi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jakarta kemudian menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan Pilkada serentak di tahun 2024 yang mengantarkan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta. Memasuki periode kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Jakarta bersiap menyongsong perayaan ulang tahunnya yang ke-500 pada 22 Juni 2027 mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, kedudukan Jakarta secara resmi diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Yang dimaksud dengan Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan Lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.

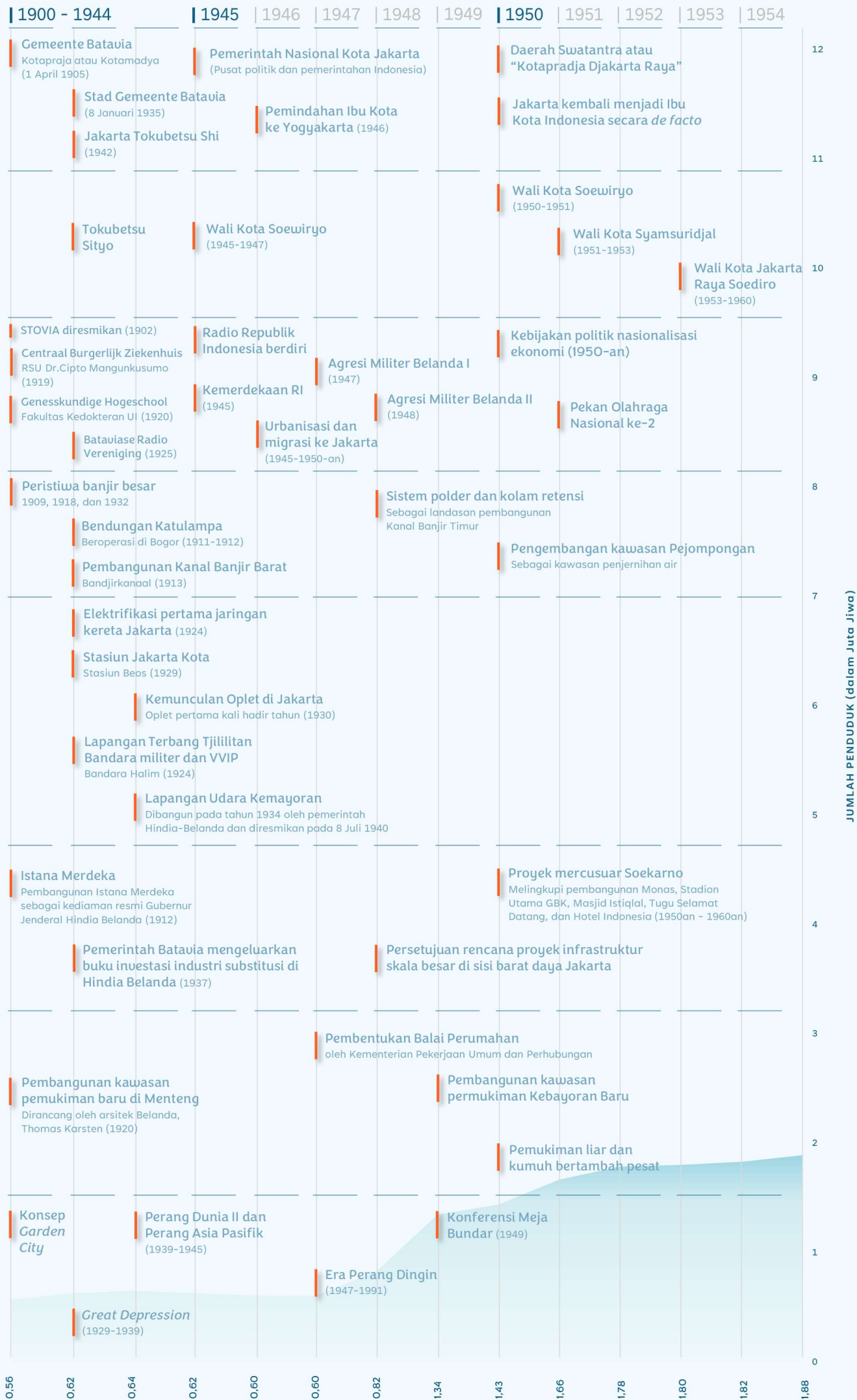
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, sedangkan wilayah Kota Administratif/ Kabupaten Administratif sebagai perangkat daerah kewilayahan dipimpin oleh Walikota/ Bupati yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Selain itu, untuk menampung aspirasi masyarakat pada Kota Administratif/ Kabupaten Administratif dibentuk Dewan Kota/ Dewan Kabupaten, dan pada tingkat kelurahan dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan.

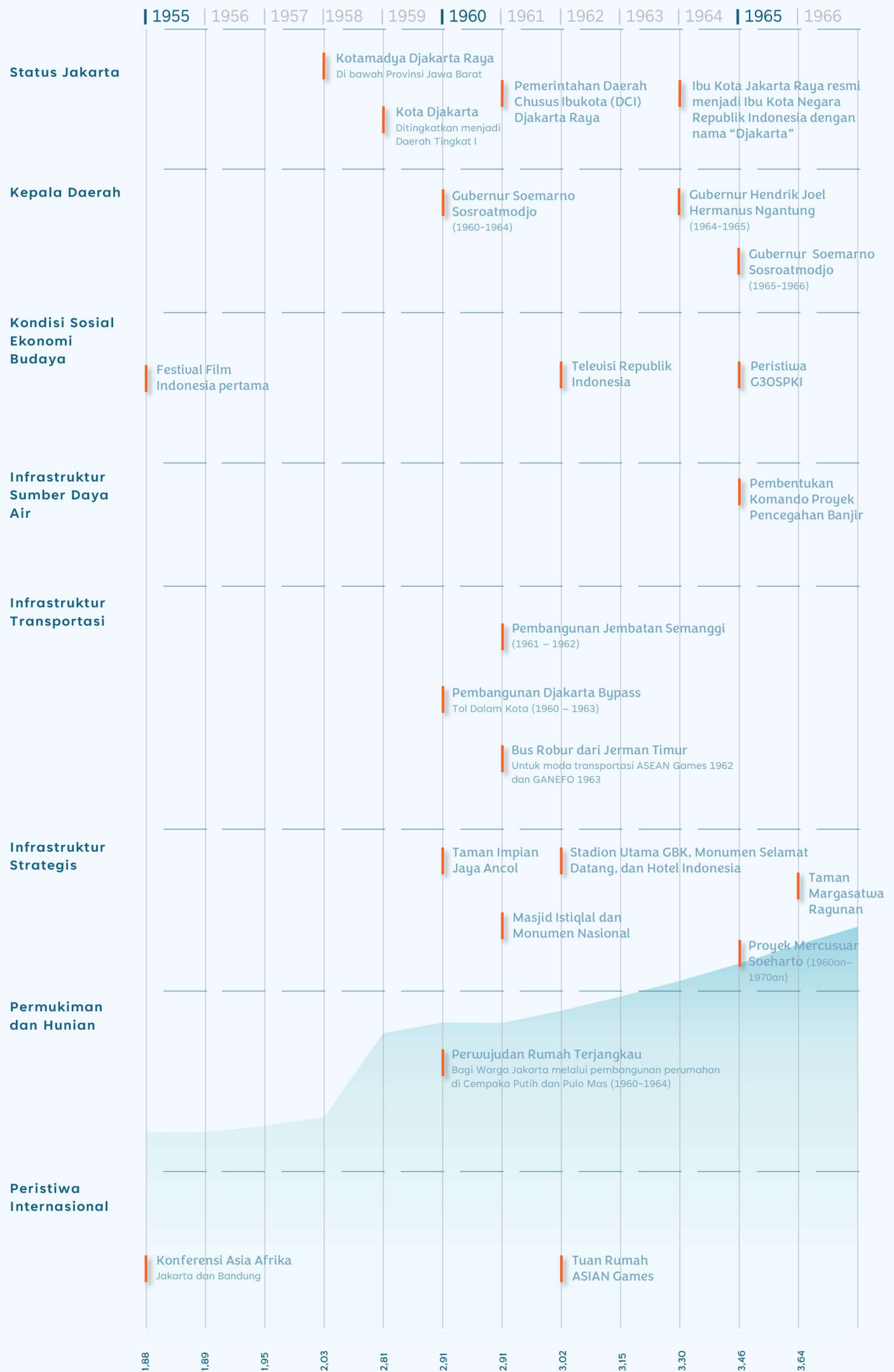
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan kewenangan khusus urusan pemerintahan dan kelembagaan selain kewenangan daerah yang berlaku secara umum berdasarkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Kewenangan khusus urusan pemerintahan tersebut mencakup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, serta urusan ketenagakerjaan. Kewenangan khusus kelembagaan mencakup penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selain itu terdapat pula kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga dapat melakukan kerja sama dengan daerah, badan usaha dan Lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

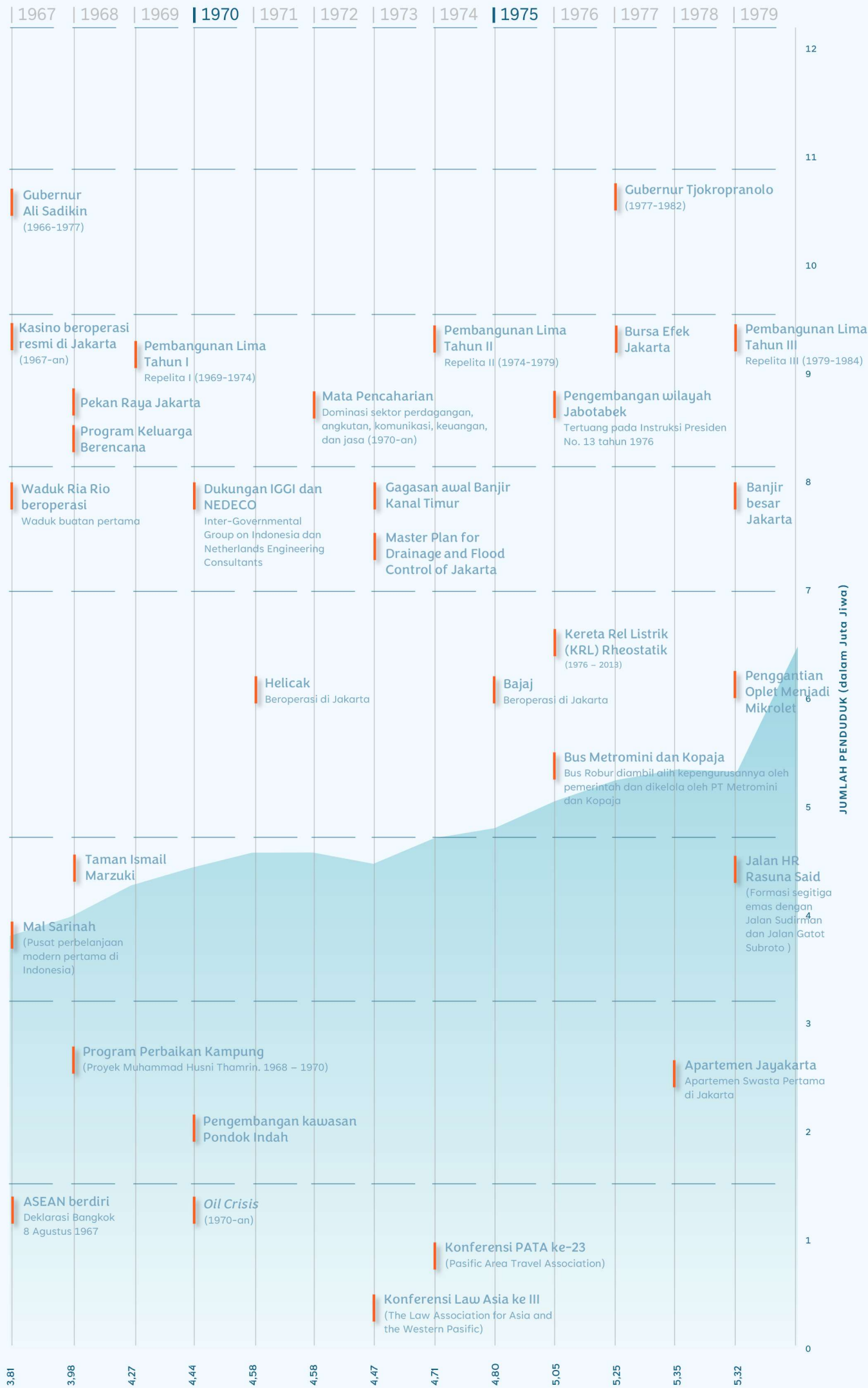
Dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 tersebut juga dibentuk Kawasan Aglomerasi sebagai upaya sinkronisasi pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar yang mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sinkronisasi pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi. Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan dokumen perencanaan tersebut dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang ketua dan anggotanya ditunjuk oleh Presiden.

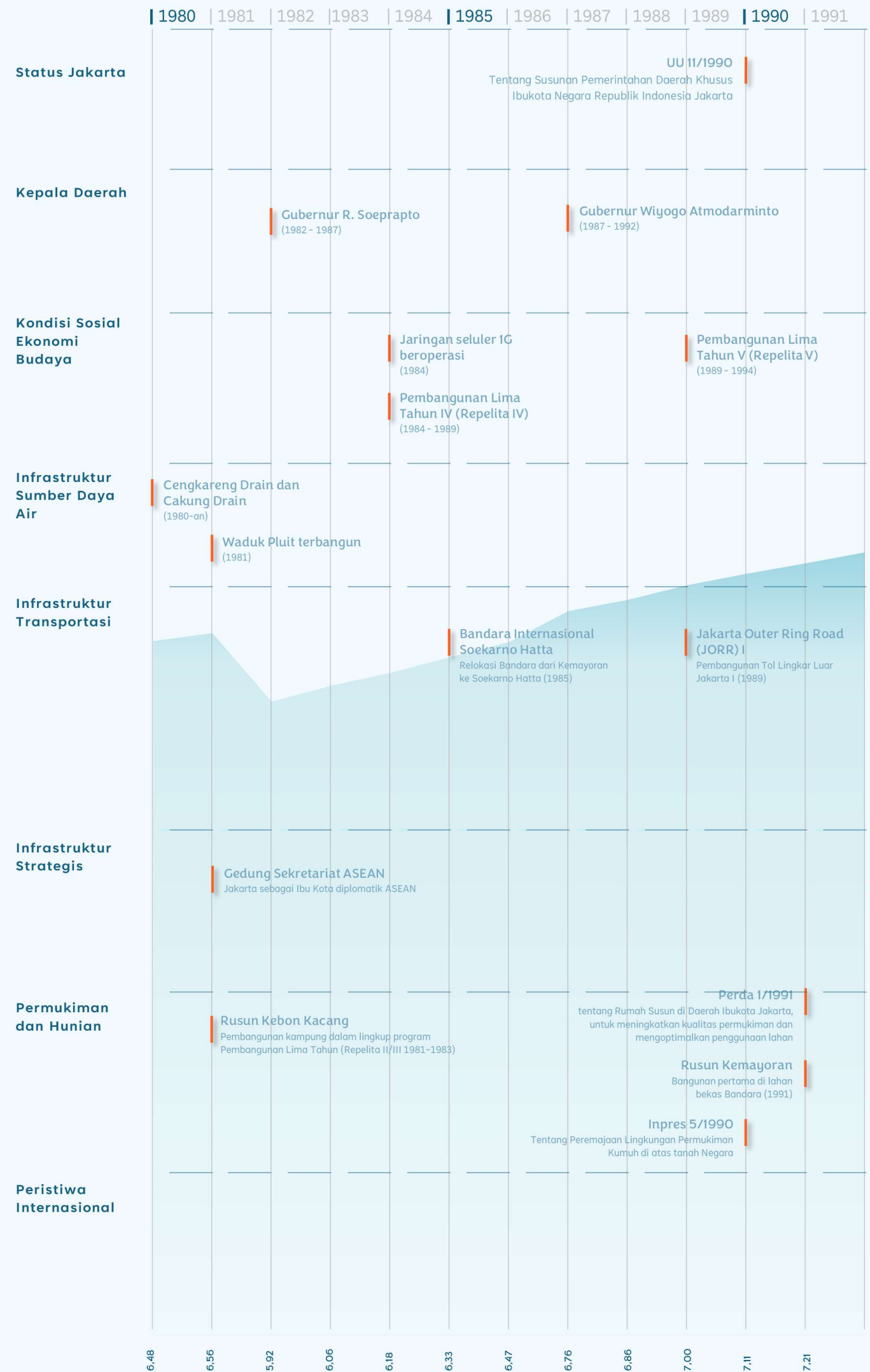
Secara kronologis, evolusi kota Jakarta selama lima abad perkembangannya divisualisasikan melalui skematik berikut.

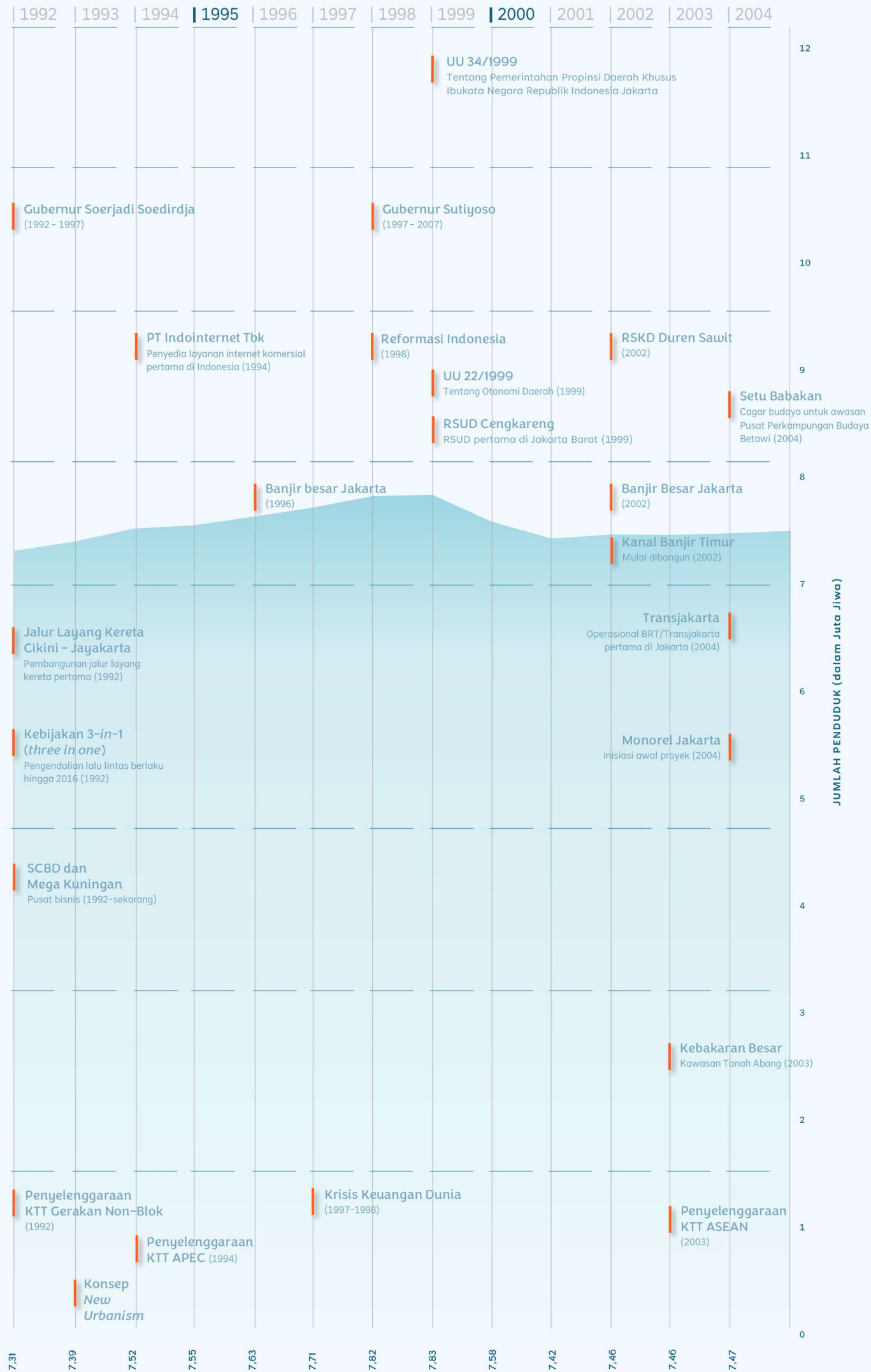
	ABAD 16	ABAD 17	ABAD 18	ABAD 19
Status Jakarta	Bandar Sunda Kelapa Jayakarta Setelah direbut Fatahillah (1527)	Kota Batavia atau Stad Batavia Setelah direbut VOC (1619)		
Kepala Daerah	Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Hindu Sunda Pajajaran, dan Kerajaan Sunda Kesultanan Banten (koalisi Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon)	Gubernur Jenderal VOC		Gubernur Jenderal Hindia Belanda (hingga 1942) Gubernur Jenderal di Bawah Kerajaan Inggris (1811-1816)
Kondisi Sosial Ekonomi Budaya	Perekonomian utama dari perdagangan	Masyarakat bervariasi antara lokal dan asing Perekonomian dimonopoli VOC Cultuurstelsel/ tanam paksa (1780-1844)	Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen (1735) Bataviasche Nouvelles Surat kabar pertama (1744) Kantor pos pertama	VOC dibubarkan (1800) <i>De Javasche Bank</i> dibangun Gedung Museum Bank Indonesia (1828) Pembangunan Pasar Baru (1820) Abolisi perdagangan budak Di seluruh Hindia Belanda (1860)
Infrastruktur Sumber Daya Air	Pelebaran Sungai Chandra bhaga (Kali Bekasi) dan penggalian saluran baru Sungai Gomati (Kali Cakung Lama) Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara.	Pembangunan kota bandar oleh VOC area timur bantaran sungai (1619) Rekayasa aliran sungai Untuk irigasi dan sumber air (1739-1753) dan (1776)	Pendangkalan kanal akibat sedimentasi dan upaya pembenahan (awal abad ke-18) Zuyder Ringsloot Saluran sirkular seperti cincin yang menghubungkan beberapa aliran sungai (akhir abad ke-18)	Peristiwa banjir besar 1870, 1893, 1895, dan 1899
Infrastruktur Transportasi	Pelabuhan Sunda Kelapa (Abad-5) Gerbang perdagangan dan kontak kebudayaan kerajaan Pajajaran dengan dunia luas	Pulau Onrust Sebagai dermaga dan galangan kapal oleh VOC (Awal abad-17) Kanal Molenvliet Sebagai batang pertumbuhan Batavia ke arah selatan (pertengahan abad ke-17) Jaringan Kanal Sebagai sarana transportasi utama dan manajemen garis pesisir utara (abad 17).		Jalan Raya Pos di Batavia Bagian Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan De Bataviasche Tramweg Maatschappij Perusahaan swasta operator trem pertama di Batavia Kebijakan trotoar <i>five-foot way</i> (1811-1816) Jalur kereta api pertama di Batavia mulai dibangun Menghubungkan Batavia dan Buitenzorg (Bogor) (1871) Pelabuhan Tanjung Priuk (1877)
Infrastruktur Strategis		Kasteel Batavia (1620) Ekspansi Kota di dalam Area Benteng Batavia	Stadhuis/ Balai Kota Batavia sekarang Museum Fatahillah (1707-1710) Pusat pemerintahan pindah ke Weltevreeden (akhir abad 18)	Pembongkaran tembok kota (1808) Kebun Binatang Cikini Dibangun pada 19 September 1864 Pembangunan Gereja Katedral (1898)
Permukiman dan Hunian	VOC memberikan izin membangun rumah kayu		Kebijakan segregasi rasial melalui Wijkenstelsel Kebijakan oleh Pemerintah Belanda untuk memisahkan wilayah tempat tinggal berdasarkan etnis (abad ke 18-19)	
Peristiwa Internasional	<i>Age of Exploration</i> (abad 15-abad 17)			Belanda dikuasai Napoleon Bonaparte (1806) Terusan Suez dibuka Peningkatan <i>traffic</i> kapal ke Batavia (1869) Revolusi Industri Proses mekanisasi dan elektrifikasi produksi (1780-1870)

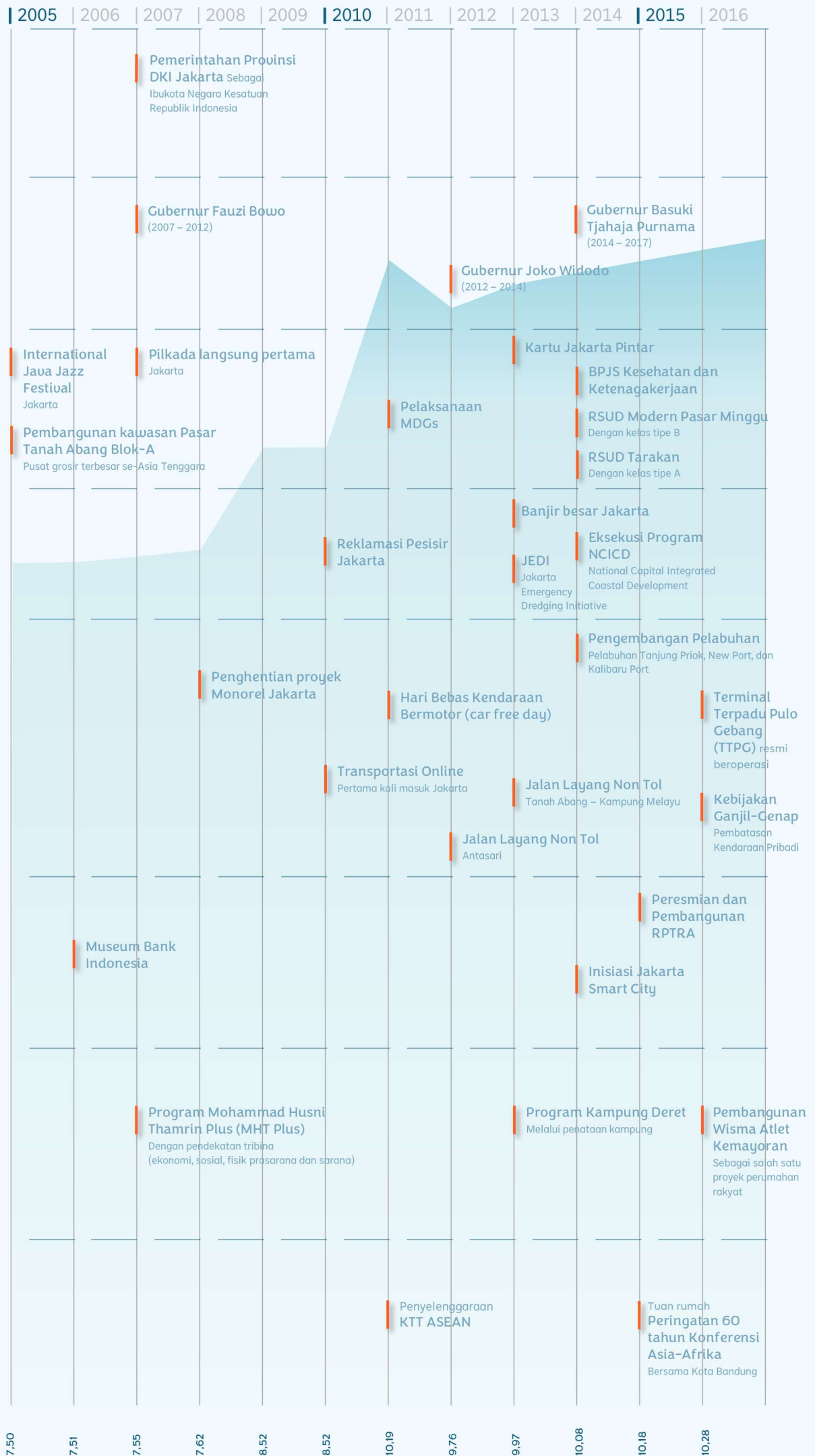


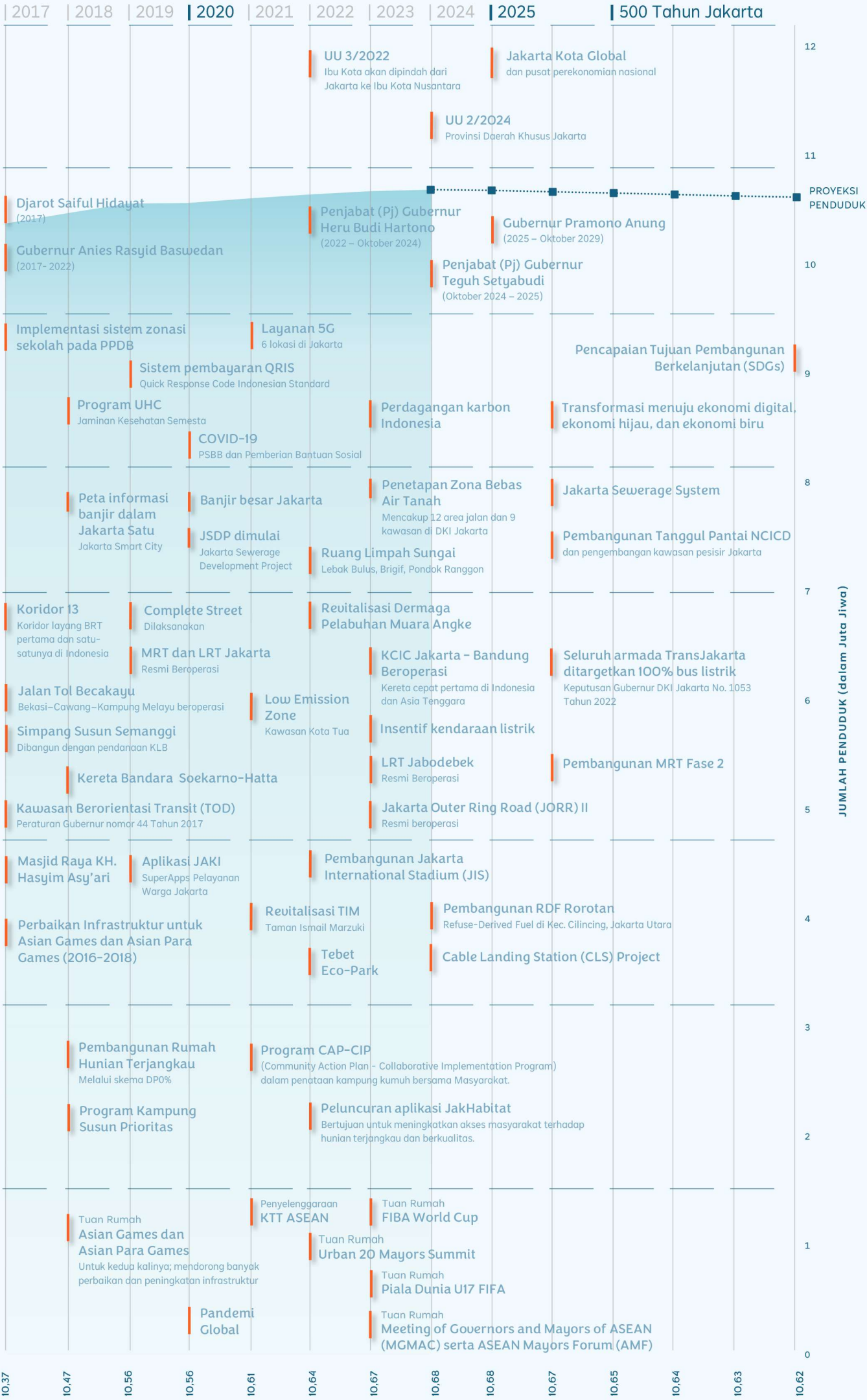












II.1.2. Aspek Geografi Dan Demografi

A. Profil Administrasi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis, wilayah Provinsi DKI Jakarta terletak antara 5°10'00" hingga 6°23'54" Lintang Selatan dan 106°19'30" hingga 106°58'18" Bujur Timur. Jakarta memiliki karakteristik wilayah yang cukup beragam di antaranya wilayah daratan utama, wilayah kepulauan, wilayah laut, serta wilayah hasil perluasan daratan (reklamasi). Karakteristik wilayah tersebut akan memiliki implikasi pada karakteristik perencanaan Kota Jakarta karena terdapat wilayah yang bukan merupakan wilayah daratan utama. Selain itu, keterkaitan antar wilayah dengan karakteristik unik tersebut akan menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kota. Wilayah Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Banten di bagian Barat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten di selatan, serta Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Lokasi geografis Jakarta yang strategis menjadi faktor pendorong pembangunan wilayah sekitarnya; begitu pun sebaliknya, pembangunan Jakarta juga dipengaruhi oleh perkembangan kota di sekitarnya.

Provinsi DKI Jakarta mencakup 6 (enam) bagian wilayah yaitu 5 (lima) Kota Administrasi, 1 (satu) Kabupaten Administrasi, 44 (empat puluh empat) Kecamatan, dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Kelurahan dengan total luas daratan 66.153 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 – 2138 Tahun 2025. Luas area Kota Administrasi mulai dari yang paling luas secara berturut-turut adalah sebagai berikut, Kota Administrasi Jakarta Timur (18.553,8 Ha), Kota Administrasi Jakarta Utara (14.753,4 Ha), Kota Administrasi Jakarta Selatan (14.494,2 Ha), Kota Administrasi Jakarta Barat (12.500 Ha), Kota Administrasi Jakarta Pusat (4.756,5 Ha), dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (1.095,1 Ha). Adapun luas daerah perairan mencapai hampir sepuluh kali lipat daratan yaitu sebesar 583.325 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024-2044.

Tabel II.1 Pembagian Wilayah Jakarta

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (Ha)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jakarta Pusat	4.756,5	8	44	386	4.531
2.	Jakarta Utara	14.753,4	6	31	460	5.315
3.	Jakarta Barat	12.500	8	56	587	6.529
4.	Jakarta Selatan	14.494,2	10	65	579	6.056
5.	Jakarta Timur	18.553,8	10	65	712	7.953
6.	Kepulauan Seribu	1.095,1	2	6	24	127
Jumlah		66.153	44	267	2.748	30.511

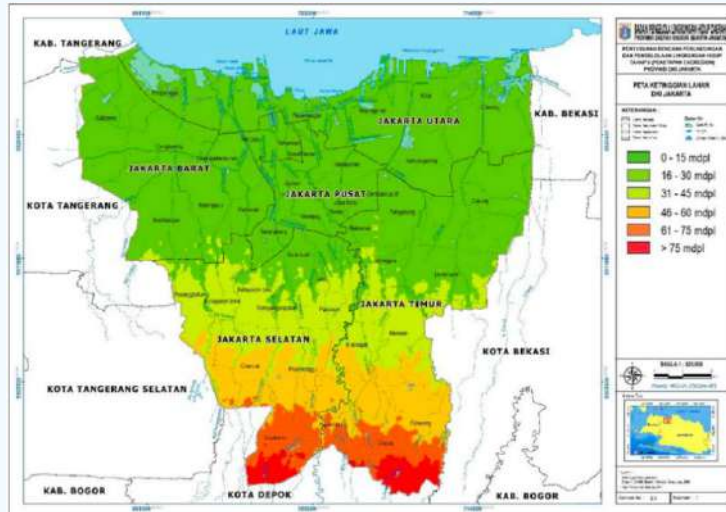
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2 – 2138 Tahun 2025

Perkembangan penggunaan lahan di Jakarta terjadi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, hal ini dengan mudah diidentifikasi dengan luas lahan terbangun yang ada dan perubahannya terhadap garis waktu. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan lahan akan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan gedung perkantoran dan niaga, sarana ekonomi dan sosial, sarana prasarana transportasi, serta infrastruktur kota lainnya yang merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya perekonomian Jakarta.

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

Topologi dan Geologi

20



Gambar II.2 Peta Ketinggian Wilayah Jakarta

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029 dan DEMNAS, 2015

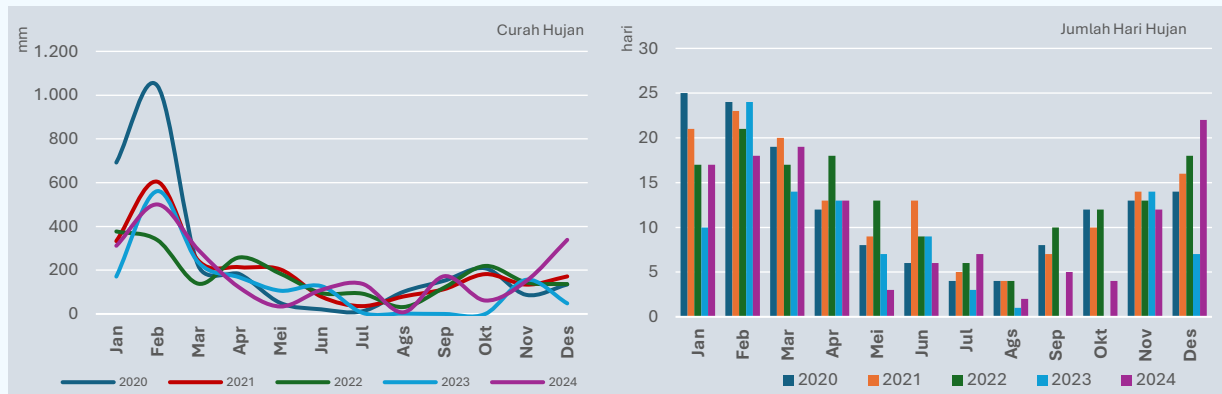
Secara umum, kemiringan lereng Jakarta berada pada kategori yang relatif datar, namun di beberapa titik memiliki kemiringan lereng kontur bergelombang. Wilayah dengan kemiringan lereng datar relatif dapat dikembangkan lebih mudah. Sebaliknya, untuk kemiringan lereng dengan kontur bergelombang memerlukan kajian dan upaya teknis lebih dalam melakukan pengembangan dan pembangunan. Beberapa titik wilayah yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, dan Senen), Jakarta Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru), Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan, Tambora, dan Cengkareng), Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan Makasar-HLP), dan Jakarta Utara (Kecamatan Pademangan, Kelapa Gading, Penjaringan, dan Cilincing).

Secara geologi struktur seluruh daerah di Jakarta terdiri dari endapan Pleistocene yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 meter, semakin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 meter, pada sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan aluvial. Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan aluvium.

Klimatologi

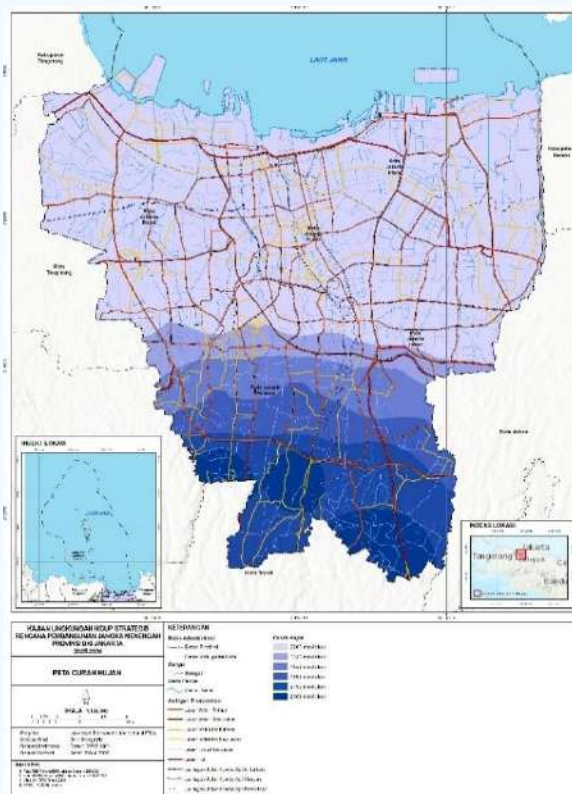
Wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam iklim tropis. Iklim tropis memiliki karakteristik musim hujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim hujan Jakarta terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan dan hari hujan tertinggi pada bulan Januari dan bulan Februari. Iklim tropis di Jakarta juga ditandai dengan kelembaban udara yang tinggi, dengan rata-rata harian 55 hingga 90 persen. Kondisi geografis Jakarta yang berada di pesisir menjadikan pengaruh angin laut dan angin darat cukup signifikan, khususnya cuaca yang dipengaruhi angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam.

Selama periode 2020–2024, Jakarta menunjukkan pola perubahan iklim dengan tren peningkatan suhu udara secara konsisten dan pola curah hujan yang tidak menentu. Suhu udara rata-rata bulanan mengalami kenaikan signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024, di mana anomali suhu sering kali melebihi $+1,0^{\circ}\text{C}$ dibandingkan normal klimatologis 1991–2020. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang periode ini, dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei yang mencapai $30,37^{\circ}\text{C}$ atau sekitar $1,62^{\circ}\text{C}$ di atas rata-rata historis. Pada bulan Oktober 2024 tercatat suhu mencapai $30,10^{\circ}\text{C}$, menandai periode panas berkepanjangan di musim kemarau. Perkembangan ini mengindikasikan adanya pengaruh perubahan iklim akibat aktivitas manusia serta efek *urban heat island* yang semakin memperparah kondisi iklim di wilayah Jakarta.



Gambar II.3 Kondisi Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Pengamatan Stasiun Meteorologi Kemayoran
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (diolah), 2025

Sebaliknya, data curah hujan menunjukkan pola yang semakin tidak teratur. Tahun 2020 merupakan tahun dengan curah hujan ekstrem tertinggi, dimana pada bulan Februari tercatat sebanyak 24 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.043,2 mm dan merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi pada periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan intensitas dan frekuensi hujan tinggi yang sangat mungkin memicu banjir besar di wilayah perkotaan. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, terutama 2023 dan 2024, terjadi penurunan curah hujan yang tajam pada beberapa bulan penting. Sebagai contoh, bulan September dan Oktober 2023 mencatat hampir tidak ada hujan, dengan nol hari hujan tercatat, padahal suhu pada bulan-bulan tersebut tergolong sangat tinggi. Kejadian suhu ekstrem yang bersamaan dengan curah hujan yang sangat rendah ini menunjukkan munculnya peristiwa iklim majemuk (*compound climate extremes*), yaitu gelombang panas yang terjadi bersamaan dengan kekeringan.

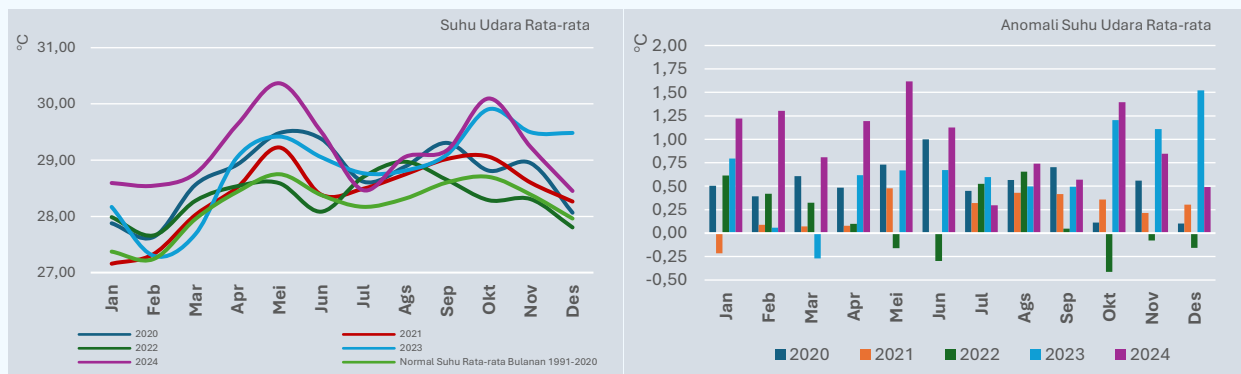


Gambar II.4 Peta Curah Hujan Jakarta
Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

Distribusi musiman curah hujan dan jumlah hari hujan juga menunjukkan pergeseran pola iklim. Meskipun pola musiman, yaitu puncak hujan pada Januari–Maret dan musim kemarau pada Juni–September masih tampak, namun besarnya menjadi semakin tidak stabil. Misalnya pada tahun 2024, terjadi penurunan curah hujan secara drastis selama musim kemarau, dengan bulan Mei hanya mencatat 34,1 mm curah hujan dalam tiga hari hujan dan bertepatan dengan suhu rata-rata bulanan tertinggi selama periode ini. Sebaliknya, bulan Desember 2024 menunjukkan lonjakan curah hujan hingga 338,7 mm dalam 22 hari hujan, mengindikasikan kemungkinan keterlambatan awal musim hujan. Pola-pola ini dapat dipengaruhi oleh fenomena iklim global seperti El Niño, yang diketahui mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat selama fase positif, serta diperparah oleh degradasi lingkungan dan urbanisasi yang cepat.

Interaksi antara peningkatan suhu dan perubahan pola hujan ini memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan iklim perkotaan Jakarta. Munculnya periode kering dan panas secara bersamaan meningkatkan risiko kekeringan dan krisis air bersih. Di sisi lain, episode hujan ekstrem yang terjadi dalam waktu singkat, seperti pada Februari 2020 dan Desember 2024, meningkatkan risiko banjir bandang, terutama di wilayah dengan sistem drainase yang belum memadai. Penurunan jumlah hari hujan meskipun curah hujan bulanan tetap tinggi juga menunjukkan transisi menuju pola hujan yang lebih intens namun jarang, merupakan salah satu ciri khas dari iklim yang menghangat.

Secara keseluruhan, data iklim Jakarta tahun 2020–2024 mencerminkan tekanan ganda akibat perubahan iklim: peningkatan suhu yang berkelanjutan dan pola curah hujan yang semakin tidak menentu. Frekuensi dan intensitas anomali suhu yang meningkat, jika dikombinasikan dengan dinamika curah hujan yang ekstrem dan periode hujan yang memendek, menegaskan pentingnya strategi adaptasi iklim yang lebih komprehensif. Siklus yang teramati ini juga sejalan dengan proyeksi iklim global untuk megakota tropis di tengah laju emisi gas rumah kaca yang terus meningkat.



Gambar II.5 Suhu Udara Rata-rata dan Anomali Suhu Udara Pengamatan Stasiun Meteorologi Kemayoran

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (diolah), 2025

Ekoregion

Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 2, UU No. 32/2009). Ekoregion berdasarkan peraturan tersebut dipahami sebagai konsep unit karakter lahan yang berperan sebagai ciri-ciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas dalam pengelolaan lahan. Pada wilayah fungsional Jakarta terdapat ekoregion dataran fluvio vulkanik yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Dengan memiliki ekoregion tersebut secara fungsi alami, wilayah fungsional Jakarta memiliki kemampuan yang tinggi terhadap pengaturan air dari hulu hingga ke hilir. Namun, saat ini dengan berkembangnya jumlah penduduk dan perkotaan, menyebabkan bentang lahan tersebut dialihfungsikan untuk pemanfaatan lahan terbangun yang berdampak pada pengurangan kinerja jasa lingkungan hidup. Selain ekoregion dataran fluvio vulkanik, ada 24 kelas ekoregion lain yang terdapat di wilayah fungsional Jakarta.

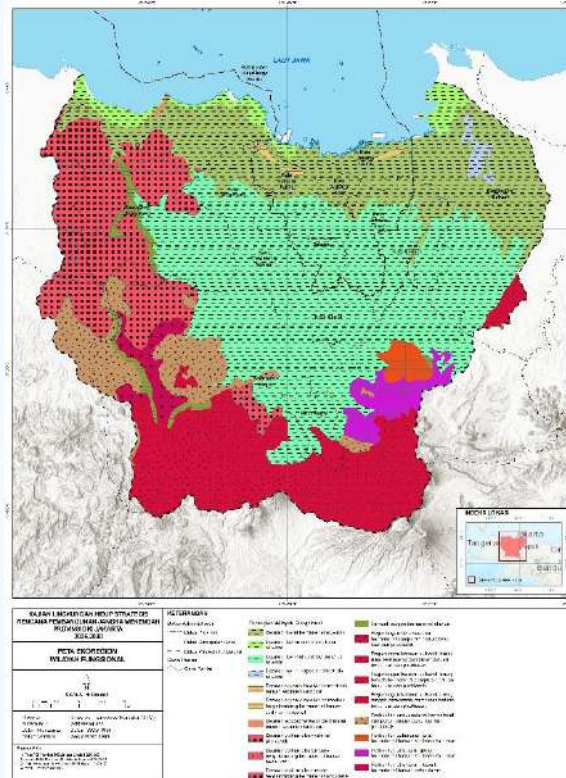
Tabel II.2 Detail Kelas Ekoregion

Bentang Lahan	Ekoregion
Dataran fluvial bermaterial aluvium	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai malar hijau
	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove
	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove monsun
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa monsun
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi mangrove
Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	Dataran vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah monsun merangas
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi terna rawa air tawar
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah monsun merangas
Lembah sungai bermaterial aluvium	Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

Disimpulkan bahwa Jakarta memiliki 4 (empat) tipologi ekoregion dataran dengan klasifikasi sebagai berikut:

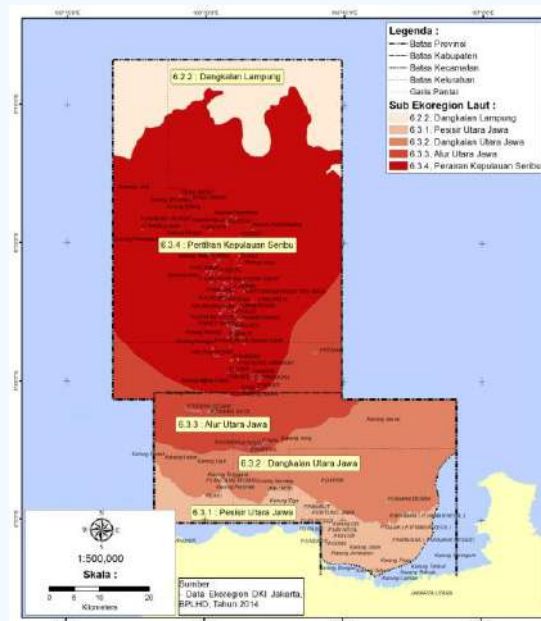
- Dataran Fluvio-marin: dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai). Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial.
- Dataran Fluvio-vulkanik: dataran yang berasal dari proses fluvial yang bermaterial utama piroklastik, seperti abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan berlangsung.
- Dataran Fluvial: dataran yang terbentuk dari hasil proses aliran sungai. Secara genetik material penyusun umumnya berupa aluvium dengan komposisi pasir, debu dan lempung relatif seimbang dengan sumber sangat bergantung kepada kondisi geologi daerah hulu, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan sungai.
- Dataran Organik Koralian: Dataran yang terbentuk melalui proses penguraian materi organik dan batuan karang yang bermaterial atuan sedimen karbonat.



Gambar II.6 Peta Ekoregion Wilayah Fungsional Jakarta

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021 dalam KLHS RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Selain ekoregion daratan, aspek lain yang tidak terlepas dari pembangunan kota adalah ekoregion laut dan kepulauan. Kawasan ekoregion laut Jakarta dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: Ekoregion Pesisir Utara Jawa, Ekoregion Dangkaln Utara Jawa, Ekoregion Alur Utara Jawa, Ekoregion Perairan Kepulauan Seribu, dan Ekoregion Dangkaln Lampung.



Gambar II.7 Peta Ekoregion Laut Jakarta

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029

Keanekaragaman Hayati

Jakarta yang termasuk ke dalam wilayah daratan dan pesisir memiliki ekosistem keanekaragaman hayati yang beragam. Ekosistem terbentuk berdasarkan karakteristik serta komponen hayati dan abiotik yang terdapat pada area tertentu. Selain keanekaragaman ekosistem, Jakarta juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang mencakup mamalia, herpetofauna, avifauna, serangga, biota perairan, dan tumbuhan-tumbuhan. Sebagian besar flora dan fauna di Jakarta merupakan jenis *urban exploiter* atau *urban adapter*.

Tabel II.3 Tipe Ekosistem Jakarta

Wilayah	Proses Terbentuknya	
	Alami	Buatan
(1)	(2)	(3)
Perairan air asin	Terumbu karang, padang lamun	-
Perairan air tawar	Sungai, danau, situ	Kanal, Waduk
Peralihan (Perairan-Terrestrial)	Hutan Mangrove	Riparian (Sempadan sungai)
Terrestrial	Hutan Pantai	Hutan kota, taman kota, kebun, pekarangan, sawah

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta 2023

Potensi keanekaragaman hayati di Jakarta dapat dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung untuk lingkungan, pemerintah, maupun masyarakat, seperti wisata alam, perlindungan sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, serta perubahan iklim. Menurut pemanfaatan jasa lingkungan, keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi jasa penyediaan (*provisioning services*), jasa pengaturan (*regulating services*), jasa kultural (*cultural services*), dan jasa pendukung (*supporting services*). Jasa penyediaan memungkinkan keanekaragaman hayati untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan, bahan obat-obatan, sumber keanekaragaman tanaman hias, sumber bahan papan, dan bahan kosmetik. Untuk jasa pengaturan, keanekaragaman hayati dapat mendukung penjagaan kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, pengontrol erosi, penjernihan air, pengontrol penyakit, serta mengurangi risiko degradasi kualitas lingkungan. Jasa kultural dapat berperan sebagai identitas, keragaman budaya, serta potensi wisata yang mencakup nilai religius-spiritual, nilai identitas, ilmu pengetahuan, dan nilai estetika. Jasa pendukung keanekaragaman hayati berperan sebagai produsen oksigen dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pada praktiknya, pelestarian keanekaragaman hayati masih mengalami beberapa permasalahan seperti pencemaran lingkungan; hilangnya habitat satwa liar; penurunan daya dukung lingkungan; perburuan, pencurian dan perdagangan ilegal satwa liar; spesies invasif dan spesies alien; konflik antara manusia dan satwa liar; perubahan iklim; serta ekspansi ruang terbangun yang mengakibatkan gangguan dan berisiko terhadap kepunahan jenis tumbuhan dan satwa. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1796 Tahun 1989 tentang Penetapan Salak Condet (Salacca Zalacca) dari jenis flora dan Burung Elang Bondol (Haliastur Indus) dari jenis fauna sebagai identitas/maskot Jakarta. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2018 juga menjelaskan tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta yang mencakup 103 jenis tumbuhan dengan 62 jenis yang termasuk Tanaman Nusantara Khas Jakarta, seperti damar, pulai, srikaya, huni, dan landep. Di sisi lain, upaya perlindungan pohon termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon. Terkait dengan keanekaragaman tumbuhan di Jakarta, berdasarkan status kelangkaan International Union for Conservation of Nature (IUCN), terdapat 391 jenis tumbuhan dengan kategori *not evaluated*, 230 jenis dengan kategori *least concern*, 4 jenis dalam *critically endangered*, dan 1 jenis yang termasuk *extinct in the wild*.

C. Profil Kinerja Lingkungan Hidup

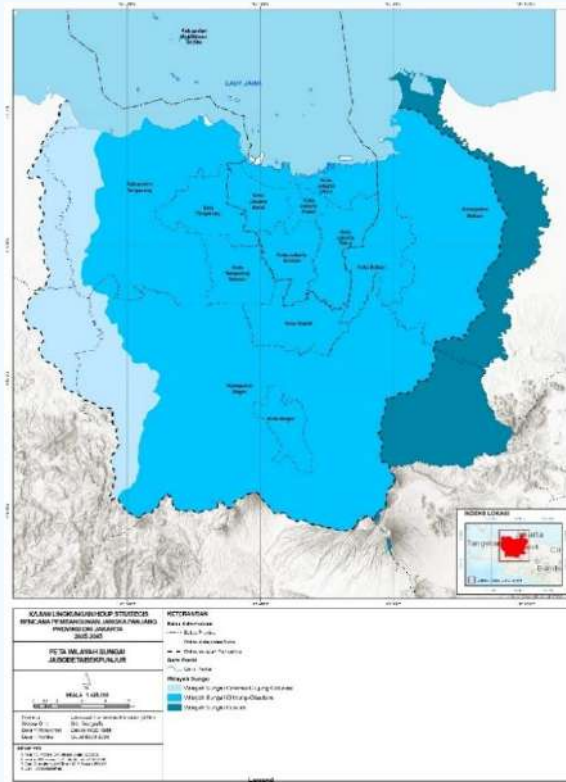
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dalam mendukung pembangunan didefinisikan sebagai kemampuan sumber daya alam untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan di antara keduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk ke dalamnya. Beberapa parameter daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan meliputi ketersediaan air, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, dan timbunan sampah. Kondisi umum daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Jakarta dapat dilihat pada gambar di bawah.

28

Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air kelas rendah yang ditandai dengan warna oranye mendominasi 86,17% wilayah Jakarta. Dalam peta penggunaan lahan skala detail tahun 2018, Jakarta telah memanfaatkan 78% wilayahnya sebagai lahan terbangun. Hal ini berakibat area resapan berkurang namun fungsi tata air melalui drainase masih cukup baik. Sementara itu pada sebagian wilayah perbatasan timur Jakarta menunjukkan kinerja jasa pengaturan air yang tinggi dikarenakan wilayah tersebut masih berupa sawah ataupun kebun campur. Areal sawah atau kebun campur tersebut berpotensi mengalami alih guna lahan mengingat pola ruang yang sama dialokasikan sebagai perumahan/pemukiman. Hal ini dapat memicu pada penurunan kinerja jasa pengaturan air yang berdampak pada fungsi penyedia air.

Kinerja jasa lingkungan hidup Jakarta sebagai pengatur mitigasi banjir erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air, namun lebih cenderung pada peran wilayah sebagai resapan. Kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi banjir di Jakarta didominasi kelas rendah (warna merah). Sebaran kinerja rendah jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi banjir menghampar di bagian utara wilayah Jakarta. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran ini secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik serta ketinggian tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah utara. Area lahan terbangun di wilayah utara Jakarta menyebabkan nilai kinerja pengaturan mitigasi bencana banjir menjadi rendah. Sementara itu, dataran di bagian selatan dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai area resapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir.



Gambar II.13 Peta Wilayah Sungai Aglomerasi Jabodetabekpunjur
Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

Jakarta terbagi ke dalam 6 DAS sebagai satu kesatuan sistem hidrologi, yaitu DAS Angke Pesanggrahan, DAS Buaran, DAS Cakung, DAS Ciliwung, DAS Krukut, dan DAS Sunter. Sedangkan untuk sungai lintas provinsi yang mengalir di Jakarta, terdapat 13 aliran sungai besar serta beberapa anak sungai dan kanal buatan yang lebih kecil. Profil panjang dan lebar masing-masing aliran sungai dan kanal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.4 Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Jakarta

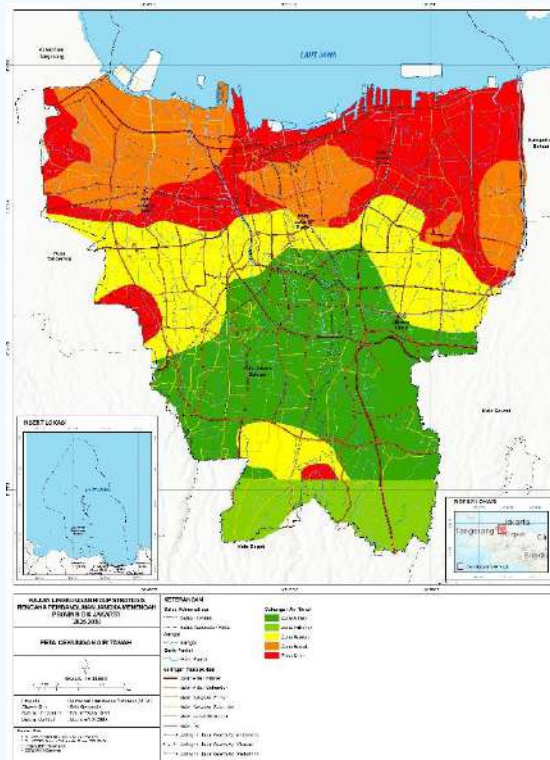
No. (1)	Sungai/Kanal (2)	Panjang (km) (3)	Luas Permukaan (ha) (4)	Kedalaman (m) (5)	Debit Aliran (m ³ /set)
1.	Ciliwung	46,2	115,5	2,4	28-62
2.	Kali Grogol	23,6	16,5	-	-
3.	Sunter	37,25	108	-	-
4.	Krukut	28,75	17,25	1,1	4,6-14
5.	Cakung	20,7	41,4	1,1	4,6-14
6.	Kalibaru Timur	39,2	39,3	0,85	2,3-3,7
7.	Kalibaru Barat	17,7	17,7	0,45	0,02-2,2
8.	Kali Angke	12,81	53,8	2,2	7,4-27
9.	Kali Pesanggrahan	27,3	25,5	2,6	10-22
10.	Cipinang	27,35	46,5	1,4	3,3-3,5
11.	Buaran	7,9	15,8	1,3	0,4-5,9
12.	Mookervart	7,3	23,4	2,34	1,3-2,5
13.	Jati Kramat	3,8	1,9	-	-
14.	Banjir Kanal Barat	12,85	77,1	-	-
15.	Banjir Kanal Timur	23	138	-	-

No. (1)	Sungai/Kanal (2)	Panjang (km) (3)	Luas Permukaan (ha) (4)	Kedalaman (m) (5)	Debit Aliran (m ³ /set)
16.	Cengkareng Drain	7,6	38	-	-
17.	Cakung Drain	11,2	67,2	-	-
18.	Kali Cideng	17,8	28,5	-	-
19.	Ancol	8,3	24,1	-	-
20.	Sekretaris	12,6	8,8	-	-

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029, 2023

Hulu sungai-sungai pada tabel di atas berada di Provinsi Jawa Barat dan Banten, sedangkan Jakarta menjadi hilir dari seluruhnya yang menjadikan Jakarta sebagai kota delta hasil endapan muara sungai yang secara umum berada di bawah permukaan air laut. Rata-rata kedalaman sungai-sungai di Jakarta yang tidak lebih dari 2,5 meter mengindikasikan tingginya risiko banjir. Upaya normalisasi dan pembersihan sungai dan kanal terus dilakukan disertai infrastruktur kolam retensi/wadah parkir air (*retention basin*) berupa waduk, situ, maupun embung yang dibangun untuk menampung limpasan air hujan. Kolam retensi juga memiliki fungsi lain, antara lain sebagai air cadangan wilayah sekitar ataupun destinasi rekreasi. Saat ini, di 5 wilayah administrasi Jakarta tersebar sejumlah 58 kolam retensi.

Kondisi cekungan air tanah (CAT) Jakarta berada pada lintas 3 Provinsi yang mencakup Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor dengan luas hingga 1.439 km². CAT Jakarta dikelompokkan menjadi 4 zona akuifer dengan tingkat kedalaman yang berbeda, yaitu kedalaman hingga 40 meter, kedalaman hingga 150 meter, kedalaman hingga 250 meter, dan kedalaman di bawah 250 meter. Lapisan akuifer ini tersebar secara tidak merata di wilayah Jakarta dan masih memerlukan pemetaan yang detail dan komprehensif. Potensi air tanah di Jakarta mengalami tantangan yang cukup signifikan dengan pesatnya laju pembangunan lahan dan ekstraksi air tanah. Diperkirakan Jumlah air tanah bebas 803 juta m³/tahun dan untuk jumlah air tanah tertekan 40 juta m³/tahun.



Gambar II.14 Peta Cekungan Air Tanah

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

Tingginya angka penduduk dan aktivitas perekonomian menjadi salah satu faktor yang membuat kebutuhan air bersih sangat besar. Kebutuhan akan air ini tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas yang aman dan layak. Berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah fungsional, lebih dari 95% wilayah Jakarta telah melampaui daya dukung dan daya tampung air; dengan ketersediaan air secara signifikan lebih rendah dibandingkan kebutuhan. Kondisi ini diperburuk oleh kualitas air sungai di Jakarta yang tergolong dalam kategori cemar sedang hingga berat, sehingga tidak layak digunakan sebagai sumber air baku. Ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 550.116.002,13 m³/tahun, sementara total kebutuhan air untuk keperluan domestik maupun pemanfaatan lahan mencapai 1.036.651.092,35 m³/tahun. Adapun masing-masing wilayah kabupaten dan kota administratif di Jakarta telah melampaui batas ketersediaan air dengan nilai sebesar 0,63% untuk Kepulauan Seribu, 18,69% untuk Jakarta Barat, 7,20% untuk Jakarta Pusat, 22,27% untuk Jakarta Selatan, 26,83% untuk Jakarta Timur, dan 20,36% untuk Jakarta Utara.

Tabel II.5 Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta

Wilayah Administrasi Kota/Kabupaten	Volume (m ³ /tahun)					Luas D3TLH Air		Indikasi Status D3TLH Air
	Ketersediaan Air Jakarta	Domestik	Lahan	Kebutuhan Total	Selisih	Belum Terlampaui	Terlampaui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Seribu	4.163.057,32	2.396.044,80	1.109.769,45	3.505.814,25	657.243,07	658,91	419,13	Terlampaui
Jakarta Barat	102.105.718,45	221.240.073,60	12.756.910,02	233.996.983,62	-131.891.265,17	144,29	12.414,16	Terlampaui
Jakarta Pusat	34.911.044,24	91.315.728,00	172.052,54	91.487.780,54	-56.576.736,29		4.781,08	Terlampaui
Jakarta Selatan	118.049.489,86	203.236.560,00	3.629.945,37	206.866.505,37	-88.817.015,52	39,68	14.791,38	Terlampaui
Jakarta Timur	152.307.750,72	287.173.814,40	20.180.742,05	307.354.556,45	-155.046.805,74	500,85	17.817,79	Terlampaui
Jakarta Utara	138.578.941,54	154.893.340,80	38.546.111,31	193.439.452,11	-54.860.510,57	1.329,83	13.522,02	Terlampaui
TOTAL	550.116.002,13	960.255.561,60	76.395.530,74	1.036.651.092,35	-486.535.090,22	2.673,56	63.745,56	

Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023 dalam KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

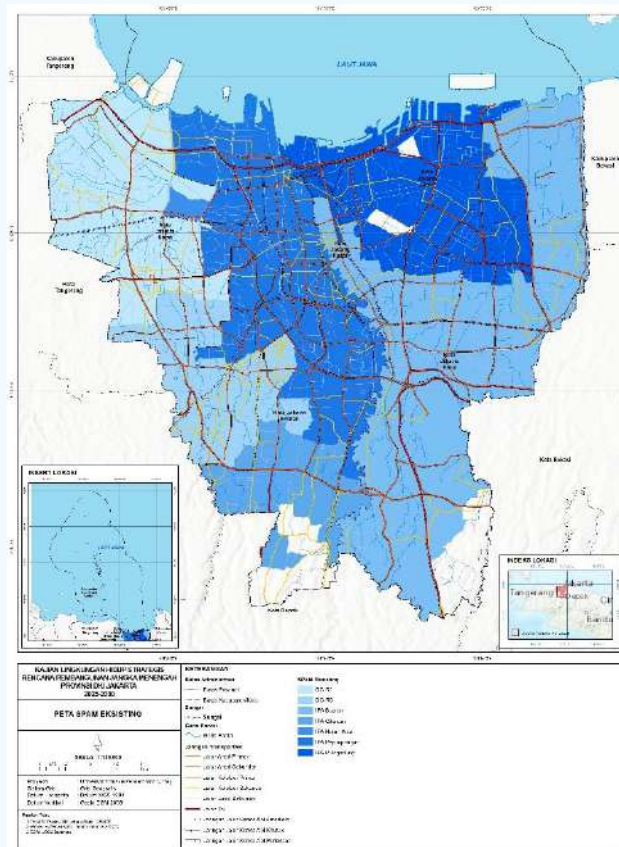
Analisis daya dukung air pada tabel II.5 menunjukkan bahwa seluruh kota dan kabupaten administrasi di Jakarta telah melampaui ambang batas daya dukungnya. Meskipun Jakarta menerima pasokan dari lima daerah aliran sungai (DAS), termasuk Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol, dan IPA Serpong, hanya sekitar 4,69% dari total air permukaan di wilayah DAS tersebut yang terdistribusi ke Jakarta. Sebagian besar ketersediaan air Jakarta juga sangat bergantung pada kondisi ketersediaan air pada Wilayah Sungai (WS) Citarum (Waduk Jatiluhur). Sehingga, walaupun wilayah fungsional Jakarta hanya mencakup dua wilayah sungai, yaitu WS Cidanau–Ciujung–Cidurian dan WS Ciliwung–Cisadane, namun untuk menilai kondisi ketersediaan air perlu memperhitungkan WS Citarum. Tabel berikut memperlihatkan ketersediaan air pada masing-masing WS.

Tabel II.6 Jumlah Ketersediaan Air Wilayah Fungsional Jakarta

Wilayah Sungai	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
(1)	(2)
WS Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru	2.065.825.816
WS Citarum Hilir	1.890.981.644
WS Ciliwung	1.650.778.439
WS Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru	432.605.843
WS Kepulauan Seribu	2.678.700
Total Ketersediaan Air 5 WS	6.042.870.443

Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023 dalam KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan berbagai upaya dalam peningkatan akses layanan air minum. Sistem penyediaan air minum telah dilengkapi dengan infrastruktur pengolahan, distribusi, dan penyimpanan air bersih yang cukup memadai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, penyediaan air bersih didukung oleh sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA) air olahan yang telah beroperasi, antara lain IPA Cilandak, IPA Pesanggrahan, IPA Pejompongan I dan II, IPA Pulo Gadung, IPA Taman Kota, IPA Citra, IPA Hutan Kota, IPA Mookervart, serta IPA Buaran I, II, dan III, yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air siap distribusi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula fasilitas distribusi dan IPA air curah olahan yang berperan penting dalam mendukung sistem jaringan, seperti DCR 4 Kebon Jeruk, DCR 5 Lebak Bulus, IPA Cikokol, dan IPA Hutan Kota. Untuk menunjang penyimpanan air, telah dibangun sejumlah reservoir komunal di berbagai lokasi, antara lain di Duri Kosambi, Tamansari, Waduk Pluit, Cilincing, Marunda, Gandaria Utara, dan Tambora. Selain itu, terdapat juga sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah beroperasi hingga saat ini, yaitu meliputi SPAM Jatiluhur, SPAM Pesanggrahan, dan SPAM Buaran III, yang mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan seperti layanan air minum aman perpipaan baru menjangkau 70,03% dan tingkat kebocoran air (*Non-Revenue Water/NRW*) sebesar 45,88%.



Gambar II.15 Peta SPAM Eksisting Jakarta

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

Kondisi kualitas air di Jakarta secara keseluruhan masih menunjukkan hasil tingkat cemar yang cukup tinggi. Kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan tidak adanya satu pun titik pemantauan yang tergolong dalam kategori baik. Sebagian besar titik pemantauan berada dalam kategori cemar sedang, dengan proporsi antara 28% hingga 80%, sementara sisanya tercatat dalam kategori cemar berat, berkisar antara 2% hingga 66%. Indeks Pencemaran (IP) sungai di wilayah ini berada pada rentang 1,93 hingga 17,47. Jika ditinjau berdasarkan ruas sungai, kualitas terburuk ditemukan pada sejumlah sungai seperti Cideng (CDG), Cipinang (CPN), Sunter (STR), Buaran (BRN), Cakung (CKG), serta segmen hilir Kalibaru Timur (KLT). Temuan di lapangan menunjukkan intensitas tinggi aktivitas domestik maupun industri di sekitar wilayah sungai tersebut. Selama empat tahun terakhir, ruas-ruas tersebut secara konsisten mencatatkan nilai IP di atas 12,00, yang dikategorikan sebagai cemar berat.

Hasil analisis pada seluruh titik pemantauan situ/waduk, baik inlet, *middle*, maupun outlet, menunjukkan bahwa situ/waduk di Jakarta umumnya berada dalam kategori cemar sedang hingga cemar berat. Tingkat pencemaran paling tinggi cenderung ditemukan pada titik inlet dibandingkan dengan titik *middle* dan outlet. Pengukuran kualitas air pada titik inlet merupakan hal penting sebagai tolak ukur perubahan antara air yang masuk dan keluar, serta untuk menilai laju erosi, tingkat sedimentasi, dan efektivitas daya tampung serta daya dukung terhadap beban pencemaran. Berdasarkan kecenderungan IP pada situ/waduk di Jakarta, terlihat adanya penurunan jumlah titik dengan status cemar berat pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan periode 2021 hingga 2023, baik pada pemantauan periode pertama maupun kedua.

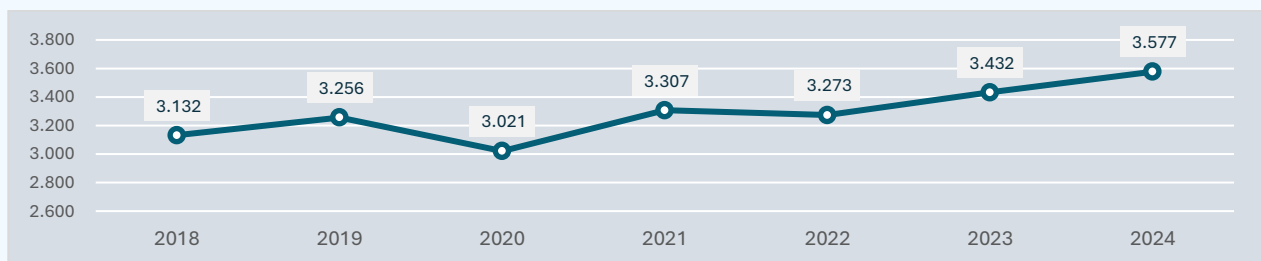
Pada periode pertama dan kedua, distribusi IP pada wilayah perairan laut dan muara teluk di Jakarta umumnya menunjukkan status cemar ringan hingga sedang. Namun demikian, terdapat dua lokasi yang dikategorikan sebagai cemar berat, salah satunya adalah titik Cengkareng Drain Surut pada periode kedua, dengan nilai IP sebesar 17,12. Sebaliknya, terdapat dua titik uji yang menunjukkan kualitas air laut yang tergolong baik, yaitu Sunter Pasang dan Sunter Surut.

Pada tahun 2024 periode pertama, hanya 4% dari seluruh titik pemantauan kualitas air tanah di Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan status baik ($IP < 1$), sementara mayoritas titik menunjukkan status cemar sedang dengan proporsi sebesar 56%. Memasuki periode kedua, persentase titik pemantauan dengan status baik meningkat menjadi 16%, menandakan adanya perbaikan dari periode sebelumnya. Namun demikian, pada periode yang sama, kualitas air tanah didominasi oleh status cemar berat, mencapai 32% dari total titik pemantauan. Wilayah utara DKI Jakarta menjadi perhatian utama dalam upaya mitigasi pencemaran air tanah karena tingginya konsentrasi lokasi dengan kategori cemar berat di kawasan tersebut.

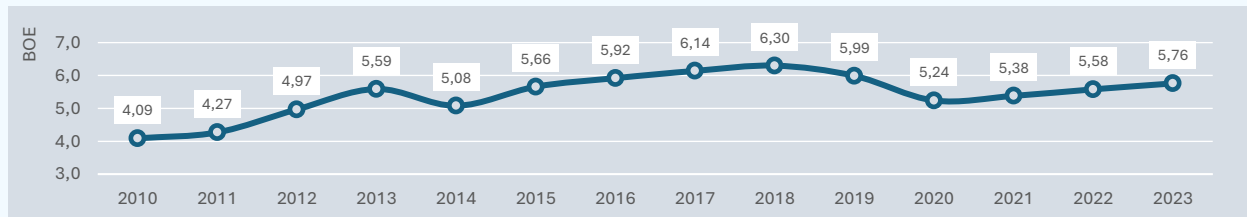
Ketahanan Energi

Energi merupakan sektor penting yang berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi sebuah kota. Rencana Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global sangat bergantung pada ketersediaan listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Meskipun Jakarta memiliki pembangkit listrik Tanjung Priok dan pembangkit listrik Muara Karang, bahan bakar dari pembangkit tersebut serta sumber energi lainnya seperti BBM, LPG, dan gas bumi masih berasal dari luar Jakarta. Aktivitas transportasi yang masih didominasi kendaraan pribadi serta tingkat konsumsi energi bangunan gedung menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi energi di Jakarta yang kemudian berdampak pada tingginya polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, kondisi geografis di Kepulauan Seribu membuat akses pasokan energi masih cukup terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan dan penguasaan teknologi energi baru terbarukan (EBT) masih menjadi tantangan dalam implementasi energi baru terbarukan di Jakarta.

Berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2023-2050, intensitas konsumsi energi per kapita di Jakarta menunjukkan capaian yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam periode 2010-2023 dengan 4,09 BOE per kapita pada tahun 2010 kemudian berangsur naik hingga menyentuh angka 5,76 di tahun 2023. Nilai emisi gas rumah kaca (GRK) dari penggunaan listrik di Jakarta pada tahun 2023 terdiri dari 29.664 Gg (ribu ton) CO₂e (*direct emission*) dan 33.420 Gg (ribu ton) CO₂e (*indirect emission*). Sektor energi merupakan kontributor terbesar (92%) terhadap *direct emission*.



Gambar II. 16 Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta
Sumber: KLHS RPIPD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025-2045



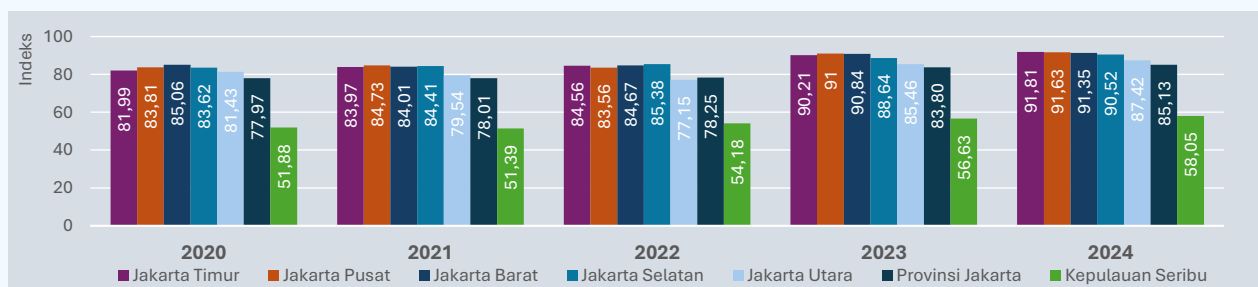
Gambar II.17 Intensitas Konsumsi Energi per Kapita Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 2024

Kemandirian Pangan

Pangan menjadi komoditas utama yang sangat dibutuhkan oleh semua golongan masyarakat. Ketersediaan komoditas pangan harus terjamin keberadaan serta keterjangkauannya. Sekitar 98% kebutuhan pangan Jakarta dipasok dari luar daerah, sehingga kerja sama antar daerah menjadi sangat strategis. PT Food Station Tjipinang Jaya (BUMD pangan) menjalankan *contract farming* dengan berbagai daerah untuk komoditas strategis seperti beras, daging, ayam, telur, cabai, dan bawang merah.

Kondisi ketahanan pangan dan gizi di Jakarta berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) diklasifikasikan menjadi 6 kategori berdasarkan tingkat keparahan dan penyebabnya. Klasifikasi tersebut adalah: prioritas 1-sangat rentan, prioritas 2-rentan, prioritas 3-agak rentan, prioritas 4-agak tahan, prioritas 5-tahan, dan prioritas 6-sangat tahan. FSVA disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan.



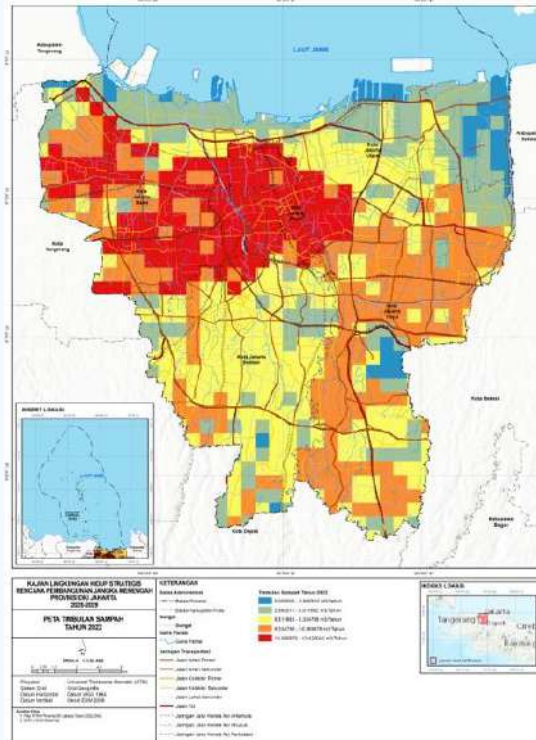
Gambar II.18 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kota/Kab

Sumber: Satu Data Pangan Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan hasil analisis FSVA tahun 2024, seluruh wilayah Jakarta daratan termasuk ke dalam prioritas 6 dengan dengan kategori sangat tahan; namun Kabupaten Kepulauan Seribu masih termasuk ke dalam prioritas 3 atau agak rawan. Akses yang cukup sulit ke Kepulauan Seribu serta karakteristik kepulauan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketahanan pangan dan gizi di Kepulauan Seribu tidak sebaik di wilayah daratan Jakarta.

Timbulan Sampah

Sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas penduduk yang merupakan sampah domestik. Analisis potensi timbulan sampah dilakukan berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari di wilayah Jakarta. Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup melaporkan timbulan sampah per kapita per hari di Jakarta sebesar 0.76 kg/kapita/hari. Nilai rujukan tersebut digunakan untuk melakukan analisis potensi timbulan sampah berdasarkan sebaran jumlah penduduk baik saat ini maupun tahun proyeksi pada 2030. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola sebaran timbulan sampah mengikuti pola distribusi penduduk berdasarkan grid 30"x30". Timbulan sampah tinggi berada di Kota Jakarta Pusat dengan nilai 10.08–13.43 kg/kapita/hari. Sedangkan untuk nilai terendah masih berada di Jakarta Utara dengan nilai 2.97–8.33 kg/kapita/hari.

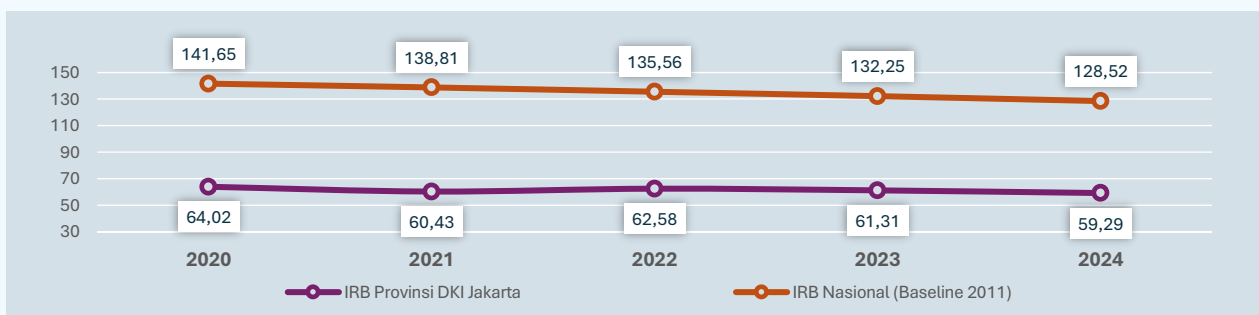


Gambar II.19 Peta Timbulan Sampah

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029

D. Profil Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana menjadi satu tantangan dalam pengembangan dan pembangunan kota; berbagai aspek dari geografi, geologi, hidrologi, ekologi, hingga demografi dapat menjadi alat bantu identifikasi potensi dan risiko bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk melakukan penilaian terhadap tingkat risiko bencana di tiap wilayah provinsi. IRBI memiliki beberapa variabel atau komponen seperti bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana, yang selanjutnya disesuaikan dengan ancaman bencana pada setiap wilayah. Secara historis IRBI dapat memberikan gambaran umum terkait dengan kecenderungan bencana yang terjadi sehingga dapat menjadi acuan melihat risiko bencana di masa mendatang. Tren IRBI wilayah Jakarta dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.20 Grafik Indeks Risiko Bencana Jakarta dan Indonesia

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

IRB Jakarta mengalami penurunan yang konsisten dari 64,02 pada tahun 2020 menjadi 59,29 pada tahun 2024. Penurunan IRB ini mencerminkan adanya upaya nyata dalam pengurangan risiko bencana, seperti peningkatan kapasitas mitigasi, perencanaan tata ruang yang lebih baik, peningkatan sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat. Selain itu, IRB Jakarta yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional mengindikasikan bahwa, meskipun Jakarta adalah daerah urban dengan kerentanan tertentu (banjir, gempa, kepadatan penduduk), kapasitas tanggap dan mitigasi bencananya relatif lebih tinggi. Walaupun terjadi penurunan, IRB Jakarta masih berada pada angka yang tidak bisa dianggap rendah mutlak; artinya risiko tetap ada dan perlu diwaspadai.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 terdapat 9 (sembilan) jenis ancaman bencana alam, antara lain banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Selain itu, terdapat 1 (satu) jenis ancaman bencana non alam, yaitu kebakaran wilayah perkotaan sehingga secara total terdapat 10 (sepuluh) jenis ancaman bencana yang dapat terjadi. Rangkuman potensi risiko bencana alam Jakarta dapat dilihat pada Tabel II.7 sedangkan bencana non alam dapat dilihat pada Tabel II.8.

Tabel II.7 Potensi Risiko Bencana Alam Jakarta

No	Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Risiko Berdasarkan Luas	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelas Risiko Berdasarkan Penduduk Terpapar
		Rendah	Sedang	Tinggi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Banjir	2.095	29.275	14.944	46.314	Tinggi	8.319.439	Sedang
2	Gempa Bumi	128.621	38.549	8	167.178	Sedang	11.246.068	Sedang
3	Likuefaksi	944	31.388	157	32.489	Sedang	5.918.303	Sedang
4	Tsunami	82.774	-	-	82.774	Rendah	71.992	Rendah
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	82.499	4.711	12.381	99.591	Tinggi	107.506	Sedang
6	Kekeringan	-	111.488	55.696	167.184	Tinggi	11.246.068	Sedang
7	Cuaca Ekstrem	34.796	49.759	82.628	167.183	Tinggi	11.246.068	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	6.944	-	-	6.944	Rendah	627	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	51.384	-	-	51.384	Rendah	11.246.068	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 Jakarta, 2023

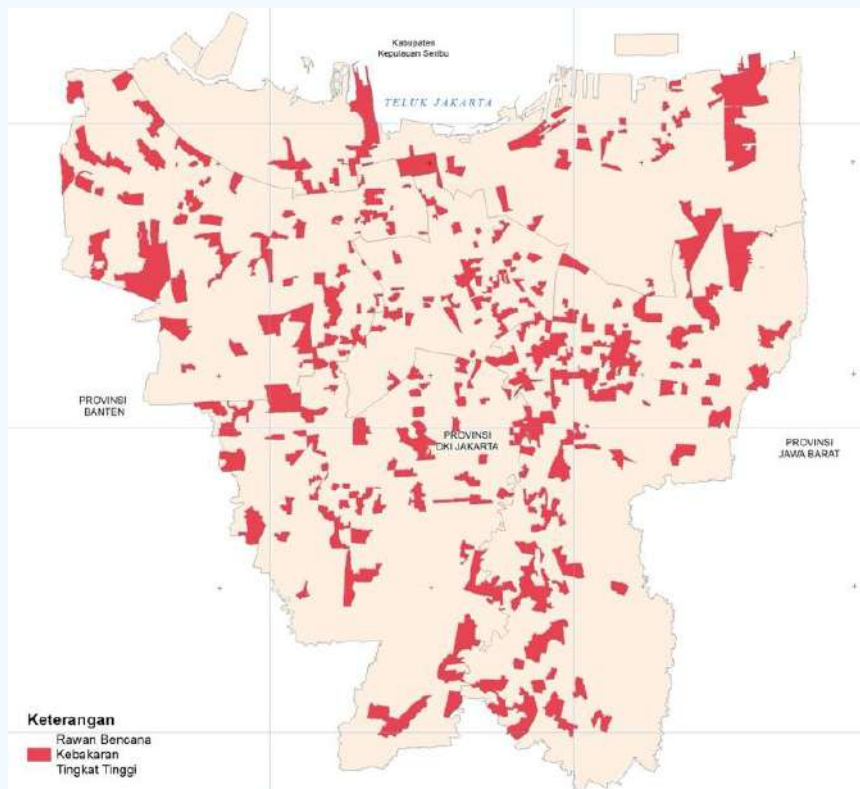
Berdasarkan potensi luas wilayah yang terdampak bencana, maka banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem perlu menjadi perhatian khusus karena termasuk ke dalam kelas risiko tinggi. Adapun berdasarkan potensi jumlah penduduk yang terdampak, maka hampir seluruh jenis bencana tersebut memiliki kelas risiko sedang. Dengan demikian maka dari 9 jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di Jakarta yang perlu sangat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan adalah bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan gempa bumi.

Tabel II.8 Potensi Risiko Bencana Non Alam (Kebakaran) Jakarta

Kabupaten/Kota	% Bahaya	% Kerentanan	% Kapasitas	% Risiko	Klasifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	11,79	27,81	60,41	51,35	Sedang
Jakarta Pusat	12,92	32,94	54,14	54,50	Sedang
Jakarta Utara	12,69	31,77	55,54	53,03	Sedang
Jakarta Barat	13,57	33,84	52,59	54,83	Sedang
Jakarta Selatan	13,22	32,80	53,98	53,79	Sedang
Jakarta Timur	13,89	32,44	53,66	55,47	Sedang
DKI Jakarta	13,34	32,75	53,92	54,42	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 Jakarta, 2023

Terkait potensi bencana non alam berupa kebakaran; identifikasi potensi bencana dilakukan dengan menekankan kepada tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko di tiap wilayah administrasi. Di Jakarta, masih teridentifikasi beberapa kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran dengan level tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta yang ditandai dengan warna merah pada peta berikut, sehingga penanggulangan kebakaran wilayah perkotaan perlu dilakukan secara merata.



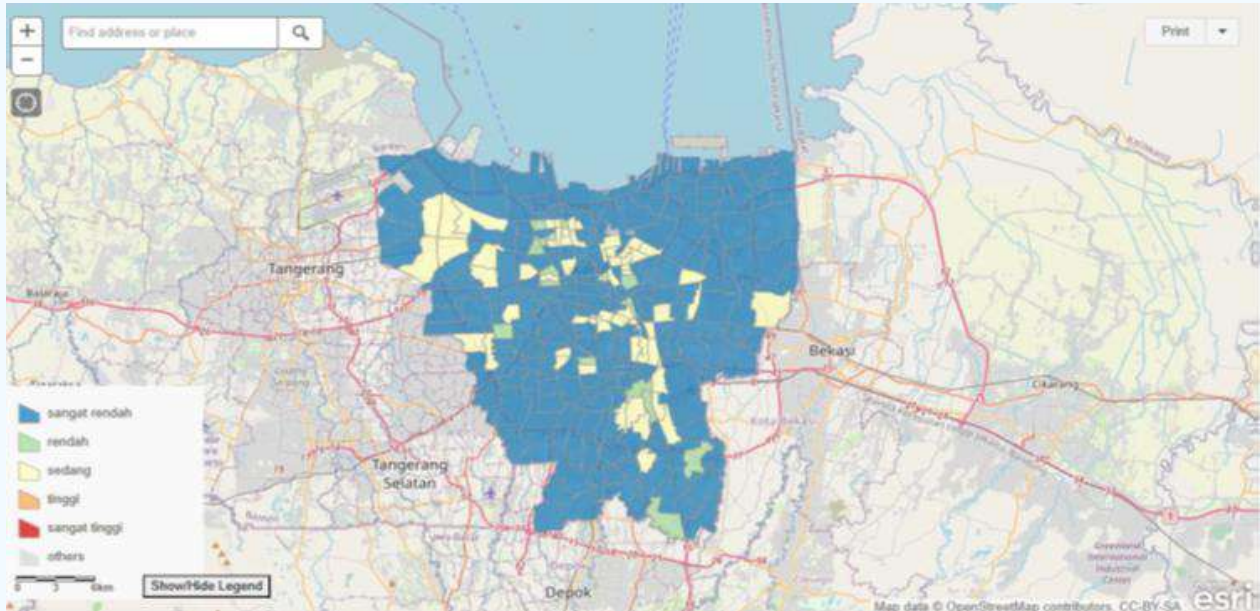
Gambar II.21 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2024–2044 (diolah)

Selain itu, masih terdapat isu kebencanaan lain yang menjadi fokus dalam beberapa tahun terakhir, yaitu banjir rob dan penurunan muka tanah yang saling berkaitan. Pada tahun 2007, tercatat tinggi muka air laut +233 cm dengan tinggi puncak tanggul +220 cm, sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan tinggi muka air laut menjadi +255 cm dan tinggi puncak tanggul menjadi +240 cm. Umumnya kejadian rob ini terjadi pada pesisir utara Jakarta meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Penjaringan, Ancol, Tanjung Priok, Koja, Kalibaru, Cilincing, dan Marunda. Faktor yang memperburuk kondisi banjir rob ini adalah gelombang tinggi, pasang air laut, musim angin, cuaca ekstrem, dan tanggul jebol. Jakarta juga mengalami penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa kawasan, hingga mencapai 11 cm per tahun. Dari studi yang telah dilakukan, beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tanah meliputi pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan akibat beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, dan gaya-gaya lempeng tektonik. Implikasi dari penurunan tanah ini adalah perubahan struktur, kerusakan struktur, pembalikan drainase, meningkatkan kejadian banjir, dan memperparah dampak banjir.

[illegible]

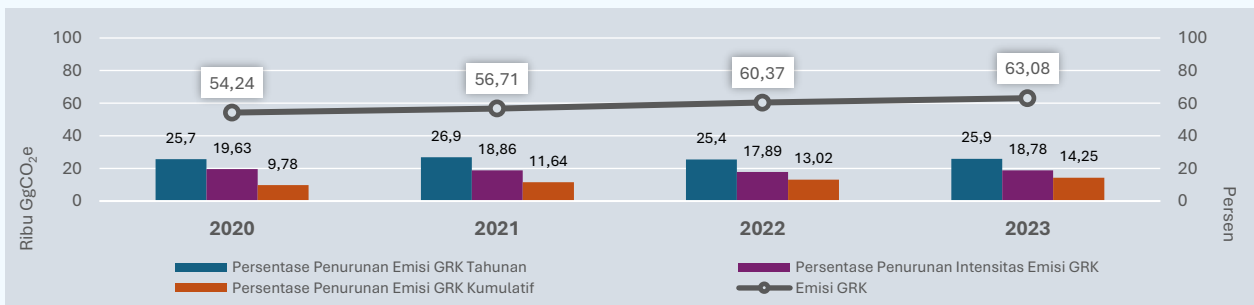
40

Jakarta sebagai kota delta memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, berdasarkan data SIDIK tahun 2021, Jakarta secara umum memiliki tingkat kerentanan rendah hingga sedang terhadap perubahan iklim, dengan nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) berkisar antara 0,303–0,498 dan Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) sebesar 0,453–0,664, yang mencerminkan kemampuan adaptasi yang cukup tinggi.



Gambar II.24 Peta Kerentanan Jakarta Terhadap Perubahan Iklim

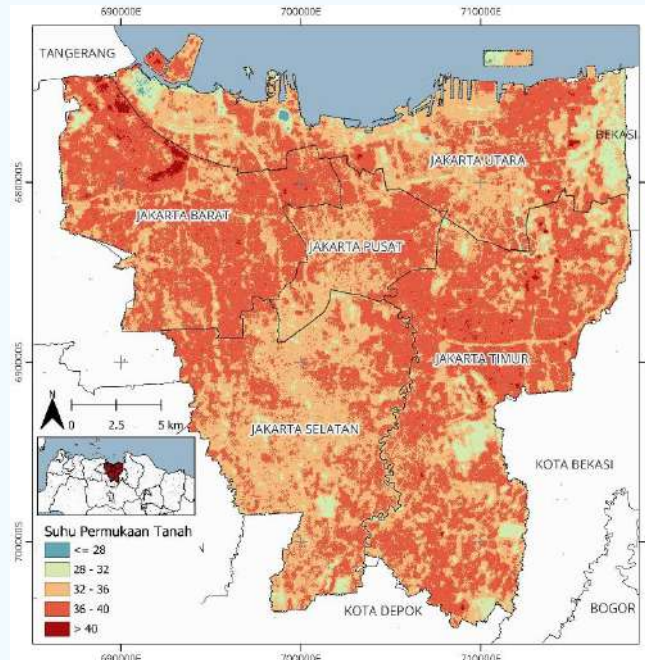
Sumber: Portal SIDIK, KLHK Data Hasil Analisis Tahun 2021 dalam KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025–2029



Gambar II.25 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelembapan, suhu udara, dan curah hujan, tetapi juga memengaruhi suhu permukaan, khususnya di wilayah perkotaan yang didominasi lahan terbangun. Di Jakarta, gedung-gedung dan infrastruktur perkotaan cenderung menyerap lebih banyak panas daripada memantulkannya, sehingga menyebabkan peningkatan suhu di sekitarnya dan memicu fenomena *urban heat island* (UHI). UHI merupakan kondisi di mana wilayah perkotaan memiliki suhu yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, sebagai akibat dari aktivitas manusia, permukaan bangunan yang menyerap panas, dan minimnya vegetasi peneduh yang dapat memantulkan panas. Berdasarkan analisis citra Landsat 8 periode 2018–2021, suhu permukaan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, suhu tertinggi tercatat mencapai sekitar 39°C, kemudian menurun menjadi sekitar 37°C pada 2019, sekitar 35°C pada 2020, dan kembali naik menjadi sekitar 36°C pada 2021. Fenomena ini menjadi tantangan lingkungan yang serius di tengah perubahan iklim, dengan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Jakarta.

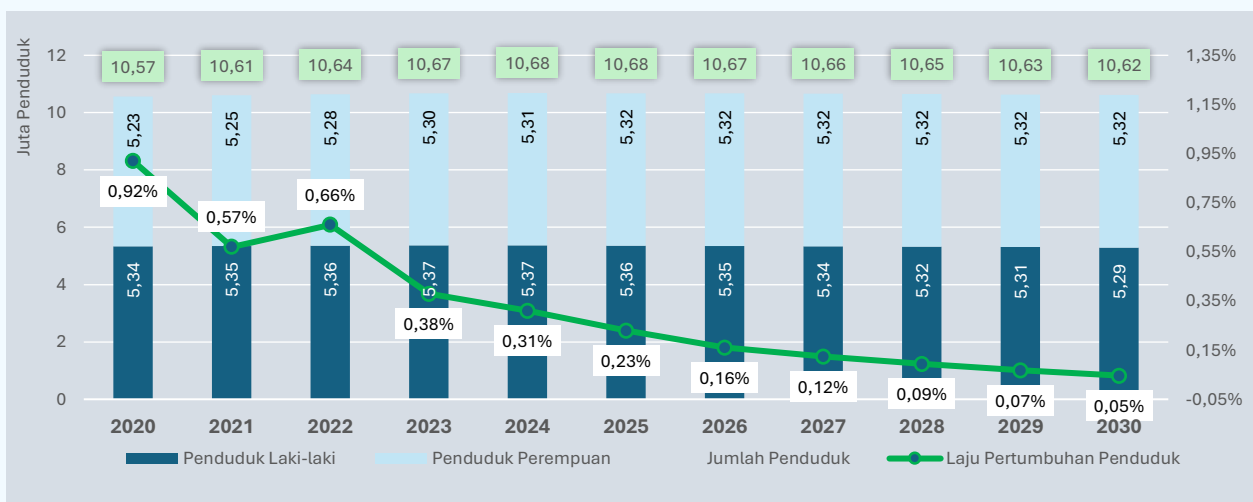


Gambar II.26 Kondisi Suhu Permukaan Jakarta

Sumber: Citra Landsat 8 - Hasil Analisis 2025 (diolah)

E. Profil Demografi

Kondisi kependudukan menjadi aspek vital dalam pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Seluruh aktivitas sosial dan ekonomi bahkan kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Profil kependudukan juga menjadi dasar perencanaan pembangunan, di antaranya jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk berdasarkan wilayah administrasi, kepadatan penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Analisis profil demografi sangat penting untuk memproyeksikan kebutuhan penduduk di masa depan agar dapat terpenuhi dengan optimal. Data historis serta proyeksi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

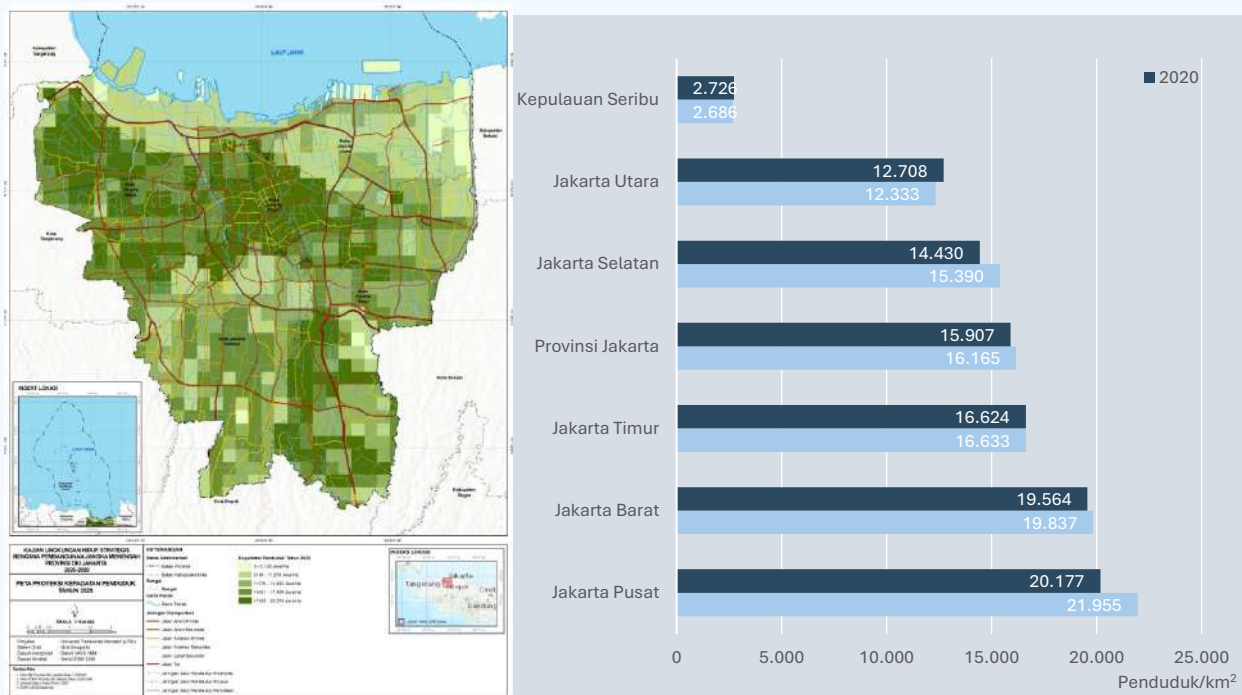


Gambar II.27 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta Tahun 2020–2030 (dalam ribu)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan data dari BPS Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 10,557 juta pada 2020 menjadi sebesar 10,685 juta jiwa di tahun 2025. Namun, setelah tahun tersebut, jumlah penduduk mulai menurun secara bertahap hingga mencapai 10,616 juta pada tahun 2030. Apabila dilihat secara lebih detail, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan penurunan yang drastis dari 0,92% pada 2020 menjadi negatif sejak 2028 (-0,05%) hingga -0,12% pada tahun 2030. Artinya, mulai 2028, jumlah penduduk Jakarta diperkirakan akan menyusut.

Hasil perhitungan proyeksi populasi Provinsi DKI Jakarta di atas dipengaruhi oleh beberapa asumsi. Mengacu pada BPS dalam Hasil Sensus Penduduk tahun 2020, perpindahan penduduk ke Ibu Kota Negara (IKN) telah dipertimbangkan sebagai faktor yang memengaruhi proyeksi penduduk di sejumlah provinsi, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, ruang yang terbatas, mahalnya biaya hidup, serta tekanan lingkungan dan infrastruktur menjadi faktor pendorong migrasi keluar Jakarta, terutama ke wilayah penyangga. Pada saat yang sama, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, serta transportasi daerah penyangga Jakarta yang mencakup Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi telah berkembang dengan pesat sehingga memungkinkan penduduk untuk bermigrasi. Lebih lanjut, proyeksi penurunan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan menandakan bahwa Jakarta tengah memasuki fase *post-urban growth* atau kejenuhan urbanisasi. Adapun kepadatan penduduk masing-masing wilayah tergambar sebagai berikut.

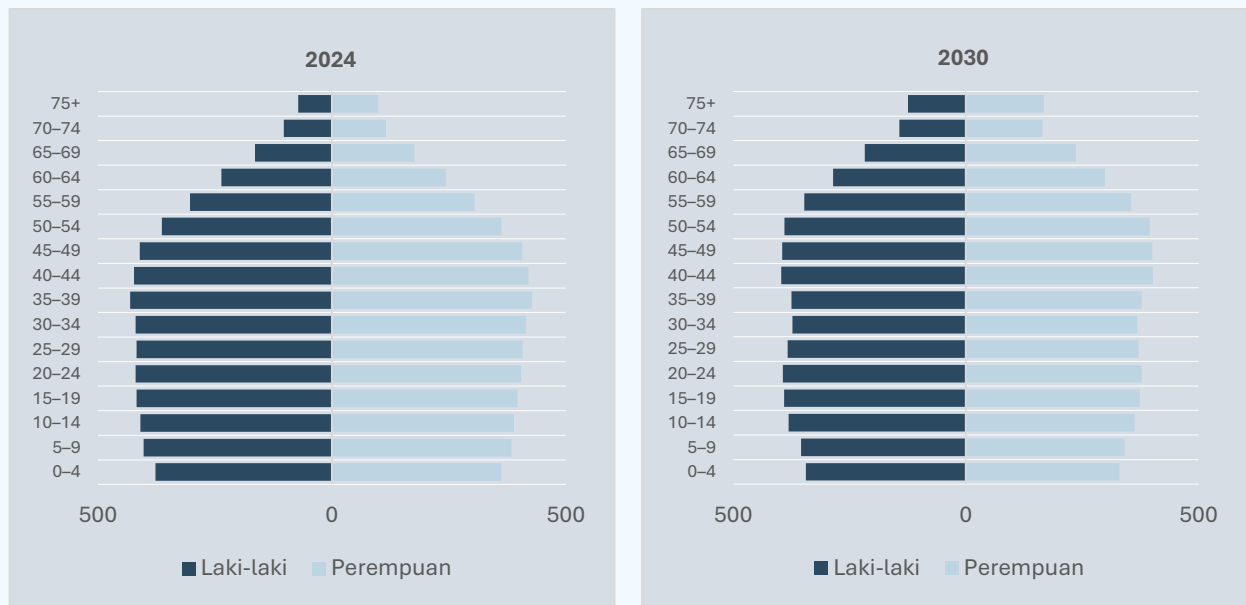


Gambar II.28 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2029 dan Perkembangan Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2024

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029 dan Badan Pusat Statistik 2025

Struktur demografi Jakarta pada tahun 2024 dan 2030 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, piramida penduduk memiliki bentuk yang mendekati struktur stasioner, dengan populasi cukup merata dari kelompok usia 0–4 tahun hingga 50–54 tahun. Basis piramida (usia muda 0–19 tahun) relatif lebar, menunjukkan proporsi anak-anak dan remaja yang cukup besar. Kelompok usia produktif (20–44 tahun) sangat dominan, menandakan bonus demografi sedang berlangsung dan dapat dimanfaatkan melalui upaya peningkatan produktivitas, pendidikan, dan keterampilan. Di waktu yang sama, usia lanjut (60 tahun ke atas) juga masih relatif kecil. Sedangkan struktur demografi untuk tahun 2030 diproyeksikan mulai bergeser ke arah piramida berbentuk limas terbalik yang memperlihatkan transisi dari struktur muda ke struktur menua. Basis piramida mulai menyempit (usia 0–14 tahun) yang menunjukkan penurunan angka kelahiran. Populasi usia produktif (15–64 tahun) masih mendominasi, namun proporsi kelompok usia lanjut meningkat, yang mengindikasikan potensi peningkatan beban ketergantungan lansia di masa depan.

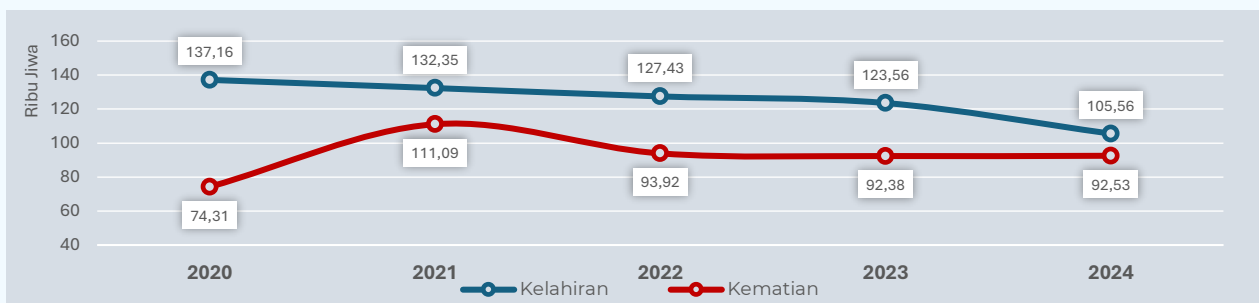
Dari sisi kebijakan, tren perlambatan pertumbuhan penduduk dan pergeseran struktur menuju populasi senior perlu direspons dengan strategi yang tepat. Dibutuhkan kebijakan yang transformatif dalam berbagai sektor—dari perencanaan kota, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan—untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial seluruh golongan usia. Selain itu, penting juga untuk mengantisipasi berkurangnya generasi muda yang akan menjadi tenaga kerja masa depan.



Gambar II.29 Piramida Penduduk Jakarta Tahun 2024 dan Tahun 2030

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Komponen demografi lainnya yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah angka kelahiran dan kematian. Dalam lima tahun terakhir angka kelahiran secara rata-rata mengalami penurunan sedangkan angka kematian cenderung naik, walaupun pada tahun 2020–2023 angka kematian cenderung fluktuatif yang disebabkan oleh pandemi. Apabila tren tersebut terus berjalan secara linear maka angka kematian akan semakin tinggi sedangkan angka kelahiran akan terus menurun yang dapat menyebabkan jumlah penduduk Jakarta akan menyusut.



Gambar II.30 Grafik Angka Kelahiran dan Kematian Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

II.1.3. Aspek Kinerja Pembangunan Daerah

A. Profil Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat secara umum didefinisikan sebagai kondisi di mana penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, hidup dengan aman dan sehat, serta memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dari aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang tumbuh secara berkelanjutan menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pada kurun waktu 2020–2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, sebagaimana kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada provinsi lain, Jakarta juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,39%. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2022, terjadi pemulihan yang signifikan, ditandai dengan pertumbuhan positif di atas 5% pada tahun 2022 untuk semua wilayah, termasuk Jakarta yang tumbuh sebesar 5,25%. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta membaiknya kondisi ketenagakerjaan.

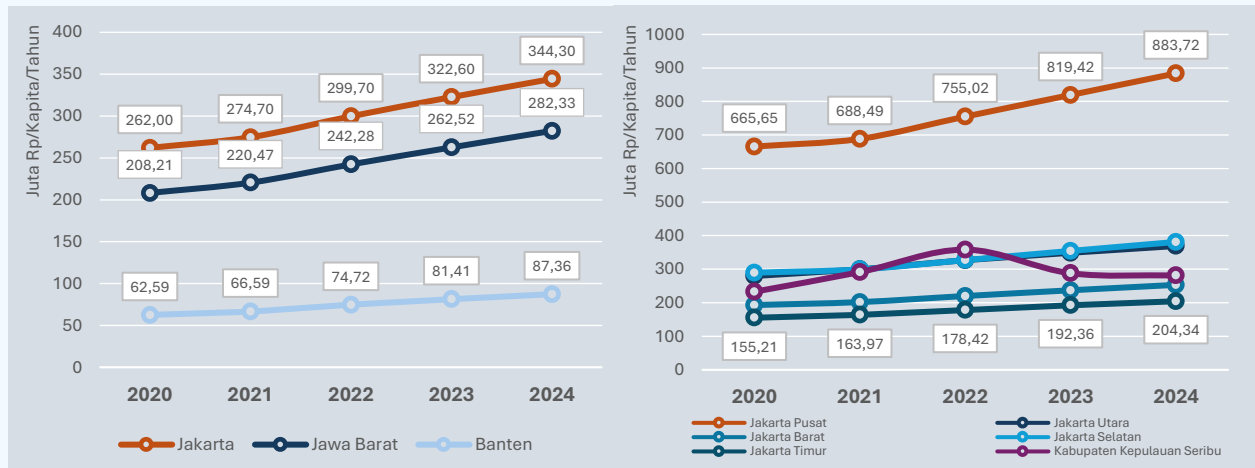


Gambar II.31 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, Provinsi Sekitar, Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tingkat Kota dan Kabupaten memiliki tren yang beragam. Pada tahun 2020, seluruh wilayah administrasi di Jakarta mengalami kontraksi ekonomi yang cukup tajam akibat pandemi Covid-19, dengan penurunan paling signifikan terjadi di Jakarta Utara (-6,22%) dan Kepulauan Seribu (-4,94%). Namun, mulai 2021 hingga 2022, seluruh wilayah kembali tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi di Jakarta Utara (6,02%) pada 2021 dan Jakarta Barat (5,85%) pada 2022. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang berbeda antarwilayah ini mencerminkan ketimpangan pembangunan dalam kota. Wilayah dengan infrastruktur ekonomi yang lebih kuat seperti Jakarta Barat, Selatan, dan Utara cenderung pulih lebih cepat, sementara Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur menghadapi tantangan lebih besar. Ketimpangan ini penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi persebaran kesejahteraan masyarakat, dan membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan antar wilayah.

Selain pertumbuhan ekonomi, kinerja kesejahteraan Jakarta juga tergambarkan dari PDRB per kapita yang merupakan gambaran rata-rata produktivitas per penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Gambar II. 28 menunjukkan bahwa pada tahun 2020–2024 nilai PDRB per kapita Jakarta memiliki tren positif seiring dengan tren peningkatan nilai ekonomi Jakarta pasca pandemi. Secara rata-rata nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Jakarta sebesar 285,4 juta rupiah per tahun.

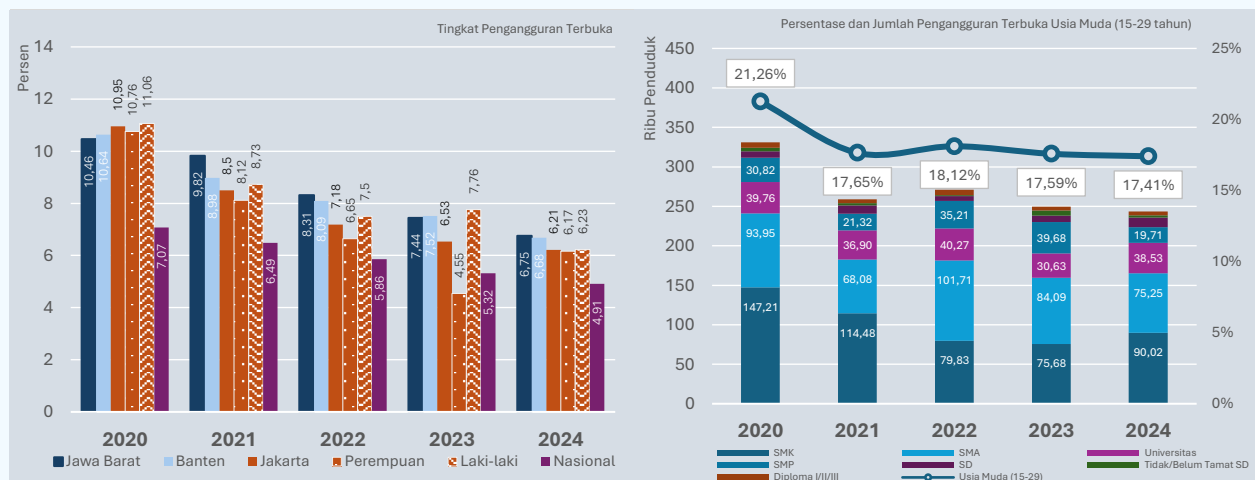


Gambar Il.32 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Jakarta dan Provinsi Sekitar Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Pada kurun waktu tersebut angka PDRB per kapita terendah terjadi pada tahun 2020. Pembatasan aktivitas ekonomi Jakarta dalam rangka mengatasi pandemi menyebabkan turunnya output perekonomian Jakarta. Angka per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 322,6 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa satu orang di Jakarta menghasilkan rata-rata sebesar 322,6 juta per tahun atau sekitar 26,9 juta per bulan. Jika dinilai atas dasar harga konstan, PDRB per kapita Jakarta sebesar 192,1 juta rupiah. Perekonomian Jakarta yang tumbuh 4,96% berimplikasi pada tumbuhnya PDRB per kapita Jakarta sebesar 4,65% atau naik 8,5 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun indikator pendapatan per kapita berguna dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara umum, namun indikator ini memiliki keterbatasan karena mengasumsikan setiap penduduk mendapatkan jumlah yang sama dari seluruh output perekonomian. Sementara itu, distribusi perekonomian pada suatu wilayah sering kali tidak terjadi secara merata, sehingga diperlukan informasi pelengkap dari indikator kesejahteraan lainnya.

Aspek lain yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran terbuka yang mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan sumber penghidupan yang layak. Tingginya pengangguran tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan individu, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat kualitas hidup secara umum. Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat pengangguran terbuka serta pengangguran pada usia muda menjadi penting untuk memahami dinamika kesejahteraan di suatu wilayah.

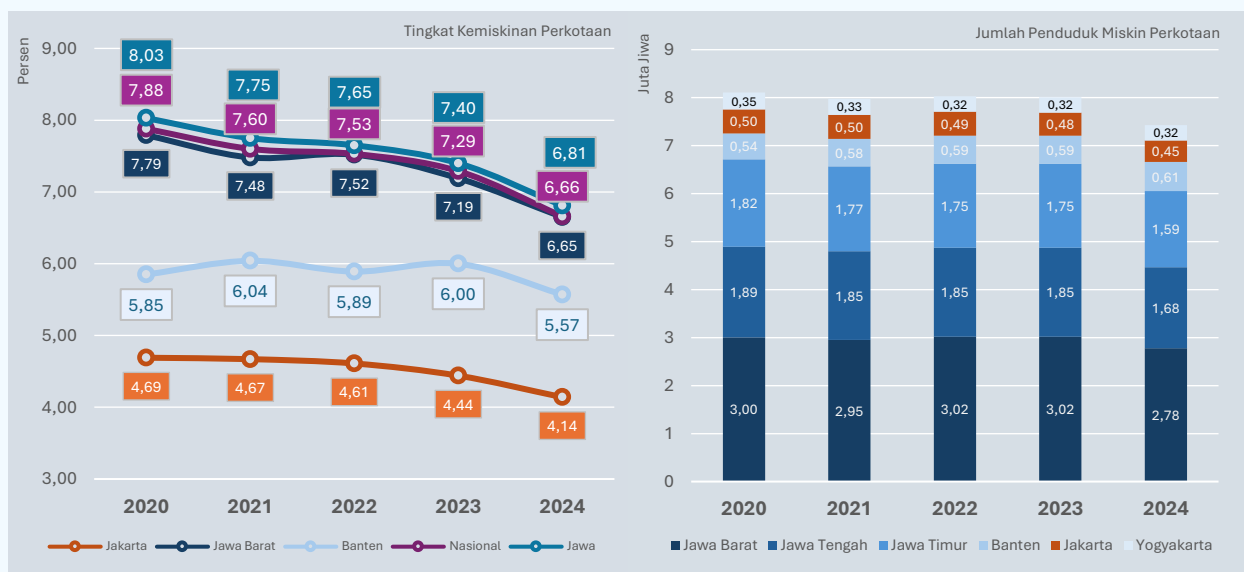


Gambar Il.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta dan Sekitar serta Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Muda Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Gambar tersebut menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan secara nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Jakarta mengalami penurunan paling tajam dari 10,95% pada 2020 menjadi 6,21% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Jakarta. Meskipun secara umum tingkat pengangguran terbuka telah mengalami penurunan, namun pada rentang umur 15–29 tahun (usia muda), tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Terlihat bahwa meskipun jumlah pengangguran usia muda secara absolut menurun dari sekitar 410 ribu orang pada tahun 2020 menjadi sekitar 320 ribu orang pada tahun 2024, tingkat penganggurannya tetap tinggi, yaitu 17,41% di tahun 2024. Penurunan ini konsisten dari angka tertinggi sebesar 21,26% pada tahun 2020, mencerminkan perbaikan pasca pandemi, meskipun masih terdapat tantangan struktural di pasar tenaga kerja.

Pengangguran di usia muda didominasi oleh lulusan SMK dan SMA, yang masing-masing menyumbang angka tertinggi setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kemungkinan rendahnya kualitas pelatihan kejuruan dan kesiapan kerja. Menariknya, lulusan universitas dan diploma relatif lebih sedikit secara jumlah, namun keberadaan mereka tetap signifikan. Tingginya pengangguran di kalangan usia muda berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang, karena kelompok usia ini adalah tulang punggung produktivitas masa depan. Ketidakmampuan mereka mengakses pekerjaan yang layak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan beban sosial, serta memperluas ketimpangan. Oleh karena itu, kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan kerja yang adaptif terhadap kebutuhan industri, dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi sangat krusial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.

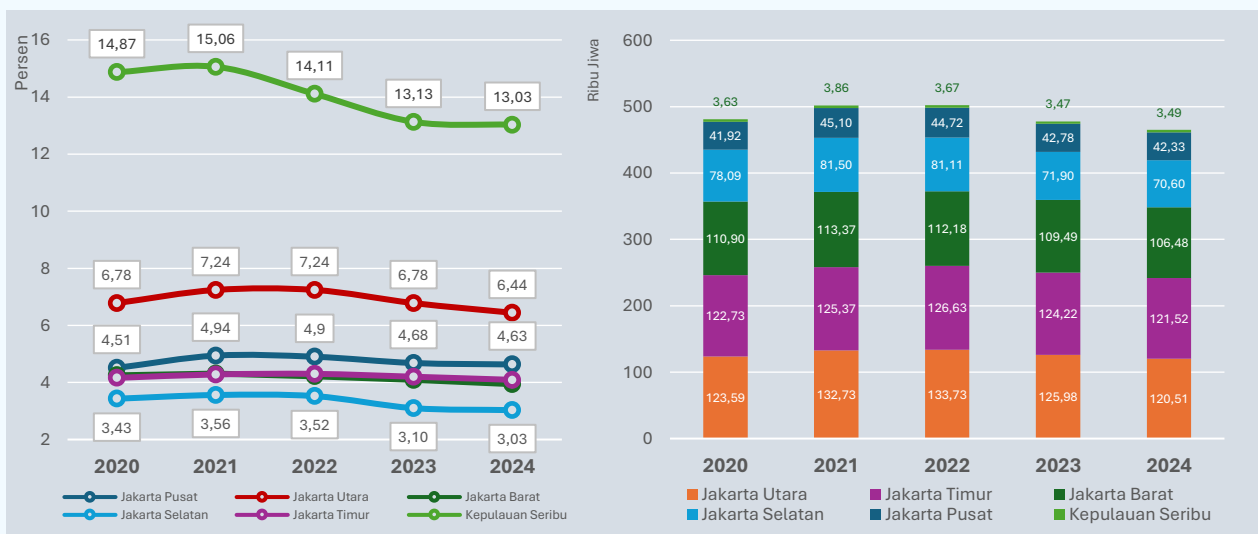


Gambar II.34 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Indikator tingkat kemiskinan memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka memiliki tingkat konsumsi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur melalui pengeluaran rumah tangga. Dalam mengidentifikasi tingkat kemiskinan, digunakan metode perhitungan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM mencerminkan nilai minimum pengeluaran untuk kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sementara GKNM mencakup kebutuhan dasar lainnya seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan indikator *Head Count Index* (HCI-P0), yang mengukur persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), tingkat kemiskinan di Jakarta dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun setelah melonjak akibat pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin tercatat mencapai puncaknya pada tahun 2020, yaitu sebesar 4,69%. Meskipun sejak 2021 angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, hingga tahun 2024 tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level di bawah 4%, sebagaimana sebelum pandemi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak ekonomi pandemi masih dirasakan, terutama dalam pemulihan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling rentan. Distribusi penduduk miskin di Jakarta selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa tiga wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi secara berurutan adalah Jakarta Utara (121 ribu jiwa), Jakarta Timur (118 ribu jiwa), dan Jakarta Barat (106 ribu jiwa). Tren ini semakin diperkuat saat pandemi Covid-19, di mana ketiga wilayah tersebut mengalami lonjakan angka kemiskinan paling signifikan, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 35,68% di Jakarta Utara, 33,97% di Jakarta Timur, dan 32,05% di Jakarta Barat. Meskipun sejak 2021 terjadi perlambatan dalam pertumbuhan jumlah penduduk miskin, hingga tahun 2024 angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata.



Gambar II.35 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Apabila dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin, juga tercermin adanya ketimpangan kesejahteraan antarwilayah kota dan kabupaten. Kabupaten Kepulauan Seribu secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 14,87% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 13,03% pada tahun 2024. Angka ini jauh melampaui wilayah lain, bahkan hampir empat kali lipat dibandingkan Jakarta Pusat yang mencatat angka terendah sebesar 3,03% pada tahun yang sama. Dalam lima tahun terakhir, kondisi kemiskinan di Jakarta mengalami penurunan secara bertahap, utamanya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang menunjukkan capaian signifikan dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Di sisi lain, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu belum menggambarkan kondisi perubahan yang cukup signifikan. Laju penurunan yang lebih lambat dan pola fluktuatif mengindikasikan adanya kesenjangan antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi.

Pada periode pencatatan, indeks Rasio Gini Jakarta tercatat 0,431 dan berada di atas capaian nasional yang sebesar 0,381. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4–0,5. Namun demikian, naiknya angka ini patut menjadi perhatian karena bermakna semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke kelompok 40% terbawah. Berdasarkan wilayahnya, ketimpangan pengeluaran tertinggi terdapat di Jakarta Utara. Ketimpangan di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2019 nilai indeks gini sebesar 0,355, sementara capaiannya pada tahun 2022 sebesar 0,543 dan menjadikan wilayah ini masuk ke dalam kategori ketimpangan tertinggi. Di sisi lain, Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah dengan tren yang menurun dari tahun 2019 sebesar 0,28 menjadi 0,211 di tahun 2022 dan masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

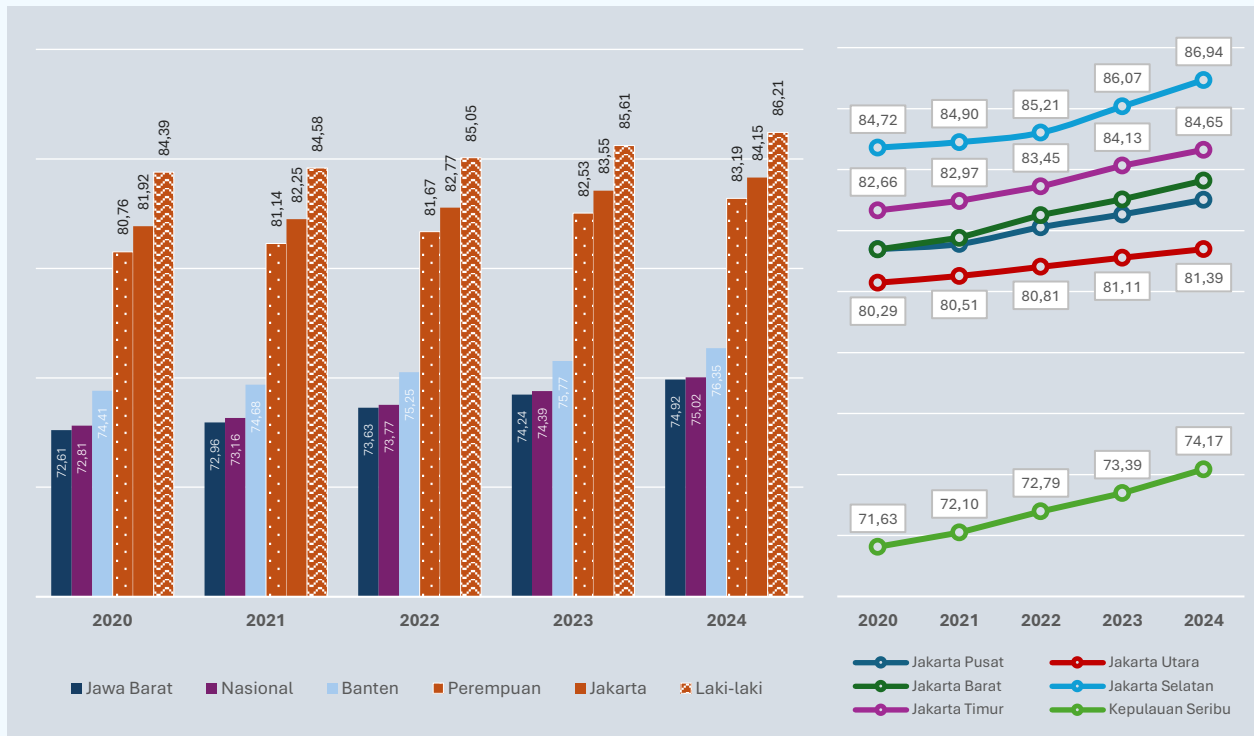
Lebih lanjut, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Tingkat Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Jakarta pada kurun waktu 2020–2024 juga mengalami sedikit peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengeluaran penduduk miskin makin jauh di bawah garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang semakin meningkat. Berdasarkan wilayah, meskipun Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah, namun kondisi kemiskinan di wilayah ini semakin dalam dan parah.



Gambar II.36 Indeks Gini, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahannya Kemiskinan Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tidak terlepas dari upaya pembangunan manusia yang berupa proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan, dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).



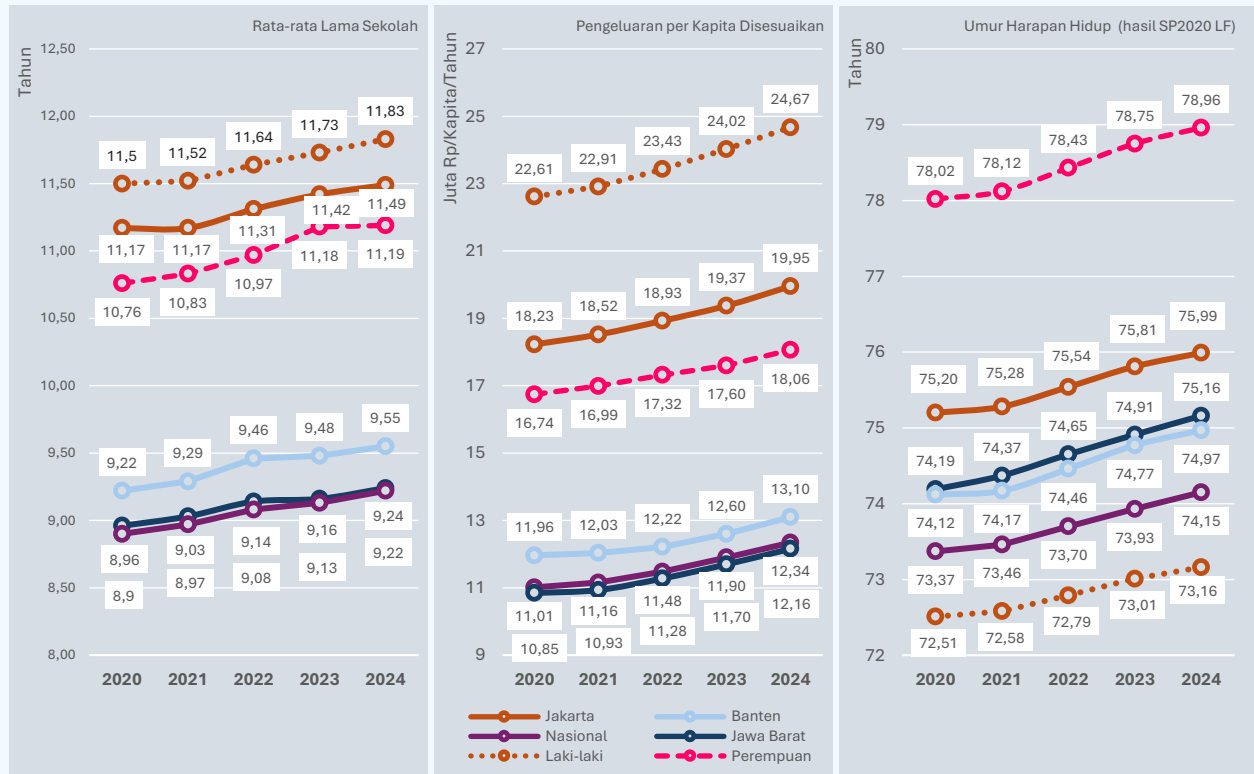
Gambar II.37 Indeks Pembangunan Manusia Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jakarta menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IPM Jakarta tercatat sebesar 81,92 dan terus meningkat hingga mencapai 84,15 pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,72% dalam 5 (lima) tahun terakhir. Namun, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup signifikan. IPM tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan dengan angka 87,57, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki IPM terendah sebesar 76,69, dengan disparitas mencapai 10,88 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, di mana Kabupaten Kepulauan Seribu masih tertinggal dibandingkan dengan lima kota lainnya.

Pada tahun 2024, tiga wilayah dengan IPM tertinggi di Jakarta adalah Kota Jakarta Selatan (87,57), Kota Jakarta Timur (84,76), dan Kota Jakarta Barat (84,40). Keunggulan wilayah-wilayah ini dalam pencapaian pembangunan manusia mengindikasikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih tinggi. Sementara itu, kesenjangan yang masih terjadi menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta, terutama bagi daerah yang masih tertinggal seperti Kabupaten Kepulauan Seribu.

Selama periode tahun 2020–2024, UHH Jakarta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode ini UHH Jakarta tumbuh 0,26% per tahun. Pada tahun 2024, UHH Jakarta sudah mencapai 75,99 tahun. Hal ini mengindikasikan bayi yang dilahirkan tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup sampai berumur hampir 76 tahun. Secara umum Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Jakarta, meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, RLS Jakarta sebesar 11,17 tahun, maknanya rata-rata penduduk Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,17 tahun atau masuk kelas XI (kelas II SMA). Sedangkan pada tahun 2024, RLS meningkat menjadi 11,49 tahun atau masuk kelas XII (Kelas III SMA). Pada tahun 2020 PPP Jakarta sekitar 18,23 juta rupiah, kemudian pada tahun 2024 PPP telah mencapai 19,95 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,66 juta rupiah per bulan. Selama periode tahun 2020–2024, PPP Jakarta terus tumbuh. Pertumbuhan PPP tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,36%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,61%.



Gambar II.38 Dimensi Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Secara lengkap rangkuman aspek kesejahteraan masyarakat Jakarta tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.9 Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Jakarta Tahun 2020–2024

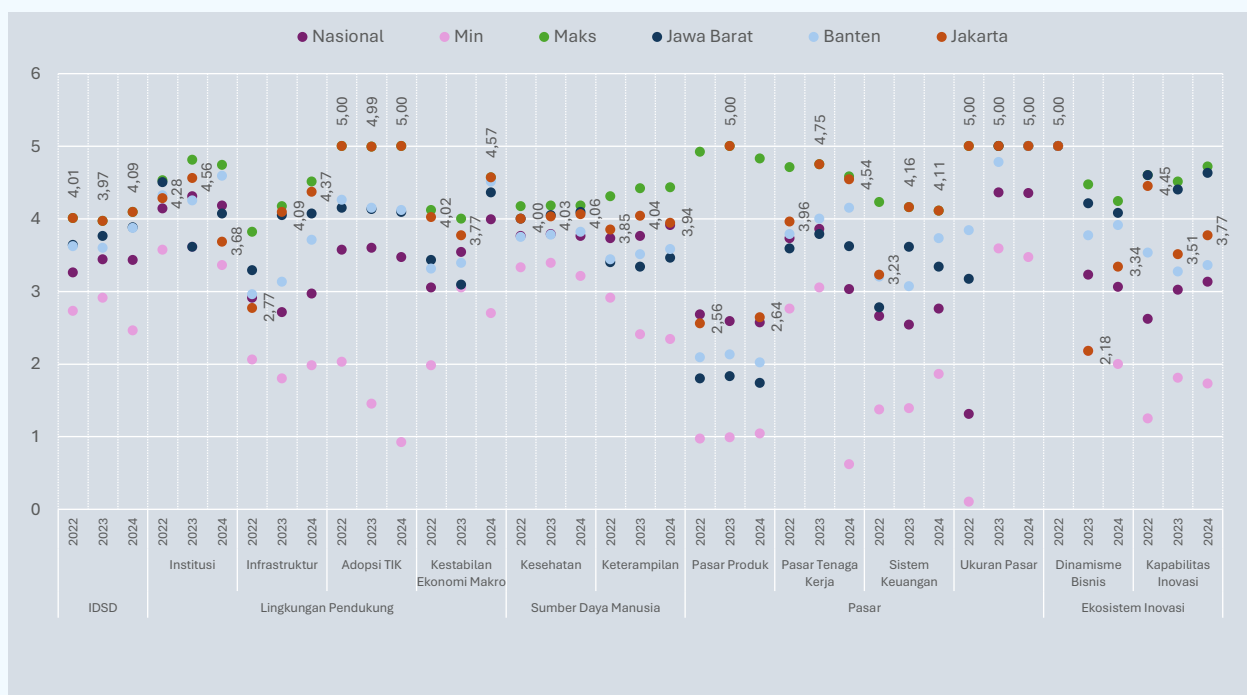
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun Rupiah	2.767	2.912	3.188	3.443	3.679
2	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan	Persen	-2,39	3,55	5,25	4,96	4,90
3	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita	Juta Rp/Kapita/Tahun	262	274,70	299,70	322,60	344,30
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,95	8,5	7,18	6,53	6,21
5	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	496,84	498,29	494,93	477,83	449,07
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,69	4,67	4,61	4,44	4,14
7	Indeks Gini	Indeks	0,400	0,411	0,412	0,431	0,431
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,670	0,750	0,680	0,690	0,550
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,150	0,180	0,160	0,170	0,110
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,77	81,11	81,65	82,46	83,08
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,17	11,20	11,30	11,42	11,49
12	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	Juta Rp/Kapita/Tahun	18,23	18,52	18,93	19,37	19,95

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
13	Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	75,20	75,28	75,54	75,81	75,99
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,07	13,08	13,33	13,51
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	N/A	70,99	73,07
16	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	N/A	68,70	67,90	69,21	DBR
17	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,63	94,84	94,93	95,24	95,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Profil Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan untuk menarik dan mempertahankan aktivitas ekonomi untuk menciptakan nilai tambah yang dapat memberikan kontribusi kesejahteraan ekonomi di suatu daerah. Aspek daya saing daerah mencakup beberapa fokus yang memberikan gambaran menyeluruh kondisi ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup. Secara keseluruhan, daya saing Jakarta mengalami peningkatan yang didukung kemampuan dan keterbukaan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai, dan iklim investasi yang kondusif. Daya saing daerah dinilai dari beberapa fokus, yang akan dijelaskan sebagai berikut.



Gambar II.39 Pemetaan Nilai Daya Saing Daerah Jakarta dengan Provinsi Sekitar Tahun 2022–2024

Badan Pusat Statistik, 2025

Untuk mengukur secara sistematis berbagai aspek daya saing, digunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai indikator komprehensif. IDSD menilai kinerja suatu daerah berdasarkan sejumlah pilar utama seperti institusi, infrastruktur, adopsi teknologi, stabilitas ekonomi, pasar tenaga kerja, serta kapabilitas inovasi, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi kekuatan dan tantangan daya saing di tingkat kota maupun provinsi.

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 hingga 2024, Jakarta menunjukkan posisi yang konsisten sebagai salah satu daerah dengan daya saing tertinggi di Indonesia. Skor IDSD Jakarta terus mengalami peningkatan dari 4,01 di tahun 2022 menjadi 4,09 pada 2024. Capaian ini menandakan bahwa secara umum Jakarta berhasil menjaga momentum perbaikan kualitas lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang menjadi fondasi daya saing daerah. Keunggulan Jakarta terlihat pada beberapa pilar, di mana Jakarta memperoleh skor maksimal (5,00) dalam tiga pilar utama, yakni Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pasar Produk, dan Ukuran Pasar. Hal ini menunjukkan kuatnya posisi Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi digital dan perdagangan nasional. Selain itu, pada tahun 2024 pilar Kestabilan Ekonomi Makro (4,57) dan Sistem Keuangan (4,11) juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang mencerminkan stabilitas kondisi makro ekonomi serta fiskal dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang merupakan elemen penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

Namun demikian, belum semua aspek IDSD menunjukkan performa yang optimal. Salah satu kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah penurunan skor pada pilar Institusi, dari 4,56 di tahun 2023 menjadi hanya 3,68 pada tahun 2024 dan berada di bawah nilai nasional. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek tata kelola, birokrasi, atau regulasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kapasitas kelembagaan di Jakarta. Selain itu, skor pada pilar Kapabilitas Inovasi (3,77) dan Kesehatan (4,06) juga masih perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi daya ungkit kedua aspek ini dalam Jakarta sebagai kota global. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta unggul dalam struktur ekonomi dan infrastruktur, aspek modal manusia dan sosial masih perlu diperkuat untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan.

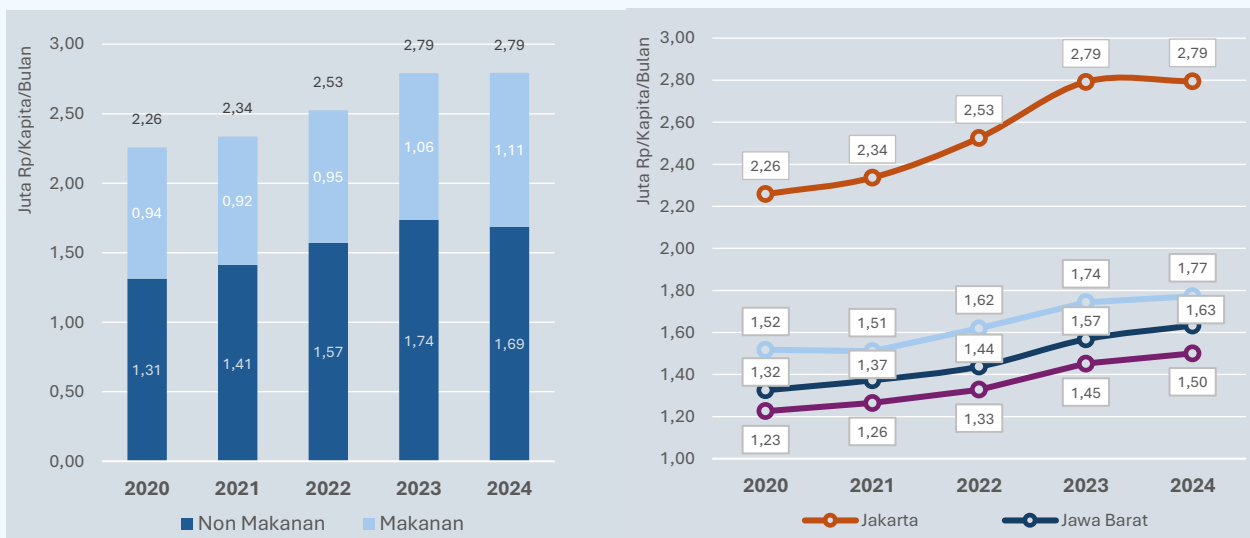


Gambar II.40 Persentase Angkatan Kerja Lulusan Perguruan Tinggi (D3–S3) Jakarta dan Sekitar Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Daya saing sumber daya manusia merupakan kemampuan tenaga kerja di suatu wilayah untuk bersaing secara produktif dan berkelanjutan dalam pasar kerja lokal, nasional, maupun global. Daya saing ini mencakup aspek keterampilan, pendidikan, etos kerja, inovasi, adaptabilitas, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah di tengah perubahan ekonomi. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas di suatu wilayah dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Selain itu dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan daya tarik investasi melalui pasar kerja yang lebih kompetitif. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas adalah persentase angkatan kerja dengan pendidikan tinggi. Pada kurun waktu 2020–2024 nilai indikator ini mengalami fluktuasi pada rentang 20,28% hingga 25,78%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Jakarta selalu bersaing dengan Yogyakarta sebagai wilayah dengan nilai indikator tertinggi. Persentase angkatan kerja dengan pendidikan tinggi di Jakarta pada akhir periode ini, meskipun masih relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain namun memiliki kecenderungan yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya perbaikan di berbagai sektor untuk menarik lebih banyak sumber daya manusia dengan kualitas tinggi untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas ekonomi Jakarta.

Selanjutnya, daya saing sumber daya manusia juga tercermin dari kemampuan ekonomi penduduk yang cenderung meningkat sejalan dengan semakin tingginya kualitas penduduk produktif di suatu wilayah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi tiap penduduk, di mana semakin besar konsumsi rumah tangga menunjukkan semakin atraktif pasar barang dan jasa di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Jakarta pada periode 2020-2024 menunjukkan tren yang meningkat yang mencerminkan daya beli masyarakat Jakarta yang semakin tinggi. Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan pada periode tersebut sebesar 2,47 juta rupiah dan didominasi oleh pengeluaran non makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sudah melewati fase konsumsi subsisten (kebutuhan dasar) dan lebih banyak mengalokasikan pendapatan untuk layanan, transportasi, pendidikan, serta kebutuhan lain. Selama periode ini, pengeluaran untuk konsumsi non makanan terus tumbuh dengan laju pertumbuhan per tahun (CAGR) sebesar 5,47% atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih tetap terjaga meskipun kondisi perekonomian sempat memburuk pada saat Pandemi Covid-19, khususnya untuk konsumsi jasa dan barang non makanan. Lebih lanjut, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di sekitar Jakarta dan Nasional, pengeluaran per kapita Jakarta juga menjadi yang tertinggi. Hal ini mencerminkan bahwa Jakarta memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah sekitar dilihat dari sisi kemampuan beli masyarakat. Perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta dan provinsi sekitarnya pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

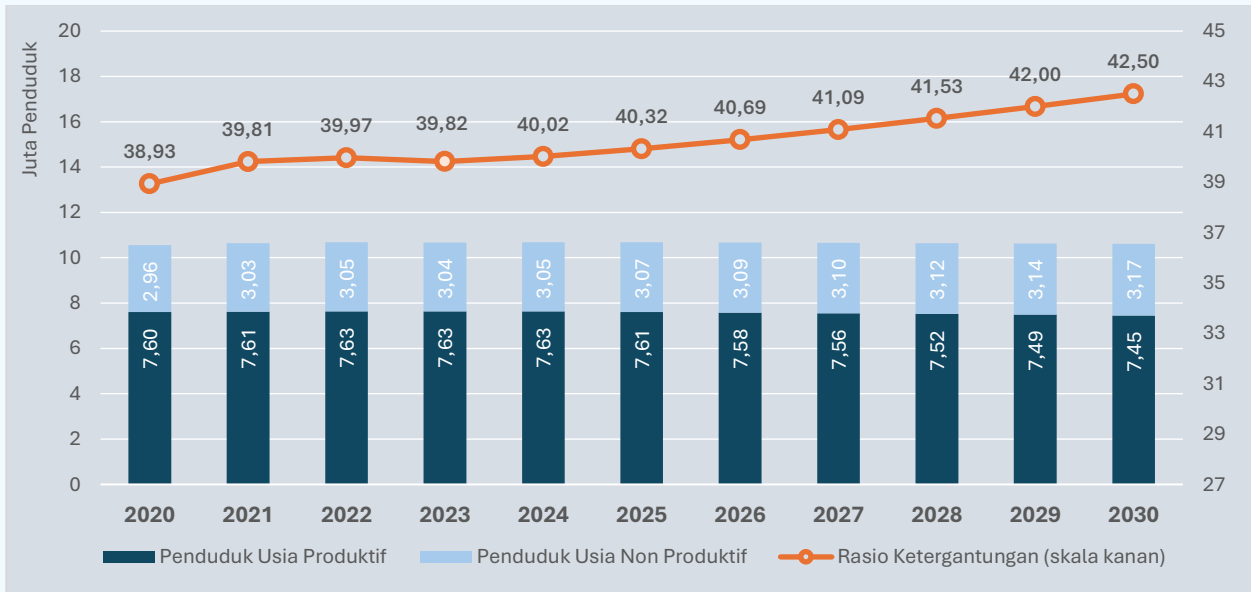


Gambar II.41 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selanjutnya, daya saing sumber daya dari suatu daerah juga dipengaruhi oleh seberapa besar porsi penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan penduduk dapat digunakan untuk melihat gambaran perbandingan penduduk produktif dengan non produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini berimplikasi pada beban ekonomi penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif yang lebih kecil.

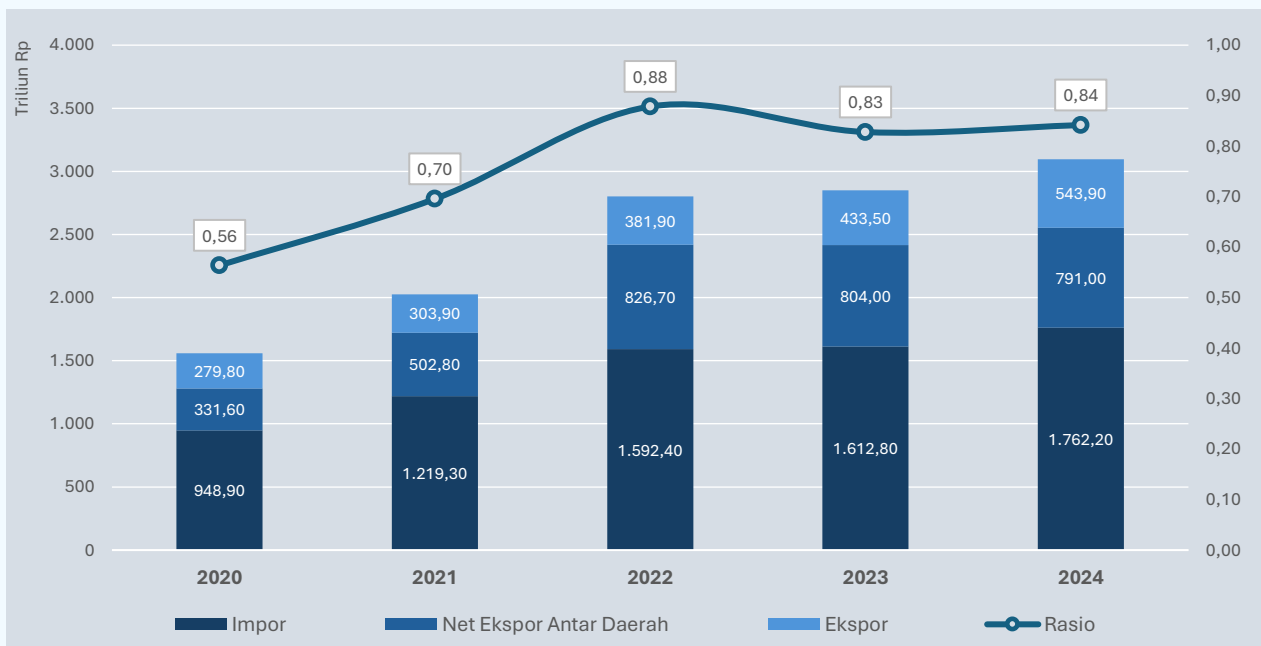
Berdasarkan proyeksi penduduk dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, rasio ketergantungan Jakarta memiliki tren yang meningkat dari sebesar 38,93 di tahun 2020 menjadi 42,50 di tahun 2030. Pada tahun 2030, dari 100 orang usia produktif akan menanggung ~43 orang usia tidak produktif, yaitu usia di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Peningkatan rasio ketergantungan ini berimplikasi langsung terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan beban ekonomi keluarga dan memperbesar tekanan terhadap sistem layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kondisi ini menuntut adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan produktivitas penduduk usia produktif, agar mereka mampu menopang kebutuhan tanggungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ketergantungan penduduk Jakarta dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar II.42 Rasio Ketergantungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020–2030

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

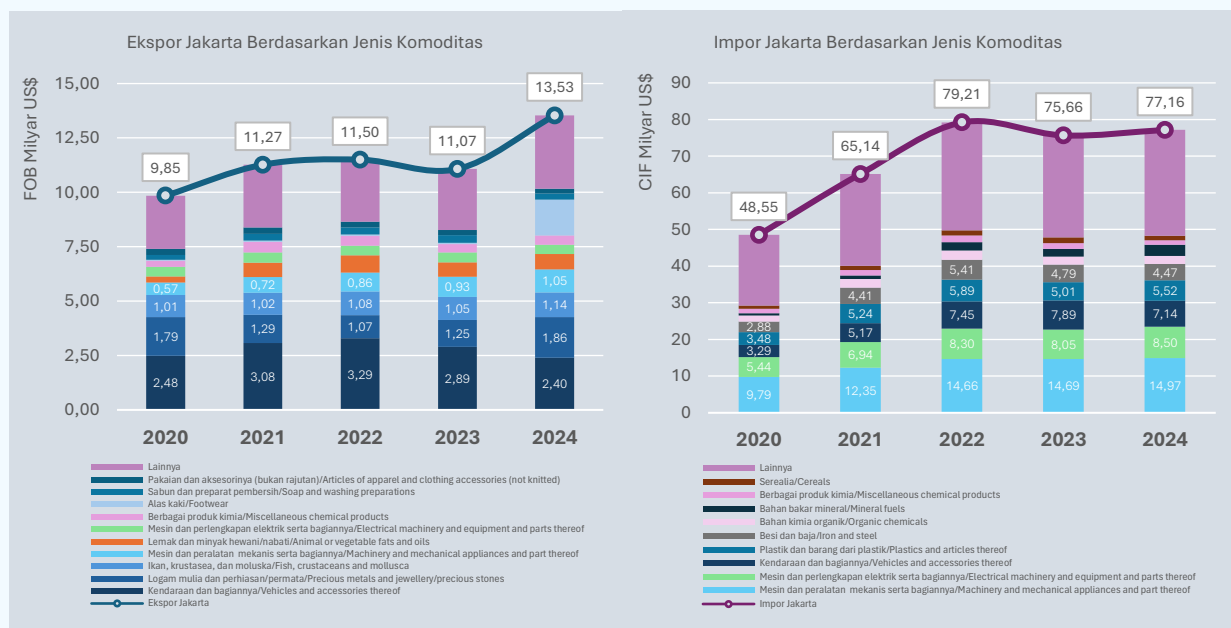
Keterbukaan ekonomi menggambarkan sejauh mana suatu wilayah terhubung dan berinteraksi secara ekonomi dengan wilayah lain, baik itu dalam bentuk perdagangan, investasi, maupun mobilitas tenaga kerja. Pada bagian ini, keterbukaan ekonomi secara khusus dilihat berdasarkan aspek perdagangan yang diukur menggunakan proporsi dari ekspor dan impor terhadap PDRB. Perkembangan rasio ekspor-impor terhadap PDRB Jakarta pada tahun 2020–2024 memiliki tren yang meningkat di awal periode dan cenderung stagnan di akhir seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.43 Rasio Ekspor-Impor Terhadap PDRB Ekonomi Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2025

Perekonomian Jakarta yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan serta perannya sebagai hub perdagangan nasional menyebabkan proporsi impor dan ekspor antar daerah maupun luar negeri terhadap PDRB memiliki nilai yang tinggi. Nilai rasio ini pada awal periode relatif lebih kecil karena aktivitas ekspor dan impor melalui Jakarta mengalami penurunan yang signifikan, terutama akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Total nilai ekspor dan impor, baik dalam skala internasional maupun antar daerah, mengalami penurunan drastis sebesar 25%, dari Rp2.094 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1.560 triliun pada tahun 2020. Dampak ini juga tercermin dalam kontribusi ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta, yang menurun cukup drastis dari 74,37% menjadi 56,38% pada tahun yang sama. Penurunan tajam ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi sektor perdagangan sebagai akibat dari pembatasan mobilitas, gangguan rantai pasok, serta melemahnya permintaan pasar global dan domestik. Nilai rasio ini mengalami peningkatan seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian pasca Pandemi Covid-19, dimana secara rata-rata pada tahun 2022–2024 nilai rasio ini telah kembali pada tingkat sebelum pandemi yaitu sebesar 0,85. Lebih lanjut, tingginya keterbukaan ekonomi Jakarta dari sisi perdagangan juga berimplikasi bahwa infrastruktur perdagangan baik fisik maupun non fisik memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan menjaga keandalan distribusi barang dan jasa.



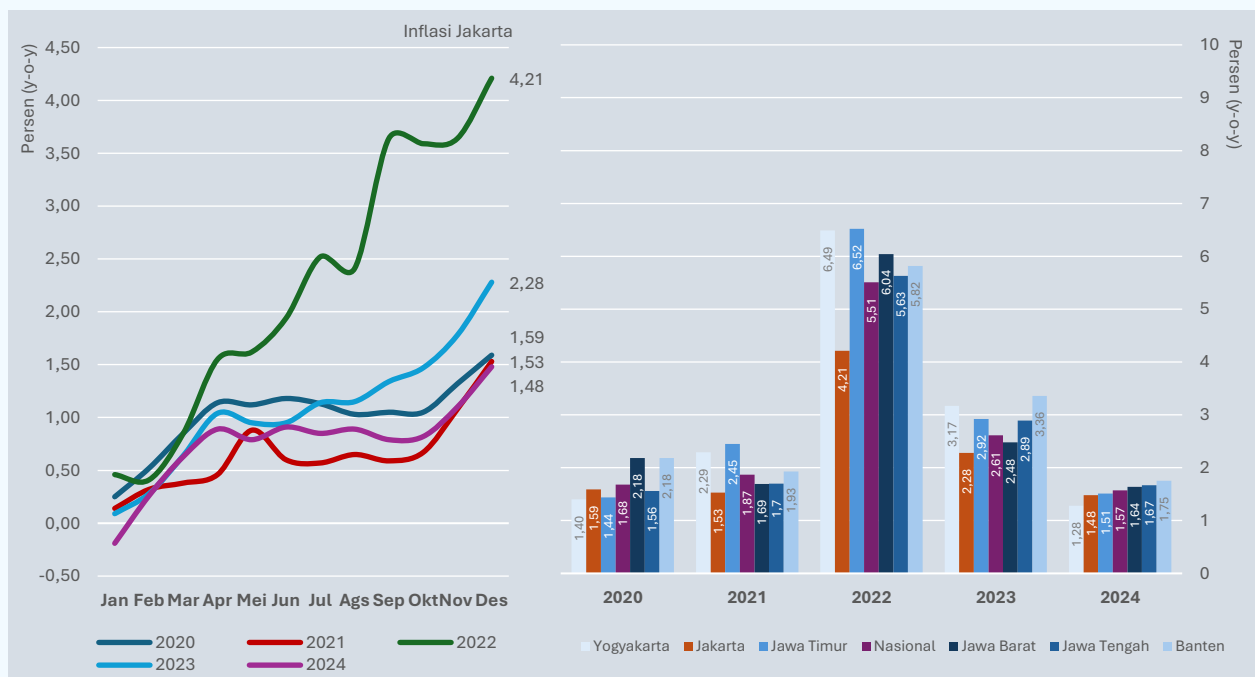
Gambar II.44 Ekspor dan Impor Jakarta Berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan perdagangan Jakarta tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai ekspor yang disertai dengan pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi, sehingga menciptakan defisit neraca perdagangan yang semakin melebar. Perkembangan ini mencerminkan struktur ekonomi Jakarta yang sangat tergantung pada impor, terutama dalam hal barang modal dan barang antara. Komposisi ekspor Jakarta memperlihatkan ketergantungan pada beberapa komoditas utama, di antaranya kendaraan dan bagiannya, logam mulia serta perhiasan, hasil perikanan, serta lemak dan minyak nabati. Ekspor produk perikanan serta lemak dan minyak nabati tumbuh relatif stabil, yang menunjukkan potensi sektor berbasis sumber daya alam. Menarik untuk dicermati adalah lonjakan ekspor alas kaki pada tahun 2024 yang meningkat hampir 30 kali lipat dari tahun sebelumnya, yang dapat menjadi indikator ekspansi produksi padat karya di kawasan Jakarta atau efek dari relokasi industri manufaktur global.

Di sisi lain, struktur impor Jakarta sangat didominasi oleh barang modal dan input industri. Mesin dan peralatan mekanis serta perlengkapan listrik mencakup porsi terbesar dari total impor. Peningkatan ini menunjukkan tingginya ketergantungan Jakarta terhadap teknologi dan peralatan produksi luar negeri, baik utamanya untuk keperluan manufaktur maupun infrastruktur. Selain itu, komoditas impor lainnya seperti kendaraan dan bagiannya, plastik dan produk turunannya, serta besi dan baja juga menunjukkan volume yang besar dan konsisten. Sementara impor bahan bakar mineral dan sereal juga meningkat, yang mengindikasikan kerentanan terhadap gejolak harga global, terutama pada sektor energi dan pangan.

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat dalam meningkatkan daya saing suatu daerah, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan usaha, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan para pelaku ekonomi memiliki kepastian untuk berusaha dan berinovasi, yang pada gilirannya mendorong produktivitas dan efisiensi kota. Inflasi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan stabilitas ekonomi makro, karena mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam perekonomian. Tingkat inflasi yang stabil dan terkendali menunjukkan bahwa harga-harga relatif tidak bergejolak, sehingga menciptakan kepastian bagi rumah tangga dalam merencanakan konsumsi, serta bagi dunia usaha dalam menetapkan harga dan biaya produksi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi atau tidak stabil dapat menggerus daya beli masyarakat, memperburuk ketimpangan sosial, serta menimbulkan ketidakpastian investasi. Perkembangan inflasi tahunan Jakarta dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi pada periode 2020–2024 seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Gambar II.45 Inflasi Jakarta, Provinsi di Jawa, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik inflasi tahunan (year-on-year) Jakarta menunjukkan trajektori yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, inflasi meningkat tajam dan mencapai puncaknya di bulan Desember sebesar 4,21%, mencerminkan tekanan harga yang cukup tinggi akibat pemulihan pasca-pandemi serta gangguan rantai pasok global yang juga berpengaruh terhadap rantai pasok nasional. Kemudian pada tahun 2023 tren inflasi terlihat lebih moderat, ditutup pada 2,28% yang menandakan mulai stabilnya kondisi harga secara umum. Inflasi berangsur turun hingga akhir tahun 2024, dimana inflasi berada pada level 1,48%. Kondisi inflasi yang secara umum mengalami peningkatan di akhir tahun berimplikasi pada perlunya menjaga kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga di tengah tekanan global dan domestik, terutama pada komoditas pangan dan energi.

Lebih lanjut, dari grafik perbandingan inflasi tahunan antar wilayah di Pulau Jawa dan nasional terlihat bahwa inflasi Jakarta cenderung lebih rendah dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Pulau Jawa, terutama pada tahun-tahun dengan tekanan inflasi tinggi seperti 2022 dan 2023. Dalam konteks daya saing daerah, stabilitas inflasi Jakarta ini menjadi keunggulan relatif dengan fondasi ekonomi yang lebih tahan terhadap tekanan eksternal maupun domestik.

Tabel II. 10 Indikator Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	N/A	N/A	4,01	3,97	4,09
2	Jumlah Angkatan Kerja dengan Pendidikan Terakhir D3–S3	Orang	2.569.523	2.651.049	2.752.774	2.823.851	2.768.052
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	18.549.069	19.244.458	19.915.512	19.982.171	20.994.394
4	Persentase Angkatan Kerja dengan Pendidikan Tinggi (D3–S3)	Persen	20,28	20,48	23,07	25,78	20,84
5	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Rupiah/ Kapita/Bulan	2.336.429	2.336.429	2.525.347	2.791.716	2.794.485
6	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga	Rupiah/ Kapita/Bulan	1.313.304	1.412.497	1.572.026	1.735.820	1.686.257
7	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Rupiah/ Kapita/Bulan	2.257.991	2.336.429	2.525.347	2.791.716	2.794.485
8	Nilai Nominal Ekspor Luar Negeri Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun Rupiah	279,80	303,90	381,90	433,50	543,90
9	Nilai Nominal Impor Luar Negeri Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun Rupiah	948,90	1.219,30	1.592,40	1.612,80	1.762,20
10	Nilai Net Ekspor Antar Daerah	Triliun Rupiah	331,60	502,80	826,70	804,00	791,00
11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun Rupiah	2.767,30	2.912,90	3.188,50	3.443,00	3.679,40
12	Persentase Ekspor + Impor terhadap PDRB	Persen	0,56	0,70	0,88	0,83	0,84
13	Proporsi PDRB Industri Pengolahan	Persen	11,38	12,28	12,27	11,87	11,49
14	Proporsi PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	4,16	4,36	4,51	4,68	4,85
15	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	10,10	10,31	10,38	10,51	10,63*
16	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,92	2,93	2,93	3,43	3,56
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,81	62,63	63,08	65,21	65,10
18	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	N/A	58,68	60,51	80,98	80,18
19	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	50,73	55,11	58,47	56,42	DBR
20	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	N/A	N/A	N/A	20,95	DBR
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	2,95	4,43	N/A	N/A	N/A
22	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	7,46	7,66	7,64	7,73	DBR
23	Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	35,03	34,37	34,54	34,25	34,11
24	Ekspor Barang dan Jasa	Miliar Dollar	9,87	11,22	11,52	11,07	13,53
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	1,15	1,19	1,26	1,13	1,20

*Data berdasarkan perhitungan PDRB Tahun 2024 Semester I

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

C. Profil Pelayanan Umum

Aspek kinerja pelayanan umum diklasifikasikan ke dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta penunjang urusan pemerintah. Penggunaan dan penjabaran data kinerja pelayanan umum berfungsi untuk memberikan gambaran terkait kondisi aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat.

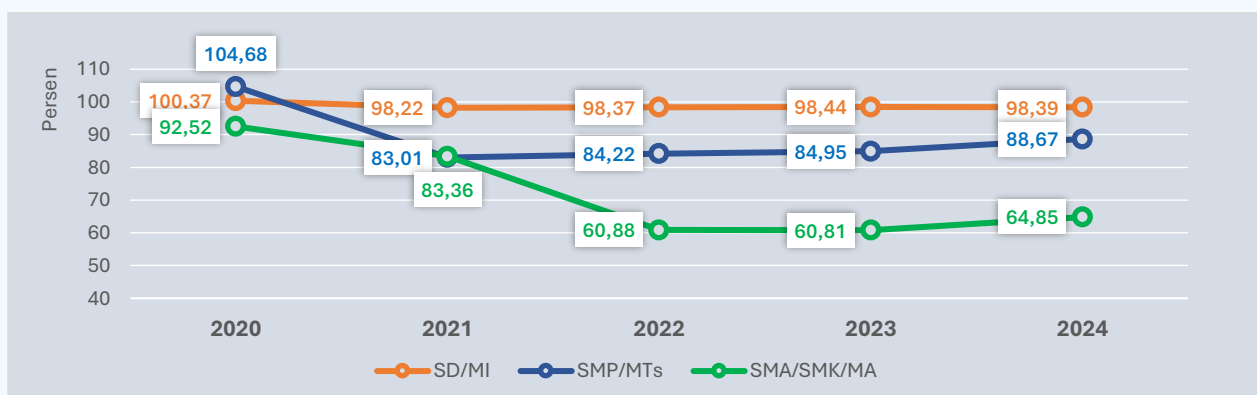
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional termasuk jaminan setiap warga negara usia sekolah dapat menikmati pendidikan. Jakarta dengan bentuk kekhususan administratifnya memiliki wewenang menyelenggarakan pendidikan di seluruh jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan tingkat menengah.

Fokus penyelenggaraan urusan pendidikan di Jakarta salah satunya diarahkan pada pemerataan akses pendidikan yang diukur dengan indikator antara lain persentase angka partisipasi sekolah; persentase angka partisipasi murni; dan persentase angka putus sekolah. Hingga tahun 2024 angka partisipasi sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs sudah hampir mencapai 100 persen, namun demikian capaian angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMA/SMK/MA masih tertinggal jauh dengan capaian sedikit di bawah 80 persen. Angka tersebut menunjukkan masih ada sekitar 20% anak usia 16-18 tahun yang seharusnya bersekolah di SMA, saat ini sedang tidak bersekolah. Untuk mengatasi hal tersebut selama ini telah dialokasikan anggaran yang besar untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tanpa memberatkan peserta didik. Kebijakan tersebut antara lain seperti penyaluran bantuan operasional untuk satuan pendidikan maupun bantuan personal untuk peserta didik yaitu KJP.

Fokus berikutnya yaitu terkait mutu pendidikan yang diukur dengan indikator antara lain persentase kelulusan; rata-rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah; dan persentase guru profesional. Seorang guru atau tenaga pendidik dapat dianggap profesional setelah mampu melewati uji kompetensi guru, saat ini di Jakarta tidak sampai 50% dari total pendidik yang memenuhi kualifikasi tersebut hal ini menunjukkan kapasitas belajar mengajar yang belum dapat memberikan kepastian terhadap kualitas yang dihasilkan. Selanjutnya untuk memastikan proses belajar dan mengajar dapat terlaksana dengan semestinya, fasilitas penunjang pendidikan juga harus tersedia dan sesuai standar. Hal ini diukur melalui indikator antara lain persentase sekolah terakreditasi A; persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan persentase sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Capaian terendah terkait akreditasi A adalah pada tingkat SMK yang dengan kurikulum vokasi menuntut ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang lebih ekstensif dari sekolah umum.



Gambar II.46 Angka Partisipasi Murni Tiap Jenjang Sekolah di Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2025

Tabel II.11 Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	100,37	98,22	98,37	98,44	98,39
2	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	104,68	83,01	84,22	84,95	88,67
3	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	92,52	83,36	60,88	60,81	64,85
4	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,18	0,006	0,1	0,11	DBR
5	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,38	0,002	0,08	0,02	DBR
6	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	Persen	0,12	0,01	0,14	0,05	DBR
7	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	Nilai	81,5	82,51	100	DBR	DBR
8	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen	N/A	67,58	80,57	81,95	85,88
9	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persen	N/A	60,17	64,1	65,24	78,19
10	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	Nilai	80,16	80,61	83,55	DBR	DBR
11	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	Nilai	81,31	82,82	84,15	DBR	DBR
12	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	Nilai	80,28	79,15	82,24	DBR	DBR
13	Persentase Guru Profesional	Persen	1,02	1,02	34,29	87,49	91,46
14	Persentase Sekolah Jenjang SD/MI Terakreditasi A	Persen	81,88	80,66	80,91	89,69	DBR
15	Persentase Sekolah Jenjang SMP/MTs Terakreditasi A	Persen	67,92	67,01	67,86	86,23	DBR
16	Persentase Sekolah Jenjang SMA/MA Terakreditasi A	Persen	78,62	77,51	78,27	93,74	DBR
17	Persentase Sekolah Jenjang SMK Terakreditasi A	Persen	47,40	47,49	49,20	75,83	DBR
18	Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri	Siswa	526.084	534.884	557.616	466.613	373.084
19	Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta	Siswa	323.207	324.580	291.509	207.986	160.565
20	Jumlah Seluruh Penerima KJP	Siswa	849.291	859.468	803.121	674.599	533.649
21	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	90,40	91,19	91,19	DBR	DBR
22	Persentase Sekolah yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	Persen	55,18	100	100	100	100
23	Jumlah Anak Usia 4-18 Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus (APS)	Persen	N/A	N/A	N/A	47,83	47,83
24	Jumlah Warga Negara Usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	81,29	93,96	98,96	99,09	98,98
25	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	3,73	28,6	10,94	17,75	18,37
26	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	33,13	28,44	57	77,52	79,61
Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Pendidikan							
27	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Persen	99,64	99,53	99,44	99,49	99,35
28	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	Persen	98,34	98,68	97,95	98,17	98,14
29	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	Persen	72,11	72,32	72,10	72,50	79,81

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2025

b. Kesehatan

Sama halnya dengan urusan pendidikan, urusan kesehatan juga merupakan amanat nasional penyelenggaraan negara. Tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Jakarta memiliki banyak kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan di daerahnya termasuk diantaranya urusan tenaga kesehatan, fasilitas dan infrastruktur kesehatan, pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, hingga bina pengawasan pengobatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat diantaranya diukur melalui: Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Persalinan, Neonatal, dan Balita lalu Cakupan Penanganan Kasus, Tingkat Kecukupan Gizi, dan Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan.

Walau capaian beberapa indikator layanan kesehatan pada tahun 2024 telah mencapai angka 100%, namun permasalahan mengenai prevalensi stunting di Jakarta masih begitu tinggi pada angka 17,2%. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menekan angka prevalensi stunting dengan berbagai cara, antara lain pemberian Makanan untuk Ibu Hamil KEK, pemberian tablet tambah darah/ *Multiple Micronutrient Supplementation* (MMS) selama masa kehamilan, makanan bergizi seimbang pada ibu hamil, pemeriksaan kehamilan selama masa kehamilan, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, praktik inisiasi menyusui dini, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita, penambahan asupan gizi Balita, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri, skrining anemia kepada remaja putri, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pendampingan masing-masing kelompok sasaran, serta berbagai upaya lainnya yang dilakukan untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan kelompok sasarannya. Capaian kinerja indikator urusan kesehatan lainnya dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.12 Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	96,1	99,18	98,82	99,29	100,07
2.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	99,12	99,51	100	100	100
3.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	99	99,5	100	100,40	102,32
4.	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	96,4	99,18	99,55	100,32	101,28
5.	Angka Kematian Ibu tiap 100.000 Kelahiran Hidup	Kematian	68,70	73,20	74,8	43,5	37,86
6.	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	83,64	86,55	100	100	100
7.	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	94,37	101,1	98,37	99,47	99,59
8.	Cakupan Desa/ Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	88,23	95,93	109,85	102,65	100,19
10.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	99,4	100	99,54	99,68	100
11.	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	Persen	59,16	97,57	92,42	91,44	89,62
12.	<i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP) Rate Per 100.000 Penduduk < 15 Th	Persen	2,11	2,1	6,52	8,03	8,08
13.	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	Kasus	100	100	25.061	34.323	41.032
14.	Penderita DBD Yang Ditangani	Kasus	100	100	100	100	100
15.	Penemuan Penderita Diare	Kasus	67,78	100	98,78 (90.101)	197,71 (195.604)	300,79 (194.506)
16.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Di Kabupaten/Kota	Kasus	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	Persen	N/A	16,8	14,8	17,6	17,2
18.	Prevalensi <i>Wasting</i> (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.	Persen	N/A	6,9	8	7,2	7,4
19.	Indeks Khusus Penanganan Stunting	Persen	73,7	74,3	72,9	73,9	N/A
20.	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah	78	78	78	78	77
Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Kesehatan							
21.	Jumlah Warga Negara Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
22.	Jumlah Warga Negara Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
23.	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	96,62	99,18	99,91	99,33	100,07
24.	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	97,34	99,48	100	100	102,32
25.	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	98,26	101,16	100	99,51	99,59
26.	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	8,23	95,93	100	100	100,19
27.	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Layanan Kesehatan	Persen	59,16	97,57	100	99,5	100,27
28.	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	38,59	99,15	100	100	100
29.	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	63,47	97,43	100	100	100
30.	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	41,02	107,15	100	100	101,6
31.	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	86,06	103,77	100	100	102,1
32.	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Yang Terlayani Kesehatan	Persen	118,31	85,94	100	100	100
33.	Jumlah Warga Negara Terduga <i>Tuberculosis</i> Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Persen	100	106,65	100	100	103
34.	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Yang Mendapat Layanan Kesehatan	Persen	118,4	105,16	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Jakarta, 2025

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari sub urusan jalan, sub urusan bangunan gedung, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan penataan ruang. Sub urusan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menegaskan bahwa peran Pemerintah Daerah mencakup ruang lingkup perencanaan penganggaran, pembangunan pemeliharaan, pengelolaan aset, pengawasan pengendalian, penegakan hukum, dan penyediaan informasi edukasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan aksi-aksi yang diperlukan untuk menjaga tingkat pelayanan jalan, seperti penataan dan pemeliharaan jalan dengan kondisi mantap, penyediaan jalur pejalan kaki, serta penyempurnaan jalan yang memiliki Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Capaian persentase jalan dengan kondisi mantap yang menyentuh angka 97,3 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa hampir seluruh jalan di Jakarta telah memiliki kondisi perkerasan yang baik. Namun demikian, jalan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung saat ini baru 6,64% sehingga perlu ada peningkatan jaringan utilitas sebagai sarana penunjang. Walaupun penambahan luas jalur pejalan kaki telah mencapai 68.519,58 m² pada tahun 2024, penyediaan jalur pedestrian tetap perlu dilakukan secara konsisten.

Sub urusan bangunan dan gedung diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengamanatkan peran pemerintah daerah untuk penyusunan peraturan daerah, perencanaan pengendalian, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengawasan penertiban, pemeliharaan pelestarian, dan penanganan gedung tidak layak. Pada tahun 2024, baru 9,1% gedung yang ramah disabilitas dan mengimplimentasikan kaidah-kaidah bangunan gedung hijau. Sehingga, perlu dilakukan peremajaan maupun pembangunan gedung baru.

Selanjutnya, sub urusan sumber daya air merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dimana pemerintah daerah berperan antara lain dalam perencanaan pengelolaan, pemanfaatan pengaturan penggunaan air, penegakan hukum, konservasi pelestarian, serta penanggulangan bencana dan krisis air. Fokus utama pada sub urusan ini terkait dengan tingkat *non-revenue water* (NRW) yang masih selalu berada di atas 45% sejak tahun 2020. Penurunan NRW perlu diupayakan lebih kuat ke depannya untuk peningkatan pelayanan air minum aman di DKI Jakarta.

Tabel II.13 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

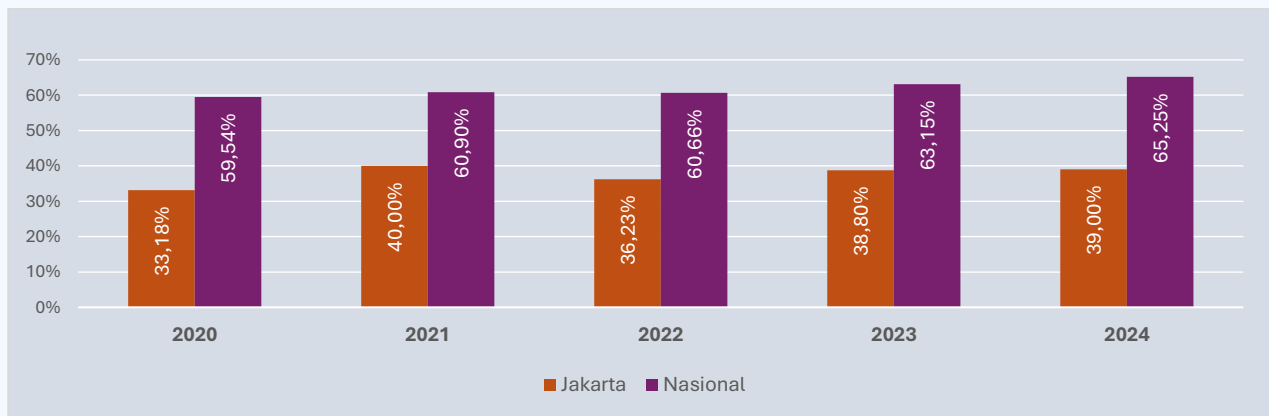
No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap	Persen	92,18	96,75	97,19	97,27	97,3
2.	Penambahan Luas Jalur Pejalan Kaki	m ²	8.851,41	53.541,43	110.449,26	111.194,7	68.519,58
3.	Rasio Jalan yang Dilengkapi Fasilitas Pendukung	Persen	N/A	N/A	N/A	6,29	6,64
4.	Persentase Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas	Persen	N/A	N/A	N/A	8,32	9,1
5.	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau	Persen	N/A	N/A	N/A	8,32	9,1
6.	<i>Non-Revenue Water</i> /NRW	Persen	45,06	46,67	45,74	45,62	45,88
7.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk (3,75m ² per satuan makam, penghitungan didapat dari jumlah luas TPU di Jakarta dibagi dengan jumlah penduduk Jakarta)	Persen	0,584	0,581	0,580	0,578	0,577
8.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	64,84	66,04	65,41	66,73	70,03
9.	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	Persen	64,33	90,51	85	98,35	99,84

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
10.	Produksi Air	Juta m ³	624	633,34	635,82	656,4	663,89
11.	Kubikasi Air Terjual	Juta m ³	342,6	337,76	345	356,96	359,27
12.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persen	14,7	18,39	20,59	21,19	21,78

Sumber: Dinas Cipta Karya Provinsi DKI Jakarta, 2025; Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, 2025; Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2025; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, 2025

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi landasan hukum untuk layanan umum urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ruang lingkup tugas dan fungsi dari pemerintah daerah untuk urusan ini adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah mengenai perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijakan nasional, menyediakan tanah dan infrastruktur dasar untuk pembangunan perumahan rakyat, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah masing-masing. Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Jakarta berfokus pada kualitas hunian dan kawasan permukiman serta pemerataan rumah layak huni. Secara historis selama 5 (lima) tahun terakhir, kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menunjukkan hasil fluktuatif yang mencerminkan kompleksitas isu hunian di Jakarta.



Gambar II.47 Grafik Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kondisi kurang ideal terlihat dari data rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pada grafik dapat terlihat fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai capaian Jakarta yang masih di bawah 50% menunjukkan bahwa hunian layak dan terjangkau masih sulit untuk diakses. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan strategi dan kebijakan yang telah diimplementasikan selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, penanganan Rukun Warga (RW) kumuh dari tahun 2018 hingga tahun 2024 telah diupayakan mencapai sejumlah 281 RW dengan luasan total 6.398,86 ha dari total 445 RW kumuh yang teridentifikasi dari data BPS tahun 2017. Penanganan RW kumuh dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya perbaikan sarana-prasarana seperti saluran air, jalan, drainase, serta pembangunan MCK komunal dan renovasi balai warga. Di sisi lain, terdapat 5 Lokasi RW Kumuh yang tidak dapat ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara langsung karena kewenangan ataupun kepemilikan lahan berada pada pihak swasta.

Tabel II.14 Realisasi Penanganan RW Kumuh Sampai Tahun 2024

No	Suku Dinas PRKP	RW Kumuh	Luas (ha)	Penanganan 2018-2024	Luas (ha)	Lokasi Tidak Ditangani	Luas (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
1.	Jakarta Pusat	98	701,49	50	267,45	0	0
2.	Jakarta Utara	80	3.789,64	60	2.710,29	0	0
3.	Jakarta Barat	92	2.552,28	75	1.444,38	1	5,54
4.	Jakarta Selatan	90	1.669,03	43	828,13	2	17,70
5.	Jakarta Timur	78	1.955,48	46	1.105,42	2	128,67
6.	Kepulauan Seribu	7	49,34	7	43,18	0	0
Total		445	10.717,26	281	6.398,86	5	151,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat provinsi terdiri atas: (a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan (b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Selengkapnya capaian kinerja indikator tersebut dan indikator lainnya tercantum pada tabel berikut.

Tabel II.15 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	Persen	93,04	95,17	92,79	93,5	94,01
2.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	99,84	99,86	98,81	99,42	99,96
3.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Persen	33,18	40,00	36,23	38,80	39,00
Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Perumahan Rakyat							
4.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100
5.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2025

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (trantibumlinmas), meskipun urusan tersebut tidak diatur tersendiri dengan regulasi terpisah. Penyelenggaraan layanan trantibumlinmas di daerah diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, aman, dan terlindungi dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman terhadap kondisi stabilitas daerah termasuk bencana. Berbagai indikator pembangunan dan pelayanan publik digunakan untuk mengukur capaian trantibumlinmas, termasuk indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti persentase warga yang memperoleh layanan penegakan hukum Perda/Perkada, layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pencapaian indikator-indikator tersebut menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan trantibumlinmas yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko sosial dan bencana. Keberhasilan ini tercermin, antara lain dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3, pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran yang mencapai 100 persen, serta layanan penyelamatan dan evakuasi yang hampir sepenuhnya menjangkau seluruh warga terdampak.

Tabel II.16 Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	64,02	60,43	62,58	61,31	59,29
2.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,55	0,64	0,52	0,57	0,61
3.	Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen	95,84	93,92	92,72	94,61	100
4.	Jumlah Kejadian Kebakaran	Satuan Jumlah	1.505	1.535	1.691	2.286	1.969
5.	Persentase Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
6.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	69,95	61,14
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas							
7.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi	Persen	100	100	100	100	100
8.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100
10.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100
11.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	99,34	99,8	99,8	99,8	99,7

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2024; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2025

f. Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kesejahteraan sosial, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial. Secara umum, baik di tingkat nasional maupun daerah kesejahteraan sosial memiliki ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pemerintah daerah memiliki peran antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah mengenai kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan nasional, menyediakan pelayanan sosial dasar dan program-program pemberdayaan di tingkat lokal, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Kondisi pelayanan urusan sosial pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kinerja capaian Standar Pelayanan Minimal sudah baik di mana pada tahun 2024 mencapai 100% pada beberapa indikator, seperti Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti, Jumlah Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti, serta Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial. Capaian tersebut menggambarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup serius dalam menangani isu kesejahteraan sosial, namun diperlukan kebijakan atau

program yang berkelanjutan agar pelayanan urusan sosial di Jakarta tetap memiliki capaian yang baik. Tujuan utama perlindungan sosial adalah untuk mengurangi ketidakpastian serta memberikan rasa aman terhadap potensi risiko yang muncul akibat ancaman tertentu. Selain itu, perlindungan ini juga menjamin setiap individu untuk dapat hidup layak serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, perlindungan sosial dirancang dengan prinsip inklusif dan adil, sehingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan masyarakat rentan lainnya memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses layanan dan manfaat sosial.

Tabel II.17 Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	63,35	69,81	N/A	N/A	N/A
2.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	5,01	4,85	N/A	N/A	N/A
3.	Jumlah Keluarga Miskin yang Mandiri	Keluarga	2.496	4.815	N/A	N/A	N/A
4.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jiwa	4.576	5.513	5.241	7.345	5.985
Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Sosial							
5.	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	87,02	99,936	99,952
6.	Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	89,79	99,988	97,613
7.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	89,21	100	100
8.	Jumlah Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti	Persen	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi	Persen	100	100	100	N/A	N/A
10.	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	98,31	N/A	N/A
11.	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	N/A	N/A
12.	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	93,03	N/A	N/A
13.	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	100	100	99,44	N/A	N/A
14.	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	99,44	N/A	N/A
15.	Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	N/A	N/A	N/A	99,958	99,993
16.	Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2025

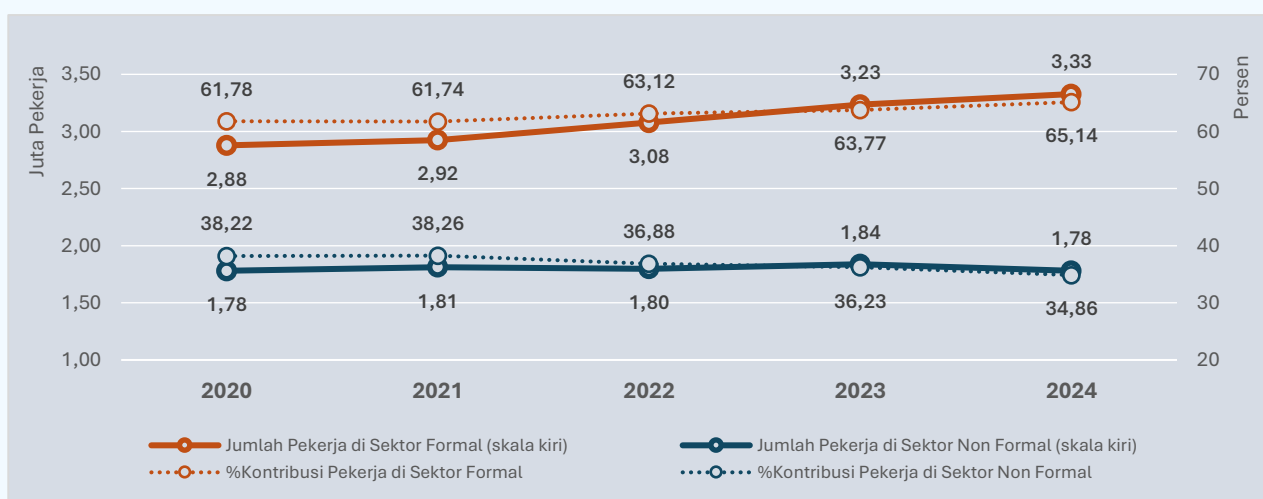
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral antara pusat dan daerah. Oleh karenanya, peran Pemerintah Daerah juga sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Unsur informasi ketenagakerjaan yang diperlukan sebagai basis perencanaan diantaranya penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan Industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Pada aspek makro, kondisi ketenagakerjaan dapat digambarkan antara lain melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kontribusi Tenaga Kerja di Sektor Formal.

Berdasarkan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya perkembangan yang positif dimana terjadi peningkatan dari sebesar 63,81% pada tahun 2019 menjadi sebesar 65,10% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa dari total penduduk usia produktif pada tahun 2024 terdapat 65,10% yang termasuk dalam angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa potensi suplai tenaga kerja di Jakarta terus mengalami peningkatan yang pada jangka panjang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomian. Sejalan dengan peningkatan ini terdapat juga peningkatan pada jumlah penduduk bekerja, dimana jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dan telah melampaui periode sebelum yang tercatat sebanyak 4,72 juta pekerja (2019) meningkat secara signifikan menjadi 5,10 juta pekerja pada tahun 2024. Peningkatan ini menyebabkan pada periode yang sama terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,21% atau telah turun sebesar 4,42% poin dibandingkan pada saat puncak pandemi dan berada di bawah kondisi sebelum pandemi yang tercatat sebesar 6,22%.

Selanjutnya, dalam menggambarkan nilai ekonomi yang dapat diciptakan oleh tiap tenaga kerja digunakan indikator produktivitas tenaga kerja. Indikator ini dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah tenaga kerja pada tahun berkenaan. Pada tahun 2024 tercatat tingkat produktivitas tenaga kerja Jakarta sebesar 421,13 juta rupiah/tenaga kerja/tahun atau meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 385,43 juta rupiah/tenaga kerja/tahun. Dilihat dari pertumbuhannya, nilai produktivitas tenaga kerja juga memiliki tren yang positif dimana pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 4,29%. Kemudian terkait dengan kualitas pekerjaan, secara umum kondisi tenaga kerja di Jakarta dapat dilihat berdasarkan kontribusi tenaga kerja di sektor formal dan non formal. Tenaga kerja di sektor formal cenderung memiliki kondisi yang lebih baik dari aspek kontrak kerja, jaminan sosial, dan kondisi kerja dibandingkan pada sektor non formal.



Gambar II.48 Distribusi Tenaga Kerja di Sektor Formal dan Non Formal di Jakarta Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Adapun distribusi tenaga kerja pada periode 2019–2024 dapat dilihat pada grafik di atas. Terlihat bahwa gejolak ekonomi karena pandemi telah mengubah proporsi tenaga kerja Jakarta, dimana terjadi kenaikan proporsi tenaga kerja sektor non formal dari sebesar 31,55% menjadi 38,22 (2020). Adapun hingga tahun 2024 proporsi ini tetap bertahan pada tingkat 34,86% meskipun terdapat tren peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor formal (3,33 juta) dan telah melampaui kondisi tahun 2019 (3,31 juta). Fenomena ini menunjukkan bahwa ke depannya masih diperlukan upaya dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja di sektor formal sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui peningkatan daya beli masyarakat. Secara umum kondisi ketenagakerjaan di Jakarta digambarkan oleh beberapa indikator seperti disajikan pada tabel realisasi kinerja urusan tenaga kerja di bawah ini.

Tabel II.18 Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Produktivitas Tenaga Kerja (Per Tenaga Kerja Per Tahun)	Juta Rupiah	385,43	392,38	401,12	404,43	421,13
2.	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	-1,05	1,80	2,23	0,82	4,29
3.	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Formal	Juta Pekerja	2,87	2,92	3,07	3,23	3,27
4.	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Non Formal	Juta Pekerja	1,78	1,81	1,79	1,83	1,78
5.	Jumlah Tenaga Kerja Berusaha Sendiri	Juta Pekerja	1,13	1,11	1,18	1,16	1,17
6.	Jumlah Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	Ribu Pekerja	241,34	254,02	195,35	248,45	283,99
7.	Jumlah Tenaga Kerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	Ribu Pekerja	252,53	254,88	242,45	284,95	193,58
8.	Jumlah Tenaga Kerja Bebas	Ribu Pekerja	150,49	192,03	176,90	141,80	128,71
9.	Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peserta	5.219. 240	4.965. 262	6.418. 194	7.461. 110	7.876. 819
10.	Jumlah Perusahaan yang menjalankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Satuan Jumlah	3.900	3.822	3.834	1.436	2.072
11.	Proporsi Lapangan Kerja Informal	Persen	38,22	38,26	36,88	36,23	36,31

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, 2025

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diamanatkan dalam peraturan perundangan yang terpisah. Urusan perlindungan anak tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan urusan pemberdayaan perempuan tidak memiliki Undang-Undang secara khusus namun diamanatkan dalam beberapa regulasi seperti, UU Penghapusan KDRT, UU Ketenagakerjaan, hingga UU Kesejahteraan Sosial. Sinergi antara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun keluarga Jakarta.

Pembangunan Jakarta tidak terlepas dari peran keluarga, sebagai satuan terkecil masyarakat. Untuk mendukung ketahanan keluarga pemerintah memberikan perhatian khusus kepada penanganan kasus kekerasan, utamanya kekerasan domestik. Capaian prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang angkanya menurun selama tiga tahun terakhir menjadi 18,91% di tahun 2024, begitu pun prevalensi kekerasan terhadap anak di Jakarta yang selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan menjadi 13,56% pada tahun 2024. Namun demikian, edukasi dan diseminasi informasi mengenai pencegahan serta layanan penanganan tindak kekerasan akan terus digencarkan. Upaya optimalisasi penanganan diwujudkan melalui penyediaan layanan komprehensif bagi korban KtP/A. Mulai dari penerimaan pengaduan, informasi, komunikasi, edukasi (KIE), pendampingan hukum, layanan psikososial, hingga rujukan pelayanan kesehatan dan rumah aman. Indikator lain seperti cakupan perlindungan perempuan dan anak, cakupan pemberdayaan perempuan, serta pembangunan kualitas lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.19 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	N/A	N/A	34,4	27,22	18,91
2.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Persen	N/A	N/A	44,32	23,56	13,56
3.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Persen	100	100	100	100	100
4.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah	20	26	27	33	36
5.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	47,47	47,34	46,62	50,12	50,24
6.	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	75,16	75,42	75,3	76,31	78,45
7.	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,21	0,194	0,32	0,256	0,147
8.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	N/A	N/A	N/A	58,12	61,6

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta, 2025

c. Pangan

Pengelolaan pangan merupakan bagian dari layanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pangan di Indonesia yang bertumpu pada prinsip kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah memiliki amanat dalam merencanakan sistem pangan yang berkelanjutan, memastikan ketersediaannya, mengembangkan produksi, mengantisipasi dan menanggulangi ancaman terhadap produksi pangan melalui kebijakan maupun teknologi, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Jakarta menjadikan urusan pangan sebagai aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warganya. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jakarta menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan dari 77,97 pada tahun 2020 kemudian mencapai 91,91 pada tahun 2024 yang mencerminkan stabilitas pasokan dan perbaikan sistem pendukung ketahanan pangan. IKP merupakan ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP disusun berdasarkan sejumlah indikator yang merepresentasikan tiga aspek ketahanan pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Sebagai bagian dari upaya perbaikan metodologi dalam pengukuran ketahanan pangan nasional, pada tahun 2025 sejumlah indikator baru telah ditambahkan ke dalam komposit IKP. Penambahan ini mencerminkan respons terhadap perkembangan konseptual dan kebutuhan untuk mengukur ketahanan pangan secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Dalam aspek ketersediaan pangan, indikator baru mencakup Rasio Ketersediaan Energi Per Kapita Per Hari terhadap Standar Kebutuhan dan Rasio Ketersediaan Protein Hewani Per Kapita Per Hari terhadap Standar Kebutuhan yang mencerminkan pentingnya kualitas nutrisi dalam ketersediaan pangan. Serta penambahan indikator Rasio Cadangan Pangan Beras Pemerintah (CBPD) yang dimiliki terhadap standar CBPD berdasarkan peraturan perundangan. Berdasarkan konversi perhitungan terbaru yang mengakomodasi perubahan dan penambahan indikator-indikator tersebut, skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 71,2.

Tabel II.20 Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i>	Persen	1,94	2,2	3,42	2,57	3,53

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	88	86,3	89,4	92,7	91,31
3.	Indeks Ketahanan Pangan*	Nilai	77,97	78,01	83,06	83,8	85,31
4.	Peningkatan Produksi Pangan Hortikultura	Ton	N/A	N/A	N/A	24,85	25,46
5.	Peningkatan Produksi Peternakan	Ton	N/A	N/A	N/A	22,4	24,97
6.	Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya (Produk Pertanian)	Persen	99,95	99,93	99,92	99,94	99,99

*Metode pengukuran lama

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta, 2025

Fokus utama Jakarta dalam pengelolaan pangan adalah memastikan kecukupan pangan dan bebas dari bahan berbahaya. Dalam lima tahun terakhir, pengawasan pangan di Jakarta menunjukkan tren positif, dengan 99,9% produk pangan bebas dari bahan berbahaya. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai kebijakan dan program strategis guna memastikan bahwa produk pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan berbagai inisiatif pengawasan pangan terpadu. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah inspeksi rutin di pasar tradisional dan modern, serta pengujian langsung terhadap sampel pangan untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya dan pengelola masing-masing pasar turut berperan dalam memperkuat pengawasan serta memastikan ketersediaan pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan telah diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dimana mengamanatkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Realisasi pembangunan pada aspek pertanahan digambarkan dengan indikator Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya yang mencapai angka 10% pada tahun 2024. Aspek pertanahan ini memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurang lengkapnya data dan dokumen pendukung untuk mendefinisikan bidang tanah. Untuk meningkatkan angka realisasi tersebut perlu dilakukan koordinasi intens dengan *stakeholder* terkait seperti Kementerian ATR/BPN serta pendataan rutin yang disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi.

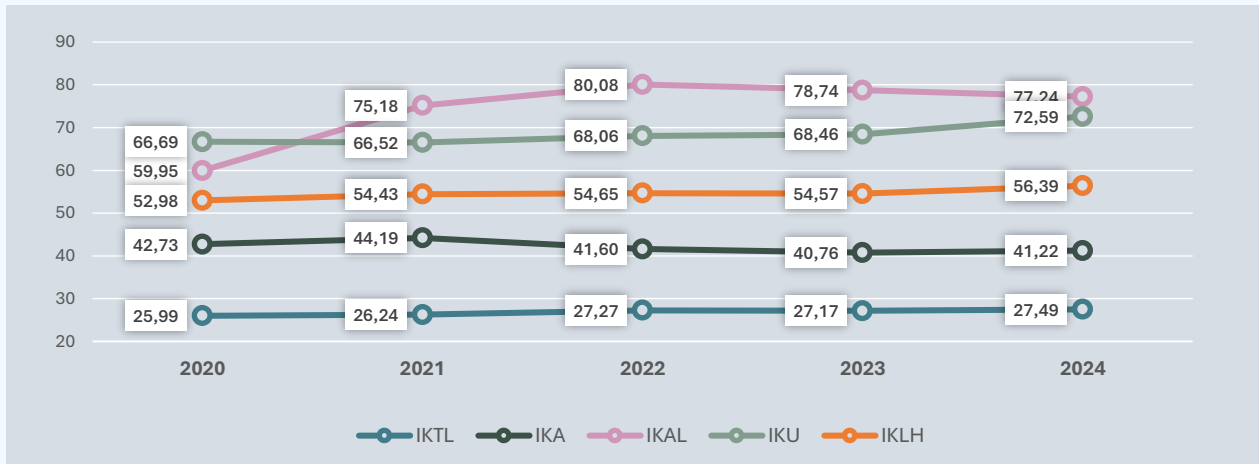
Tabel II.21 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	Persen	N/A	N/A	N/A	5	10

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta, 2024

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengendalian pencemaran menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk juga instrumen pengendalian seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen instrumen ekonomi lingkungan hidup. Jakarta memiliki tantangan yang besar dalam urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengendalian pencemaran karena hal ini merupakan hak warga negara untuk mendapatkan kualitas sumber daya lingkungan yang baik. Pada grafik di bawah dapat terlihat kondisi secara umum kualitas sumber daya lingkungan hidup di Jakarta.



Gambar II.49 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jakarta dan Komposisinya Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, 2025

Kondisi lingkungan hidup di Jakarta tergambarkan melalui capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, tidak ada perubahan signifikan kecuali pada kualitas air laut dan udara. Secara umum, kualitas air dan kualitas tutupan lahan masih memerlukan perbaikan karena capaiannya masih rendah. Kedua indeks ini dapat menjadi fokus agar meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Selain itu, perbaikan lingkungan hidup Jakarta juga ditunjang kinerja pelayanan pengelolaan persampahan. Meskipun angka persentase pengelolaan sampah menunjukkan hasil yang hampir sempurna, yaitu 99,65% pada tahun 2024, fakta bahwa sebagian besar timbulan sampah masih dikelola di TPST Bantargebang mengindikasikan bahwa Jakarta masih perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri di dalam kota.

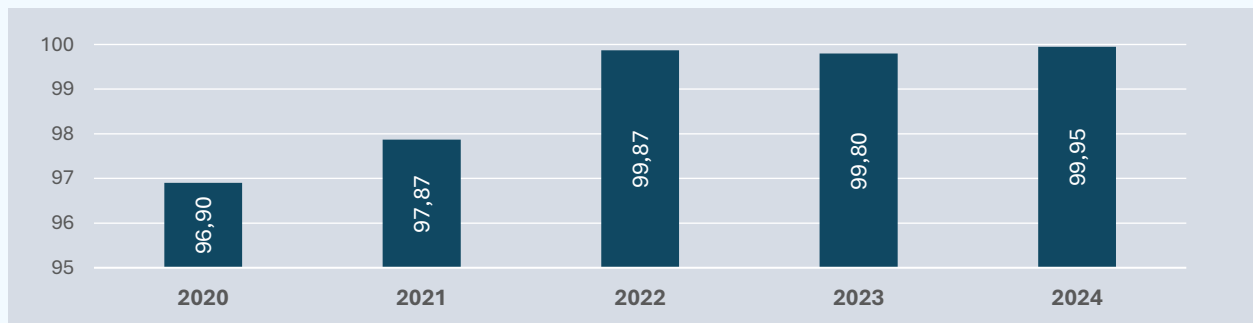
Tabel II.22 Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,94	54,43	54,65	54,57	56,39
2.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Persen	7,74	9,78	11,64	13,02	14,25
3.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan	Persen	16,55	25,7	26,9	25,4	25,9
4.	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,19	44,19	41,17	40,76	41,22
5.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	66,69	66,52	68,06	68,46	72,59
6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	25,99	26,25	27,07	27,17	27,49
7.	Indeks Kualitas Air Laut	Nilai	59,95	75,18	80,08	78,74	77,24
8.	Timbulan sampah yang ditangani	Ton	3.054.815,82	3.083.437,85	3.112.381,29	3.141.649,89	3.171.247,45
9.	Persentase pengelolaan sampah	Persen	98,16	99,19	99,78	99,75	99,65
10.	Persentase Penanganan Sampah	Persen	75,70	74,45	73,68	72,67	71,59
11.	Persentase Pengurangan Sampah	Persen	22,46	24,45	26,10	27,08	28,06
12.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2025

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi penting untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan.



Gambar II.50 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, 2023

Penyelenggaraan layanan kependudukan dan catatan sipil di Jakarta dapat dilihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap administrasi kependudukan yang secara umum sudah sangat baik sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Kondisi pelayanan administrasi kependudukan di Jakarta hampir mencapai 100%. Selain itu, terdapat beberapa indikator penunjang lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.23 Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Administrasi Kependudukan	Nilai	96,9	97,87	99,87	99,8	99,95
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	99,03	99,6	100	100	100
3.	Rasio Pasangan Berakta Nikah	Persen	61,52	71,36	83,78	84,85	88,09
4.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	99,72	99,64	99,29	99,92	99,97
5.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	99,18	99,95	100	99,95	99,94
6.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Persen	99,95	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, 2025

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator kinerja dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditujukan untuk mendorong kemandirian masyarakat, agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia secara optimal. Upaya yang diperlukan mencakup penguatan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, dalam mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Tabel II.24 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Rata-Rata	0,169	0,169	N/A	N/A	N/A
2.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah Rata-Rata	38,29	33,67	N/A	N/A	N/A
3.	Persentase Posyandu Aktif	Persen	99,91	87,75	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta, 2025

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Seperti halnya dengan administrasi kependudukan, proses pengendalian penduduk menjadi signifikan karena posisi penduduk sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Secara jangka panjang, pengendalian penduduk menjadi variabel kontrol terhadap pembangunan. Amanat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimana pemerintah daerah diamanatkan untuk menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; serta sosialisasi, advokasi, dan koordinasi. Dalam konteks Keluarga Berencana (KB), peran Pemerintah Daerah di antaranya meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi. Kondisi pelaksanaan layanan KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.25 Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Age Specific Fertility Rate umur 15-19 tahun	Persen	25	23,2	19,3	5,4	7,8
2.	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	59,51	60,32	59,16	60,8	42,3
3.	Rasio Akseptor KB	Persen	4,99	4,78	N/A	N/A	N/A
4.	Unmet Need	Persen	11,04	8,85	9,69	11,7	15,6

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta, 2025

i. Perhubungan

Urusan perhubungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Transportasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Menurut peraturan perundangan tersebut, peran pemerintah daerah antara lain penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, perencanaan pengembangan, regulasi dan pengawasan, hingga koordinasi dan integrasi dalam lingkup urusan perhubungan.

Jakarta terus mencatat peningkatan jumlah penumpang pada berbagai moda transportasi publik. Pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa penggunaan KRL Commuter Line melonjak dari 2,94 juta orang pada tahun 2020 menjadi 328,15 juta orang pada tahun 2024, sedangkan MRT Jakarta mencatat pertumbuhan dari 9,92 juta orang pada tahun 2020 menjadi 39,87 juta orang pada tahun 2024. Moda transportasi lain seperti TransJakarta juga mengalami kenaikan jumlah penumpang dari 280,27 juta orang pada tahun 2020 menjadi 372,72 juta orang pada tahun 2024. Kenaikan jumlah penumpang ini mencerminkan semakin tingginya preferensi masyarakat terhadap transportasi publik. Namun, lonjakan tersebut juga membawa tantangan bagi sistem transportasi Jakarta, terutama dalam peningkatan kapasitas infrastruktur, efisiensi operasional, dan pemerataan layanan.

Salah satu indikator yang mencerminkan tantangan adalah angka fatalitas kecelakaan angkutan umum yang mengalami penurunan dari 0,07% pada tahun 2020 dan akhirnya mencapai nol pada tahun 2023 dan tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan dalam sistem keselamatan transportasi, tetapi juga menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memastikan keamanan dan efisiensi operasional. Seiring dengan peningkatan jumlah perjalanan harian di berbagai moda transportasi, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah pengguna transportasi publik sejalan dengan peningkatan keselamatan bagi pengguna transportasi publik.

Tabel II.26 Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Public Transport Mode Share	Persen	8,2	14,76	18,45	18,86	22,19
2.	Jumlah Penumpang KRL Commuter Line	Juta Orang	2,94	126,73	213,07	290,89	328,15
3.	Jumlah Penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta	Juta Orang	9,92	7,18	19,77	33,49	39,87
4.	Jumlah Penumpang Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta	Juta Orang	0,48	0,32	0,68	1,03	1,22
5.	Jumlah Penumpang Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek	Juta Orang	-	-	-	-	13,87
6.	Jumlah Penumpang Kereta Api Jarak Jauh	Juta Orang	2,08	3,11	8,03	8,04	10,75
7.	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut (Tj. Priok)	Ribu Orang	119,22	130,99	353,00	433,43	464,04
8.	Jumlah Penumpang Angkutan Pesawat Udara (HLP)	Juta Orang	6,21	1,52	1,00	3,79	3,42
9.	Jumlah Penumpang TransJakarta	Juta Orang	280,27	123,81	191,41	284,92	372,72
10.	Indeks Fatalitas Kecelakaan Angkutan Umum Per 10.000 Penduduk	Persen	0,07	0,01	0,02	0	0
11.	Jumlah Perjalanan Harian Moda TJ	Penumpang Per Hari	268.551	501.155	747.920	962.471	1.101.914
12.	Jumlah Perjalanan Harian Moda Angkot/Bus	Penumpang Per Hari	158.663	123.030	208.730	213.849	254.648
13.	Jumlah Perjalanan Harian Moda MRT	Penumpang Per Hari	15.264	42.823	115.135	123.293	110.381
14.	Jumlah Perjalanan Harian Moda LRT	Penumpang Per Hari	780	1.473	5.640	21.878	3.310
15.	Jumlah Perjalanan Harian Moda KRL	Penumpang Per Hari	344.074	507.361	781.745	863.513	828.679
16.	Jumlah Perjalanan Harian Moda Kereta Bandara	Penumpang Per Hari	696	1.403	4.644	5.377	6.102
17.	Jumlah Perjalanan Harian Moda Kapal	Penumpang Per Hari	1.756	1.903	2.933	3.701	3.418
18.	Jumlah Perjalanan Harian Moda Bus Sekolah	Penumpang Per Hari	158.663	785	36.990	40.152	39.242
19.	Jumlah Perjalanan Harian Moda Angkutan Sewa Khusus	Penumpang Per Hari	277.548	399.096	599.844	584.640	601.048
20.	Jumlah Perjalanan Harian Moda Taksi/Bajaj	Penumpang Per Hari	74.387	94.386	115.308	152.176	200.414
21.	Jumlah Perjalanan Harian Moda Ojek (Daring)	Penumpang Per Hari	162.464	999.160	1.003.160	1.131.227	1.202.049

Dinas Perhubungan Jakarta, 2025

j. Komunikasi dan Informatika

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Sebagai kota metropolitan dengan masyarakat yang sangat adaptif terhadap teknologi, pengembangan komunikasi, informatika, dan statistik di Jakarta diarahkan pada peningkatan kualitas layanan digital serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dalam capaian indikator-indikator strategis, seperti Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir, Kecepatan Rata-rata Internet Unduh via *Mobile*, Indeks Literasi Digital, serta Persentase Pemenuhan Data Prioritas.

Peningkatan nilai SPBE dari 3,23 pada tahun 2020 menjadi 4,46 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Jakarta semakin terdigitalisasi dan adaptif terhadap transformasi digital. Cakupan rumah tangga yang pernah mengakses internet pun terus meningkat, mencapai 98,08% pada tahun 2024, mencerminkan tingginya penetrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Kecepatan rata-rata internet unduh juga terus menunjukkan tren positif, mencapai 35,54 Mbps pada tahun 2024, mendukung aktivitas ekonomi digital dan pendidikan daring. Sementara itu, Indeks Literasi Digital menunjukkan peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Adapun Persentase Pemenuhan Data Prioritas telah mencapai angka maksimal, yakni 100% pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Melalui pencapaian indikator-indikator tersebut dan sebagaimana tercantum pada tabel berikut, terlihat bahwa Jakarta terus bertransformasi menuju kota berbasis digital dengan layanan komunikasi dan statistik yang inklusif, canggih, dan berkelanjutan.

Tabel II.27 Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi, Informasi dan Statistik Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,23	3,47	3,67	4,21	4,46
2.	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir	Persen	93,24	95,44	95,39	97,56	DBR
3.	Kecepatan Rata-rata Internet Unduh <i>Via Mobile</i>	Mbps	N/A	21,92	N/A	29,745	35,54
4.	Indeks Literasi Digital	Nilai	3,26	3,51	3,59	3,88	DBR
5.	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Jakarta, 2025

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum dan pengaturan yang komprehensif untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. Jakarta terus menunjukkan peningkatan dalam pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam urusan koperasi, peran pemerintah lebih bersifat stimulatif, mendorong pertumbuhan berbagai lini usaha. Sementara itu, untuk UMKM, peran pemerintah lebih luas dan mendetail, mencakup penciptaan iklim usaha yang kondusif, termasuk kemudahan perizinan dan akses pasar. Selain itu, fasilitasi pengembangan usaha, perluasan akses pembiayaan, serta pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Peningkatan jumlah koperasi aktif dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan dan stabilisasi sektor koperasi di Jakarta pasca pandemi. Dari 2.021 unit pada 2020 menjadi 2.373 unit pada 2024, tren ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan koperasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan jumlah koperasi, tantangan tetap ada dalam hal peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi. Volume usaha koperasi menunjukkan tren penurunan dari 3,36 triliun rupiah pada 2020 menjadi 1,48 triliun rupiah pada 2024. Fenomena ini menggarisbawahi perlunya penguatan daya saing, efisiensi operasional, serta akses terhadap sumber daya dan pasar yang lebih luas bagi koperasi agar tetap produktif dan berkelanjutan.

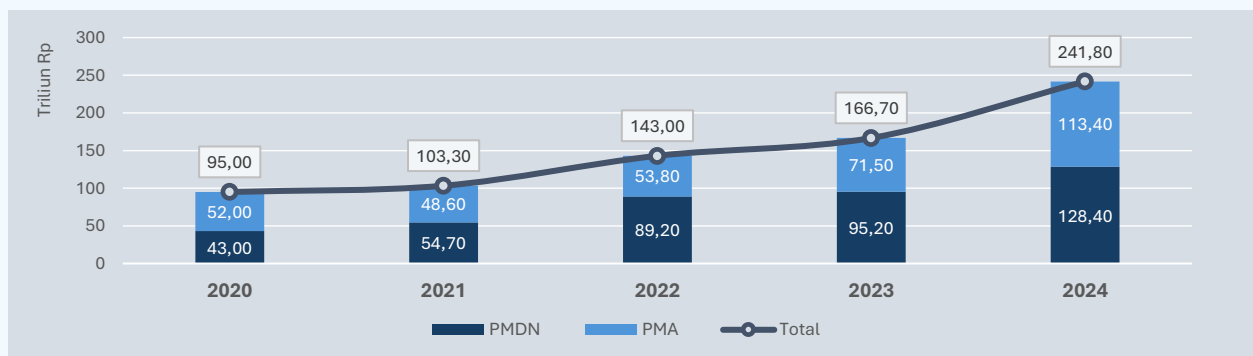
Tabel II.28 Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	2.021	2.059	2.128	2.207	2.373
2.	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Triliun Rupiah	3,36	2,52	1,37	1,45	1,48

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Koperasi, 2024

L. Penanaman Modal

Peran Pemerintah Daerah dalam urusan penanaman modal diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menjelaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, penyediaan infrastruktur, koordinasi dan kerja sama, serta pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Mengingat Jakarta adalah salah satu tujuan utama investasi di Indonesia, urusan penanaman modal memiliki dampak strategis meningkatkan peluang usaha dan bisnis. Grafik di bawah memperlihatkan kondisi realisasi penanaman modal di Jakarta baik yang bersumber dari asing maupun dalam negeri.



Gambar II.51 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Tahun 2020–2024

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025

Kinerja penanaman modal di Jakarta dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan terutama pasca pandemi dengan perubahan tren Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melampaui Penanaman Modal Asing (PMA). Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan PMDN lebih besar dari PMA seperti kemudahan perizinan untuk investor domestik, kondisi pasar, dan kebijakan proteksionis atau prioritas produk nasional. Rincian capaian terkait penanaman modal dan indikator lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.29 Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Triliun Rupiah	52,00	48,60	53,80	71,50	113,40
2.	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Triliun Rupiah	43,00	54,70	89,20	95,20	128,40

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

m. Kepemudaan dan Olahraga

Peran pemerintah daerah dalam kepemudaan diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu diantaranya menyediakan fasilitas dan sarana yang mendukung pengembangan pemuda, menyusun kebijakan dan program yang berfokus pada pengembangan pemuda, dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program kepemudaan. Di tengah kehidupan perkotaan kegiatan pemuda perlu diarahkan kepada aktivitas yang positif dan membangun salah satunya adalah olahraga. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah antara lain pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, serta bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan olahraga.

Secara historikal selama lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa kinerja layanan urusan kepemudaan dan olahraga memiliki fluktuasi capaian, dengan tren peningkatan jumlah atlet berprestasi menjadi 1.321 orang pada tahun 2024, serta mencetak 1.634 prestasi olahraga. Indeks Pembangunan Pemuda juga meningkat pada angka 52,50 pada tahun 2024. Ke depan diperlukan pemberdayaan pemuda yang holistik dalam kerangka kerja kolaboratif dan sinergi antar Perangkat Daerah mencakup bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga komunikasi dan informatika. Pendekatan lintas sektor ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan program komprehensif, yang memastikan setiap kebijakan di Jakarta mempertimbangkan dampaknya terhadap pemuda dan secara aktif membuka ruang bagi kontribusi mereka. Pada tabel berikut dapat terlihat kondisi kinerja layanan urusan kepemudaan dan olahraga.

Tabel II.30 Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	18	679	507	596	1321
2.	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah	12	515	298	1338	1634
3.	Jumlah Kegiatan Olahraga Skala Internasional	Kegiatan	0	0	1	8	6
4.	Rasio Fasilitas Olahraga Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	70,67	76,93	77,41	N/A	N/A
5.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	51,00	49,67	52,67	52,00	52,50

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta, 2025

n. Statistik

Dasar hukum pelaksanaan urusan statistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengatur kewajiban termasuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan statistik. Walaupun fungsi utama koordinasi dan penyelenggaraan statistik dasar berada pada Badan Pusat Statistik, namun pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam menyediakan, mengelola, dan menggunakan data dan informasi secara efisien, akurat, dan terkini. Publikasi "Provinsi dalam Angka" dan "Kota dalam Angka" tersedia secara rutin setiap tahun. Publikasi ini menyajikan berbagai jenis data yang mencakup sektor pemerintahan, demografi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, pertanian, industri, serta aspek ekonomi dan keuangan. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sebagai referensi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, publikasi data PDRB baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi juga tersedia secara konsisten sepanjang periode 2020–2024. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi makro dan hasil pembangunan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Informasi rinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.31 Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Buku “Kabupaten/Kota dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku “PDRB Kabupaten/Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku “Provinsi dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku “PDRB Provinsi”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2025

o. Persandian

Urusan persandian memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan informasi dan komunikasi pemerintahan di era digital yang semakin kompleks. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik skala nasional, sehingga penguatan sistem persandian menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan kerahasiaan, integritas, dan keaslian data serta informasi pemerintahan. Persandian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung informasi strategis negara dan daerah, tetapi juga sebagai penopang utama tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang aman dan terpercaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem keamanan informasi yang terpadu dan berstandar nasional. Melalui penguatan urusan persandian, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang tangguh terhadap ancaman keamanan digital, sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data. Dengan demikian, Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi kota yang unggul dalam penerapan teknologi, tetapi juga menjadi kota yang mampu menjamin keamanan informasi dan komunikasi pemerintahan secara menyeluruh.

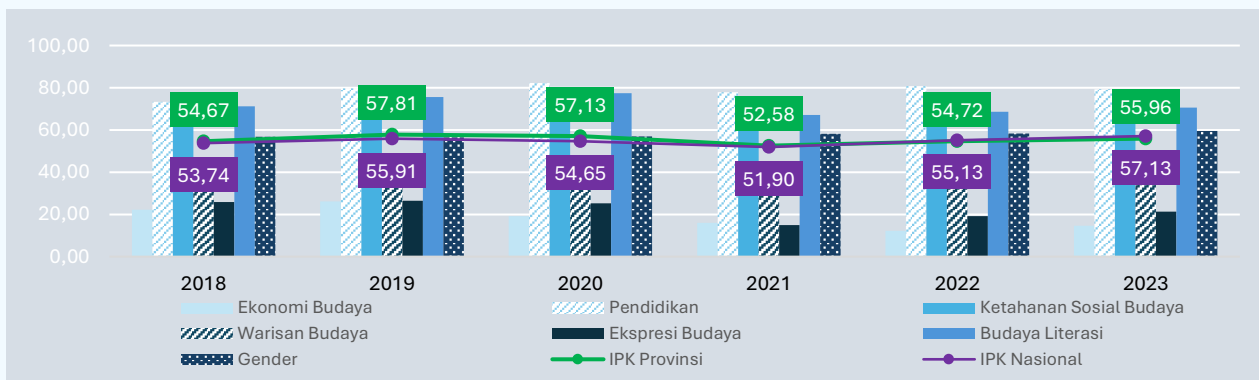
Tabel II.32 Realisasi Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Nilai	N/A	N/A	631	632	640

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

p. Kebudayaan

Urusan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Daerah memiliki peran dan wewenang di antaranya: pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan; penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah; pencatatan dan pendokumentasian, pemutakhiran, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan publikasi terhadap informasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK); serta pendanaan pemajuan kebudayaan. Hasil kajian Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan 2025-2029 menunjukkan bahwa kondisi daya saing kebudayaan masih belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di tahun 2023 (peringkat 20 secara nasional) dan hasil survei pemeliharaan OPK Jakarta (kurang 5 % dari total keseluruhan) yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan objek kebudayaan untuk sektor ekonomi, pendanaan, serta dukungan kebijakan terkait pelestarian dan pemajuan kebudayaan, masih belum optimal.



Gambar II.52 Indeks Pembangunan Kebudayaan Jakarta dan Nasional

Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024

Melihat data IPK periode 2018–2023, capaian Jakarta telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun demikian angka 55,96 pada tahun 2023 masih di bawah Nasional. Hal ini kontras mengingat tingkat dimensi pendidikan dan literasi Jakarta berada pada posisi yang cukup baik. Rendahnya nilai pada Ekspresi Budaya dan Ekonomi Budaya menunjukkan jika SDM masih mengalami kendala dalam menyalurkan ide, gagasan, maupun kreativitasnya untuk menghasilkan karya inovatif. Ke depan nilai budaya memiliki andil besar, hal ini karena nilai-nilai, norma, dan praktik budaya yang berlaku di masyarakat setempat dapat menentukan; bagaimana peluang dan kesempatan muncul, dan bagaimana individu dapat mengaksesnya. Untuk mewujudkan pembangunan manusia dan perwujudan kota global yang sukses, diperlukan fokus menciptakan nilai-nilai budaya inklusi, kesetaraan, toleransi, dan kolaborasi inovasi. Tabel berikut memperlihatkan kinerja layanan pembangunan kebudayaan selama 5 (lima) tahun terakhir di Jakarta.

Tabel II.33 Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya per 10.000 Penduduk	Satuan Jumlah	4	4	N/A	N/A	N/A
2.	Indeks Pelestarian Budaya	Nilai	0	5	N/A	N/A	N/A
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	57,13	52,58	54,72	55,96	DBR

Sumber: Dinas Kebudayaan Jakarta, 2025

q. Perpustakaan

Urusan perpustakaan diatur melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menegaskan bahwa informasi, pengetahuan, literasi, hingga budaya bangsa menjadi peran vital perpustakaan. Pemerintah daerah memiliki peran di antaranya melalui penyelenggaraan perpustakaan daerah, pengelolaan dan pengembangan koleksi, penyediaan anggaran dan infrastruktur, promosi dan kampanye budaya literasi, koordinasi dan kerja sama, serta pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Adapun jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun terakhir di Jakarta sedikit mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut.

Jakarta bertekad meningkatkan budaya literasi sebagai bagian dari upayanya menjadi kota global. Langkah konkret yang dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi antara lain: penguatan peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran yang ramah dan mudah diakses; optimalisasi layanan perpustakaan dan arsip digital seperti Jaklitera, Siapjak, SIKD, dan Arjuna; penguatan layanan perpustakaan dan kearsipan yang efektif; pengembangan cerita interaktif melalui aplikasi teknologi; modernisasi fasilitas fisik, waktu operasional, dan layanan digital perpustakaan; dan peningkatan koleksi perpustakaan dan pengelolaan arsip digital; dan peningkatan budaya tertib arsip yang akuntabel untuk mendukung pelestarian memori kolektif bangsa.

Tabel II.34 Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan	Persen	7,34	17,46	35,23	34,80	29,71
2.	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	Orang	793.243	1.852.115	3.967.721	3.918.306	3.365.903
3.	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	626.485	630.800	1.221.314	1.356.552	1.438.414
4.	Nilai Budaya Literasi	Nilai	77,35	67,11	68,64	71,37	72,09

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, 2024

r. Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki landasan konstitusi yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Amanat di dalam perundangan ini menegaskan bahwa fungsi Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan sistem kearsipan daerah, yang telah dilaksanakan melalui upaya pengelolaan arsip digital; peningkatan budaya tertib arsip yang akuntabel untuk mendukung pelestarian memori kolektif bangsa; serta penyediaan fasilitas dan sumber daya lain yang diperlukan. ANRI sebagai lembaga arsip nasional, mengevaluasi lembaga arsip di tingkat daerah melalui penilaian mutu dan kelayakan lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan. Adapun capaian Jakarta terkait layanan kearsipan tercantum pada tabel berikut.

Tabel II.35 Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	83,15	80,32	90,98	90,06	93,11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, 2024

Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan sektor perikanan menunjukkan tren positif dalam produksi, namun dihadapkan dengan tantangan dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta angka konsumsi ikan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, produksi perikanan meningkat signifikan dari 94,47 ton pada 2020 menjadi 219,2 ton pada 2024, hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan efektivitas sistem perikanan tangkap serta budidaya. Meskipun terjadi peningkatan produksi, kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB masih relatif kecil, berada di kisaran 0,03–0,04% selama periode 2020–2024. Selain itu, pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB mengalami fluktuasi, dengan peningkatan sebesar 10,76% pada 2021, diikuti oleh kontraksi -8,58% pada 2023, sebelum kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 12,50% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi lebih lanjut guna memastikan kesinambungan pertumbuhan sektor ini dalam perekonomian daerah. Sementara itu, angka konsumsi ikan turut mengalami pergeseran signifikan. Setelah mencapai 104,75 kg per kapita per tahun pada 2021, konsumsi ikan turun menjadi 48,64 kg di tahun 2024. Penurunan ini berpotensi berdampak pada asupan protein masyarakat, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat konsumsi ikan melalui edukasi gizi, stabilisasi harga, serta penguatan distribusi pangan laut.

Tabel II.36 Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB (Besar, Kecil, dan Menengah)	Persen	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04
2	Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	0,48	10,76	6,13	-8,58	12,50
3	Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya)	Ton	94,47	117,17	135,826	198,195	219,20
4	Angka Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	98,86	104,75	48,61	48,61	48,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta, 2025

b. Pariwisata

Sektor pariwisata Jakarta mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama akibat dampak pandemi. Berdasarkan data, jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan tajam dari 435.888 orang pada 2020 menjadi 119.362 orang pada 2021, sebelum menunjukkan pemulihan bertahap hingga mencapai 2.353.569 orang pada 2024. Wisatawan nusantara menunjukkan tren peningkatan lebih stabil, dari 30,91 juta orang pada 2020 menjadi 87,23 juta orang pada 2024, menandai pemulihan aktivitas wisata domestik yang lebih cepat dibanding wisatawan mancanegara. Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara memperlihatkan efek dari berbagai inisiatif pemulihan pasca pandemi, termasuk relaksasi pembatasan perjalanan serta peningkatan upaya promosi pariwisata. Namun, di tengah peningkatan jumlah wisatawan, lama kunjungan mengalami tren penurunan. Wisatawan mancanegara yang sebelumnya menghabiskan rata-rata 4,08 hari pada 2020, hanya tinggal 2 hari pada 2024. Hal yang sama terjadi pada wisatawan nusantara, yang mengalami penurunan lama kunjungan dari 2,22 hari pada 2021 menjadi 1,53 hari pada 2024. Penurunan ini berpotensi berdampak pada daya dorong sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah, karena semakin singkatnya kunjungan berpengaruh pada pengeluaran wisatawan, termasuk sektor perhotelan, kuliner, dan hiburan.

Dari sudut pandang ekonomi, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB terus meningkat, menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan lama kunjungan, sektor ini tetap berhasil menggerakkan perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang meningkat menjadi Rp 7,01 triliun pada 2024, mencerminkan efektivitas pemulihan industri dan meningkatnya aktivitas wisata di Jakarta. Ke depan, langkah strategis diperlukan untuk tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memperpanjang lama kunjungan wisatawan. Diversifikasi atraksi wisata, penguatan ekosistem pariwisata, serta optimalisasi strategi pemasaran menjadi faktor kunci dalam membangun daya tarik Jakarta sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan.

Tabel II.37 Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	435.888	119.362	938.991	1.963.059	2.353.569
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	30.914.200	37.634.468	56.008.041	63.622.596	87.233.238
3	Lama Kunjungan Wisata Mancanegara	Hari	4,08	3,89	3,13	2,51	2,00
4	Lama Kunjungan Wisata Nusantara	Hari	2,2	2,22	1,83	1,68	1,53
5	PAD Sektor Pariwisata	Rp	2.908.538.070.821	3.112.644.779.690	5.291.649.076.555	6.540.755.313.652	7.018.115.803.405

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makan Minum)	Persen	4,27	4,49	4,67	4,88	5,03
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makan Minum)	Persen	-16,21	8,99	9,31	9,69	8,32

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, 2025

c. Pertanian

Sektor pertanian di Jakarta menunjukkan pola stabil dalam kontribusinya terhadap PDRB, namun dinamika pertumbuhan dan produksi masih menghadapi tantangan. Selama periode 2020–2024, kontribusi sektor ini tetap berada di angka 0,04%, menandakan bahwa peran pertanian dalam ekonomi daerah masih relatif kecil dibanding sektor industri dan jasa. Meskipun demikian, pertumbuhan sub sektor ini mengalami fluktuasi yang cukup tajam, menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi produktivitas dan efisiensi pertanian.

Salah satu tantangan utama yang terlihat adalah penurunan produksi tanaman padi dan bahan pangan utama lokal lainnya. Dari 4.658 ton pada tahun 2020, produksi turun menjadi 2.306 ton pada tahun 2024, mengindikasikan adanya tekanan terhadap sektor ini, baik dari segi perubahan iklim, keterbatasan lahan, maupun tantangan sistem produksi. Di sisi lain, luas areal pertanian mengalami penurunan dari 934 hektar pada tahun 2020 menjadi 498 hektar pada tahun 2024, yang menjadi faktor utama dalam berkurangnya volume produksi. Ke depan, sektor pertanian Jakarta perlu difokuskan pada optimalisasi produksi melalui pemanfaatan teknologi, penguatan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan efisiensi penggunaan lahan. Meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDRB tetap stabil, memastikan kesinambungan pertumbuhan dan produktivitas menjadi kunci untuk mendukung ketahanan pangan di Jakarta.

Tabel II.38 Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Kontribusi Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB	Persen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Pertumbuhan Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB	Persen	0,5	-0,78	-0,35	0,15	-0,75
3	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ton	4.658	4.543	2.337,77	2.674,28	2.306,54
4	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ha	934	578	477,25	542,93	498,31
5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Ton/Ha	4,98	5,99	5,12	5,03	5,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

d. Kehutanan

Pada periode 2020-2024, Pemerintah Jakarta berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dengan memperluas RTH. Rasio luas RTH terhadap total luas kawasan mencapai 5,149% pada tahun 2020, namun upaya penambahan rasio RTH ini mengalami penurunan yang diindikasikan karena dampak dari pandemi. Luas lahan untuk pembebasan RTH tercatat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, dari seluas 21,44 hektar pada tahun 2019 menjadi 3,37 hektar pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 6,9 hektar di tahun 2021, dan tahun 2022 turun kembali menjadi 2,56 hektar. Hingga pada tahun 2023 dan 2024 dilakukan akselerasi penambahan rasio RTH melalui penagihan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi pengembang. Luas lahan untuk masing-masing jenis RTH (hutan, taman, dan makam) yang dibebaskan menunjukkan tren yang variatif namun cenderung menurun, dengan angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 25,63 hektar RTH taman, 16,75 RTH hutan, dan 4,82 RTH makam, namun tidak ada pembebasan lahan untuk RTH taman dan hutan pada tahun 2020.

Perhitungan Rasio RTH dimaksud merupakan total luasan RTH pada tahun berkenaan dibagi dengan total luasan wilayah daratan Jakarta. Realisasi Rasio RTH sebagaimana pada tabel berikut bersumber dari JakartaSatu. Terdapat penyesuaian angka capaian rasio RTH pada tahun 2024 yang disebabkan oleh pemutakhiran basis data luasan daratan Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 – 2138 Tahun 2025. Total luas daratan Jakarta dari keputusan tersebut adalah 66.153 Ha, sehingga Rasio Total RTH Terhadap Luas Wilayah tahun 2024 dengan penghitungan terbaru ekuivalen dengan 5,209% dari sebelumnya 5,357% berdasarkan luas daratan Jakarta yang lama.

Tabel II.39 Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio Total Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah	Persen	5,149	5,171	5,176	5,214	5,209*
2.	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan	Juta Rp	N/A	N/A	24,407	87,654	144,312

*Penghitungan dengan data luas daratan Jakarta terbaru

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, 2025

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian Jakarta belum menunjukkan pembentukan nilai tambah yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah Jakarta yang memiliki tutupan hutan produksi sangat terbatas. Meski demikian, terdapat aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. KTH berperan sebagai kelompok kerja yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, serta usaha mikro dalam skema perhutanan sosial, dengan tujuan membangun kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah terpublikasi pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan KLHK, Nilai Transaksi Ekonomi dari KTH di DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya volume transaksi atas komoditas hasil kelola KTH, antara lain bibit tanaman/mangrove, pupuk organik, tanaman pangan, produk olahan, serta produk dan/atau panen segar hasil pertanian dan perikanan lainnya.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi sektor energi di Provinsi DKI Jakarta saat ini menunjukkan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. KEN menetapkan visi jangka panjang pengelolaan energi nasional yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan menargetkan peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga minimal 23% pada tahun 2025 dan hingga 31% pada tahun 2050. Jakarta perlu meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi primer untuk jangka menengah hingga tahun 2030 sehingga mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian sasaran nasional, meskipun secara lokal masih memerlukan akselerasi yang lebih kuat.

Selain itu, target efisiensi energi di Jakarta juga selaras dengan arah KEN yang mendorong pengurangan intensitas energi secara nasional. Penurunan intensitas energi primer dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi pemanfaatan energi di sektor ekonomi. Adapun rasio elektrifikasi 100% telah tercapai sejak tahun 2019. Keberhasilan ini menjamin akses energi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Konsumsi listrik per kapita diperkirakan akan mengalami peningkatan yang mengindikasikan kenaikan permintaan energi seiring pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi sehingga perlu diimbangi dengan pengelolaan energi yang cerdas dan berkelanjutan.

Selama periode 2020–2024, sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan upaya signifikan dalam peningkatan infrastruktur energi, terutama di Kepulauan Seribu. Persentase daya listrik terpasang di Kepulauan Seribu mengalami peningkatan dari 73% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2022. Adapun bauran energi baru terbarukan menunjukkan peningkatan dari 0,08% pada tahun 2020 menjadi 0,66% pada tahun 2024. Namun, hal ini masih sangat perlu ditingkatkan agar proporsi energi baru terbarukan semakin tinggi. Persentase cakupan pencahayaan kota juga mengalami peningkatan dari 82,99% pada tahun 2020 menjadi 100% sejak tahun 2022. Selain itu sejak tahun 2020 seluruh pencahayaan kota sudah dilaksanakan berbasis *smart system* yang berhasil menghemat energi dan menunjukkan adopsi teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dan teknologi *smart system* perlu didorong lebih lanjut agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung upaya Jakarta menuju kota global.

Tabel II.40 Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Listrik Terpasang di Kepulauan Seribu	Persen	73	100	100	100	100
2	Bauran Energi Baru Terbarukan	Persen	0,13	0,18	0,32	0,54	0,66
3	Persentase Cakupan Pencahayaan Kota	Persen	82,99	86,78	100	100	100
4	Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis <i>Smart System</i>	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta, 2023

f. Perdagangan

Sektor perdagangan terus memainkan peran penting dalam perekonomian Jakarta, mencerminkan pemulihan dan ketahanan ekonomi pasca pandemi. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB menunjukkan tren positif, meningkat dari 15,11% pada 2020 menjadi 18,01% pada 2024. Angka ini menegaskan bahwa sektor perdagangan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jakarta. Meskipun mengalami kontraksi sebesar -7,04% pada 2020 akibat dampak pandemi, sektor ini berhasil bangkit dengan pertumbuhan yang kembali positif, mencapai 7,78% pada 2022 dan tetap stabil di kisaran 4,52–6,87% pada 2023 dan 2024. Tren pemulihan ini mencerminkan efektivitas strategi adaptasi yang diterapkan oleh pelaku usaha serta dukungan kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Namun demikian, meskipun kontribusi terhadap PDRB menunjukkan peningkatan, tantangan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan masih perlu mendapatkan perhatian. Dinamika pola konsumsi, akselerasi digitalisasi perdagangan, serta intensitas persaingan yang semakin kompleks menjadi faktor strategis yang perlu dikelola secara optimal agar momentum pertumbuhan dapat terus terjaga. Selain itu, penguatan infrastruktur perdagangan dan penguatan ekosistem bisnis menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing sektor ini di tengah ekonomi global.

Tabel II.41 Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Persen	15,11	15,39	15,75	15,69	18,01
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Atas Dasar Harga Konstan	Persen	-7,04	5,46	7,78	4,52	6,87

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta, 2025

g. Perindustrian

Sektor industri pengolahan terus menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Jakarta, dengan kontribusi yang relatif stabil terhadap PDRB. Meskipun mengalami fluktuasi, peran sektor ini tetap signifikan, berada di kisaran 10,85% pada 2020 hingga 11,49% pada 2024. Stabilitas ini menunjukkan pentingnya industri pengolahan dalam ekosistem ekonomi Jakarta, sekaligus menggarisbawahi tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan. Salah satu indikator utama yang perlu diperhatikan adalah fluktuasi pertumbuhan industri pengolahan, yang mencerminkan tekanan dari berbagai faktor eksternal dan internal. Setelah mengalami kontraksi -10,36% pada 2020, sektor ini berhasil mengalami pemulihan pada 2021 dengan pertumbuhan 11,05%, namun kembali melambat pada tahun-tahun berikutnya. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun industri mampu bangkit dari tekanan ekonomi, tantangan keberlanjutan pertumbuhan tetap menjadi fokus utama. Adaptasi terhadap perubahan pasar, optimalisasi rantai pasok, serta peningkatan efisiensi operasional menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat untuk menjaga daya saing industri.

Selain itu, jumlah industri manufaktur besar dan sedang di Jakarta mengalami dinamika selama periode 2020–2024, dengan penurunan dari 1.654 perusahaan pada 2020 menjadi 1.609 perusahaan pada 2024. Variabilitas ini mengindikasikan adanya perubahan dalam struktur industri, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti efisiensi operasional, transformasi model bisnis, serta adopsi teknologi dalam proses produksi. Optimalisasi ekosistem industri, akselerasi digitalisasi, serta peningkatan investasi dalam teknologi produksi menjadi langkah strategis yang perlu dikedepankan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri.

Tabel II.42 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Persen	10,85	11,64	11,71	11,36	11,49
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan	Persen	-10,36	11,05	5,88	1,86	1,14
3	Jumlah Industri Manufaktur Besar dan Sedang	Perusahaan	1.654	1.636	1.683	1.680	1.609

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta, 2025

Penunjang Urusan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa aspek kinerja Fokus Fungsi Penunjang Urusan menganalisis indikator-indikator bidang urusan dari: (a) sekretariat daerah dan sekretariat DPRD; (b) perencanaan pembangunan; (c) keuangan; (d) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (e) penelitian dan pengembangan; (f) pengawasan; dan (g) kesatuan bangsa dan politik, serta pemerintahan umum lainnya. Berikut terlampir kondisi eksisting fokus penunjang urusan Jakarta tahun 2020-2024.

a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Indeks reformasi birokrasi menunjukkan tren positif, meningkat secara konsisten dari 76,54 pada tahun 2020 menjadi 93,72 pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya komitmen kuat untuk melakukan pembenahan internal birokrasi agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi yang terus meningkat ini sangat penting karena dapat memperkuat kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan dan representasi publik secara optimal. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan pada aspek kinerja kesekretariatan daerah dan lembaga legislatif, indikator lainnya menunjukkan arah positif dalam pembangunan kelembagaan dan demokrasi partisipatif di Jakarta. Implikasi dari capaian ini adalah pentingnya menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi dan memperkuat efektivitas fungsi representasi agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan daerah dan lembaga legislatif semakin meningkat.

Aspek kapasitas lembaga ditunjukkan melalui nilai indikator kinerja lembaga legislatif, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2022. Namun, nilai ini menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 36,84%. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan kinerja lembaga legislatif, keberlanjutannya belum sepenuhnya konsisten. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas pengawasan dan legislasi yang menjadi fungsi utama lembaga tersebut. Sementara itu, pada aspek kesetaraan dalam demokrasi, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan menunjukkan capaian yang konsisten dan maksimal, dengan angka 100% pada tahun 2021 hingga 2023. Ini menandakan adanya ruang yang terbuka dan terfasilitasi dengan baik bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan publik, yang merupakan indikator positif dalam penguatan demokrasi partisipatif. Namun, perlu dikaji lebih dalam apakah capaian 100% tersebut benar-benar mencerminkan keterlibatan substansial dari berbagai kelompok masyarakat atau hanya secara administratif telah memenuhi indikator.

Tabel II.43 Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Provinsi						
	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif	Persen	N/A	17,86%	46,15%	36,84%	DBR
2	Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi Provinsi						
	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan	Nilai	N/A	100	100	100	DBR
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	76,54	78,88	78,98	82,47	93,72

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Jakarta, 2025

b. Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan mengacu kepada indikator nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi AKIP. Pada tahun 2020, nilai perencanaan 25,46 kemudian meningkat menjadi 25,76 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan kinerja.

Tabel II.44 Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	92,56	92,66
2	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi AKIP	Nilai	25,46	25,72	25,53	25,56	25,76

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jakarta, 2025

c. Keuangan

Pemerintah Provinsi Jakarta secara konsisten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan untuk tahun 2020 hingga 2024. Opini WTP memiliki makna bahwa tata kelola keuangan daerah telah dilaksanakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal sudah memadai, dan kepatuhan terhadap peraturan sudah baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya menyusun APBD tepat waktu.

Tabel II.45 Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta, 2025

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indeks Sistem Merit menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 290 pada tahun 2020 menjadi 350,5 pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur negara, termasuk proses rekrutmen, promosi, dan pengembangan kompetensi yang berbasis kinerja dan objektivitas. Mencermati komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam lima tahun terakhir, terdapat tren peningkatan jumlah pegawai untuk jenjang pendidikan Sarjana ke atas sampai dengan Doktor, namun jenjang pendidikan Diploma III ke bawah cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur kepegawaian ke arah tenaga kerja yang lebih berkualifikasi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan arah reformasi kepegawaian menuju SDM aparatur berkualifikasi tinggi dan penguatan sistem meritokrasi. Namun, penurunan jumlah pegawai akibat potensi pensiun massal atau kebijakan pembatasan rekrutmen baru akan berdampak pada kapasitas pelayanan publik jika tidak diimbangi dengan transformasi digital, redistribusi beban kerja, atau regenerasi pegawai baru yang berkualitas. Implikasinya, pemerintah perlu menjaga kesinambungan kompetensi aparatur sambil tetap memperkuat budaya integritas dan efisiensi dalam birokrasi untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Tabel II.46 Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Sistem Merit	Nilai	290	310,5	335,5	335,5	350,5
2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkat Pendidikan Magister/Doktor/Ph.D	Orang	3.986	3.893	3.717	3.684	4.021
3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkat Pendidikan Sarjana	Orang	32.345	33.736	37.281	39.583	44.701
4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkat Pendidikan Diploma III/Sarjana Muda	Orang	4.824	5.689	5.464	5.168	5.178
5	Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkat Pendidikan Diploma I,II/Akta I,II	Orang	1.195	1.071	902	770	669
6	Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat	Orang	15.861	14.748	13.234	11.305	9.725
7	Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkat Pendidikan SMP/Sederajat	Orang	720	453	404	327	261
8	Jumlah Aparatur Sipil Negara Tingkat Pendidikan Sampai dengan SD	Orang	244	194	207	114	88

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Jakarta, 2025

e. Penelitian dan Pengembangan

Kapasitas inovasi Jakarta yang diukur melalui Nilai Pilar Kapasitas Inovasi menurun dari 4,45 pada tahun 2022 menjadi 3,77 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen yang masih rendah terhadap fungsi penelitian dan pengembangan. Proporsi Belanja Penelitian Pengembangan Terhadap APBD juga masih sangat kecil dan hanya mencapai 0,00894% pada tahun 2024.

Tabel II.47 Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Pilar Kapasitas Inovasi	Nilai	-	-	4,45	3,51	3,77
2	Proporsi Belanja Penelitian Pengembangan Terhadap APBD	%	0,00094%	0,00606%	0,00093%	0,00225%	0,00894%

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jakarta, 2025

f. Pengawasan

Indeks Survei Penilaian Integritas Jakarta menunjukkan peningkatan dari 68,70 pada tahun 2021 menjadi 72,50 pada tahun 2024. Semakin tinggi nilai indeks mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Capaian Jakarta masih berada pada kategori rentan sehingga masih perlu perbaikan. Selanjutnya, capaian predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus menunjukkan peningkatan dari 74,41 di tahun 2020 menjadi 81,66 di tahun 2024.

Tabel II.48 Realisasi Kinerja Urusan Inspektorat Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Survei Penilaian Integritas	Nilai	75,69*	68,70	73,3	76,96	72,5
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	74,41	80,10	80,51	81,06	81,66

*Terdapat perbedaan dimensi SPI tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lainnya.

Sumber: Inspektorat, 2025

g. Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Pemerintahan Umum Lainnya

Secara umum, data pada tabel berikut merefleksikan perkembangan kebebasan demokrasi serta kondisi kerukunan umat beragama di Jakarta sebagai bagian dari fondasi kehidupan sosial-politik yang inklusif dan harmonis. Aspek Kebebasan dalam Indeks Demokrasi Provinsi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Nilainya sempat menurun dari 88,84 pada tahun 2020 menjadi 87,39 pada tahun 2022, namun menunjukkan tren pemulihan dengan kenaikan menjadi 90,66 pada tahun 2023. Penurunan yang terjadi pada 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi yang berdampak pada terbatasnya ruang-ruang kebebasan sipil, namun peningkatan setelahnya mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan demokrasi dan jaminan kebebasan. Lebih lanjut, sub-indikator dalam aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi memberikan gambaran yang lebih mendetail. Kebebasan yang dijamin oleh aparat negara menunjukkan peningkatan signifikan, dari 87,29 pada tahun 2020 menjadi 97,50 pada 2023. Ini menunjukkan penguatan institusional dalam melindungi hak-hak sipil warga negara. Di sisi lain, indikator yang mencerminkan kebebasan antar masyarakat yang

sempat menurun, sebelum kembali meningkat menjadi 93,74 pada 2023, dapat diartikan sebagai dinamika sosial yang dipengaruhi tekanan sosial atau perbedaan pandangan politik yang meningkat pada masa krisis. Sementara itu, kebebasan berkeyakinan menunjukkan stabilitas pada dua tahun pertama dengan skor 100, namun sempat menurun drastis menjadi 70,56 pada tahun 2022 dan kemudian membaik menjadi 95,83 pada 2023. Fluktuasi ini menandakan adanya kerentanan tertentu dalam menjaga hak atas keyakinan yang perlu direspons dengan kebijakan yang lebih sensitif terhadap keragaman.

Adapun Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mulai diukur sejak tahun 2021 menunjukkan tren positif. Skor awal sebesar 70,28 pada tahun 2021 terus meningkat hingga mencapai 76,15 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga harmoni antar umat beragama telah menunjukkan hasil, meskipun peningkatannya berlangsung secara bertahap. Secara keseluruhan, ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mempertahankan kebebasan dan kerukunan di tengah dinamika sosial dan krisis kesehatan, arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan respons yang baik dengan capaian yang membaik dari waktu ke waktu. Ke depan, konsistensi dalam menjaga kebebasan sipil, memperkuat relasi sosial yang harmonis, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat akan menjadi kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas demokrasi serta kohesi sosial di Jakarta.

Tabel II.49 Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Provinsi	Nilai	88,84	89,27	87,39	90,66	DBR
a	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara,	Nilai	87,29	97,45	94,95	97,50	DBR
b	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat,	Nilai	87,29	80,91	87,38	93,74	DBR
c	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Nilai	100	100	70,56	95,83	DBR
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	N/A	70,28	72,62	76,47	76,15

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta, 2025

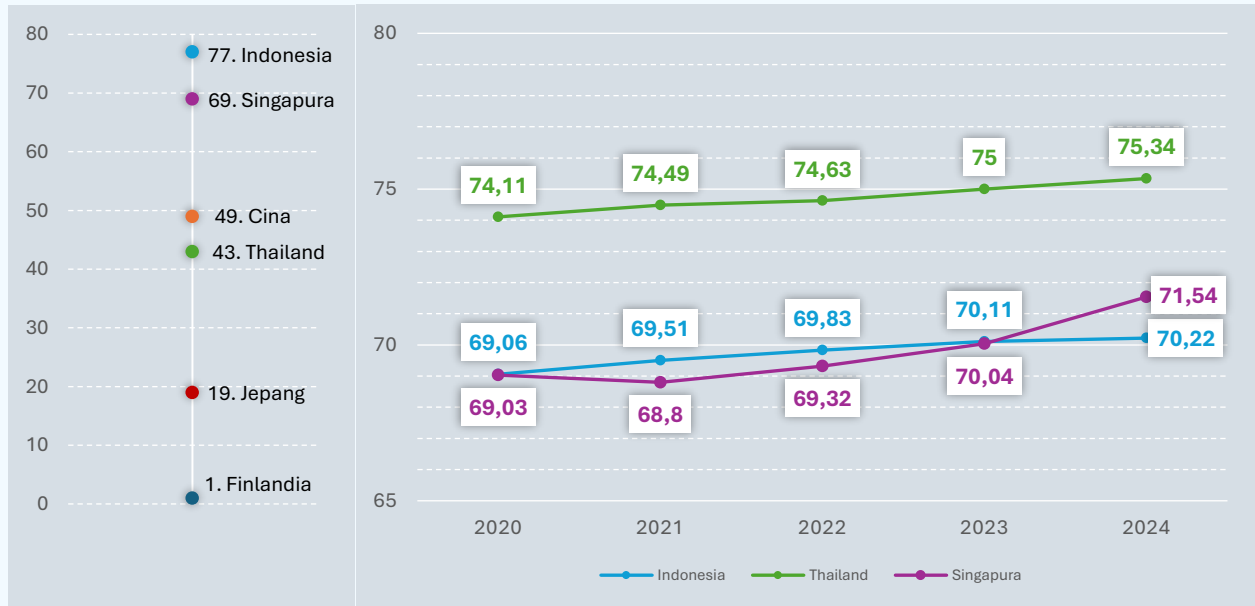
Selain kinerja berdasarkan pelaksanaan bidang urusan Pemerintah Daerah, indikator-indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum, antara lain:

Tabel II.50 Indikator Aspek Pelayanan Umum Lainnya Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	-	-	-	99,28
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31	4,38	4,4	4,03	4,53
3.	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Nilai	100	98,91	98,16	97,92	100
4.	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	77,31	82,08	82,13	84,57	DBR
5.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen	40,17	-	-	N/A	-

II.1.4. Aspek Parameter Kota Global

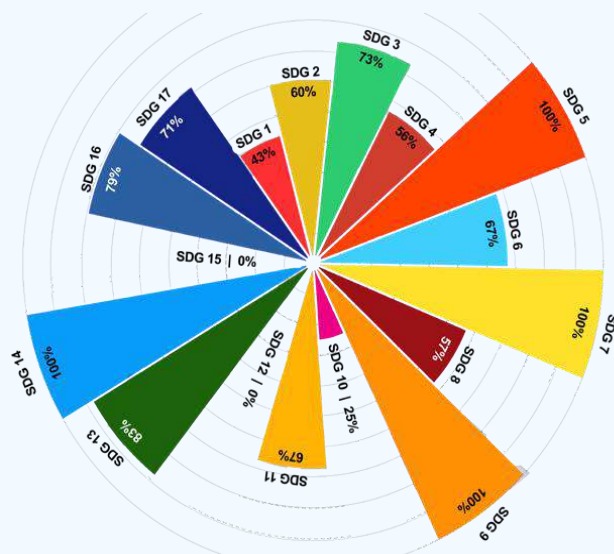
A. Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Gambar II.53 Capaian Ranking dan SDG Index Score Indonesia

Sumber: Sustainable Development Report, 2025

Analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan sebagai input kinerja Jakarta saat ini dalam melaksanakan mandat agenda global dan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Jakarta memiliki 17 tujuan yang diukur dengan dari 177 indikator; pada proses evaluasi 45 indikator belum tersedia data capaiannya, sehingga menyisakan 132 indikator untuk dianalisis. Merujuk pada dokumen Jakarta Voluntary Local Review (VLR) 2024, sebanyak 69% target memenuhi capaian, sedangkan 15% mengalami penurunan dan 15% peningkatan. Adapun capaian dari masing-masing goal adalah sebagai berikut.



Gambar II.54 Grafik Presentase Status Capaian Tujuan TPB Tahun 2023

Sumber: Analisis Sekretariat SDG's Jakarta, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPB 5 Kesenjangan Gender, TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, dan TPB 14 Ekosistem Lautan mencapai 100%. Sedangkan TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab dan TPB 15 Ekosistem daratan memiliki capaian 0% bukan karena tidak tersedianya data dari PD namun karena indikator ada tujuan tersebut tidak relevan dengan kondisi Jakarta. Beberapa Tujuan yang memiliki capaian di bawah 50% adalah TPB 1 Tanpa Kemiskinan sebesar 43% mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pemerataan kesejahteraan ekonomi serta pengentasan kemiskinan di wilayah Jakarta, khususnya di Kepulauan Seribu. Sedangkan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan sebesar 25%, mengindikasikan masih terdapat gap infrastruktur dan aksesibilitas program bantuan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat. Adapun dinamika capaian dan tantangan realisasi TPB di Jakarta selama periode tahun 2019 – 2024 terlampir sebagai berikut.

Tabel II.51 Evaluasi Capaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB Periode 2019-2024

TPB	Capaian dan Tantangan TPB
 1 TANPA KEMISKINAN	Tingkat kemiskinan pasca-pandemi di Jakarta terus mengalami penurunan sejak Maret 2021 (4,72%) yang juga mencakup penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Tercatat tahun 2023 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional turun menjadi 4,44% (tahun 2023) dari 4,61% (tahun 2022). Namun, tantangan kemiskinan Jakarta masih terdapat di beberapa area, seperti Kepulauan Seribu. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dari Pemerintah Jakarta untuk wilayah yang masih tertinggal pada upaya pengentasan kemiskinan.
 2 TANPA KELAPARAN	Prevalensi <i>stunting</i> di Jakarta telah menurun dalam beberapa tahun terakhir (2,57% di tahun 2023), menjadikan Jakarta di urutan terendah kedua secara nasional. Selain itu, kelebihan berat badan dan obesitas kini menjadi perhatian yang meningkat menandakan fokus pemerintah tidak hanya pada kekurangan gizi tetapi juga pada masalah gizi lebih. Meski <i>stunting</i> di Jakarta telah menurun, namun <i>stunting</i> tetap menjadi tantangan di beberapa area, terutama di Kepulauan Seribu, menunjukkan adanya ketidakseimbangan pada penerapan program kesehatan dan gizi di Jakarta.
 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Tren angka kematian ibu terus menurun mencapai 43,56 di tahun 2023 dari <i>baseline</i> 57,46. Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai, salah satunya berupa cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi (98,56% di tahun 2023). Selain itu, jumlah perempuan yang dibantu oleh tenaga kesehatan selama persalinan di Jakarta juga lebih tinggi daripada rata-rata nasional, menunjukkan kualitas layanan kesehatan ibu yang baik di Jakarta, sejalan dengan proporsi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan Jakarta yang mencapai 100% di Tahun 2023.
 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	Tingkat partisipasi sekolah Jakarta menurun di hampir semua jenjang pendidikan pada tahun 2021-2022, kecuali untuk pendidikan tinggi, disebabkan oleh COVID-19. Namun, siswa yang menyelesaikan SD, SMP, dan SMA meningkat menjadi selama 100% di tahun 2023. Selain itu angka partisipasi kasar perguruan tinggi Jakarta mencapai 40,05% di tahun 2023 menandakan bahwa lebih banyak penduduk Jakarta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik sesuai standar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) tetap rendah, menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai kualifikasi yang ditetapkan.
 5 KESETARAAN GENDER	Indeks ketimpangan gender Jakarta tahun 2023 (0,256) lebih rendah daripada tahun 2022 (0,320) dan lebih rendah rata-rata nasional tahun 2023 (0,477), menunjukkan adanya kesetaraan gender yang lebih baik di Jakarta. Menurunnya ketimpangan gender juga dipengaruhi oleh perbaikan pada semua dimensi pembentuknya, yakni dimensi Kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Tantangan pada Tujuan 5 tetap ada, yakni rendahnya representasi perempuan dalam posisi senior dan peran pengambilan keputusan di Pemerintah Jakarta (27,08% proporsi perempuan di eselon II tahun 2023). Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di Pemerintahan Jakarta.

TPB	Capaian dan Tantangan TPB
	Akses sanitasi di Jakarta 12% lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk Jakarta yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Namun, defisit air permukaan dan kurangnya pasokan air dari luar wilayah Jakarta menyebabkan masyarakat masih bergantung pada sumber air tanah. Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkelanjutan perlu direncanakan Pemerintah Jakarta secara matang untuk mengurangi penurunan muka tanah (<i>land subsidence</i>) akibat air tanah yang diambil secara berlebihan.
	Rasio elektrifikasi Jakarta telah mencapai 100% sejak tahun 2019, dibersamai dengan penggunaan gas rumah tangga yang memiliki tren meningkat hingga tahun 2023 mencapai 3.432 kWh. Namun, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor energi dan minimnya alokasi anggaran oleh pemerintah daerah untuk sektor energi menjadi tantangan yang harus diatasi Pemerintah untuk mengembangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.
	Meningkatnya jumlah orang yang bekerja di Jakarta bersamaan dengan penurunan tingkat pengangguran menunjukkan adanya peningkatan dalam peluang kerja. Kondisi tersebut dibersamai dengan tren laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Jakarta yang meningkat mencapai Rp322.620.000,- di tahun 2023 dari <i>baseline</i> Rp268.000.000,-. Namun, perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, dan kenaikan suku bunga bank sentral berpotensi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Jakarta dan tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.
	Industri manufaktur memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Jakarta. Tetapi terjadi tren penurunan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur Jakarta hingga mencapai 1,86% di Tahun 2023. Kondisi tersebut menandakan penurunan volume ekspor yang diindikasikan akibat berkurangnya permintaan global akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Pusat serta perlu kebijakan khusus. Upaya peningkatan mobilitas dan produktivitas ekonomi di Jakarta dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur rel untuk meningkatkan potensi aktivitas ekonomi lokal maupun biaya logistik, sehingga dapat mengurangi dampak perlambatan ekonomi global.
	Tingkat kemiskinan pasca-pandemi di Jakarta terus menurun sejak 2021 sebesar 4,67% menjadi 4,44 di tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, Indeks Gini di Jakarta terus meningkat selama empat tahun terakhir dan mencapai 0,431 di tahun 2023 serta lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,388. Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan pengeluaran masyarakat kelompok atas lebih pesat dibanding pertumbuhan pengeluaran kelompok lain di Jakarta dan lebih tinggi dari rata-rata Indonesia. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Jakarta juga meningkat, sehingga upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan perlu lebih ditingkatkan Pemerintah Jakarta.
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di tahun 2023 meningkat menjadi 38,80% dari 36,23 di tahun 2022. Jumlah penduduk yang terlayani transportasi umum juga memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 18,86% di tahun 2023. Capaian-capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah Jakarta untuk meningkatkan aksesibilitas hunian layak bagi semua kelompok Masyarakat meski menghadapi tantangan berupa kenaikan harga lahan di Jakarta yang memiliki rata-rata kenaikan lahan sekitar 20% setiap tahun.

TPB	Capaian dan Tantangan TPB
	Kuantitas persentase pengurangan sampah di Jakarta telah mengalami peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pengurangan sampah telah mencapai 27,12% tahun 2023 dari <i>baseline</i> awal tahun 2019 sebesar 17,06% menunjukkan keberhasilan Jakarta pada program pengelolaan sampah. Meski demikian, masih terdapat masalah terkait kapasitas tempat pembuangan akhir kota tidak cukup untuk menampung sampah padat sehingga perlu peningkatan kapasitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.
	Inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) telah dilakukan Pemerintah Jakarta bersama dengan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca. Jumlah emisi gas rumah kaca Jakarta Tahun 2023 sebesar 63,074 Mton CO₂e yang menurun ketimbang Tahun 2022 (63,732 Mton CO₂e) menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap pengendalian perubahan iklim. Meskipun ada peningkatan penggunaan transportasi umum, tetapi penggunaan transportasi pribadi berbahan bakar bensin masih tinggi. Selain itu peran sektor terkait masih belum optimal dalam pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor AFOLU (<i>Agriculture Forest and Other Land Use</i>), Energi, Limbah dan IPPU (<i>industrial processes and product use</i>).
	Temuan riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperlihatkan terjadinya peningkatan sampah mikroplastik di muara sungai menuju Teluk Jakarta semasa pandemi COVID-19 mencapai 10 kali lipat yang dipicu akibat penggunaan APD (Alat Pelindung Diri). Pencemaran tersebut berdampak terutama pada nelayan, karena mempengaruhi perubahan jarak dan waktu tempuh ke daerah penangkapan ikan akibat sampah plastik. Pencemaran tersebut juga berdampak signifikan pada ekosistem laut. Selain itu, tercatat tingkat polusi di Teluk Jakarta, terutama dalam parameter nitrat dan fosfat, melebihi standar kualitas pada tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan perairan (Dinas Lingkungan Hidup, 2023).
	Jakarta memiliki tantangan utama berupa keterbatasan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau. Tingginya harga tanah di wilayah Jakarta, serta mayoritas lahan terbangun yang sebagian besar dimiliki oleh entitas swasta menjadi kendala dalam meningkatkan lahan untuk ruang terbuka hijau, mengingat penambahan lahan hutan baru terbatas dan bergantung pada kemampuan APBD. Meski demikian, sebanyak 5,2% dari target total 30% ruang terbuka hijau (RTH) telah terealisasi di Jakarta.
	Dalam hal tata kelola data, integrasi data-data terkait kependudukan dan kondisi sosial-ekonomi yang dimiliki oleh Jakarta masih cenderung dikelola secara sektoral dan belum berjalan secara optimal dan terintegrasi berdasarkan NIK (Nomor Induk Kewarganegaraan). Meski demikian, persentase pencapaian instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi $\geq B$ terus meningkat, mencapai skor 81,06 dan memperoleh peringkat A, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan kualitas birokrasi di Jakarta. Selain itu, persentase keterwakilan Perempuan sebagai pengambilan Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon 1 dan II) mengalami peningkatan hingga 26,5% di tahun 2023 menandakan representasi perempuan di Pemerintahan kian terwakilkan. Namun, masih terdapat penurunan indeks kebebasan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kebebasan sipil di Jakarta beberapa tahun terakhir.
	Realisasi anggaran pemerintah daerah menunjukkan peningkatan positif, terutama dalam hal pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio penerimaan pajak, dan pengelolaan kekayaan daerah. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Jakarta yang efektif dan efisien. Namun, terdapat beberapa tantangan terutama ketika pandemi covid-19 di tahun 2020, dan penurunan pertumbuhan ekspor produk non migas akibat ketegangan geopolitik tahun 2022. Ke depan, risiko-risiko eksternal memerlukan antisipasi lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi Jakarta.

Sumber: Tabel Rekap Pencapaian SDGs Tahun 2019–2023, 2023–2026 dan Analisis Tim Bappeda, 2024

B. Evaluasi Indikator Kota Global

Kota global merupakan kota yang berperan sebagai *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia, modal, barang, gagasan, serta informasi. Pengertian tersebut, disintesis dari diskursus mengenai globalisasi oleh para praktisi dan akademisi antara lain:

- ❑ Ann Markusen (1994), mendefinisikan kota global sebagai kota yang berhasil bersaing mendapatkan status kota besar dalam, setidaknya, salah satu fungsi penting dalam mengintegrasikan ekonomi kapitalis internasional
- ❑ Saskia Sassen (2006), mengartikan kota global merupakan simpul utama dari berbagai kota-kota di dunia dan memiliki hubungan yang mengikat dengan kota-kota lain, serta memiliki dampak langsung pada urusan sosio-ekonomi global
- ❑ Derek Gregory *et. al.*, (2009), kota global adalah simpul utama dalam organisasi ekonomi dunia sebagai: pusat-pusat kendali ekonomi, produksi dan perdagangan, perputaran informasi, dan transmisi budaya, serta kekuatan politik
- ❑ Greg Clark (2016), kota global dicirikan oleh: (a) mendukung dan memiliki spesialisasi dari sektor yang diperdagangkan, (b) menarik dan mempertahankan wirausaha dengan populasi yang beragam, (c) mendorong inovasi untuk menciptakan pengaruh, (d) terdepan dalam penciptaan pasar, rute, produk, atau layanan baru, dan (e) memiliki keunggulan geopolitik

GDP per kapita tumbuh seiring dengan bertambahnya persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan, sehingga *high-income countries* memiliki persentase penduduk urban yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan potensi Jakarta dan aglomerasi Bodetabekpunjur sebagai generator perekonomian yang saat ini berkontribusi terhadap 23,8% PDRB Indonesia. Namun demikian potensi dan daya tarik tersebut harus dinilai secara objektif dan relatif dengan daya tarik kota-kota lain di dunia sebagai kompetitornya.

Beberapa lembaga dan *think tank* internasional telah melakukan pemeringkatan kota-kota dunia dengan masing-masing pendekatan dan indikator penilaian. Berdasarkan *Global City Index (GCI)* yang dikeluarkan oleh AT Kearney, pada tahun 2024 Jakarta berada di peringkat 74 dari 156 kota. Indeks lainnya yang dapat dijadikan acuan yaitu *Global Power City Index (GPCI)* yang dipublikasikan oleh The Mori Memorial Foundation yang menempatkan Jakarta pada peringkat 45 dari 48 kota. Berdasarkan *Global Liveability Index* yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), Jakarta berada pada peringkat 98 dari 173 kota.

Tabel II.52 Persandingan Dimensi dan Metrik Pengukuran Kota Global

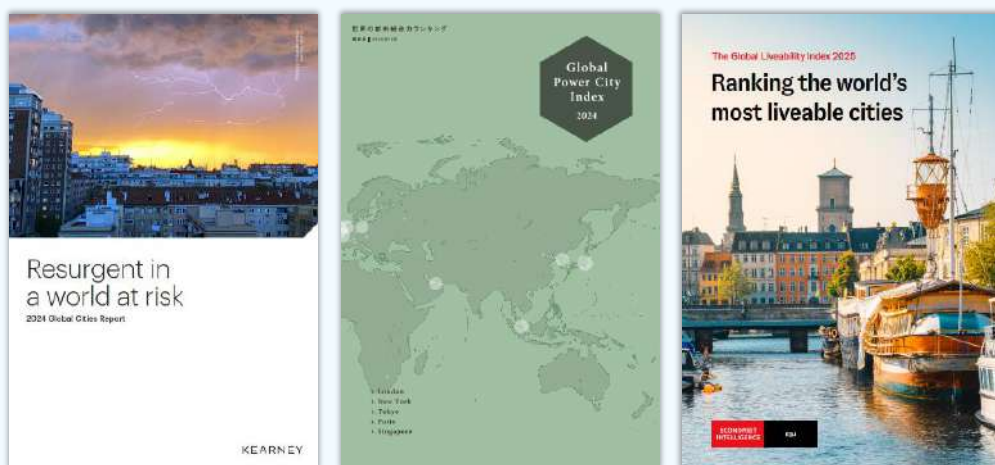
NAMA INDEKS		DIMENSI / METRIK PENGUKURAN			
GLOBAL CITY INDEX (74 DARI 156)	❑ Business Activity	❑ Human Capital ❑ Political Engagement		❑ Cultural Experience	❑ Information Exchange
GLOBAL POWER CITY INDEX (45 DARI 48)	❑ Economy	❑ Research and Development	❑ Livability ❑ Environment	❑ Cultural Interaction	❑ Accessibility
GLOBAL LIVEABILITY INDEX (98 DARI 173)		❑ Stability ❑ Education	❑ Healthcare	❑ Culture and Environment	❑ Infrastructure
SINTESIS DIMENSI	ECONOMY BUSINESS ACTIVITY	R&D HUMAN CAPITAL	LIVEABILITY ENVIRONMENT	CULTURAL INTERACTION AND EXPERIENCE	ACCESSIBILITY AND INFORMATION EXCHANGE
DESKRIPSI	Ekonomi mapan, berdaya saing, dan terkoneksi secara global. Tenaga Kerja yang kompetitif. Iklim berusaha yang mendukung. Keberadaan perusahaan multinasional. Daya tarik investasi asing	Kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus. Sumber daya manusia berkualitas. Institusi pendidikan bermutu sampai tingkat universitas. Ragam hak kekayaan intelektual. Kota sebagai living laboratory	Kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan. Biaya hidup terjangkau. Layanan sosial yang baik. Kondisi keamanan yang terkendali. Ketahanan terhadap bencana dan cuaca ekstrem. Pola hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.	Daya tarik wisata tinggi. Memiliki pengaruh dan identitas budaya yang kuat. Kapasitas dalam menyelenggarakan event internasional. Infrastruktur wisata dan fasilitas penunjang yang memadai.	Akses yang terkoneksi intra dan inter kota. Kemudahan bepergian menuju kota/negara lain. Pilihan moda transportasi publik yang andal. Jaringan telekomunikasi dan informasi yang mutakhir.

INDIKATOR RELEVAN TERPILIH	ECONOMI BUSINESS ACTIVITY	R&D HUMAN CAPITAL	LIVEABILITY ENVIRONMENT	CULTURAL INTERACTION AND EXPERIENCE	ACCESSIBILITY AND INFORMATION EXCHANGE
	☐ Nilai PDRB Jakarta (USD) ☐ PDRB per Kapita (USD) ☐ Rata-rata Upah Pekerja (USD) ☐ Tingkat Kemiskinan (%) ☐ Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ☐ Pekerja Sektor Jasa (%) ☐ EoDB (Indeks) ☐ Nilai Kapitalisasi Pasar (USD) ☐ Nilai Investasi (USD) ☐ ICOR (rasio) ☐ Top 500 World Company (perusahaan) ☐ Index of Economic Freedom (Indeks)	☐ Indeks Pembangunan Manusia (indeks) ☐ Indeks Daya Saing Daerah (indeks) ☐ Angka Partisipasi Sekolah (%) ☐ Kompetensi SDM Pendidikan (%) ☐ Nilai performa Akademis (score) ☐ Proporsi Lulusan Perguruan Tinggi (%) ☐ Ranking Universitas ☐ Jumlah Siswa Internasional (orang) ☐ Jumlah Paten/Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	☐ Indeks Kualitas Lingkungan hidup (indeks) ☐ Indeks Risiko Bencana (indeks) ☐ Coverage Air Bersih dan Sanitasi (%) ☐ Ketersediaan Hunian Layak (%) ☐ Luas RTH (ha) ☐ Intensitas Emisi GRK (%) ☐ Universal Health Coverage (%) ☐ Angka Harapan Hidup (tahun) ☐ Ketahanan Pangan (indeks)	☐ Jumlah Infrastruktur Seni Budaya ☐ Jumlah Infrastruktur Olahraga ☐ Amenitas Kota (Jumlah Hotel, Restoran, Museum) ☐ Jumlah Event Internasional ☐ Jumlah Pengunjung Internasional (orang) ☐ Lama Kunjungan (hari) ☐ PDRB Parekraf (USD) ☐ Cultural Content Export Value	☐ Public Transport Mode Share (%) ☐ Coverage Transportasi Publik (%) ☐ Jalan dengan utilitas lengkap (complete street) (km) ☐ Average Commuting Time (menit) ☐ Travel Time To/From Airport (menit) ☐ Jumlah Penerbangan Internasional ☐ Kecepatan dan Keamanan Internet (Mbps) ☐ Cakupan Layanan Internet-5G (%)
TANTANGAN JAKARTA					
	☐ PDRB Jakarta belum setara kota maju ☐ Kegiatan ekonomi belum efisien dan nilai kapitalisasi pasar belum maksimal ☐ Daya tarik investasi rendah ☐ Kerumitan dalam berbisnis ☐ Perusahaan besar/multinasional kurang tertarik ☐ Fluktuasi tingkat pengangguran karena keterbatasan kesempatan kerja ☐ Rata-rata upah pekerja tidak menarik talenta global ☐ Penurunan angka proporsi tenaga kerja di sektor bisnis dan jasa ☐ Kesejahteraan belum merata dan disparitas kemiskinan antar wilayah ☐ Garis kemiskinan yang belum menggambarkan standar hidup layak	☐ Rata-rata lama bersekolah belum tuntas sampai dengan pendidikan menengah ☐ Keteringgalan kualitas SDM Kepulauan Seribu ☐ Rendahnya kualitas SDM Pendidikan ☐ Performa akademis termasuk rendah di Asia Tenggara ☐ Keterbatasan Pendidikan Tinggi Berkualitas ☐ Rendahnya Proporsi Lulusan Perguruan Tinggi ☐ Penurunan indeks daya saing digital ☐ Dukungan riset dan penelitian yang terbatas	☐ Banyak warga belum memiliki hunian layak ☐ Ketergantungan supply air ☐ Tingkat kebocoran air yang masih tinggi ☐ Pengelolaan limbah dan sampah belum menyeluruh ☐ Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sudah terlampaui ☐ Luas RTH minim ☐ Penggunaan energi terbarukan yang masih sangat rendah ☐ Kerawanan bencana meningkat ☐ Perlindungan terhadap kelompok rentan belum optimal ☐ Kualitas kesehatan perkotaan perlu ditingkatkan ☐ Perlindungan jaminan kesehatan belum menyeluruh ☐ Masih adanya balita gizi buruk ☐ Kerentanan daya beli pangan	☐ Jumlah pengunjung internasional yang masih rendah ☐ Lama kunjungan wisata yang singkat ☐ Amenitas kota terbatas ☐ Infrastruktur seni, budaya, dan olahraga terbatas ☐ PDRB Parekraf belum signifikan ☐ Daya tarik MICE / konser internasional rendah ☐ Potensi industri kreatif belum maksimal	☐ Penggunaan transportasi publik yang masih rendah ☐ Tingkat keandalan transportasi umum perlu ditingkatkan ☐ Kemacetan dan waktu terbuang ☐ Terbatasnya coverage transportasi publik dan pembangunan TOD belum optimal ☐ Lamanya waktu perjalanan dari/ke airport ☐ Penerbangan langsung internasional masih sedikit ☐ Akses dan kecepatan internet broadband yang terbatas ☐ Sistem logistik yang belum terintegrasi maksimal

Sumber: Analisis Tim Bappeda, 2024

Jakarta masih memiliki berbagai tantangan besar yang harus diselesaikan sesuai dengan kelima dimensi kota global yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jakarta harus mampu bersaing untuk memiliki perekonomian yang kuat, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk dihuni oleh warga lokal maupun internasional, serta mampu memperkenalkan budaya Jakarta di mata dunia. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global, diperlukan perencanaan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan yang memperhatikan parameter sebagai berikut:

1. Dalam dimensi *Economic and Business Activity*, kondisi PDRB per kapita Jakarta perlu ditingkatkan agar dapat lebih bersaing dengan kota-kota global lain di dunia. Selain itu, iklim usaha investasi di Jakarta perlu mempermudah alur proses serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan investasi melalui peningkatan *ease of doing bussiness*. Masalah ketimpangan ekonomi antara kelas menengah dan kelas bawah serta antar wilayah di Jakarta juga perlu lebih diperhatikan.
2. Pada dimensi *Research and Development Human Capital*, posisi Kota Jakarta dalam hal pendidikan dan ekosistem inovasi maupun pengembangan masih kurang bersaing ketimbang kota-kota global lainnya. Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) Jakarta juga berada di urutan terbawah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Secara institusional, Jakarta memiliki satu universitas yang masuk dalam jajaran QS World University Ranking Top 1.000 dunia yang lebih rendah bila dibandingkan Singapura dengan dua kampus di Top 50 dan Kuala Lumpur dengan empat universitas dalam Top 500. Peran penting ekosistem pendidikan dan riset yang dapat men-*generate* Jakarta sebagai hub perkembangan industri baru berdasarkan pengembangan *start up* maupun inovasi bisnis masih perlu ditingkatkan.
3. Dalam dimensi *Liveability and Environment*, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang bersaing di Jakarta masih mengalami ketimpangan yang besar dibandingkan kota global lain. Penyediaan dan pemerataan air bersih, sanitasi, hunian layak, perlu lebih di tingkatkan. Cakupan air bersih di Jakarta mencapai 65,8% rumah tangga pada tahun 2025, tertinggal dari Singapura yang telah mencapai 100% mencerminkan perlunya peningkatan jangkauan cakupan air bersih untuk memenuhi standar Kota Global. Isu lingkungan dan perubahan iklim di Jakarta seperti penurunan muka air tanah (*land subsidence*), banjir, dan fenomena *urban heat island* turut memerlukan prioritas penanganan dan perhatian khusus.
4. Pada dimensi *Cultural Interaction and Experience*, kunjungan turis Jakarta masih belum maksimal karena kecenderungan perjalanan sebagai kunjungan bisnis atau *airport transit*. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura, yang telah sukses mengemas atraksi budaya sebagai destinasi utama. Selain itu, pengembangan *event* kebudayaan di Jakarta masih kurang dikemas dalam paket-paket turis yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Keberadaan museum, studio, dan objek wisata yang dilaksanakan secara swadaya perlu lebih dibina dan dipromosikan secara masif agar ekosistem hiburan seni budaya maupun seni modern Jakarta dapat bersaing secara global.
5. Adapun terkait dimensi *Accessibility and Information Exchange*, kemacetan di Jakarta mempengaruhi rendahnya konektivitas Jakarta, rendahnya penggunaan dan *coverage* transportasi publik, lamanya waktu tempuh akibat kemacetan, kurangnya fasilitas pendukung yang inklusif bagi semua kalangan, mempengaruhi kelancaran alur pergerakan manusia. Maka *mode share* Jakarta yang masih rendah perlu untuk lebih ditingkatkan agar setiap individu warga dapat memiliki akses dan lebih memilih akses transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. Kecepatan dan *coverage area* internet cepat di Jakarta juga perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung pertukaran informasi, maupun kelancaran bisnis.



Gambar II.55 Dokumen Referensi Parameter Kota Global

II.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

II.2.1. Kinerja dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD Jakarta meliputi (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBD DKI Jakarta tahun 2020–2024 menunjukkan realisasi pendapatan yang relatif stabil, dengan capaian di atas 90% pada sebagian besar tahun. Namun, realisasi belanja daerah belum mencapai target secara konsisten, meskipun sempat membaik pada 2023 dengan serapan 92,55%. Realisasi penerimaan pembiayaan selalu di atas 90% dan meningkat signifikan pada 2022, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak pernah mencapai target. Kondisi ini mencerminkan penetapan target anggaran yang cenderung terlalu optimis. Kinerja APBD DKI Jakarta dapat dilihat dari tingkat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

A. Realisasi APBD

Tabel II.53 Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah				
2020	57.234.618.765.469	55.887.004.237.727	97,65	(1.347.614.527.742)
2021	65.209.105.040.795	65.567.009.199.000	100,55	357.904.158.205
2022	77.796.647.728.301	67.290.479.172.308	86,50	(10.506.168.555.993)
2023	70.662.936.135.345	71.065.534.207.722	100,57	402.598.072.377
2024	74.946.825.859.889	72.952.104.892.735	97,34	(1.994.720.967.154)
Belanja Daerah				
2020	58.951.071.715.868	52.088.133.628.022	88,36	(6.862.938.087.846)
2021	69.992.620.874.576	61.619.040.160.565	88,04	(8.373.580.714.011)
2022	76.972.166.396.328	64.865.121.220.296	84,27	(12.107.045.176.032)
2023	72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	(5.374.276.984.172)
2024	76.023.113.210.933	70.012.728.586.086	92,09	(6.010.384.624.847)
Penerimaan Pembiayaan				
2020	6.166.484.950.399	5.582.816.579.812	90,53	(583.668.370.587)
2021	14.681.130.860.452	11.914.196.646.991	81,15	(2.766.934.213.461)
2022	5.015.108.618.305	10.701.364.203.815	213,38	5.686.255.585.510
2023	8.895.317.655.192	8.886.564.884.056	99,90	(8.752.771.136)
2024	10.255.502.731.787	9.343.797.504.127	91,11	(911.705.227.660)
Pengeluaran Pembiayaan				
2020	4.450.032.000.000	4.215.991.139.321	94,74	(234.040.860.679)
2021	9.897.615.026.671	6.140.446.854.085	62,04	(3.757.168.172.586)
2022	5.839.589.950.278	4.526.625.491.573	77,52	(1.312.964.458.705)
2023	7.413.367.177.951	6.639.068.343.295	89,56	(774.298.834.656)
2024	9.179.215.380.743	7.849.321.126.348	85,51	(1.329.894.254.395)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode 2020–2024, kinerja pendapatan DKI Jakarta menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,05%. Pendapatan meningkat dari Rp55,88 triliun pada 2020 sehubungan terdampak pandemi menjadi Rp72,95 triliun pada 2024.

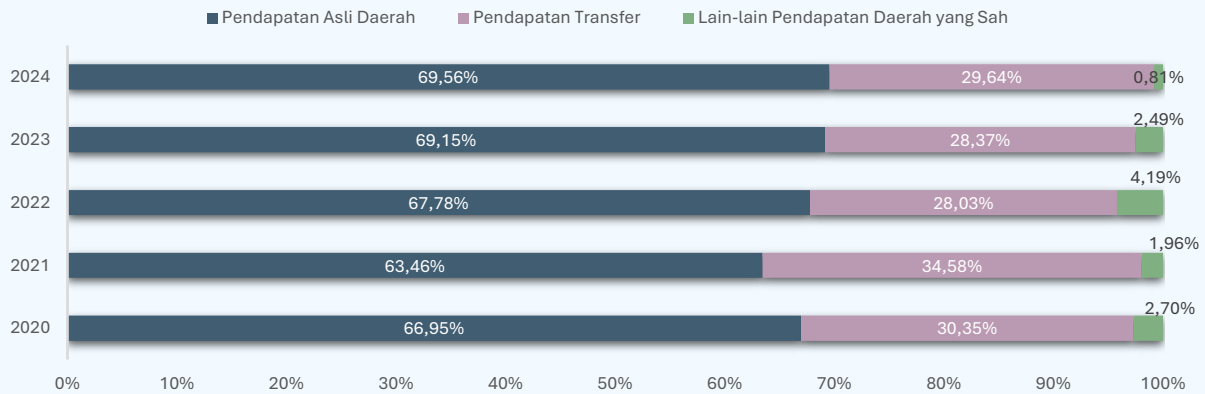
Komponen Pendapatan Asli Daerah tumbuh rata-rata 7,96%, dengan retribusi daerah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,29%, disusul pajak daerah sebesar 8,77%. Pendapatan transfer juga meningkat dengan rata-rata 7,75%, terutama dari Dana Bagi Hasil. Namun, beberapa komponen seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah mengalami penurunan. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh sebesar 0,11%, dengan penurunan yang cukup signifikan pada hibah dari Rp1,50 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp589 miliar di tahun 2024. Keseluruhan komponen Pendapatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Jakarta untuk Tahun Anggaran 2020 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.54 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Jakarta Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	55.887.004	65.567.009	67.290.479	71.065.534	72.952.105	7,05%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37.414.755	41.606.307	45.608.405	49.139.746	50.742.032	7,96%
1.1.1	Pajak Daerah	31.895.263	34.575.563	40.275.148	43.516.482	44.448.075	8,77%
1.1.2	Retribusi Daerah	496.333	383.860	376.978	454.698	713.838	13,29%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	672.492	398.792	402.424	545.869	653.701	3,90%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.350.667	6.248.092	4.553.854	4.622.697	4.926.418	6,14%
1.2	Pendapatan Transfer	16.962.899	22.673.794	18.860.859	20.159.635	21.620.905	7,75%
1.2.1	Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer	16.897.722	22.630.423	18.831.175	20.124.460	21.576.815	7,81%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.567.076	19.347.016	16.010.823	17.049.969	18.032.589	9,40%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	80.882	49.945	51.266	-	-	-
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	22.180	368.173	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	3.249.764	3.233.463	2.769.085	3.052.311	3.176.053	-0,15%
1.2.2	Dana Insentif Daerah	65.177	43.371	29.684	35.175	44.090	-5,29%
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	65.177	43.371	29.684	35.175	44.090	-5,29%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.509.350	1.286.907	2.821.216	1.766.154	589.168	0,11%
1.3.1	Hibah	1.509.350	1.286.907	2.821.216	1.766.154	589.168	0,11%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

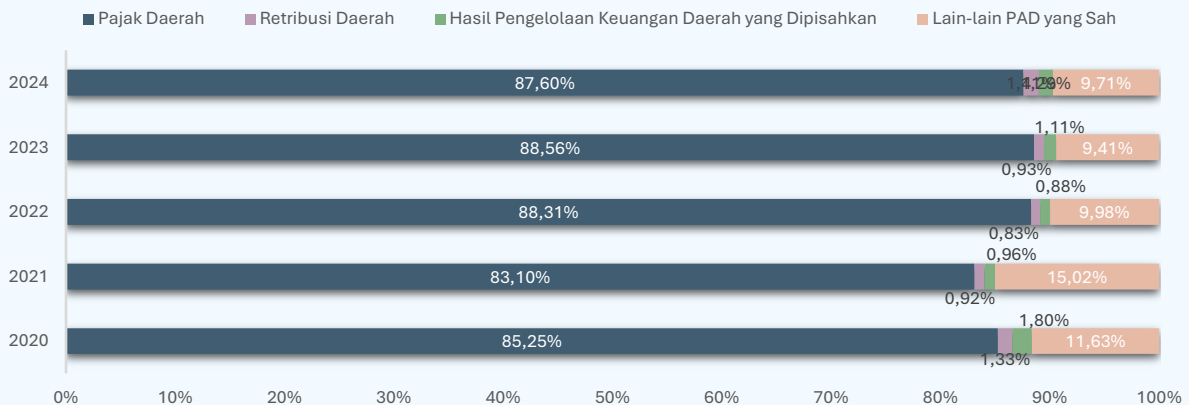
Berdasarkan komponen penyusun pendapatan daerah pada gambar berikut, Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen utama pendapatan daerah dengan tren yang terus meningkat. Sementara itu, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah cenderung fluktuatif. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan perbaikan kinerja fiskal Jakarta dan arah menuju kemandirian pendapatan daerah.



Gambar II.56 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Jakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Pada gambar di bawah terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Jakarta selama 2020–2024, diikuti oleh Pendapatan Transfer, sementara Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi paling rendah.

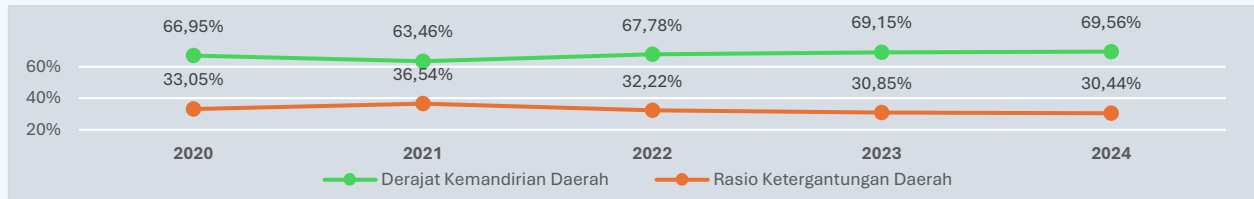


Gambar II.57 Proporsi Komponen Pembentuk PAD Jakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Jakarta mengalami fluktuasi selama 2020–2024, mengalami naik turun dari 85,25% pada 2020 menjadi 87,60% pada 2024. Nilai tertinggi dicapai pada 2024 sebesar Rp 44,44 triliun dan terendah pada 2020 sebesar Rp 31,89 triliun, dengan rata-rata Rp 38,94 triliun. Sementara itu, proporsi Lain-lain PAD yang Sah juga berfluktuasi, tertinggi pada 2021 sebesar 15,02 % dan terendah pada 2023 sebesar 9,41%. Rata-rata nilainya sebesar Rp 1,59 triliun, dengan capaian tertinggi pada 2022 sebesar Rp 2,82 triliun dan terendah pada 2024 sebesar Rp 589 miliar.

Derajat Kemandirian Daerah mencerminkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, sementara Rasio Ketergantungan menunjukkan seberapa besar ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Selama 2020–2024, kemandirian Jakarta cenderung meningkat, dari 66,59% pada 2020 menjadi 69,15% pada 2023 dan 2024. Sebaliknya, rasio ketergantungan menurun dari 36,54% pada 2021 menjadi 29,72% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perbaikan kinerja fiskal Jakarta pasca pandemi menuju kemandirian yang lebih kuat.



Gambar II.58 Grafik Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Belanja Daerah

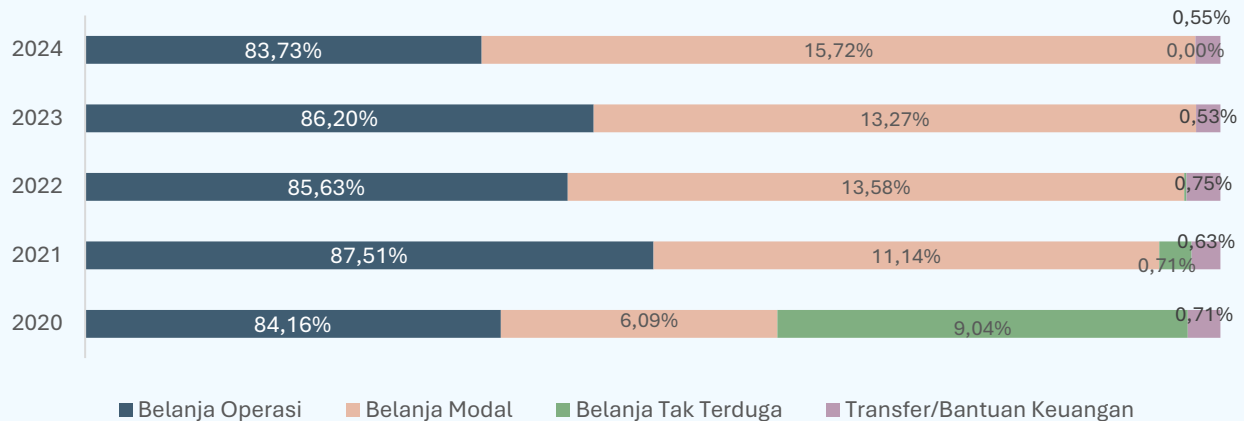
Belanja Daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang mengurangi kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Selama 2020–2024, realisasi Belanja Daerah DKI Jakarta menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat, dari Rp52,08 triliun pada 2020 menjadi Rp70,01 triliun pada 2024, dengan rata-rata realisasi sebesar Rp63,04 triliun. Analisis belanja ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan sebagai dasar perencanaan belanja ke depan dalam mendukung pembangunan daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 hingga tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel II.55 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Jakarta Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Tumbuh
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Belanja Daerah		52.088.134	61.619.040	64.865.121	66.770.610	70.012.729	2,31%
1	Belanja Operasi	43.835.700	53.925.744	55.542.187	57.556.903	58.623.946	2,98%
1.1	Belanja Pegawai	16.686.871	18.816.238	17.705.440	17.977.776	19.190.555	-1,81%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.775.618	21.488.663	23.613.049	25.824.445	26.572.378	6,17%
1.3	Bunga	62.300	86.116	270.633	229.704	180.739	43,71%
1.4	Belanja Subsidi	3.628.167	4.355.292	6.278.333	5.539.653	5.875.838	17,77%
1.5	Belanja Hibah	1.881.883	2.651.074	2.639.327	3.621.683	3.307.808	9,00%
1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.800.616	6.528.360	5.035.405	4.363.641	3.496.629	-2,21%
1.7	Belanja Rugi Selisih Kurs	245	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal	3.173.224	6.865.827	8.808.195	8.857.260	11.004.785	19,39%
2.1	Belanja Tanah	966.124	1.419.026	880.954	442.600	433.525	-20,31%
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	762.688	1.325.812	1.798.854	2.822.976	2.961.717	19,68%
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	413.006	2.148.875	1.735.905	1.653.056	2.385.011	70,29%
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	917.725	1.651.626	4.264.727	3.799.028	4.975.950	39,21%
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	113.681	320.487	127.755	139.600	119.497	17,98%
2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	129.085	-
3	Belanja Tak Terduga	4.707.938	439.889	29.977	-	-	-
4	Transfer/Bantuan Keuangan	371.273	387.580	484.763	356.446	383.997	-9,01%
4.1	Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	371.273	387.580	484.763	356.446	383.997	-8,88%
4.2	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Selama 2020–2024, proporsi Belanja Operasi dalam total Belanja Daerah DKI Jakarta mengalami fluktuasi, dari 84,16% pada 2020, naik menjadi 87,15% pada 2021, lalu turun menjadi 83,73% pada 2024. Belanja Modal juga menunjukkan tren serupa, meningkat dari 6,09% pada 2020 menjadi 15,72% pada 2024, yang merupakan porsi tertinggi selama lima tahun terakhir.



Gambar II.59 Proporsi Komponen Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan mencakup cicilan pokok utang, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, dan pengeluaran lainnya. Rincian Penerimaan Pembiayaan DKI Jakarta tahun 2020–2024 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel II.56 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Belanja Daerah Jakarta Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Tumbuh
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pembiayaan							
A	Penerimaan Pembiayaan	5.582.817	11.914.197	10.701.364	8.886.565	9.343.798	22,85%
1.	Penggunaan SILPA	1.203.971	5.165.696	9.721.719	8.600.097	6.542.421	95,45%
2.	Pencairan Dana Cadangan	1.474.792	-	-	-	-	-
3.	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	2.903.531	6.744.329	979.251	286.278	2.801.305	213,64%
4.	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	4.171	-	-	-	-
5.	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	522	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	-	394	191	72	-

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Tumbuh
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B.	Pengeluaran Pembiayaan	4.215.991	6.140.447	4.526.625	6.639.068	7.849.321	21,07%
1.	Pembentukan Dana Cadangan	95.681	-	-	-	-	-
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.086.681	5.906.817	3.492.066	4.836.397	5.988.136	16,49%
3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	33.630	33.630	1.034.559	1.802.671	1.861.185	763,46%
4.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
6.	Pengeluaran Pembiayaan BLUD	-	-	-	-	-	-
7.	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat	-	200.000	-	-	-	-
Pembiayaan Netto		1.366.825	5.773.750	6.174.739	2.247.497	1.494.476	58,06%
SILPA		5.165.696	9.721.719	8.600.097	6.542.421	4.433.853	5,13%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah Jakarta berfluktuasi tiap tahun, dengan SILPA sebagai kontributor terbesar. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan meningkat dari Rp4,21 triliun pada 2020 menjadi Rp7,84 triliun pada 2024, terutama disebabkan oleh meningkatnya penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah.

B. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Gambaran neraca daerah Jakarta dalam kurun waktu tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

J A K A R T A 2 0 2 5 - 2 0 2 9

Tabel II.57 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Jakarta Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	ASET	520.360.899.906	544.504.580.985	684.976.321.606	715.498.299.812	745.956.336.004	9,79%
A	ASET LANCAR	15.039.191.698	20.101.356.228	18.204.220.678	15.206.617.886	16.487.537.093	4,04%
1	Kas di Kas Daerah	3.954.827.809	6.732.035.382	6.030.074.927	5.454.632.626	3.416.945.253	3,22%
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.472	514.661	24.701	109.645	346	793,35%
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	13.275.313	5.972.289	3.275.220	329.383	3.181.234	168,93%
4	Kas dan Setara Kas BLUD	1.016.838.393	2.810.239.493	2.490.726.625	1.008.514.644	942.341.899	24,73%
5	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	196.314.403	183.639.373	81.840.508	85.056.747	76.180.041	-
6	Kas Lainnya	0	0	32.709.286	13.543.921	130.020	-
7	Piutang Pajak Daerah	10.816.078.130	9.256.873.402	10.995.901.553	11.679.786.241	13.241.938.790	5,99%
8	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-5.350.019.371	-3.938.538.654	-5.665.302.405	-6.386.116.947	-7.584.681.387	12,24%
9	Piutang Retribusi	81.148.183	67.106.246	63.956.433	68.096.445	287.659.875	76,73%
10	Penyisihan Piutang Retribusi	-75.763.246	-56.538.930	-57.157.173	-51.563.663	-206.905.230	66,80%
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.233.492	2.551.687	0	0	0	-
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.099.444.259	3.331.542.361	3.104.392.253	3.030.838.595	3.416.172.019	-
13	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-1.304.783.568	-1.099.925.527	-1.594.910.423	-1.696.690.001	-1.722.362.611	-
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	384.734.934	0	359.067.395	0	2.370.741.523	-
15	Piutang Lainnya	267.312.963	450.781.597	156.416.094	374.339.155	383.637.071	36,28%
16	Penyisihan Piutang Lainnya	-21.629.244	-32.056.052	-32.502.879	-139.785.193	-140.150.376	94,98%
17	Beban Dibayar di Muka	614.373.559	664.271.308	751.750.848	501.750.678	655.570.617	4,67%
18	Persediaan	1.302.789.214	1.722.887.594	1.483.957.715	1.263.775.601	1.347.138.010	2,53%

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	INVESTASI JANGKA PANJANG	66.966.670.316	73.150.176.669	78.314.759.089	84.559.599.246	93.176.692.452	8,61%
1	Investasi Non Permanen	350.000.500	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	14,29%
a	Investasi Dalam Dana Bergulir	904.536.404	1.100.364.684	1.099.970.792	1.099.780.202	1.099.708.356	5,40%
b	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	-554.535.904	-550.364.684	-549.970.792	-549.780.202	-549.708.356	-0,22%
2	Investasi Permanen	66.616.669.816	72.600.176.669	77.764.759.089	84.009.599.246	92.626.692.452	8,60%
C	ASET TETAP	407.084.025.242	427.876.655.106	528.105.329.929	579.286.732.228	593.738.923.386	10,18%
1	Tanah	350.225.518.656	371.964.291.506	466.211.312.147	515.882.640.362	527.255.442.882	11,10%
2	Peralatan dan Mesin	28.323.238.017	28.903.444.030	30.534.777.685	32.771.280.763	30.462.326.362	1,99%
3	Gedung dan Bangunan	42.907.022.852	43.594.169.675	46.684.316.665	47.160.243.336	48.454.852.796	3,11%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.771.147.385	46.377.451.922	55.993.465.847	61.937.757.653	65.909.190.074	9,77%
5	Aset tetap Lainnya	1.431.347.724	2.857.574.026	1.305.487.304	1.388.435.197	1.114.104.353	7,98%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.801.244.841	2.746.965.569	3.489.601.573	2.516.920.525	4.463.525.050	32,25%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-63.375.494.234	-68.567.241.620	-76.113.631.292	-82.370.545.608	-83.920.518.131	7,33%
D	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
E	ASET LAINNYA	31.271.012.651	23.376.392.981	59.120.774.132	31.969.187.416	37.263.185.898	24,57%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	26.597.707	26.287.355	36.714.362	36.651.951	35.662.824	8,91%
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.230.432.233	7.984.230.522	6.561.259.794	6.524.489.357	6.524.180.701	-1,99%
3	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-613.757.533	-671.153.629	-394.222.184	-393.892.000	-394.218.154	-7,98%
4	Aset Tidak Berwujud	265.859.734	502.505.080	566.900.954	634.599.865	715.084.978	31,61%
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-225.723.188	-291.918.325	-364.438.170	-537.631.910	-551.873.045	26,09%
6	Aset Lain-lain	30.321.442.493	22.113.315.782	59.324.093.701	33.076.672.679	43.707.111.197	32,27%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-5.733.838.795	-6.286.873.805	-6.609.534.325	-7.371.702.526	-12.772.762.604	24,89%

J A K A R T A 2 0 2 5 - 2 0 2 9

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
F	PROPERTI INVESTASI	-	-	1.231.237.778	4.476.163.037	5.289.997.175	-
1	Properti Investasi - Tanah	-	-	1.074.729.364	3.367.064.779	4.178.110.485	-
2	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	-	-	453.001.596	1.542.937.242	1.553.795.480	-
3	Properti Investasi - Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	14.163.300	14.163.300	-
4	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-296.493.181	-448.002.284	-456.072.090	-
II	KEWAJIBAN	15.107.695.822	19.975.312.518	19.426.434.755	17.426.015.191	18.006.116.758	5,63%
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.255.881.914	4.091.960.331	4.569.900.472	4.263.242.971	4.023.225.107	-5,70%
1	Utang PFK	1.115.203	3.909.502	1.303.570	652.048	1.615.238	70,41%
2	Utang Bunga Pinjaman	9.120.889	12.398.335	15.030.569	14.739.619	15.646.131	15,34%
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	33.629.623	712.790.858	1.684.301.177	1.861.669.834	1.981.669.834	543,20%
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.121.930.658	848.936.718	505.256.654	216.488.455	221.835.170	-29,87%
5	Utang Belanja	4.082.635.587	2.419.393.165	2.344.638.185	2.147.127.573	1.780.943.312	-17,33%
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.449.954	92.342.791	13.126.032	16.377.360	15.141.616	267,74%
7	Utang Jaminan		2.188.963	6.244.285	6.188.082	6.373.806	-
B	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	9.851.813.908	15.883.352.187	14.856.534.283	13.162.772.220	13.982.891.651	12,40%
1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	9.851.813.908	15.883.352.187	14.856.534.283	13.162.772.220	13.982.891.651	12,40%
III	EKUITAS DANA	505.253.204.084	524.529.268.467	665.549.886.851	698.072.284.621	727.950.219.246	9,97%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		520.360.899.906	544.504.580.985	684.976.321.606	715.498.299.812	745.956.336.004	9,79%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Berdasarkan neraca tersebut, maka dapat dianalisis kemampuan keuangan Jakarta melalui perhitungan rasio pada tabel selanjutnya.

Tabel II.58 Analisis Rasio Keuangan Jakarta Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,86	4,91	3,98	3,57	4,52
2	Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>)	2,61	4,49	3,66	3,27	4,14
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Analisis rasio keuangan Jakarta mencakup Rasio Likuiditas dan Solvabilitas. Rasio likuiditas, yang terdiri dari *current ratio* dan *quick ratio*, menunjukkan kemampuan Jakarta dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nilai kedua rasio ini konsisten di atas 1 selama periode analisis, mencerminkan kekuatan likuiditas yang baik. Sementara itu, rasio solvabilitas yang diukur dari rasio total utang terhadap aset dan rasio utang terhadap modal, juga menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Kedua rasio ini berada di kisaran sangat rendah, yaitu sekitar 0,03% hingga 0,04%, menandakan tingkat risiko keuangan yang sangat kecil dan ketergantungan terhadap utang yang rendah. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan kapabilitas keuangan Jakarta yang kuat dalam pelunasan kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini dapat menjadi opsi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Jakarta untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

C. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Jakarta yang disajikan pada tabel berikut menunjukkan Jakarta memiliki defisit dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel II.59 Penutup Defisit Riil Anggaran Jakarta Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Realisasi Pendapatan Daerah	55.887.004	65.567.009	67.290.479	71.065.534	72.952.105	7,05%
	Dikurangi Realisasi:						
2	Belanja Daerah	52.088.134	61.619.040	64.865.121	66.770.610	70.012.729	7,84%
3	Pengeluaran Pembiayaan	4.215.991	6.140.447	4.526.625	6.639.068	7.849.321	21,07%
A	Defisit Riil	-417.121	-2.192.478	-2.101.268	-2.344.144	-4.909.945	135,62%
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Penggunaan SILPA	1.203.971	5.165.696	9.721.719	8.600.097	6.542.421	95,45%
2	Pencairan Dana Cadangan	1.474.792	-	-	-	-	0,00%
3	Pinjaman Dalam Negeri	2.903.531	6.748.500	979.251	286.278	2.801.305	213,67%
4	Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman Daerah	522	-	394	191	72	0,00%
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.582.817	11.914.197	10.701.364	8.886.565	9.343.798	22,85%
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	5.165.696	9.721.719	8.600.097	6.542.421	4.433.853	5,13%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Jakarta mempunyai SiLPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup kuat untuk membiayai belanja daerah. Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2020 hingga 2024 tabel berikut.

Tabel II.60 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	5.165.696	100%	9.721.719	100%	8.600.097	100%	6.542.421	100%	4.433.851	100%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-671.231	-12,99%	-3.575.780	-36,78%	-10.054.430	-116,91%	697.702	10,66%	275.275	6,21%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Transfer	-155.640	-3,01%	5.800.250	59,66%	1.634.380	19,00%	-64.680	-0,99%	-2.155.522	-48,62%
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-520.744	-10,08%	-1.866.566	-19,20%	-2.086.119	-24,26%	-230.424	-3,52%	-114.487	-2,58%
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	6.862.938	132,86%	8.373.581	86,13%	12.107.045	140,78%	5.374.277	82,15%	6.009.359	135,53%
6	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-583.668	-11%	-2.766.934	-28%	5.686.256	66,12%	-8.753	-0,13%	-911.705	-20,56%
7	Sisa Pembiayaan Pengeluaran	234.041	5%	3.757.168	39%	1.312.964	15,27%	774.299	11,84%	1.329.894	29,99%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 (Audited) Diolah

Data SiLPA Jakarta tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan nilai tertinggi Rp9,72 triliun pada 2021 dan terendah Rp4,43 triliun pada 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, dan faktor fiskal lainnya. Komponen pelampauan PAD mencatat defisit besar pada 2021 dan 2022, lalu berbalik menjadi surplus pada 2023 dan 2024. Pendapatan transfer juga berfluktuasi, dengan surplus tertinggi pada 2021 dan defisit terbesar pada 2024. Pendapatan lain-lain yang sah umumnya defisit, terutama pada 2022. Sementara itu, komponen sisa penghematan belanja menunjukkan surplus stabil tiap tahun, mencerminkan efisiensi anggaran, dengan puncaknya pada 2022 sebesar Rp12,11 triliun.

II.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah

A. Proyeksi Ekonomi Makro

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh membaik. Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mendorong terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi baru, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2026 hingga tahun 2030 diproyeksikan akan tumbuh dalam kisaran 5,10–7,70% (yoy) dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Tabel II.61 Proyeksi Asumsi Makroekonomi Tahun 2026-2030

No.	Skenario	Proyeksi Asumsi Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy %)	5,10 - 6,00	5,20 - 6,50	5,30 - 7,00	5,40 - 7,40	5,50-7,70
2	Tingkat Inflasi (yoy %)	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1

Sumber: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, 2025

Proyeksi ekonomi makro Jakarta pada tahun 2029 diperkirakan tumbuh mencapai 5,4 s.d. 7,4% sudah sejalan dengan kondisi akhir RPJMN dimana pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan target wilayah Jawa-Bali sebesar 7,9% pada tahun 2029. Adapun tingkat inflasi pada periode 2026-2030 diperkirakan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi, tingkat permintaan secara umum diperkirakan meningkat. Namun demikian, inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran 2,5±1 %. Pada tahun 2030, laju inflasi diproyeksikan mencapai 3,25 %.

B. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan

Proyeksi APBD menggambarkan pentingnya untuk memperkuat kapasitas manajemen keuangan daerah. Ini termasuk adopsi teknologi dalam pelaporan keuangan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, dan peningkatan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan anggaran. Dengan mempertimbangkan proyeksi asumsi makroekonomi Jakarta tahun 2026 hingga tahun 2030 di atas, serta melihat performa pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat lebih meningkat secara optimal, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk mencapainya. Pada periode 2026 sampai dengan tahun 2030, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah yaitu:

Pajak Daerah

Kebijakan pajak daerah:

- ☐ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ☐ Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (khususnya yang berkenaan dengan tarif Pajak Parkir).
- ☐ Penyusunan peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan pajak, dan tata kelola pajak daerah.
- ☐ Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Pajak Daerah.
- ☐ Implementasi Kebijakan Pajak Daerah berupa pemberian Insentif Pajak Daerah.

Strategi Pajak Daerah:

- ☐ Intensifikasi
 - Pemutakhiran data wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak secara berkala.
 - Pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara online dan terintegrasi.
 - b. Pengembangan aplikasi *mobile* untuk melakukan pengawasan kewajiban perpajakan.
 - c. Penyederhanaan prosedur administrasi pajak daerah melalui sistem *online*
 - d. Pemanfaatan *artificial Intelligence* untuk menganalisis pola pajak dan mendeteksi potensi kebocoran pajak.
 - e. Konsolidasi data transaksi Wajib Pajak dari berbagai sumber data.
 - f. Peningkatan Kapasitas *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC).

- Peningkatan koordinasi organisasi dengan lembaga-lembaga dalam rangka pertukaran data dan informasi, pengawasan pajak, *law enforcement*, pemungutan pajak daerah, dan sosialisasi pajak daerah.
 - Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka penagihan piutang dan *cleansing* data piutang.
 - Peningkatan kapasitas SDM dalam pemahaman pajak daerah, pemanfaatan teknologi, serta pelayanan publik.
 - Pemberian insentif fiskal daerah yang terarah dan terukur, antara lain keringanan pajak bagi masyarakat dan insentif untuk mendorong investasi di daerah.
- ☐ Ekstensifikasi
- Pemberian insentif fiskal daerah yang terarah dan terukur.
 - Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak pada sektor yang masih perlu digali untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.

Retribusi Daerah

Kebijakan Retribusi Daerah:

- ☐ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ☐ Penyusunan peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan retribusi, dan tata kelola retribusi daerah.
- ☐ Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Retribusi Daerah.

Strategi Retribusi Daerah:

- ☐ Intensifikasi
 - Pengembangan dan penyempurnaan *Retribusi Online Sistem* (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi, melalui perluasan kanal pembayaran retribusi; dan pengintegrasian sistem pemungutan retribusi PD.
 - Harmonisasi Pergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Mendorong PD yang memiliki laboratorium agar mempunyai akreditasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional).
 - Mendorong PD pemungut retribusi untuk menagih piutang retribusi agar semakin mengecil setiap tahunnya.
 - Melakukan evaluasi Perjanjian Kerja sama yang memiliki potensi peningkatan kontribusi.
 - Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan pihak ketiga.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah (BMD) yang belum terutilisasi secara optimal
 - Aktif dalam mengelola rekomendasi hak atas tanah di atas HPL dan pemanfaatan di atas tanah HPL.
 - Aktif dalam mengelola pemanfaatan tanah dan ruang bawah/atas tanah untuk kepentingan infrastruktur.
 - Melakukan pengindahan bangunan *idle/underutilized* yang berpotensi meningkatkan pendapatan.
 - Tidak memperpanjang perjanjian kerja sama pemanfaatan aset yang berpotensi merugikan daerah.
 - Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (khusus untuk BLUD Aset).
 - Melakukan evaluasi secara berkala atas tarif objek Retribusi Daerah dengan memperhatikan *willingness to pay* (WTP), *ability to pay* (ATP) dan biaya penyediaan layanan (OM dan Investasi) objek retribusi daerah.
 - Melakukan evaluasi secara berkala atas tarif objek Retribusi Daerah dengan memperhatikan *willingness to pay* (WTP), *ability to pay* (ATP) dan biaya penyediaan layanan (OM dan Investasi) objek retribusi daerah.
- ☐ Ekstensifikasi
 - Melakukan revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk perluasan objek retribusi pemanfaatan ruang.
 - Melakukan evaluasi terkait penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar melalui Pergub Penyesuaian Tarif dengan perluasan rincian objek dan detail rincian objek.
 - Implementasi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE)/ Retribusi ERP.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan dari BUMD dan penyertaan modal daerah, seperti dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dan dividen. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja keuangan dan operasional BUMD, sehingga memengaruhi kontribusi penerimaan dari sumber ini. Rata-rata pertumbuhan per tahun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang biasa diberikan kepada Pemerintah Daerah dari tahun 2010 sampai 2023 sebesar 11,04% per tahun. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- ☐ Meningkatkan kesehatan, tata kelola dan manajemen risiko BUMD;
- ☐ Menciptakan budaya inovasi guna meningkatkan pelayanan publik berstandar global;
- ☐ Melakukan transformasi digital dalam proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi
- ☐ Menciptakan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;
- ☐ Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- ☐ Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerja sama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta;
- ☐ Meningkatkan diversifikasi bisnis kepada sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi;
- ☐ Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui skema pembiayaan kreatif dan sumber pendanaan relevan lainnya.
- ☐ Pendirian BUMD baru yang mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan mampu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- ☐ Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul.

Sedangkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Lain-Lain Milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Jakarta sebagai berikut:

- ☐ Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan pihak ketiga;
- ☐ Melakukan evaluasi Perjanjian Kerja sama yang memiliki potensi peningkatan kontribusi;
- ☐ Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
- ☐ Mengoptimalkan Pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah (BMD) yang belum terutilisasi secara optimal (*underutilized*) dan BMD yang tidak digunakan atau dimanfaatkan atau mangkrak (*idle*) agar menciptakan penerimaan daerah;
- ☐ Aktif dalam mengelola rekomendasi hak atas tanah di atas HPL dan pemanfaatan di atas tanah HPL;
- ☐ Aktif dalam mengelola pemanfaatan tanah dan ruang bawah/atas tanah untuk kepentingan berbagai Infrastruktur, antara lain transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur reklame;
- ☐ Menciptakan regulasi yang memadai dengan pengaturan yang jelas, tegas, tidak multitafsir, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lain, tidak terjadi kekosongan hukum, dan dapat dilaksanakan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan BMD *idle* dan/atau *underutilized*;
- ☐ Melakukan beautilifikasi bangunan *idle/underutilized* yang berpotensi meningkatkan pendapatan berdasarkan kajian yang telah disusun;
- ☐ Mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerja sama pemanfaatan aset yang berpotensi merugikan;
- ☐ Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini Jakarta memenuhi aspek kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan serta berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat sehingga pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dilaksanakan difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah MRT sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), serta koordinasi dengan PT. Jasa Raharja dalam menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tabel II.62 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026–2030 (Miliar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	56.452	58.497	60.862	62.152	64.477
1.1.1	Pajak Daerah	49.198	51.133	53.175	54.157	56.157
1.1.2	Retribusi Daerah	1.839	2.345	2.440	2.498	2.558
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774	733	792	857	927
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.641	4.286	4.455	4.640	4.835
1.2	Pendapatan Transfer	26.137	31.347	33.614	35.239	37.513
1.2.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	22.352	26.562	28.358	29.589	31.374
1.2.2	Dana Alokasi Umum	382	402	422	443	465
1.2.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.371	4.346	4.794	5.165	5.630
1.2.4	Insentif Fiskal	32	38	40	42	44
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.689	11.754	6.312	7.618	4.862
a.	Pendapatan Hibah	2.689	11.754	6.312	7.618	4.862
a.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - Pembangunan MRT	2.676	11.741	6.299	7.605	4.849
a.2	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - PT. Jasa Raharja	13	13	13	13	13
Total Pendapatan Daerah		85.278	101.598	100.788	105.009	106.852

Sumber: LPEM UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025

C. Kebijakan dan Proyeksi Belanja

Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan rencana pembangunan secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD tahun 2025-2029, diantaranya sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur melalui kontinuitas pelaksanaan program *quickwins* 100 hari dan implementasi 10 Program Kerja Gubernur/Wakil Gubernur;
2. Penyelesaian pembangunan infrastruktur fundamental yang menyelesaikan permasalahan kota (*DSP/DKI Strategic Projects*), khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar (*sufficient basic services*);
3. Perbaikan peringkat kota global melalui pelaksanaan *Global City Programs* (GSP);
4. Mempertimbangkan pencapaian target pembangunan di Tahap I RPJPD 2025-2045 diantaranya transformasi ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
5. Mendukung agenda pembangunan (Asta Cita) dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta;
6. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

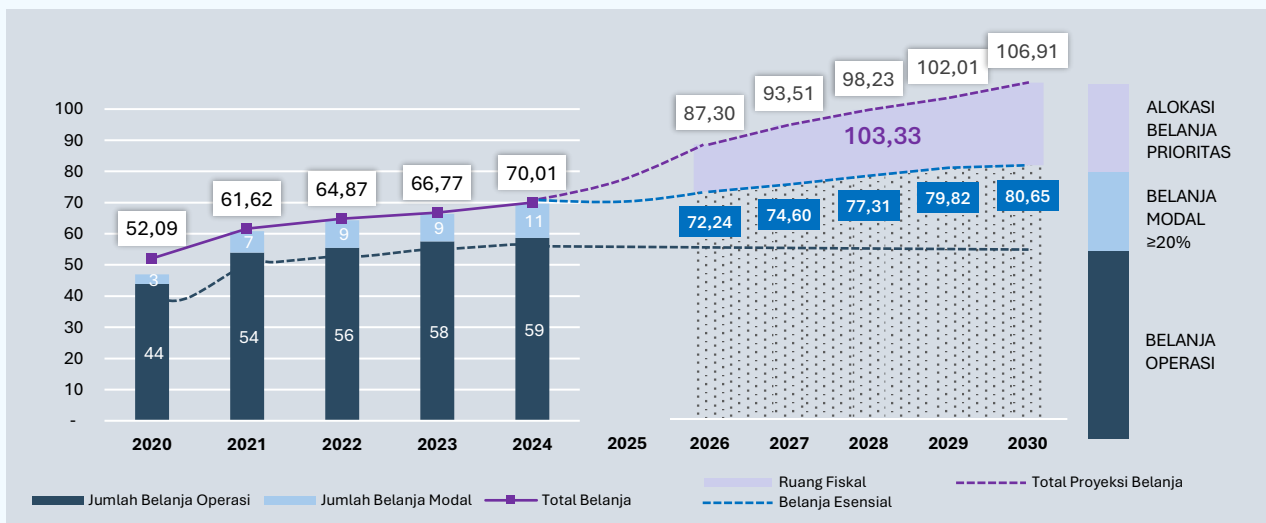
Tabel II.63 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026–2030 (Miliar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Operasi	69.890	68.605	71.377	74.272	75.688
2.1.1	Belanja Pegawai	22.180	19.629	19.563	19.507	19.459
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.946	33.372	34.916	37.916	39.827
2.1.3	Belanja Bunga	89	101	97	92	87
2.1.4	Belanja Subsidi	6.436	8.034	8.531	8.689	8.846
2.1.5	Belanja Hibah	3.034	2.907	3.707	3.507	2.907
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.205	4.562	4.562	4.562	4.562
2.2	Belanja Modal	15.861	23.589	25.561	26.472	29.959
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4	Belanja Transfer	387	313	288	264	264
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	387	313	288	264	264
Total Belanja		87.297	93.507	98.226	102.009	106.911

Sumber: LPEM UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, pada periode 2026-2030 total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp.487,95 Triliun. Dengan mendorong peningkatan proporsi belanja modal dan optimalisasi proporsi belanja operasi, maka dari total belanja tersebut dapat dialokasikan ruang fiskal untuk belanja prioritas sejumlah Rp 103,33 Triliun. Adapun pemanfaatan belanja prioritas tersebut, diutamakan untuk kontinuitas pelaksanaan program *quickwins* dan program kerja Gubernur/Wakil Gubernur, DSP (*DKI Strategic Projects*), dan GCP (*Global City Programs*). Besaran belanja prioritas jangka menengah tersebut dapat disesuaikan alokasinya pada perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya optimalisasi belanja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *quality spending* dan *revenue driven expenditure*. Belanja yang produktif dan tepat sasaran yaitu mengalokasikan belanja Urusan Pemerintahan untuk belanja wajib dan mengikat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kebutuhan esensial Perangkat Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; serta efisiensi belanja dengan *switching* atau pengurangan alokasi 'program lama' ataupun program yang beririsan dengan program nasional melalui integrasi kebijakan.



Gambar II.60 Alokasi Belanja Prioritas Tahun 2026–2030

D. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah mencakup penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun proyeksi. Untuk periode 2025–2029, kebijakan pembiayaan Jakarta meliputi penerimaan pembiayaan dari SILPA, obligasi daerah, pengembalian PMD, pinjaman daerah (termasuk dari pemerintah pusat untuk proyek MRT), serta pengembalian investasi dana bergulir. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran di masa yang akan datang, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB) / laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
4. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan;
5. Asumsi penyerapan pendapatan rata-rata per tahun;
6. Asumsi penyerapan belanja rata-rata per tahun, antara lain dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa (seperti sisa lelang, gagal lelang), harga satuan, efisiensi dan lain-lain;
7. Asumsi penyerapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan rata-rata per tahun.

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan bagian pelampauan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran;
2. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
6. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
7. Mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Tabel II.64 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026–2030

No.	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	9.573	5.738	7.163	10.780	12.892
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	4.705	4.798	4.918	5.041	5.167
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.868	939	2.245	5.739	7.725
a.	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang (Penerusan Pinjaman MRT Jakarta)	3.068	939	2.245	5.739	7.725
b.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	1.800	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.555	13.829	9.726	13.780	12.833
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.744	12.680	8.543	13.344	12.574
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.810	1.149	1.182	436	259
a.	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	244	259	259	259	259

No.	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.1	Pembayaran Pokok Utang JEDI	34	34	34	34	34
a.2	Pembayaran Pokok MRT	210	225	225	225	225
b.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	1.567	890	890	178	0
b.1	Pembayaran Pokok Pinjaman PEN	1.567	890	890	178	0
TOTAL PEMBIAYAAN		2.018	-8.091	-2.563	-3.000	59

Sumber: LPEM UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025

E. Proyeksi APBD 2025-2029

Proyeksi APBD untuk periode 2026 hingga 2030, sebagaimana tercantum dalam tabel terlampir, disusun berdasarkan sejumlah konsideran yang saling berkaitan dan mendasari perencanaan fiskal jangka menengah, meliputi:

- ☐ Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2026-2030.
- ☐ Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang telah dijabarkan sebelumnya.
- ☐ Tren Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada beberapa tahun terakhir.
- ☐ Rencana pemenuhan Belanja Prioritas Daerah, termasuk pendanaan program-program strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun yang akan datang.
- ☐ Asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Tabel II.65 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030 (Miliar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan	85.278	101.598	100.788	105.009	106.852
1.1	Pendapatan Asli Daerah	56.452	58.497	60.862	62.152	64.477
1.2	Pendapatan Transfer	26.137	31.347	33.614	35.239	37.513
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.689	11.754	6.312	7.618	4.862
2	Belanja	87.297	93.507	98.226	102.009	106.911
2.1	Belanja Operasi	69.890	68.605	71.377	74.272	75.688
2.2	Belanja Modal	15.861	23.589	25.561	26.472	29.959
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4	Belanja Transfer	387	313	288	264	264
	Surplus/Defisit	-2.018	8.091	2.563	3.000	-59
3	Pembiayaan	2.018	-8.091	-2.563	-3.000	59
3.1	Penerimaan Pembiayaan	9.573	5.738	7.163	10.780	12.892
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.555	13.829	9.726	13.780	12.833
Total APBD		94.852	107.336	107.951	115.789	119.744

Sumber: LPEM UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tren pembiayaan menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Strategi pengelolaan risiko yang matang menjadi esensial dalam menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks di tingkat lokal. Keterlibatan aktif dari berbagai stakeholders, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin timbul. Demikian dengan memperkuat kapasitas manajemen keuangan daerah dan meningkatkan sinergi antara semua pihak terkait, proyeksi APBD ini menawarkan potensi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial demi mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Analisis ini menekankan pentingnya adopsi strategi yang berorientasi pada keberlanjutan untuk memastikan bahwa setiap investasi dan pengeluaran dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang.

Selain itu, proyeksi APBD juga menggambarkan pentingnya untuk memperkuat kapasitas manajemen keuangan daerah. Ini termasuk adopsi teknologi dalam pelaporan keuangan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, dan peningkatan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan anggaran. Keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat sipil dan pihak swasta dapat memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks regulasi, meskipun tidak secara spesifik disebutkan, implementasi kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip keuangan yang baik dan keterbukaan dalam penggunaan dana publik sangat penting. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa setiap pengeluaran didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Secara keseluruhan, analisis proyeksi APBD 2026-2030 menyoroti pentingnya kebijakan keuangan yang berkelanjutan dan responsif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang inklusif. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap keputusan anggaran berkontribusi secara positif terhadap visi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

II.2.3. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (*gap*) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah memastikan keberlanjutan pendanaan pembangunan infrastruktur, penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Indikatif Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur DKI Jakarta Menuju Peringkat Atas Kota Global

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang Jakarta sebagai kota global, Jakarta perlu melaksanakan program-program terstruktur di berbagai aspek pembangunan, di mana masing-masing sektor memiliki kebutuhan investasi yang berbeda. Berdasarkan Studi Jakarta Rise #20 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025, untuk mewujudkan program-program yang mendorong pencapaian posisi Jakarta sebagai 20 (dua puluh) besar kota global dunia, dibutuhkan total belanja sekitar Rp4.700 triliun selama 20 tahun ke depan atau sebesar Rp1.064 triliun untuk 5 tahun ke depan. Proyeksi tersebut didasarkan atas tiga kategori pengeluaran berikut:

1) *Business-as-Usual (BAU)*

Proyeksi BAU dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan historis dan estimasi kebutuhan di masa mendatang yang dialokasikan untuk belanja operasional rutin pemerintah daerah, seperti gaji aparatur sipil negara, pengadaan barang dan jasa, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Selain itu, sebagian pengeluaran BAU juga dialokasikan untuk mendukung pembiayaan BUMD yang menjalankan layanan dan infrastruktur yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Estimasi kebutuhan pengeluaran BAU sebesar Rp462 triliun untuk 5 tahun ke depan.

2) *Proyek Strategis DKI Jakarta (DKI Strategic Project/DSP)*

Merupakan proyek strategis yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat keamanan dan keselamatan publik, serta menyediakan infrastruktur dan layanan dasar esensial bagi masyarakat. Selain menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur saat ini, proyek-proyek tersebut juga bertujuan untuk membangun fondasi dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global. Kebutuhan pembiayaan untuk DSP selama 20 tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp650 triliun atau sekitar Rp236 triliun untuk 5 tahun ke depan. Proyek Strategis DKI Jakarta (DSP) mencakup 14 (empat belas) proyek utama seperti *Jakarta Sewerage System (JSS)*, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), *Mass Rapid Transit (MRT)*, *Light Rail Transit (LRT)*, Penyediaan Hunian Layak, Pengendalian Banjir, Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemda, Penyediaan RTH, Rehabilitasi atau Pembangunan Sekolah serta Infrastruktur Transformasi Digital. Rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.66 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Kota Global dan Potensi Skema Pendanaan/Pembiayaan (2025-2045)

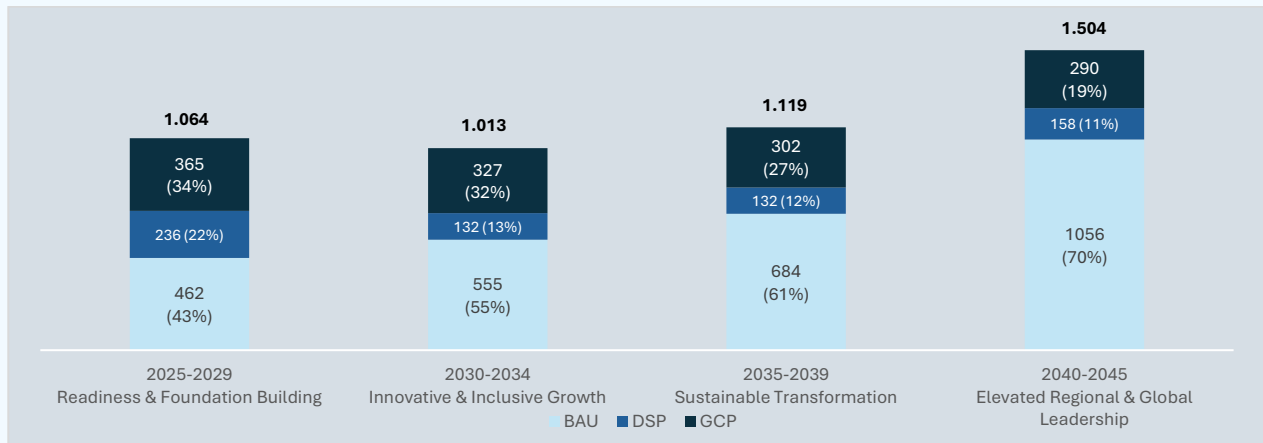
No	Kebutuhan Infrastruktur	Keterangan	Biaya (Triliun Rp)		Potensi Skema Pendanaan / Pembiayaan			
1	Jakarta Sewerage System (JSS)	Zona 1, 2, 4, 5, 6, 8, dan 10 Zona 3, 7, 8, 9, 11 12, 13 dan 14	89,84	APBD/ APBN	KPBU	Pinjaman Luar Negeri	Climate Finance	Hibah
2	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Subsidi Air Bersih untuk daerah krisis air dan layanan SPAM Regional	14,48	APBD/ APBN	KPBU	Blended Finance	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Susun dan Peningkatan Kualitas Permukiman	47,33	APBD/ APBN	KPBU	Pinjaman Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	
4	Pengendalian Banjir	Pembangunan/rehabilitasi tanggul pengaman pantai, sistem polder, sistem pompa dan pintu air, waduk dan situ, pengadaan tanah sungai dan waduk, pengerukan dan peningkatan kapasitas saluran dan drainase	14,83	APBD/ APBN	Pinjaman Daerah			
5	Penanganan Sampah	RDF dalam kota, saringan sampah, landfill mining, PLTSa, sarana (<i>truck</i>)	14,12	APBD/ APBN	Transfer Development Right (TDR)	Pinjaman Daerah		
6	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Infrastruktur <i>complete street</i>	28,45	APBD/ APBN	Transfer Development Right (TDR)	Disinsentif Pemanfaatan Ruang		
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemda	Penerapan konsep green energy dan ramah disabilitas	11,75	APBD/ APBN	Climate Finance			
8	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan tanah dan pembangunan taman	98,46	APBD/ APBN	Climate Finance	CSR		
9	Pendidikan	Rehabitasi/pembangunan sekolah	6,51	APBD/ APBN	CSR			

No	Kebutuhan Infrastruktur	Keterangan	Biaya (Triliun Rp)		Potensi Skema Pendanaan / Pembiayaan		
10	Mass Rapid Transit (MRT)	North-South Line (extention), East-West (Fase 1)	123,92	APBD/ APBN	Hibah		
11	Light Rail Transit (LRT)	Manggarai-Dukuh Atas-Karet-Pesing-Rajawali-JIS-Danau Sunter Barat-Kelapa Gading; Danau Sunter Barat-PIK; Velodrome-Klender-Halim; Pulogebang-Joglo	79,95	APBD/ APBN	KPBU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah
12	Penanggulangan Bencana	Infrastruktur Kebakaran dan Penyelamatan	2,14	APBD/ APBN	CSR		
13	Transformasi Digital	SPBE, Ekosistem Kota Cerdas	2,76	KPBU			
14	Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN)	Fase B (Tanggul Pantai dan Laut termasuk Reklamasi)	123	APBD/ APBN	KPBU	Private Investment	Obligasi/Sukuk Daerah
Total Kebutuhan Biaya			657,55				

Sumber : Analisis Bappeda, 2025

3) Program Kota Global (*Global City Programs/GCP*)

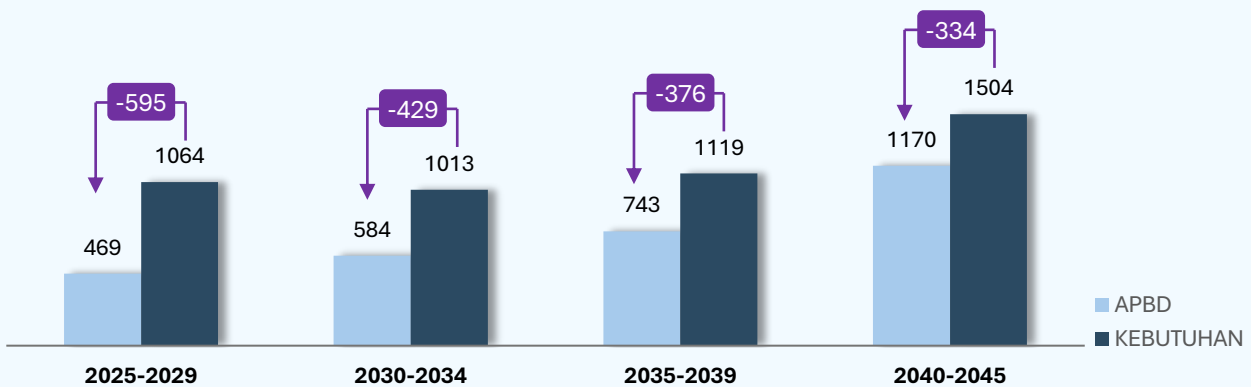
Merupakan proyek inisiatif lanjutan yang dirancang untuk memperkuat fondasi BAU dan DSP dalam rangka mendorong transformasi Jakarta menjadi salah satu dari 50 besar kota global pada tahun 2030 dan 20 besar pada 2045. GCP mencakup lebih dari seratus kegiatan yang tersebar di tujuh pilar utama pembangunan: Bisnis & Ekonomi, Masyarakat & Tenaga Kerja, Pariwisata & Penjenamaan Kota, Lingkungan & Keberlanjutan, Infrastruktur & Mobilitas, Penelitian & Inovasi, serta Tata Kelola, Kelembagaan & Pembiayaan yang dijalankan dalam kerangka Visi dan Misi Jakarta. Total kebutuhan pembiayaan untuk GCP sebesar Rp 365 triliun untuk 5 tahun ke depan. Beberapa contoh program utama meliputi pengembangan kawasan *Transit-Oriented Development (TOD)*, peningkatan kesiapan infrastruktur pusat data, serta transformasi kawasan pesisir utara dan Kepulauan Seribu menjadi pusat terpadu untuk gaya hidup, komersial dan pariwisata.



Gambar II.61 Proyeksi Kebutuhan Belanja Jakarta 2025-2045 (Triliun Rupiah)

Sumber: Studi Jakarta Rise #20 oleh Kearney, 2025

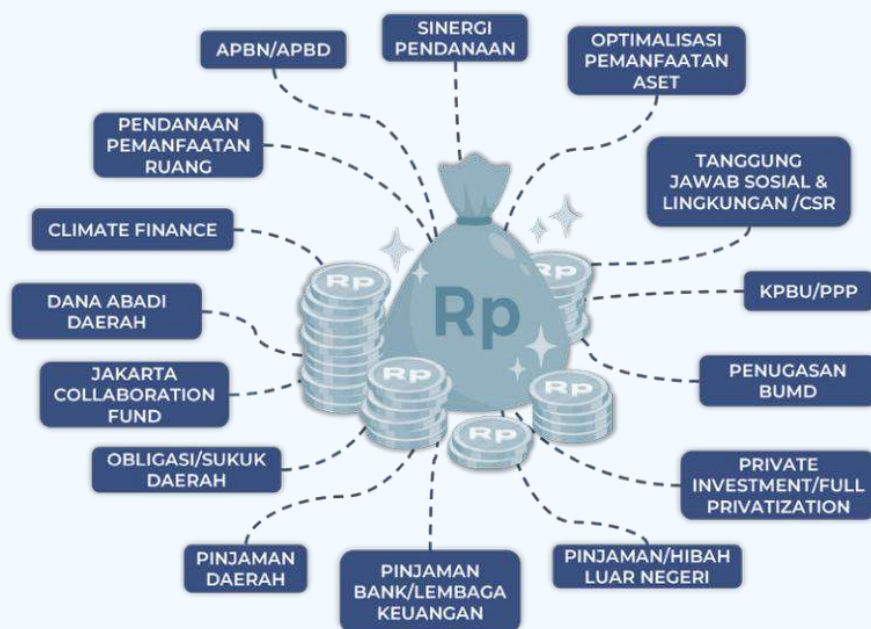
Secara empiris, tren realisasi APBD Jakarta 5 tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik serta berkurangnya kapasitas fiskal karena adanya situasi yang tidak biasa (munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020). Untuk itu pada RPJMD 2025-2029 kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas, karena dengan pendapatan daerah yang konservatif dan tidak didukung dengan *creative financing*, Jakarta akan defisit 595 T.



Gambar II.62 Proyeksi Defisit Anggaran Jakarta Tanpa Skema Pembiayaan Alternatif

Sumber: Studi Jakarta Rise #20 oleh Kearney, 2025

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, optimalisasi pemanfaatan aset, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerja sama secara *Business to Business* (B to B) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis, berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.63 Kerangka Alternatif Pendanaan yang dapat Diimplementasikan

Sumber : Analisis Bappeda, 2025

Adapun penjelasan masing-masing alternatif pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pinjaman / Utang Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan. Pembiayaan Utang Daerah harus memenuhi persyaratan teknis minimal, yaitu administrasi, keuangan dan kelayakan kegiatan. Persyaratan Keuangan terdiri atas:

1. Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
2. Rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah, dan
3. Batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah yang dihitung pada saat pengajuan Pembiayaan Utang Daerah.

Pembiayaan Utang Daerah dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

□ Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pinjaman Daerah dapat digunakan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Terkait dengan Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD. Namun demikian, Pinjaman Daerah dimaksud harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan. Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah. Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. Adapun pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian.

Adapun syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain:

1. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
5. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

❑ Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (*Grant/Loan*)

Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya:

Tabel II.67 Proyek Jakarta dengan Skema Pinjaman Daerah yang Bersumber Dari Luar Negeri

No	Proyek	Sumber Pinjaman Luar Negeri
1	<i>Jakarta Emerge Dredging Initiative</i> (JEDI)	World Bank
2	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI)	Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)
3	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor Selatan-Utara Fase II A (Bundaran HI-Kota)	Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)
4	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap 1	Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB)
5	<i>Jakarta Sewerage System</i> (JSS) Zona 1	Pemerintah Pusat meminjam kepada Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk paket 1-4, aset hasil pembangunan akan dihibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta
6	<i>Jakarta Sewerage System</i> (JSS) Zona 6	Pemerintah Pusat meminjam kepada Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), aset hasil pembangunan akan dihibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta

Sumber : Analisis Bappeda, 2025

❑ Obligasi Daerah/ Sukuk Daerah

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, baik Obligasi Daerah maupun Sukuk Daerah merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Barang Milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah. Barang Milik Daerah yang disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa tanah dan/atau bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan. Aset Sukuk Daerah tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.

Beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, diantaranya:

- Investasi prasarana dan/atau sarana pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (*revenue bond*). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (*general bond*) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
- Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah/Sukuk Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

B. Sinergi Pendanaan

Dalam rangka memperluas opsi pembiayaan pembangunan, khususnya untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya di tingkat daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi pendekatan Sinergi Pendanaan. Sebagaimana Pasal 167 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sinergi Pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD. Pendanaan dari APBD dapat berasal dari PAD, Transfer ke Daerah (TKD), dan/atau Pembiayaan Utang Daerah. Pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan, Pemerintah dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/ atau tugas pembantuan.

Sinergi Pendanaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sinergi Pendanaan merujuk pada integrasi berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBD maupun selain APBD. Sumber pendanaan APBD termasuk Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) dan/atau Penerimaan Pembiayaan (Utang) Daerah, sementara sumber pendanaan Non-APBD dapat diperoleh melalui skema kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau melalui dukungan pembiayaan dari pihak lain.

Pendanaan dari pihak lain sebagaimana diatur dalam PMK No. 84 Tahun 2024 dapat bersumber dari pemerintah berupa belanja kementerian/lembaga, swasta, BUMN, BUMD, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan/atau sumber lainnya yang sah. Pendekatan Sinergi Pendanaan memberikan fleksibilitas dan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendanaan lintas sumber dalam mendukung program strategis nasional maupun daerah.

C. Penugasan BUMD

Penugasan BUMD merupakan skema pendanaan alternatif berupa pemberian tugas oleh Pemerintah kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi pelayanan publik tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BUMD. Dalam praktiknya, Pemerintah dapat memanfaatkan BUMD untuk menjalankan proyek-proyek yang membutuhkan keahlian sektor publik, seperti dalam penyediaan infrastruktur. Selain berasal dari Pemerintah Daerah, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 76 Tahun 2019 penugasan juga dapat merupakan mandat dari Pemerintah Pusat yang diteruskan melalui Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan penugasan BUMD, sumber pendanaan dapat berasal dari berbagai mekanisme yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan, antara lain termasuk:

- a. Modal perusahaan
- b. Patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah
- c. Penyertaan modal Pemerintah Daerah
- d. Pinjaman dari lembaga keuangan
- e. Penerbitan surat utang atau obligasi
- f. Pemberian pinjaman Daerah
- g. Hibah
- h. Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah
- i. Bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembiayaan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah

ditetapkan sebelumnya yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (*solicited*) maupun prakarsa dari Badan Usaha (*unsolicited*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 22 (dua puluh dua) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*value for money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktivitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan namun tidak terbatas pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur serta Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Beberapa kegiatan yang masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, diantaranya meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar;
- b. Penyelenggaraan LRT/Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta;
- c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lingkup hilir;
- d. Fasilitas *Jakarta Sewerage System*/Pengolahan Air Limbah;
- e. Fasilitas pengolahan dan penanganan sampah;
- f. Penyediaan Hunian Terjangkau/*Affordable Housing*;
- g. Penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- h. Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, telah dibentuk Simpul Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018. Simpul Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk pengoptimalan pengimplementasian skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta, Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Perangkat Daerah/BUMD, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain, dan dapat dibantu oleh Profesional baik perseorangan maupun tim, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018.

E. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) / *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak. Di lain sisi, kemampuan keuangan Pemerintah semakin terbatas. Oleh karena itu, skema TJSL/CSR hadir sebagai salah satu solusi dengan risiko yang rendah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Di samping itu, TJSL/CSR dapat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan TJSL/CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU). Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, TJSL/CSR dilaksanakan secara sukarela di mana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TJSL/CSR dilaksanakan. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dunia usaha tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui Forum TSLDU.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, keberadaan Forum TSLDU diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan operasional Forum TSLDU dibebankan pada dana TJSL/CSR masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Nantinya, semua bentuk kontribusi yang difasilitasi melalui Forum TSLDU akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada pemberi kontribusi. Pelaksanaan TJSL/CSR dilakukan melalui kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TJSL/CSR terkait barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah. Adapun ruang lingkup TJSL/CSR berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 meliputi bina sosial dan budaya, bina ekonomi, bina fisik lingkungan, dan penanggulangan bencana.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan TJSL/CSR, ke depan akan terus dilakukan penguatan melalui perbaikan kebijakan/regulasi dalam pelaksanaan TJSL/CSR seperti penguatan definisi Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi, penguatan prinsip pelaksanaan yang tidak hanya menekankan kepada prinsip sukarela, tetapi juga prinsip tanggung jawab, kolaborasi, saling menghormati, kesetaraan, tidak mengikat, efektif dan efisien, perluasan pelaku TJSL/CSR yang tidak hanya dapat dilaksanakan oleh dunia usaha saja, melainkan juga organisasi, perguruan tinggi, asosiasi atau penguatan jenis kegiatan TJSL/CSR yang terbuka untuk semua bidang pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

F. Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang

☐ Kewajiban Pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)

Salah satu bentuk sumber pembiayaan yang saat ini masih dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana kota adalah melalui penyelesaian kewajiban dari pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tidak lagi menerbitkan IPPR, namun penyelesaian atas piutang kewajiban dari pemegang IPPR masih terus dilanjutkan. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang sendiri merupakan izin yang sebelumnya diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang di atas lahan seluas 5.000 m² atau lebih, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan

ruang dalam batasan sub zona sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum IPPR, izin prinsip ini dikenal dalam bentuk Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Adapun pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud di atas meliputi pembangunan jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), atau tempat pembuangan sampah. Untuk pembangunan sarana meliputi pembangunan sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, atau sarana parkir. Sedangkan untuk pembangunan utilitas umum meliputi pembangunan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, atau sarana penerangan jasa umum.

Pada dasarnya pemenuhan kewajiban pemegang IPPR dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan melalui kontribusi swasta/masyarakat. Namun, guna terus mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban pemegang IPPR dan pencapaiannya yang dirasa belum optimal, pengelolaan kewajiban dimaksud perlu ditingkatkan ke depannya melalui upaya penagihan atas pemenuhan kewajiban pemegang IPPR secara berkala dan upaya peningkatan keterbukaan informasi dan perizinan terpadu berbasis daring (*online*) yang menyimpan seluruh informasi terkait izin dan kewajiban yang dapat diakses oleh berbagai pihak secara mudah.

Sejak tahun 2009 hingga 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penerbitan IPPR dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pihak pemegang IPPR dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen PPK dituangkan bentuk dan luasan kewajiban yang harus diserahkan dan/atau disediakan, serta batas waktu penyelesaian masing-masing kewajiban fasos fasum. Namun demikian, baik dokumen IPPR maupun PPK hanya menyebutkan luasan kewajiban dan tidak menyebutkan nilai (dalam rupiah) dari kewajiban fasos fasum IPPR, sehingga fasos fasum yang berpotensi menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi secara handal dalam satuan rupiah tertentu, dan sangat mungkin nilainya berbeda dengan nilai pada saat dilakukan serah terima kewajiban.

Atas kewajiban IPPR yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kewajiban tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang pada neraca karena belum memenuhi kualifikasi pencatatan aset (belum ada nilai yang pasti). Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat ditandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai perhitungan NJOP untuk lahan dan nilai appraisal untuk konstruksi yang dicantumkan. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai nilai wajar atas potensi pendapatan dari kewajiban fasos fasum IPPR. Di samping itu, tingkat ketertagihan atas pemenuhan kewajiban fasos fasum IPPR memiliki ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

1. Kewajiban yang tidak terdefinisi dengan jelas di dalam IPPR;
2. Adanya tumpang tindih kewajiban IPPR akibat dari peralihan kepemilikan IPPR yang tidak dilanjutkan dengan penyempurnaan IPPR sebelumnya/lama;
3. Adanya fasos fasum yang dibangun tidak sesuai dengan penetapan kewajiban dalam IPPR;
4. Rencana kota yang dinamis;
5. IPPR belum dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitannya (belum ada pembangunan di lokasi);
6. Pengembang pailit atau sulit ditemukan keberadaannya; dan
7. Belum diterapkannya sanksi atas keterlambatan penyelesaian kewajiban fasos fasum IPPR.

☐ Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif. Penetapan disinsentif didasarkan atas kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Objek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya. Terdapat dua skenario disinsentif yang ditentukan oleh KLB Dasar dan KLB Optimal. Kedua skenario tersebut adalah:

1. Disinsentif yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang antara KLB Dasar dan KLB Optimal
Apabila daya dukung dan daya tampung kondisi eksisting kawasan sudah sesuai dengan rencana RDTR, dikenakan disinsentif fiskal berupa setoran uang tunai yang akan menjadi atau diperhitungkan sebagai lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Sementara apabila kondisi eksisting kawasan belum memenuhi daya dukung dan daya tampung yang direncanakan dalam RDTR, maka dikenakan disinsentif non-fiskal yang dapat berupa kewajiban ganti rugi terhadap lingkungan dan/atau pihak yang dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang dan/atau kontribusi berupa pembangunan sarana prasarana umum yang akan menjadi atau diperhitungkan sebagai tambahan aset daerah yang sah.

2. Disinsentif yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang melampaui KLB Optimal
Dikenakan disinsentif non-fiskal yang dapat berupa kewajiban ganti rugi terhadap lingkungan dan/atau pihak yang dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang dan/atau kontribusi berupa pembangunan sarana prasarana umum yang akan menjadi atau diperhitungkan sebagai tambahan aset daerah yang sah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, terdapat rencana struktur ruang Sistem Pusat Pelayanan yang merupakan kawasan yang dioptimalkan pembangunannya sebagai Kawasan Berorientasi Transit (TOD) dengan densitas dan intensitas lebih tinggi. Pengaturan teknis terkait ketentuan intensitas tinggi ini diatur melalui satu teknik pengaturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 adalah pemberian Zona Bonus. Zona Bonus memberikan peluang kepada masyarakat atau pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang, seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan/atau Koefisien Tapak Basement (KTB), di atas batas dasar yang ditetapkan. Sebagai kompensasi atas peningkatan tersebut, pengembang diwajibkan memberikan kontribusi dalam bentuk uang (rupiah) dan/atau penyediaan prasarana serta sarana publik tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas pembangunan sekaligus mendukung penyediaan fasilitas kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, pelampauan KLB dapat diberikan pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus dengan kode a yang merupakan:

1. Pusat kegiatan primer;
2. Pusat kegiatan sekunder;
3. Kawasan strategis kepentingan ekonomi;
4. Kawasan terpadu dengan pengembangan konsep TOD;
5. Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*); dan
6. Lokasi pertemuan angkutan umum massal

Bentuk kompensasi terhadap pelampauan KLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 ditetapkan dengan bentuk menyediakan fasilitas publik, antara lain:

1. Menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
2. Menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
3. Menyediakan lahan dan/atau membangun waduk atau situ;
4. Menyediakan infrastruktur;
5. Menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
6. Menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum

Bentuk penyediaan infrastruktur sebagaimana poin 4 di atas, antara lain:

1. Infrastruktur transportasi;
2. Infrastruktur jalan;
3. Infrastruktur sumber daya air, irigasi dan pengendalian banjir;
4. Infrastruktur air minum;
5. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
7. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. Infrastruktur ketenagalistrikan;
10. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
11. Infrastruktur konservasi energi;
12. Infrastruktur fasilitas perkotaan;

13. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
14. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
15. Infrastruktur kawasan;
16. Infrastruktur pariwisata;
17. Infrastruktur kesehatan;
18. Infrastruktur lembaga permasyarakatan;
19. Infrastruktur perumahan rakyat;
20. Infrastruktur pertamanan;
21. Infrastruktur pemerintahan;
22. Infrastruktur lingkungan hidup; dan
23. Infrastruktur perekonomian

Selain bentuk kompensasi sebagaimana tersebut di atas, dikenakan kompensasi tambahan dalam bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki secara proporsional pada lahan perencanaan serta tidak diperhitungkan dalam nilai kesetaraan kompensasi yang ditetapkan dalam Gambar Perencanaan Arsitektur. Penyediaan bentuk kompensasi tersebut diutamakan pada lahan/aset milik Pemerintah Daerah atau pada lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan kebutuhan SKPD/UKPD. Bentuk kompensasi tersebut wajib diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat menjadi aset Pemerintah Daerah. Pelampauan KLB dan bentuk pengenaan kompensasinya ditetapkan berdasarkan Persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dalam Rapat Pimpinan BKPRD dan/atau forum Rapat Pimpinan Gubernur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penerapan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan koefisien lantai bangunan untuk pembangunan infrastruktur seperti Simpang Susun Semanggi, Penataan Kawasan Kota Tua, Pembangunan Rusunami/Rusunawa, Revitalisasi Waduk dan Kali Pengendali Banjir dan Fasilitas Publik Lainnya.

Terdapat juga mekanisme pelampauan nilai KLB pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* (KBT/TOD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit. Penetapan KBT/TOD harus memenuhi kriteria yaitu kawasan yang direncanakan atau ditetapkan sebagai pusat kegiatan, kawasan yang dilayani atau direncanakan untuk dilayani oleh Angkutan Umum Massal berbasis rel dan Angkutan Umum lainnya dan berada pada Kawasan dengan kerentanan bencana rendah disertai dengan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. KBT/TOD dikelola untuk mewujudkan KBT sesuai dengan Panduan Rancang Kota (PRK) yang telah ditetapkan pada 5 (lima) lokasi KBT/TOD, antara lain:

1. PRK KBT/TOD Lebak Bulus, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Lebak Bulus
2. PRK KBT/TOD Fatmawati, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Fatmawati
3. PRK KBT/TOD Blok M dan Sisimangaraja, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Blok M dan Sisimangaraja
4. PRK KBT/TOD Istora dan Senayan, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Istora dan Senayan
5. PRK KBT/TOD Dukuh Atas, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Dukuh Atas

Untuk implementasi PRK yang telah ditetapkan tersebut di atas, masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dengan melakukan pembangunan sesuai dengan PRK KBT/TOD dan dapat diberikan insentif, berupa pemberian:

1. Akses ke sarana Angkutan Umum Massal;
2. Keringanan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2);
3. Keringanan atau pengurangan Pajak Daerah lainnya;
4. Fleksibilitas kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
5. Alokasi penambahan intensitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Panduan Rancang Kota.

Untuk dapat dilakukan penambahan intensitas pemanfaatan ruang sesuai PRK, harus memenuhi kriteria yaitu lokasi lahan penerima insentif harus berada di dalam deliniasi Panduan Rancang Kota Kawasan Berorientasi Transit, penambahan luas lantai bangunan pada lahan penerima insentif tidak melebihi intensitas yang tertuang dalam Panduan Rancang Kota, dan penerima insentif bersedia untuk memberikan dukungan berupa penyelenggaraan antara lain infrastruktur, sarana dan prasarana umum serta hunian terjangkau.

Besaran insentif penambahan luas lantai bangunan atas dukungan dalam penyelenggaraan infrastruktur kawasan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pimpinan BKPRD dan/atau forum Rapat Pimpinan Gubernur. Untuk bentuk dukungan penyelenggaraan yang berada pada lahan Pemerintah Daerah wajib diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat menjadi aset Pemerintah Daerah dan sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh KJPP, penelitian fisik dan teknis oleh pengelola kawasan yang didampingi perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sampai dengan saat ini, dukungan yang telah diperoleh dari PRK KBT/TOD yaitu berupa pedestrianisasi Jalan Blora sebagai perluasan plaza transit, penataan taman Kudus sebagai Plaza Transit Pengembangan Serambi Dukuh Atas, Pelebaran Jalan Pati Juana dan bentuk lainnya. Ke depannya, sehubungan dengan terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, akan disusun kembali regulasi terkait mekanisme penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

☐ Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang

Penetapan kewajiban membiayai dan membangun Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) dalam Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) berdasarkan ketentuan:

Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta – yaitu kewajiban membiayai dan membangun Rumah Susun Murah beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial, terhadap lokasi/lahan IPR yang dimohon dengan kondisi lapangan dan atau menurut rencana kota peruntukannya adalah perumahan yang luasnya 5.000 m² atau lebih.

Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta – Yaitu berkenaan pemegang IPR telah membebaskan lahan tanpa terlebih dahulu memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) dari Gubernur sesuai ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990, maka dikenakan Sanksi SP3L. Adapun jenis kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sanksi SP3L antara lain:

- Membiayai dan membangun (RSM/S) beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial;
- Membiayai dan membangun bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan; dan
- Membiayai dan membangun bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

Kewajiban RSM/S adalah kewajiban yang bersifat penyediaan, terdapat beberapa alternatif atau mekanisme dalam pemenuhannya yaitu membangun RSM/S, yang pelaksanaan pembangunannya dimungkinkan pada lokasi di dalam areal SIPPT dan di aset lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 354 Tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur bahwa; harga jual/harga sewa sesuai rekomendasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemegang IPR sebagai pemilik dan pengelola bangunan RSM/S, dan dalam hal pembangunan di aset lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka kepemilikan dan pengelolaan RSM/S merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Mekanisme Konversi Kewajiban RSM/S telah mengalami beberapa penyesuaian karena pada periode 1990-2002 para pemegang IPR kesulitan dalam menunaikan kewajiban pembangunan RSM/S disebabkan: terbatasnya lahan dalam areal SIPPT, pertimbangan teknis dan perhitungan nilai ekonomis terkait rencana pengembangan lahan yang kurang mendukung, kondisi sosial masyarakat di lokasi, kesulitan dalam mencari lahan lain untuk pembangunan rumah susun, sehingga

capaian penyelesaiannya kewajiban RSM/S belum optimal. Diperlukan ketentuan alternatif dalam peningkatan pemenuhan kewajiban RSM/S yaitu melalui mekanisme konversi.

Pada Tahun 2002 ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 1934/2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana yang Dikonversi dengan Dana Oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT, yaitu konversi dilakukan melalui penyetoran dana tunai sesuai nilai yang dihitung serta ditetapkan melalui Surat Persetujuan Gubernur. Selanjutnya pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020, yang mengatur bahwa konversi kewajiban RSM/S diwujudkan melalui pembangunan rumah susun, prasarana, sarana, utilitas umum dan/atau pengadaan barang.

Selaras dengan Kewajiban IPPR dan Kompensasi Pelampauan KLB, skema konversi kewajiban RSM/S merupakan salah satu terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020. Pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang IPR dikonversi dalam bentuk:

- Pembangunan rumah susun diutamakan pada lahan milik Pemerintah Daerah;
- Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum berupa konstruksi pada lahan milik Pemerintah Daerah dan/atau konstruksi berikut pengadaan tanah;
- Pengadaan barang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dan/atau barang pelengkap pembangunan RSM/S dan/atau Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum.

Pada akhirnya skema perhitungan nilai konversi dapat dijadikan pilihan dalam rangka mendorong penyelesaian kewajiban yang belum diselesaikan tepat pada waktunya oleh para pemegang izin pemanfaatan ruang, sehingga dapat mendukung terlaksananya peningkatan/penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum.

❏ *Transfer Development Right* (Peralihan Hak Membangun)

Transfer Development Right adalah suatu perangkat pengendalian pemanfaatan lahan yang mendorong pengalihan hak membangun (baik sebagai aturan wajib maupun sukarela) dari suatu tempat/kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi yang disebut dengan *sending areas* (area pengirim), menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang yang disebut dengan *receiving areas* (area penerima). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Jakarta Tahun 2024-2044, Peralihan Hak Membangun atau *Transfer Development Right* yang selanjutnya disingkat TDR merupakan instrumen pendanaan pembangunan alternatif dan sekaligus dapat digunakan sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong pengalihan hak membangun luas lantai yang belum dimanfaatkan dari suatu tempat atau kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi menuju tempat/kawasan yang diharapkan untuk berkembang.

TDR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 berlaku pada area pengirim dan area penerima. Area pengirim merupakan kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi pembangunannya dan berada dalam radius 800 (delapan ratus) meter di simpul transit perpindahan antar angkutan umum massal. Sementara, area penerima merupakan kawasan yang dipromosikan atau didorong pembangunannya menjadi lebih tinggi, padat dan kompak yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan jalan dan transportasi angkutan umum massal.

Area pengirim, dilaksanakan dengan ketentuan:

- Kawasan atau bangunan cagar budaya yang memiliki Intensitas Pemanfaatan Ruang yang tidak dapat dimanfaatkan;
- Lahan Perencanaan yang tidak memanfaatkan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- Tidak diperbolehkan pada Sub-Zona R-1 dan Sub-Zona R-2 kecuali untuk pembangunan Rumah Susun Umum; dan/atau
- Kawasan Kompak atau Kawasan Berorientasi Transit sepanjang memiliki Pengelola Kawasan yang sama.

Area penerima, dilaksanakan dengan ketentuan:

- Kawasan yang masih memiliki daya dukung dan daya tampung untuk menerima tambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang sampai dengan batasan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- Kawasan Kompak atau Kawasan Berorientasi Transit sepanjang memiliki Pengelola Kawasan yang sama;
- Tidak berada pada kawasan rawan bencana; dan/atau
- Tidak berada pada Sub-Zona R-1 atau Sub-Zona R-2 kecuali untuk pembangunan Rumah Susun Umum.

Pada lokasi lahan yang ditetapkan sebagai zona TDR, maka pemilik lahan yang ingin melakukan pengalihan hak pembangunannya harus mengajukan permohonan sertifikat TDR yang dikecualikan pada lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi dapat langsung diterbitkan sertifikat TDR. Pemanfaatan luas lantai tambahan yang diperoleh dari TDR pada lokasi zona penerima, dikenakan retribusi di luar retribusi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perolehan dana dari TDR akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan/pengelolaan/perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum perkotaan. Pengaturan lebih lanjut terkait penerapan TDR juga akan disesuaikan sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2024-2044.

G. Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai aset yang besar namun pemanfaatan dan optimalisasinya masih rendah. Nilai aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejumlah Rp 512,89 Triliun pada tahun 2023. Dari besarnya nilai aset tersebut, realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset pada periode 2018-2021 masih berada di kisaran Rp 50 Miliar per tahun. Dari sisi pemanfaatan, sebagian besar pendapatan pemanfaatan aset berasal dari pemanfaatan sewa. Ditinjau dari besaran pendapatannya, sewa berkontribusi lebih 70% pendapatan aset, diikuti oleh pemanfaatan BGS (Bangun Guna Serah) dan BSG (Bangun Serah Guna). Menurut Permendagri 19 tahun 2016 pengelola barang memiliki kewenangan besar pengelolaan barang hanya pada aset kelolaan, sementara hampir 90% aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebar pada pengguna barang. Hanya 10% aset yang berada pada pengelola barang, berupa peralatan, mesin, taman, saluran dan tanah. Di antara tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) adalah meningkatkan utilitasnya secara optimal. Utilisasi dapat dilihat dari aspek penggunaan BMD sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang dan optimalisasi BMD untuk menciptakan penerimaan daerah.

Secara kelembagaan, telah didirikan *public corporation* yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki tugas melakukan pengelolaan aset di Jakarta sejak tahun 2022 berupa Unit Pengelolaan Manajemen Aset (UPMA) di bawah Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) yang kemudian berganti nama menjadi Jakarta Asset Management Center (JAMC). Sejak berdirinya JAMC terjadi peningkatan pendapatan dari pengelolaan aset menjadi Rp 229 Miliar di tahun 2022 dari sebelumnya hanya Rp 35,43 Miliar di tahun 2021. Dengan keberadaan JAMC diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang didapat dari pengelolaan aset maupun kerja sama pemanfaatan aset dalam rangka pembangunan infrastruktur. Ke depan, untuk mencapai optimalisasi BMD *idle* dan/atau *underutilized*, JAMC memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama PD terkait dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, perluasan portofolio pemanfaatan BMD dapat dilaksanakan melalui:

- *Business Case* Pemanfaatan BMD termasuk sentralisasi kewenangan Pemanfaatan BMD pada BLUD selain JAMC;
- Analisis Pemanfaatan dan Pendayagunaan BMD termasuk melakukan evaluasi pemanfaatan BMD eksisting (nilai kontribusi, jangka waktu pemanfaatan dan skema pemanfaatan serta aspek lainnya); dan
- *Feasibility Study* Pemanfaatan BMD termasuk penambahan skema pemanfaatan yang sebelumnya belum aturan dalam peraturan perundang-undangan.

H. Pembiayaan Berbasis Iklim / *Climate Based Financing*

Green Climate Fund (GCF) saat ini merupakan penyalur dana penanggulangan dampak perubahan iklim terbesar di dunia. Dana yang terhimpun sampai akhir 2019 sudah mencapai USD 10,3 miliar. Meski demikian, seperti halnya berbagai sumber pembiayaan hijau, GCF seharusnya dipandang bukan sebagai sumber pembiayaan konvensional, melainkan peluang untuk membuat sebuah program atau proyek aksi iklim yang inovatif. GCF akan membiayai proyek yang memiliki potensi dampak positif yang besar terhadap iklim, perubahan paradigma dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan negara yang bersangkutan, kepemilikan yang kuat dari negara yang bersangkutan, serta efektif dan efisien. Untuk bisa memenuhi

aspek-aspek tersebut terdapat proses pembelajaran yang perlu ditempuh. Oleh karena itu, apabila sebuah proyek iklim sudah layak untuk dibiayai melalui skema pembiayaan konvensional, pemilik proyek biasanya akan memanfaatkan peluang pembiayaan yang sudah tersedia di perbankan dibandingkan mengakses pendanaan GCF.

Tantangan utama untuk program aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah ketiadaan sumber dana berjangka panjang (lebih dari 5 tahun), rendahnya imbal hasil (*rate of return*), kurangnya kapasitas pelaksanaan dan pengetahuan para pemain di sektor ini, serta berbagai risiko lain. Sejumlah literatur ilmiah dan kajian oleh berbagai pusat riset di dunia, lembaga keuangan, serta survei menunjukkan bahwa secara umum tidak ada instrumen pembiayaan universal yang sesuai untuk semua proyek-proyek tersebut. Sedangkan, pilihan pembiayaan untuk proyek iklim secara umum ditentukan oleh banyak faktor seperti ukuran proyek, tipe investasi yang dipilih, ketersediaan instrumen pembiayaan, peran negara, dan dukungan lembaga keuangan.

Untuk menurunkan risiko yang tinggi dari proyek perubahan iklim agar sebuah proyek menjadi layak dibiayai oleh perbankan, atau dikenal dengan istilah *de-risking*, terdapat beberapa perangkat yang dapat digunakan oleh pemohon proyek untuk mengakses pendanaan perbankan antara lain:

1. Memperkuat porsi ekuitas proyek sehingga kebutuhan pembiayaan yang akan diambil dari utang mengecil dan bank lebih berani menyalurkan pinjaman;
2. Menyediakan kuasi ekuitas melalui skema Pembiayaan Mezanin yang menjembatani antara utang senior dari perbankan dan ekuitas dari pemegang saham proyek;
3. Berbagi risiko porsi utang melalui sindikasi atau memasukkan pemberi pinjaman lain ke dalam struktur pembiayaan;
4. Menyediakan kolateral melalui kredit garansi atau asuransi; dan
5. Menyediakan fasilitas *hedging* untuk valuta asing jika pinjaman untuk proyek berasal dari sumber luar negeri.

Perangkat *de-risking* di atas beserta metode penurunan risiko lainnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana GCF. Misalnya dalam proyek eksplorasi energi terbarukan panas bumi yang memiliki peluang keberhasilan kecil, maka GCF bisa membantu pemerintah dalam mengambil alih risiko tersebut. Salah satu contohnya adalah proyek *Geothermal Resource Risk Mitigation Project* (GREM) yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia, GCF, dan Bank Dunia yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk melakukan eksplorasi potensi panas bumi di wilayah potensial Indonesia. Eksplorasi sumber energi panas bumi selain membutuhkan biaya besar juga memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi. Namun, bila proyek GREM ini nantinya mampu menemukan sumber panas bumi yang potensial, maka tahap eksploitasi dapat dibiayai oleh perbankan secara komersial karena memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi.

Dengan tersedianya berbagai perangkat *de-risking* ini, maka perbankan komersial akan bersedia terlibat dalam membiayai berbagai proyek iklim karena risiko yang akan mereka hadapi menjadi lebih kecil. Kredit komersial dari perbankan inilah yang perlu tetap dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan proyek setelah fase yang berisiko dari sebuah proyek didanai oleh instrumen *de-risking* GCF. Kombinasi pembiayaan GCF dan perbankan dapat digunakan di dalam beberapa fase proyek tergantung dari profil risiko fase proyek. Apabila fase awal proyek dapat berjalan lancar dengan pembiayaan GCF, maka selanjutnya perbankan akan lebih terbuka atau berani terlibat memberikan pinjaman ke proyek iklim atau setidaknya memperkenalkan proyek-proyek iklim ini ke lembaga keuangan yang sesuai. Bagi pemilik proyek iklim yang sebelumnya sudah menerima fasilitas *de-risking* GCF, NDA GCF menyarankan pemilik proyek untuk memanfaatkan pembiayaan komersial dari perbankan untuk pengembangan proyek iklim dan mereplika proyek tersebut.

I. Jakarta Collaboration Fund

Jakarta Collaboration Fund merupakan suatu mekanisme pendanaan dan pembiayaan kolaboratif yang akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggalang, mengelola, dan menyalurkan dana dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, lembaga donor, dan organisasi internasional. *Jakarta Collaboration Fund* ditujukan untuk mendukung program pembangunan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. *Jakarta Collaboration Fund* direncanakan akan mengelola dana yang bersumber dari antara lain pemanfaatan dana abadi daerah, dana investasi milik pemerintah, swasta dan masyarakat. Konsep *Jakarta Collaboration Fund* dirancang sebagai skema pendanaan dan pembiayaan inovatif yang mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Indonesia yang bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Secara umum, SWF merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola dana publik dan menginvestasikannya ke dalam berbagai aset yang luas dan beragam. Pada dasarnya, SWF adalah dana abadi pemerintah yang diinvestasikan untuk mendapatkan imbal balik (*return*) melalui pengelolaan dana dalam sejumlah instrumen, seperti deposito untuk mendapatkan bunga, saham untuk mendapatkan *capital gain* atau dividen, serta instrumen keuangan lainnya yang menghasilkan pendapatan jenis lain. Dana pokok dalam SWF merupakan dana abadi atau bersifat permanen sehingga tidak dapat ditarik kembali. Namun, pendapatan yang dihasilkan dari investasi SWF dari instrumen-instrumen seperti deposito, saham dan instrumen bentuk lain dapat dimanfaatkan. Sumber dana pokok SWF dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. Dengan adanya SWF, diharapkan setiap penerimaan negara dapat dimanfaatkan secara produktif (tidak *idle*) dan dapat diinvestasikan secara efisien dan berkualitas, sehingga mampu menghasilkan imbal hasil yang signifikan bagi perekonomian jangka panjang.

Pembentukan SWF di Jakarta melalui *Jakarta Collaboration Fund* memberikan peluang strategis untuk mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Hal ini relevan dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan memiliki potensi signifikan dalam pengembangan aset dan peningkatan nilai tambah melalui investasi yang terkelola dengan baik. Dalam pelaksanaannya, *Jakarta Collaboration Fund* akan mengelola dana yang berasal dari beberapa sumber, antara lain pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah, dana investasi milik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dengan mengadopsi pendekatan serupa, *Jakarta Collaboration Fund* diharapkan dapat mengelola dana secara efisien dan efektif, serta menjadi sumber pendanaan baru bagi pembangunan DKI Jakarta. Tujuan utama pembentukan *Jakarta Collaboration Fund*, antara lain:

- Mendanai pembangunan sosial dan ekonomi termasuk infrastruktur, baik fisik (seperti jalan dan jaringan kereta api) maupun non fisik (seperti pendidikan, kesehatan, UMKM).
- Menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah
- Menarik investasi dan mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya untuk berkembang
- Mengurangi ketergantungan pada pajak dan retribusi
- Mendukung kolaborasi multisektor
- Meningkatkan efisiensi penggunaan APBD

Dalam jangka panjang dapat menjadi strategi politik ekonomi terutama melalui investasi ke obligasi pemerintah, institusi, dan perusahaan penting, yang mengambil peran besar dalam perekonomian negara target.

J. Dana Abadi Daerah

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang bersifat abadi di mana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pembentukan Dana Abadi Daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya, memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah serta menyelenggarakan kemanfaatan umum yang berkelanjutan bagi lintas generasi. Dengan adanya Dana Abadi Daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan ketahanan fiskal serta memastikan keberlanjutan pembiayaan berbagai program pembangunan jangka panjang.

Pembentukan Dana Abadi Daerah dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Daerah yang akan membentuk Dana Abadi Daerah harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yaitu memiliki kapasitas fiskal yang tinggi atau sangat tinggi serta memastikan bahwa kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Dengan demikian, Dana Abadi Daerah hanya dapat dibentuk oleh Daerah yang memiliki keuangan daerah yang kuat serta tidak memiliki defisit dalam pemenuhan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (4) PP Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa dana untuk membentuk Dana Abadi Daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang belum ditentukan penggunaannya dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA

dapat diinvestasikan untuk membentuk Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi. Penambahan pokok Dana Abadi Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari surplus hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah dan sumber lain dari APBD.



Gambar II.64 Potensi SiLPA untuk Dana Abadi Daerah (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

Pada grafik realisasi SiLPA di atas menunjukkan bahwa SiLPA di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi, tetapi cenderung menunjukkan tren peningkatan dengan nominal yang relatif besar. SiLPA yang signifikan ini mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam proses perencanaan anggaran pemerintah yang mengakibatkan tertundanya pemanfaatan dana untuk pembiayaan pelayanan publik pada tahun anggaran berjalan. Di sisi lain, SiLPA juga dapat disebabkan karena terjadinya pelampauan capaian pendapatan dibandingkan dengan penghematan (efisiensi) realisasi belanja. Sehingga, saldo positif SiLPA dapat diindikasikan sebagai kesehatan dan kesinambungan fiskal pemerintah daerah, sementara saldo negatif SiLPA dapat diindikasikan sebagai masalah dalam manajemen keuangan daerah dan berdampak buruk pada kesinambungan fiskal daerah.

Pemanfaatan SiLPA sebagai sumber Dana Abadi Daerah perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Salah satunya adalah penggunaan SiLPA di awal tahun yang sering dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Pegawai, terutama ketika realisasi penerimaan dari Pajak Daerah belum mencapai target pada triwulan pertama tahun berjalan. SiLPA pada awal tahun merupakan surplus anggaran dari tahun sebelumnya yang belum digunakan, sehingga pemanfaatannya memungkinkan pemerintah daerah dalam memastikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tanpa mengganggu pelaksanaan program pembangunan lainnya. Selain itu, diperlukan verifikasi yang cermat terhadap ketersediaan dana yang bersumber dari SiLPA guna memastikan dana tersebut benar-benar tersedia dan dapat digunakan, bukan sekedar tercatat dalam pembukuan akuntansi semata.

Pengelolaan Dana Abadi Daerah dapat dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan prinsip kehati-hatian, yaitu menempatkan dana pada investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Salah satu caranya dengan menempatkan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya. Dengan demikian, nilai pokok atau modal awal investasi tetap aman dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi di pasar uang atau pasar modal. Fluktuasi hanya akan memengaruhi imbal hasil investasi, sementara dana pokok tetap terjaga, sehingga menjamin keberlanjutan Dana Abadi Daerah untuk jangka panjang.

Prinsip Pemanfaatan Dana Abadi Daerah, antara lain:

1. Dana Abadi Daerah dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain anggaran belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
2. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembentukan dana.
3. Pengelola Dana Abadi Daerah dapat bekerjasama dengan pengelola dana abadi di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, dan/atau LKB/LKBB dalam memanfaatkan Dana Abadi Daerah.
4. Dalam hal diperlukan, pengelola Dana Abadi Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kondisi darurat, Daerah dapat menarik pokok Dana Abadi Daerah guna memastikan keberlangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi darurat tersebut mengacu pada definisi yang dijelaskan pada Pasal 173 UU Nomor 1 Tahun 2022, yaitu situasi memburuknya kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menyebabkan fungsi dan peran APBN dan APBD tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, antara lain:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan,
2. Proyeksi penurunan pendapatan negara/daerah dan/atau meningkatnya belanja negara/daerah secara signifikan, dan/atau
3. Adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Namun, untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan, penarikan pokok Dana Abadi Daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ketentuan penarikan mewajibkan Daerah untuk terlebih dahulu mengajukan usulan penarikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan resmi. Setelah kondisi darurat berakhir, Daerah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok Dana Abadi Daerah dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Apabila Daerah tidak mampu melakukan pengembalian dana pokok, Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bentuk pengembalian atas pokok Dana Abadi Daerah yang telah ditarik.

K. Privatisasi Penuh / *Full Privatisation*

Privatisasi Penuh adalah skema di mana kepemilikan dan pengelolaan suatu aset atau proyek publik sepenuhnya dialihkan kepada pihak swasta. Skema ini umumnya diterapkan pada sektor-sektor yang membutuhkan investasi modal besar dan keahlian teknis khusus yang umumnya melebihi kapasitas pemerintah. Beberapa model privatisasi penuh antara lain berupa penawaran saham di pasar modal, penjualan langsung melalui lelang terbuka kepada mitra usaha, konsesi atau sewa, privatisasi berbasis pembiayaan proyek (investor membangun, mengubah dan mengoperasikan fasilitas tertentu selama jangka waktu tertentu), serta kontrak manajemen (kepemilikan tetap berada di tangan pemerintah, namun pengoperasian dilaksanakan oleh kontraktor selama periode tertentu).

L. *Best Practice* Pendanaan Infrastruktur

☐ *Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI)*

Pada tanggal 17 Februari 2012, sebagaimana isi dari Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri *Loan Agreement* Nomor 8121-ID, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 139,640,000 dalam rangka pembiayaan *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)*. Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-217/MK.05/2012 tanggal 2 April 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui untuk meneruskan sebagian pinjaman yang berasal dari IBRD, *Loan Agreement* Nomor 8121-ID sebagai pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mata uang Rupiah dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar ekuivalen USD 69,340,000.

Secara umum, pinjaman ditujukan untuk membiayai kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedikitnya 13 sungai akan dikeruk, waduk maupun situ yang telah dangkal juga akan dikuras. Sungai yang dikeruk adalah Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol-Sekretaris.

Tujuan proyek JEDI antara lain; mengurangi dampak banjir tahunan di DKI melalui rehabilitasi dan pengerukan *floodways*, saluran air dan cekungan retensi, sesuai dengan standar praktik internasional; dan memberikan keahlian teknis melalui pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah DKI untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian banjir, sesuai dengan standar internasional. Penarikan pinjaman telah selesai pada akhir tahun 2016 dengan besar utang pokok pinjaman JEDI sebesar Rp 504.949.300.724. Jadwal pembayaran pokok pinjaman terakhir di tahun 2032.

☐ Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta

Pembangunan MRT Jakarta dirancang untuk meningkatkan sistem transportasi Jakarta melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas. Saat ini, pembangunan MRT Jakarta terbagi atas dua koridor, yaitu MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan (North-South Line) dan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat (East-West Line). Pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan terdiri dari dua fase, yaitu Fase 1 yang menghubungkan Lebak Bulus dengan Bundaran HI yang saat ini telah selesai

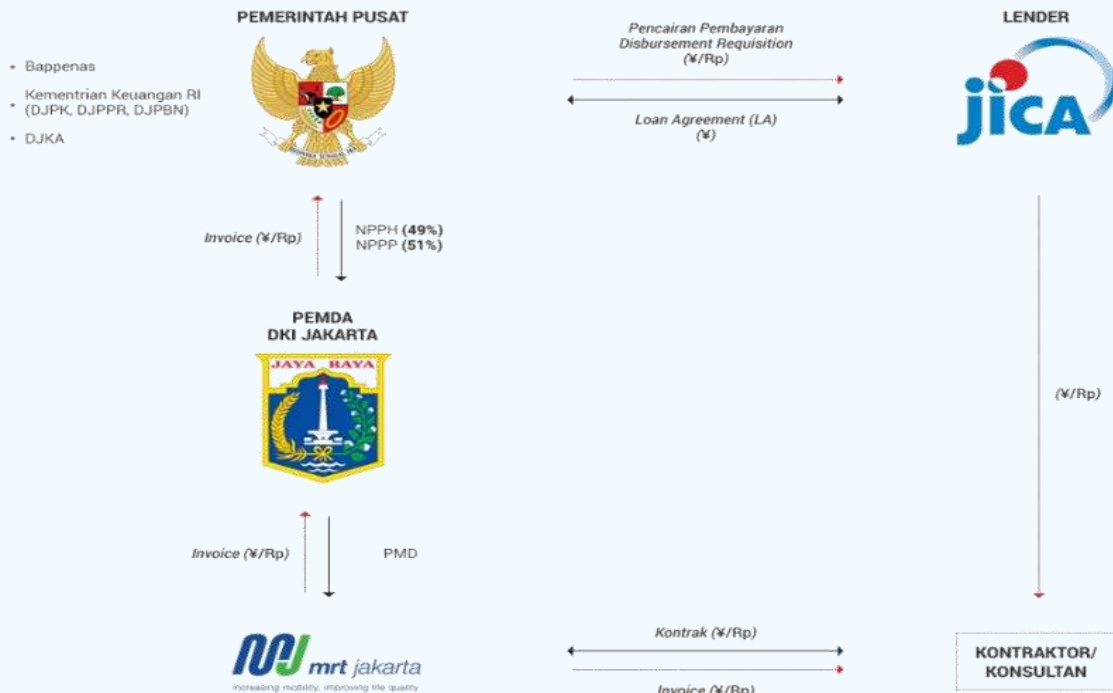
pembangunannya dan mulai beroperasi sejak tahun 2019, serta Fase 2 yang direncanakan akan memperpanjang jalur dari Bundaran HI hingga ke Ancol (dalam proses). Sumber dana pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 1 dan Fase 2 berasal dari pinjaman JICA dengan proporsi pinjaman pemerintah pusat (49%) dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta (51%).

Pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat direncanakan akan menghubungkan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dengan rencana jalur indikatif Cikarang-Balaraja sepanjang ±90 km. Secara keseluruhan rencana pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat akan dibagi menjadi dua fase, yaitu Fase 1 adalah trase di DKI Jakarta dan Fase 2 adalah trase yang berada di Banten dan Jawa Barat. Fase 1 pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat sendiri terbagi menjadi dua tahap, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria) sepanjang 30,4 km dan Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang) sepanjang 9,2 km. Saat ini, pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1 tahap 1 telah mendapat dukungan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA dan Asian Development Bank (ADB), sementara tahapan lainnya masih dalam proses perencanaan.

Selain itu, terdapat juga usulan rencana pembangunan MRT Jakarta Koridor Fatmawati-Kampung Rambutan sepanjang 10,9 km yang pembiayaannya dimungkinkan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan alternatif lainnya. Koridor Fatmawati-Kampung Rambutan direncanakan untuk melengkapi dan mengembangkan jaringan layanan MRT di kawasan selatan Jakarta untuk menangkap demand dan dinamika pertumbuhan yang cukup tinggi di koridor TB Simatupang.

MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 1

Pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 1 dimulai pada tahun 2013 dengan total jalur kereta sepanjang 16 km yang meliputi 10 km *elevated* dan 6 km *underground*. Pembiayaan pembangunan MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 1 didukung melalui dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Jumlah pinjaman untuk Fase 1 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2023 adalah sebesar JPY 140.277.377.661. Komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana Permenko tersebut untuk Pemerintah Pusat sebesar 49% (*on-granting*) dan Pemerintah Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 51% (*on-lending*).



Gambar II.65 Skema Pembiayaan Proyek MRT Koridor Utara-Selatan Fase 1

Sumber : MRT Jakarta, 2025

MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2

Pendanaan Pembangunan MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan Fase 2 (Bundaran HI–Kota–Ancol) berasal dari sumber pendanaan yang sama dengan MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan Fase 1, yakni pinjaman Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)*. Pagu indikatif pembangunan MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan Fase 2 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2023 adalah sebesar USD 1.890.083.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu Dolar Amerika) dan JPY 54.980.622.339,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Yen Jepang). Pengaturan komposisi pembebanan pinjaman dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2023 dimana sebesar 51% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-lending*) dan 49% ditanggung oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-granting*).

MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase I Tahap 1

Pendanaan untuk pembangunan MRT Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 dilaksanakan melalui skema *co-financing* yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA dan dari pinjaman Asian Development Bank (ADB). Nilai pinjaman JICA sesuai dengan yang tertera pada dokumen *Minutes of Discussion (MoD) of Appraisal Mission on Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase 1 (I)* tahun 2023 adalah sebesar JPY 437.063.000.000. Sedangkan indikasi nilai pinjaman ADB adalah sebesar USD 805.650.000 termasuk porsi *Provisional Sum dan Contingencies* untuk membiayai paket *elevated* yang akan diberikan dengan skema *multi tranche financing* sesuai dengan hasil *ADB Consultation Mission* pada Februari 2024.

Adapun perjanjian pinjaman JICA tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang di tanggal 13 Mei 2024. Penyelenggaraan MRT Timur Barat Fase 1 juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan *Mass Rapid Transit* Koridor Timur-Barat Fase 1. Pinjaman luar negeri akan diteruskan pinjaman sebesar 51% dan diteruskan hibahkan sebesar 49% oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta (Persero) selaku *Sub-Implementing Agency*, dan sumber pendanaannya akan diberikan melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan/atau skema lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara bertahap setiap tahunnya selama jangka waktu penyelesaian pembangunan. Namun, baik Pembangunan MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan Fase 2 (Bundaran HI–Kota–Ancol) maupun pembangunan MRT Jalur Timur-Barat Fase 1, nilai kebutuhan anggarannya masih terbuka kemungkinan adanya penyesuaian nilai kebutuhan seiring dengan dinamika pelaksanaan pembangunan.

❑ Jakarta Sewerage System (JSS)

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai serangkaian kegiatan untuk merintis pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bagian dari strategi memperluas cakupan layanan air limbah domestik di wilayah perkotaan dan mendukung peningkatan akses sanitasi yang sehat, aman, dan layak di Indonesia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Dalam rangka mendukung pencapaian target 100% sanitasi aman, inklusif, dan berkelanjutan di tahun 2045, maka perlu dibuka berbagai macam opsi pendanaan untuk percepatan infrastruktur pendukung baik melalui APBN/APBD ataupun opsi pembiayaan lain. Berdasarkan hasil kajian JICA, terdapat 15 (lima belas) zona yang perlu dibangun untuk pencapaian target tersebut meliputi 14 (empat belas) zona baru dan 1 (satu) zona eksisting, dengan perkembangan saat ini sebagai berikut:

- Zona 0 – zona eksisting yang telah beroperasi
- Zona 1 – sedang dalam tahap konstruksi (kerja sama antara Kementerian PUPR dan Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dengan skema pembiayaan pinjaman JICA dan APBD)
- Zona 6 Fase 1 – tahap inisiasi pembangunan (kerja sama antara Kementerian PUPR dan Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dengan skema pembiayaan pinjaman JICA dan APBD)

Tabel II.68 Estimasi Besaran Pembiayaan Pembangunan JSS

Paket	Cakupan Layanan	Estimasi Pembiayaan
Zona 1		± Rp 8,85 T
Zona 2	1,68 %	± Rp 11,46 T
Zona 3		± Rp 1,74 T
Zona 4 dan Zona 10		± Rp 7,60 T
Zona 5	7,73 %	± Rp 3,95 T
Zona 6		± Rp 8,7 T
Zona 7		menunggu kajian
Zona 8	8,81 %	± Rp 5,08 T
Zona 9		menunggu kajian

Sumber : Analis Bappeda (2025) dan Hasil Estimasi Konsultan Engineering Services (E/S) JSS Zona 1

Hasil rewiu Dinas Sumber Daya Air terhadap Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik menunjukkan perlunya sejumlah penyesuaian terhadap *timeline* dan target prioritas pembangunan zona JSS. Berdasarkan hasil rewiu tersebut, fokus rencana pengembangan jangka pendek (2025-2035) diarahkan pada pembangunan Zona 1, 2, 5, 6 dan 8 dengan prioritas pembangunan pada Zona 1 yang telah memasuki tahap konstruksi dan Zona 6 Fase 1 yang sudah pada tahap inisiasi pembangunan.

Jakarta Sewerage Development Project Zona 1

Sebagaimana tertuang pada Surat Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Nomor S-5/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2016 tanggal 16 Februari 2016, dinyatakan bahwa pendanaan Zona 1 menggunakan skema pendanaan bersama APBN dan APBD dengan pembagian sebagai berikut: IPAL, Main Trunk, Sambungan Rumah pada daerah percontohan oleh Pemerintah Pusat melalui pinjaman luar negeri; dan *Sub trunk* dan Sambungan Rumah di luar daerah percontohan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan JSS Zona 1 dilaksanakan pada tahun 2023-2027. Total nilai investasi untuk pembangunan Zona 1 diperkirakan sebesar ±8,85 Triliun Rupiah (berdasarkan sumber Hasil *Engineering Estimate Consultant E/S* JSS Zona 1) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.69 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1

Paket	Pekerjaan dan Estimasi Biaya	Pembiayaan
1	Pembangunan IPAL	± Rp 4 T
2	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-1	± Rp 0.92 T
3	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-2	± Rp 2 T
4	Pembangunan Pilot Area	± Rp 0.12 T
5	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-1	± Rp 1 T
6	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-2	± Rp 0.8 T

Sumber: Hasil *Engineering Estimated Konsultan Engineering Services (E/S)* JSS Zona 1

Jakarta Sewerage Development Project Zona 6

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh INDII-Mott MacDonald yang bekerjasama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pembangunan *Jakarta Sewerage Development Project* Zona 6 membutuhkan nilai investasi sebesar Rp.8,7 Triliun. *Jakarta Sewerage Development Project* Zona 6 terbagi menjadi 4 fase karena tingginya biaya dan periode konstruksi. Untuk Fase 1 telah disusun Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) pada Tahun 2013 yang dilengkapi dengan *Supplemental Study* pada Tahun 2017. Studi Kelayakan (FS) untuk fase 2, 3 dan 4 akan disusun pada kontrak 1 Jakarta Sewerage Zona 6 Fase 1. Total biaya proyek JSS Zona 6 Fase 1 diestimasikan sebesar 45,415 juta Yen atau setara dengan 413 juta USD. Dari jumlah tersebut, sebesar 30,980 juta Yen (282 juta USD) merupakan porsi pendanaan dari JICA yang akan dibiayai melalui pinjaman ODA Jepang. Sementara itu, sisanya sebesar 14,435 juta JPY (131 juta USD) menjadi porsi pemerintah Indonesia.

Tabel II.70 Total Biaya Proyek JSS Zona 6 Fase 1

Pembiayaan	Pekerjaan	Tanggung Jawab	Estimasi Biaya
Pinjaman JICA	Jasa Konsultasi (<i>Consulting services</i>)	Kementerian PUPR	3.460 juta JPY (31 juta USD)
	Pembangunan IPAL (<i>WWTP</i>)		
	Pembangunan Pipa Utama (<i>Trunk sewer</i>)		
	Pembangunan Pipa Pelayanan, Pipa Lateral dan Pipa Persil (<i>Service Pipe, Lateral pipe, Persil pipe</i>) di area percontohan		27.520 juta JPY (250 juta USD)
	Pekerjaan sipil/bangunan untuk stasiun pompa di IPAL (<i>Civil/Building Works of Pumping Station in WWTP</i>)		
APBD DKI Jakarta	Pembangunan Pipa Pelayanan, Pipa Lateral dan Pipa Persil (<i>Service Pipe, Lateral pipe, Persil pipe</i>) di luar area percontohan	Pemprov DKI Jakarta	7.051 juta JPY (64 juta USD)
	Pembangunan sambungan rumah tangga (<i>House Connection</i>)		1.527 juta JPY (14 juta USD)
APBN	Biaya administrasi	Pemerintah Pusat	1.902 juta JPY (17 juta USD)
	Pajak Pertambahan Nilai/PPN (<i>Value Added Tax/VAT</i>)		2.209 juta JPY (20 juta USD)
	Bea Masuk (<i>Import Tax</i>)		1.594 juta JPY (14 juta USD)
	Bunga selama masa konstruksi		1.618 juta JPY (15 juta USD)
	Biaya awal (<i>Front End Fee</i>)		62 juta JPY (1 juta USD)

Sumber: Estimasi awal Minutes of Discussion (MoD) JSS Zona 6 Tahun 2017

Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1 rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025-2031 dengan skema pendanaan berdasarkan empat paket pekerjaan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.71 Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1

Paket	Pekerjaan dan Estimasi Biaya	Pembiayaan
1	Pembangunan IPAL dan Rumah Pompa ± Rp 2 T	Kementerian PUPR – JICA ODA Loan
2	Pembangunan Jaringan Pipa Utama ± Rp 0.2 T	
3	Pembangunan Pilot Area ± Rp 0.3 T	
4	Pembangunan Jaringan Pipa Lateral, Service, Persil ± Rp 0.74 T	APBD DKI Jakarta

Sumber: Estimasi awal Minutes of Discussion (MoD) JSS Zona 6 Tahun 2017

❑ Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta

Salah satu bentuk implementasi skema Penugasan BUMD adalah penyelenggaraan Prasarana dan Sarana *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta yang merupakan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditugaskan. Melalui penugasan tersebut, Pemerintah Daerah tidak hanya mendorong penyediaan layanan transportasi massal yang terintegrasi, tetapi juga mengoptimalkan peran BUMD dalam mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan. Sumber pendanaan proyek LRT Jakarta sepenuhnya berasal dari APBD DKI Jakarta melalui skema Penanaman Modal Daerah (PMD) yang disalurkan kepada PT Jakarta Propertindo.

Pembangunan LRT Jakarta 1A dimulai pada bulan Juni 2016 dan telah beroperasi secara penuh sejak tanggal 1 Desember 2019 melayani rute Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) hingga Velodrome (Rawamangun) sepanjang 5,8 km. Koridor LRT Pegangsaan Dua-Velodrome mencakup 6 (enam) stasiun layang (*elevated*) yang terdiri atas Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian dan Stasiun Velodrome serta

sebuah depo seluas 100.000 m² di kawasan Pegangsaan Dua. Saat ini sedang berproses pembangunan LRT 1B Koridor Velodrome-Manggarai dengan panjang lintasan 6,4 km dan 5 (lima) stasiun. Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan LRT Jakarta, telah tersedia Studi Kelayakan untuk LRT Jakarta Loopline pada tanggal 8 Juli 2020.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Kajian Studi Kelayakan dan Pra-BED Perencanaan Jaringan Perkeretaapian Perkotaan Jakarta, yang mencakup trase Karet-Pesing. Dalam kajian tersebut, moda transportasi yang disarankan adalah LRT articulated dengan kecepatan rencana 40 km/jam. Kajian tersebut mencakup estimasi demand penumpang, kajian teknis, kajian resiko, dan kajian keekonomian. Proyeksi penumpang LRT Jakarta Loopline dapat mencapai 320.000 penumpang/hari, dengan pembangunan bertahap yang dimulai dengan LRT 1A (Kelapa Gading/Pegangsaan Dua-Velodrome) memiliki jumlah penumpang sebanyak 3.000 penumpang/hari, jika terhubung dengan Manggarai, LRT 1A+1B (Kelapa Gading/Pegangsaan Dua-Velodrome-Manggarai) dapat mencapai 72.000 penumpang/hari. Pertambahan eksponensial akan lebih terjadi jika disambungkan dengan Dukuh Atas sehingga diproyeksikan pengguna harian mencapai 80.000-180.000 penumpang/hari.

Adapun sehubungan dengan pembangunan trase LRT 1C dengan ruas Manggarai-Dukuh Atas itu sendiri merupakan tindak lanjut atas Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ("RITJ") yang termuat dalam Perpres No. 55 Tahun 2018. Merujuk pada Tabel 4 Lampiran Perpres No. 55 Tahun 2018 telah ditetapkan pembangunan trase LRT mencakup LRT Velodrome-Dukuh Atas. Koridor Loopline dengan total panjang 57,3 km terdiri atas:

Tabel II.72 Peta Jalan Pembangunan LRT Jakarta

Fase	Koridor	Panjang (km)	Stasiun	Estimasi Biaya	Status	Dasar Hukum
1	Velodrome-Pegangsaan Dua	5,8	6	Rp 6.5 T	Operate	PerPres 55 & Draft RIT Jakarta
1B	Velodrome-Manggarai	6,4	5	Rp 5.36 T	Construction Period	PerPres 55, PSN & Draft RIT Jakarta
1C	Manggarai-Dukuh Atas	1,9	1	Rp 2.9 T**	Proposed as priority extension	PerPres 55
1D	Dukuh Atas-Karet-Pesing	11,8	13	Rp 13,4 T**	Proposed as priority extension	PerPres 55
1E	Pesing-Rajawali	8,9	5	Rp 8,4 T		PerPres 55
2A	Jakarta International Stadium (JIS)-Pegangsaan Dua	8,2	6	Rp 7 T*	- o Feasibility Study - o Route Permit - o Basic Design - o Tender Doc - o PCP & DUK (Dokumen G2G)	PerPres 55 & PSN
2B	Velodrome-Klender	4,5	4	Rp 3.65 T**	- o Feasibility Study - o Route Permit - o PCP & DUK (Dokumen G2G)	Draft RIT Jakarta
3A	JIS-Rajawali	5,6	4	Rp 4.9 T**	- o Feasibility Study - o Route Permit - o PCP & DUK (Dokumen G2G)	PerPres 55
3B	Klender-Halim	4,9	4	Rp 4.6 T**	- o Feasibility Study - o Route Permit - o PCP & DUK (Dokumen G2G)	Draft RIT Jakarta
Loopline		58	48	Rp 56,71 T		

Sumber : Jakarta Propertindo, 2024

*Termasuk Rolling Stock

**Preliminary Calculation

Selain itu, terdapat juga usulan rencana pembangunan LRT Koridor Pulogebang-Joglo sepanjang 32,15 km yang pembiayaannya dimungkinkan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan alternatif lainnya. Koridor tersebut direncanakan untuk menghubungkan, melengkapi dan mengembangkan jaringan layanan LRT dari Kawasan Timur ke Selatan Jakarta untuk menangkap *demand* sebesar 172.500 pax/day.

II.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Sub-bab ini akan menjabarkan isu-isu strategis pembangunan Jakarta periode 2025-2029 yang disusun berdasarkan hasil sintesis permasalahan capaian pembangunan periode sebelumnya (2020-2024) dengan penyelarasan isu dan kebijakan skala global, nasional, dan regional. Isu skala global yang diangkat yaitu *triple planetary crisis*, geopolitik dan ekonomi politik internasional, dan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); isu skala nasional meliputi kebijakan jangka panjang dan menengah nasional; sedangkan isu skala regional terkait kebijakan perencanaan wilayah aglomerasi, kebijakan tata ruang wilayah, kebijakan jangka panjang daerah, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD.

II.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam dokumen ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan merupakan indikator kinerja di setiap aspek maupun bidang urusan yang belum mencapai hasil yang optimal berdasarkan standar nasional maupun internasional yang telah dianalisis pada Sub-bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Tabel II.73 Permasalahan Pembangunan Jakarta

Indikator Kinerja	Permasalahan	Analisis
(1)	(2)	(3)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sudah terlampaui	Nilai IKLH di Jakarta masih dalam klasifikasi kurang baik. Dari 4 indikator komposit pembentuk IKLH hanya satu yang mengalami perbaikan secara signifikan dalam periode 2019-2023 yaitu Indeks Kualitas Air Laut.
Laju Penurunan Muka Tanah	<i>Land subsidence</i>	Bagian utara Jakarta turun 2,5 meter dalam sepuluh tahun terakhir, sedangkan wilayah lain mengalami penurunan dengan kecepatan berbeda.
Indeks Risiko Bencana	Kerentanan banjir	Data BPBD 2024 menunjukkan lebih kurang 200 RW memiliki risiko banjir tinggi. Intensitas pada puncak musim hujan (Des-Feb) mencapai >150 mm/hari. Sepanjang tahun 2024 terdapat 109 kejadian banjir yang berdampak kepada 1.154 orang mengungsi.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Fluktuasi tingkat pengangguran	TPT Jakarta pada periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana peningkatan signifikan terjadi pada saat pandemi COVID-19. Puncak TPT terjadi pada tahun 2020, dimana terdapat sebanyak 572 ribu orang menganggur atau sebesar 10,95%. Fluktuasi tersebut juga menunjukkan resiliensi tenaga kerja yang belum baik menghadapi disrupsi pasar. Faktor penyebabnya mayoritas angkatan kerja yang menganggur hanya memiliki pendidikan setara SMA.
Indeks Gini	Ketimpangan meningkat	Walaupun tingkat ketimpangan Jakarta masih dalam kategori moderat, namun memiliki tren yang meningkat dari 0,394 pada tahun 2019 sampai dengan 0,42 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan kesejahteraan di masyarakat Jakarta.
Tingkat Kemiskinan	Disparitas kemiskinan antar wilayah	Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian dan ketersediaan lapangan pekerjaan membuat tingkat kemiskinan mengalami kenaikan hingga puncaknya pada 2021 sebesar 4,94%. Meskipun hingga 2024 kembali menurun, namun tingkat kemiskinan belum dapat kembali lagi ke tingkat di bawah 4% sebelum Pandemi. Dengan wilayah Kepulauan Seribu sebagai daerah dengan kemiskinan tertinggi yaitu 13,13% pada tahun 2023 jauh di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 7,29%.

Indikator Kinerja	Permasalahan	Analisis
(1)	(2)	(3)
	Garis kemiskinan yang belum menggambarkan standar hidup layak	Pada tahun 2024, garis kemiskinan di DKI Jakarta sebesar Rp 846.065 per kapita/bulan. Dengan menggunakan upah minimum regional Jakarta yang mencapai 5 juta per bulan sebagai standar kebutuhan layak, maka garis kemiskinan tersebut masih jauh di bawah standar. Sehingga capaian tingkat kemiskinan yang selama ini sudah merupakan yang tertinggi di Indonesia belum menggambarkan kondisi masyarakat pra-sejahtera di Jakarta.
Indeks Pembangunan Manusia	Ketertinggalan kualitas SDM Kepulauan Seribu	Pada tahun 2024, IPM di wilayah Kepulauan Seribu hanya mencapai 72,10 jauh di bawah agregat Provinsi sebesar 84,15 dan Nasional. Capaian tersebut setara dengan capaian Jakarta 15 tahun yang lalu, sehingga masih banyak ketertinggalan yang harus dikejar.
Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama bersekolah belum tuntas sampai dengan pendidikan menengah	Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah di Jakarta sebesar 11,49%, hal ini menunjukkan ketidaktuntasan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun. Angka partisipasi sekolah terendah dan putus sekolah tertinggi berada pada jenjang SMA/SMK/MA.
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Indeks Daya Saing Digital	Penurunan indeks daya saing digital	Selama satu tahun terakhir indeks daya saing digital mengalami penurunan, mengindikasikan penurunan laju pembangunan digital. Upaya peningkatan diperlukan untuk membangun ekonomi digital Jakarta yang berdaya saing global.
Proporsi Tenaga Kerja di Sektor Bisnis dan Jasa	Penurunan angka proporsi tenaga kerja di sektor bisnis dan jasa	Proporsi tenaga kerja di sektor bisnis dan jasa mengalami tren penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Meski sempat mengalami peningkatan proporsi ditahun 2022, tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2023 sehingga diindikasikan tenaga kerja di sektor bisnis dan jasa belum mengalami peningkatan kesejahteraan.
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Persentase Guru yang Kompeten	Rendahnya kualitas SDM pendidikan	Pada tahun 2023, persentase guru yang lulus uji kompetensi guru hanya sebesar 34,29%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah pengajar yang mendapat pelatihan peningkatan kompetensi secara sistematis dan berjenjang.
Prevalensi <i>Stunting</i>	Masih adanya balita gizi buruk	Penanggulangan <i>stunting</i> kurang merata di wilayah Kepulauan Seribu. Program penanggulangan masih berfokus pada pemenuhan gizi dan kurang memerhatikan program 1.000 hari pertama kehidupan.
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Pelindungan terhadap kelompok rentan terutama perempuan dan anak belum optimal	Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.682 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
<i>Non-Revenue Water</i>	Tingkat kebocoran air yang masih tinggi	Persentase kehilangan air yang disalurkan Jakarta mencapai 45,88% per tahun (Sumber: PAM JAYA). Penyebab kebocoran ini disebabkan oleh faktor fisik seperti kebocoran pipa dan kerusakan infrastruktur, maupun non-fisik seperti pencurian air dan kesalahan pengukuran.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau	Rendahnya rumah tangga yang memiliki hunian layak	Hanya 39% rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian layak pada tahun 2024. Rendahnya capaian ini dikarenakan masih banyaknya rumah yang dibangun tidak mengikuti standar rumah layak. Selain itu faktor keterjangkauan dan <i>supply</i> hunian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar turut berkontribusi terhadap <i>backlog</i> hunian perkotaan.
Timbulan sampah yang ditangani	Peningkatan jumlah sampah yang harus ditangani	Jumlah sampah yang memerlukan penanganan meningkat secara signifikan menjadi 3.171.247,45 ton/tahun pada tahun 2024, dengan jumlah rata-rata sampah yang diangkut ke Bantar Gebang sebanyak 7.734,97 ton/hari. (Sumber: Dinas Lingkungan Hidup)
Rasio Total RTH Terhadap Luas Wilayah	Minimnya luasan ruang terbuka hijau	Luas RTH pada tahun 2024 dengan perhitungan pada tahun tersebut mencapai 5,36% dari total luas Jakarta (berdasarkan JakartaSatu).
Bauran energi baru terbarukan	Penggunaan energi terbarukan yang masih sangat rendah	Pada tahun 2024, bauran energi terbarukan di Jakarta hanya sebesar 0,66. Capaian ini menunjukkan masih ada gap dengan target pada Rencana Umum Energi Daerah.

Indikator Kinerja	Permasalahan	Analisis
(1)	(2)	(3)
<i>Moda Share</i> Transportasi Publik	Penggunaan transportasi publik yang masih rendah	Persentase <i>mode share</i> transportasi publik di Jakarta baru mencapai 22,19% pada tahun 2024. Upaya peningkatan ragam moda transportasi publik, perluasan jangkauan trayek, maupun insentif disinsentif penggunaan transportasi publik perlu lebih ditingkatkan.
Jumlah Wisatawan	Jumlah pengunjung internasional yang masih rendah dan lama kunjungan wisata yang singkat	Lama kunjungan wisatawan internasional mengalami tren penurunan sejak tahun 2020 dan tidak pernah mencapai 7 hari. Jakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan wisata, menambah ragam atraksi, serta memperkuat <i>branding</i> Jakarta sebagai destinasi wisata.

II.3.2. Penyelarasan Isu Strategis

A. Identifikasi Isu Skala Global

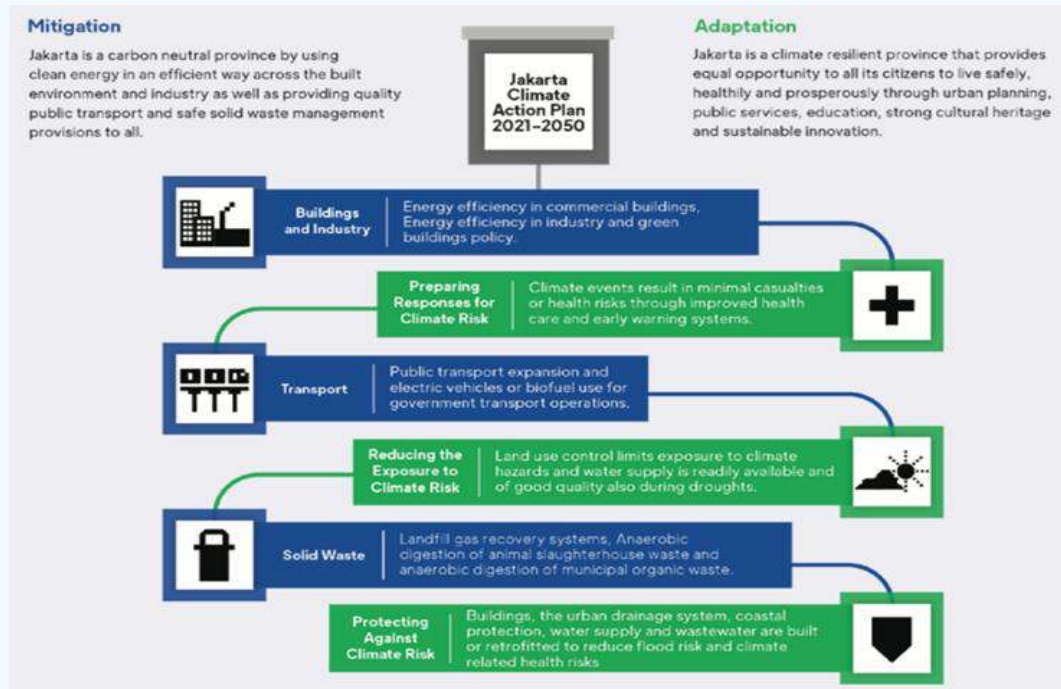
Penanggulangan *Triple Planetary Crisis*

Saat ini seluruh dunia tengah menghadapi *triple planetary crisis* atau isu lingkungan meliputi perubahan iklim, polusi/pencemaran lingkungan, dan penurunan keanekaragaman hayati yang terjadi secara global. Dalam merespons krisis global tersebut, 196 negara termasuk Indonesia menyepakati *Paris Agreement* yang merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Selanjutnya ditetapkan *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada masing-masing negara yang memuat komitmen dan aksi iklimnya yang dikomunikasikan kepada dunia.

Sebagai bagian dalam konstelasi kota global, Jakarta tidak luput dari ancaman krisis tersebut, yang ditunjukkan oleh meningkatnya bencana alam seperti banjir, penurunan muka tanah (*land subsidence*), peningkatan permukaan air laut (*sea level rise*), rob dan intrusi air laut, peningkatan *urban heat island*, krisis air, krisis pangan, kemacetan, polusi lintas daerah (*transboundary pollution*), serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Untuk itu, sejalan dengan kebijakan nasional berupa Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), Jakarta berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam pencapaian target perubahan iklim melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Melalui peraturan tersebut, Jakarta berkomitmen untuk melakukan mitigasi perubahan iklim untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050.

Untuk mencapai netralitas emisi tersebut, terdapat 2 skenario penurunan emisi GRK yang ditargetkan pada tahun 2030, yaitu sebesar 30% reduksi sehingga emisi total setara dengan 74 juta ton CO²e sebagai skenario pertama, dan pada skenario ambisius sebesar 50% reduksi sehingga emisi total setara dengan 54 juta ton CO²e. Dalam mencapai target tersebut Jakarta telah menyusun Rencana Aksi Perubahan Iklim (*Jakarta Climate Action Plan 2021-2050*) yang turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan provinsi, pemerintahan nasional, akademisi, ahli iklim, organisasi non-pemerintah internasional, pihak swasta, dan masyarakat.

Selain untuk meningkatkan upaya mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan menekan kontribusi terhadap krisis iklim, rencana ini bersifat strategis dan komprehensif untuk mengatasi perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi di beberapa sektor. Aksi mitigasi dilakukan di beberapa bidang, yakni: (a) Bangunan dan industri; (b) Transportasi; (c) Limbah padat. Sedangkan aksi adaptasi dilakukan melalui: (a) Melakukan persiapan untuk merespon resiko perubahan iklim melalui peningkatan perawatan kesehatan dan sistem peringatan dini; (b) mengurangi paparan risiko iklim melalui pengendalian guna lahan dan menjaga ketersediaan pasokan air bersih hingga di musim kemarau; (d) menjaga bangunan, drainase perkotaan, pantai, pasokan air bersih dan air limbah dari resiko banjir dan resiko perubahan iklim. Secara singkat, upaya mitigasi dan adaptasi Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.66 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jakarta 2021 – 2050

Sumber: Jakarta Climate Action Plan, 2021

Geopolitik dan Ekonomi Internasional

Perubahan global yang bersifat transformatif, berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat masif akan mempengaruhi kompleksitas pembangunan kota. Geopolitik dunia saat ini tengah melalui perubahan signifikan yang ditandai dengan ketidakpastian tinggi, strategi yang sangat dinamis, dan perubahan fungsi institusional negara dan kota. Persaingan antar kekuatan besar dunia semakin tajam sehingga memicu dilema keamanan dan meningkatkan risiko konflik. Hal ini menghasilkan tantangan sekaligus peluang bagi kota, terutama kota-kota besar untuk menjadi lebih adaptif dalam memanfaatkan momentum ini untuk berperan dalam tatanan dunia yang baru. Keterlibatan Jakarta dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, UCLG, C40 dan kemitraan *sister city* menunjukkan bahwa kota ini memiliki pengaruh dalam membentuk keseimbangan ekonomi dan politik regional. Jakarta konsisten mengangkat isu urban global seperti perubahan iklim, transportasi berkelanjutan, dan inklusi sosial ke panggung internasional. Selanjutnya Jakarta perlu memastikan stabilitas kota, kebijakan pembangunan yang tepat, serta kemampuan diplomatik yang baik terhadap perubahan konstelasi global untuk tetap relevan dan mempertahankan peran di kancah internasional.

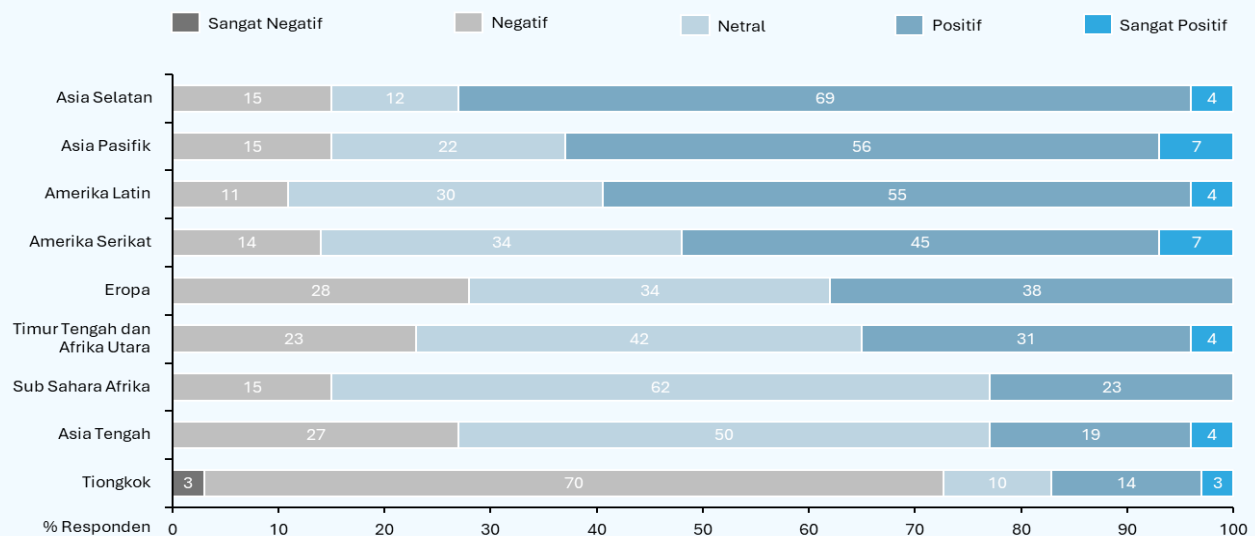


Gambar II.67 13th AIFED 2024 - Growth Strategies in Navigating Geoeconomic Shifts

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Globalisasi ‘murni’ yang selama ini digerakkan oleh prinsip efisiensi yang hanya mencari biaya terendah mulai digantikan strategi yang mempertimbangkan faktor politik. Dalam 3 tahun terakhir fenomena *friendshoring* mulai meningkat; *friendshoring* adalah strategi memindahkan rantai pasokan atau investasi ke negara-negara yang dianggap sebagai sekutu. Dengan kata lain, perusahaan atau negara akan memprioritaskan mitra dagang dan investasi di negara-negara yang memiliki nilai politik, sistem pemerintahan, atau orientasi geopolitik yang sejalan. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari ketegangan geopolitik (contohnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok), risiko keamanan nasional (contohnya teknologi sensitif yang berpotensi jatuh ke tangan negara yang berlawanan ideologi), dan keinginan mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang dianggap rival. Hal ini berpotensi menciptakan blok-blok ekonomi dan polarisasi ekonomi global.

Dalam perekonomian dunia yang semakin terfragmentasi, negara-negara yang berupaya netral akan bergerak mengurangi ketergantungan terhadap pusat perekonomian yang berisiko tinggi dan rentan tekanan politik. Investasi dan rantai pasok global kini juga mempertimbangkan aspek resiliensi, dan mencari lokasi dan rute baru yang lebih stabil seperti Asia Selatan maupun Asia Pasifik, sehingga perekonomian dunia kini akan lebih terdistribusi dan terhubung, serta tidak lagi dikendalikan oleh pusat-pusat perekonomian tertentu. Ke depannya nilai *output*/produksi negara-negara berkembang diperkirakan akan mencapai 71% dari total nilai *output*/produksi dunia. Peran sebagai pusat perekonomian baru yang tidak memihak ini yang dapat menjadi peluang besar bagi Jakarta; berada di tengah kawasan Indo-Pasifik, Jakarta memainkan peran penting dalam rantai pasok regional dan pergeseran kekuatan ekonomi dari Barat ke Asia. Namun demikian Jakarta perlu memperhatikan tuntutan dan standar praktik dari negara-negara maju untuk dapat selanjutnya bermitra dan bekerjasama. Contoh tuntutan kebijakan dari dunia internasional salah satunya terkait aspek lingkungan dan penerapan standar *sustainability* yang tinggi. Meski berbagai teknologi baru menjanjikan solusi bagi isu lingkungan tersebut, kemampuan fiskal kota untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi ini menjadi isu yang tidak terpisahkan.



Gambar II.68 Dampak Restrukturisasi Rantai Pasok Global Terhadap Prospek Ekonomi Antar Kawasan Dunia

Sumber: Survey Kepala Ekonom Dunia (Chief Economist Outlook) 2023-2026, World Economic Forum (2023)

Kebijakan ekonomi internasional seperti perubahan suku bunga global, perkembangan teknologi, pergeseran arah investasi, serta fluktuasi harga komoditas dunia berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi Jakarta. Pasar internasional yang kurang stabil dapat menekan Jakarta pada nilai tukar, arus investasi, serta harga barang kebutuhan pokok. Ketergantungan langsung pada investasi asing dan pasar ekspor berisiko pada rentannya kota terhadap gejolak ekonomi global. Efek yang ditimbulkan bukan hanya dalam skala makroekonomi saja, tetapi juga mencapai tingkatan individu di semua kalangan. Misalnya, gangguan rantai pasok global berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga barang impor yang berdampak pada operasional industri dan distribusi dalam memenuhi permintaan di Jakarta. Di sisi lain, fenomena mengantisipasi *brand*/perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok tertentu menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap perilaku konsumen. Selain itu, konflik yang menyangkut ideologis atau agama juga dapat memicu polarisasi sosial masyarakat sehingga perlu perhatian lebih dalam menjaga stabilitas kota.

Megatren global lainnya yaitu terkait disrupsi teknologi; pemanfaatan kecerdasan buatan (*AI/artificial intelligence*) mempercepat perubahan di hampir seluruh bidang. AI tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi juga meningkatkan ketimpangan antara kota-kota yang mampu memanfaatkannya dan yang tertinggal. Sistem otomatisasi yang didorong oleh AI kini semakin terjangkau dan luas penggunaannya sehingga dapat menciptakan gangguan pada pasar tenaga kerja. Apabila Jakarta mampu mengembangkan penerapan AI yang bersifat komplementer terhadap tenaga kerja manusia maka terdapat peluang besar untuk menjadi lebih produktif dan mempercepat transformasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan teknologi seperti AI perlu diarahkan untuk kemajuan yang inklusif tanpa menurunkan kapabilitas dan daya saing manusia.

Peran pemerintah kota terhadap geopolitik dunia semakin penting dalam era urbanisasi di mana penduduk perkotaan dunia semakin meningkat. Meski kota bukan aktor utama dalam diplomasi negara seperti pemerintah pusat, kota memiliki peran strategis sebagai aktor geopolitik baru yang memengaruhi dinamika global melalui diplomasi kota, pengaruh ekonomi, identitas budaya/*soft power*, dan respons terhadap isu transnasional. Kota-kota besar adalah ruang kontestasi dan kolaborasi geopolitik masa depan. Dalam era yang ditandai oleh ketidakpastian, kemampuan adaptif dan visi jangka panjang kota menentukan peran kota dalam tatanan dunia baru yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Terdapat 17 tujuan pada pelaksanaan program TPB. Berdasarkan indentifikasi tantangan dan capaian TPB yang telah disebutkan pada bagian evaluasi, kendala pelaksanaan TPB di Jakarta dapat disederhanakan menjadi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

a. Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Pada pelaksanaan tujuan TPB yang berkaitan dengan Ekonomi dan Ketahanan Sosial masih terdapat kendala pada perkembangan ekonomi Jakarta di bidang manufaktur karena dampak pandemi serta dampak perang global. Maka program pengembangan dan penelitian serta inovasi untuk menunjang pertumbuhan PDRB perlu dilakukan sebagai alternatif pengembangan ekonomi lokal. Selain itu pertumbuhan ekonomi UMKM perlu lebih diperhatikan keberlanjutannya mengingat ekonomi lokal mampu berperan sebagai fundamental ekonomi Kota Jakarta di saat terjadi ketidak stabilan ekonomi global. Ekonomi yang bersifat inklusif sehingga akses pelayanan dapat menjangkau berbagai lapisan ekonomi juga perlu diperhatikan sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jakarta dapat lebih ditekan dan dibenahi.

b. Kualitas Hidup

Realisasi tujuan program TPB yang berkaitan dengan Kualitas hidup berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan stunting, peningkatan kualitas ruang publik, akses ke air bersih dan sanitasi, inisiatif pengurangan limbah berkelanjutan, serta layanan kesehatan masyarakat yang lebih baik perlu untuk lebih diperhatikan. Realisasi tujuan program TPB yang berkaitan dengan kualitas hidup masih memiliki beberapa catatan dalam pencapaian. Belum menyeluruhnya jaminan kesehatan dan pemerataan kualitas pendidikan, serta akses hunian, air bersih, sanitasi, dan limbah yang memadai sebagai *basic service* masih memiliki hambatan yang belum memenuhi target untuk menjangkau berbagai lapisan kelompok masyarakat secara inklusif. Pemenuhan di lapangan masih terkendala perihal skema kelembagaan dan investasi pembiayaan infrastruktur yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak dan sektor. Selain itu, peningkatan kualitas ruang publik perlu lebih ditingkatkan sebagai *third place* sebagai ruang kegiatan informal, sosial, komunitas, hingga sebagai tempat resapan air.

c. Lingkungan

Pada realisasi tujuan TPB yang berkaitan dengan Lingkungan, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Target yang belum mencapai target antara lain: (1) upaya adaptasi dan mitigasi bencana, (2) pengembangan infrastruktur yang memiliki resiliensi terhadap perubahan iklim, (3) pemanfaatan *early warning system* pada kebencanaan, (4) serta kurang optimalnya penanganan korban bencana, (5) pengelolaan sampah belum mencapai target terutama di pulau. Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga masih memiliki beberapa hambatan pencapaian karena membutuhkan koordinasi dengan pemerintahan pusat dan berbagai *stakeholder* terkait yang tidak hanya terbatas pada EBT skala kecil (kendaraan pribadi atau kendaraan publik), tetapi juga EBT skala besar pada *Industrial Processes and Product Use* (IPPU). Penyediaan ekosistem kendaraan listrik.

d. Aksesibilitas

Sedangkan pada realisasi tujuan TPB pengelolaan lalu lintas, masih terdapat banyak tujuan yang belum tercapai. Beberapa tujuan yang belum tercapai tersebut antara lain yakni transportasi umum antara moda rel dan moda roda yang belum

seutuhnya terintegrasi menjangkau seluruh Kota Jakarta. Selain itu ketersediaan mobilitas berkelanjutan yang mengutamakan pejalan kaki serta bersifat inklusif yang turut menerapkan pengembangan *transit-oriented development* (TOD) yang memerlukan kerjasama antar instansi kelembagaan di tingkat regional dan nasional.

Berdasarkan beberapa permasalahan pada realisasi program TPB, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Jakarta untuk menanggulangi masalah tersebut yakni:

- Peningkatan Kualitas Ruang Publik: Melalui pengembangan ruang terbuka hijau seperti Tebet *Eco Park* dan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) serta peningkatan kualitas taman dan ruang hijau lainnya di seluruh Jakarta.
- Akses ke Air Bersih dan Sanitasi: Melalui kebijakan pengelolaan air yang ketat untuk mengurangi penggunaan air tanah dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
- Pengurangan Limbah Berkelanjutan: Larangan kantong plastik sekali pakai dan promosi manajemen limbah berbasis komunitas dan inisiatif pengomposan dan penggunaan teknologi seperti *Black Soldier Fly* (BSF) untuk mengurai limbah organik.
- Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat: Digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi JakSehat dan Program Jakarta Beraksi untuk mengurangi stunting dengan fokus pada intervensi nutrisi dan akses kesehatan.

B. Identifikasi Isu Skala Nasional

Kepentingan nasional merupakan satu kepentingan yang sangat perlu dipertimbangkan sebagai kepentingan daerah termasuk Jakarta. Selain kepentingan nasional, permasalahan dan isu strategis nasional juga dapat memiliki interaksi terhadap permasalahan dan isu strategis di tingkat daerah. Apabila integrasi antar rencana pembangunan yang mana di dalamnya terdapat kepentingan, tujuan, masalah, dan isu strategis dilakukan dengan optimal maka seluruh kinerja Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) akan mendukung pencapaian kinerja nasional. Oleh karena itu diperlukan identifikasi isu strategis di tingkat nasional agar selaras nantinya dengan seluruh isu strategis dan strategi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Isu strategis nasional termuat di dalam dua dokumen yang keduanya disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menerbitkan Undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagai acuan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen tersebut memuat seluruh permasalahan, isu strategis, serta tujuan pembangunan nasional. Sehingga untuk merumuskan isu strategis pembangunan jangka panjang dapat mengacu pada isu yang ada pada dokumen tersebut. Diharapkan baik langsung maupun tidak langsung, Jakarta dapat berkontribusi terhadap isu strategis yang berkembang di tingkat nasional. Isu strategis nasional yang termuat di dalam RPJPN Tahun 2025 - 2045 antara lain:

☐ Kesenjangan Antarwilayah

Isu ini merupakan sebuah tantangan yang harus diatasi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Kesenjangan yang dimaksud disini adalah ketimpangan aktivitas ekonomi antarwilayah yang disebabkan oleh terpusatnya sumber daya penggerak ekonomi mulai dari persebaran penduduk, tenaga kerja terdidik, investasi dan kredit perbankan, hingga sarana prasarana. Saat ini pusat aktivitas ekonomi masih berada di Pulau Jawa dan Sumatra dengan kontribusi di angka 78%. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan tantangan ini menjadi semakin besar terutama untuk daerah - daerah kepulauan.

☐ Persebaran Penduduk dan Tenaga Kerja Terampil Terpusat di Jawa dan Sumatra

Penduduk yang menetap di wilayah Jawa dan Sumatra berjumlah lebih dari 78,1% dari total penduduk Indonesia menurut BPS tahun 2020. Secara kuantitatif kesenjangan jumlah penduduk antarwilayah sudah menjadi satu isu, terlebih lagi secara kualitatif yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan sebagian

besar provinsi dengan IPM diatas rata-rata nasional adalah provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang bukan merupakan provinsi di Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatra yang berhasil meraih IPM diatas rata-rata nasional. Kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan terutama dalam kesenjangan dalam hal sarana prasarana serta tenaga pendidikan yang berhubungan langsung dengan IPM maupun kompetensi dan keahlian tenaga kerja.

❑ Variasi capaian Pembangunan dan Kinerja Sistem Kesehatan Antardaerah Tinggi

Capaian pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia secara luas masih lebih baik di Jawa dan Bali bila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja sistem kesehatan di daerah lain. Wilayah Indonesia bagian tengah dan timur masih terdapat banyak kasus penyakit menular seperti kusta dan malaria yang diindikasikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah tersebut. Sedangkan di wilayah barat Indonesia kasus yang lebih kerap terjadi adalah Tuberkulosis (TBC) dan kasus *stunting*.

❑ Kinerja Sarana Prasarana Dibandingkan Negara Lain Terutama Negara Kontinental

Sebagai negara kepulauan, menjadi tantangan untuk mengoptimalkan kinerja sarana prasarana dikarenakan lebih kompleksnya jalur distribusi. Di masa mendatang khususnya 20 tahun ke depan sarana dan prasarana didorong ke arah adil, berkelanjutan, dan berkualitas dengan dukungan tata kelola yang baik.

❑ Konektivitas yang Belum Optimal Menyebabkan Rendahnya Kinerja Logistik dan Daya Saing Global Di Tingkat Asia Pasifik

Di negara-negara kawasan Asia Pasifik, kinerja logistik Indonesia masih di bawah rata-rata. Hanya Bangladesh dan Kamboja yang memiliki indeks kinerja logistik yang lebih rendah dari Indonesia. Tidak hanya indeks kinerja logistik, nilai kompetitif Indonesia terhadap negara Asia Pasifik relatif cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh kinerja infrastruktur air minum, sanitasi, persampahan, listrik, internet yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia.

❑ Semakin Meningkatnya Krisis Iklim dan Posisi Geografis Indonesia pada Cincin Api

Semakin meningkatnya tiga krisis planet bumi, dan posisi Indonesia yang terletak di kawasan tropis dan kawasan cincin api (*ring of fire*) dapat menjadi potensi ancaman bencana, namun posisi tersebut menjadikan Indonesia kawasan yang subur dengan sumber daya alam melimpah dan dibutuhkan oleh berbagai negara yang dapat dimanfaatkan dan menjadi modal untuk berbagai hilirisasi dan bahan baku industri.

❑ Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Beberapa Daerah yang Berjalan Belum Efektif

Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Jawa (*Java centris*). Masih tingginya ketimpangan antarwilayah terutama disebabkan masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan persebarannya yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

❑ Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Terbatas

Perbedaan kuantitas dan kualitas aparatur Pemerintah Daerah termasuk regulasi tumpang tindih serta kondisi politik yang kurang kondusif. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel.

❑ Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas

Secara umum keadaan fiskal daerah menunjukkan ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah masih tinggi sedangkan rasio pajak daerah yang masih rendah, serta minimnya inovasi pembiayaan alternatif di daerah.

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025. Terdapat isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi Jakarta. RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama dari RPJPN 2025-2045 yang diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Visi Presiden periode 2025-2029 tertuang dalam 8 Asta Cita yang memuat 17 Program Prioritas Nasional. Berdasarkan evaluasi kinerja kewilayahan pada RPJMN periode sebelumnya telah diidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan Jakarta yaitu:

- ❑ Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dengan selatan, barat dengan timur, serta pulau utama dengan daerah kepulauan;
- ❑ Tingginya kerentanan bencana seperti banjir rob di bagian utara Pulau Jawa serta gempa bumi dan tsunami di bagian selatan Pulau Jawa;
- ❑ Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri;
- ❑ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi sektor pertanian;
- ❑ Belum optimalnya upaya pengurangan pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industry; dan
- ❑ Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong – kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scaring effect* pasca pandemi COVID-19.

Untuk itu pada periode 2025-2029 telah ditetapkan arah pembangunan kewilayahan yang bertujuan untuk menguatkan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Tema pembangunan Pulau Jawa dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Secara spesifik Jakarta dan kawasan aglomerasi Jakarta diberikan amanah tema pembangunan sebagai Kota Global Hijau yang Menjadi Simpul Ekonomi Asia Tenggara.



Gambar II.69 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Pembangunan Nasional

Sumber: RPJMN 2025-2029

Selain itu, RPJMN 2025-2029 menekankan strategi prioritas pembangunan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang difokuskan pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, strategi mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan, dan strategi mencapai pemerataan pembangunan. Beberapa indikator makro yang ditargetkan sebagai sasaran pembangunan Jakarta, yaitu:

Tabel II.74 Target Sasaran Pembangunan Jakarta dalam RPJMN 2025-2029

Indikator	2025	2029
Rata-rata LPE (%)	6,8 %	
LPE (%)	-	7,9 %
PDRB per kapita (Rp Juta)	373,4	560,8
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	16,7	16,5
Tingkat Kemiskinan (%)	3,55-3,85	2,08-3,08
Rasio Gini	0,425-0,430	0,417-0,421
Indeks Modal Manusia	0,65	0,69
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	14,65	22,01
IKLH Daerah	51,34	51,98
TPT (%)	5,54-6,40	4,93-5,99

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2025-2029

Dalam mencapai target tersebut, RPJMN memberikan indikasi intervensi dalam bentuk *highlight* arah kebijakan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, dan ketahanan sosial budaya ekologi yang perlu dilakukan di Jakarta.

Arah kebijakan pada transformasi sosial antara lain adalah Penguatan pendidikan tinggi STEAM dan inovasi bertaraf global (pilot project: Universitas Indonesia); Peningkatan rumah sakit di Kab. Kep. Seribu menjadi RS kelas C; dan Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting pada Kab Kep Seribu, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat. Arah kebijakan pada transformasi tata kelola adalah Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Jabodetabek. Arah kebijakan pada transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia antara lain adalah Operasi dan patroli laut strategis di wilayah sekitar ALKI I; Penguatan/peningkatan Lantamal Jakarta; Penguatan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat pada objek vital, wilayah rentan, dan ranah siber.

Arah kebijakan pada transformasi ekonomi antara lain adalah Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Tanjungpriok; Pembangunan KA Medium Speed Jakarta – Surabaya (Tahap 1 Jakarta – Semarang); Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif pada KPPN Kep Seribu, KPPN Kota Tua–Sunda Kelapa, KPPN CBD Jakarta Kota, KPPN Cibubur–TMII; Peningkatan layanan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke daerah afirmasi 3TP; dan Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Jabodetabek menuju taraf global city dan economic hub Asia Tenggara. Infrastruktur perkotaan yang dimaksud antara lain terdiri atas Pembangunan sistem transportasi massal publik berbasis jalan (BRT & feeder) dan rel (MRT & LRT); City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism; Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, melalui pengembangan public housing dan/atau urban renewal untuk mencapai kota tanpa permukiman kumuh; Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal; serta Pengembangan kendaraan listrik dan pembangunan SPKLU.

Arah kebijakan pada transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi antara lain adalah Pemulihan dan perlindungan pesisir dan laut di Kota Jakarta Utara; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, terutama di DAS Ciliwung dan DAS Krukut; Optimalisasi penanganan sampah domestik di hulu dan hilir, serta penerapan ekonomi sirkular; Peningkatan sistem pemantauan kualitas udara di Metropolitan Jabodetabek; Pelindungan dan pelestarian warisan budaya terutama warisan dan cagar budaya peninggalan sejarah di KPPN Kota Tua–Sunda Kelapa; Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik.

Selanjutnya secara teknis, RPJMN 2025-2029 menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung signifikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. Terdapat beberapa PSN yang berkaitan langsung dengan Jakarta. PSN ini menjadi pedoman yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan dengan mempertimbangkan kesinambungan dengan pemangku kepentingan lain di luar pemerintah Jakarta. Selain itu telah termuat beberapa lokasi prioritas pada kawasan aglomerasi Jakarta sesuai dengan konteksnya yang mencakup:

1. Jakarta-Tangerang *Internasional Business Corridor* dan Jakarta *Global City Urban Tourism (Central-South)*.
2. *Northern Coast New Economic Hub* dan Jakarta *Global City Urban Tourism (North)*.
3. Kawasan Konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu

Tabel II.75 Proyek Strategis Nasional di Jakarta dalam RPJMN 2025-2029

No.	Proyek	Lokasi	Pelaksana
13	<i>Giant Sea Wall</i> , Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta , Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah	- Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
30	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta , Belesi, Palu	PT Pertamina/ PGN
71	Pembangunan Jakarta <i>Metropolitan Mass Rapid Transit</i> Koridor Timur - Barat	DKI Jakarta , Jawa Barat, Banten	- Kementerian Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Pemerintah Provinsi Banten PT MRT Jakarta
76	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	DKI Jakarta , Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado	Pemerintah Kota Lokasi proyek dan Swasta
77	<i>Jakarta Sewerage System</i>	DKI Jakarta	- Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

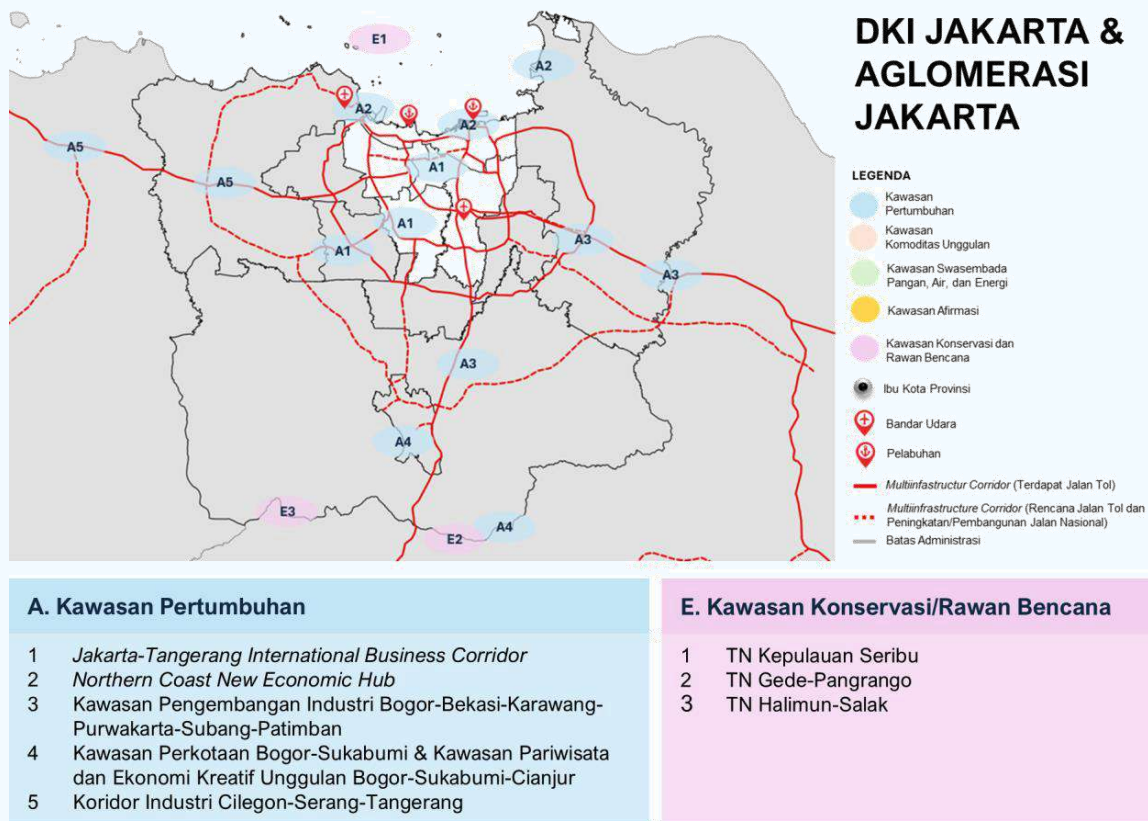
Sumber: RPJMN 2025-2029

C. Identifikasi Isu Skala Regional

Kebijakan Perencanaan Wilayah Aglomerasi Jakarta

Wilayah Jabodetabekpunjur yang dikenal sebagai wilayah aglomerasi Jakarta memiliki isu strategis dan tantangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi kota Jakarta. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang mengatur mengenai kawasan aglomerasi yang paling sedikit meliputi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dokumen ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan di wilayah Kawasan Aglomerasi Jakarta sehingga tercipta sistem tata kelola yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan umum dalam UU DKJ, disebutkan bahwa Kawasan Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Dengan pendekatan ini, Kawasan Aglomerasi Jakarta diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan daya saing global, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang termasuk dalam cakupan aglomerasi. RIPKA Jakarta memuat program/kegiatan yang mencakup bidang-bidang berikut: a) Transportasi; b) Pengelolaan Sampah; c) Pengelolaan Lingkungan Hidup; d) Penanggulangan Banjir; e) Pengelolaan Air Minum; f) Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3; g) Infrastruktur Wilayah; h) Penataan Ruang; dan i) Energi.



Gambar II.70 Arah Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Kawasan Aglomerasi Jakarta

Sumber: RPJMN 2025-2029

Kementerian ATR/BPN membentuk *Project Management Office* Tim Koordinasi Penataan Ruang (PMO TKPR) Jabodetabekpunjur yang bertugas mengakselerasi penyelesaian isu strategis Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Terdapat beberapa isu strategis yang menyangkut wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur sebagaimana disimpulkan oleh PMO TKPR Jabodetabekpunjur dan dokumen teknokratik RIPKA, antara lain:

1. Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang

Fenomena *Urban Sprawl* di mana perkembangan wilayah perkotaan meluas ke area pinggiran atau pedesaan dengan pola pembangunan yang cenderung horizontal dan tidak terkendali. Pola ini sering kali ditandai dengan kepadatan penduduk yang rendah, segregasi fungsi lahan (seperti pemisahan antara perumahan, komersial, dan industri), serta ketergantungan yang tinggi pada kendaraan pribadi. Dalam banyak kasus, *urban sprawl* terjadi karena kombinasi pertumbuhan populasi, preferensi gaya hidup untuk hunian di area yang lebih luas dan tenang, serta lemahnya perencanaan tata ruang. Fenomena ini menciptakan kota-kota yang tersebar luas dengan jaringan infrastruktur yang lebih mahal dan kurang efisien. Di kasus Kawasan Aglomerasi Jakarta, terjadi peningkatan fenomena *urban sprawl* 19% dalam 20 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan terjadi penjarangan spasial kawasan terbangun menuju arah timur, barat, dan selatan Jakarta (PMO TKPR, 2022). Fenomena ini juga sering diperburuk oleh peraturan tata ruang yang tidak mendukung penggunaan lahan campuran di pusat kota, sehingga mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke area yang lebih terjangkau. Akibatnya, pusat kota dapat kehilangan daya tariknya, sementara kawasan pinggiran menjadi padat dengan pembangunan dan memperbesar jarak perjalanan harian masyarakat.

2. Pergerakan Orang dan Barang di Kawasan Aglomerasi

Berdasarkan Statistik Komuter Jabodetabek (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023) bahwa pergerakan orang dalam Kawasan Aglomerasi Jakarta sangat signifikan, baik dari luar Jakarta-Jakarta (Eksternal-Internal), antar wilayah di Jakarta-Jakarta (Internal-Internal), maupun dari Jakarta ke luar Wilayah (Internal-Eksternal). Pergerakan yang tinggi dari kawasan di luar Jakarta menuju pusat kota menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat luar wilayah Jakarta

pada pusat kegiatan ekonomi di Jakarta. Sedangkan pergerakan luar Jakarta menuju Jakarta berdasarkan asal daerah didominasi oleh Kota Depok yang memiliki jumlah komuter tertinggi, yaitu sekitar 371.488 orang per trip per harinya, dan dari Kota Bogor menuju Jakarta dengan pergerakan paling sedikit sebanyak sekitar 33.926 orang per trip per harinya (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023). Data pergerakan dari luar Jakarta ke Jakarta ini menunjukkan banyak penduduk yang memilih menetap di luar Jakarta dan bekerja di pusat kota.

Selain kondisi pergerakan orang, kondisi pergerakan barang di Kawasan Aglomerasi Jakarta juga menjadi isu strategis. Pergerakan barang dari Jakarta ke Jakarta menjadi rute dengan pergerakan terbesar, yaitu mencapai sekitar 496.414.433 ton/tahun yang mengindikasikan masifnya pergerakan barang internal dan besarnya aktivitas logistik di Jakarta. Banyaknya kondisi pergerakan orang juga dapat menjadi salah satu sebab tingginya pergerakan barang setiap harinya. Estimasi kebutuhan perjalanan kendaraan barang diperkirakan menghasilkan jumlah pergerakan truk sekitar 500-700 ribu pergerakan kendaraan barang per hari (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, 2023). Dikarenakan tingginya pergerakan barang, tidak jarang ditemukan beberapa titik kemacetan menghambat distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya perencanaan jangka panjang dan komprehensif untuk mengantisipasi pertumbuhan urbanisasi yang cepat serta memastikan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan di Kawasan Aglomerasi Jakarta.

3. Ketahanan dan Transisi Energi

Sumber energi listrik di Kawasan Aglomerasi Jakarta secara dominan berasal dari pembangkit berbasis energi fosil, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Untuk dapat memproduksi listrik dalam jumlah yang besar, PLTU menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi. Sedangkan PLTGU menghasilkan emisi yang lebih rendah karena menggunakan gas alam sebagai bahan bakar utama. Sebagai bagian dari sistem transmisi ketenagalistrikan Jawa-Bali, Kawasan Aglomerasi Jakarta sangat bergantung pada sumber energi fosil untuk menjaga kestabilan pasokan listrik di sektor yang sedang berkembang pesat, seperti perumahan, komersial, dan industri. Hal ini menjadikan PLTU dan PLTGU sebagai komponen utama dalam struktur bauran energi listrik Jabodetabek, meskipun terus dihadapkan pada tantangan keberlanjutan terkait emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan terhadap kebutuhan listrik di Kawasan Aglomerasi Jakarta pada tahun 2030, total kebutuhan listrik mencapai sekitar 193.775 GWh atau meningkat 99% dari tahun 2020 (Dokumen Teknokratik RIPKA 2025). Jumlah total kebutuhan listrik tersebut dapat terjadi apabila distribusi pola ruang pada tahun 2030 optimal dan sesuai dengan rencana pola ruang. Kebutuhan listrik untuk rumah tangga masih menjadi yang paling tinggi, yaitu sebesar 85.356 GWh (Dokumen Teknokratik RIPKA 2025). Hal tersebut dikarenakan luasan dari peruntukan pola ruang sebagai kawasan permukiman, yaitu mencapai 302.308 hektar. Berdasarkan dokumen teknokratik RIPKA Jakarta 2025, terdapat program transisi energi yang merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mengingat wilayah ini adalah pusat ekonomi dan memiliki tingkat konsumsi energi yang tinggi, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa program untuk mendukung transisi energi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), serta penggunaan *Electric Vehicle*.

4. Potensi Ancaman Banjir

Kawasan Aglomerasi Jakarta berada pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Ciujung-Cidanau-Cidurian, dan Citarum yang secara historis rawan terhadap bencana banjir. Banjir di Kawasan Aglomerasi Jakarta utamanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah, yang dipengaruhi peningkatan intensitas curah hujan akibat perubahan iklim, dan faktor antropogenik, yakni terkait alih fungsi lahan resapan air yang menyebabkan daya resap wilayah berkurang. Isu banjir pada Kawasan Aglomerasi Jakarta memerlukan upaya-upaya dengan pendekatan lintas wilayah administratif dengan penanganan yang meliputi daerah-daerah terkait. Selain itu, beberapa hal teridentifikasi sebagai akar permasalahan banjir sehingga perlu diperhatikan secara menyeluruh. Akar permasalahan tersebut menjadi landasan dalam menentukan perencanaan, pembangunan, dan program penyelesaian isu banjir di Kawasan Aglomerasi Jakarta. Akar permasalahan banjir yang terjadi di Kawasan Aglomerasi Jakarta antara lain adalah peningkatan debit limpasan permukaan (*surface runoff*), penataan ruang dan bangunan yang kurang tangguh terhadap bencana, rendahnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir, penurunan muka tanah yang semakin drastis, sistem peringatan dini banjir yang belum efektif, dan pengoperasian sistem pengendali banjir yang belum terintegrasi (PMO TKPR, 2022).

5. Penyediaan Air Baku, Air Minum dan Sanitasi

Sebagai penunjang pengembangan Kawasan Aglomerasi Jakarta, diperlukan peningkatan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan yang umumnya telah melalui proses pengolahan yang memenuhi standar kesehatan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Suplai air baku ke Kawasan Aglomerasi Jakarta khususnya ke kota inti bersumber dari Waduk Jatiluhur yang termasuk dalam Wilayah Sungai Citarum dengan porsi sebesar 82%. Kawasan Aglomerasi Jakarta sendiri berada pada Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, yang mana jika merujuk pada data indeks ketersediaan air milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), telah mengalami kelangkaan mutlak atau kelangkaan air absolut dengan indeks ketersediaan air lebih rendah dari 500 m³/tahun/kapita, artinya, permintaan air di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane telah melebihi ketersediaan sumber daya air yang ada. Lebih lanjut, diperkirakan Kawasan Aglomerasi Jakarta yang berada di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane akan mengalami cekaman air sangat tinggi pada tahun 2025 (The World Bank, 2021). Untuk itu, diperlukan pengelolaan air secara terpusat dan terintegrasi menggunakan teknologi yang tepat untuk dapat menyediakan suplai air baku secara regional.

Untuk mempercepat akses sanitasi aman, berbagai akar permasalahan harus diatasi, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang layak, kurangnya infrastruktur sanitasi terpusat, dan keterbatasan pendanaan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang memadai. Upaya lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitas sangat penting untuk mencapai target sanitasi aman. Terkait infrastruktur sanitasi, terdapat proyek strategis nasional dengan sasaran peningkatan akses sanitasi aman, yaitu *Jakarta Sewerage System (JSS)*. JSS merupakan proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan air limbah di wilayah Jakarta yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan.

6. Kemacetan Lalu Lintas

Sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, Kawasan Aglomerasi Jakarta memiliki karakteristik masyarakat dengan mobilitas tinggi dan dengan jarak *commuting* harian yang terhitung jauh, hingga rata-rata 20 km per hari (PMO TKPR). Menurut BPS tahun 2023, pergerakan penduduk Jabodetabek sebesar 4,4 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, pergerakan dari dalam Jakarta dan Provinsi Banten dan Jawa Barat menuju Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu) mencapai 2,6 juta, dengan 1,5 juta penduduk berasal dari Jabar dan Banten (PMO TKPR). Selain itu, proporsi pergerakan komuter Jabodetabek berupa 79% kendaraan pribadi dan 19,5% *mode share* transportasi publik (PMO TKPR). Kondisi ini memicu permasalahan kemacetan yang menyebabkan kerugian signifikan dalam ekonomi, polusi, bahkan kesehatan masyarakat. Mengutip PMO TKPR, kerugian ekonomi terjadi akibat dari waktu perjalanan dan semakin tingginya biaya transportasi. Atas dasar perhitungan variabel *Value of Time (delay)* dan *Vehicle Operating Cost*, kerugian ekonomi di Jabodetabek akibat kemacetan mencapai sekitar Rp. 40 Triliun untuk biaya operasional transportasi dan sekitar Rp. 60 Triliun untuk waktu perjalanan setiap tahunnya. Beberapa penyebab kemacetan di Jabodetabek, antara lain *mode share* angkutan umum yang rendah, sistem transportasi publik belum efektif dan menjangkau seluruh wilayah, *urban sprawl* yang semakin meluas, serta sarana prasarana transportasi yang belum inklusif dan andal. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan transportasi publik merupakan hal fundamental dalam penyelesaian permasalahan kemacetan. Selain itu, kebijakan penataan ruang dan kawasan, serta pengarusutamaan *non-motorized transportation* dan inklusivitas akses transportasi menjadi pendukung yang dapat menjawab tantangan kemacetan Jabodetabek dan kerugian ekonomi yang dihasilkannya.

7. Kerentanan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pantai

Sebagai satu-satunya wilayah metropolitan di Indonesia, wilayah pantai utara yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana pesisir seperti banjir rob, *land subsidence*, dan abrasi. Hasil studi JICA tahun 2021, menunjukkan bahwa terdapat penurunan tanah cukup pesat di utara Jakarta sebesar 0,2 m/tahun. Bencana di wilayah pesisir sering kali menelan banyak korban jiwa dan material. Kerugian ekonomi yang dihadapi masyarakat antara lain meliputi berkurangnya pendapatan ekonomi warga, status kepemilikan tanah dan termasuk biaya pencegahan banjir rob itu sendiri. Beberapa faktor yang memengaruhi potensi bencana di wilayah pesisir Kawasan Aglomerasi Jakarta antara lain seperti, efek perubahan iklim dan pemanasan global, ketidakaturan kawasan pesisir, alih fungsi lahan, dan eksploitasi lingkungan berlebihan, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat bahari. Oleh karena itu diperlukan penanganan multi-sektoral dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan sosial-ekonomi masyarakat dalam penataan pantai utara, seperti penguatan kapasitas ketanggapan bencana dan kapasitas masyarakat, penataan ruang dan infrastruktur, serta pemulihan lingkungan dan revitalisasi kawasan pesisir.

8. Pengelolaan dan Kapasitas Penampungan Sampah

Pertumbuhan penduduk secara masif yang terjadi di Kawasan Aglomerasi Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan, tak terkecuali permasalahan persampahan. Tingginya jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahunnya kian membebani TPA hingga melebihi kapasitas. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, lebih dari 13 juta ton sampah (40,71%) yang dihasilkan setiap tahunnya tidak dapat terkelola di kawasan tersebut. Sampah yang tidak terkelola ini disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang melebihi kapasitas, kurangnya infrastruktur pendukung, *impermeable surface* yang tidak layak sehingga menyebabkan pencemaran. Selain itu, masih minimnya kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah, serta keterbatasan kemampuan layanan persampahan dari pemerintah daerah menjadi salah satu alasan tingginya jumlah sampah yang tidak terkelola. Pengelolaan sampah di Kawasan Aglomerasi Jakarta yang belum optimal menyebabkan beberapa masalah, diantaranya adalah munculnya TPS liar, fenomena *open dumping* dan *open burning*, hingga mencemari sungai dan badan air. Lebih jauh lagi, apabila dibiarkan akan menyebabkan kerugian dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tingginya jumlah sampah yang dihasilkan di setiap kabupaten/kota setiap tahunnya mengakibatkan terbebannya TPA hingga melebihi kapasitas, dengan kata lain, kapasitas penampungan sampah belum dapat menampung seluruh timbulan sampah. Akar permasalahan pengelolaan persampahan dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) antara lain: (a) Kapasitas TPA dan kemampuan pengelolaan sampah yang tidak memadai; (b) Model manajemen persampahan belum menjawab tantangan; dan (c) Kurangnya dukungan pembiayaan (PMO TKPR, 2022).

9. Permukiman Kumuh

Seiring bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat. Keterbatasan lahan merupakan kondisi yang pasti terjadi, terutama didorong oleh tingginya laju urbanisasi ke Kawasan Aglomerasi Jakarta untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Lahan yang semakin terbatas juga diikuti oleh kurang terjangkau harga lahan maupun hunian di perkotaan menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman pada lokasi-lokasi yang kurang layak huni dan sesuai peruntukannya. Keberadaan permukiman kumuh dapat meningkatkan potensi ancaman pencemaran lingkungan, kebakaran dan banjir, penyebaran penyakit, serta kriminalitas. Selain itu hal ini juga memengaruhi citra kawasan perkotaan itu sendiri. Beberapa hal yang diidentifikasi menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah disparitas ekonomi dan rendahnya kemampuan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan; tidak optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya; dan pertambahan penduduk dan semakin berkurangnya ketersediaan lahan. Beberapa hal fundamental yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan permukiman kumuh dan penyediaan hunian terjangkau yang layak huni, yang dapat memanfaatkan metode konsensus pemanfaatan lahan (*land consolidation*).

10. Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir

Dinamika yang terjadi di area hulu akan berdampak pada area hilir. Kawasan Aglomerasi Jakarta dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Bogor dan Kawasan Puncak bagian Kabupaten Cianjur merupakan bagian dari area hulu. Dinamika yang terjadi di area hulu tentunya dapat memberikan dampak pada area di bagian hilir dalam suatu ekosistem regional. Kawasan hulu di dalam Kawasan Aglomerasi Jakarta memiliki tipikal morfologi yang berbentuk hamparan dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan serta memiliki curah hujan yang tinggi. Keadaan yang sedemikian rupa membuat area hulu memiliki kerentanan terhadap bencana-bencana seperti gerakan tanah, longsor, dan banjir. Penyebab utama dari terjadinya bencana-bencana tersebut kebanyakan diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang menyebabkan permasalahan lingkungan, terutama pada area hutan dan sempadan sungai. Pendekatan penataan ruang berbasis kesesuaian daya dukung daya tampung serta partisipatif masyarakat dapat menjadi solusi dalam penyelesaian isu strategis ini.

11. Pengelolaan UMKM dan Sektor Informal

Dalam konteks Kawasan Aglomerasi Jakarta, pengelolaan UMKM dan sektor informal semakin terbebani oleh dinamika kependudukan dan tingginya arus migrasi masuk, terutama dari daerah *hinterland* dan luar Jakarta. Banyak pendatang yang tidak memiliki keterampilan memadai serta tidak menetap dalam jangka panjang, sehingga cenderung terserap ke sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Kondisi ini tidak hanya menghambat pengembangan UMKM dan penataan sektor informal, tetapi juga meningkatkan beban ekonomi kota, terutama dalam

aspek kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, besarnya jumlah tenaga kerja informal yang minim daya saing turut menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi, baik di perkotaan maupun di kawasan aglomerasi. Akumulasi dari kondisi ini dapat menciptakan stagnasi, di mana sektor informal terus berkembang tanpa peningkatan kualitas tenaga kerja atau pergeseran menuju sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, jumlah penduduk dan arus migrasi masuk perlu dikelola secara strategis agar memberikan kontribusi positif bagi perekonomian tanpa menambah beban atau tekanan pada kawasan aglomerasi.

12. Pengembangan Sektor Pariwisata

Kawasan Aglomerasi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata. Sebagai kota global, Kawasan Aglomerasi Jakarta tidak hanya menjadi gerbang utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga menawarkan ekosistem pariwisata yang kompleks, mulai dari pariwisata budaya, bisnis, hingga gaya hidup. Penguatan sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat daya saing dalam konstelasi kota global. Untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata, Kawasan Aglomerasi Jakarta perlu mengembangkan destinasi wisata unggulan, memperbaiki infrastruktur transportasi, serta memperkuat ekosistem industri kreatif. Potensi besar, seperti budaya Betawi, Kepulauan Seribu, serta rangkaian destinasi wisata alam di Kawasan Bogor-Halimun, harus dioptimalkan melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, Kawasan Aglomerasi Jakarta memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata global.

Kawasan Metropolitan Jabodetabek menjadi sebuah aglomerasi yang tidak dapat terpisahkan dalam pembangunan wilayah, karena jika salah satu daerah dilakukan pembangunan, maka akan mempengaruhi atau dipengaruhi daerah lain di sekitarnya. Begitu juga dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi yang tidak dapat terlepas satu sama lain. Terdapat beberapa isu strategis pembangunan di provinsi sekitar Jakarta yang perlu menjadi perhatian untuk mendukung koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat dan lintas pemerintah daerah yang efektif. Isu strategis tersebut tercantum dalam dokumen RPJMD Jawa Barat dan Banten yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel II.76 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten

Isu Strategis Jawa Barat (Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029)	Isu Strategis Banten (Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten 2025-2029)
Green and Blue Economy serta Pembangunan Inklusif ☐ Penggunaan sumber daya alam yang terbarukan. ☐ Efisiensi energi. ☐ Pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. ☐ Pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. ☐ Pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut. ☐ Pembangunan inklusif yang memastikan pertumbuhan ekonomi terdistribusikan secara merata.	Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah ☐ Produktivitas ekonomi di sektor unggulan yaitu manufaktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif ☐ Penyebaran kebermanfaatannya ekonomi ☐ Kualitas investasi yang merata antara wilayah Banten Utara dengan Banten Selatan ☐ Peningkatan kemandirian keuangan daerah
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia ☐ Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ☐ Relevansi Keterampilan ☐ Inovasi dan Kreativitas ☐ Kesejahteraan dan Motivasi ☐ Pemberdayaan dan Keterlibatan ☐ Adaptasi terhadap Perubahan	Peningkatan pemerataan kualitas layanan Sumber Daya Manusia (SDM) ☐ Peningkatan intelektual dan karakter masyarakat ☐ Peningkatan kualitas taraf kesehatan masyarakat ☐ Peningkatan pembangunan kualitas keluarga ☐ Inovasi dan digitalisasi dalam penerapan pembelajaran
Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar ☐ Akses yang Tidak Merata ☐ Dampak pada Kualitas Hidup ☐ Pengembangan Ekonomi ☐ Inklusivitas Sosial ☐ Perubahan Iklim dan Keberlanjutan ☐ Pemerataan Pembangunan ☐ Tantangan Finansial	Penanggulangan kemiskinan ☐ Keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat ☐ Penurunan kemiskinan wilayah pedesaan ☐ Kualitas kelembagaan ekonomi kerakyatan ☐ Bantuan sosial dan fasilitas <i>microfinancing</i> Penanggulangan pengangguran terintegrasi ☐ sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan riil pasar kerja

Isu Strategis Jawa Barat (Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029)	Isu Strategis Banten (Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten 2025-2029)
	☐ ketimpangan akses terhadap informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, serta peluang berwirausaha ☐ inovasi serta teknologi modern yang mendukung proses <i>re-skilling</i> dan <i>up-skilling</i> ☐ perluasan akses informasi pasar kerja dan pengembangan program padat karya
Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan ☐ Daya Dukung dan Daya Tampung ☐ <i>Overexploitasi</i> Sumber Daya ☐ Perubahan Iklim ☐ Manajemen Sumber Daya ☐ Kehidupan Berkelanjutan ☐ Kolaborasi Global ☐ Pendidikan dan Kesadaran	Penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana ☐ Pertumbuhan urbanisasi yang pesat mengakibatkan hilangnya lahan hijau ☐ Tingginya alih fungsi lahan dan pertambangan ilegal ☐ Sistem mitigasi bencana yang terintegrasi ☐ Edukasi kebencanaan, pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan
Keberlanjutan Penataan Ruang ☐ Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan ☐ Perlindungan Lingkungan ☐ Keadilan Sosial ☐ Adaptasi terhadap Perubahan Iklim ☐ Penggunaan Lahan yang Efisien ☐ Partisipasi Masyarakat ☐ Kolaborasi Antar Pemerintah	Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan ☐ Ketimpangan infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah ☐ Pengembangan potensi lokal di daerah selatan ☐ Pembangunan jalan, transportasi massal, dan infrastruktur penunjang lainnya secara merata ☐ Simpul <i>logistic flux</i> antara Pulau Jawa dan Sumatera ☐ Integrasi perencanaan dengan Provinsi sekitar
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ☐ Transparansi dan Akuntabilitas ☐ Keterlibatan Masyarakat ☐ Keadilan dan Keterbukaan ☐ Efisiensi dan Efektivitas ☐ Penegakkan Hukum dan Anti Korupsi ☐ Inovasi dan Teknologi ☐ Kolaborasi dan Kemitraan	Pemantapan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani ☐ Birokrasi yang berintegritas dan adaptif ☐ Masyarakat yang bermoral Pancasila dan demokratis ☐ Pemberantasan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN) ☐ Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Jakarta

Isu penataan ruang di Jakarta dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu rendahnya penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai serta kebijakan perencanaan tata ruang yang belum relevan dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Isu strategis penataan ruang tersebut diantaranya adalah:

- Kemacetan dan *high-cost economy*** akibat mobilitas penduduk yang tidak efisien. Hal ini disukung dengan kebijakan perencanaan tata ruang yang masih cenderung berorientasi pada kendaraan pribadi dan pembangunan jalan baru.
- Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital** yang menyebabkan inefisiensi mobilitas dan aktivitas penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh akses digital yang belum merata, data dan informasi yang belum terintegrasi, serta kurangnya penyediaan dan pemanfaatan platform. Merujuk pada kebijakan perencanaan yang ada, pengembangan infrastruktur telekomunikasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan akses pelayanan pada lingkungan hunian dan sarana prasarana dasar.
- Squatter* dan *sprawling*** akibat kurangnya supply hunian layak dan terjangkau yang aksesibel, serta kebijakan penataan ruang yang masih membuka pengembangan hunian horizontal dan belum mempertimbangkan integrasi dengan jaringan transportasi umum.
- Permasalahan lingkungan** (banjir, penurunan tanah, pencemaran air dan udara) akibat kurangnya pengendalian pembangunan di daerah hulu dan hilir, meliputi minimnya ruang terbuka hijau, penggunaan air tanah berlebih, serta sinkronisasi perencanaan dan pengendalian banjir di kawasan hulu dan hilir.

Untuk itu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044, dilakukan perubahan paradigma perencanaan untuk menjawab perkembangan permasalahan ruang kota melalui konsep 3 pilar utama yakni: pembangunan ruang kota berorientasi pada transit angkutan umum massal (TOD), ruang kota berbasis digital, serta pembentukan *self sufficient neighborhood*. Secara skematik, 3 (tiga) pilar utama perencanaan tata ruang Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.71 Konsep Pengembangan Spasial Rencana Tata Ruang Jakarta

Sumber: Perda 7/2024 tentang RTRW Jakarta 2044

Dalam konsep pengembangan kota berorientasi transit/ **Transit Oriented Development**, jaringan transportasi umum massal merupakan struktur utama pembentuk ruang kota Jakarta. Pemusatan aktivitas dan penduduk akan diarahkan di sekitar titik transit dalam rangka efisiensi pergerakan penduduk dan penggunaan ruang kota, serta mempermudah pencapaian kebutuhan sehari-hari. Ditargetkan 70% penduduk tinggal dan beraktivitas di sekitar titik transit (*People Near Transit*) yang dikembangkan dengan konsep TOD. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan ini, yakni perluasan jaringan transportasi umum massal yaitu angkutan berbasis rel dan BRT koridor utama dan penyesuaian alokasi ruang (*rezoning*) yang dapat dibagi atas:

- 1) *Upzoning* dan penciptaan kawasan *mixed-used* pada Wilayah Pengembangan, yaitu kawasan yang berada pada koridor transit angkutan umum massal yang dikembangkan sebagai TOD dan pusat pelayanan dengan syarat kriteria teknis dan performa minimal kawasan yang memperhatikan aspek inklusivitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
- 2) *Downzoning* pada kawasan Wilayah Pengendalian, yaitu kawasan di luar koridor titik transit dimana pembangunannya akan ditahan untuk kepentingan keseimbangan lingkungan perkotaan, diantaranya melalui pemanfaatan ruang secara selektif, pembukaan RTH-RTH baru, serta *repurposing* lahan terbengkalai (*underutilized*) dan kawasan tidak ramah lingkungan menjadi ruang terbuka hijau.



Gambar II.72 Konsep Kota Berorientasi Transit

Sumber: Perda 7/2024 tentang RTRW Jakarta 2044

Dalam konsep pembangunan berorientasi digital/ *Digital Oriented Development*, penataan ruang yang mendorong masyarakat untuk dapat beraktivitas dari lingkungan huniannya, sehingga kedepannya masyarakat dapat memiliki opsi untuk beraktivitas dengan menggunakan transportasi publik ke kawasan-kawasan TOD atau beraktivitas dengan perangkat digital dari huniannya. Terdapat 2 strategi yang dilakukan dalam menerapkan konsep ini, yaitu:

- 1) Peningkatan fleksibilitas warga melalui pengembangan lingkungan hunian yang mandiri (*self-sufficient neighborhood*) dan efisiensi pergerakan, sehingga fungsi penunjang (bekerja, perdagangan, perdagangan dan jasa skala lingkungan, rekreasi, dll) dapat dikembangkan di dalam kawasan perumahan untuk mendukung aktivitas warga dari rumah.
- 2) peningkatan dukungan infrastruktur digital sebagai upaya pemerataan akses masyarakat terhadap informasi di area digital melalui pengembangan *digital hub* dengan bentuk Pusat *Tech Commerce* skala kota sebagai ruang kolaborasi masyarakat (Future City Hub, dll) dan *Neighborhood Digital Hub* skala lingkungan hunian (*coworking space*, *JakWifi*, dll), serta pengembangan sarana prasarana teknologi masa depan (*Micro cell tower* 5G, *data center*, dll) dan pelayanan publik secara digital (*Platform JAKI*, dll).

Dalam konsep *self-sufficient neighborhood* yang mengadaptasi konsep *15-Minute City*, yang penerapannya dalam rencana tata ruang Jakarta meliputi penyediaan fasilitas telekomunikasi dan digital hub, sarana dan prasarana transportasi dan hunian, sarana perdagangan dan niaga, ruang terbuka publik, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Penerapan konsep *self-sufficient neighborhood* ini menekankan pada 3 prinsip utama yaitu:

- 1) setiap *neighborhood*/lingkungan hunian memiliki fungsi pelayanan kota berskala mikro untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
- 2) optimalisasi fungsi ruang dengan mendorong densitas/kepadatan dan pengembangan *mixed-use*/campuran, dan
- 3) responsif terhadap gender dan usia, ramah difabel, dan berketahanan.

Dengan menerapkan ketiga konsep tersebut, Visi Jakarta dalam Perda 7/2024 tentang RTRW Jakarta 2024-2044 adalah **Kota Bisnis Berskala Global yang Berkeadilan, Berketahanan, serta Berbasis Transit dan Digital**. Visi tersebut dicapai melalui misi meningkatkan produktivitas kota melalui perwujudan ruang dan pelayanan kota yang adaptif dan inklusif, serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, disusun tujuan dan kebijakan pembangunan kota sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

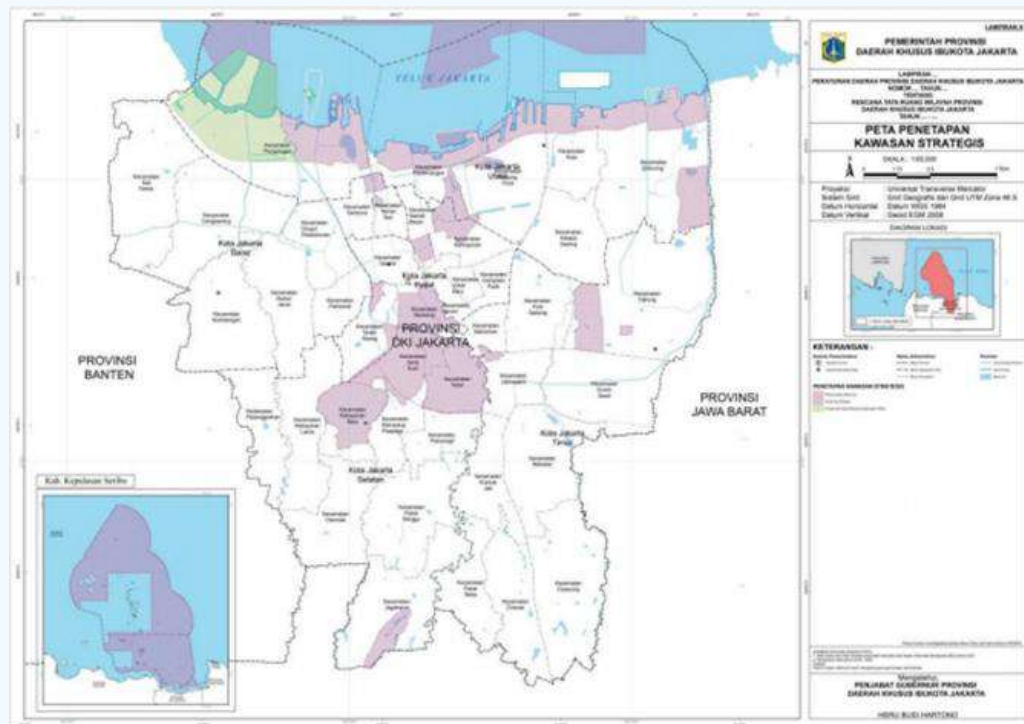
Tabel II. 77 Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kota dalam RTRW Jakarta 2044

Tujuan	Kebijakan
1. Terciptanya pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital	a. Pemusatan kegiatan dan 70% penduduk di sekitar titik transit b. Perwujudan 55% perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik c. Pergeseran aktivitas kota ke arah digital dan efisiensi pola mobilitas
2. Hunian yang layak huni dan berkeadilan serta lingkungan permukiman yang mandiri (<i>self-sufficient neighbourhood</i>)	a. Peningkatan kuantitas dan kualitas hunian vertikal yang layak dan terjangkau perkotaan b. Peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif c. Penyediaan sarana prasarana yang terintegrasi dan utilitas yang memadai di setiap lingkungan permukiman
3. Ruang dan pelayanan kota berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah sekitar Bodetabekpunjur	a. Perwujudan kota hijau yang berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca sejumlah 80% dari basis tahun 2020 b. Perwujudan kota yang adaptif terhadap sumber daya air (<i>water adaptive city</i>) menuju bebas banjir dan berbasis pelestarian sumber daya air serta kerjasama antar daerah Bodetabekpunjur c. Perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan d. Peningkatan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan local e. Peningkatan ketahanan kota atas bencana dan penyebaran wabah penyakit

Tujuan	Kebijakan
4. Penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global	a. Peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global b. Pengembangan sistem logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan sistem logistik regional/ internasional
5. Pengembangan kawasan pesisir, perairan, dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan	a. Peningkatan konektivitas dan dukungan sarana prasarana serta utilitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu yang terintegrasi dengan daratan Jakarta b. Pengembangan dan penyediaan ruang hidup serta akses nelayan terhadap laut dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan c. Pemulihan kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan d. Pengembangan kawasan sebagai pusat ekonomi biru e. Pengembangan pariwisata maritim berkelanjutan berskala global f. Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM pesisir dan Kepulauan Seribu
6. Penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan	a. Pengembangan dan peningkatan mutu kawasan khusus untuk mendukung peran Jakarta sebagai bagian dari jaringan kota-kota internasional b. Pelestarian dan peningkatan fungsi cagar budaya c. Pengembangan pusat budaya perkotaan

Sumber: Perda 7/2024 tentang RTRW Jakarta 2024-2044

Pada RTRW 2024-2044 ditetapkan pula kawasan-kawasan strategis berskala nasional maupun provinsi. Kawasan Strategis Nasional merupakan kawasan strategis yang direncanakan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat seperti pelabuhan nasional, pembangkit listrik, dan pertahanan keamanan. Adapun Kawasan Strategis Provinsi ditentukan berdasarkan pengaruh strategis yang diberikan dalam sudut pandang kepentingan Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Lingkungan. Rencana Kawasan Strategis di Jakarta tersebut tergambar pada peta berikut.



Gambar II.73 Kawasan Strategis Provinsi Jakarta

Sumber: Perda 7/2024 tentang RTRW Jakarta 2024-2044

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Isu strategis dalam RPJPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2025-2045 dirumuskan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan Jakarta, isu pembangunan global, nasional, dan regional (wilayah Aglomerasi Jabodetabekpunjur). Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan isu strategis jangka panjang pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing global;
2. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang setara dengan kota global di negara maju dan stabilitas ekonomi yang kokoh;
4. Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global;
5. Optimalisasi riset dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis;
6. Optimalisasi pergerakan manusia, barang, dan informasi;
7. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang efisien dan efektif;
8. Perwujudan kota layak huni yang aman, nyaman, dan berkelanjutan; dan
9. Penciptaan lingkungan perkotaan yang mandiri, adaptif, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dalam menjawab tantangan dan isu pembangunan Jakarta, serta dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara, Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan, maka visi jangka panjang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2025-2045 adalah Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

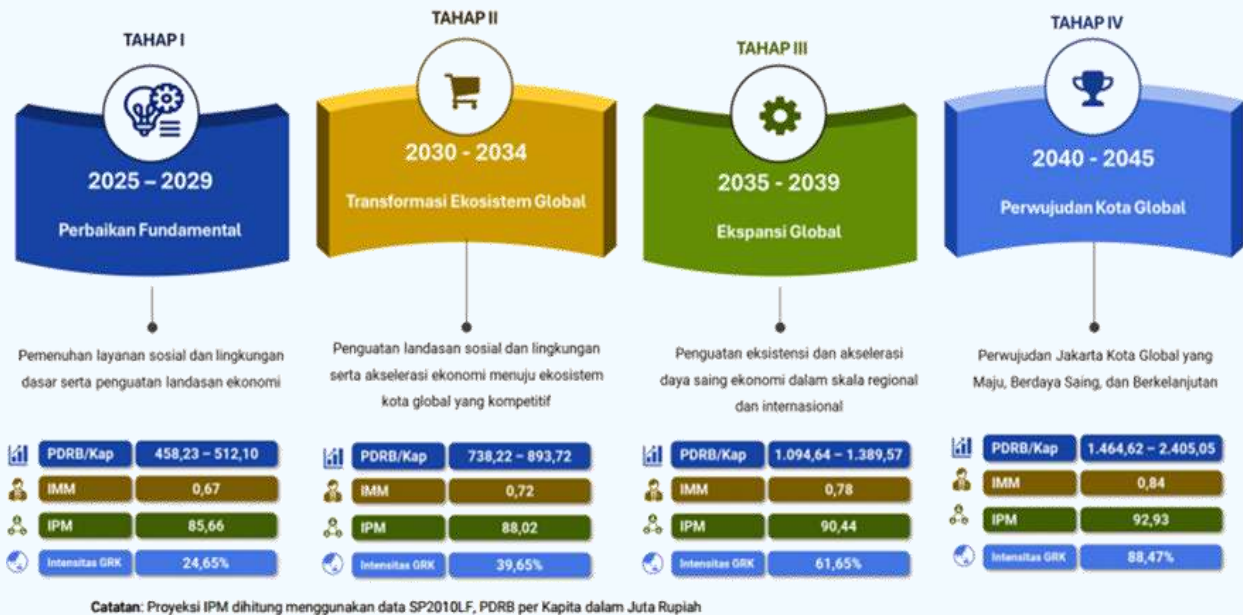
Kemajuan Jakarta yang diharapkan adalah Jakarta dapat menjadi kota yang modern, inovatif, responsif, progresif dan adaptif dengan perkembangan zaman secara global, yang dicirikan dengan pemanfaatan pengetahuan dan inovasi pada pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur modern yang berkualitas dan adaptif, penyediaan layanan dan jasa yang terdepan, regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang transparan, responsif, dan efektif terhadap kebutuhan aktivitas perkotaan, serta penduduk yang sejahtera, setara, dan berkebudayaan maju yang tetap mempertahankan identitas dan nilai luhur bangsa. Selanjutnya, Jakarta yang berdaya saing berarti Jakarta mampu menempatkan diri sebagai kota yang kompetitif dan unggul untuk dapat menarik sumber daya finansial, manusia, barang, serta informasi dan pengetahuan sehingga dapat berdiri sejajar dengan kota-kota global di negara maju lainnya. Jakarta yang berdaya saing dicirikan dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkeahlian tinggi, ekonomi yang berketahanan, produktif dan berdaya saing global, infrastruktur yang andal dan mumpuni, interaksi budaya yang mendunia, serta memiliki peran dan pengaruh diplomasi yang kuat dalam pergaulan kota-kota dunia. Selain itu, Jakarta yang berkelanjutan merupakan komitmen pembangunan yang tetap mengutamakan kesinambungan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jakarta yang berkelanjutan ditandai dengan terciptanya kualitas lingkungan yang baik, nyaman, dan lestari, berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan meminimalisasi produksi emisi gas rumah kaca, serta memiliki ketahanan air, energi, dan pangan, serta memiliki ketangguhan kota yang didukung oleh sistem pembangunan adaptif dan berketahanan, infrastruktur yang kokoh, andal, dan selaras dengan kondisi lingkungan yang lestari. Visi Jakarta tersebut dijabarkan dalam 5 Sasaran Visi yaitu:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang ditandai oleh Indeks Modal Manusia yang diharapkan meningkat dari 0,62 pada baseline 2025 menjadi 0,84 pada tahun 2045.
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yang ditandai oleh penurunan Tingkat Kemiskinan yang dari 3,55-4% pada *baseline* 2025 menjadi 0-0,5% pada tahun 2045, Rasio Gini dari 0,425-0,43 pada *baseline* 2025 menjadi 0,363-0,386 pada tahun 2045, serta Kontribusi PDRB Provinsi dari 16,52% pada *baseline* 2025 menjadi 14,17% pada tahun 2045.
3. Peningkatan pendapatan per kapita, yang ditandai oleh PDRB per kapita yang diharapkan meningkat dari Rp354,13-355,12 juta pada tahun 2025 menjadi Rp1.464,62-2.405,05 juta pada tahun 2045, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) yang diharapkan meningkat dari 26,9 pada tahun 2025 menjadi 243,93 pada tahun 2045, serta Kontribusi PDB Industri Pengolahan dari 11,87% pada tahun 2025 menjadi 13,91-14,38% pada tahun 2045.
4. Perwujudan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing, yang ditandai oleh Rank Kota Global Indeks Ekonomi yang diharapkan meningkat dari 54 pada tahun 2025 menjadi 21 pada tahun 2045.
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju *Net Zero Emission*, yang ditandai oleh penurunan intensitas emisi GRK yang diharapkan dapat meningkat dari 14,65% penurunan pada *baseline* tahun 2025 menjadi 88,47% penurunan pada tahun 2045.

Dalam mewujudkan visi dan sasaran visi tersebut, dirumuskan 8 Misi Jangka Panjang Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera
2. Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
4. Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global
5. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan

Selanjutnya, dalam mencapai visi dan misi jangka panjang tersebut, terdapat 17 Sasaran Pokok beserta 45 Indikator Utama Pembangunan yang ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu 20 tahun ke depan yang diharapkan dapat dicapai melalui berbagai arahan kebijakan transformasi pada tiap sasaran pokok. Terdapat 4 tahap pembangunan untuk mencapai visi jangka panjang tersebut, dimana RPJMD 2025-2029 merupakan tahap pertama dengan fokus perbaikan fundamental dalam pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi.

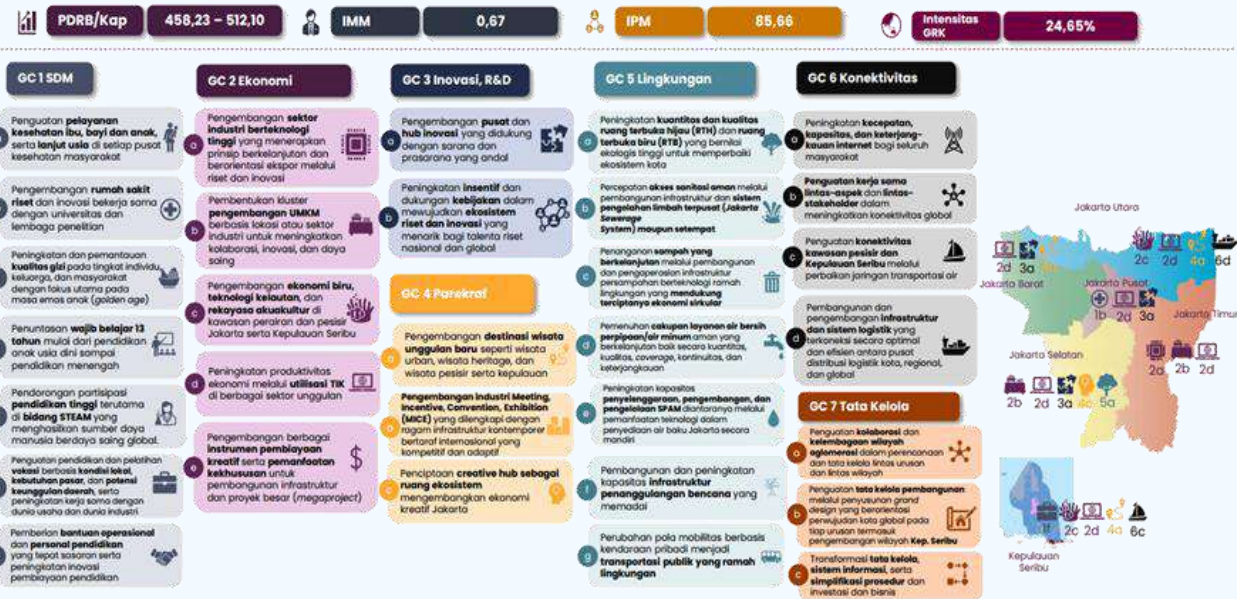


Gambar II. 74 Tahapan Implementasi Rencana Jangka Panjang Jakarta 2025-2045

Sumber: Perda 8/2024 tentang RPJPD Jakarta 2025-2045

Terdapat 7 sektor prioritas dalam RPJPD yang dinilai memiliki daya ungkit tinggi terhadap sektor-sektor lainnya, yaitu Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Inovasi dan Riset, Pariwisata, Lingkungan, Konektivitas, dan Tata Kelola. Pada masing-masing sektor tersebut ditetapkan *game changers* atau rumusan pengembangan prioritas yang diuraikan dalam arah kebijakan prioritas. Arah kebijakan prioritas ini merupakan upaya strategis yang dirancang untuk mendorong pencapaian cita-cita aspek sosial, lingkungan, serta ekonomi yang kondusif dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, yang kemudian menjadi panduan rencana pembangunan yang dapat dirumuskan pada setiap tahapan. Adapun arah kebijakan prioritas pada Tahap 1 atau periode 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut.

TAHAP 1: PERBAIKAN FUNDAMENTAL



Gambar II.75 Game Changers Tahap 1 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jakarta 2025-2045

Sumber: Perda 8/2024 tentang RPJPD Jakarta 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Perumusan isu strategis yang dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029 didasarkan pada penelaahan terhadap kondisi lingkungan hidup, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta penelaahan terhadap dokumen strategis yang relevan dengan pembangunan Jakarta selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan telaah terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah Jakarta sebagaimana yang telah diuraikan dalam Subbab II.3.2 Kondisi Lingkungan Hidup, terdapat 4 isu pembangunan berkelanjutan utama yang perlu segera diatasi, yaitu: 1) keberlanjutan sumber daya air, 2) pencemaran lingkungan, 3) kerentanan terhadap bencana, dan 4) degradasi keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis terhadap capaian 17 TPB/ SDGs yang diukur menggunakan 253 indikator, terdapat 5 TPB Prioritas dengan 10 isu pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel II.78 Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

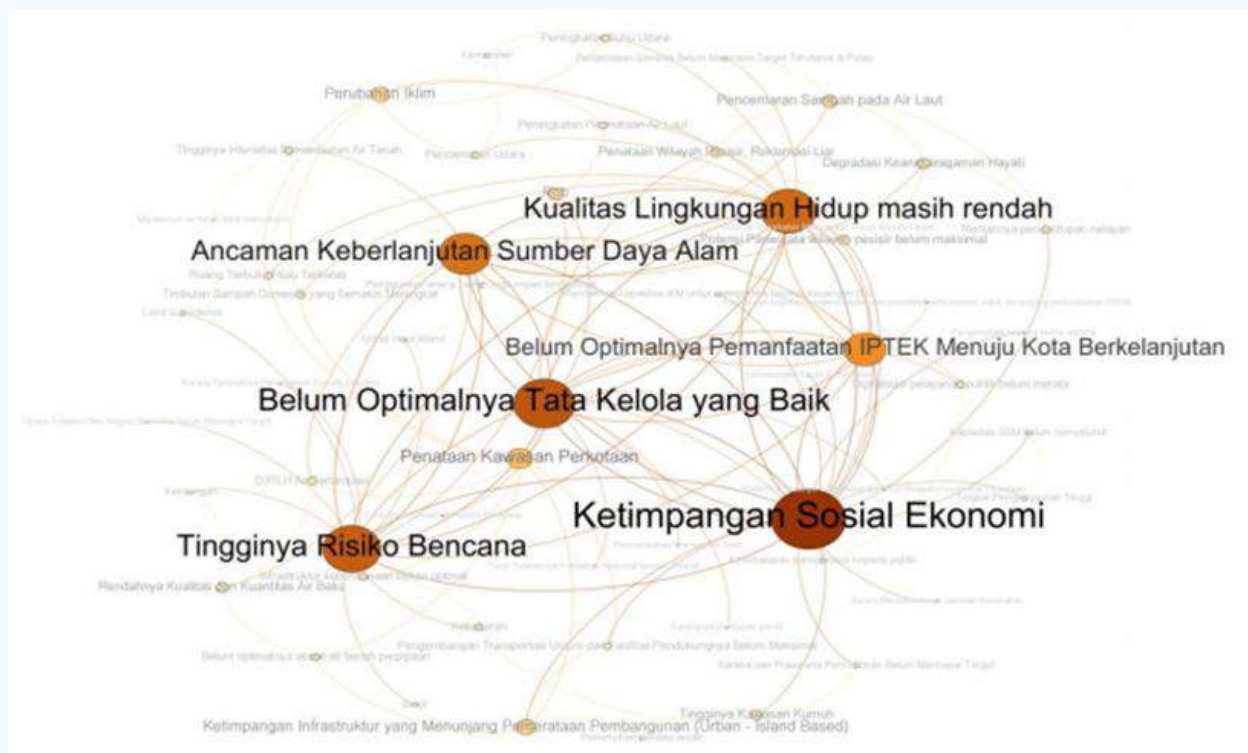
TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan
TPB 1 - Tanpa Kemiskinan	1. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih 2. Kurang optimalnya penanganan korban bencana
TPB 2 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3. Kualitas Kesehatan masyarakat belum sesuai target 4. Belum menyeluruhnya jaminan kesehatan
TPB 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5. Rendahnya kegiatan pengembangan dan penelitian serta inovasi untuk menunjang pertumbuhan PDRB 6. Rendahnya kapasitas IKM untuk mengakses fasilitas keuangan (<i>Financial Institution</i>)
TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan	7. Ketimpangan infrastruktur yang menunjang pemerataan pembangunan (<i>Urban-Island based</i>)
TPB 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	8. Sarana dan prasarana permukiman belum mencapai target TPB Jakarta 9. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana belum mencapai target TPB Jakarta 10. Pengelolaan sampah belum mencapai target terutama di Pulau

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029

Selain itu, dalam KLHS dilakukan pula telaah terhadap 8 dokumen strategis yang relevan, yaitu: Rancangan RPJP Nasional 2025-2045, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang RTR Jabodetabekpunjur, Naskah Akademik RUU Daerah Khusus Jakarta, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2022-2052, Rancangan RTRW Jakarta, Laporan KLHS RTRW Jakarta 2022-2042, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jakarta 2023-2026, serta KLHS RPJPD Jakarta 2025-2045. Hasil sintesis terhadap telaah dokumen-dokumen tersebut menghasilkan 6 isu pembangunan berkelanjutan yaitu: 1) Tingginya resiko bencana, 2) Belum optimalnya tata kelola berbasis wilayah fungsional perkotaan, 3) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan, 4) Kesenjangan sosial-ekonomi, 5) Degradasi kualitas lingkungan, serta 6) Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya, seluruh isu pembangunan berkelanjutan yang didapatkan dari telaah terhadap kondisi lingkungan hidup, capaian TPB/ SDGs, dan dokumen strategis tersebut dibahas dalam rangkaian FGD dan Konsultasi Publik bersama dengan *stakeholders* terkait. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut disepakati 6 isu pembangunan strategis dalam KLHS RPJMD 2025-2029 yaitu: 1) Tingginya resiko bencana, 2) Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam, 3) Kualitas lingkungan hidup masih rendah, 4) Ketimpangan sosial-ekonomi, 5) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan, dan 6) Belum optimalnya tata Kelola yang baik (*good governance*).

Keenam isu tersebut merupakan simpul dari berbagai isu pembangunan berkelanjutan yang saling berkaitan, sehingga dianggap merupakan isu yang paling strategis untuk diselesaikan dalam periode RPJMD ini. Secara lebih jelas, *mind-map* hubungan keterkaitan antar isu pembangunan tersebut digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar II.76 Hasil Analisis Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029

Selanjutnya, terhadap masing-masing isu strategis tersebut dilakukan proyeksi dan analisis *trend* terhadap tiga alternatif skenario yaitu: 1) tanpa upaya tambahan (*business as usual/ BaU*), 2) skenario konservatif/ moderat, dan 3) skenario optimis/ akseleratif. Berdasarkan analisis proyeksi tersebut, disusun rekomendasi arah kebijakan serta program prioritas yang perlu dilaksanakan dalam periode 2025-2029 untuk menjawab masing-masing isu strategis. Hasil analisis alternatif skenario dalam KLHS RPJMD tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Tingginya risiko bencana

Pengukuran isu strategis ini menggunakan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang secara historis sejak tahun 2015 mengalami penurunan risiko hingga pada tahun 2022 mencapai indeks 62,58. Perbaikan capaian IRBI Jakarta ini utamanya didorong oleh peningkatan nilai Kapasitas Daerah yang menggambarkan ketahanan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Disamping itu, sistem peringatan dini bencana sebagai salah satu elemen penting dalam pengurangan risiko bencana juga menunjukkan perbaikan dengan tren yang meningkat. Namun demikian kerugian bencana juga diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 265 miliar rupiah apabila tanpa upaya tambahan (skenario BaU), sehingga diperlukan upaya tambahan dalam mengurangi risiko kerugian ini. Alternatif strategi yang diusulkan dalam mengurangi risiko bencana antara lain:

- ❑ Skenario *moderate*: Penyusunan rencana mitigasi bencana alam dan non alam yang terpadu; Kolaborasi dan koordinasi multi pihak, multi sektor, dan lintas wilayah; Peningkatan sarana prasarana serta logistik penanggulangan kebencanaan; Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan; Peningkatan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- ❑ Skenario akselerasi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini bencana yang terpadu, serta Pengembangan teknologi dan inovasi untuk sistem pemulihan bencana yang terpadu.

2. Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Pengukuran isu strategis ini dilakukan terhadap kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) air dan keanekaragaman hayati. D3TLH air dihitung menggunakan analisis proyeksi jumlah penduduk dibandingkan dengan ketersediaan air. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui kebutuhan air pada tahun 2029 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, yaitu sekitar 1.098.525.847,55 m³/tahun atau meningkat sebesar 61.874.755,20 m³/tahun apabila dibandingkan dengan kebutuhan air pada tahun 2022. Sementara itu, proyeksi ketersediaan air Jakarta berdasarkan wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian dan Ciliwung-Cisadane diperkirakan hanya mencapai 440.941.300,46 m³/tahun pada tahun 2029, sehingga hasil proyeksi D3TLH air pada hampir seluruh wilayah Jakarta telah terlampaui. Selain itu terdapat pula isu degradasi keanekaragaman hayati yang memiliki kecenderungan yang semakin buruk, yang ditunjukkan dengan kecenderungan luasan ekosistem mangrove yang semakin berkurang, peningkatan kerusakan ekosistem padang lamun, serta kondisi terumbu karang yang didominasi status cukup baik hingga kurang baik. Untuk itu, alternatif strategi yang diusulkan dalam mengurangi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam tersebut antara lain:

- ❑ Skenario *moderate*: Pemerataan infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi; Peningkatan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi; Kerja sama antar wilayah dalam menjaga keberlanjutan SDA dan kualitas LH; Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan; Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air; Perlindungan kawasan ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati.
- ❑ Skenario akselerasi: Percepatan pencapaian 100% air perpipaan dan moratorium pengambilan air tanah di seluruh wilayah; Rehabilitasi dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan ketentuan 30% dari luas wilayah; Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan yang komprehensif dalam menjalankan kerja sama di wilayah fungsional.

3. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah

Pengukuran isu strategis ini menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta persentase sampah terolah. Proyeksi tren IKLH hingga tahun 2029 menunjukkan peningkatan, yang didukung dengan indikator kompositnya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang proyeksi trennya juga menunjukkan peningkatan walaupun terdapat fluktuasi dalam capaian lampayanya. Pada indikator IKU, perlu difokuskan perbaikan pada emisi sektor industri energi, manufaktur industri dan transportasi sebagai kontributor terbesar beban emisi pencemar udara berdasarkan kajian Inventarisasi Emisi Polusi Udara Jakarta 2020. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim, ditargetkan pengurangan GRK pada skenario *moderate* sebesar 30% hingga pada skenario akselerasi sebesar 50% dari BaU pada tahun 2029. Selain itu,

terkait pengelolaan sampah, terdapat indikator persentase sampah terolah di tempat pengolahan yang pada RPJPN ditargetkan mencapai 90% pada tahun 2045 sehingga apabila dilakukan proyeksi secara linier maka pada tahun 2029 perlu dicapai 28% sampah terolah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, alternatif strategi yang diusulkan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jakarta antara lain:

- ❑ Skenario *moderate*: Penurunan emisi GRK melalui pengendalian sumber emisi utama (transportasi, industri, dan pembangkit listrik); Diversifikasi sumber energi (tenaga surya) pada setiap sektor terutama sumber emisi utama; Pengembangan transportasi publik terintegrasi yang ramah lingkungan; Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau melalui kesesuaian rancangan RTH termasuk penanaman vegetasi yang efektif menyerap emisi; Peningkatan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi dengan peran serta multi pihak;
- ❑ Skenario akselerasi: Pengembangan inovasi dan teknologi ramah lingkungan untuk menekan emisi; dan Penerapan kebijakan infrastruktur hijau dalam pengembangan wilayah

4. Ketimpangan sosial-ekonomi

Pengukuran isu strategis ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Proyeksi indikator IPM dan PDRB per kapita menunjukkan tren yang positif hingga tahun 2029, sedangkan indikator rasio gini, tingkat kemiskinan dan TPT yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19 lalu memerlukan upaya akseleratif untuk dapat mencapai target nasional 2045. Berdasarkan hasil analisis tersebut, alternatif strategi yang diusulkan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Jakarta antara lain:

- ❑ Skenario *moderate*: Peningkatan PDRB perkapita; Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan; Penurunan tingkat pengangguran terbuka; Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan; Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; Peningkatan IPM Kepulauan Seribu; Penurunan rasio gini; Penyediaan rumah layak huni; Penurunan jumlah RW kumuh;
- ❑ Skenario akselerasi: Pengembangan ekonomi makro berskala global berbasis bisnis dan jasa; Peningkatan fungsi kota Jakarta sebagai kota transit internasional; Peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi; Pengembangan Jakarta sebagai *smart city*.

5. Belum optimalnya tata kelola yang baik (*good governance*)

Pengukuran isu strategis ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, nilai SAKIP, ketersediaan kebijakan dan dokumen rencana, serta jumlah kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional. Nilai IKM menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2029, dan dapat diakselerasikan dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang disertai dengan peningkatan kualitas ASN dan sarana prasarana pendukung. Nilai SAKIP yang pada tahun 2022 telah mencapai nilai A diharapkan dapat segera meningkat menuju nilai AA melalui pengukuran kinerja hingga level individu dan peningkatan sistem kelembagaan dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*) pada sistem kelembagaan. Selain itu, kebijakan dan dokumen rencana terkait lingkungan hidup seperti pengendalian air tanah, keanekaragaman hayati, pencemaran udara, dan persampahan yang telah dimiliki Jakarta perlu ditindaklanjuti dengan pengimplementasian yang baik, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum atas sanksinya. Selanjutnya, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan daerah fungsional di sekitar Jakarta seperti dengan Kota Bekasi terkait pengelolaan lahan TPA, wilayah Bodetabekjur terkait ketahanan pangan, transportasi dan penyediaan air bersih, serta dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi terkait pengendalian polusi udara. Alternatif strategi yang diusulkan dalam pengoptimalan tata kelola yang baik (*good governance*) antara lain:

- ❑ Skenario *moderate*: Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju *good governance*; Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional; Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global; Peningkatan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam tata kelola termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KRP; Peningkatan sistem penegakan hukum;
- ❑ Skenario akselerasi: Kesiapan menuju terciptanya business enabling environment (Reformasi ekonomi, *policy dialogue, knowledge sharing, civil society*); Penguatan mekanisme kerja sama multipihak dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*).

6. Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan

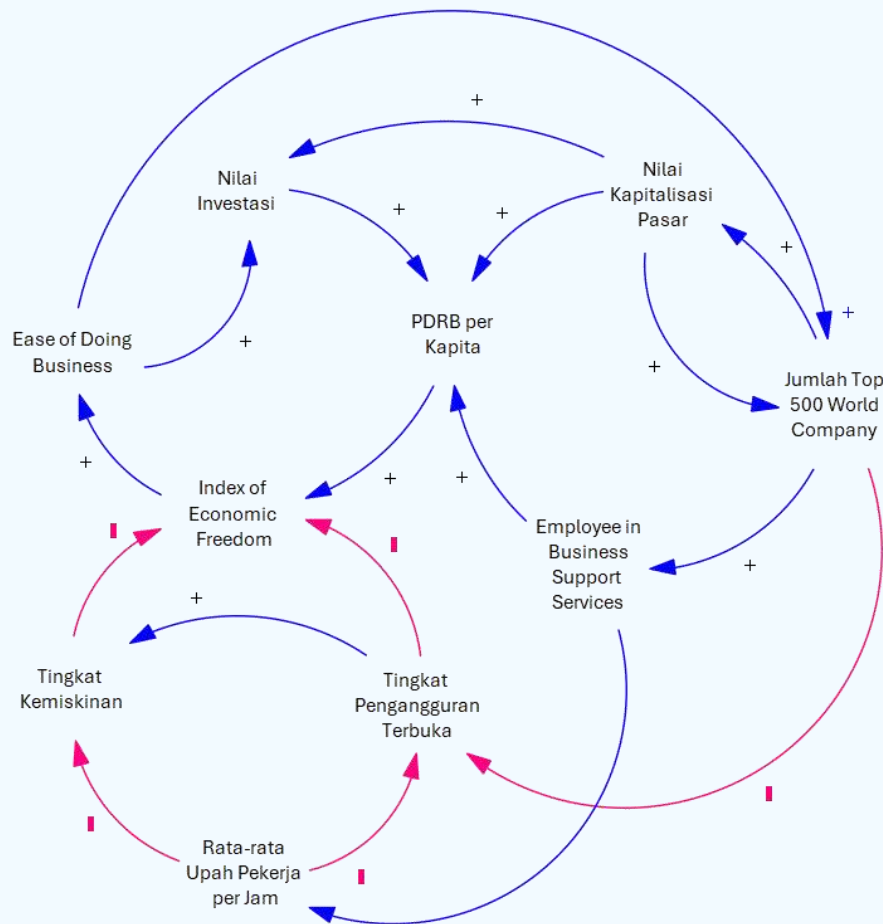
Pengukuran isu strategis ini dilakukan dengan menilai pemenuhan infrastruktur perkotaan (transportasi publik), proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada aspek penyediaan infrastruktur transportasi publik digunakan indikator *public transportation modal share*, yang pada *baseline* tahun 2022 mencapai angka 18,45% dan diproyeksikan meningkat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi umum beserta fasilitas pendukungnya. Pada indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yang juga merupakan indikator pada TPB 11, tren proyeksi tahun 2029 menunjukkan peningkatan menuju target RPJPN 2045. Selain itu indeks SPBE juga menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2023 telah mencapai angka 4,21 atau predikat "memuaskan". Alternatif strategi yang diusulkan dalam pengoptimalan pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan antara lain:

- ❑ Skenario *moderate*: Peningkatan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan; Peningkatan kolaborasi untuk akselerasi inovasi terkait keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan
- ❑ Skenario akselerasi: Pengembangan Jakarta sebagai *smart city*; Peningkatan akses pembiayaan inovatif untuk menunjang pengembangan IPTEK dan penerapan teknologi yang *climate friendly* (*Green building*, pengembangan energi terbarukan)

II.3.3. Isu Strategis 2025-2029

Isu strategis disusun melalui identifikasi *gap* kinerja pembangunan serta isu dan kebijakan skala global, nasional, dan regional yang relevan dengan pembangunan Jakarta ke depan. Proses tersebut menghasilkan *long list* isu pembangunan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara silo; perlu intervensi yang terfokus pada isu yang paling strategis untuk menghasilkan dampak sistemik yang turut menyelesaikan permasalahan terkait lainnya.

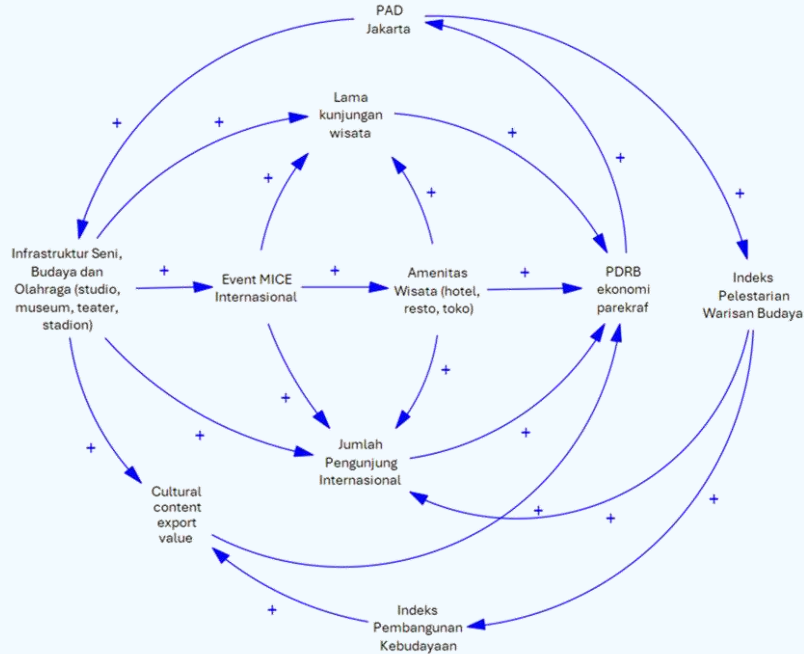
Berdasarkan analisis dan pemodelan menggunakan metode *system dynamics* telah dihasilkan diagram keterkaitan dan pola hubungan antar unsur pembangunan (*causal loop diagram/CLD*), sehingga kecenderungan perilaku dari waktu ke waktu (*behaviour over time*) dapat diprediksi. CLD isu strategis Jakarta 2025-2029 dibangun dengan memodelkan lima dimensi kota global dengan menggunakan parameter pada masing-masing dimensi tersebut sebagai variabel. Panah biru dengan simbol positif (+) menggambarkan hubungan antar variabel yang saling menguatkan/ berbanding lurus (*reinforcing*), sedangkan panah merah dengan simbol negatif (-) menggambarkan hubungan antar variabel yang saling menyeimbangkan/ berbanding terbalik (*balancing*).



Gambar II.77 CLD Dimensi Economy Business Activity

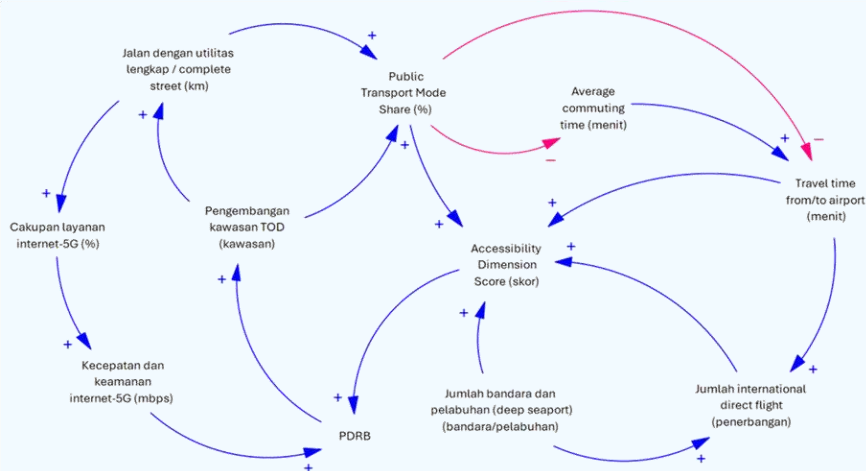
CLD dimensi *Economy Business Activity* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi dan kemudahan bisnis, tetapi juga pada kesejahteraan tenaga kerja dan kebijakan sosial. *Loop reinforcing* mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing global, sedangkan *loop balancing* menyoroti pentingnya pengelolaan isu sosial seperti pengangguran dan kemiskinan agar pertumbuhan tetap inklusif dan berkelanjutan.

CLD dimensi *Liveability Environment* menampilkan keseimbangan antara dua kutub; *loop reinforcing* yang mendorong peningkatan kualitas hidup melalui layanan dasar, perumahan, dan kesehatan dan *loop balancing* yang memperingatkan tentang dampak negatif dari pertumbuhan penduduk dan tekanan lingkungan, seperti menurunnya RTH, peningkatan emisi, dan meningkatnya risiko bencana.



Gambar II.80 CLD Dimensi Cultural Interaction and Experience

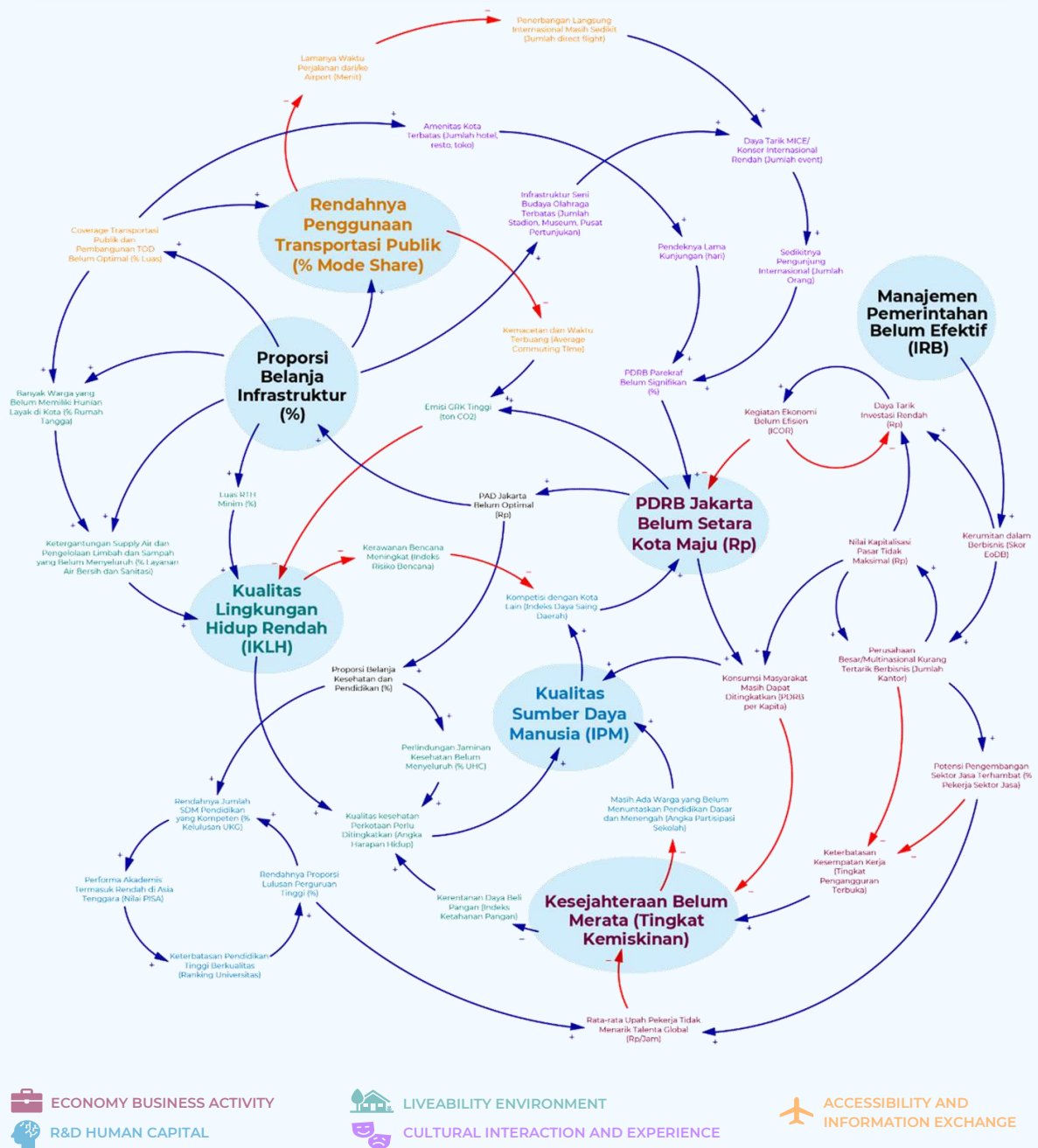
CLD dimensi *Cultural Interaction and Experience* menunjukkan siklus penguatan atau *loop reinforcing* yang saling terhubung antara infrastruktur budaya, kunjungan wisata, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian budaya. Pengembangan infrastruktur budaya dan event internasional dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai kota budaya global. Pembangunan budaya bukan hanya urusan identitas, tetapi berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar II.81 CLD Dimensi Accessibility and Information Exchange

CLD pada dimensi *Accessibility and Information Exchange* menunjukkan *reinforcing loop* dan *balancing loop* yang memengaruhi kualitas aksesibilitas dan konektivitas suatu kota. Transportasi publik, digitalisasi, dan pengembangan kawasan secara terpadu akan meningkatkan skor aksesibilitas kota. Aksesibilitas yang tinggi mendorong konektivitas ekonomi dan PDRB, serta memperkuat koneksi internasional melalui bandara dan pelabuhan. Sinergi antara transportasi fisik dan infrastruktur digital sangat penting untuk menciptakan kota yang efisien, kompetitif, dan layak huni.

Hasil iterasi dari kelima model CLD berdasarkan dimensi kota global tersebut kemudian dihubungkan satu sama lain untuk menghasilkan pola hubungan dan keterkaitan antar unsur pembangunan kota yang lebih holistik yang diwakilkan oleh indikator-indikator yang relevan. Diagram ini menggambarkan keterkaitan sistemik dari berbagai permasalahan utama di Jakarta dan hubungan sebab-akibat serta *trade-off* antar permasalahan. Metode *system thinking* dibutuhkan untuk menavigasi kompleksitas permasalahan perkotaan dan menentukan isu strategis.



Gambar II.82 Causal Loop Diagram Indikator Strategis Pembangunan Jakarta

Berdasarkan CLD tersebut teridentifikasi 7 (tujuh) indikator strategis yang menjadi *leverage* pembangunan dimana upaya yang tepat dapat menginisiasi dan menggerakkan perubahan yang besar. Ketujuh *leverage* tersebut menjadi dasar dari isu strategis periode 2025-2029 yaitu:

Tabel II.79 Isu Strategis 2025-2029

LEVERAGE	ISU STRATEGIS
Kualitas SDM (IPM)	A. MODAL MANUSIA TINGGI DAN MASYARAKAT MADANI
Kesejahteraan Belum Merata (Tingkat Kemiskinan)	B. PEMERATAAN DAN KEBERMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN
PDRB Jakarta Belum Setara Kota Maju (Rp)	C. PEREKONOMIAN PRODUKTIF, KOMPETITIF, DAN ATRAKTIF DI PASAR GLOBAL
Manajemen Pemerintahan belum Efektif (IRB)	D. PEMERINTAHAN DINAMIS DENGAN PERFORMA LAYANAN PRIMA
Kualitas Lingkungan Hidup Rendah (IKLH)	E. EKOSISTEM YANG SEIMBANG DAN BERKETAHANAN IKLIM
Proporsi Belanja Infrastruktur (%)	F. INFRASTRUKTUR KOTA YANG LAYAK DAN BERKELANJUTAN
Rendahnya Penggunaan Transportasi Publik (% Mode Share)	G. PERGERAKAN MANUSIA, BARANG, DAN INFORMASI YANG OPTIMAL

Penjelasan terkait ketujuh isu strategis di atas dijabarkan sebagai berikut:

A. Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani

Sumber daya manusia merupakan modal pembangunan utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang maju dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia Jakarta yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM) diharapkan tidak hanya unggul secara nasional, namun juga dapat setara dengan talenta global lainnya. Dengan meningkatnya IPM Jakarta, daya saing daerah juga akan meningkat sehingga memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian serta pembangunan kota secara keseluruhan. Pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Meskipun pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi dan sosial, masih banyak masyarakat, terutama yang berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah, kesulitan untuk mengakses pendidikan karena kendala biaya. Di sisi lain, meskipun pemerintah sudah menyediakan berbagai bentuk bantuan pembiayaan pendidikan, masih terdapat ketidaktepatan dalam pendistribusiannya, yang mengakibatkan bantuan tidak sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. Penyelesaian masalah ini tidak hanya akan meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat miskin, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berusaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan untuk menjangkau setiap warga negara dalam berbagai usia dan jenjang untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah juga telah berupaya untuk memfasilitasi bagi warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi untuk tetap dapat menimba ilmu sesuai dengan jenjang yang ditempuh. Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah dengan menyediakan secara khusus berbagai bantuan di antaranya berupa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, tetap menjadi fokus utama. Meskipun telah ada upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, masih terdapat berbagai tantangan, terutama terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah ketidaktersediaan sarana prasarana yang memadai, terutama di sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota. Selain itu, ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik, khususnya guru, belum optimal, dan akses terhadap sarana pendidikan informal juga belum merata. Untuk memastikan proses pembelajaran yang relevan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu prioritas utama. Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk mencapai target peningkatan persentase guru profesional, berbagai upaya akan dilakukan, seperti memperkuat peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), mengembangkan aplikasi pembelajaran bagi pendidik, dan memetakan kebutuhan guru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas pendidik tidak hanya mencakup aspek pelatihan, namun juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Hal ini juga melibatkan tenaga pendidik di sekolah swasta dan madrasah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa kesejahteraan guru swasta ini akan terus ditingkatkan, salah satunya melalui program hibah yang efektivitasnya akan terus dipantau dan dievaluasi.

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi dilaksanakan melalui revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Revitalisasi ini mencakup pengembangan beberapa SMK menjadi *centers of excellence* yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran siswa. Selain itu, perlu ada kerja sama yang lebih erat dengan DU/DI dalam pengembangan program studi di pendidikan tinggi vokasi. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) perlu diterapkan untuk mengembangkan keterampilan teknis (*technical skills*) dan keterampilan non-teknis (*soft skills*) siswa sesuai dengan kebutuhan industri. Langkah lainnya adalah mendorong pengembangan produk atau jasa melalui riset terapan dan inovasi yang melibatkan kerja sama antara industri dan masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM di bidang vokasi juga mencakup peningkatan keterampilan teknis, keterampilan pedagogik, dan *soft skills* bagi guru, instruktur, dosen, dan pelatih agar sesuai dengan standar DU/DI. Selain itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan di dunia pendidikan vokasi juga menjadi prioritas, guna mengembangkan institusi pendidikan vokasi secara berkelanjutan.

Dengan menciptakan ekosistem inovasi yang baik, Jakarta diharapkan dapat menarik talenta-talenta berkualitas dan investasi di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi, yang dapat memberikan dampak positif berupa *knowledge spillover* bagi Jakarta dan kolaborasi dengan inovator lokal. Dalam era yang dinamis dan cepat, ditambah dengan globalisasi dan revolusi teknologi informasi, inovasi menjadi suatu keharusan. Salah satu faktor utama dalam mendorong kemajuan riset dan inovasi adalah kualitas subjek yang terlibat. Hal ini mencakup lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di pemerintahan, universitas, pusat riset di industri, serta peneliti independen. Saat ini, jumlah peneliti di Jakarta hanya mencapai 3.375 per 1 juta penduduk, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota global lainnya, seperti Seoul (15.483), Beijing (15.705), dan Singapura (7.225). Dari sisi kualitas sumber daya riset yang berasal dari universitas, Jakarta hanya memiliki satu universitas yang masuk dalam peringkat 1000 dunia, yaitu Universitas Indonesia. Sebagai perbandingan, kota-kota seperti London memiliki lebih dari 15 universitas, Bangkok memiliki 4, dan Singapura memiliki 2 universitas yang masing-masing menduduki peringkat 19 dan 32 universitas terbaik dunia.

Riset memegang peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. Dengan riset yang berkualitas, inovasi dapat tercipta secara lebih efektif, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan bisnis, menciptakan nilai tambah pada produk, dan meningkatkan daya saing wilayah, khususnya dalam menghadapi persaingan global. Ekosistem riset yang ideal terdiri dari berbagai faktor yang saling terkait, seperti kualitas sumber daya riset, struktur kelembagaan, skema pendanaan, akuntabilitas, serta kerangka regulasi yang mendukung. Namun, Jakarta masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas ekosistem riset di setiap aspek tersebut, sehingga penguatan dan investasi di sektor ini sangat dibutuhkan untuk pengoptimalan lebih lanjut.

Konsep kesehatan perkotaan semakin penting seiring dengan pesatnya peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan. Menurut data dari PBB tahun 2018, sekitar 55% dari total populasi dunia tinggal di kawasan perkotaan. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050, dengan tambahan sekitar 2,5 miliar orang (PBB, 2019). Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini membawa dampak besar pada tingginya permintaan terhadap berbagai layanan kota. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya di kota-kota, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas layanan perkotaan. Masalah yang sering muncul antara lain adalah keterbatasan dan ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta memperkuat upaya pencegahan dan promosi kesehatan, terutama melalui pendekatan berbasis keluarga. Selain itu, penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penanggulangan masalah gizi, terutama stunting pada balita, juga menjadi fokus utama. Program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu dioptimalkan, dengan penekanan pada pencegahan dan promotif, guna mengurangi beban penyakit menular dan tidak menular. Untuk itu, peran fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas kelurahan yang tersebar di 267 wilayah Jakarta perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, perhatian khusus juga diberikan kepada masalah kesehatan lansia, dengan memperhatikan kondisi fisik, sosial, dan psikologis mereka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga fokus pada intervensi gizi spesifik untuk balita, terutama dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang telah terbukti secara ilmiah menjadi periode krusial dalam menentukan kualitas kesehatan jangka panjang.

Untuk memastikan keberhasilan program-program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengembangkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, dengan fokus pada empat determinan utama: lingkungan sosial, infrastruktur fisik, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan. Beberapa langkah strategis yang diambil termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental, memperluas pemanfaatan fasilitas kesehatan secara merata, serta melakukan transformasi rumah sakit daerah. Selain itu, pengelolaan kesehatan yang berbasis pada sistem monitoring yang terintegrasi akan memastikan kebijakan pembangunan berorientasi pada peningkatan kesehatan penduduk, serta mempercepat pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan status gizi masyarakat, khususnya penurunan prevalensi stunting pada balita, merupakan salah satu arah utama dalam pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, serta menjadi salah satu indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Masalah stunting pada balita mencerminkan adanya masalah gizi kronis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ibu atau calon ibu, masa kehamilan, periode bayi hingga balita, serta penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti halnya masalah gizi lainnya, stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial-ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi status kesehatan. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan angka stunting harus mencakup dua jenis intervensi: pertama, intervensi gizi spesifik yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi gangguan gizi secara langsung, dan kedua, intervensi gizi sensitif yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi secara tidak langsung. Intervensi gizi spesifik biasanya dilakukan di sektor kesehatan, namun kontribusinya hanya sekitar 30%. Sebagian besar (70%) kontribusi berasal dari intervensi gizi sensitif yang melibatkan sektor-sektor lain, seperti ketahanan pangan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan sektor sosial lainnya.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar di seluruh wilayah Jakarta juga harus menjadi fokus utama pemerintah. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memastikan fasilitas kesehatan dan pendidikan tersebar merata di seluruh wilayah, baik di pusat kota maupun daerah terpencil. Penguatan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia, termasuk fasilitas transportasi umum yang dapat diakses oleh semua warga, menjadi bagian penting dalam mewujudkan inklusivitas. Infrastruktur yang lebih aksesibel tidak hanya akan menguntungkan penyandang disabilitas, tetapi juga membantu lansia dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keterbatasan fisik.

Jakarta sebagai kota dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya menghadapi tantangan dalam membangun hubungan antarwarga yang solid dan saling menghargai. Ketimpangan sosial, perbedaan budaya, dan kesenjangan ekonomi sering kali memperburuk bahkan menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat dan ancaman nonmiliter, yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan sosial, seperti menurunnya nilai-nilai kebangsaan, tindakan diskriminasi, intoleransi, perundungan, konflik tawuran dan sebagainya yang dipicu oleh lemahnya rasa memiliki terhadap lingkungan, rendahnya interaksi lintas kelompok, serta kurangnya ruang ekspresi positif bagi generasi muda. Oleh karena itu, penguatan kohesi sosial di Jakarta perlu dilakukan melalui berbagai program yang mendorong integrasi sosial antarwarga, terutama di tengah-tengah keberagaman yang ada. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kesadaran dan toleransi antar kelompok sosial, budaya, agama, dan etnis di Jakarta. Program-program edukasi dan pelatihan yang mengedepankan pentingnya saling menghargai dan kerja sama antarwarga sangat penting untuk mengurangi konflik sosial. Selain itu, penting juga untuk memperkuat serta memfasilitasi dialog antarwarga dan antar komunitas agar terciptanya ruang interaksi bagi seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian konflik yang konstruktif. Berkenaan dengan ancaman nonmiliter, pemerintah daerah dapat mendukung sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memperhatikan peran serta masyarakat dalam pembangunan kota, dengan melibatkan berbagai komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan komunitas lokal, termasuk organisasi masyarakat sipil, kelompok pemuda, serta komunitas berbasis agama atau budaya, dapat memperkuat rasa

kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan Jakarta. Sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki peran penting dalam mencerminkan identitas nasional sekaligus membangun daya saing di tingkat global. Keberagaman etnis dan budaya yang menjadi ciri khas Jakarta merupakan aset berharga yang perlu dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan dalam membangun identitas kota yang inklusif, berdaya saing, dan memiliki daya tarik yang kuat. Meskipun Jakarta telah menginisiasi gerakan *city branding* seperti +Jakarta, masih diperlukan penguatan narasi dan strategi yang dapat meningkatkan kebanggaan serta keterlibatan masyarakat dalam membangun citra kota.

Jakarta tidak bisa mengabaikan pengembangan budaya Betawi sebagai bagian penting dari identitas kota. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembangunan Pusat Budaya Betawi di Setu Babakan. Namun, kawasan ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan Museum Kebudayaan Betawi yang menampilkan sejarah perkembangan budaya Betawi serta Museum Benyamin Sueb untuk mengenang kiprah salah satu legenda budaya Betawi. Selain itu, budaya sastra juga menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya melalui revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin. Revitalisasi museum secara keseluruhan juga menjadi agenda penting, mengingat Jakarta memiliki ratusan museum yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pihak swasta. Sayangnya, jumlah kunjungan wisatawan ke museum masih tergolong rendah karena tampilan atraksi yang kurang menarik dan cenderung monoton. Oleh karena itu, diperlukan inovasi agar museum kembali menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Inovasi tersebut harus mampu meningkatkan peran publik dalam pengelolaan museum di DKI Jakarta.

Di sisi lain, penyelenggaraan berbagai acara budaya, optimalisasi lokasi-lokasi bersejarah seperti Gedung Sumpah Pemuda, Proklamasi, Titik Nol Jakarta di Menara Syahbandar, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Onrust, Kelenteng Petak Sembilan, dan situs bersejarah lainnya, serta pengembangan Taman Ismail Marzuki sebagai bagian dari upaya ekstensifikasi cagar budaya perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemerintah juga perlu mendorong konsep *place-making* untuk menciptakan lebih banyak ruang publik budaya seperti TIM di berbagai wilayah Jakarta, misalnya dengan merevitalisasi bangunan atau sarana prasarana yang terbengkalai agar dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya jumlah acara budaya yang masuk dalam kalender *event* budaya Jakarta, serta penguatan program untuk memperkaya nilai sejarah kota, diharapkan Jakarta dapat menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung lokal maupun internasional sekaligus menjadi pusat edukasi sejarah bagi masyarakat. Melalui upaya pembenahan ini, Jakarta dapat berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang tidak hanya menawarkan hiburan edukatif dan atraktif, tetapi secara tidak langsung dapat memperbaiki kualitas hidup warganya.

B. Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan

Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu isu kewilayahan Jakarta yang salah satunya tergambar melalui distribusi tingkat kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan akan meningkatkan taraf hidup manusia sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan daya saing kota. Pemerataan pembangunan, khususnya terhadap wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, perlu menjadi perhatian utama. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pembangunan yang efektif dan dikoordinasikan pada tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi. Dalam hal ini, penguatan peran Walikota dan Bupati sebagai aktor penting agar tercipta harmonisasi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Adapun optimalisasi atau penguatan peran Walikota dan Bupati yang perlu didorong adalah meningkatkan kewenangan koordinasi terhadap PD di tingkat Kota dan Kabupaten. Namun, peran Walikota dan Bupati Administrasi tidak hanya sebatas melakukan koordinasi, tetapi juga berperan langsung dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat Kota dan Kabupaten. Hal ini dilakukan melalui koordinasi implementasi di setiap wilayah (fungsi *lead actor*), serta melaksanakan kolaborasi penuntasan target kegiatan strategis daerah prioritas (fungsi *active supporting actor*) yang mencakup pengendalian banjir, pengelolaan sampah, penataan kampung, pemulihan ekonomi pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata urban, dan aktivasi *city branding* di masing-masing wilayah.

Pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja merupakan isu strategis yang krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup seluruh penduduk Jakarta. Di bidang pendidikan, tantangan yang dihadapi mencakup disparitas mutu antar satuan pendidikan, akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan menengah yang belum merata, serta keterbatasan sarana-prasarana dan tenaga pendidik berkualitas di beberapa wilayah. Sementara itu, akses terhadap layanan kesehatan juga belum sepenuhnya merata, ditandai dengan ketimpangan distribusi fasilitas layanan primer maupun lanjutan, serta rendahnya tingkat literasi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, meskipun Jakarta merupakan pusat ekonomi nasional, tidak semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang

layak, terutama mereka yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja inklusif melalui penguatan pelatihan vokasional, kewirausahaan, dan transformasi ekonomi digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah terus berupaya memberikan layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang diperoleh dari pemutakhiran data secara berkala, guna mewujudkan sistem data yang lengkap dan akurat. Selain itu, penguatan proses *monitoring* dan evaluasi pelayanan sosial juga menjadi fokus penting, disertai peningkatan kolaborasi dengan pihak non-pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial maupun dukungan pengembangan ekonomi masyarakat. Di samping itu, penyempurnaan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial juga terus dibutuhkan. Sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan di Jakarta, Pemerintah perlu menyediakan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program-program tersebut mencakup pemberian bantuan dalam bentuk tunai maupun non-tunai, serta bantuan pengembangan ekonomi yang ditujukan untuk menjaga stabilitas tingkat konsumsi penduduk miskin. Pendanaan untuk mendukung program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana non-APBD melalui berbagai bentuk kolaborasi dan skema pembiayaan lainnya.

Masyarakat tangguh (*resilient community*) merujuk pada komunitas yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai krisis, serta memiliki kemampuan untuk bangkit, tumbuh, dan berkembang pasca krisis. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang tangguh melalui program pemberdayaan serta perlindungan sosial yang inklusif dan berlandaskan keadilan. Kesejahteraan warga Jakarta sangat bergantung pada kesiapan sosial dan ekonomi dalam menghadapi berbagai situasi. Perlindungan sosial diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menyediakan jaring pengaman bagi kelompok rentan dari risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial. Tujuan utama perlindungan sosial adalah untuk mengurangi ketidakpastian serta memberikan rasa aman terhadap potensi risiko yang muncul akibat ancaman tertentu. Selain itu, perlindungan ini juga menjamin setiap individu untuk dapat hidup layak serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, perlindungan sosial dirancang dengan prinsip inklusif dan adil, sehingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan masyarakat rentan lainnya memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses layanan dan manfaat sosial. Melalui perlindungan sosial yang menyeluruh ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, menjadi lebih berdaya, serta berkontribusi pada peningkatan taraf hidup, produktivitas ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah Jakarta memiliki peran utama dalam memastikan akses terhadap kebutuhan dasar yang terjangkau bagi warganya. Rancangan kebijakan yang menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, perlu diperhatikan agar tepat sasaran. Dalam aspek pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemerintah berperan dalam menyediakan pangan dengan harga terjangkau, akses air bersih, serta hunian layak bagi masyarakat, baik yang miskin dan berpenghasilan rendah hingga masyarakat golongan menengah. Selain itu, dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial, pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan sosial melalui layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta jaminan sosial bagi kelompok rentan. Untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Jaminan keamanan publik mencakup keamanan lingkungan dari faktor alam dan kriminalitas dengan infrastruktur kota yang baik. Upaya pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat termasuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, program perlindungan tenaga kerja, serta kehadiran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota.

C. Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraktif di Pasar Global

Jakarta yang mengemban peran sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, dituntut untuk tetap mempertahankan ritme dan produktivitas ekonominya, yang ditunjukkan oleh indikator PDRB Jakarta. Dengan meningkatkan PDRB Jakarta, kualitas hidup masyarakat Jakarta dan pendapatan asli daerah akan meningkat sehingga belanja infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan di Jakarta dapat turut meningkat. Namun demikian, peningkatan emisi akibat tingginya aktivitas ekonomi merupakan eksternalitas yang perlu diantisipasi, sehingga upaya peningkatan produktivitas ekonomi perlu dilakukan secara selektif dan berkelanjutan.

Jakarta sebagai *economic node* Asia Tenggara mendapatkan dukungan signifikan dari keberadaan Sekretariat ASEAN yang berlokasi di kota ini. Sebagai pusat administrasi dan diplomasi regional, Sekretariat ASEAN memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan ekonomi dan perdagangan antarnegara di kawasan. Hal ini memberikan Jakarta posisi yang strategis sebagai simpul utama untuk interaksi ekonomi, baik secara regional maupun global. Keberadaan Sekretariat ASEAN memperkuat citra Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan diplomasi internasional. Kota ini menjadi tuan rumah bagi berbagai pertemuan strategis yang melibatkan pemangku kepentingan dari negara-negara ASEAN, serta mitra dagang global mereka. Dalam konteks ini, Jakarta memiliki peluang besar untuk menarik investasi, baik dari dalam kawasan maupun dari negara-negara di luar ASEAN. Potensi ini memberikan peluang besar bagi Jakarta untuk menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global.

Dalam upaya menciptakan ekonomi berkelanjutan, Jakarta perlu mengambil langkah awal dengan mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular. Pendekatan ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, daur ulang, serta pengurangan limbah, yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Penerapan ekonomi sirkular di Jakarta dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis, seperti peningkatan program daur ulang yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan material sekunder, sehingga dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi limbah yang dibuang, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru. Melalui penerapan ekonomi sirkular, Jakarta dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Inisiatif ini akan meningkatkan produktivitas ekonomi dengan meminimalkan biaya produksi dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Dengan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan, DKI Jakarta dapat menciptakan iklim bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Jakarta sebagai kota pesisir, memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Dengan mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan dan pariwisata Bahari yang ramah lingkungan, akan mendukung dalam peningkatan produksi ikan dan produk kelautan. Di sisi lain, *green economy* menjadi landasan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan. Jakarta telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030 dan mencapai *net zero emission* pada tahun 2050. Investasi hijau di sektor transportasi umum, energi terbarukan, dan bangunan ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Di Jakarta, penerapan ekonomi hijau dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Selain itu, promosi bangunan hijau dan transportasi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi jejak karbon kota dan meningkatkan kualitas udara, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung daya saing Jakarta di pasar global.

Ekonomi digital memberikan pengaruh besar terhadap kota baik dari aspek ekonomi dan sosial. Momentum ini dapat dimanfaatkan Jakarta, melalui peningkatan kualitas SDM, seperti jumlah digital *user* dan penetrasi layanan internet yang mumpuni, serta infrastruktur yang mendukung untuk menciptakan iklim digital *user* yang dapat memperluas lapangan pekerjaan seperti sektor *edutech*, *healthtech*, dan nilai tambah lainnya. Ekonomi digital berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Jakarta memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital melalui peningkatan infrastruktur digital, pengembangan ekosistem *startup*, dan promosi literasi digital. Berdasarkan laporan terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5%, dengan Pulau Jawa, termasuk Jakarta, mencatat angka tertinggi sebesar 83,64%. Data ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menggarisbawahi potensi besar Jakarta dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital. Dengan akses internet yang semakin luas dan jaringan komunikasi yang semakin handal, Jakarta memiliki peluang untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi digital seperti *e-commerce*, *fintech*, dan teknologi informasi. Pengembangan ekosistem *startup* yang inovatif juga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan teknologi baru dan menciptakan lapangan kerja di sektor digital, yang pada gilirannya membuat Jakarta menjadi lebih atraktif bagi investor dan pelaku bisnis global.

Dari perspektif masyarakat, ekonomi digital memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan produsen, termasuk mitra kerja platform digital, melalui akses terhadap peluang penghasilan baru. Selain itu, ekonomi digital menciptakan surplus konsumen dengan menawarkan layanan dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan batas maksimal yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Secara sosial, keberadaan ekonomi digital juga menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk penyandang disabilitas, dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih inklusif serta pelatihan keterampilan yang relevan di era teknologi. Lebih dari itu, ekonomi digital di Jakarta dapat memainkan peran

strategis dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan mendorong sinergi ini, Jakarta dapat memanfaatkan momentum transformasi digital untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan inovatif.

Gig economy memainkan peran strategis dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan Jakarta, khususnya di sektor informal yang masih mendominasi lapangan kerja. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan, sistem ini dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan akses pekerjaan yang lebih terstruktur bagi pekerja sektor informal melalui platform digital. Selain itu, *gig economy* memberikan peluang bagi perusahaan di Jakarta untuk merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia tanpa batasan geografis, membuka jalan bagi kolaborasi global yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas tenaga kerja. Dalam penerapan *gig economy*, tentunya membutuhkan adanya dukungan kebijakan yang mencakup penguatan infrastruktur digital untuk memastikan akses internet yang andal, perlindungan sosial bagi pekerja lepas untuk menjamin keamanan kerja, serta program pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja berbasis teknologi. Dalam rangka menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berkembang, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi upaya yang perlu dilakukan. Program pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis, seperti teknologi informasi, analisis data, dan otomatisasi industri, akan membekali tenaga kerja di Jakarta dengan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pasar global.

Menghadapi perubahan ini, pengembangan kemampuan tenaga kerja harus berfokus pada keterampilan digital, keterampilan berbasis teknologi, dan adaptasi terhadap industri kreatif. Menguasai keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan analisis data akan memungkinkan tenaga kerja untuk berkontribusi secara signifikan dalam transformasi digital di berbagai sektor industri. Kemampuan tenaga kerja untuk merespons perubahan permintaan pasar juga merupakan kunci dalam membangun ekonomi yang kompetitif. Fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting di era *gig economy*, di mana pekerja sering kali harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan proyek dan kebutuhan pasar. Tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menavigasi perubahan pasar dan memanfaatkan peluang baru yang muncul. Lebih lanjut, peningkatan kemampuan tenaga kerja harus mendorong inovasi dan kreativitas. Inovasi adalah elemen penting dalam menciptakan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing Jakarta di pasar global. Tenaga kerja yang terampil dan inovatif dapat membantu perusahaan mengembangkan solusi baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Jakarta memiliki peluang strategis untuk memimpin transformasi ekonomi global dengan memanfaatkan keunggulan kompetitifnya. Keberhasilan di pasar internasional bergantung pada kemampuan kota ini untuk menciptakan nilai ekspor yang unik atau *unique-value export*, yang secara strategis mengintegrasikan inovasi dengan kekayaan budaya untuk menghasilkan konten dengan identitas yang orisinal. Jakarta, sebagai pusat budaya dan ekonomi Indonesia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kekayaan budaya lokal, seperti seni tradisional, kerajinan, kuliner, dan produk kreatif lainnya, sebagai daya tarik ekspor dengan nilai tambah yang unik. Dengan membangun citra merek yang berbasis budaya Indonesia, produk ekspor dari Jakarta dapat membedakan diri di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat. Investasi dalam pengembangan desain, teknologi, dan pemasaran yang berorientasi pada narasi budaya dapat meningkatkan daya saing produk lokal.

Industri *Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) mengalami perkembangan pesat di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Pertumbuhan sektor MICE ini telah memberi dampak positif, memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di ibu kota. Keunggulan geografis Jakarta yang strategis serta aksesibilitas yang baik menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat bisnis utama di Asia Tenggara, yang semakin menarik perhatian bagi pengembangan MICE. Aksesibilitas yang mudah melalui jalur udara, darat, dan laut menjadi faktor kompetitif penting dalam menarik penyelenggaraan acara MICE. Jakarta menempati posisi strategis sebagai pusat bisnis dan keuangan terbesar di Indonesia. Kota ini menjadi tujuan utama pertemuan bisnis dan konferensi tingkat tinggi, serta menarik berbagai perusahaan multinasional, kantor pusat perusahaan nasional, dan organisasi-organisasi besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) pada tahun 2023, Indonesia menyelenggarakan 178 pameran, dengan rincian 120 pameran internasional dan 58 pameran nasional. Dari total tersebut, sebanyak 129 pameran dilaksanakan di Jakarta. Untuk mendukung pengembangan MICE, pemerintah perlu aktif mempromosikan berbagai acara untuk memperluas jangkauan pasar MICE di Jakarta.

Karakter dan identitas suatu kota dapat dilihat dari wajah kota secara fisik, yang mencerminkan budaya dan identitasnya. Ini termasuk impresi visual yang dirasakan oleh pengunjung saat pertama kali datang ke kota tersebut. Selain itu, perkembangan usaha dan fasilitas pendukung juga menjadi elemen penting yang menunjukkan wajah kota. Data ekonomi,

kegiatan promosi seperti *event*, pameran, pertunjukan, diskusi, atau forum menjadi gambaran kota dalam hal keberpihakan terhadap industri tertentu. Jakarta sebagai ibu kota memiliki keberagaman yang tinggi, namun masih kurang memiliki kekuatan identitas yang kuat, terutama dalam hal citra positif yang merepresentasikan kota kreatif. Keberhasilan Jakarta dalam mendapatkan gelar sebagai bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO, khususnya dalam bidang literasi, harus menjadi dorongan untuk menjadikan Jakarta sebagai pelopor bagi Ekonomi Kreatif Indonesia.

D. Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima

Kemajuan kota, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai regulator dan katalisator unsur-unsur pembangunan kota. Pemerintah Jakarta perlu meninggalkan praktik *business as usual* dan melakukan terobosan melalui tata kelola profesional serta pemenuhan layanan yang berstandar internasional. Penerapan *good governance* melalui penyederhanaan birokrasi akan meningkatkan *ease of doing business* sehingga dapat menarik investasi ke dalam Jakarta yang selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya saing kota secara keseluruhan.

Tata kelola yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan kinerja, meningkatkan mutu pelayanan, dan memperkuat kompetensi serta akuntabilitas pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu metode dalam mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Hal ini dapat terwujud apabila Pemerintah mempunyai komitmen penuh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus pada aspek kelembagaan, aparatur, serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Namun, dalam implementasinya, Reformasi Birokrasi menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain: 1) pelaksanaan tugas dan Perangkat Daerah belum optimal karena Sumber Daya Manusia kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 2) sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tupoksi pekerjaan; dan 3) penataan kelembagaan masih berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan daerah.

Aspek penting lainnya adalah optimalisasi manajemen talenta. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kompetensi, kinerja, dan profesionalisme tinggi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas ASN dapat ditingkatkan melalui manajemen talenta, mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan kompetensi/keahlian. Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, upaya tersebut telah dilakukan dengan melaksanakan pengembangan dan pembaharuan *database* pada aplikasi *talent pool*. Selain itu, telah dilakukan perampingan birokrasi dengan memangkas Perangkat Daerah yang semula berjumlah 53 menjadi hanya 42. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat menciptakan rantai koordinasi yang lebih efektif dan efisien.

Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tidak dapat berjalan sendiri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 tentang RTR Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur adalah Kawasan Strategis Nasional dari aspek kepentingan ekonomi yang meliputi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Adapun Jakarta memiliki kedudukan sebagai kawasan perkotaan inti. Perkembangan pesat Jakarta telah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian, dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta pusat kegiatan bisnis dan perdagangan.

Daerah penopang Jakarta, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur turut mempunyai peran strategis dalam mendukung kesuksesan pembangunan Jakarta. Sayangnya, kolaborasi dan koordinasi kelembagaan antar wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur masih belum optimal. Mandeknya kerja sama antar wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur tersebut disebabkan oleh masih parsialnya peran masing-masing daerah di wilayah Jabodetabekpunjur baik dari sisi perencanaan hingga penganggaran. Setiap tahun, Pemerintah Jakarta mengalokasikan anggaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada kota/daerah di wilayah Bodetabekpunjur, diantaranya untuk mengurangi banjir, meningkatkan laju pergerakan orang dan barang, peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Pemerintah memiliki tugas dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan warga, agar setiap individu merasa aman. Keamanan sendiri merujuk pada kondisi yang tertata dan sesuai dengan norma yang berlaku, sedangkan ketertiban berkaitan erat dengan hukum dan penegakannya. Selain itu, ketenteraman mengacu pada ketenangan batin masyarakat akibat terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan norma yang ada. Dalam periode 2017–2021, penegakan peraturan daerah menunjukkan tren yang stabil pada tingkat tinggi, meskipun pada tahun 2018 sempat turun menjadi 77%. Pada tahun 2021, dari total 681.915 pelanggaran K3, sebanyak 640.427 atau 94% berhasil diselesaikan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keindahan telah berjalan dengan baik. Terkait penegakan peraturan daerah, tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat berada pada Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk mengalami peningkatan selama 2017–2021. Pada 2017, terdapat 3 personel Satpol PP untuk setiap 10.000 penduduk, dan jumlahnya meningkat menjadi 5 personel per 10.000 penduduk pada 2021. Sebaliknya, jumlah anggota linmas di DKI Jakarta mengalami penurunan, dari 15 linmas per 10.000 penduduk pada 2017 menjadi tidak ada linmas pada 2021.

Dalam hal penanggulangan kebakaran, kebakaran umumnya terjadi di wilayah dengan aktivitas padat, terutama di kawasan permukiman kumuh, permukiman liar, serta kawasan industri yang tidak tertata dengan baik. Penanganan kebakaran meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan, yang menuntut kecepatan serta ketepatan dalam bertindak. Di DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menyiapkan personel pemadam dan hidran yang tersebar di seluruh wilayah untuk mendukung penanggulangan kebakaran. Untuk memastikan peralatan dan sarana penanggulangan kebakaran tetap berkualitas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan uji mutu yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Pengujian ini mencakup berbagai peralatan, seperti alat pemadam api, *foam liquid*, pintu tahan api, *rolling door*, *fire stopping*, sistem pengendali asap dan api, pompa *portable*, mobil pemadam, selang kebakaran, helm, baju tahan panas, sepatu keselamatan, kepala pemercik, brankas, komponen hidran, hingga mulut pipa.

E. Ekosistem yang Seimbang dan Berketahanan Iklim

Lingkungan hidup yang menjadi wadah bagi segala aktivitas di Jakarta tengah menghadapi krisis lingkungan yang juga terjadi secara global. Di samping itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan Jakarta saat ini telah terlampaui sehingga diperlukan upaya ekstra untuk mengembalikan fungsi ekologis yang diperlukan masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Peningkatan kualitas lingkungan hidup akan turut meningkatkan taraf hidup masyarakat dan daya saing kota Jakarta. Untuk itu diperlukan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat dengan keberlanjutan ekosistem dan ketahanan terhadap musibah lingkungan.

Musibah lingkungan yang umumnya dihadapi Jakarta antara lain adalah perubahan iklim, banjir, kebakaran, dan kekeringan. Banjir dan kekeringan sebagai musibah utama di Jakarta sangat berkaitan dengan isu strategis sebelumnya, yaitu pelayanan dasar yang dititikberatkan pada akses air bersih, sanitasi, dan drainase. Normalisasi saluran air dan penguatan sistem drainase dapat berkontribusi dalam penanganan banjir dan kekeringan. Sebagai Kota Global, resiliensi terhadap musibah lingkungan merupakan aspek penting untuk menjaga sistem perkotaan agar tetap berjalan dan dapat pulih secara cepat. Ketahanan dan resiliensi kota terhadap musibah lingkungan perlu diintegrasikan dengan sistem digital dan teknologi mutakhir guna memberikan sistem terpadu dalam pencegahan, peringatan, penanganan, dan penanggulangan bencana.

Penguatan infrastruktur pengamanan musibah lingkungan di Jakarta menjadi krusial dalam menghadapi ancaman seperti banjir rob dan penurunan muka tanah. Salah satu solusi strategis yang sedang dikembangkan adalah pembangunan tanggul lepas pantai sebagai bagian dari proyek *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) yang sekaligus mengembangkan area pesisir Jakarta. Tanggul ini bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir Jakarta dari kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim serta mengurangi risiko banjir rob dan penurunan tanah. Selain berfungsi sebagai penghalang air laut, tanggul ini juga diintegrasikan dengan sistem sanitasi dan drainase untuk mengelola aliran air secara lebih efektif. Implementasi tanggul lepas pantai harus didukung dengan perencanaan yang matang secara keberlanjutan, termasuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mitigasi dampak sosial bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Jakarta.

Ditambah lagi, efek dari perubahan iklim terus meningkat, salah satunya dengan ancaman peningkatan suhu bumi. Indonesia sebagai negara tropis memiliki karakteristik suhu ruang dan udara yang relatif menengah hingga tinggi, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta. Perubahan iklim dapat berdampak luas terhadap sistem perkotaan, termasuk penggunaan energi, ekosistem hayati dan hewani, dan cuaca ekstrem. Mitigasi efek perubahan iklim di Jakarta dilakukan cara dengan mengurangi sumber penyebab perubahan iklim seperti CO₂ dan mengurangi konsumsi energi. Adaptasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan memulai pembangunan berkelanjutan, penetapan regulasi, dan pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada iklim dan lingkungan untuk menyesuaikan dengan konteks dan kondisi lingkungan dan iklim.

Selain itu, pemerintah Jakarta dapat menerapkan kebijakan yang mengatur operasional perkotaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk lebih memerhatikan emisi karbon yang dihasilkan. Reduksi emisi karbon perusahaan-perusahaan dapat difokuskan pada *scope 1* untuk mengurangi emisi karbon dari segi operasional secara langsung dan *scope 2* untuk meningkatkan penggunaan energi yang berasal dari sumber energi baru terbarukan. *Scope 3* dapat ditekankan kepada masyarakat luas untuk lebih sadar dengan perilaku dan aktivitas keberlanjutan.

Mitigasi terhadap perubahan iklim juga dapat didukung dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis berperan sebagai area yang menjadi area resapan air, habitat flora dan fauna, serta mitigasi efek urban *heat island*. Peningkatan rasio, kualitas, dan persebaran RTH perlu diperhatikan guna mengurangi polusi dan menurunkan suhu permukaan kota sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas udara dan lingkungan hidup. Pemerintah perlu menetapkan upaya yang lebih optimal untuk merealisasikan peningkatan kualitas RTH yang memadai di setiap wilayah serta melakukan revitalisasi terhadap lahan-lahan yang kurang produktif agar dapat dijadikan ruang hijau yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan.

Kota bertanggung jawab besar dalam konsumsi sumber daya (energi, pangan, bahan bakar, air, dll) dan emisi karbon. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan di Jakarta, diperlukan pendekatan perencanaan kota yang mampu mengakomodir kebutuhan saat ini serta meminimalisir dampak negatif lingkungan di masa yang akan datang. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna menciptakan Jakarta yang lebih sehat dan berkelanjutan. Aspek-aspek perbaikan kualitas lingkungan hidup mencakup kualitas udara melalui pengurangan sumber polusi udara, kualitas air melalui tata kelola air dan sanitasi, dan kualitas lahan melalui pengelolaan tutupan lahan yang tepat guna. Perbaikan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan analisis DPSIR (*drivers, pressures, state, impact, and response*) yang kolaboratif dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara lingkungan dengan kehidupan masyarakat secara luas.

Langkah strategis lainnya yang perlu dilakukan adalah daur ulang air secara holistik dan pengurangan penggunaan air tanah. Eksploitasi air tanah berlebihan serta pencemaran sumber daya air dapat menyebabkan krisis air di Jakarta. Pendekatan holistik dalam daur ulang air mencakup pengolahan air limbah domestik dan industri melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemanfaatan kembali air hujan, peningkatan kawasan serapan air, serta penerapan teknologi filtrasi untuk mendukung ketersediaan air bersih. Sistem ini mendukung penggunaan air yang telah didaur ulang agar dapat digunakan kembali untuk keperluan non-konsumsi seperti irigasi, industri, dan sanitasi. Upaya ini perlu diiringi dengan pengurangan penggunaan air tanah melalui perluasan akses jaringan air perpipaan, penyediaan air baku, serta penerapan regulasi yang lebih ketat terkait eksploitasi air tanah. Penggunaan teknologi seperti sumur resapan dan infiltrasi air hujan juga dapat membantu menjaga keseimbangan air tanah.

F. Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan

Sebagai fondasi awal dalam mencapai visi jangka panjang Jakarta, perbaikan fundamental perlu dilakukan segera dalam mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Analisis isu strategi Jakarta mengidentifikasi beberapa upaya infrastruktur kota yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut, antara lain adalah pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar; lingkungan hunian yang kompak dan mandiri; ketersediaan dan keragaman amenities perkotaan; dan ruang publik yang ramah kelompok rentan. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas mencakup akses air bersih, sanitasi yang layak, pengolahan sampah, dan permukiman layak huni. Kondisi kesehatan lingkungan diantaranya dapat ditinjau dari aksesibilitas penduduk terhadap air bersih, sanitasi layak, dan limbah padat berupa sampah.

Tata kelola air bersih dan air minum merupakan salah satu tantangan besar dalam penyediaan pelayanan dasar di Jakarta. Mayoritas rumah tapak di Jakarta masih mengandalkan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti turunnya permukaan tanah (*land subsidence*) dan intrusi air laut. Hal ini dapat berkontribusi dalam meningkatnya risiko banjir di wilayah pesisir Jakarta berdampak negatif terhadap bangunan dan infrastruktur.

Sanitasi dan drainase juga merupakan pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, kualitas hidup masyarakat, dan kualitas lingkungan. Persebaran cakupan fasilitas sanitasi layak juga perlu ditingkatkan untuk menjangkau rumah tangga masyarakat yang masih belum memiliki sanitasi yang memadai. Selain itu, infrastruktur yang mendukung sanitasi layak perlu dikembangkan secara menyeluruh, terutama terkait sistem pengolahan air limbah. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) saat ini tengah dikembangkan di wilayah Jakarta dalam proyek pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS), sebagai pengolahan limbah terpusat yang memenuhi standar baku mutu. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan air bersih untuk kebutuhan masyarakat dari pengolahan air limbah.

Selain limbah cair, limbah padat atau sampah termasuk dalam pelayanan dasar yang perlu perhatian khusus. Tata kelola sampah perlu ditingkatkan untuk menghindari meningkatnya timbunan sampah di Jakarta. Di sisi lain, ketersediaan lahan untuk pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola sampah di Jakarta karena belum dapat

sepenuhnya mengakomodir volume sampah yang dihasilkan. Tata kelola sampah dengan mengidentifikasi beban timbunan sampah, material dominan, dan analisis geospasial berbasis data dapat membantu pemerintah mengembangkan strategi dan intervensi yang tepat dalam mengelola sampah di masing-masing wilayah, termasuk cara pengangkutan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah. Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah perlu memperhatikan dengan seksama terkait teknologi yang digunakan dan lokasi pembangunannya agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Selain itu, pengelolaan sampah secara berkelanjutan dapat menjadi potensi untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular dengan cara *recycle* dan *upcycle*. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal daur ulang sampah dan meningkatkan perkembangan UMKM yang bergerak di bidang tata kelola sampah dan limbah. Kegiatan ekonomi sirkular dapat ditekankan baik dalam usaha skala kecil dan menengah maupun skala industri besar.

Penyediaan hunian layak merupakan kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan di Jakarta. Melihat tren pertumbuhan penduduk Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan perumahan dan hunian juga diekspektasikan akan meningkat. Dalam perwujudan Jakarta sebagai kota global, kesempatan akan terbuka luas dan meningkatkan jumlah penduduk Jakarta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengakibatkan permintaan terhadap rumah dan hunian layak semakin tinggi. Oleh karena itu, faktor hunian sangat krusial untuk menghindari krisis tempat tinggal dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan di Jakarta, perlu ditingkatkan upaya untuk menggunakan bangunan hunian vertikal dan membatasi pengembangan perumahan horizontal. Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah Jakarta adalah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 31 tahun 2022 dan No. 20 tahun 2024 yang mengakomodir pembangunan rumah flat sebagai hunian tapak untuk lebih dari satu kepala keluarga. Peraturan ini memungkinkan pemilik lahan untuk mendirikan bangunan dengan tingkat densitas yang lebih tinggi dari rumah tapak keluarga tunggal dengan maksimal 4 lantai.

Jakarta masih menghadapi masalah akses terhadap hunian yang layak dan dengan harga terjangkau. Realitanya, bangunan tempat tinggal milik pribadi masih sangat sulit untuk dicapai oleh rumah tangga di Jakarta. Capaian tahun 2024 untuk proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah sebesar 39% (Sumber: KLHS RPJMD Jakarta 2025-2029). Selain masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja kelas menengah juga termasuk ke dalam proporsi ini. Membangun hunian vertikal terjangkau berupa rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai menengah menjadi salah satu upaya yang perlu diprioritaskan. Data menunjukkan bahwa jumlah Rumah Susun Sederhana di seluruh wilayah Jakarta pada tahun 2024 telah mencapai 36.346 unit (Sumber: Jakarta dalam Angka 2025).

Pemerintah Jakarta telah menjalankan program Hunian Terjangkau Milik untuk menyediakan rumah dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Program ini bertujuan agar masyarakat Jakarta dapat memiliki tempat tinggal yang layak tanpa terbebani biaya tinggi dan mengurangi kawasan permukiman kumuh. Penyediaan hunian layak juga perlu memperhatikan masyarakat dengan kelompok ekonomi menengah ke bawah, seperti penataan kawasan kumuh dan penyediaan rumah susun. Percepatan Reforma Agraria dapat ditingkatkan sebagai program menyeluruh yang terdiri dari Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, hingga Penataan Akses dengan berbagai bentuk kegiatan untuk mengatasi kesenjangan pemilikan dan penggunaan lahan, menurunkan ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan berikutnya dalam rangka peningkatan lingkungan hunian adalah lingkungan hunian yang mandiri atau *self-sufficient neighborhood*. Lingkungan hunian mandiri merupakan langkah strategis dalam mengupayakan kota yang berkelanjutan berbasis komunitas. Lingkungan hunian mandiri berfokus pada interaksi dan inisiatif warga kota yang terbentuk dalam komunitas-komunitas tertentu untuk menjalankan sistem perkotaan. Komunitas di dalam lingkungan hunian dapat berperan dalam pemenuhan kebutuhannya sendiri seperti produksi energi terbarukan, pengolahan limbah, mitigasi bencana, dan penerapan pertanian urban yang mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sistem di luar lingkungan hunian itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, diperlukan keselarasan dan kerja sama dari berbagai elemen-elemen lingkungan hunian untuk senantiasa berkolaborasi dengan kompak.

Pemberdayaan RT dan RW juga dapat ditingkatkan untuk mendukung lingkungan hunian yang mandiri dengan menjalankan program-program inisiatif yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. RT dan RW sebagai satuan terkecil memiliki peran yang krusial sebagai komunitas karena dapat bersinggungan langsung dengan warga, sehingga pelayanan dalam ranah RT dan RW diharapkan dapat menyerap, menyalurkan dan mengatasi aspirasi warga.

Selain aspek hunian, ketersediaan amenitas perkotaan atau fasilitas publik adalah salah satu elemen kota yang menunjang ketercapaian kota layak huni dan sangat dibutuhkan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari. Kelengkapan dan keragaman

amenitas perkotaan harus dipastikan tersebar secara merata di seluruh wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan warga kota mulai dari fasilitas transportasi, kesehatan, pendidikan, kerohanian, jasmani, rekreasi, dan budaya.

Ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting bagi kualitas hidup warga kota. Penerapan taman vertikal, taman atap, dan pertanian kota dapat menjadi elemen pendukung untuk program penghijauan di Jakarta. Fasilitas olahraga perlu ditingkatkan tidak hanya terkait persebaran jumlah dan rasionya terhadap jumlah penduduk tetapi juga tentang jenis fasilitas yang bervariasi, seperti lapangan serba guna, lapangan tenis, lapangan sepak bola, kolam renang, dll. Perpustakaan dan ruang belajar diperlukan oleh masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif sehingga mendukung sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, perpustakaan umum di Jakarta perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem. Revitalisasi pedestrian untuk yang aman dan nyaman serta keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang terintegrasi dapat mendorong penggunaan transportasi publik. Akses ke fasilitas kesenian dan kebudayaan seperti galeri seni, gedung pertunjukan, dan pusat kebudayaan penting dalam memberikan ruang ekspresi bagi masyarakat yang dapat berkontribusi untuk pembangunan budaya dan identitas kota. Wahana rekreasi berbasis edukasi dapat menjadi sarana belajar yang ramah keluarga dan anak-anak yang terjangkau sehingga mudah diakses dan dekat dengan tempat tinggal.

Dalam mendukung perwujudan Jakarta sebagai kota yang inklusif, ruang publik dan komersial yang ada di Jakarta perlu mengakomodir kelompok-kelompok rentan seperti difabel, lansia, perempuan, dan anak-anak. Kelompok rentan termasuk orang-orang dengan kebutuhan khusus yang tidak hanya terlihat secara fisik tetapi juga non-fisik yang tidak tampak dengan kasat mata, seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan, keterbatasan perilaku, keterbatasan emosional, dan keterbatasan sensorik. Ruang publik dan komersial harus memiliki akses yang mudah, aman, dan nyaman sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat karena sejatinya ruang publik merupakan kebutuhan dan hak dari setiap individu warga kota.

Penerapan konsep kota layak huni yang berorientasi pada keberlanjutan ini dapat menciptakan sistem perkotaan yang berdampak positif pada ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan layanan dasar perkotaan menyangkut hajat hidup masyarakat dan juga kualitas lingkungan hidup. Membangun lingkungan hunian yang kompak dan mandiri akan memberikan dampak positif bagi kota untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Keberadaan amenitas yang lengkap dan beragam akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur kota yang inklusif dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses bagi setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain, mengikuti berbagai kegiatan, dan membuka peluang yang lebih luas. Pemenuhan dan pengembangan infrastruktur kota tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing kota.

G. Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi yang Optimal

Dalam mencapai cita-cita sebagai Kota Global, diperlukan konektivitas pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal. Untuk itu diperlukan *shifting* pola perjalanan penduduk menuju penggunaan transportasi umum masal yang andal dan efektif, yang keberhasilannya ditandai oleh persentase *Public Transport Mode Share* yang meningkat. Peningkatan tersebut akan berkontribusi dalam penurunan kemacetan dan emisi gas rumah kaca yang selanjutnya dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu peningkatan konektivitas perkotaan juga tidak terbatas pada pergerakan manusia, namun juga pada aliran informasi dan sistem logistik yang akan turut meningkatkan produktivitas warga serta menarik para pendatang untuk beraktivitas dan berwisata di Jakarta.

Jakarta menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mencapai konektivitas optimal bagi pergerakan manusia, barang, dan informasi. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, DKI Jakarta sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta dengan total populasi sekitar 31 juta jiwa dengan 1,5 juta diantaranya merupakan komuter harian. Peningkatan volume pergerakan ini mencerminkan semakin kompleksnya kebutuhan transportasi di kota megapolitan Jakarta, sekaligus menegaskan urgensi untuk merancang dan mengimplementasikan solusi transportasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan mampu mendukung mobilitas tinggi. Lebih lanjut, faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, tingginya laju urbanisasi, dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi terus memberikan tekanan pada sistem transportasi. Tantangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala tersebut demi mencapai konektivitas yang optimal. Ketergantungan pada kendaraan pribadi merupakan salah satu

faktor kunci yang mempengaruhi tingkat efisiensi pergerakan manusia dan barang. Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa persentase penggunaan transportasi publik (*public transport mode share*) di Jakarta mencapai 12,28%. Jika dibandingkan dengan persentase penggunaan kendaraan pribadi yang menyentuh angka 77,81%, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jakarta masih cenderung memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Tingkat penggunaan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi berkontribusi pada peningkatan beban infrastruktur transportasi Jakarta, yang berdampak pada aliran lalu lintas dan efisiensi distribusi logistik.

Salah satu pendekatan strategis yang dapat diterapkan dalam mencapai konektivitas yang optimal adalah melalui pemusatan kegiatan penduduk di sekitar titik transit dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit, atau *Transit Oriented Development* (TOD). Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD) sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit menjadi arahan penting. Penerapan ini mencakup beberapa aspek kunci (*key element*) seperti peningkatan konektivitas, pengembangan kawasan menuju intensitas yang lebih padat, pengutamaan penggunaan lahan campuran, serta pembangunan kawasan kompak yang meminimalkan jarak perjalanan. Langkah-langkah ini dirancang untuk secara aktif dan optimal menstimulasi peningkatan pergerakan masyarakat.

Transit Oriented Development (TOD) mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan sistem transportasi umum yang bertujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Konsep ini mengintegrasikan penggunaan lahan yang beragam atau *mixed use*, yang mencakup perumahan, komersial, perkantoran, dan fasilitas publik dalam satu kawasan yang mudah diakses melalui transportasi umum. Pendekatan ini memiliki dua persyaratan utama: ketersediaan jaringan dan sistem transit berkapasitas tinggi dan lingkungan yang ramah bagi *non-motorized transportation* atau moda transportasi tidak bermotor seperti berjalan kaki dan bersepeda. Integrasi ini tidak hanya mempermudah penduduk dalam mengakses moda transportasi umum, tetapi juga mendorong lebih banyak individu untuk memilih transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi serta dapat memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang mudah dan nyaman ke transportasi umum dalam aktivitas harian penduduk.

Penerapan sistem transportasi tidak dapat dipisahkan dari pentingnya *first mile* dan *last mile* perjalanan. Integrasi moda menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah *first mile* dan *last mile*. Sistem transportasi publik terpadu menggabungkan berbagai moda transportasi, baik *rail-based transportation* seperti *Commuter Line* (KRL), *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rail Transit* (LRT), KA Bandara, *Bus Rapid Transit* (Transjakarta), *feeder* (pengumpan) hingga *non-motorized transportation* seperti sepeda, dan pejalan kaki, dalam satu jaringan yang saling terhubung. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya dengan mudah dan tanpa hambatan (*seamless*), sehingga meningkatkan efisiensi perjalanan. Fasilitas pendukung di sekitar titik transit turut memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan *Transit Oriented Development* (TOD). Fasilitas ini mencakup trotoar yang nyaman, jalur sepeda yang aman, dan area *park and ride* yang strategis. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini tidak hanya mempermudah akses penduduk ke moda transportasi umum, tetapi juga mendukung keterhubungan antar moda transportasi.

Dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan pribadi di wilayah aglomerasi Jabodetabek di setiap tahunnya, mendorong dibutuhkannya sinkronisasi kebijakan yang perlu dilakukan, tidak hanya di Kota Jakarta, tetapi juga di kota-kota penyangganya yang saling mendukung baik pada level pusat dan daerah. Kebijakan ini harus berfungsi sebagai insentif untuk pengguna transportasi umum dan disinsentif untuk pengguna kendaraan pribadi guna mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu mengatasi tantangan ini secara efektif untuk mendukung upaya pencapaian mobilitas yang optimal.

Jakarta tetap menjadi pusat utama pergerakan barang di Indonesia, memainkan peran sentral dalam jaringan logistik nasional. Berdasarkan data terbaru pada tahun 2024, sekitar 47% dari total pergerakan barang di wilayah Jabodetabek terjadi di Jakarta, dengan volume tahunan mencapai 2,3 miliar ton, atau sekitar 6,3 juta ton per hari. Aktivitas ini berkontribusi pada estimasi 550.000–750.000 perjalanan truk per hari. Pergerakan barang internal tertinggi di Jakarta masih terjadi antara Jakarta Timur dan Jakarta Utara, sementara aliran eksternal antara DKI Jakarta dan Bodetabek didominasi oleh Kabupaten Bogor, yang menyumbang sekitar 7% dari total pergerakan barang. Rute tersibuk tetap berada pada jalur dari Jakarta Selatan menuju Bogor, mencerminkan pentingnya konektivitas antara wilayah ini dalam mendukung aktivitas logistik. Pergerakan barang dalam jumlah besar ini bersaing langsung dengan kendaraan penumpang untuk ruang di jalan, berkontribusi secara signifikan terhadap kemacetan dan menurunkan Tingkat Pelayanan (*Level of Service/LoS*) di jalan-jalan Jakarta. Ketidadaan jalan khusus untuk pergerakan barang semakin memperburuk tantangan ini, karena kendaraan angkutan barang, terutama truk yang *over-dimension* dan *over-load* (ODOL), berbagi infrastruktur yang sama dengan kendaraan penumpang. Hal ini tidak hanya mengurangi kecepatan rata-rata perjalanan, namun turut berdampak negatif

pada efisiensi logistik dan mobilitas perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi strategis seperti pengembangan koridor khusus angkutan barang atau penerapan waktu pengiriman yang terbatas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan jalan.

Jakarta, sebagai pusat ekonomi Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan transportasi dan logistik. Sistem logistik di Jakarta saat ini masih didominasi oleh jalur darat berbasis jalan, yang rentan terhadap kemacetan dan kurang efisien dalam memenuhi kebutuhan transportasi barang. Sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi elemen kunci dalam sistem transportasi laut Jakarta. Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam perdagangan barang antarpulau dan ekspor-impor. Sebagai kota dengan kontribusi besar terhadap aliran barang dan jasa di Indonesia, Jakarta memiliki peran penting dalam integrasi ekonomi antar daerah.

Sebagai salah satu terminal peti kemas terbesar di Asia Tenggara, pengembangan *Jakarta International Container Terminal* (JICT) di Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu pusat distribusi terbesar di Indonesia, berperan penting dalam mempercepat proses bongkar muat barang, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mendukung kelancaran arus logistik nasional. Dalam meningkatkan jaringan sistem logistik yang andal, Jakarta dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Kebutuhan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur logistik menjadi salah satu hambatan utama. Proyek pembangunan seperti pusat distribusi terpadu, fasilitas transportasi multimoda, dan teknologi logistik canggih memerlukan pendanaan yang signifikan. Dalam mencapai target yang diharapkan, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan sistem logistik yang andal dan efisien. Di tingkat global, Jakarta berperan sebagai pintu gerbang utama bagi perdagangan dan investasi internasional. Hubungan erat antara Jakarta dan pasar global menciptakan peluang besar untuk meningkatkan ekspor-impor, memperluas akses produk-produk lokal ke pasar dunia, serta mendorong daya saing industri domestik.

Dalam mendukung pergerakan informasi yang optimal, Jakarta memerlukan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Meskipun tingkat penetrasi internet mencapai 87%, Jakarta menduduki peringkat ke-115 di dunia untuk kecepatan *internet mobile*, dengan cakupan 5G yang terbatas pada 22% (Speedtest, 2024; Bappeda DKI Jakarta, 2024). Jakarta memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan cakupan 5G dan serat optik melalui berbagai inisiatif strategis. Peningkatan cakupan 5G dan serat optik merupakan elemen penting dalam transformasi digital yang lebih luas di Jakarta. Dengan teknologi 5G, kota ini dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat transfer data, dan mendukung berbagai aplikasi berbasis *Internet of Things* (IoT). Ini akan mendorong efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.

Penerapan jaringan infrastruktur telekomunikasi berbasis internet 5G di Jakarta diproyeksikan memberikan dampak substansial terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat perkotaan. Peningkatan signifikan dalam kecepatan dan stabilitas koneksi internet berpotensi mendukung efisiensi operasional dalam sektor bisnis dan *e-commerce*. Dengan tersedianya akses internet yang lebih cepat, perusahaan di Jakarta dapat meningkatkan efektivitas operasionalnya sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.



BAB

3

VISI, MISI, DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

III.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menyajikan analisis terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029. Tujuan merupakan kondisi akhir (*ultimate outcome*) yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

III.1.1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025 – 2029 adalah:

**JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING,
BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA**

JAKARTA KOTA GLOBAL: merupakan aspirasi jangka panjang Jakarta untuk menyejajarkan dirinya dengan kota-kota besar lain di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dimana Jakarta dapat menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia, modal, barang, gagasan, serta informasi yang terbaik. Pada tahun 2030 Jakarta menargetkan masuk ke dalam 50 besar kota global.

PUSAT PEREKONOMIAN: merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan motor penggerak perekonomian nasional. Kawasan perkotaan menyimpan potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara. PDRB per kapita tumbuh seiring dengan bertambahnya persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dan *high-income countries* di dunia memiliki persentase penduduk perkotaan yang paling tinggi. Saat ini kawasan aglomerasi Jabodetabekjur merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Nasional.

BERDAYA SAING: dalam konstelasi kota global, daya saing merupakan elemen penting karena tidak hanya Jakarta harus lebih baik dari dirinya di masa lampau, tetapi juga secara paralel berkompetisi dengan kota-kota lain yang terus memperbaiki kualitasnya. Kota yang memiliki daya saing tinggi mampu berkembang lebih pesat karena mampu menarik dan mempertahankan investasi, tenaga kerja, dan bisnis dibandingkan dengan kota lain.

BERKELANJUTAN: kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan penduduknya saat ini tanpa mengorbankan kesempatan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kota tetap layak huni dalam jangka panjang.

MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGA: memiliki makna bahwa hakikatnya seluruh proses pembangunan yang berlangsung di Jakarta adalah untuk mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan di sini dapat diartikan luas dan tidak hanya terkait dimensi ekonomi, namun merupakan konsep *well-being* yang holistik. Setiap warga Jakarta memiliki level kebutuhan yang berbeda-beda, untuk sebagian golongan yang mampu, Pemerintah dapat tetap memberikan nilai ‘sejahtera’ seperti kualitas udara yang lebih baik dan fasilitas publik yang nyaman. Di sisi lain bagi golongan yang rentan, Pemerintah dapat hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan mengurangi beban hidup sehari-hari. Sehingga Jakarta dapat mewujudkan secara penuh konsep kota untuk semua atau *cities for all*.

III.1.2. Misi

Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah dideskripsikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan menjadi alat navigasi arah kebijakan yang mempengaruhi rekomendasi kerja berupa program prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Jakarta pada tahun 2030, lima misi pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera**
2. **Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata**
3. **Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal**
4. **Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan**
5. **Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Untuk memastikan keselarasan misi dengan dokumen perencanaan lainnya yang menjadi pertimbangan, maka dilaksanakan penyalarsan antara Misi RPJMD dengan isu strategis RPJMD, Misi dan *Game Changer* RPJPD, serta Asta Cita yang berfungsi sebagai Prioritas Nasional pada dokumen RPJMN dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel III.1 Penyalarsan Misi RPJMD dengan RPJMN dan RPJPD

RPJMN 2025-2029		RPJPD 2025-2045		RPJMD 2025-2029	
VISI PRESIDEN: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		VISI: Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan		VISI: Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya	
ASTA CITA	MISI	GAME CHANGER	ISU STRATEGIS	MISI	
PRIORITAS NASIONAL 1 PRIORITAS NASIONAL 4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera	Transformasi Jakarta Menjadi Pusat Keunggulan	Kualitas modal manusia dan kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera	
PRIORITAS NASIONAL 2 PRIORITAS NASIONAL 5 PRIORITAS NASIONAL 6	- Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan - Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan.	- Ekskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global - Pengarusutamaan R&D dan Inovasi dalam Pembangunan	- Perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global - Pemerataan dan kebermanfaatan Hasil Pembangunan	Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata	
PRIORITAS NASIONAL 3 PRIORITAS NASIONAL 7	- Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas - Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global	Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing	Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima	Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal	
PRIORITAS NASIONAL 3 PRIORITAS NASIONAL 8	- Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan - Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan	Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan	- Ekosistem yang seimbang dan berketahanan iklim - Infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan	Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan	
	Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global	Pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal	Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	

Selanjutnya dilakukan tinjauan terhadap masing-masing misi dengan memperhatikan makna dari frasa penyusun kalimat dan indikator strategis yang relevan dengan kondisi yang ingin dicapai.

MISI 1

‘Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera’

Misi pertama ini merupakan perwujudan kondisi **“Masyarakat Megapolitan”** Jakarta yang adaptif terhadap segala perubahan global, serta dapat merespons tantangan dan peluang dengan cepat dan tepat, serta memiliki kompetensi bersaing di berbagai bidang, baik skala lokal maupun global dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai warisan budaya. Secara umum nilai yang ditekankan pada misi ini dititik beratkan pada nilai keberdayaan, mapan, dan sejahtera; baik pada entitas manusia melalui pendekatan individu maupun manusia dengan pendekatan kolektif sebagai masyarakat. Misi ini juga mengandung makna mewujudkan masyarakat Jakarta yang aktif terbuka pada ide-ide baru dan demokratis dalam interaksinya di dunia yang semakin plural dan heterogen.

Kondisi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia Jakarta yang difokuskan pada kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan, serta penghayatan dan penerapan nilai-nilai budaya. **“Berdaya”** menjadi kata kunci yang ditujukan kepada masing-masing entitas manusia untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan kompleks yang terjadi pada tiap-tiap manusia tentunya memengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang, oleh karena itu sifat berdaya dibutuhkan untuk menunjang tujuan pembangunan utama yaitu manusia yang sejahtera. Pendekatan indikator ‘Indeks Modal Manusia’ dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pendidikan dan kesehatan manusia dimana pada tingkatan tertentu diharapkan dapat meningkatkan peluang seseorang mencapai produktivitas sebagai manusia yang berdaya.

Salah satu cara terbaik untuk membekali generasi berikutnya adalah dengan menempatkan pembelajaran mereka pada sistem pendidikan yang dapat diandalkan. Kondisi ini dapat diukur melalui Indeks Dimensi Pendidikan yang terdiri dari indikator ‘Rata-rata Lama Sekolah’ dan ‘Harapan Lama Sekolah’ di mana keduanya memperlihatkan secara umum peluang dan partisipasi pendidikan formal melalui institusi sekolah, yang dapat ditingkatkan diantaranya melalui jaminan layanan pendidikan yang inklusif disertai bantuan biaya pendidikan. Berikutnya, kondisi kesehatan masyarakat dapat terlihat melalui pendekatan ‘Angka Harapan Hidup’ yang menunjukkan probabilitas rata-rata waktu hidup manusia yang lahir saat ini. Pencapaian yang baik pada indikator ini merupakan indikasi positif dari kemajuan dalam berbagai aspek kesehatan, termasuk penyediaan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, serta penguatan layanan kesehatan primer. Selain itu kualitas fisik dan fungsi kognitif manusia akan berdampak pada prestasi akademis dan produktivitas mereka di masa depan, sehingga indikator ‘Prevalensi *Stunting*’ dapat dijadikan indikator kendali atas kualitas tumbuh kembang anak-anak. Semakin tinggi angka *stunting*, maka semakin rendah kualitas sumber daya manusia suatu negara, karena anak-anak yang mengalami *stunting* tidak tumbuh optimal secara fisik dan mental, tidak mencapai potensi belajar maksimal, dan tidak produktif secara penuh saat dewasa. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap pencapaian Indeks Modal Manusia.

Peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak hanya bisa tercapai secara optimal jika semua orang mendapatkan akses yang setara terhadap kesempatan tersebut. Kesetaraan berarti setiap manusia memiliki hak, peluang, dan akses yang sama untuk berkembang, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, ekonomi, suku, agama, atau wilayah geografis. Ketika seluruh penduduk punya kesempatan untuk berkembang, lebih banyak orang dapat berkontribusi secara produktif dalam masyarakat, sehingga ‘Indeks Ketimpangan Gender’ dan ‘Indeks Pembangunan Pemuda’ dapat digunakan untuk memastikan kebijakan dan akses layanan publik yang imparial terhadap perbedaan gender dan usia.

Kata kunci terakhir pada misi ini yaitu **“Sejahtera”** yang merujuk kepada konsep *well-being* di mana manusia mengalami keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial yang positif, keamanan ekonomi, serta perasaan bahagia dan puas terhadap hidup. Konsep ini meliputi nilai-nilai yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Salah satu bentuk kesejahteraan yang *tangible* dan dapat diukur yaitu dari sisi keamanan finansial. Sejahtera dari sisi *intangible* dapat terlihat dari tingkat budaya masyarakat (*civil society*) yang madani. Hubungan antara *well-being* dan kebudayaan sangat erat, karena kebudayaan membentuk cara individu memahami, merasakan, dan mengejar kesejahteraan dalam hidupnya. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang memengaruhi persepsi terhadap apa itu hidup yang baik, sehingga kebijakan peningkatan *well-being* perlu dirancang sesuai dengan konteks budaya lokal yang dapat digambarkan oleh indikator ‘Indeks Pembangunan Kebudayaan’ dan ‘Indeks Demokrasi Provinsi’.

MISI 2

‘Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata’

Misi kedua ini mengandung frasa terpenting yaitu aspirasi Jakarta sebagai **“Pusat Ekonomi”** di mana berbagai sektor ekonomi unggulan saling terintegrasi dan membentuk ekosistem yang terhubung dengan infrastruktur yang handal serta modern. Pengembangan ekonomi yang berorientasi pada inovasi berkelanjutan dimaksudkan agar Jakarta lebih kompetitif di tingkat dunia, sekaligus semakin terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional dan global.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa pendekatan indikator ekonomi seperti ‘Laju Pertumbuhan Ekonomi’ dan ‘Total PDRB’. Laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa, serta adanya ekspansi ekonomi yang sehat dan mampu bersaing dengan pusat ekonomi lain. Pendekatan lainnya dapat juga dilihat dari tingkat inflasi yang terkendali atau stabil. Kestabilan inflasi menunjukkan bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang efektif untuk mengendalikan tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Kata **“Inovatif”** menunjukkan Jakarta memiliki ekosistem yang mendukung penelitian dan pengembangan (*R&D*), pemanfaatan teknologi baru, serta kolaborasi yang kuat antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi sehingga dapat menarik investasi strategis dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ‘Indeks Daya Saing Daerah’ dapat digunakan untuk mengukur tingkat inovasi dan peran Jakarta sebagai kota terdepan di Indonesia. Indikator ini merupakan ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya untuk menciptakan nilai tambah. Pendekatan ekonomi inovatif lainnya adalah ‘Indeks Ekonomi Biru Indonesia’ yang menunjukkan keberlanjutan ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan pengelolaan ekosistem laut yang sehat, serta ‘Indeks Ekonomi Hijau Indonesia’ yang mengukur pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Jakarta yang membangun ekosistem inovasi yang kuat akan lebih siap menghadapi tantangan global serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Inovasi juga perlu didukung oleh kolaborasi yang bermakna. Dengan daya tarik ekonomi dan bisnis yang baik, diharapkan Jakarta dapat menarik investasi, bisnis, dan kunjungan wisata baik domestik maupun internasional. Beberapa pendekatan yang dapat memperlihatkan keatraktifan Jakarta adalah peningkatan nilai investasi yang ditanamkan investor domestik maupun internasional yang diukur melalui ‘Pembentukan Modal Tetap Bruto’. Selanjutnya, peningkatan peran Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis yang didukung dengan daya tarik pariwisata dan penjenamaan kota yang menarik akan mempengaruhi ‘Jumlah Kunjungan Internasional’. Hal ini akan berdampak terhadap sektor-sektor lainnya seperti perhotelan, restoran, dan transportasi yang kemudian meningkatkan ekonomi Jakarta. Selain itu, keatraktifan Jakarta akan menarik talenta kreatif dan inovator dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang akan meningkatkan ‘PDRB Ekraf’. Sektor-sektor tersebut dibutuhkan untuk menghasilkan ekonomi dengan nilai tambah tinggi; yaitu sistem ekonomi yang menghasilkan produk dan jasa dengan tingkat pemrosesan, inovasi, dan pengetahuan yang tinggi, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan hanya menjual sumber daya mentah atau produk dasar. Hal ini relevan dengan kondisi Jakarta yang memiliki lahan terbatas. Dengan kebijakan pengembangan sektor usaha yang tepat Jakarta dapat meningkatkan kesempatan menjadi hub investasi dan bisnis internasional.

Frasa **“Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata”** adalah strategi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Jakarta mendapatkan kesempatan dan akses yang setara terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Keadilan sosial dan inklusi ekonomi diupayakan melalui berbagai kebijakan pengurangan ketimpangan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan yang diukur melalui indikator ‘Tingkat Kemiskinan’ dan ‘Rasio Gini’. Inklusivitas pembangunan dijaga dengan tolak ukur diantaranya akses yang layak terhadap hak-hak fundamental seperti pangan yang diukur dengan ‘Indeks Ketahanan Pangan’, serta ‘Indeks Kesejahteraan Sosial’ yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, keberfungsian sosial, dan ketahanan sosial. Perbaikan akses sumber daya pembangunan juga meliputi akses terhadap penghidupan yang layak yang diukur melalui ‘Tingkat Pengangguran Terbuka’. Menurunnya angka pengangguran menunjukkan pembangunan yang semakin inklusif, adil, dan merata, karena tanpa distribusi pembangunan yang adil — baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, maupun investasi — kesempatan kerja yang layak hanya akan dinikmati oleh sebagian wilayah dan kelompok masyarakat.

MISI 3

‘Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal’

Subjek utama dari misi ketiga adalah **“Manajemen Kota Modern”** yang menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola kota agar mampu menjawab tantangan urbanisasi, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Kondisi yang diinginkan untuk dicapai adalah perbaikan birokrasi yang menyeluruh dan tingkat kepuasan layanan yang tinggi yang dapat diukur dengan menggunakan ‘Indeks Reformasi Birokrasi’. Manajemen yang dimaksud meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pemerintahan yang baik yang diukur melalui ‘Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)’. Profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tercermin dari kata **“Akuntabel”** dan **“Responsif”** yang bermakna kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur sipil negara yang membaik. Untuk menciptakan aparatur yang profesional, kompeten, dan akuntabel perlu dikembangkan kebijakan terkait meritokrasi yang diukur melalui ‘Indeks Sistem Merit’ dan ‘Indeks Integritas Daerah’. Kebijakan tersebut memastikan pengangkatan, promosi, dan penugasan individu dalam sistem birokrasi atau organisasi didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan prestasi, bukan karena hubungan pribadi, politik, atau faktor non-profesional lainnya. Selain itu pendekatan indikator ‘Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah’ digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas, komitmen, dan kinerja daerah dalam tata kelola fiskal.

Frasa **“Layanan Publik yang Optimal”** merupakan perwujudan salah satu fungsi dasar pemerintah daerah. Dengan pelayanan yang optimal, masyarakat Jakarta dapat terpenuhi hak-hak-nya sebagai warga kota dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pendekatan melalui indikator ‘Indeks Pelayanan Publik’ menggambarkan secara objektif kinerja layanan kota serta inovasi layanan secara keseluruhan berdasarkan hasil survei kepuasan publik. Sedangkan pendekatan indikator ‘Indeks SPBE’ dan ‘Indeks Pemerintahan Digital’ memperlihatkan kondisi kinerja layanan pemerintah yang didukung oleh teknologi secara maksimal dan menjadi bagian penting dari pengembangan Jakarta menjadi kota cerdas.

MISI 4

‘Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan’

Frasa **“Ruang Kota”** dimaknai sebagai objek pembangunan berupa infrastruktur fisik yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan beraktivitas. **“Layak Huni”** menggambarkan kualitas atau kondisi yang diinginkan terhadap ruang-ruang hidup di kota tersebut. Studi terkait *livable city index* mengukur prinsip-prinsip kota layak huni diantaranya ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, sanitasi), ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman kota, fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah), dan lingkungan hidup yang berkualitas (udara bersih, mikro iklim yang nyaman). Untuk mengevaluasi ketercapaian atas kriteria kota layak huni tersebut dapat digunakan pendekatan indikator ‘Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan’; yang kemudian secara spesifik dipertajam melalui kondisi infrastruktur yang dibutuhkan berupa manajemen sumber daya air baik menuju kedaulatan air, manajemen limbah padat dan cair melalui sistem sanitasi terpadu, serta hunian yang beragam dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan setiap kelas masyarakat. Ketiganya dapat diukur melalui indikator ‘Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak’, ‘Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah’, dan ‘Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak’.

Penggunaan kata kunci **‘Berkelanjutan’** memiliki makna pembangunan kota yang ramah lingkungan dan selaras dengan kelestarian sumber daya alam. Kondisi berkelanjutan ini diwujudkan melalui pendekatan indikator ‘Indeks Kualitas Lingkungan Hidup’ yang mencerminkan upaya menjaga kualitas udara, air, dan tanah melalui pencegahan pencemaran lingkungan, serta pendekatan indikator ‘Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca’ yang mengukur capaian upaya penurunan karbon dari berbagai sektor melalui penerapan regulasi terkait dampak negatif pembangunan dan perubahan iklim.

Keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang akan berkontribusi terhadap ketahanan kota. Kota harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, baik yang bersifat tiba-tiba (guncangan) maupun bertahap (tekanan jangka panjang). Konsep **‘Berketahanan’** mengadopsi prinsip-prinsip *resilient city* yang dapat diukur melalui pendekatan indikator ‘Indeks Risiko Bencana’ dan komposisinya yaitu ‘Indeks Ketahanan Daerah’, yang digunakan untuk menilai seberapa tangguh kota dalam menghadapi ancaman bencana alam maupun non alam, serta menilai upaya pemerintah meningkatkan kapasitas aparatur maupun masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

MISI 5

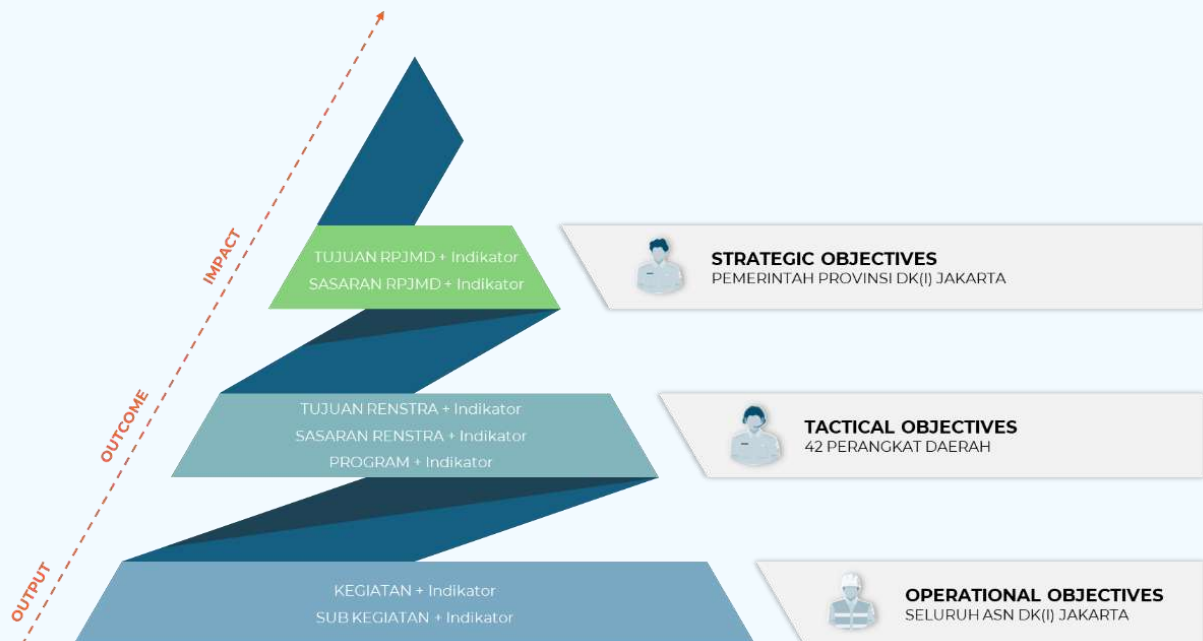
‘Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya’

Misi kelima bertujuan untuk mengembangkan ruang Jakarta melalui pendekatan berbasis transit/*transit-oriented development* (TOD). Untuk mewujudkan kata kunci **“Konektivitas”**, perlu dilakukan pengintegrasian moda sistem transportasi publik yang modern, perluasan cakupan pelayanan transportasi publik yang diukur melalui indikator ‘Cakupan Layanan Angkutan Umum Massal’, serta peningkatan ragam penggunaan lahan meliputi: perumahan, ruang komersil, dan fasilitas publik. Kondisi tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan pola mobilitas yang efektif dan efisien yang dapat diukur melalui ‘*Public Transport Mode Share*’ yang menunjukkan preferensi penggunaan moda transportasi umum oleh warga.

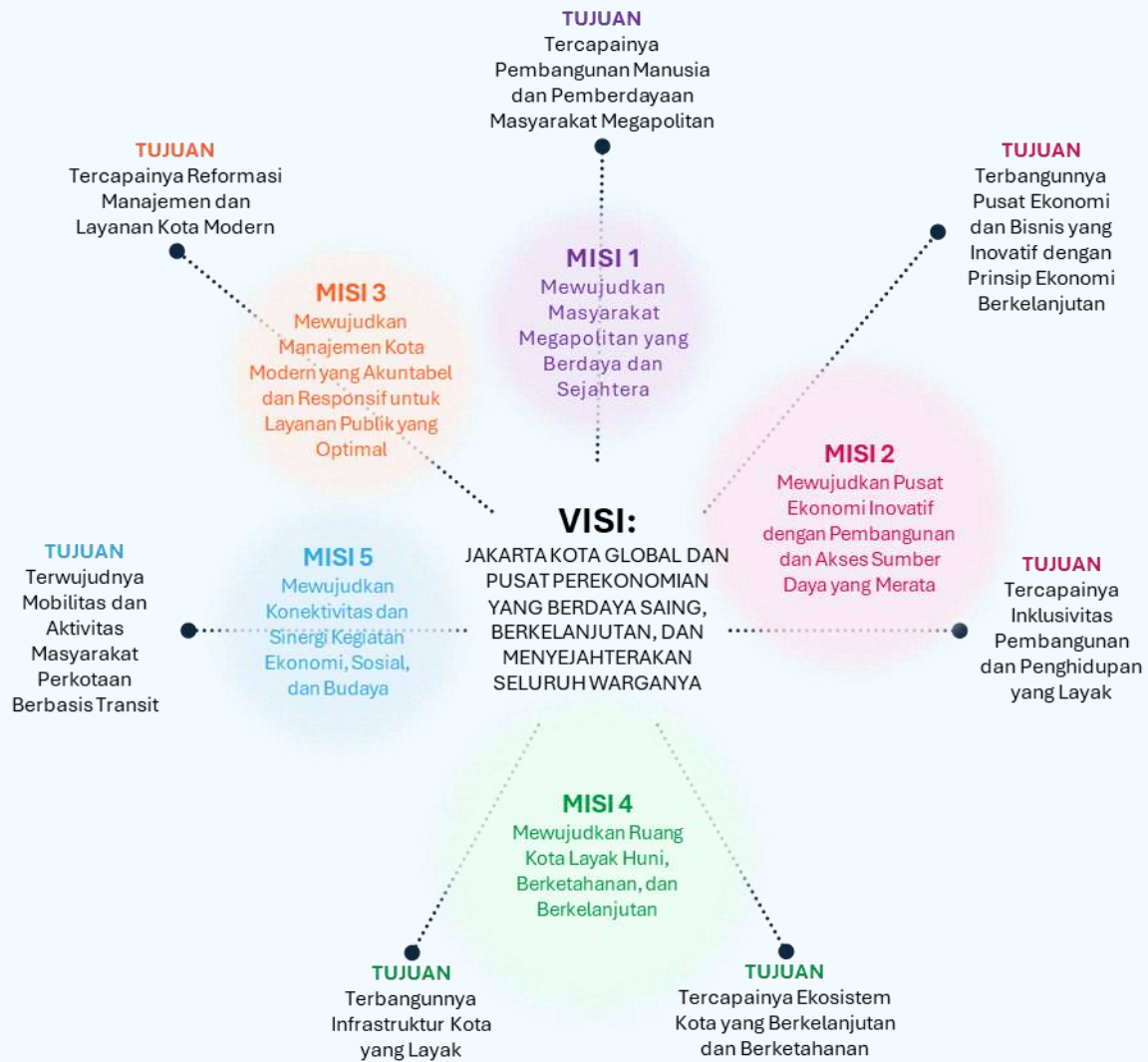
Misi ini turut menggambarkan keterkaitan antara pembangunan ruang gerak kota dengan penyediaan ruang hidup yang menampung **“Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya”**; kehadiran ruang-ruang tersebut di sekitar titik transit akan menjadi daya tarik pengembangan kawasan strategis yang menawarkan berbagai fungsi. Munculnya kawasan-kawasan ini akan mengurangi pola pergerakan *origin-destination* yang selama ini menimbulkan kemacetan, karena seluruh kebutuhan warga dapat disediakan di satu lokasi. Masyarakat tidak perlu bepergian dan menempuh jarak jauh untuk memenuhi segala kebutuhannya. Pengembangan kawasan kota sejenis juga dikenal dengan konsep *15-minutes-city*. Kata **“Sinergi”** mencerminkan strategi pengembangan ruang kota yang menggabungkan ketersediaan transportasi publik dengan kawasan-kawasan kompak kota, serta mengoptimalkan peran ruang publik. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan sinergi ini adalah dengan menggunakan pendekatan ‘*People Near Transit*’ yang mengukur seberapa banyak penduduk yang tinggal, bekerja, dan berusaha dalam radius titik transit.

III.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran adalah kinerja strategis pembangunan daerah yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di akhir periode RPJMD. Proses analisis terhadap *critical success factor* dari masing-masing tujuan dan sasaran selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara berjenjang. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan merupakan kontribusi lintas sektor Pemerintah, *stakeholders* eksternal, maupun peran serta Masyarakat.



Gambar III.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



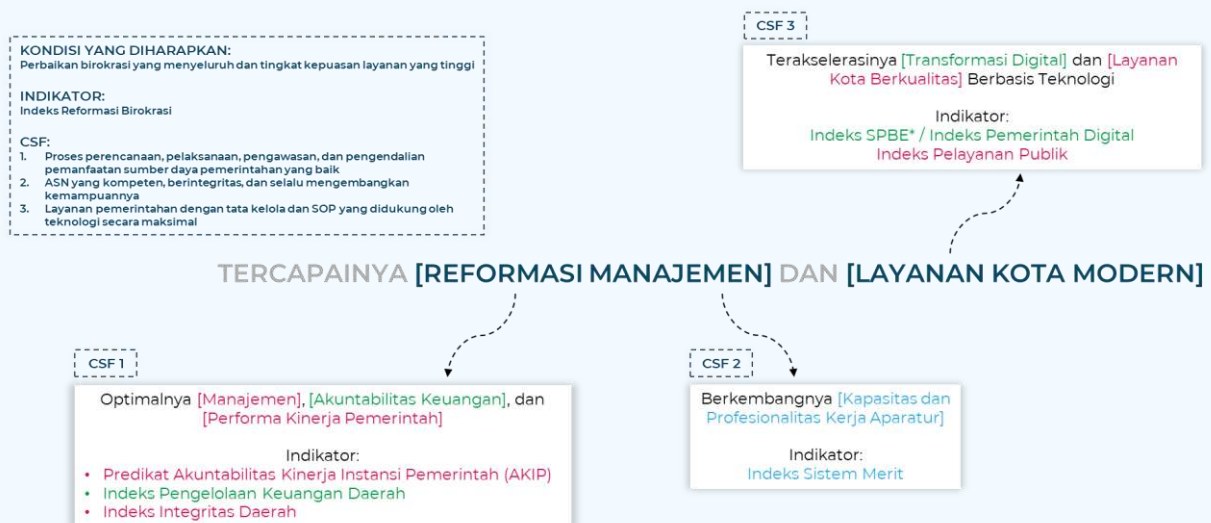
Gambar III.2 Perumusan Tujuan Pembangunan dan Keselarasan dengan Misi



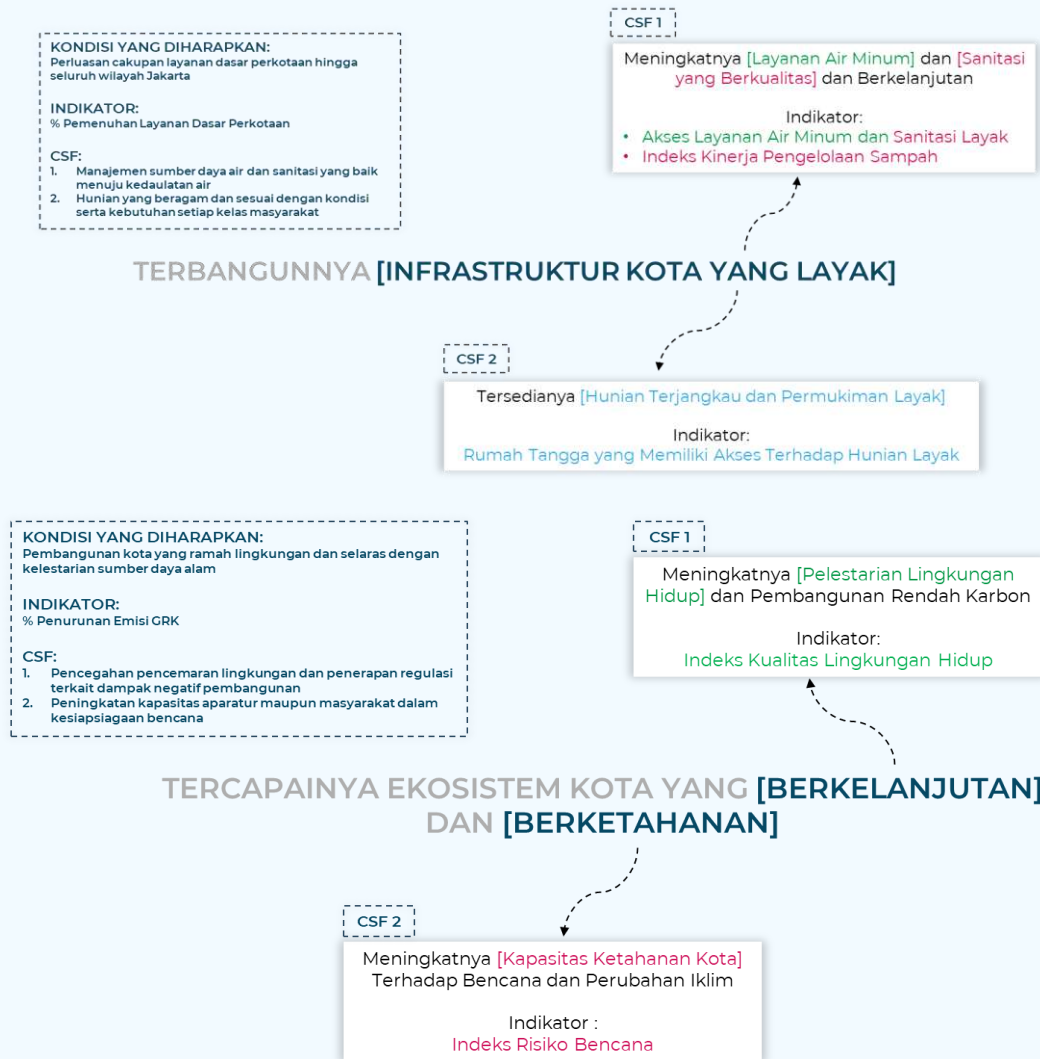
Gambar III.3 Cascading Kinerja pada Misi 1



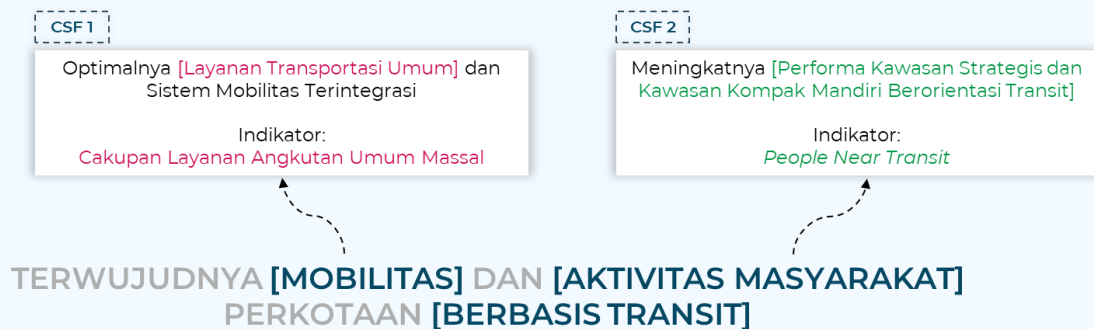
Gambar III.4 Cascading Kinerja pada Misi 2



Gambar III.5 Cascading Kinerja pada Misi 3



Gambar III.6 Cascading Kinerja pada Misi 4



Gambar III.7 Cascading Kinerja pada Misi 5

JAKARTA 2025 - 2029

Tabel III.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan	Indeks Modal Manusia	indeks	0,62	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,7
1.a	Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua	Indeks Dimensi Pendidikan	indeks	0,670	0,696	0,704	0,712	0,720	0,728	0,739	0,739
1.b	Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan	Usia Harapan Hidup	tahun	75,99	76,15	76,31	76,54	76,82	77,14	77,51	77,51
		Prevalensi Stunting	persen	17,2	15,8	15	14,2	13,5	12,8	12,3	12,3
1.c	Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	64,02	65,18	71,03	73,57	76,30	79,31	81,68	81,68
		Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,147	0,143	0,140	0,137	0,134	0,132	0,129	0,129
1.d	Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,96 (2023)	57,29	57,91	58,52	59,1	59,69	60,48	60,48
		Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	84,60	84,70	85,78	86,85	87,93	89,00	89,13	89,13
2.1	Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,9	5,00-5,30	5,10-6,00	5,20-6,50	5,30-7,00	5,40-7,40	5,50-7,70	5,50-7,70
		Indeks Ekonomi Biru	indeks	20,95 (2023)	22,89	24,69	26,54	28,48	30,65	32,55	32,55
		Indeks Ekonomi Hijau	indeks	56,42** (2023)	44,80	45,37	46,50	48,15	48,88	49,45	49,45
2.1.a	Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi	Total PDRB	triliun rupiah	3.679,36	3.907,37-3.918,53	4.106,64-4.153,64	4.320,19-4.423,63	4.549,16-4.733,28	4.806,19-5.083,55	5.084,94-5.474,98	5.084,94-5.474,98
2.1.b	Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	4,15	4,15
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen	34,11	34,3	34,32 – 34,44	34,35 – 34,54	34,37 – 34,64	34,46 – 34,72	34,46 – 34,72	34,46 – 34,72
2.1.c	Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik	PDRB Ekraf	persen	10,63	10,75	10,87	11	11,12	11,25	11,36	11,36
		Jumlah Tamu Mancanegara	orang	1.273.358	1.286.092	1.289.257	1.594.162	1.848.874	2.105.833	2.332.494	2,332,494

NO	TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2	Tercapainya Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak	Tingkat Kemiskinan	persen	4,3	3,96-4,15	3,80-3,90	3,37-3,965	2,94-3,49	2,08-3,08	1,82-2,91	1,82-2,91
		Rasio Gini	koefisien	0,423	0,425-0,430	0,410-0,422	0,422-0,427	0,420-0,425	0,417-0,421	0,415-0,419	0,415-0,419
2.2.a	Meningkatnya Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,21 (Agustus)	6,10	5,92-6,01	5,90-6,00	5,78-5,90	5,64-5,78	5,49-5,64	5,49-5,64
2.2.b	Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	0,35	0,175-0,263	0-0,175	0-0,135	0-0,100	0	0	0
		Indeks Kesejahteraan Sosial	indeks	59,77	59,77	62,36	64,94	67,52	70,10	72,47	72,47
		Indeks Ketahanan Pangan	persen	71,2***	71,71	72,84	74,86	77,52	80,30	83,20	83,20
3	Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	93,72	94	95	96	98	99	101	101
3.a	Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	predikat	A (81,66)	A (82,14)	A (82,57)	A (83,22)	A (83,97)	A (84,62)	AA (90,10)	AA (90,10)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	B	A	A	A	A	A	A	A
		Indeks Integritas Daerah	indeks	72,5	76,82	77,60	78,38	79,17	79,96	80,75	80,75
3.b	Berkembangnya Kapasitas dan Profesionalitas Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	indeks	350,5	350,5	355,03	355,03	360,5	360,5	400	400
3.c	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi	Indeks SPBE / Pemerintahan Digital*	indeks	4,46	4,46	1,7*	1,7*	2,0*	2,0*	2,2*	2,2*
		Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,53 (Prima)	4,54 (Prima)	4,55 (Prima)	4,56 (Prima)	4,57 (Prima)	4,58 (Prima)	4,8 (Prima)	4,8 (Prima)
4.1	Terbangunnya Infrastruktur Kota yang Layak	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	persen	77,66	78,06	78,47	78,88	79,30	79,71	80,13	80,13

NO	TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.a	Meningkatnya Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	persen	96,99	97,13	97,38	97,58	97,70	97,75	97,84	97,84
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	indeks	65,88	69,83	71,94	74,05	76,15	78,26	80,37	80,37
4.1.b	Tersedianya Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	persen	39	39,55	40,22	40,88	41,55	42,22	42,89	42,89
4.2	Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	persen	25,90	25,90	27,12	28,34	29,56	30,78	32,00	32,00
4.2.a	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	53,60***	53,72	53,87	54,05	54,32	54,63	55,01	55,01
4.2.b	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	indeks	59,29**	52,93	52,51	52,09	51,67	51,25	50,85	50,85
5	Terwujudnya Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perkotaan Berbasis Transit	Public Transport Mode Share	persen	22,19	23,01	23,4	24,38	25,34	26,12	27,06	27,06
5.a	Optimalnya Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi	Cakupan Layanan Angkutan Umum Massal	persen	87,97	88,99	90,01	91,03	92,05	93,07	94,09	94,09
5.b	Meningkatnya Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit	People Near Transit	persen	37,18	37,18	37,18	38,15	38,15	38,15	39,09	39,09

*Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target daerah disesuaikan sebagaimana Perpres 12 Tahun 2025 Lampiran 1 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan data baseline masih menggunakan metode pengukuran yang lama sehingga datanya lebih tinggi dari data target.

**Adanya perubahan metode perhitungan pada indikator tahun 2025 sehingga angka pada tahun kondisi awal tidak bisa diperbandingkan dengan angka tahun 2025.

***Merupakan hasil perhitungan IKP dan IKLH menggunakan metode baru.

III.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.2.1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan disusun berdasarkan *critical success factor* dari kondisi yang diharapkan di tahun akhir pelaksanaan RPJMD dari masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan. Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebijakan lintas sektor dan bidang urusan mana yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian kondisi akhir yang diinginkan. Hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.3 Strategi Pembangunan Menurut Tujuan dan Sasaran

TUJUAN / SASARAN RPJMD	CRITICAL SUCCESS FACTOR		BIDANG URUSAN UTAMA	BIDANG URUSAN PENDUKUNG
	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI		
Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan				
Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua	Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah warga Jakarta yang mendekati 13 tahun INDIKATOR: Indeks Dimensi Pendidikan	1. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang 2. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan 3. Penguatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama DU/DI 4. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional 5. Tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel	Pendidikan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan	Angka harapan hidup yang terus meningkat dan berkurangnya secara signifikan balita pendek/sangat pendek dengan gizi buruk INDIKATOR: Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting	1. Transformasi sistem kesehatan publik melalui digitalisasi dan inovasi layanan kesehatan 2. Peningkatan layanan kesehatan primer 3. Perluasan manfaat jaminan kesehatan nasional 4. Promosi pola hidup sehat dan pengendalian penyakit tidak menular 5. Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan 6. Penyediaan layanan dukungan psikologis dan kesehatan mental 7. peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi 8. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 9. Peningkatan cakupan pendataan keluarga terpadu satu pintu melalui Carik Jakarta 10. Peningkatan pengolahan dan analisis data Carik Jakarta dalam penanganan isu kependudukan 11. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak 12. Peningkatan pola asuh, pendampingan, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja 13. Penguatan pelayanan ramah lansia dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia 14. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda 15. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan	Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pangan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sosial
Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender	Kesetaraan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan dengan tidak adanya gap pada capaian indeks pembangunan manusia INDIKATOR: Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda	1. Penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan jabatan publik 3. Kesetaraan upah dan peluang kerja, serta dukungan wirausaha perempuan 4. Fleksibilitas kerja dan cuti melahirkan, serta fasilitas tempat kerja yang mendukung ibu pekerja 5. Penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender 6. Peningkatan akses dan layanan korban kekerasan yang terintegrasi dan komprehensif rumah tangga dan perdagangan manusia 7. Advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak kepada para stakeholder	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga	Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

TUJUAN / SASARAN RPJMD	CRITICAL SUCCESS FACTOR		BIDANG URUSAN UTAMA	BIDANG URUSAN PENDUKUNG
	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI		
Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	Inklusi budaya yang kuat dan menjadi modal pembangunan manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan INDIKATOR: Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Demokrasi Provinsi	1. Pelestarian dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat identitas kota 2. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia 3. Kerja sama pengelolaan cagar budaya 4. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 5. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM permuseuman 6. Peningkatan budaya literasi masyarakat 7. Penghapusan Diskriminasi Sosial dan Budaya 8. Peningkatan kohesivitas masyarakat untuk mencegah konflik sosial 9. Peningkatan kualitas layanan legislatif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 10. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui penguatan ideologi pancasila 11. Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan institusi politik	Kebudayaan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat DPRD	Kepemudaan dan Olahraga, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pendidikan
Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan				
Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi	PDRB yang meningkat setara dengan kota-kota besar di regional ASEAN dengan pendekatan berkelanjutan INDIKATOR: Total PDRB, Tingkat Inflasi	1. Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan, dan pelaporan harga 2. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga 3. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan ekspor, serta pengendalian impor 4. Optimalisasi manfaat dari perjanjian perdagangan bebas (<i>free trade agreement</i>) 5. Peningkatan kualitas layanan di bidang perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approached</i> (OSS-RBA) 6. Penguatan UMKM dalam rantai pasok 7. Peningkatan produktivitas industri dan IKM melalui pelatihan teknis dan manajerial 8. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging dan pelayanan kesehatan hewan 9. pengembangan pertanian perkotaan/<i>urban farming</i> 10. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap 11. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pendidikan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	Peningkatan efektivitas ekonomi untuk menambah daya tarik Jakarta dalam menarik investasi, kerja sama, dan talenta SDM global yang terbaik INDIKATOR: Indeks Daya Saing Daerah, Pembentukan Modal Tetap Bruto	1. Pengembangan peta potensi dan peluang investasi di Jakarta 2. Penguatan kebijakan terkait kemudahan membuka bisnis/usaha 3. Fasilitasi calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jakarta khususnya pada proyek Pemerintah 4. Pelaksanaan riset pasar/<i>investor mapping behaviour</i> negara-negara investor 5. Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha 6. Pengelolaan ekosistem inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi 7. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media 8. Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Penelitian dan Pengembangan, Penanaman Modal, Sekretariat Daerah	Perencanaan, Keuangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian
Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang menarik	Jakarta menjadi salah satu tujuan wisata dan bisnis utama khususnya di kawasan Asia Tenggara INDIKATOR: Jumlah Kunjungan Internasional, % PDRB Ekraf	1. Peningkatan daya tarik dan kualitas pengalaman wisata melalui revitalisasi objek wisata potensial 2. Penyelenggaraan <i>event-event</i> kelas dunia 3. Adaptive reuse bangunan-bangunan bersejarah untuk menciptakan identitas dan ruang publik yang unik	Pariwisata	Budaya
Tercapainya Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak				

TUJUAN / SASARAN RPJMD	CRITICAL SUCCESS FACTOR		BIDANG URUSAN UTAMA	BIDANG URUSAN PENDUKUNG
	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI		
Meningkatnya Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja	Angka pengangguran yang paling rendah di Indonesia dan meningkatnya peluang kerja formal untuk menjamin kesejahteraan pekerja INDIKATOR: Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Peningkatan keterampilan untuk menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi 2. Penguatan kapasitas pusat pelatihan kerja daerah 3. Sertifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar industri 4. Perlindungan dalam bentuk asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja 5. Peningkatan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan 6. Penciptaan lapangan kerja memanfaatkan perkembangan teknologi 7. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi 8. Pelatihan keterampilan dan manajemen bisnis bagi pelaku UMKM 9. Pendampingan dan mentoring pelaku UMKM 10. Penjaminan pemerintah agar UMKM lebih mudah mendapatkan kredit usaha 11. Pengembangan <i>marketplace</i> lokal dalam pemasaran produk UMKM	Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Penanaman Modal, Perindustrian, Pariwisata, Pendidikan
Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Angka kemiskinan ekstrem yang mendekati nol dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah INDIKATOR: Tingkat Kemiskinan Ekstrem, Indeks Kesejahteraan Sosial, Indeks Ketahanan Pangan	1. Pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran 2. Integrasi dan pemutakhiran berkala data terpadu kesejahteraan sosial 3. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan SPM 4. Penanganan korban bencana alam dan sosial sesuai dengan SPM 5. Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran 6. Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan 7. Pemberian bantuan subsidi pangan yang tepat sasaran 8. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga pemberdayaan kemasyarakatan (PKK, Posyantek dan lembaga lainnya)	Sosial, Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern				
Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah	Tata kelola pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien dengan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel INDIKATOR: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Integritas Daerah	1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta pengelolaan manajemen dan administrasi pemerintahan 2. Integrasi penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan perencanaan pembangunan berbasis bukti 3. Penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif dan efisien 4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 5. Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa 6. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang akuntabel dan transparan 7. Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal 8. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan peraturan perundang-undangan, penyusunan kebijakan daerah dan advokasi hukum	Inspektorat Daerah, Perencanaan, Sekretariat Daerah, Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan, Kepegawaian
Berkembangnya Kapasitas dan Profesionalitas Kerja Aparatur	Aparatur negara dengan standar kompetensi tinggi dan berintegritas untuk menghasilkan birokrasi yang efektif dan efisien INDIKATOR: Indeks Sistem Merit	1. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN 2. Pengembangan sistem penilaian kinerja 3. Penegakan disiplin aparatur serta pengembangan jabatan fungsional tertentu 4. Pengembangan <i>corporate university</i> sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia Jakarta	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah

TUJUAN / SASARAN RPJMD	CRITICAL SUCCESS FACTOR		BIDANG URUSAN UTAMA	BIDANG URUSAN PENDUKUNG
	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI		
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi	Layanan publik yang prima di setiap jenjang pemerintahan dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memenuhi prinsip <i>smart governance</i> dan kota cerdas (<i>smart city</i>) INDIKATOR: Indeks SPBE/pemerintahan Digital, Indeks Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik 2. Peningkatan dukungan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan 3. Penguatan dan pemanfaatan Super App Jaki untuk digitalisasi layanan 4. Peningkatan manajemen keamanan informasi dan jaringan 5. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil 6. Penyajian dan analisis profil kependudukan 7. Pelaksanaan koordinasi wilayah kota/kab administrasi yang optimal 8. Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, di antaranya melalui kegiatan PPSU, RT, RW, LMK dan FKDM 9. Pelayanan dan pemanfaatan arsip autentik 10. Pengelolaan data dan informasi kearsipan vital pemerintah dan masyarakat	Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Penanaman Modal, Kearsipan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan Administrasi	Perencanaan, Keuangan
Terbangunnya Infrastruktur Kota yang Layak				
Meningkatnya Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Akses air bersih perpipaan dan sanitasi terintegrasi yang melayani mayoritas rumah tangga INDIKATOR: % Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	1. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum 2. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah 3. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan 4. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tersedianya Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak	Hunian yang beragam, layak, dan terjangkau bagi mayoritas warga Jakarta INDIKATOR: % Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	1. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarannya 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan 3. Pengembangan skema pembiayaan kepemilikan perumahan 4. Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup
Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan				
Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	Lingkungan yang bersih, bebas polusi, dengan mikro iklim yang nyaman INDIKATOR: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau 2. Integrasi ruang terbuka hijau dengan ruang terbuka biru dan pemanfaatan indeks hijau-biru Indonesia 3. Pembangunan / penataan / penghijauan hutan untuk meningkatkan kualitas hutan kota 4. Penegakan aturan pencegahan pencemaran lingkungan 5. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha 6. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 7. Orientasi bagi seluruh penyelenggara bangunan gedung terkait konsep gedung hijau dan ramah disabilitas 8. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil 9. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan terkait pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perhubungan

TUJUAN / SASARAN RPJMD	CRITICAL SUCCESS FACTOR		BIDANG URUSAN UTAMA	BIDANG URUSAN PENDUKUNG
	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI		
Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Risiko bencana yang berkurang baik dari korban jiwa maupun kerugian materi INDIKATOR: Indeks Risiko Bencana	1. Pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tampungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai 2. Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase 3. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh <i>stakeholders</i> dalam menghadapi bencana 4. Pengoptimalan perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan 5. Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan Muka Tanah 6. Penegakan Perda/Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif 7. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Sosial, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi
Terwujudnya Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perkotaan Berbasis Transit				
Optimalnya Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi	Transportasi publik yang dapat diandalkan, tepat waktu, dan signifikan mengurangi kemacetan INDIKATOR: Cakupan Layanan Umum Massal	1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga 2. Pemberlakuan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi 3. Peningkatan pelayanan angkutan umum massal termasuk angkutan perairan 4. Pengawasan badan usaha angkutan umum 5. Perumusan kebijakan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian 6. Peningkatan infrastruktur logistik	Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Meningkatnya Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit	Masyarakat tidak perlu bepergian jauh dari tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari INDIKATOR: % <i>People Near Transit</i>	1. Pengembangan ruang kota yang diprioritaskan di sekitar sistem pusat pelayanan 2. Kelengkapan fasilitas publik di sekitar kawasan permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perhubungan

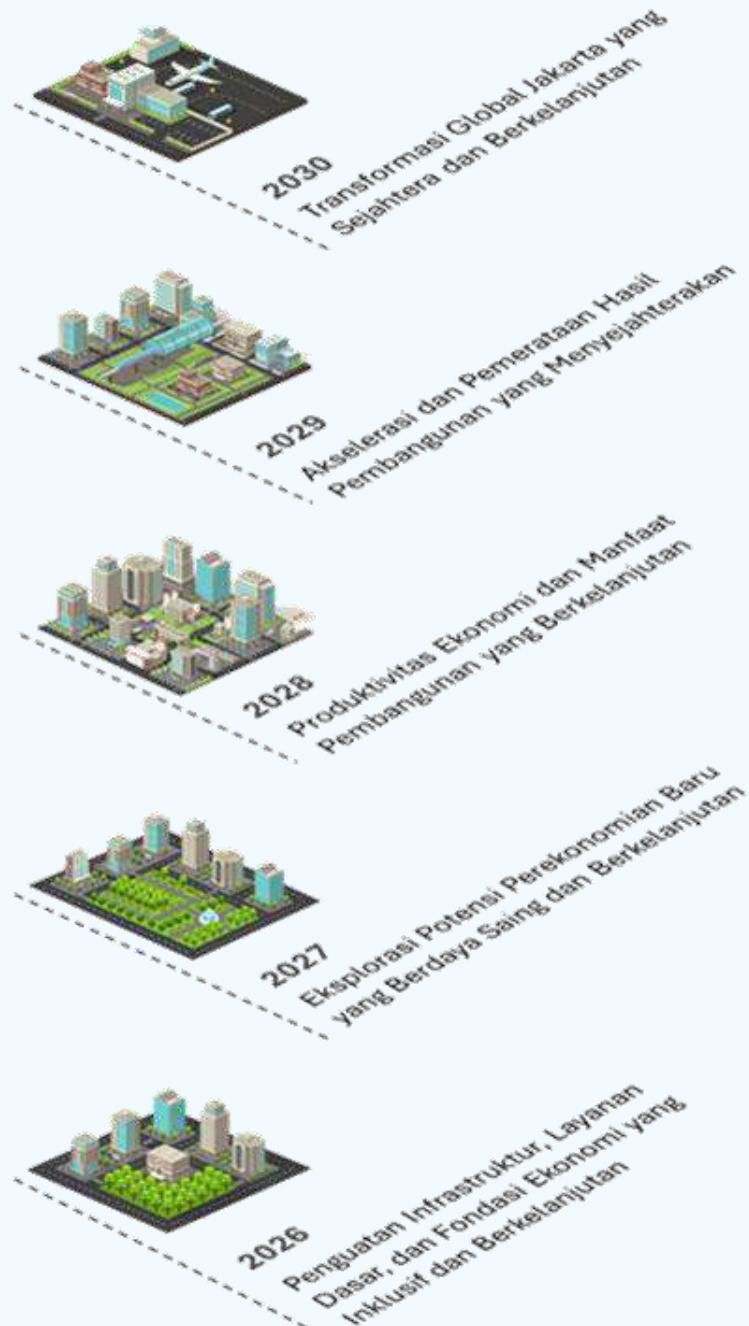
III.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 dilandasi dari tahapan pembangunan pada RPJPD DKI Jakarta 2025-2045, yaitu perbaikan fundamental sebagai tahapan pertama. Pada fase ini, pembangunan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar di bidang sosial dan lingkungan serta penguatan fondasi ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja. Selain itu, penguatan aspek sosial dan lingkungan juga dilakukan melalui perbaikan sistem kelembagaan dan regulasi, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai target pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan Jakarta ditajamkan melalui beberapa pendekatan yaitu; penentuan tahapan pembangunan per tahun selama periode 2025-2029, penjabaran aspek fundamental dari setiap Misi untuk diintegrasikan sebagai rekomendasi kebijakan prioritas untuk setiap Tujuan, penelaahan arah kebijakan rekomendasi KLHS, dan perencanaan pengembangan wilayah.

A. Tahapan Pembangunan

Tahapan pembangunan adalah serangkaian langkah atau fase yang dilakukan dalam suatu proses pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun sosial dalam rangka memantapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Jakarta periode 2025-2029. Pentahapan dilaksanakan atas pertimbangan waktu pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang mengakselerasi prioritas pembangunan Jakarta serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, sesuai dengan tahap pertama RPJPD 2025-2045 adalah Perbaikan Fundamental; berupa pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Tahapan pembangunan per tahun tersebut dijabarkan sebagai berikut:



Gambar III.8 Pentahapan Pembangunan RPJMD

1. **Tema pembangunan tahun 2026**

Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2. **Tema pembangunan tahun 2027**

Pembangunan pada tahun 2027 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Eksplorasi Potensi Perekonomian Baru yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

3. **Tema pembangunan tahun 2028**

Pembangunan pada tahun 2028 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Produktivitas Ekonomi dan Manfaat Pembangunan yang berkelanjutan

4. **Tema pembangunan tahun 2029**

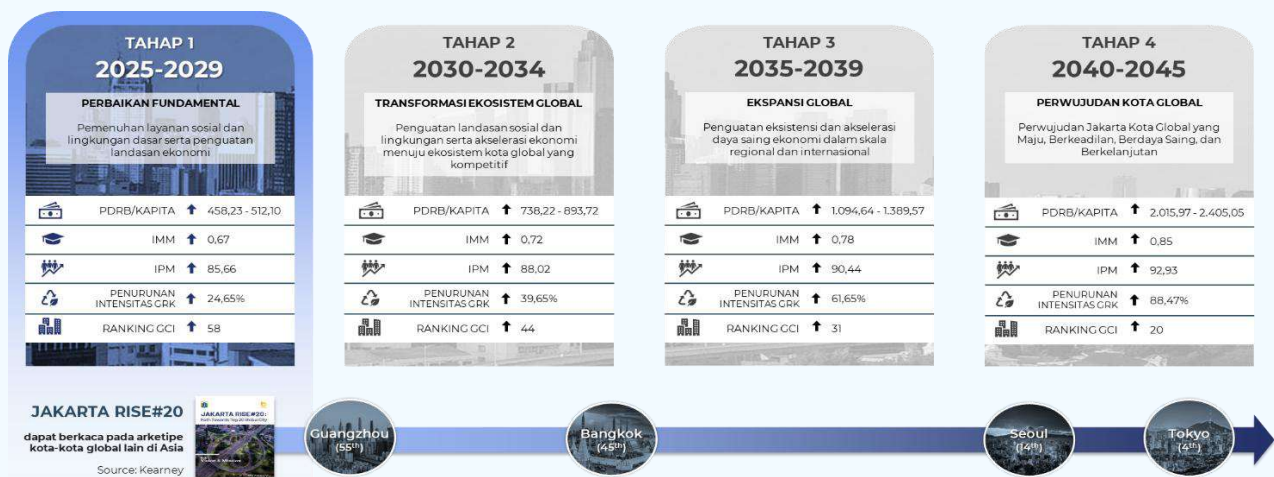
Pembangunan pada tahun 2029 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Akselerasi dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan

5. **Tema pembangunan tahun 2030**

Pembangunan pada tahun 2030 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Transformasi Global Jakarta yang Sejahtera dan Berkelanjutan

B. Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029) : Perbaikan Fundamental

Periode 2025-2029 merupakan tahap awal yang krusial untuk perbaikan fundamental dalam mewujudkan visi jangka panjang Jakarta pada tahun 2045. Kebijakan pembangunan RPJMD 2025–2029 tidak terlepas dari arah kebijakan prioritas tahap I RPJPD 2025–2045. Fokus utama pembangunan pada tahap ini adalah pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan infrastruktur dasar, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penguatan landasan sosial dan lingkungan dengan memperkuat kelembagaan dan regulasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan.



Gambar III.9 Tahapan RPJPD Jakarta 2025–2045

Sumber: RPJPD DKI Jakarta 2025-2045

Pada dokumen RPJPD 2025–2045 mencantumkan 7 *game changers* yang merupakan himpunan dari arah kebijakan prioritas yang telah dikelompokkan menurut tahapan pelaksanaannya. Proses perumusan *game changers* dilakukan dengan menentukan beberapa sektor yang memiliki daya ungkit atau keterkaitan tinggi terhadap sektor-sektor lainnya. Secara lengkap arah kebijakan yang diprioritaskan (*game changers*) dalam tahap 1 RPJPD, yaitu:

Game Changer 1.**Transformasi Jakarta Menjadi Pusat Keunggulan**

- Penguatan pelayanan kesehatan, ibu, bayi, dan anak, serta lanjut usia di setiap pusat kesehatan masyarakat
- Pengembangan rumah sakit daerah berbasis rumah sakit pendidikan (*teaching hospital*) sebagai pusat riset dan inovasi bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian
- Peningkatan dan pemantauan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dengan fokus utama pada masa emas anak (*golden age*)
- Penuntasan wajib belajar 13 tahun mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah
- Pendorongan partisipasi pendidikan tinggi terutama di bidang STEAM yang menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, kebutuhan pasar, dan potensi keunggulan daerah, serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri
- Pemberian bantuan operasional dan personal pendidikan yang tepat sasaran serta peningkatan inovasi pembiayaan pendidikan

Game Changer 2.**Eskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global**

- Pengembangan sektor industri berteknologi tinggi yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan berorientasi ekspor melalui riset dan inovasi
- Pembentukan kluster pengembangan UMKM berbasis lokasi atau sektor industri untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan daya saing
- Pengembangan ekonomi biru, teknologi kelautan, dan rekayasa akuakultur di kawasan perairan dan pesisir Jakarta, serta Kepulauan Seribu
- Peningkatan produktivitas ekonomi melalui utilisasi TIK di berbagai sektor unggulan
- Pengembangan berbagai instrumen pembiayaan kreatif serta pemanfaatan kekhususan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek besar (*megaproject*)

Game Changer 3.**Pengarusutamaan R&D dan Inovasi dalam Pembangunan**

- Pengembangan pusat dan *hub* inovasi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang andal
- Peningkatan insentif dan dukungan kebijakan dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang menarik bagi talenta riset nasional dan global

Game Changer 4.**Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya**

- Pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, wisata *heritage*, dan wisata pesisir serta kepulauan
- Pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) yang dilengkapi dengan ragam infrastruktur kontemporer bertaraf internasional yang kompetitif dan adaptif
- Penciptaan *creative hub* sebagai ruang ekosistem mengembangkan ekonomi kreatif Jakarta

Game Changer 5.**Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan**

- Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) yang bernilai ekologis tinggi untuk memperbaiki ekosistem kota
- Percepatan akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dan sistem pengolahan limbah terpusat (*Jakarta Sewerage System*) maupun setempat
- Penanganan sampah yang berkelanjutan melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur persampahan berteknologi ramah lingkungan yang mendukung terciptanya ekonomi sirkular

- Pemenuhan cakupan layanan air bersih perpipaan/air minum aman yang berkelanjutan baik secara kuantitas, kualitas, *coverage*, kontinuitas dan keterjangkauan
- Peningkatan kapasitas penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan SPAM di antaranya melalui pemanfaatan teknologi dalam penyediaan air baku Jakarta secara mandiri
- Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai
- Perubahan pola mobilitas berbasis kendaraan pribadi menjadi transportasi publik yang ramah lingkungan

Game Changer 6.

Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global

- Peningkatan kecepatan, kapasitas dan keterjangkauan internet bagi seluruh masyarakat
- Penguatan kerja sama lintas-aspek dan lintas-*stakeholder* dalam meningkatkan konektivitas global
- Penguatan konektivitas kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu melalui perbaikan jaringan transportasi air
- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sistem logistik yang terkoneksi secara optimal dan efisien antara pusat distribusi logistik kota, regional, dan global

Game Changer 7.

Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing

- Penguatan kolaborasi dan kelembagaan wilayah aglomerasi dalam perencanaan dan tata kelola lintas urusan dan lintas wilayah
- Penguatan tata kelola pembangunan melalui penyusunan *grand design/masterplan* yang berorientasi perwujudan kota global pada tiap urusan termasuk pengembangan wilayah Kepulauan Seribu
- Transformasi tata kelola, sistem informasi, serta simplifikasi prosedur dan proses investasi dan bisnis

Tabel III.4 Perumusan Arah Kebijakan Menurut Misi

MISI 2025–2029	ISU STRATEGIS 2025–2029	ARAH KEBIJAKAN	INTEGRASI KE TUJUAN
Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera	❑ Modal manusia tinggi dan masyarakat madani	Layanan pendidikan dasar dan menengah, Layanan kesehatan primer, Pemenuhan gizi	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 1
Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata	❑ Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan ❑ Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraktif di Pasar Global	Sistem perlindungan sosial tepat sasaran, Pengentasan kemiskinan berbasis wilayah, Inklusivitas ekonomi, Kemudahan investasi dan membuka usaha, Tenaga kerja berdaya saing	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 2.1 DAN 2.2
Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal	❑ Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima	Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik dan manajemen kota	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 3
Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan	❑ Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan ❑ Ekosistem yang Seimbang dan Berketahanan Iklim	Infrastruktur dasar, Hunian terjangkau, Perbaikan kualitas air dan udara, Ruang terbuka hijau, Ketahanan terhadap bencana	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 4.1 DAN 4.2
Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	❑ Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi yang Optimal	Kemudahan mobilitas, Koneksi internet yang cepat, <i>Branding</i> kota	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 5

Arah kebijakan prioritas sejatinya dirancang sebagai upaya strategis untuk mendorong pencapaian cita-cita Jakarta sebagai Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dengan target capaian peringkat 50 kota global dunia pada tahun 2030. Penyusunan arah kebijakan prioritas dilakukan dengan melihat karakteristik, posisi, serta potensi yang dimiliki oleh Jakarta saat ini. Dengan demikian, diharapkan arah kebijakan prioritas ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan sejalan dengan visinya.

C. Arah Kebijakan Rekomendasi KLHS RPJMD

Dalam mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Pada dokumen tersebut, untuk menjawab isu strategis dan skenario proyeksinya, telah dirumuskan rekomendasi arahan kebijakan dan arahan program. Arahan tersebut disusun berdasarkan alternatif strategi masing-masing isu strategis KLHS, rekomendasi arahan kebijakan Tahap I (2025-2029) dari KLHS RPJPD 2025-2045, serta diharmonisasikan dengan RPJPN 2045, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044, dan RPPLH Jakarta. Rekomendasi arahan kebijakan dan program prioritas dari KLHS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS

Isu KLHS	Rekomendasi Arahan Kebijakan	Rekomendasi Arahan Program (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)
Tingginya Risiko Bencana	- Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi <i>stakeholder</i> - Meningkatkan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana	1.05.03 Penanggulangan Bencana 1.05.04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1.03.08. Penataan Bangunan Gedung 1.04.02 Pengembangan Perumahan 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam	- Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan - Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multisektor, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	1.03.02 Pengelolaan SDA 1.03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 1.03.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2.11.08 Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2.11.11 Pengelolaan Persampahan 3.25.02 Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil 3.25.05 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3.28.04 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3.29.02 Pengelolaan Aspek Kegeologian
Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	- Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau - Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sektor, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan	1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2.11.02 Perencanaan Lingkungan Hidup 2.11.03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) 2.11.08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat
Ketimpangan sosial- ekonomi	Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global	1.01.02 Pengelolaan Pendidikan 1.01.03 Pengembangan Kurikulum 1.02.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Isu KLHS	Rekomendasi Arahan Kebijakan	Rekomendasi Arahan Program (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)
	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (<i>Meeting, Incentive, Conference, Exhibition</i>) berskala internasional • Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif • Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kepulauan dan daratan melalui peningkatan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana sosial, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni	• 1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • 1.03.07 Pengembangan Permukiman • 1.04.02 Pengembangan Perumahan • 1.04.03 Program Kawasan Permukiman • 1.04.05 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum • 1.06.02. Pemberdayaan Sosial • 1.06.05. Perlindungan dan Jaminan Sosial • 2.07.03 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • 2.14.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera • 2.17.07 Pemberdayaan UMKM • 2.17.08 Pengembangan UMKM • 3.25.06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • 3.26.02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata • 3.26.03 Pemasaran Pariwisata • 3.26.04 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • 3.26.05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • 4.01.06 Perekonomian dan Pembangunan
Belum optimalnya tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)	• Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern • Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (<i>Triple Planetary Crisis</i>) • Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian <i>good governance</i> dan <i>global city</i>	• 1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang • 4.01.02. Program Penataan Organisasi • 4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah • 4.01.06. Program Perekonomian dan Pembangunan • 5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • 5.03.02. Program Kepegawaian Daerah • 5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia • 5.07.02. Program Pelayanan Penghubung • 6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan
Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan	• Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan	• 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan • 2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • 2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik • 3.26.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • 5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

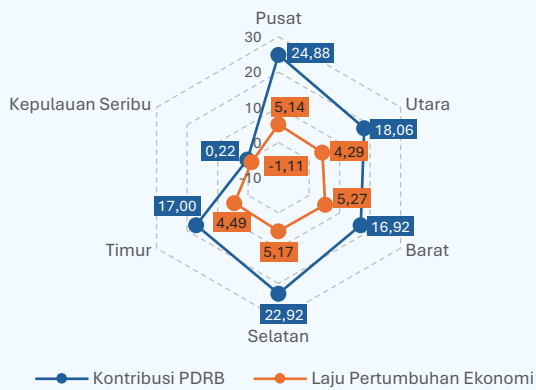
D. Arah Kebijakan Kewilayahan

Pembangunan wilayah adalah sarana untuk memetakan arah pembangunan Jakarta yang lebih spesifik sesuai dengan konteks dan karakter wilayah masing-masing. Penyusunan arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Jakarta 2025–2029 didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang merepresentasikan kepentingan pembangunan jangka menengah dan panjang, yaitu perbaikan fundamental dan visi untuk menjadi Kota Global. Beberapa pertimbangan strategis tersebut di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Arah Pembangunan Kewilayahan Jakarta yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029; Kawasan Strategis yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044; dan Koridor Prioritas Pembangunan yang termuat dalam Peta Jalan Jakarta menuju Kota Global (Jakarta Rise #20).

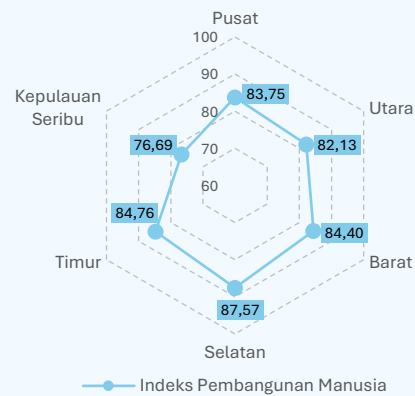
Kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Jakarta 2025–2029 merujuk pada PSN yang termuat dalam RPJMN 2025–2029. PSN merupakan instrumen utama pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah strategis. Arah Pembangunan Kewilayahan Jakarta yang juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029 memiliki indikasi-indikasi intervensi yang menjadi dasar penting dalam pembangunan Jakarta. Kebijakan kewilayahan Jakarta juga mengacu pada RTRW Jakarta tahun 2024–2044. RTRW menjadi peta landasan dalam mengarahkan fungsi ruang kota secara jangka panjang yang menetapkan Kawasan Strategis Jakarta melalui sudut

kepentingan sosial budaya, pertumbuhan ekonomi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selain itu, Peta Jalan Jakarta menuju Kota Global (Jakarta Rise#20) memberikan rekomendasi mengenai arah pengembangan wilayah serta mengidentifikasi koridor-koridor potensial pembangunan yang dapat mengakselerasi peringkat Jakarta sebagai kota global.

Sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan pengelolaan tata ruang. Tantangan utama yang dihadapi adalah disparitas antara daya saing masing-masing kota administrasi dan kabupaten administrasi. Berdasarkan capaian tahun 2024, terlihat kesenjangan yang cukup signifikan antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan kota administratif lainnya. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Seribu berada pada angka yang sangat kecil (0,22%) dibandingkan kota administratif lain (16% atau lebih). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Seribu pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 1,11%. Hal ini berbanding terbalik dengan kota administratif lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif, dengan Kota Jakarta Barat mencapai 5,27%. Kesenjangan juga ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki nilai IPM sebesar 76,69 pada tahun 2024, terendah di antara kota administratif lain yang mencapai angka di atas 82 dengan Jakarta Selatan sebagai pemegang nilai IPM tertinggi di angka 87,57.



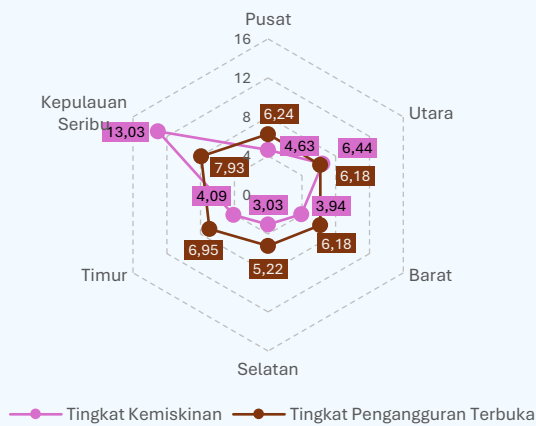
Gambar III.10 Kontribusi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024
Sumber: Analisis Bappeda, 2025



Gambar III.11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024
Sumber: Analisis Bappeda, 2025

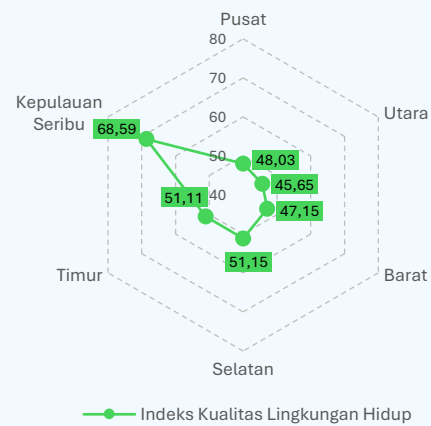
Kabupaten Kepulauan Seribu juga memiliki Tingkat Kemiskinan yang paling tinggi yaitu 13,03% pada tahun 2024, diikuti dengan Jakarta Utara yang berada pada 6,44%. Sedangkan, kota administrasi lain memiliki Tingkat Kemiskinan di bawah angka tersebut dengan capaian terbaik di Jakarta Selatan yang mencapai 3,03%. Kondisi ketenagakerjaan di Jakarta salah satunya dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Seribu juga masih yang tertinggi di Jakarta yaitu sebesar 7,93%.

Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang paling tinggi, yaitu mencapai 68,59. Kota administratif lain di Jakarta hanya mencapai nilai rata-rata 48,62. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi dan pembangunan kota di daratan Jakarta. Tingginya nilai IKLH di Kepulauan Seribu menunjukkan potensi lingkungan yang harus dipertahankan dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan daerah.



Gambar III.12 Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

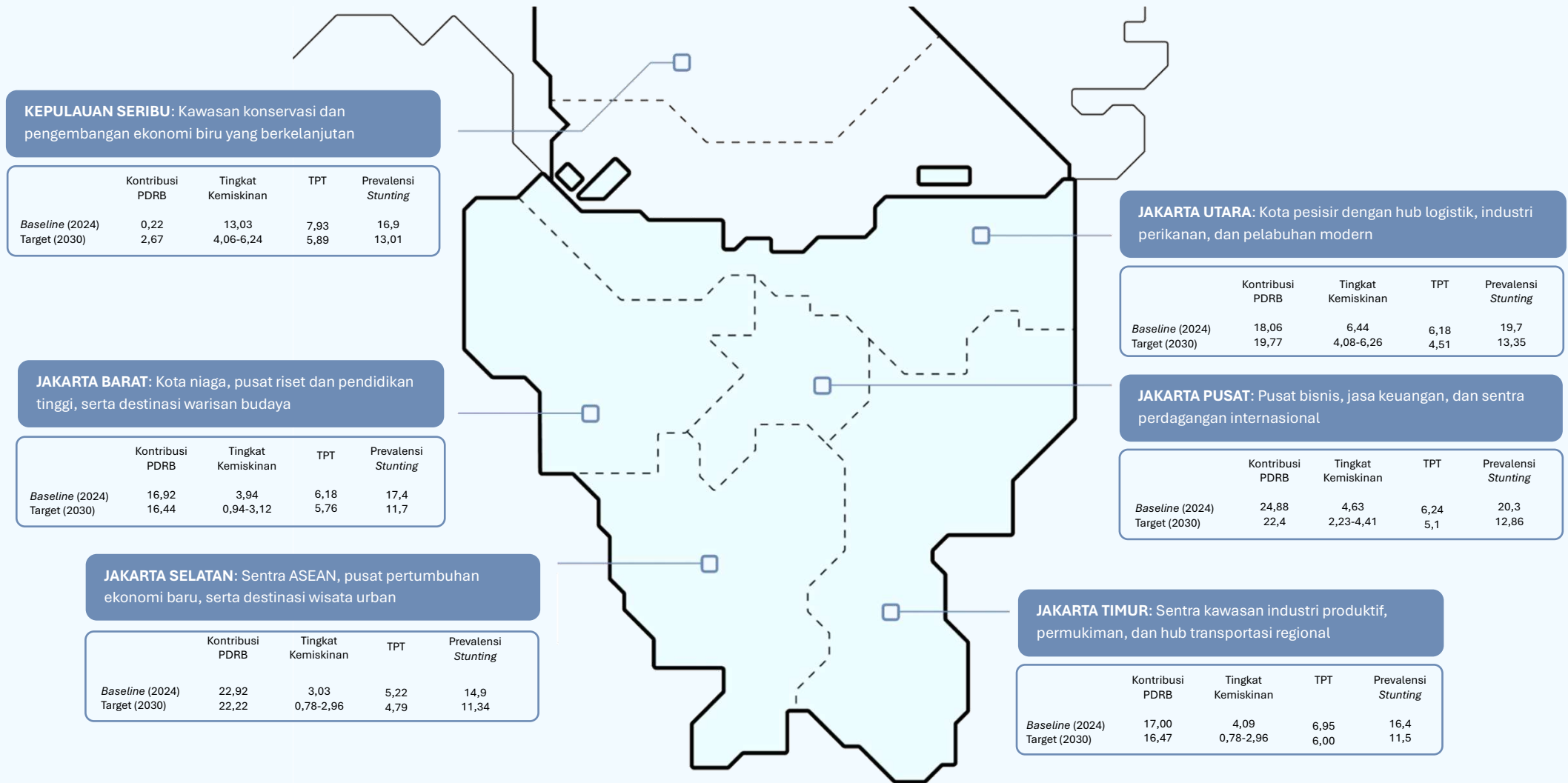


Gambar III.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi tahun 2024

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

Dengan memahami kondisi setiap kota dan kabupaten administrasi di Jakarta, pendekatan berbasis kewilayahan dalam RPJMD 2025-2029 memungkinkan optimalisasi sektor unggulan di setiap kawasan, seperti penguatan pusat ekonomi dan bisnis, konservasi kawasan pesisir, pengembangan sentra logistik, pengembangan destinasi wisata urban dan perairan berbasis sejarah dan kebudayaan, pengembangan permukiman layak, penguatan aktivitas ekonomi kreatif, dan pengembangan kawasan industri. Arah pembangunan wilayah mendukung efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur dengan menyesuaikan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan konteks setiap wilayah.

Penerapan konsep pembangunan wilayah dalam RPJMD 2025-2029 memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Walikota/Bupati, Perangkat Daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Tantangan dari sisi internal, eksternal, dan global perlu dipertimbangkan untuk menentukan prioritas penguatan di tiap wilayah. Arah pembangunan kewilayahan dapat menjadi landasan bagi Jakarta dalam menghadapi dinamika perkotaan di masa depan dan memastikan pertumbuhan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dirancang dengan menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan permasalahan dan potensi spesifik di setiap wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tema pembangunan dari masing-masing wilayah untuk periode 2025-2029 adalah:



Gambar III.14 Tematik Arah Pembangunan Kewilayahan dan Target Indikator Strategis Kota/Kabupaten Administrasi

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

Selain itu, rekomendasi kebijakan strategis wilayah juga dirumuskan berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS). Analisis LQ dan SS digunakan untuk menilai signifikansi suatu industri di suatu wilayah Kota dan Kabupaten dibandingkan dengan wilayah referensi yang lebih besar, yaitu Jakarta. Analisis LQ dan SS membandingkan proporsi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dalam suatu industri di tingkat wilayah dengan proporsi industri yang sama di tingkat provinsi. Analisis ini membantu mengidentifikasi keunggulan ataupun kelemahan ekonomi dalam sektor tertentu.

LQ digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor ekonomi bersifat basis ($LQ \geq 1$) atau non-basis ($LQ < 1$). Sektor basis berarti sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dan lebih dominan dibandingkan rata-rata wilayah lainnya, sedangkan sektor non-basis menunjukkan bahwa sektor tersebut kurang berkembang secara relatif. Sementara itu, SS mengukur perubahan daya saing sektor ekonomi berdasarkan pertumbuhan regional dan nasional, dengan $SS > 0$ menunjukkan sektor yang prospektif (berkembang lebih cepat dari rata-rata) dan $SS < 0$ menunjukkan sektor yang non-prospektif (berkembang lebih lambat atau menurun). Selain itu, semakin tinggi nilai SS suatu sektor, semakin besar kontribusi faktor lokal dalam mendorong pertumbuhannya. Dengan kata lain, sektor dengan nilai SS yang lebih tinggi mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan sektor dengan nilai SS yang mendekati nol, yang menunjukkan pertumbuhan yang hampir setara dengan rata-rata Jakarta secara keseluruhan.

Kombinasi hasil antara LQ dan SS mengidentifikasi sektor di setiap wilayah menjadi 4 kuadran, yaitu Unggulan ($LQ \geq 1$ dan SS positif), Potensial ($LQ \geq 1$ dan SS negatif), Berkembang ($LQ < 1$ dan SS positif), dan Tertinggal ($LQ < 1$ dan SS negatif). Sektor unggulan adalah sektor basis yang prospektif, menandakan sektor ini kuat secara lokal dan memiliki pertumbuhan yang baik. Sektor potensial adalah sektor basis yang non-prospektif, yang berarti sektor ini masih dominan tetapi mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor berkembang adalah sektor non-basis yang prospektif, menunjukkan potensi pertumbuhan meskipun belum menjadi sektor utama di wilayah tersebut. Terakhir, sektor tertinggal adalah sektor non-basis yang non-prospektif, yang berarti sektor ini tidak dominan dan juga mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dari rata-rata, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan ekonomi wilayah.

Tabel III.6 Pemetaan Hasil Analisis LQ dan SS

	SS > 0 (Prospektif)	SS < 0 (Non-Prospektif)
LQ ≥ 1 (Basis)	Unggulan	Potensial
LQ < 1 (Non-Basis)	Berkembang	Tertinggal

a. Jakarta Pusat

**Pusat Bisnis, Jasa Keuangan, dan Sentra Perdagangan Internasional****Permasalahan dan Potensi Wilayah**

Jakarta Pusat memiliki posisi yang sangat strategis, yang menjadikannya pusat pemerintahan dan pembangunan kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang RDTR Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Medan Merdeka menjadi Kawasan Khusus karena merupakan pusat pemerintahan dan budaya Jakarta. Di sekitar area ini terdapat berbagai bangunan penting seperti kantor pemerintah dan fasilitas budaya yang mengelilingi taman terbesar di Jakarta. Selain itu, kota ini juga memiliki pembagian pusat pelayanan administrasi. Pusat Pelayanan Kota berlokasi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, sementara Sub Pusat Pelayanan Kota ada di Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Salah satu tantangan yang dialami wilayah Jakarta Pusat dalam pengembangan wilayahnya adalah kesenjangan sosial yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang bertambah dari 4,51% pada tahun 2020 menjadi 4,63% per tahun 2024. Penyebab kemiskinan di Jakarta Pusat salah satunya didorong oleh tingginya kebutuhan biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat, terutama dari segi hunian. Banyak masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta lainnya ataupun kota lain di sekitar Jakarta namun bekerja di Jakarta Pusat yang berdampak pada isu lain seperti kemacetan, rendahnya kualitas udara dan kawasan kumuh padat penduduk. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah umumnya terjebak dalam sektor pekerjaan informal dan memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan layak dan berkelanjutan. Kondisi ketenagakerjaan yang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta Pusat mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan angka 10,97% menjadi 6,24% pada tahun 2024. Namun demikian, tren penurunan TPT ini tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan di Jakarta Pusat. Kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan harus lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Tabel III.7 Capaian Indikator Makro Jakarta Pusat

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia ¹	82,22	82,38	82,90	83,29	83,75
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹	-0,66	2,33	4,78	5,11	5,14
Kontribusi PDRB (%) ¹	25,15	24,99	24,76	24,78	24,88
Total PDRB (Triliun Rupiah) ¹	700,79	728,05	795,39	859,82	922,86
PDRB per kapita (ADHB, ribu rupiah) ¹	665.645	688.487	755.015	819.423	883.715
Prevalensi <i>stunting</i> ³	N/A	19,7	14,0	19,1	20,3
Tingkat Kemiskinan (%) ¹	4,51	4,94	4,90	4,68	4,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ¹	10,97	7,75	5,88	6,42	6,24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ²	N/A	50,23	48,06	48,29	48,03

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

² Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024

³ Survei Status Gizi Indonesia

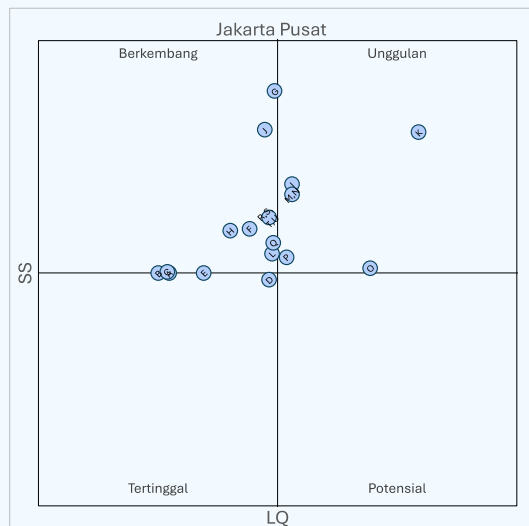
Salah satu sektor penopang perekonomian yaitu sektor informal yang tidak terlepas dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Idealnya, UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mencapai kemandirian ekonomi daerah dan didorong perkembangannya untuk menjadi bisnis dengan skala yang lebih besar sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Secara garis besar, UMKM di Jakarta menghadapi masalah utama berupa permodalan dan pemasaran. Ditambah lagi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan akses terhadap teknologi membuat UMKM sulit untuk meningkatkan jangkauan bisnisnya. Peningkatan pemberdayaan UMKM dapat mendukung potensi sektor ini menuju perekonomian yang mandiri dan inovatif serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka di wilayah Jakarta Pusat.

Jakarta Pusat juga menghadapi tantangan lingkungan berupa minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebagai kawasan pusat pemerintahan dan bisnis, penggunaan lahan yang mayoritas difungsikan untuk gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung hunian vertikal menyebabkan terbatasnya lahan untuk dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau. Kurangnya RTH saat ini, berdampak pada kualitas udara yang rendah, cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Pelestarian lingkungan diharapkan dapat merespons permasalahan terkait pemerataan ruang terbuka hijau, kualitas udara, serta aksesibilitas ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Upaya peningkatan ruang terbuka hijau perlu dioptimalkan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan.

Kepadatan penduduk Jakarta Pusat merupakan salah satu wilayah dengan angka yang tinggi dibandingkan Kota/Kabupaten Administrasi lain di Jakarta. Secara statistik, jumlah penduduk di Jakarta Pusat mencapai 1.057.270 orang pada tahun 2024 (BPS, Jakarta dalam Angka 2025). Kepadatan penduduk yang tinggi di Jakarta pusat juga memunculkan permasalahan lain, salah satunya adalah tingginya tingkat kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Frekuensi kebakaran di Jakarta Pusat mencapai 503 kejadian sepanjang tahun 2023–2024. Dugaan penyebab dari kebakaran kawasan permukiman padat penduduk disebabkan oleh hubungan arus pendek, gas, rokok dan penyebab lainnya (cuaca panas, kompor, korek api, dan petasan). Untuk itu, langkah-langkah mitigasi perlu dioptimalkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran yang diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana kebakaran yang layak, memadai, modern, terintegrasi serta *respond time* yang cepat.

Selain masalah kebakaran akibat kepadatan penduduk yang tinggi, Jakarta Pusat juga menghadapi isu populasi penduduk. Berdasarkan data BPS tahun 2020 dan 2025 serta proyeksi penduduk tahun 2030 dan 2035, jumlah penduduk produktif (15-64) akan semakin berkurang, sementara jumlah penduduk non produktif (0-14 dan 65+) akan semakin bertambah. Hal ini tentu saja berdampak pada angka ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi kependudukan yang seperti ini harus diwaspadai, misalnya terkait dengan munculnya isu-isu sosial dan ekonomi, sehingga perlu ditanggapi dengan pengembangan wilayah yang tepat dan penyediaan infrastruktur yang sesuai kebutuhan untuk menciptakan Jakarta Pusat yang layak huni.

Analisis LQ dan SS mendalami data PDRB dengan lebih komprehensif. Hasil menunjukkan bahwa Jakarta Pusat memiliki 5 sektor unggulan, yaitu 'Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum' (I), 'Jasa Perusahaan' (M,N), 'Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib' (O), dan 'Jasa Pendidikan' (P) yang berarti sektor-sektor ini memiliki kontribusi yang lebih tinggi di Jakarta Pusat dibandingkan provinsi DKI Jakarta dan mengalami pertumbuhan positif. Signifikansi tertinggi pada sektor unggulan di Jakarta Pusat bertumpu pada 'Jasa Keuangan dan Asuransi' (K). Sektor-sektor pada kuadran berkembang menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan rata-rata Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika dilihat dari grafik kuadran persebaran sektor, terdapat 2 sektor berkembang yang dapat dioptimalkan agar menjadi sektor unggulan yang kuat, yaitu 'Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor' (G) dan 'Informasi dan Komunikasi' (J), karena posisi SS yang tinggi dan mendekati ambang batas LQ. Di sisi lain, meskipun sektor 'Pengadaan Listrik dan Gas' (D) tergolong sebagai sektor tertinggal dan sektor 'Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang' (E) sebagai sektor berkembang, nilai SS sektor tersebut mendekati 0 yang menandakan bahwa sektor-sektor ini memiliki pertumbuhan yang tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan sektor Provinsi DKI Jakarta.



Kode	Lapangan Usaha	Kategori
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	Berkembang
B	Petambangan dan penggalian	-
C	Industri Pengolahan	Berkembang
D	Pengadaan listrik dan gas	Tertinggal
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	Berkembang
F	Konstruksi	Berkembang
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Berkembang
H	Transportasi dan pergudangan	Berkembang
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Unggulan
J	Informasi dan komunikasi	Berkembang
K	Jasa keuangan dan asuransi	Unggulan
L	Real Estat	Berkembang
M,N	Jasa Perusahaan	Unggulan
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	Unggulan
P	Jasa Pendidikan	Unggulan
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	Berkembang
R,S,T,U	Jasa lainnya	Berkembang

Gambar III.15 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Pusat

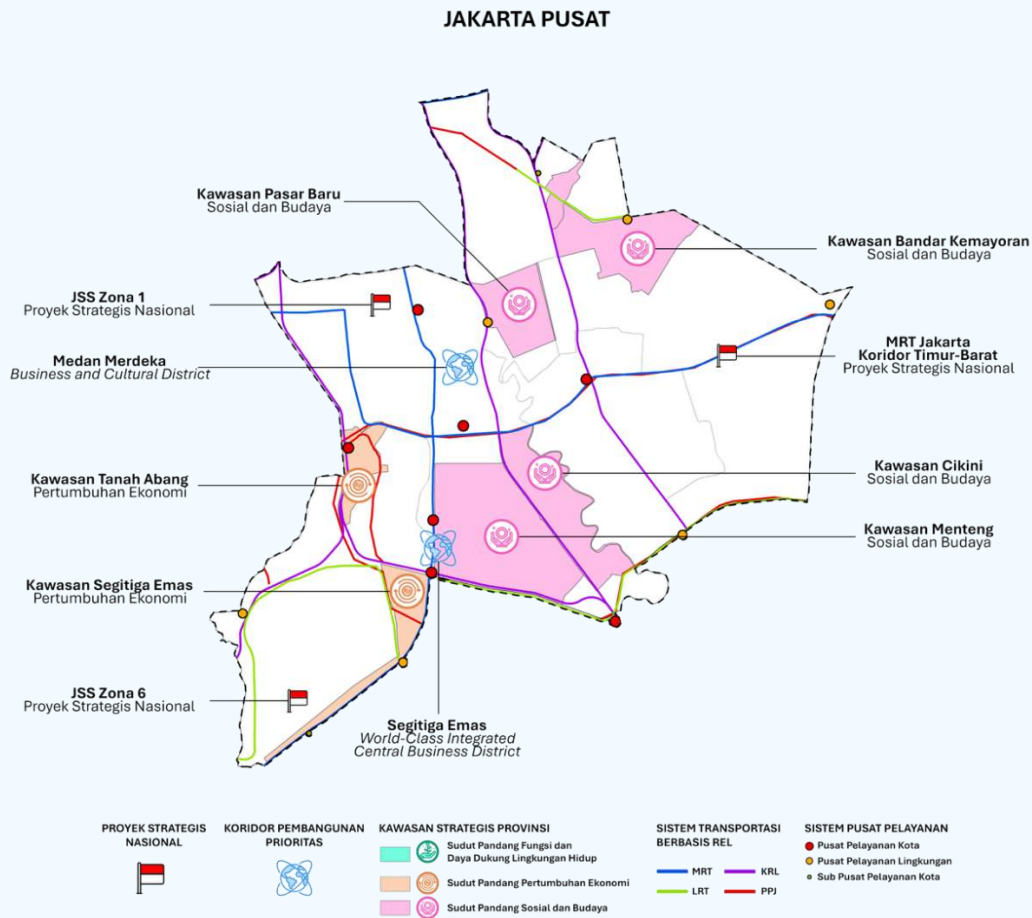
Sektor jasa menjadi tulang punggung ekonomi Jakarta Pusat. Berbagai perusahaan multinasional dan lokal beroperasi di daerah ini, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Kawasan bisnis seperti Sudirman dan Thamrin dipenuhi dengan gedung perkantoran yang terdiri dari berbagai perusahaan dari sektor keuangan, teknologi, dan layanan profesional lainnya. Selain itu, Kawasan Segitiga Emas, yang meliputi sebagian Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Kebayoran Baru, berperan sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global, menjadikan Jakarta Pusat sebagai pusat bisnis yang kompetitif. Sementara itu, Kawasan Tanah Abang dikenal sebagai pusat grosir dan perdagangan jasa berskala global. Sebagai salah satu sentra perdagangan terbesar di Asia Tenggara, kawasan ini memiliki peran penting dalam mendukung sektor perdagangan Jakarta Pusat. Dengan jaringan distribusi yang luas dan aktivitas perdagangan yang terus berkembang, kawasan ini menjadi daya tarik bagi para pelaku bisnis dari dalam maupun luar negeri.

Di samping itu, berdasarkan data PDRB 2024, Jakarta Pusat memiliki PDRB sebesar 922,86 triliun rupiah. Angka ini berkontribusi sekitar 24,88% dari PDRB DKI Jakarta sebagai wilayah dengan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Sektor keuangan dan asuransi di Jakarta Pusat menyumbang lebih dari setengah kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi DKI Jakarta, dengan banyak kantor pusat bank nasional dan internasional, termasuk Bank Indonesia yang terletak di kota ini.

Selain itu, sektor MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) berkembang pesat di Jakarta, menjadikannya tujuan utama bagi wisatawan mancanegara. Pada 2023, Jakarta menerima hampir dua juta wisatawan asing, dengan MICE menjadi salah satu faktor utama menarik minat mereka. Jakarta memiliki infrastruktur yang mendukung industri ini, seperti Jakarta Convention Center (JCC) dan hotel-hotel berbintang dengan fasilitas MICE. Tak hanya itu, Jakarta Pusat juga unggul dalam hal fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kota ini memiliki 37 rumah sakit dengan berbagai jenis fasilitas, termasuk rumah sakit tipe A, B, C, dan D. Rumah Sakit tipe A, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, RSUPN Cipto Mangunkusumo, dan RSPAD Gatot Subroto yang berfungsi sebagai pusat rujukan. Terdapat pula rumah sakit pendidikan dengan standar internasional yakni RS Gigi dan Mulut Universitas Indonesia.

Secara keseluruhan, Jakarta Pusat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan berbagai sektor yang saling mendukung. Dengan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur, mendukung UMKM, dan mengatasi tantangan yang ada, daerah ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, Jakarta Pusat berpotensi menjadi salah satu pusat ekonomi terkemuka di Asia Tenggara. Kegiatan perdagangan dan jasa di Jakarta Pusat juga cukup beragam, dari toko-toko kecil hingga pasar besar dan pusat perbelanjaan. Sektor perdagangan ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, dengan sektor ini menyumbang sekitar 160,41 triliun rupiah pada 2024. Kehadiran pusat-pusat perbelanjaan besar turut mendukung aktivitas ekonomi ini.

Kawasan Strategis Pembangunan Wilayah



Gambar III.16 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Pusat

Kawasan strategis provinsi yang berada di Jakarta Pusat terdiri dari 2 kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan 4 kawasan strategis sosial budaya, yaitu:

Kawasan Strategis dari sudut pandang Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta Pusat.

- ☐ Kawasan Tanah Abang dikembangkan sebagai pusat grosir dan perdagangan jasa berskala global melalui pembangunan fasilitas kebutuhan sarana tempat usaha dan penentuan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor informal dari berbagai jenis kegiatan perekonomian.
- ☐ Kawasan Segitiga Emas dikembangkan sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global yang meliputi sebagian Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Kebayoran Baru.

Kawasan Strategis dari sudut pandang Sosial Budaya di Jakarta Pusat.

- ☐ Kawasan Pasar Baru dikembangkan untuk merevitalisasi bangunan bersejarah dan pengembangan wisata perkotaan.
- ☐ Kawasan Bandar Kemayoran dikembangkan sebagai kawasan ekshibisi yang dirancang untuk penyelenggaraan acara pameran promosi produk dan jasa di Provinsi DKI Jakarta.
- ☐ Kawasan Cikini dikembangkan sebagai kawasan pusat kreatif dan kebudayaan khususnya di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan sekitarnya, pengemasan koridor Cikini – Gondangdia – Agus Salim/Sabang sebagai koridor pengembangan kegiatan pariwisata budaya perkotaan yang mengedepankan wisata kuliner, pertunjukan dan belanja.
- ☐ Kawasan Menteng dikembangkan untuk pemugaran bangunan bersejarah dan pelestarian konsep pengembangan kawasan permukiman taman, serta pusat budaya dan kesenian berskala internasional.

Koridor pembangunan yang dapat berkontribusi mengakselerasi pencapaian Kota Global di Jakarta Pusat antara lain adalah:

- Koridor Segitiga Emas sebagai pusat distrik bisnis terintegrasi berkelas dunia.
- Koridor Medan Merdeka sebagai distrik bisnis dan budaya.

Selain kawasan strategis di atas, terdapat juga kawasan terpadu yang memiliki histori penting, yaitu Pasar Senen dan Gambir. Pasar Senen adalah pusat kota utama di Jakarta yang terkenal dengan pasar tradisional dan blok perbelanjaannya. Stasiun-stasiun di kawasan ini menghubungkan angkutan lokal dan jarak jauh dengan pengembangan komersial dan *mixed use* yang semarak. Ke depan, Kawasan Pasar Senen akan menjadi pusat yang memadukan transit dan perdagangan dalam lingkup perkotaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, lokasi-lokasi yang dekat dengan simpul transportasi utama seperti Gambir, yang masih memiliki aset-aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan (BMN/BMD) memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang dinamis. Banyaknya pejalan kaki serta aksesibilitas yang baik menjadikan area ini dapat diubah menjadi zona komersial yang ramai, dilengkapi dengan gerai ritel, ruang perkantoran dan industri jasa. Pengembangan Kawasan Strategis tersebut didukung dengan rencana sistem pusat layanan dan sistem transportasi berbasis rel yang memadai. Adapun rencana sistem pusat layanan yang dikembangkan di Kota Jakarta Pusat sebagai berikut:

- Pusat pelayanan kota di Jakarta Pusat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota. Pusat pelayanan kota di Jakarta Pusat berpusat berada pada titik simpul transit yang berada di 6 (enam) pusat layanan, meliputi: Dukuh Atas di Kecamatan Tanah Abang, Bundaran HI di Kecamatan Menteng, Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang, Senen di Kecamatan Senen, Harmoni di Kecamatan Gambir, dan Kawasan Monas di Kecamatan Gambir dengan fungsi pusat pelayanan administrasi pemerintahan skala kota.
- Sub pusat pelayanan kota sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah di Jakarta Pusat di Rajawali di Kecamatan Sawah Besar.
- Pusat pelayanan lingkungan di Jakarta Pusat sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman di wilayah Jakarta Pusat berada di Juanda di Kecamatan Sawah Besar, Kemayoran di Kecamatan Kemayoran, Cempaka Mas di Kecamatan Kemayoran, dan Palmerah di Kecamatan Tanah Abang.

Dengan adanya rencana pengembangan kawasan strategis pembangunan dan sistem pusat layanan serta sistem transportasi berbasis rel tersebut diharapkan Kota Jakarta Pusat dapat meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta Pusat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan identitas sosial budaya Jakarta sebagai Kota Global.

Kebijakan Strategis Pembangunan Jakarta Pusat

Dalam rangka mencapai target perencanaan jangka menengah daerah dan mendorong pembangunan wilayah Jakarta Pusat, direkomendasikan kebijakan strategis yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Tabel III.8 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Pusat

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	Peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki pada Kawasan Segitiga Emas dan kawasan berorientasi transit (TOD)
	Pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan pada Kawasan Segitiga Emas
	Pengaturan dan penataan <i>complete street</i> pada Kawasan Cikini
	Peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalur pejalan kaki, fasilitas difabel, dan jalur sepeda yang lebih aman dan nyaman pada Kawasan Pasar Baru

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Pusat keuangan dan bisnis yang produktif	Peningkatan kapasitas tampung kawasan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa dan campuran pada Kawasan Segitiga Emas
	Penyediaan ruang untuk golongan usaha skala kecil, dan sektor informal pada Kawasan Segitiga Emas
	Peningkatan kemampuan pelayanan, manajemen, sistem jaringan komunikasi, sarana dan prasarana dalam memanfaatkan peluang ekonomi global serta kemampuan dan kepekaan mengenal iklim investasi yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional pada Kawasan Segitiga Emas
	Pembangunan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktivitas yang berlangsung pada Kawasan Tanah Abang
	Pembangunan fasilitas perdagangan dan/atau jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengembangan golongan usaha skala kecil dan sektor informal pada Kawasan Tanah Abang
	Penentuan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor formal dari berbagai jenis kegiatan perekonomian pada Kawasan Tanah Abang
	Pengembangan kawasan Pasar Senen sebagai Gerbang Transit Bisnis yang menghubungkan angkutan lokal dan jarak jauh, serta memadukan fungsi perdagangan, komersial, dan <i>mixed use</i> dalam lingkungan kota yang berkelanjutan
	Peningkatan konektivitas antar-moda transportasi umum di Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Dukuh Atas yang terintegrasi dengan perkantoran kelas atas dan ruang komersial, serta didukung dengan area ramah pejalan kaki
	Peningkatan konektivitas Gambir sebagai gerbang masuk wisatawan antar-kota melalui penyediaan moda transportasi umum dan jalur pedestrian yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya
Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Penyediaan ruang untuk ruang hijau dan ruang publik pada Kawasan Segitiga Emas
	Penyediaan IHBI kawasan pada Kawasan Segitiga Emas
	Penyediaan utilitas dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan energi dan gas, serta sarana dan prasarana lainnya pada Kawasan Segitiga Emas dan Kawasan Tanah Abang
	Pengembangan prasarana dan fasilitas pendukung serta pemenuhan kebutuhan Utilitas dasar di dalam dan sekitar kawasan pada Kawasan Bandar Kemayoran
	Pengembangan ruang publik pada kawasan strategis sebagai pusat kegiatan sosial budaya masyarakat tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan pada Kawasan Bandar Kemayoran
	Pengembangan kawasan dilakukan dengan prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu fungsi sebagai kawasan pemugaran pada Kawasan Menteng
	Pengembangan ruang publik termasuk ruang hijau biru yang inklusif untuk kegiatan sosial budaya masyarakat pada Kawasan Menteng dan Kawasan Waduk Melati
Kota cerdas berorientasi digital dan berbasis data	Penyediaan kelengkapan infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota (<i>tech commerce</i>) pada Kawasan Segitiga Emas
Destinasi wisata sejarah dan urban yang berwawasan budaya dan lingkungan	Pemugaran dan pelestarian objek dan kawasan cagar budaya pada Kawasan Menteng
	Revitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya dan bernilai sejarah pada Kawasan Pasar Baru dan bangunan cagar budaya di sekitarnya
	Pengembangan pusat pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan yang dapat mengakomodasi kepentingan pendidikan, penelitian, dan dokumentasi pada Kawasan Cikini
	Pengemasan koridor Cikini–Gondangdia–Agus Salim/Sabang sebagai koridor pengembangan kegiatan pariwisata budaya perkotaan dengan mengedepankan wisata kuliner, pertunjukan, dan belanja

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata perkotaan pada Kawasan Pasar Baru
Pusat kesenian dan edukasi kreatif	Pengembangan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan sekitarnya sebagai pusat pertunjukan, pameran, penelitian, pelatihan budaya, dan kesenian

b. Jakarta Utara



Kota Pesisir dengan Hub Logistik, Industri Perikanan, dan Pelabuhan Modern

Permasalahan dan Potensi Wilayah

Menurut catatan sejarah, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan cikal bakal perkembangan Kota Jakarta modern saat ini. Sejak abad ke-5, Bandar Pelabuhan yang terletak di muara Sungai Ciliwung daerah Angke telah menjadi pusat perdagangan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Bandar Pelabuhan saat itu memiliki peran sebagai pintu gerbang ekonomi di Asia Tenggara yang menarik pedagang dari berbagai belahan dunia, seperti Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Jejak sejarah ini dapat dijumpai di sejumlah lokasi, seperti Kampoeng Toegoe dan Pasar Ikan. Berangkat dari hal tersebut, maka pengembangan Kota Administrasi Jakarta Utara didorong untuk mengembalikan potensi kejayaannya sebagai pusat ekonomi, budaya, dan wisata sejarah yang layak untuk diapresiasi serta dirayakan.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebesar 14.721,2 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.832.032 orang pada tahun 2024 (BPS, Jakarta dalam Angka 2025) serta laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,67% per tahun selama periode 2020–2024. Pesatnya pertumbuhan penduduk ini berdampak pada berkurangnya ketersediaan lahan akibat semakin luasnya lahan terbangun, baik untuk hunian, usaha, maupun penggunaan lainnya. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang minim berpotensi meningkatkan risiko banjir serta rob. Masalah ini turut diperparah oleh penurunan muka tanah di sepanjang pesisir utara Jakarta karena pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan (*settlement*), dan/atau faktor alami (*natural subsidence factors*), seperti konsolidasi lapisan-lapisan tanah dan gaya-gaya tektonik. Selain rawan banjir dan rob, permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar di kawasan Jakarta Utara juga cenderung rentan terhadap bencana kebakaran.

Tabel III.9 Capaian Indikator Makro Jakarta Utara

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia ¹	81,04	81,26	81,56	81,85	82,13
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹	-6,22	6,02	5,85	4,17	4,29
Kontribusi PDRB (%) ¹	17,82	18,40	18,30	18,19	18,06
Total PDRB (Triliun Rupiah) ¹	496,66	535,98	587,79	631,14	670,17
PDRB per kapita (ADHB, ribu rupiah) ¹	279.723	299.603	326.693	349.893	369.121
Prevalensi <i>stunting</i> ³	N/A	20,4	18,5	19,8	19,7
Tingkat Kemiskinan (%) ¹	6,78	7,24	7,24	6,78	6,44

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ¹	11,79	9,84	8,04	7,05	6,18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ²	N/A	42.12	43.67	40.79	45.65

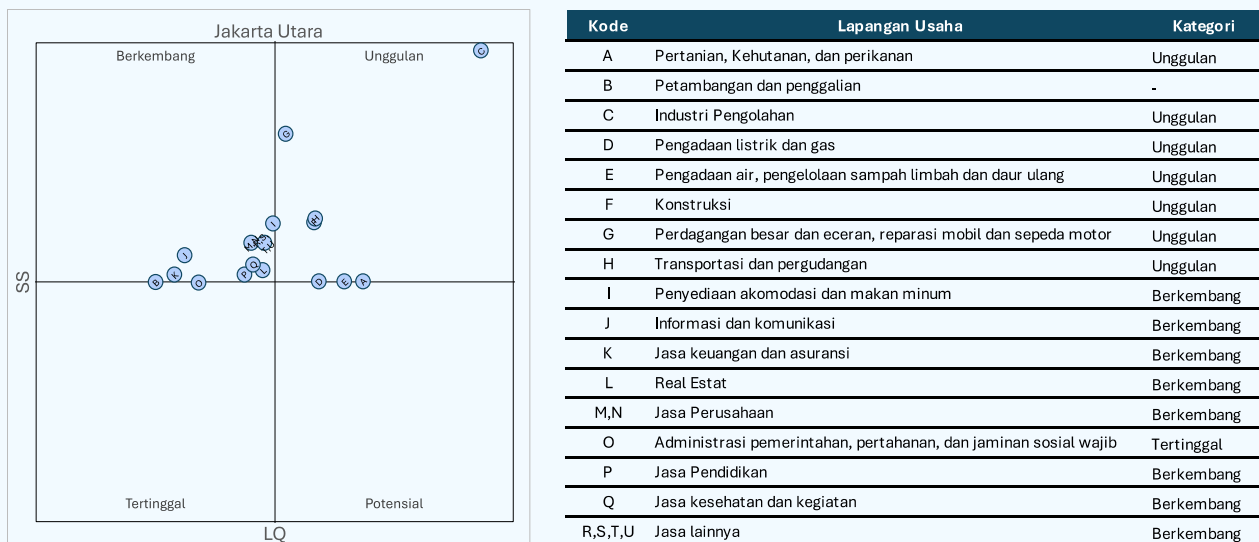
1 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2 Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024

3 Survei Status Gizi Indonesia

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat mengalami tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT Jakarta Utara sempat mencapai angka tertinggi, yaitu 11,79%. Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 telah menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -6,22% dan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Namun, seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi, TPT di Jakarta Utara berangsur-angsur pulih hingga mencapai 6,18% pada 2024. Tren penurunan TPT di Jakarta Utara menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek serapan tenaga kerja. Selain TPT, salah satu indikator makro lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemiskinan. Secara umum, tingkat kemiskinan di Kota Administrasi Utara selama tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi, tetapi cenderung menurun dalam 2 (dua) tahun terakhir. Persentase penduduk miskin di Jakarta Utara pada tahun 2020 berada pada angka 6,78%, kemudian menjadi 6,44% pada tahun 2024.

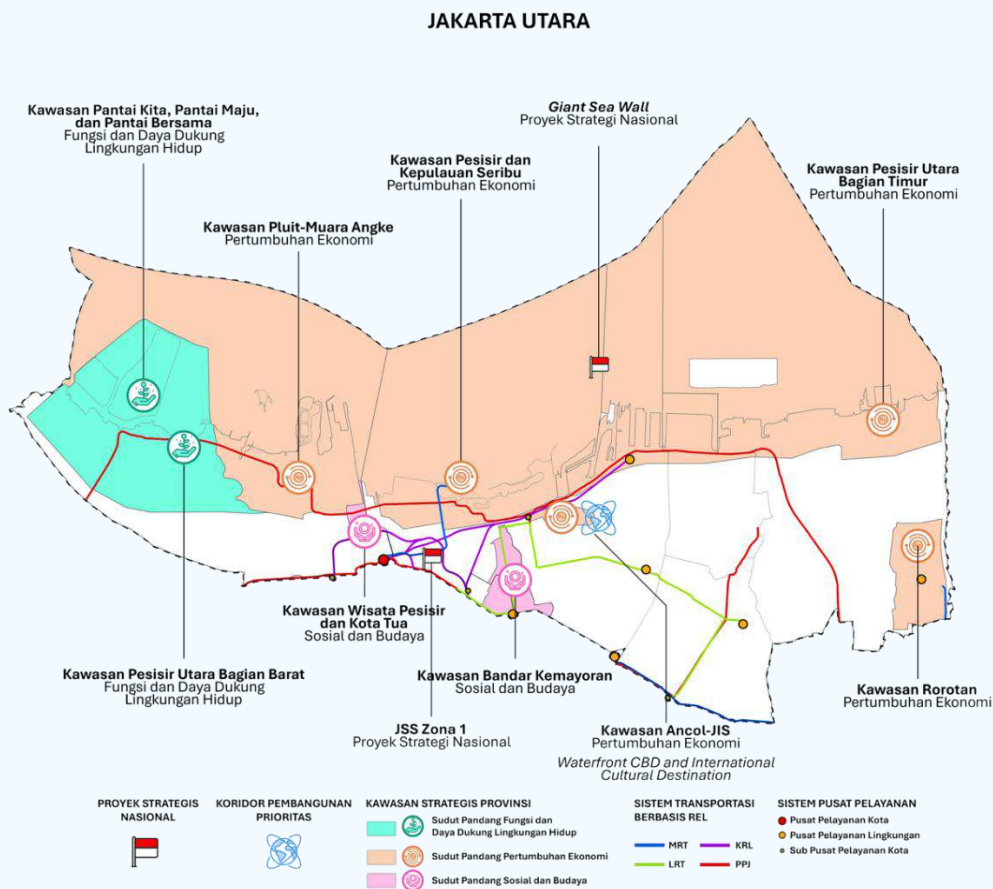
Dari segi ekonomi, Jakarta Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, terutama sebagai pusat industri, perdagangan, dan konstruksi. Potensi ini sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 yang mencapai Rp670.179,09 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari 3 (tiga) sektor unggulan, yaitu Industri Pengolahan (30,3%), Perdagangan Besar dan Eceran & Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,8%), dan Konstruksi (13,9%). Di samping itu, Jakarta Utara memiliki 11 pelabuhan yang tersebar di sepanjang pesisir, dengan pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pelabuhan di bawah kewenangan pusat, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Pelabuhan Utama, Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Marunda sebagai Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Kali Baru dan Pelabuhan Marunda sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Cakung Drain, Pangkalan Pasir Baru, Marina Ancol, Pelabuhan Mutiara, serta Muara Kamal sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal. Sedangkan pelabuhan yang berada di bawah kewenangan daerah adalah Pelabuhan Muara Angke yang berfungsi sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan dukungan infrastruktur maritim yang mumpuni tersebut, Kota Jakarta Utara memiliki prospek besar untuk terus berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan.



Gambar III. 17 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Utara

Di wilayah Jakarta Utara, sektor ‘Industri Pengolahan’ menjadi sektor unggulan yang sangat kuat dibandingkan dengan sektor unggulan lainnya seperti ‘Konstruksi’ (F), ‘Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor’ (G), dan ‘Transportasi dan Pergudangan’ (H). Di satu sisi, sektor ‘Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan’ (A), ‘Pengadaan Listrik dan Gas’ (D), dan ‘Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang’ (E) tergolong sebagai sektor unggulan, namun secara signifikansi masih terbilang rendah karena nilai SS yang mendekati 0. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor tersebut hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor di Provinsi DKI Jakarta. Hal serupa juga terjadi pada sektor ‘Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib’ (O) sebagai sektor tertinggal yang hanya sedikit lebih rendah dari pertumbuhan sektor tersebut dalam cakupan provinsi. Sektor berkembang lain yang dapat dioptimalkan adalah sektor ‘Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum’ (I) untuk ditingkatkan menjadi sektor unggulan karena nilai SS yang cukup tinggi dan nilai LQ yang telah mendekati 1.

Kawasan Strategis Pembangunan Wilayah



Gambar III. 18 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Utara

Kawasan strategis provinsi yang berada di Jakarta Utara terdiri dari 5 kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, 2 kawasan strategis sosial budaya, dan 2 kawasan strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu:

Kawasan Strategis dari sudut pandang Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta Utara.

- ☐ Kawasan Pluit-Muara Angke dikembangkan sebagai kawasan perikanan yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.
- ☐ Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu dikembangkan sebagai pusat pariwisata dan lumbung pangan berbasis lingkungan yang berkelanjutan.
- ☐ Kawasan Pesisir Utara Bagian Timur dikembangkan sebagai sentra industri, pergudangan dan perikanan berskala global.

- ❑ Kawasan Ancol-JIS dikembangkan sebagai pusat rekreasi, olahraga, dan ekshibisi.
- ❑ Kawasan Rorotan dikembangkan sebagai pusat hunian dan komersial terpadu yang terintegrasi dengan RTH berkualitas.

Kawasan Strategis dari sudut pandang Sosial Budaya di Jakarta Utara.

- ❑ Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua dikembangkan sebagai pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan meliputi Kota Tua, Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Rumah Si Pitung di Marunda, Masjid Al-Alam, Museum Bahari, Menara Syahbandar, Kampung Luar Batang, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor.
- ❑ Kawasan Bandar Kemayoran dikembangkan sebagai pusat ekshibisi.

Kawasan Strategis dari sudut pandang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Jakarta Utara.

- ❑ Kawasan Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama dikembangkan sebagai kawasan pesisir yang berorientasi pada konsep kota tepi laut (*waterfront city*) dan pariwisata berbasis lingkungan (*ecotourism*) dengan menyediakan ruang publik yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, Kawasan Pantai Bersama memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai kawasan perlindungan terhadap bencana dan perubahan iklim yang pengembangannya berorientasi pada konsep kota tepi laut (*waterfront city*) dengan tetap mempertahankan karakter kawasan pesisir dan memperhatikan kualitas lingkungan.
- ❑ Kawasan Pesisir Utara Bagian Barat dikembangkan sebagai kawasan sistem pengendalian banjir terpadu kawasan pesisir untuk meningkatkan ketahanan kawasan pesisir terhadap risiko bencana, serta mewujudkan pariwisata berbasis lingkungan (*ecotourism*) dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Koridor pembangunan yang dapat berkontribusi mengakselerasi pencapaian Kota Global di Jakarta Pusat, antara lain adalah:

- Kawasan Ancol-JIS sebagai pusat distrik bisnis tepi laut dan destinasi budaya internasional.

Pengembangan Kawasan Strategis tersebut didukung dengan rencana sistem pusat layanan dan sistem transportasi laut serta sistem transportasi berbasis rel yang saling terkoneksi dengan baik. Adapun rencana sistem pusat layanan yang dikembangkan di Kota Jakarta Utara sebagai berikut:

- Sub pusat pelayanan kota di Jakarta Utara sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah berada di Ancol di Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan sekitarnya.
- Sub pusat pelayanan lingkungan di Jakarta Utara sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman di Wilayah Jakarta Utara berada di Sunter di Kecamatan Tanjung Priok, Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok, Pegangsaan Dua di Kecamatan Kelapa Gading, dan Rorotan di Kecamatan Cilincing.

Kebijakan Strategis Pembangunan Jakarta Utara

Dalam rangka mencapai target perencanaan jangka menengah daerah dan mendorong pembangunan wilayah Jakarta Utara, direkomendasikan kebijakan strategis yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Tabel III.10 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Utara

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Pusat pelayanan logistik dan pergerakan barang yang terpadu	Pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang terpadu serta terhubung dengan jaringan distribusi logistik pada Kawasan Pesisir Utara bagian Timur
Destinasi wisata sejarah dan pesisir yang	Pengembangan sarana rekreasi untuk berupa wahana, <i>event</i> olahraga, <i>meeting</i> , <i>incentive</i> , <i>convention</i> , <i>exhibition</i> dan kegiatan edukasi serta konservasi yang memperhatikan aspek lingkungan pada Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
berwawasan budaya dan lingkungan	Pengembangan situs-situs cagar budaya sebagai kegiatan pariwisata budaya sejarah bertaraf internasional yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya, antara lain di Kawasan Wisata Pesisir serta Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa
	Pengembangan kegiatan pariwisata berbasis budaya perkotaan meliputi wisata kuliner, pasar tematik ikan, <i>meeting, incentive, convention, exhibition</i> , museum, serta hiburan dan rekreasi, antara lain di Kawasan Wisata Pesisir serta Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa
	Pengembangan sebagai kawasan inklusif untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi melalui penciptaan ekosistem usaha kecil menengah serta ekonomi kreatif masyarakat yang kondusif, antara lain di Kawasan Wisata Pesisir serta Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa
	Pengemasan secara terpadu objek-objek wisata dalam Kawasan Wisata Pesisir melalui penyediaan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan serta pengelolaan rute wisata, antara lain di Kawasan Wisata Pesisir serta Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa
	Penyediaan pantai publik diarahkan pada area tanah timbul, kawasan pantai, kawasan Ancol dan kawasan lainnya di sepanjang pesisir Pantai Utara Jakarta pada Kawasan Pesisir Utara
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	Pengintegrasian transportasi publik baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan pada Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium
	Penyediaan sarana parkir kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki yang memadai dan terintegrasi pada Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium
	Pengintegrasian transportasi publik baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan pada Kawasan Rorotan
	Penyediaan sarana parkir kendaraan bermotor dan jalur pejalan kaki yang memadai dan terintegrasi pada Kawasan Rorotan
	Peningkatan konektivitas dan Permeabilitas Kawasan, melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki pada Kawasan Rorotan
Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Integrasi kawasan dengan jaringan dan titik transit Angkutan Umum Massal pada Kawasan Pesisir Utara bagian Timur
	Pengembangan sistem transportasi dalam kawasan yang memperhatikan kebutuhan pengguna difabel pada Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium
	Penyediaan serta peningkatan kualitas fasilitas publik bagi pengunjung pada Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium
	Penyediaan serta peningkatan kualitas fasilitas publik pada Kawasan Stadion Kamal Muara yang mendukung kawasan permukiman
	Pengembangan RTH yang berkualitas dan terintegrasi dengan pengembangan kawasan pada Kawasan Rorotan
	Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan kawasan pada Kawasan Rorotan
	Pengembangan ruang pemberdayaan komunitas terpadu yang berkualitas dan terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Marunda
	Penyediaan Utilitas dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, serta jaringan energi dan gas pada Kawasan Rorotan
	Pembangunan dan pengembangan kawasan yang memperhatikan daya dukung Lingkungan Hidup dan aspek keberlanjutan pada Kawasan Pesisir Utara bagian Timur
	Pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana pada Kawasan Pesisir Utara bagian Timur
	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan melalui peningkatan ketersediaan dan layanan air bersih dan listrik, penataan sistem sungai dan drainase kawasan secara menyeluruh dan terpadu, serta peningkatan kualitas sistem persampahan dan limbah pada Kawasan Pluit-Muara Angke

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
	Pengembangan, penyediaan, dan optimalisasi fungsi ruang publik dan ruang hijau termasuk pantai publik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan, antara lain di Kawasan Wisata Pesisir serta Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa
	Pengembangan fasilitas publik meliputi pasar tematik ikan, prasarana ibadah, dermaga, dan prasarana umum lainnya pada Kawasan Wisata Pesisir serta Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa
	Prasarana ibadah, kantor pemerintah, dermaga dan prasarana umum lainnya pada Kawasan Pesisir Utara bagian Barat
	Penyediaan lahan kontribusi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari total luas area kotor yang telah menjadi daratan pada Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama
	Pengembangan Kawasan Pantai mengutamakan kemandirian dan tidak membebani daratan dalam hal penyediaan prasarana tata air, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, sistem pengerukan kanal, serta mengembangkan fasilitas publik pada Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama
Pengembangan ekosistem industri perikanan yang bernilai tambah	Pembangunan tempat tambat labuh kapal nelayan Kalibaru, Cilincing, dan Marunda
	Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan pada Kawasan Pesisir Utara bagian Timur
	Pengaturan spasial yang selaras dengan rantai komoditas pada sentra perikanan pada Kawasan Pesisir Utara bagian Timur
	Peningkatan penataan manajemen pelabuhan melalui pengadaan <i>standard operational procedure</i> alur pelayaran kapal perikanan, penataan dan pembangunan dermaga, penataan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan, penataan kawasan galangan kapal dan perbekalan, serta penambahan dan penataan kios pada Kawasan Pluit-Muara Angke
	Penataan kawasan industri dan pasar grosir perikanan pada Kawasan Pluit-Muara Angke
	Penataan akses kawasan melalui penataan akses jalan permukiman, jalan pelabuhan, industri, pasar grosir perikanan, dan wisata maritim pada Kawasan Pluit-Muara Angke
Kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau	Pengembangan pelabuhan diarahkan menuju pelabuhan ramah lingkungan (<i>greenport</i>) pada Kawasan Pesisir Utara bagian Barat
	Revitalisasi dan peremajaan kawasan hunian di sekitar Ancol-Jakarta International Stadium guna mendukung tujuan pengembangan kawasan pada Kawasan Ancol-Jakarta International Stadium
	Pengembangan kawasan hunian dan komersial yang memperhatikan daya dukung Lingkungan Hidup dan aspek berkelanjutan pada Kawasan Rorotan
	Penataan Kawasan Permukiman pada Kawasan Pluit-Muara Angke
Pembangunan tanggul pantai dan pengembangan kawasan pesisir yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim	Penyediaan perumahan sebagai upaya pemenuhan hunian layak huni dan terjangkau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi bencana pada Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama
	Pembangunan dan peningkatan kualitas tanggul rob pada Kawasan Pluit-Muara Angke sepanjang Kawasan Pesisir Utara
Wilayah pesisir sebagai kawasan konservasi dan edukasi dengan beragam aktivitas ekonomi	Pada area tanah timbul dan/atau area yang terbentuk sebagai akibat dari pembangunan tanggul pantai, dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang serta tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada Kawasan Pesisir Utara bagian Barat
	Pada kawasan daratan pesisir yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan intensitas rendah sampai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir sepanjang Kawasan Pesisir Utara, utamanya di bagian Barat
	Pada kawasan daratan pesisir yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah tetapi subur dan merupakan kawasan resapan air dapat dikembangkan sebagai perkebunan,

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
	agroindustri, pertanian, pariwisata dan hutan produksi sepanjang Kawasan Pesisir Utara, utamanya di Barat
	Pada area hutan bakau/ <i>mangrove</i> dapat dikembangkan untuk wisata <i>mangrove</i> dan/atau kegiatan yang bersifat pendidikan dan penelitian tetap mempertahankan kelestarian ekosistem <i>mangrove</i> sepanjang Kawasan Pesisir Utara, utamanya di bagian Barat
	Pemanfaatan sempadan pantai wajib memperhatikan kepentingan konservasi lingkungan pesisir dan memastikan ketersediaan ruang bagi pembangunan tanggul pantai dengan desain yang memperhatikan kepentingan nelayan sepanjang Kawasan Pesisir Utara, utamanya di bagian Barat

c. Jakarta Barat



Kota Niaga, Pusat Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Destinasi Warisan Budaya

Permasalahan dan Potensi Wilayah

Jakarta Barat menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang ditemukan di Jakarta Barat menyangkut hal-hal terkait kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Secara statistik, jumlah penduduk di Jakarta Barat mencapai 2.556.752 orang pada tahun 2024 (BPS, Jakarta dalam Angka 2025). Permasalahan sosial-ekonomi ditandai dengan tingginya angka tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Meskipun wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan industri, masih banyak warga yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Kawasan permukiman kumuh masih perlu perhatian khusus, terutama di sekitar bantaran sungai dan lahan-lahan tidak resmi. Masalah lain mencakup rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, sehingga banyak penduduk usia produktif yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Jakarta Barat adalah kemiskinan yang menyentuh angka 4,25% pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun dan mencapai 3,94% pada tahun 2024. Salah satu upaya dari Pemerintah adalah memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah maupun dengan mitra pembangunan dalam rangka pemberian intervensi program kepada penduduk miskin.

Tabel III.11 Capaian Indikator Makro Jakarta Barat

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia ¹	82,33	82,70	83,43	83,85	84,40
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹	-0,86	3,61	5,50	5,30	5,27
Kontribusi PDRB (%) ¹	16,83	16,95	16,84	16,88	16,92
Total PDRB (Triliun Rupiah) ¹	469,05	493,81	540,75	585,46	627,87
PDRB per kapita (ADHB, ribu rupiah) ¹	192.975	201.829	219.934	237.025	253.217
Prevalensi <i>stunting</i> ³	N/A	17,6	15,2	17,1	17,4

Tingkat Kemiskinan (%) ¹	4,25	4,31	4,22	4,09	3,94
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ¹	12,27	9,06	7,10	6,39	6,18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ²	57,88	48,35	46,70	46,84	47,15

1 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2 Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024

3 Survei Status Gizi Indonesia

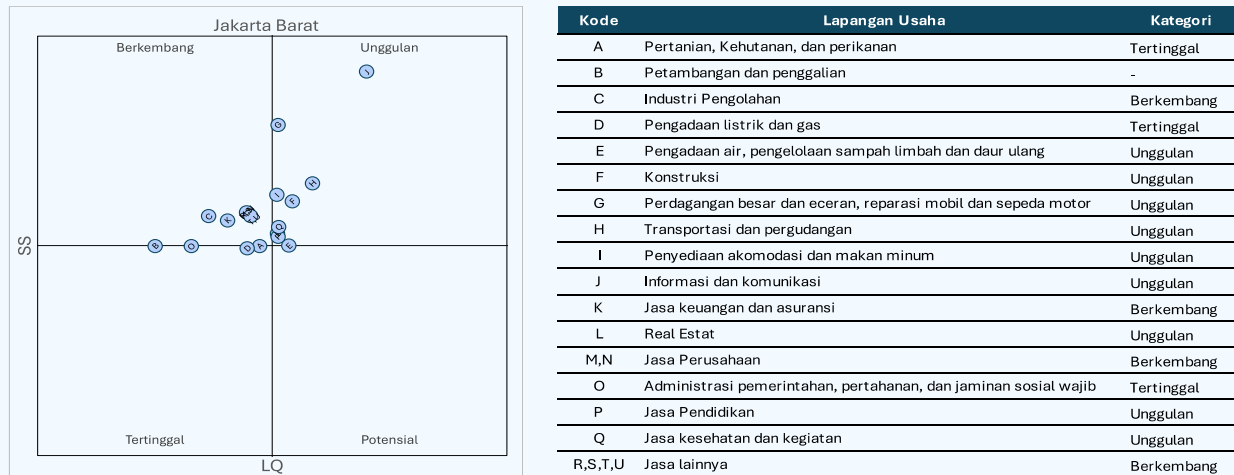
Tantangan lain Jakarta Barat dalam pengembangan wilayahnya adalah kasus kebakaran di wilayah padat penduduk. Berdasarkan data Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat, jumlah kasus kebakaran menunjukkan angka yang fluktuatif selama 5 tahun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 tercatat 333 kasus yang meningkat menjadi 482 kasus kebakaran di tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui sosialisasi pencegahan kebakaran, perekrutan dan pembinaan relawan kebakaran, pembangunan hidran mandiri di lingkungan padat penduduk dan rawan kebakaran, pemberian APAR kepada masyarakat, pembangunan pos pemadam kebakaran, serta membangun kesadaran masyarakat untuk saling menjaga dan mendukung pencegahan kebakaran.

Selain itu, Jakarta Barat merupakan wilayah penghubung pergerakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, khususnya dari wilayah Banten dan Tangerang ke Jakarta dan sebaliknya. Dengan kapasitas jalan yang belum ideal dan mobilitas masyarakat yang tinggi dengan penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di berbagai titik lokasi terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, perilaku berkendara masyarakat yang belum baik, maraknya parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) di badan jalan, penyempitan pada beberapa ruas jalan, serta ketersediaan transportasi umum massal yang belum efisien dan terintegrasi menjadi faktor yang memperparah kemacetan. Sebagian besar titik kemacetan berada di sekitar lokasi sekolah, perkantoran, pasar, dan pusat-pusat kegiatan lainnya. Administrasi pemerintahan di Jakarta Barat juga masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pelayanan publik. Pengembangan sistem administrasi pemerintahan di Jakarta Barat dapat didorong melalui beberapa aspek, seperti digitalisasi layanan, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta transparansi dan partisipasi publik. Sistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan partisipatif dapat mendorong kota yang lebih efektif dalam melayani kebutuhan warganya serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

Di sisi lain, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jakarta Barat pada tahun 2024 adalah sekitar 47,15. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya, menunjukkan perlunya pengembangan dan pengelolaan yang lebih baik. Penghijauan urban dan implementasi kebijakan berbasis keberlanjutan menjadi prioritas untuk meningkatkan keseimbangan ekologi, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kualitas lingkungan akibat minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pencemaran udara dan air yang cukup tinggi. Banjir dan kemacetan juga masih menjadi permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan. Kepadatan penduduk yang tinggi dan pesatnya pertumbuhan kawasan industri serta perdagangan menyebabkan berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya polusi dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor.

Saat ini, terdapat 19 titik rawan genangan/banjir berulang di Jakarta Barat. Penyebab genangan ini adalah topografi sebagian Jakarta Barat yang merupakan daerah dataran rendah atau cekungan, kapasitas drainase yang belum ideal, pendangkalan/penyempitan sungai, serta masih adanya endapan lumpur dan sampah pada saluran. Hal ini merupakan tantangan bagi Jakarta Barat, khususnya pada saat curah hujan tinggi. Untuk wilayah yang berbatasan dengan daerah lain, seperti Kota Tangerang, penanganan banjir membutuhkan koordinasi dan kerja sama lebih intensif.

Menurut kategorisasi analisis LQ SS, wilayah Jakarta Barat memiliki sektor unggulan yang paling banyak dengan jumlah total 9 sektor unggulan dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya. Dari 9 sektor tersebut, sektor unggulan dipimpin oleh sektor 'Informasi dan Komunikasi (J) dan disusul oleh sektor 'Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor' (G) dan sektor 'Transportasi dan Pergudangan' (H). Wilayah Jakarta Barat yang memiliki banyak sektor unggulan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan meskipun kontribusi PDRB Jakarta Barat di tahun 2024 hanya sekitar 16,92%.



Gambar III.19 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Barat

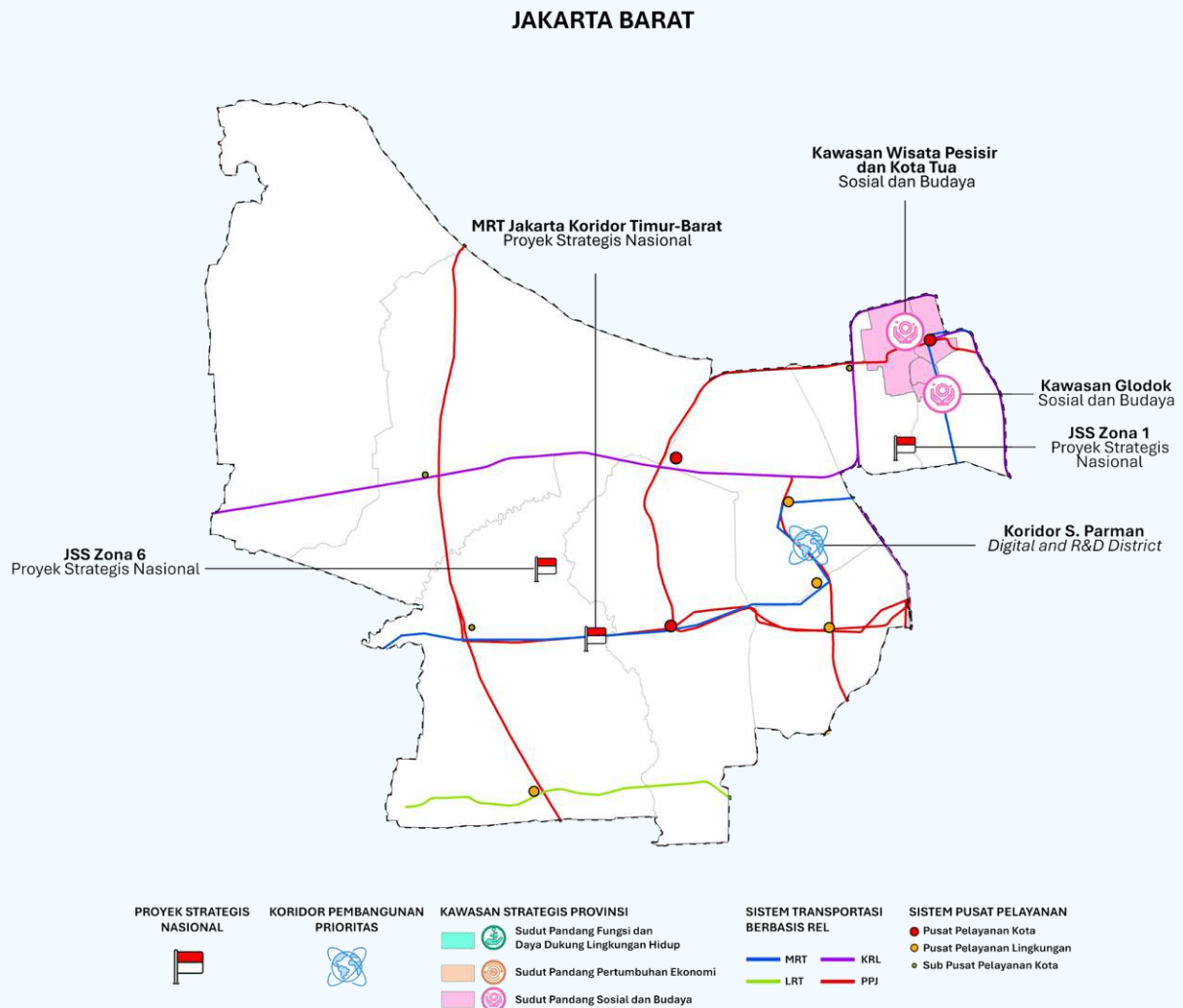
Jakarta Barat memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian DKI Jakarta, dengan potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa di Jakarta Barat cukup besar, yaitu sekitar 20% dari total luas wilayah lahan perdagangan dan jasa Provinsi DKI Jakarta. Hal ini turut diperkuat dengan kontribusi ekonomi Jakarta Barat pada sektor ‘Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor’ (G) mencapai 19,73% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Barat pada tahun 2024, menggambarkan peran strategis sektor perdagangan di Jakarta Barat dalam mendukung aktivitas ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didukung oleh keberadaan sejumlah kawasan tersier yang telah berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, seperti Kawasan Lokasari-Mangga Besar, Rawa Belong, Asem Reges, Pasar Cengkareng, dan Tanjung Duren. Kawasan-kawasan ini, dengan karakteristik dan fungsi yang beragam, menunjukkan keunggulan kompetitif yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan sektor bisnis dan jasa di Jakarta Barat akan terbantu dengan pengembangan koridor barat Jakarta. Salah satu faktor yang mendukung hal tersebut adalah pembangunan MRT fase III lintas Timur-Barat. Potensi ini perlu direspons dengan mulai memfokuskan pembangunan kawasan berorientasi transit yang akan menjadi titik-titik simpul moda transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang aman dan nyaman. Penataan kawasan titik simpul antar moda juga perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek inklusif dan kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus. Perekonomian Jakarta Barat didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa yang menyumbang hampir 20% dari total perekonomian kota. Salah satu potensi penyumbang terbesar pada sektor perdagangan Jakarta Barat adalah keberadaan Pasar Bunga Rawa Belong yang merupakan salah satu pasar bunga terbesar di Asia Tenggara berskala internasional dengan omset berkisar sekitar 15-20 milyar per bulan. Selain itu, kawasan pergudangan di Kecamatan Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan, Kembangan, dan Tambora memiliki luas 853,42 Ha atau setara sekitar 6,59% dari luas wilayah Jakarta Barat turut memperkuat pertumbuhan ekonomi kota. Pada sektor jasa, Jakarta Barat memiliki kawasan wisata yang menjadi daya tarik global, yaitu Kawasan Kota Tua. Museum Sejarah Jakarta (Fatahillah) di kawasan Kota Tua menjadi destinasi favorit ke-5 di Jakarta yang dikunjungi wisatawan lokal maupun internasional, dengan 542.554 kunjungan (BPS 2022). Hal ini menempatkan Jakarta Barat sebagai kota dengan jumlah usaha akomodasi terbanyak dan tertinggi kedua di Jakarta, yaitu sebanyak 135 usaha (BPS 2023). Selain itu, Jakarta Barat juga memiliki Sentra Primer Barat yang berpotensi dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru mengingat pada kawasan tersebut terdapat beberapa pusat perbelanjaan besar, pusat kuliner malam, rumah sakit, dan pusat pemerintahan kota, serta akses jalan tol.

Keunggulan lain Jakarta Barat adalah wilayah yang memiliki beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul. Universitas-universitas tersebut memiliki akreditasi yang baik, peringkat yang tinggi, dan lokasi yang berdekatan sehingga berpotensi menciptakan kluster riset dan pendidikan tinggi beserta ekosistem pendukungnya. Selain itu, Jakarta Barat juga merupakan pusat vital bagi sektor pariwisata. Beberapa lokasi di Jakarta Barat dapat dikembangkan dengan mengedepankan nilai-nilai sejarah dan lingkungan sebagai destinasi wisata urban. Titik-titik strategis tersebut mencakup Glodok Chinatown Market, Pasar Petak Sembilan, Vihara Dharma Jaya Toasebio dan Vihara Dharma Bhakti. Perayaan Imlek, Cap Go Meh, pengobatan tradisional Tionghoa, dan kuliner khas masih dilestarikan oleh masyarakat setempat dan menjadikan Glodok sebagai

"museum hidup" budaya Tionghoa. Kawasan Kota Tua, selain menjadi destinasi budaya, juga menjadi pusat industri seni kreatif yang mengintegrasikan seni dan bisnis dalam satu ekosistem. Beragamnya komunitas di Kota Tua juga menjadi ruang kolaboratif bagi pelaku ekonomi kreatif yang menarik wisatawan lokal maupun internasional. Potensi ini dapat meningkatkan diversifikasi ekonomi di Jakarta Barat seperti ekonomi kreatif dan kebudayaan sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan daya tahan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kawasan Strategis Pembangunan Wilayah



Gambar III.20 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Barat

Kawasan strategis provinsi yang berada di Jakarta Barat terdiri dari 2 kawasan strategis sosial budaya, yaitu:

Kawasan Strategis dari sudut pandang Sosial Budaya di Jakarta Barat.

- ☐ Kawasan Wisata Kota Tua dikembangkan sebagai pariwisata berbasis budaya sejarah dan budaya perkotaan.
- ☐ Kawasan Glodok dikembangkan sebagai pusat wisata urban melalui pengembangan Glodok *Chinatown Market*, Pasar Petak Sembilan, Vihara Dharma Jaya Toasebio dan Vihara Dharma Bhakti.

Koridor pembangunan yang dapat berkontribusi mengakselerasi pencapaian Kota Global di Jakarta Barat antara lain adalah:

- ☐ Koridor S. Parman sebagai pusat digital serta distrik riset dan pengembangan.

Pengembangan Kawasan Strategis di Jakarta Barat didukung dengan rencana sistem pusat layanan dan sistem transportasi berbasis rel yang memadai. Adapun rencana sistem pusat layanan yang dikembangkan di Kota Jakarta Barat sebagai berikut:

- Pusat pelayanan kota di Jakarta Barat berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota. Pusat pelayanan kota di Jakarta Barat berpusat berada pada titik simpul transit yang berada di 3 pusat layanan meliputi: Pesing di Kecamatan Grogol Petamburan, Kebon Jeruk di Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kawasan Kota di Kecamatan Taman Sari.
- Sub pusat pelayanan kota di Jakarta Barat sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah berada di Angke di Kecamatan Tambora pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan sekitarnya, Sentra Primer Barat di Kecamatan Kembangan, dan Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng.
- Sub pusat pelayanan lingkungan di Jakarta Barat sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman di Wilayah Jakarta Barat berada di Joglo di Kecamatan Kembangan, Tanjung Duren di Kecamatan Grogol Petamburan, Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan, dan Slipi di Kecamatan Palmerah.

Kebijakan Strategis Pembangunan Jakarta Barat

Dalam rangka mencapai target perencanaan jangka menengah daerah dan mendorong pembangunan wilayah Jakarta Barat, direkomendasikan kebijakan strategis yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Tabel III.12 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Barat

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Destinasi wisata sejarah dan urban yang berwawasan budaya dan lingkungan	Pengembangan Glodok Chinatown Market, Pasar Petak Sembilan, Vihara Dharma Jaya Toasebio dan Vihara Dharma Bhakti sebagai atraksi wisata urban
	Pengembangan kegiatan pariwisata berbasis kewilayahan dalam suatu konsep tematik (Religi, Sosial Budaya, Edukasi) pada kawasan Kota Tua dan kawasan Glodok
	Pengembangan kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Pariwisata dengan tetap menjaga mutu kawasan cagar budaya pada kawasan Kota Tua dan kawasan Glodok
	Optimalisasi ruang untuk kegiatan budaya urban dan pariwisata kuliner, seni, museum, pameran, teater/pementasan, dan ruang kota pada kawasan Kota Tua
	Pengemasan objek-objek budaya dan elemen pendukungnya secara terpadu pada kawasan Kota Tua
	Pengembangan situs-situs cagar budaya sebagai kegiatan pariwisata budaya sejarah bertaraf internasional yang berkelanjutan dengan tetap memerhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya pada kawasan Kota Tua
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	Peningkatan kualitas moda transportasi umum menuju dan dalam kawasan pada Kawasan Glodok
	Revitalisasi kawasan melalui revitalisasi bangunan dan penataan jalur pejalan kaki pada Kawasan Glodok
	Pengembangan Kawasan Perkantoran, perdagangan dan jasa yang terhubung dengan jaringan angkutan umum pada kawasan Glodok
	Pengintegrasian kawasan ekonomi dengan jaringan dan titik transit angkutan umum massal pada kawasan Glodok
	Peningkatan jalur pejalan kaki pada kawasan Pasar Bunga Rawa Belong
	Peningkatan aksesibilitas melalui integrasi transportasi publik dari dan ke Pasar Bunga Rawa Belong
Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana umum untuk menunjang fungsi kawasan pada Kawasan Glodok
	Pengembangan fasilitas pendukung Kawasan Perkantoran serta perdagangan dan jasa pada kawasan Glodok

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
	Pengembangan sarana rekreasi dan wisata di kawasan Kota Tua dan kawasan Glodok
	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan Pasar Bunga Rawa Belong
	Revitalisasi kawasan Pasar Bunga Rawa Belong
	Revitalisasi kawasan dengan tetap memperhatikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada Kawasan Hutan Kota Srengseng
Kota cerdas berorientasi digital dan berbasis data	Digitalisasi dan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi dan internet untuk membangun narasi kawasan pada Kawasan Glodok
	Pengembangan inovasi teknologi dalam mendukung pariwisata berbasis pengalaman pada kawasan Kota Tua
Pusat pelayanan logistik dan pergerakan barang yang terpadu	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas logistik di Kawasan Pergudangan Cengkareng dan Kalideres
	Pengembangan Kawasan Pergudangan Cengkareng dan Kalideres yang terhubung dengan jaringan angkutan umum
	Mendorong tumbuhnya pergudangan baru di Kawasan Pergudangan Cengkareng dan Kalideres
Promosi dan edukasi kreatif	Penguatan promosi kawasan dan komoditi Pasar Bunga Rawa Belong melalui pengembangan seni kreatif dan edukasi
Pusat Riset dan Pendidikan Tinggi	Mendorong tumbuhnya aktivitas riset/penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan Kota Jakarta
	Meningkatkan kerja sama dan daya saing perguruan tinggi unggulan di wilayah Jakarta Barat
	Meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan peringkat dan akreditasi perguruan tinggi

d. Jakarta Selatan



Sentra ASEAN, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, serta Destinasi Wisata Urban

Permasalahan dan Potensi Wilayah

Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki karakteristik unik sebagai pusat bisnis, permukiman elite, serta ruang hijau yang cukup luas dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa Kawasan Bisnis, di antaranya kawasan Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan TB Simatupang yang menjadi lokasi perkantoran. Selain itu, wilayah ini juga memiliki banyak pusat perbelanjaan dan hiburan seperti Blok M, Kemang, dan Pondok Indah, yang menjadi destinasi bagi masyarakat untuk berbagai aktivitas komersial dan rekreasi. Jakarta Selatan juga memiliki beberapa kawasan potensial yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) seperti Lebak Bulus dan Manggarai yang terhubung dengan jaringan angkutan umum massal dengan kapasitas layanan dan frekuensi yang tinggi serta dapat menjadi titik simpul transit antar moda yang melayani warga Jakarta dan area sekitarnya.

Salah satu permasalahan yang sering muncul di Jakarta Selatan adalah kemacetan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami penyempitan dan tingginya mobilitas kendaraan pribadi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya, seperti Depok dan Tangerang Selatan. Ditambah lagi, menurut data Badan Pusat Statistik Jakarta (Jakarta dalam Angka 2025), jumlah penduduk di Jakarta Selatan mencapai 2.331.411 orang pada tahun 2024.

Tingkat kemiskinan di Jakarta Selatan mengalami fluktuasi dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,43% dan mengalami tren penurunan yang konsisten hingga mencapai 3,03% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih baik dan selaras dengan angka tingkat pengangguran terbuka yang juga menunjukkan tren menurun setelah pandemi. Bermula dari 10,79% pada 2020, tingkat pengangguran berhasil turun hingga di angka 5,22% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kesempatan kerja pada wilayah Jakarta Selatan. Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut berperan dalam memperbaiki daya saing tenaga kerja di Jakarta Selatan. Secara keseluruhan, tren positif ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Tabel III.13 Capaian Indikator Makro Jakarta Selatan

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia ¹	85,40	85,58	85,87	86,71	87,57
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹	-0,49	2,39	5,24	5,32	5,17
Kontribusi PDRB (%) ¹	23,10	22,95	22,75	22,84	22,92
Total PDRB (triliun rupiah) ¹	643,56	668,38	730,69	792,33	850,29
PDRB per kapita (ADHB, ribu rupiah) ¹	289.552	299.398	327.041	354.415	381.187
Prevalensi <i>stunting</i> ³	N/A	15,7	11,9	16,6	14,9
Tingkat Kemiskinan (%) ¹	3,43	3,56	3,52	3,10	3,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ¹	10,79	7,33	5,63	5,37	5,22
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ²	N/A	51,09	51,11	51,73	51,15
Indeks Akses Keuangan Daerah			6,33	7,25	7,13

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

² Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024

³ Survei Status Gizi Indonesia

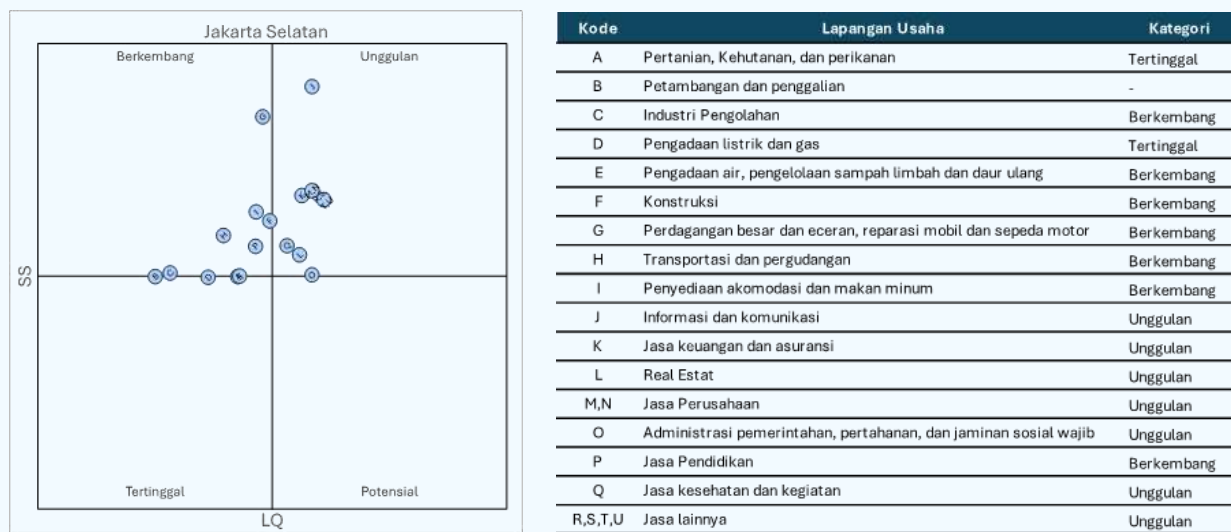
Di sisi lain, ketimpangan sosial di Jakarta Selatan pun perlu perhatian lebih. Jakarta Selatan memiliki banyak kawasan elite seperti Pondok Indah, Kemang, dan Cipete namun masih terdapat titik-titik permukiman padat dan kawasan kumuh, seperti di daerah Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Tebet. Masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, akses pendidikan yang berkualitas, serta hunian yang terjangkau.

Pertumbuhan perekonomian dan daya saing masyarakat di Jakarta Selatan tergambarkan juga dari nilai kontribusi PDRB Jakarta Selatan terhadap Jakarta yang terbilang cukup besar dengan 22,92%. Kawasan Blok M sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi digadangkan akan menjadi sentra diplomatik Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang berorientasi transit beserta fasilitas penunjang kesekretariatan ASEAN. Pengembangan Kawasan Blok M mencakup aspek bisnis dan investasi serta sistem logistik berskala global. Ditambah lagi, Kawasan Blok M – Cakra Selaras Wahana (CSW) difokuskan untuk dikembangkan sebagai salah satu titik simpul transit Jakarta.

Selain itu, dengan adanya koridor Blok M – CSW – Senopati – Wolter Monginsidi – Kemang – Cipete dan Kawasan Kebayoran Baru yang aktif dan berkembang pesat, sangat mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan wisata urban. Pariwisata perkotaan yang berbasis budaya dan sejarah dengan keunggulan wisata kuliner, perbelanjaan, dan hiburan dapat ditingkatkan untuk mendorong Kota Jakarta Selatan sebagai pusat ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta.

Ditambah lagi, data dari BPS Provinsi DKI Jakarta 2023 menunjukkan layanan jaringan 5G sebagai infrastruktur pendukung sektor informasi dan komunikasi telah mencakup 22% dari keseluruhan wilayah Jakarta yang sebagian besar dari cakupan

jaringan 5G tersebut berada di wilayah Jakarta Selatan, khususnya area Kebayoran Baru. Hal ini menjadi potensi besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota (*tech commerce*) di Kawasan Kebayoran Baru, Kawasan Mega Kuningan, dan Kawasan Rasuna Epicentrum. Berdasarkan analisis LQ SS, sektor ‘Informasi dan Komunikasi’ (J) di Jakarta Selatan pun termasuk sebagai sektor unggulan yang paling kuat, serupa dengan wilayah Jakarta Barat. Selain itu, sama halnya seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan juga unggul dalam sektor ‘Jasa Keuangan dan Asuransi’ (K) dan ‘Jasa Perusahaan’ (M,N) serta sektor ‘Jasa Lainnya’ (R, S,T,U) yang mengindikasikan kuatnya sektor bisnis di wilayah Jakarta Selatan. Dilihat dari posisinya dalam grafik kuadran, Sektor ‘Konstruksi’ (F) dan ‘Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor’ (G) sebagai sektor berkembang memiliki potensi untuk ditingkatkan agar menjadi sektor unggulan karena signifikansi LQ yang mendekati 1. Artinya, kedua sektor tersebut dapat menjadi sektor basis untuk Jakarta Selatan.

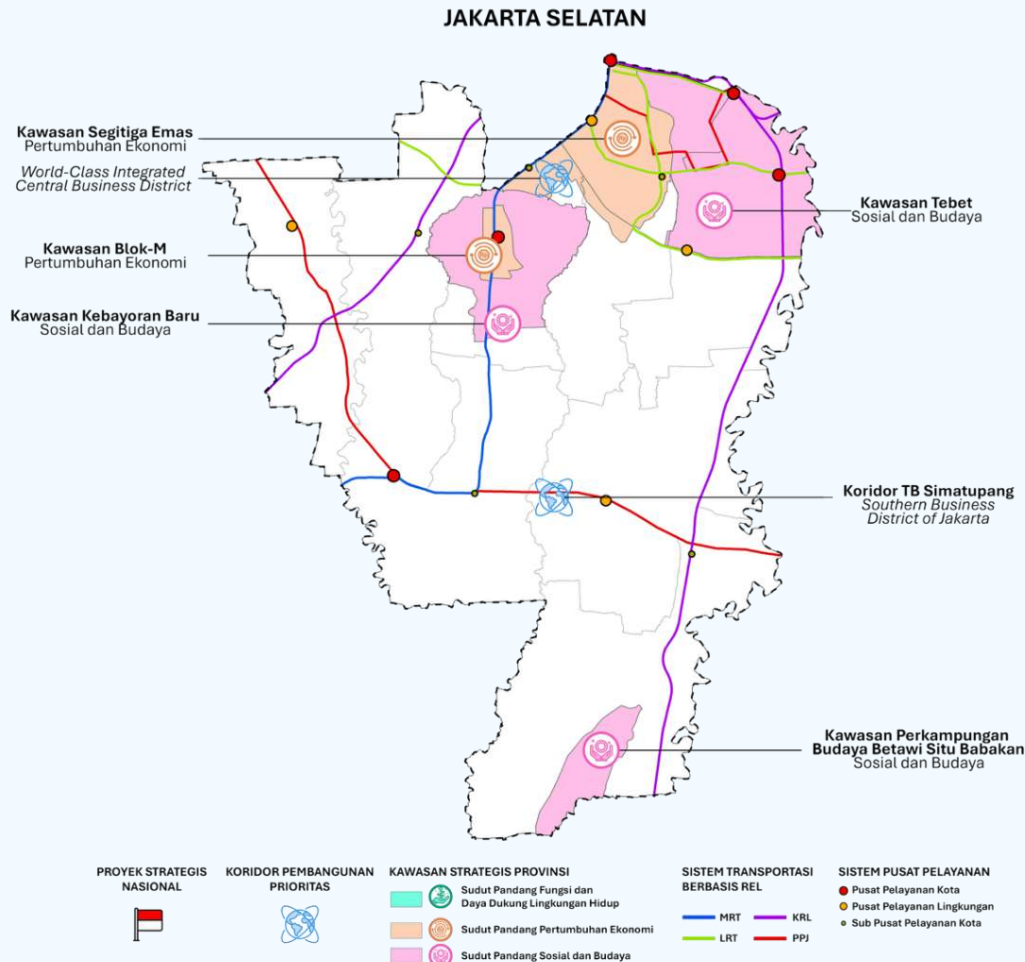


Gambar III.21 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Selatan

Potensi lain yang berada di wilayah Jakarta Selatan adalah Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi di Jakarta Selatan. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi juga pusat edukasi budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Kawasan ini dihuni oleh masyarakat yang masih menjalankan gaya hidup khas Betawi, mulai dari arsitektur rumah, pola kehidupan sosial, hingga berbagai seni dan budaya seperti tari-tarian, musik gambang kromong, lenong, dan silat Betawi. Selain itu, kuliner khas Betawi juga dijual oleh penduduk setempat, seperti kerak telur, soto Betawi, dan dodol Betawi. Keberadaan UMKM yang menjual berbagai produk budaya dan kuliner memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Situ Babakan juga memiliki potensi besar dalam bidang wisata alam.

Berbagai potensi di Jakarta Selatan diimbangi dengan keunggulan terbesar yaitu nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah lain. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat menjadi katalis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jakarta Selatan dengan mengedepankan nilai-nilai kebudayaan dan wawasan ramah lingkungan.

Kawasan Strategis Pembangunan Wilayah



Gambar III.22 Peta pengembangan Wilayah Jakarta Selatan

Kawasan strategis provinsi yang berada di Jakarta Selatan terdiri dari 2 kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan 3 kawasan strategis sosial budaya, yaitu:

Kawasan Strategis dari sudut pandang Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta Selatan.

- ☐ Kawasan Blok-M dikembangkan sebagai ibukota diplomatik *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang dikembangkan dengan konsep Kawasan Berorientasi Transit.
- ☐ Kawasan Segitiga Emas dikembangkan sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global yang meliputi sebagian Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Kebayoran Baru.

Kawasan Strategis dari sudut pandang Sosial Budaya di Jakarta Selatan.

- ☐ Kawasan Tebet dikembangkan sebagai kawasan wisata urban berupa kawasan berbasis kuliner fusion, distro, olahraga, dan kesenian.
- ☐ Kawasan Kebayoran Baru dikembangkan sebagai pemugaran bangunan bersejarah dan pengembangan budaya perkotaan.
- ☐ Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan dikembangkan sebagai pusat kebudayaan Betawi.

Koridor pembangunan yang dapat berkontribusi mengakselerasi pencapaian Kota Global di Jakarta Selatan antara lain adalah:

- Koridor Segitiga Emas sebagai pusat distrik bisnis terintegrasi berkelas dunia.
- Koridor TB Simatupang sebagai distrik bisnis selatan Jakarta.

Pengembangan Kawasan Strategis tersebut didukung dengan rencana sistem pusat layanan dan sistem transportasi berbasis rel yang saling terkoneksi untuk kemudahan aksesibilitas masyarakat. Adapun rencana sistem pusat layanan yang dikembangkan di Kota Jakarta Selatan sebagai berikut:

- Pusat pelayanan kota di Jakarta Selatan berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota. Pusat pelayanan kota di Jakarta Selatan berpusat berada pada titik simpul transit yang berada di 4 pusat layanan meliputi: Manggarai di Kecamatan Tebet, Tebet di Kecamatan Tebet, Blok M-CSW di Kecamatan Kebayoran Baru, dan Lebak Bulus di Kecamatan Kebayoran Lama.
- Sub pusat pelayanan kota di Jakarta Selatan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah berada di Istora Senayan di Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama di Kecamatan Kebayoran Lama, Tanjung Barat di Kecamatan Jagakarsa, Setiabudi di Kecamatan Setiabudi dan Fatmawati di Kecamatan Cilandak.
- Sub pusat pelayanan lingkungan di Jakarta Selatan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman di Wilayah Jakarta Selatan berada di Bendungan Hilir di Kecamatan Setiabudi, Ragunan di Kecamatan Pasar Minggu, Pesanggrahan di Kecamatan Pesanggrahan, dan Pancoran di Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kebijakan Strategis Pembangunan Jakarta Selatan

Dalam rangka mencapai target perencanaan jangka menengah daerah dan mendorong pembangunan wilayah Jakarta Selatan, direkomendasikan kebijakan strategis yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Tabel III.14 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Selatan

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Hubungan eksternal dan internasional yang sinergis	Perwujudan Jakarta sebagai sentra ASEAN pada Kawasan Blok M
	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kesekretariatan ASEAN pada Kawasan Blok M
	Peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan melalui peningkatan opsi aksesibilitas dengan tujuan memperpendek jarak dan mempersingkat waktu tempuh pejalan kaki, melalui penyediaan jalur pejalan kaki yang lebar dan nyaman pada Kawasan Segitiga Emas
	Pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan pada Kawasan Segitiga Emas
Pusat keuangan dan bisnis yang produktif	Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa untuk seluruh golongan usaha
	Peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global pada Kawasan Blok M
	Peningkatan kapasitas tampung kawasan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa dan campuran pada Kawasan Segitiga Emas
	Penyediaan ruang untuk golongan usaha skala kecil, dan sektor informal pada Kawasan Segitiga Emas
	Peningkatan kemampuan pelayanan, manajemen, sistem jaringan komunikasi, sarana dan prasarana dalam memanfaatkan peluang ekonomi global serta kemampuan dan kepekaan mengenal iklim investasi yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional pada Kawasan Segitiga Emas
Kota cerdas berorientasi digital dan berbasis data	Peningkatan kualitas investasi dan iklim bisnis
	Diversifikasi sektor ekonomi kreatif, digital, dan <i>green economy</i>
Kota cerdas berorientasi digital dan berbasis data	Penyediaan kelengkapan infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota (<i>tech commerce</i>) pada Kawasan Segitiga Emas

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Pusat pelayanan logistik dan pergerakan barang yang terpadu	Pengembangan sistem logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan sistem logistik regional/internasional pada Kawasan Blok M
Destinasi wisata sejarah dan urban yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kreatif	Pengembangan kawasan dilakukan dengan prinsip keselarasan dengan lingkungan sekitar dan tidak mengganggu fungsi sebagai kawasan pemugaran pada Kawasan Kebayoran Baru Pengemasan koridor Blok M – CSW – Senopati – Wolter Monginsidi – Kemang – Cipete sebagai koridor pengembangan pariwisata budaya perkotaan dengan mengedepankan wisata kuliner, belanja, dan hiburan pada Kawasan Kebayoran Baru Pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pelestarian budaya Betawi yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Penyediaan ruang publik yang inklusif bagi masyarakat lokal dan wisatawan pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Pelestarian budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Pengembangan kawasan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat setempat dalam aspek sosial dan ekonomi pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Pengembangan kawasan wisata urban berbasis kuliner, distro, olahraga, dan kesenian pada Kawasan Tebet
Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Penyediaan RTH pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai daerah resapan air pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Pengembangan RTH dan ruang publik untuk mendukung aktivitas rekreasi, olahraga dan kesenian pada Kawasan Tebet Penyediaan ruang untuk ruang hijau dan ruang publik pada Kawasan Segitiga Emas Pemenuhan Indeks Hijau Biru pada Kawasan Segitiga Emas
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan penataan jalur pejalan kaki dan pedagang kaki lima pada Kawasan Tebet Penyediaan lahan dan penataan parkir kendaraan bermotor pada Kawasan Tebet Penataan jalur pejalan kaki beserta elemen pendukungnya dari bangunan <i>park and ride</i> menuju stasiun MRT Lebak Bulus Penataan titik transit yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan dan transportasi umum (perpindahan antar moda)

e. Jakarta Timur



Sentra Kawasan Industri Produktif, Permukiman, dan Hub Transportasi Regional

Permasalahan dan Potensi Wilayah

Sebagai wilayah terluas di Jakarta, Jakarta Timur menghadapi berbagai tantangan terkait urbanisasi, infrastruktur, lingkungan, dan sosial-ekonomi. Wilayah ini berfungsi sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota sekitar seperti Bekasi dan Depok. Jakarta Timur memiliki beberapa *hub* transportasi regional seperti Stasiun Jatinegara, Terminal Kampung Rambutan, dan Terminal Pulogebang, yang menghubungkan berbagai rute penting. Wilayah ini juga didukung oleh moda transportasi seperti KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan TransJakarta. Integrasi antar moda transportasi di beberapa *hub* tersebut akan semakin mempermudah perjalanan, meningkatkan kenyamanan, dan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efisien serta ramah lingkungan.

Sekitar 46% dari total luas wilayah Kota Jakarta Timur dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah rumah tangga terbanyak di Jakarta dengan jumlah penduduk mencapai 3.230.417 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta Timur memiliki fungsi strategis sebagai tempat warga bermukim. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, pengelolaan persampahan, sistem sanitasi, serta pelestarian dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Keberadaan RTH berperan penting tidak hanya dalam menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga sebagai ruang rekreasi dan wisata bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kawasan permukiman di Jakarta Timur yang belum memiliki layanan dasar secara optimal, seperti sanitasi, air minum, fasilitas umum, dan akses terhadap hunian layak. Laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan perumahan, namun akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang terjangkau masih menjadi tantangan. Selain itu, wilayah bantaran sungai seperti Cawang, Kampung Melayu, Cipinang Melayu, dan Bidara Cina memiliki risiko banjir yang tinggi. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengembangan sistem drainase, penambahan area resapan air, dan penataan kawasan sungai perlu ditingkatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Sebagai bagian dari Jakarta yang merupakan kota multi etnis, Jakarta Timur dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan etnis, seperti Betawi, Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Maluku, Tionghoa, Arab, Portugis, Belanda, dan India. Keberagaman ini menjadikan Jakarta Timur sebagai wilayah yang kaya akan budaya. Suku Betawi, yang merupakan penduduk asli Jakarta, merupakan hasil perpaduan berbagai pengaruh budaya termasuk Arab, Tiongkok, India, dan Portugis yang membentuk identitas khas Betawi sebagai budaya *mestizo*, atau budaya hasil akulturasi. Sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya, Jakarta Timur memiliki sembilan cagar budaya yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian, serta 18 museum yang sebagian besar berada di dalam kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII berperan sebagai pusat kebudayaan nasional, termasuk budaya Betawi melalui Anjungan Provinsi DKI Jakarta, yang menampilkan beragam seni pertunjukan seperti musik, tari, teater, serta berbagai tradisi khas Betawi lainnya.

Jakarta Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya, khususnya di wilayah Jatinegara. Kawasan ini menyimpan jejak kolonial yang kuat melalui sejumlah bangunan bersejarah seperti Stasiun Jatinegara, Gedung Eks Kodim 0505, dan Pasar Jatinegara yang masih berdiri kokoh hingga kini. Keberadaan situs-situs ini tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga menyuguhkan narasi sejarah yang memperkaya pemahaman tentang perkembangan sosial dan budaya kota Jakarta dari masa ke masa. Secara geografis, Jatinegara berada di lokasi yang sangat strategis, menjadikannya mudah diakses dari berbagai arah, baik oleh warga lokal maupun wisatawan luar kota. Kawasan ini terhubung melalui jalur transportasi utama seperti kereta api, bus, dan jalan tol, sehingga menawarkan kenyamanan

akses. Dengan kombinasi antara nilai sejarah, keberagaman budaya yang hidup di tengah masyarakatnya, dan aksesibilitas yang baik, Jatinegara memiliki modal kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis komunitas. Pengembangan ini tidak hanya berfokus pada pelestarian warisan sejarah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga lokal sebagai pelaku wisata. Oleh karena itu, Jatinegara layak diposisikan sebagai salah satu wajah baru pariwisata Jakarta yang memadukan kekayaan masa lalu dengan potensi masa depan.

Tabel III.15 Capaian Indikator Makro Jakarta Timur

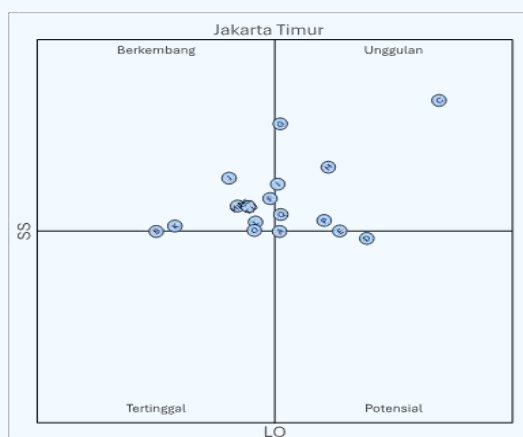
Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia ¹	82,84	83,14	83,45	84,26	84,76
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹	-4,48	4,77	5,02	5,15	4,49
Kontribusi PDRB (%) ¹	16,87	17,18	17,03	17,07	17,00
Total PDRB (Triliun Rupiah) ¹	469,99	500,41	547,05	592,38	630,60
PDRB per kapita (ADHB, ribu rupiah) ¹	155.207	163.971	178.421	192.357	204.344
Prevalensi <i>stunting</i> ³	N/A	13,4	14,4	16,8	16,4
Tingkat Kemiskinan (%) ¹	4,16	4,28	4,30	4,20	4,09
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ¹	9,29	8,23	8,39	7,24	6,95
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ²	N/A	43,09	46,58	46,24	51,11
Indeks Akses Keuangan Daerah			5,61	5,47	6,24

1 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2 Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024

3 Survei Status Gizi Indonesia

Angka kemiskinan di Jakarta Timur menunjukkan tren fluktuatif, namun cenderung menurun pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,16%, meningkat menjadi 4,30% pada tahun 2022, lalu menurun kembali menjadi 4,09%, pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut tetap memerlukan perhatian melalui intervensi yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2020, dari angka 9,29% menjadi 6,95% pada tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan tumbuhnya ekonomi Jakarta Timur yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja meningkat. Tren ini perlu dipertahankan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan agar lebih banyak masyarakat terserap ke dalam lapangan kerja yang tersedia. Secara perekonomian wilayah, Jakarta Timur pada tahun 2024 memiliki PDRB sebesar 630,60 triliun rupiah. Angka ini berkontribusi sekitar 17% dari PDRB DKI Jakarta. Kontribusi terbesar dari PDRB Jakarta Timur adalah dari sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.



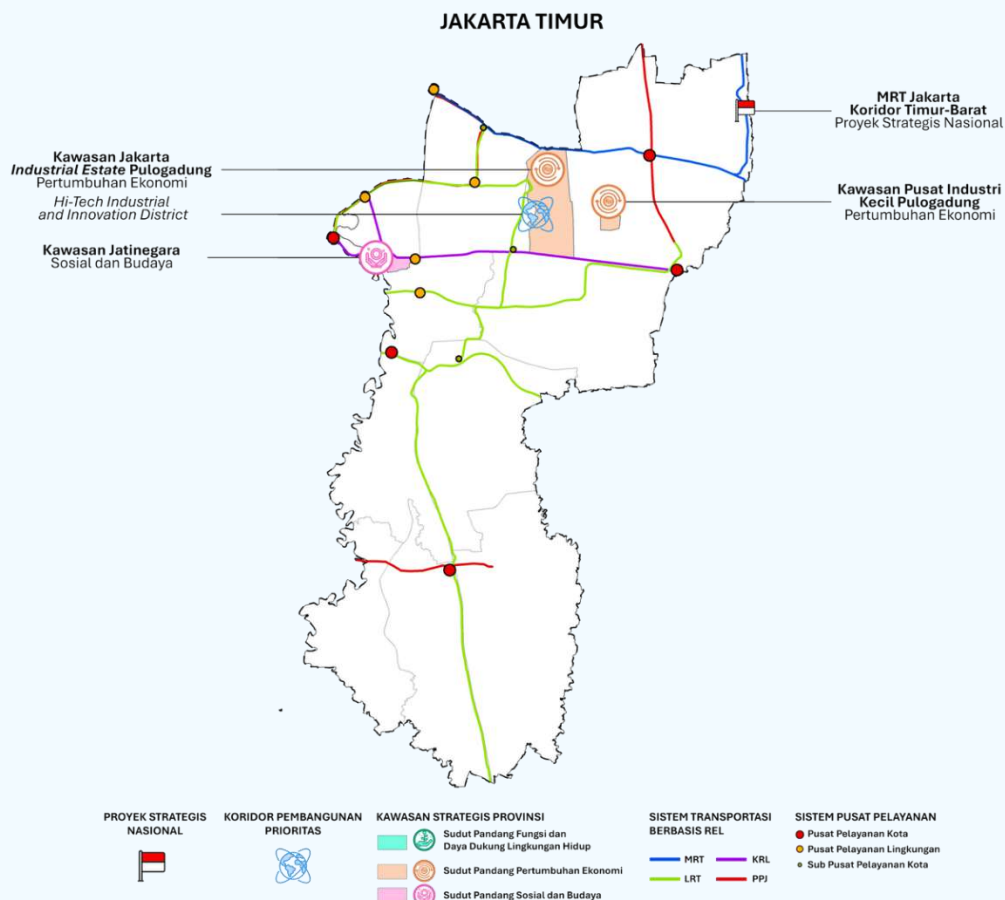
Kode	Lapangan Usaha	Kategori
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	Potensial
B	Petambangan dan penggalian	-
C	Industri Pengolahan	Unggulan
D	Pengadaan listrik dan gas	Potensial
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	Unggulan
F	Konstruksi	Berkembang
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Unggulan
H	Transportasi dan pergudangan	Unggulan
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Unggulan
J	Informasi dan komunikasi	Berkembang
K	Jasa keuangan dan asuransi	Berkembang
L	Real Estat	Berkembang
M,N	Jasa Perusahaan	Berkembang
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	Berkembang
P	Jasa Pendidikan	Unggulan
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	Unggulan
R,S,T,U	Jasa lainnya	Berkembang

Gambar III.23 Hasil Analisis LQ dan SS Kota Jakarta Timur

Sektor ‘Industri Pengolahan’ (C) teridentifikasi menjadi sektor unggulan yang paling signifikan di Jakarta Timur berdasarkan analisis LQ SS. Sektor ‘Transportasi dan Pergudangan’(H), ‘Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum’ (I), ‘Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor’ (G) juga merupakan sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Terkait dengan sektor yang berkembang, sektor ‘Konstruksi’ (F) memiliki nilai LQ mendekati 1, sehingga dapat diprioritaskan untuk ditingkatkan dan menjadi sektor unggulan. Begitu pula dengan sektor ‘Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang’ (E) dan ‘Pengadaan Listrik dan Gas’ (D) yang telah termasuk sektor basis dan laju pertumbuhannya hampir setara pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat ditingkatkan agar laju pertumbuhannya lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta.

Di samping sektor permukiman dan kebudayaan, Jakarta Timur juga berperan sebagai kawasan industri. Wilayah ini memiliki 5.856 titik sebaran kawasan industri, dengan Kecamatan Cakung sebagai wilayah dengan jumlah kawasan industri terbanyak, yakni 2.218 titik. Salah satu kawasan industri utama di Jakarta Timur adalah Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). PT JIEP merupakan BUMD pengelola Kawasan Industri Pulogadung dengan luas 433 ha. JIEP akan didorong menjadi kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis, kreativitas, dan komunitas dengan fungsi industri dan komersial yang dapat mengakomodir tenaga kerja baru. Jakarta Timur juga memiliki kawasan pusat industri kecil Pulogadung sebagai sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menjadi wadah pengembangan ruang bisnis kreatif sebagai wadah inovasi untuk meningkatkan daya saing kawasan serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Berdasarkan berbagai potensi yang dimiliki, pengembangan wilayah Jakarta Timur diarahkan menjadi kawasan berkarakter permukiman layak huni, pusat kebudayaan, serta kawasan industri yang kompetitif. Dengan perencanaan yang tepat, Jakarta Timur dapat terus berkembang sebagai wilayah yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Kawasan Strategis Pembangunan Wilayah



Gambar III.24 Peta Pengembangan Wilayah Jakarta Timur

Kawasan strategis provinsi yang berada di Jakarta Timur terdiri dari 2 kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan 1 kawasan strategis sosial budaya, yaitu:

Kawasan Strategis dari sudut pandang Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta Timur.

- ❑ Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung dikembangkan sebagai kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis kreativitas, dan komunitas.
- ❑ Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung dikembangkan sebagai sentra UMKM.

Kawasan Strategis dari sudut pandang Sosial Budaya di Jakarta Timur.

- ❑ Kawasan Jatinegara dikembangkan sebagai pusat kebudayaan Betawi dan pelestarian bangunan bersejarah meliputi Taman Benyamin Sueb dan Stasiun Jatinegara.

Koridor pembangunan yang dapat berkontribusi mengakselerasi pencapaian Kota Global di Jakarta Timur antara lain adalah:

- Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebagai distrik industri berteknologi tinggi dan inovasi.

Pengembangan Kawasan Strategis tersebut didukung dengan rencana sistem pusat layanan dan sistem transportasi berbasis rel yang saling terkoneksi untuk kemudahan aksesibilitas masyarakat. Adapun rencana sistem pusat layanan yang dikembangkan di Kota Jakarta Timur sebagai berikut:

- Pusat pelayanan kota di Jakarta Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Kota. Pusat pelayanan kota di Jakarta Selatan berpusat berada pada titik simpul transit yang berada di 4 pusat layanan meliputi: Sentra Primer Timur di Kecamatan Cakung, Cakung di Kecamatan Cakung, Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas, dan Kawasan Cawang di Kecamatan Jatinegara pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sub pusat pelayanan kota di Jakarta Timur sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah berada di Pulogadung di Kecamatan Cakung, Pulomas di Kecamatan Pulo Gadung dan Halim di Kecamatan Makasar pada Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sub pusat pelayanan lingkungan di Jakarta Timur sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman di Wilayah Jakarta Timur berada di Pramuka di Kecamatan Matraman, Jatinegara di Kecamatan Jatinegara, Cipinang di Kecamatan Jatinegara, Velodrome Rawamangun di Kecamatan Pulo Gadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kebijakan Strategis Pembangunan Jakarta Timur

Dalam rangka mencapai target perencanaan jangka menengah daerah dan mendorong pembangunan wilayah Jakarta Timur, direkomendasikan kebijakan strategis yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Tabel III.16 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Jakarta Timur

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	Peningkatan aksesibilitas melalui integrasi dengan transportasi publik pada Kawasan Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung, Kawasan Perkampungan Industri Kecil Pulogadung, Kawasan Cakung Barat, Kawasan Jatinegara
	Penyediaan jalur pejalan kaki untuk meningkatkan konektivitas pejalan kaki pada Kawasan Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung
	Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan penataan jalur pejalan kaki dan perdagangan kaki lima pada Kawasan Jatinegara
	Penataan jalur pejalan kaki dan peningkatan aksesibilitas kawasan dengan pengintegrasian titik transit dengan kawasan UMKM dan permukiman sekitarnya pada Kawasan Industri Kecil Pulogadung

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
	Peningkatan aksesibilitas Kawasan Cakung Barat melalui pembangunan jalan baru serta pelebaran jalan eksisting
Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Pengembangan kawasan Cakung Barat yang dilakukan secara inklusif partisipatif, ramah lingkungan, berkelanjutan, serta ditunjang dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya seperti layanan kesehatan, pendidikan, konektivitas, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.
	Revitalisasi kawasan perdagangan, penataan PKL, dan pembangunan infrastruktur transportasi di Kawasan Jatinegara
Lingkungan yang adaptif terhadap risiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem	Penyediaan ruang hijau dan badan air skala kawasan sebagai tempat rekreasi dan usaha penanggulangan banjir pada Kawasan Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung
	Peningkatan ruang terbuka biru berupa waduk, embung, situ sebagai upaya penanggulangan banjir sekaligus sebagai tempat rekreasi di Jakarta Timur
Kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau	Penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan nyaman pada Kawasan Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung
	Penyediaan rusun di atas pasar pada penataan permukiman kawasan Jatinegara
Produktivitas kawasan industri	Pengembangan kawasan dengan fungsi industri dan komersial yang dapat mengakomodasi tenaga kerja baru pada Kawasan Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung
	Penataan kawasan menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai pada Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung
	Pengembangan ruang bisnis kreatif sebagai wadah inovasi untuk meningkatkan daya saing kawasan serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM pada Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung
Destinasi wisata sejarah dan urban yang berwawasan budaya dan lingkungan	Pengembangan pariwisata berbasis pelestarian budaya, kesenian dan kuliner Betawi, melalui memfungsikan kembali Gedung Eks Kodim 0505, serta ruang-ruang publik lainnya yang memiliki potensi sebagai tempat pertunjukan budaya, seni, dan kuliner betawi yang terjadwal rutin.
	Pelestarian objek cagar budaya berupa Gedung Eks Kodim 0505 dan Stasiun Jatinegara pada Kawasan Jatinegara
	Penataan Kawasan Jatinegara sebagai <i>mixed-use destination</i> yang memadukan kawasan perdagangan dan wisata <i>heritage</i> sehingga dapat menjadi destinasi yang memikat untuk berbelanja sekaligus menikmati jejak sejarah kota Jakarta
	Penataan dan pengembangan Kawasan Cagar Buah Condet sebagai destinasi wisata dalam upaya melestarikan tanaman buah khas Betawi diantaranya salak dan duku Condet
Kota cerdas berorientasi digital dan berbasis data	Penyediaan kelengkapan infrastruktur digital dan pusat aktivitas digital skala kota (<i>tech commerce</i>) pada Kawasan Jatinegara, Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung, Jakarta <i>Industrial Estate</i> Pulogadung, dan Kawasan Cakung Barat

f. Kepulauan Seribu



Kawasan Konservasi dan Pengembangan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan

Permasalahan dan Potensi Wilayah

Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik Jakarta (Jakarta dalam Angka 2025), jumlah penduduk di Kepulauan Seribu mencapai 30.334 orang pada tahun 2024. Kabupaten ini memiliki luas total 1.072,5 ha dengan lebih dari 110 pulau yang tersebar di dalamnya. Pada tahun 2024, tingkat kepadatan penduduk berada di sekitar 2.686 jiwa per km². Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki keunikan geografis dan tantangan tersendiri dalam proses pembangunan. Dengan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau kecil yang tersebar di perairan utara Jakarta, Kepulauan Seribu menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi strategis dan berkelanjutan.

Isu kemiskinan di Kepulauan Seribu menjadi fokus utama dalam pembangunan Jakarta secara satu kesatuan wilayah, di mana tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu menjadi penyumbang persentase kemiskinan terbesar dibanding wilayah Jakarta lainnya. Tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu masih berada di atas 10%. Dibutuhkan langkah-langkah intervensi dalam pengentasan kemiskinan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Seribu menunjukkan tren yang relatif tinggi. Merujuk pada potensi wilayah yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu, angka pengangguran dapat ditekan dengan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik mata pencaharian berbasis pesisir dan kepulauan.

Tabel III.17 Capaian Indikator Makro Kepulauan Seribu

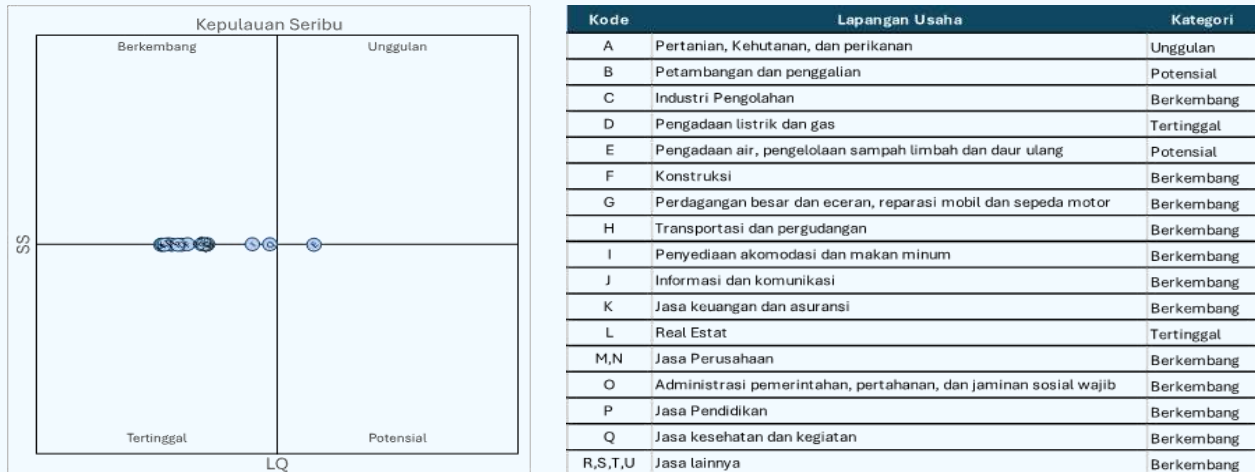
Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia ¹	74,19	74,65	75,34	75,91	76,69
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹	-4,94	-1,55	-1,70	-7,86	-1,11
Kontribusi PDRB Provinsi (%) ¹	0,23	0,28	0,32	0,24	0,22
Total PDRB (Triliun Rupiah) ¹	6,41	8,15	10,12	8,21	8,10
PDRB per kapita (ADHB, ribu rupiah) ¹	232.819	291.267	358.302	287.922	281.266
Prevalensi <i>stunting</i> ³	N/A	19,3	20,5	18,6	16,9
Tingkat Kemiskinan (%) ¹	14,87	15,06	14,11	13,13	13,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ¹	7,37	8,58	8,47	8,11	7,93
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ²	51,94	66,66	66,46	67,99	68,59
Indeks Akses Keuangan Daerah			3,44	4,82	4,57

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

² Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2024

³ Survei Status Gizi Indonesia

Kepulauan Seribu cenderung rentan terhadap banjir rob dan angin puting beliung mengingat letaknya yang berada di kawasan pesisir. Naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim telah meningkatkan risiko banjir rob yang mengancam permukiman serta infrastruktur di pulau-pulau berpenghuni. Genangan air laut yang merendam area permukiman warga dapat merusak rumah, fasilitas umum, dan juga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. Selain itu, Kepulauan Seribu juga rawan terjadi angin puting beliung terutama pada musim hujan. Bencana angin puting beliung dilaporkan telah merusak sejumlah bangunan dan menghentikan jaringan transportasi laut.



Gambar III.25 Hasil analisis LQ dan SS Kabupaten Kepulauan Seribu

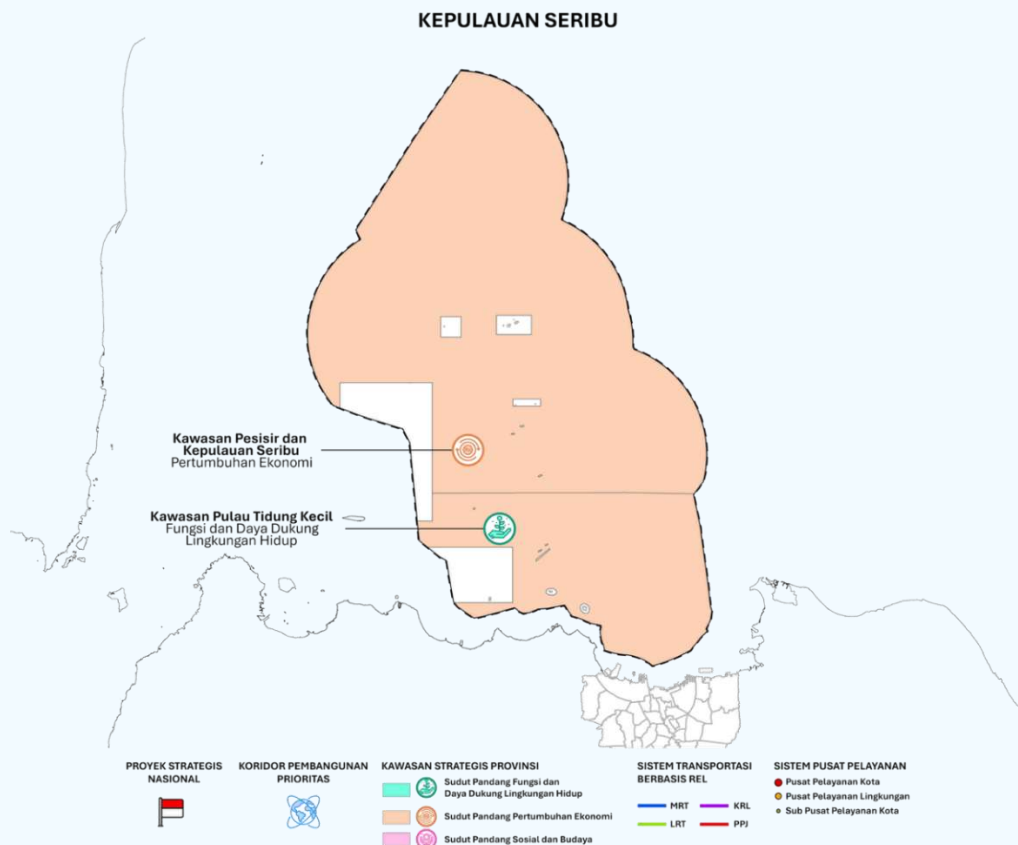
Secara keseluruhan, kontribusi PDRB di Kabupaten Kepulauan Seribu terhadap Provinsi DKI Jakarta cukup rendah dengan 0,22% di tahun 2024, sehingga persebaran semua sektor pada nilai SS sangat mendekati ambang batas (0). Namun, berdasarkan hasil analisis LQ SS, terdapat beberapa sektor yang dapat diprioritaskan pengembangannya untuk mendorong perekonomian Kabupaten Kepulauan Seribu dan Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sektor 'Pertanian, Kehutanan dan Perikanan' (A) menjadi satu-satunya sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Seribu dan perlu perhatian khusus. Di sisi lain, perkembangan sektor perekonomian yang berbasis masyarakat, pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu diprioritaskan agar perekonomian Kabupaten Kepulauan Seribu tidak bergantung pada sektor 'Pertambangan dan Penggalian' (B), yang pada tahun 2024 berkontribusi sebesar 70,52% terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kepulauan Seribu memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan RTRW 2024–2044 DKI Jakarta yang mendorong pengembangan wisata untuk meningkatkan daya tarik dan ekonomi di wilayah ini. Dalam hal destinasi wisata, Kepulauan Seribu memiliki keunggulan wisata berbasis edukasi sejarah. Pengembangan wisata sejarah ini mencakup Pulau Bidadari, Cipir, Kelor, Kahyangan, dan Onrust yang menyimpan beberapa peninggalan era kolonial, seperti Benteng Martello dan Museum Purbakala. Potensi tersebut dapat ditingkatkan melalui pengembangan produksi kerajinan tangan dan pengolahan produk makanan yang berbasis hasil laut. Selain wisata sejarah, destinasi wisata yang akan dikembangkan di antaranya pembangunan pulau tematik yang direncanakan akan dibangun diantaranya di Pulau Tidung Kecil dan pengembangan destinasi resor *high end* yang ramah lingkungan diantaranya Pulau Panjang. Pengembangan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata tidak terlepas dari perlunya peningkatan sarana transportasi laut dan pengembangan transportasi udara, termasuk potensi landasan pesawat amfibi.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga mempunyai potensi sebagai lumbung pangan melalui pengembangan komoditas pertanian dan kelautan. Wilayah ini menyimpan kekayaan sumber daya ikan yang beragam, seperti ikan kakap, kerapu, tenggiri, dan tuna. Dalam hal ini, penangkapan dengan teknologi mutakhir perlu digunakan agar hasil tangkapan lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain sebagai sentra ketahanan pangan (*food security*), Kepulauan Seribu juga dapat dikembangkan sebagai kawasan strategis untuk lokasi penelitian ilmiah tentang ekosistem dan konservasi laut. Potensi besar lainnya adalah Kepulauan Seribu sebagai kawasan konservasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dengan sinar matahari yang melimpah, wilayah ini ideal untuk pemanfaatan energi surya guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan sektor pariwisata. Selain itu, budidaya laut menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Budidaya ikan kerapu dan kakap melalui metode keramba jaring apung berpotensi

memberikan hasil ekonomi tinggi. Begitu pula dengan budidaya rumput laut yang memiliki nilai jual tinggi untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Budidaya kerang mutiara dan teripang juga menjadi peluang besar untuk pasar domestik dan internasional. Namun, Kepulauan Seribu menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Dari 113 pulau yang ada, sebanyak 26,98% terumbu karang mengalami kerusakan, sementara hanya 0,12% yang berada dalam kondisi sangat baik. Abrasi pantai juga menjadi ancaman serius, dengan 6 pulau telah hilang dan 23 lainnya terancam tenggelam.

Kawasan Strategis Pembangunan Wilayah



Gambar III.26 Peta Pengembangan Wilayah Kepulauan Seribu

Kawasan strategis provinsi yang berada di Kepulauan Seribu terdiri dari 1 kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan 1 kawasan strategis sosial budaya, yaitu:

Kawasan Strategis dari sudut pandang Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Seribu.

- ☐ Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu dikembangkan sebagai pusat pariwisata dan lumbung pangan berbasis lingkungan yang berkelanjutan.

Kawasan Strategis dari sudut pandang Sosial Budaya di Kepulauan Seribu.

- ☐ Kawasan Pulau Tidung Kecil dikembangkan sebagai pusat edukasi yang mengedepankan pelestarian lingkungan, pusat konservasi, dan pusat budidaya pembibitan karang, ikan, penyu, dan biota laut lainnya.

Pengembangan Kawasan Strategis tersebut juga didukung dengan rencana sistem pusat layanan yang dikembangkan di Kepulauan Seribu yaitu sub pusat pelayanan kota di Kepulauan Seribu sebagai kawasan pusat pemerintahan, permukiman dan pariwisata yang melayani sub wilayah berada di Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kebijakan Strategis Pembangunan Kepulauan Seribu

Dalam rangka mencapai target perencanaan jangka menengah daerah dan mendorong pembangunan wilayah Kepulauan Seribu, direkomendasikan kebijakan strategis yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Tabel III. 18 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kepulauan Seribu

Isu Strategis	Kebijakan Strategis
Destinasi wisata sejarah dan perairan yang berwawasan budaya dan lingkungan	Pemaduan unsur pembangunan budaya dan pariwisata yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Kepulauan Seribu
	Perencanaan pariwisata menggunakan pendekatan partisipatif untuk mengoptimalkan potensi lokal di Kepulauan Seribu
	Perencanaan pengembangan pariwisata dengan pendekatan kewilayahan, pengembangan produk wisata, dan pasar yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem wilayah pengaturan spasial yang selaras dengan rantai komoditas pada sentra perikanan pada kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu
	Pengembangan kawasan wisata yang mengedepankan aspek lingkungan (<i>ecotourism</i>) diantaranya melalui pengembangan pulau-pulau tematik pada Kawasan Pulau Tidung Kecil dan resor <i>high end</i> yang ramah lingkungan pada Pulau Panjang
	Penyelenggaraan festival Kepulauan Seribu
Lingkungan yang adaptif terhadap risiko bencana, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem	Pemanfaatan lingkungan baik sumber daya alam maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan manusia dengan alam untuk mencegah kerusakan alam di Kepulauan Seribu
	Pembangunan infrastruktur, bangunan, dan kawasan yang adaptif terhadap bencana di Kepulauan Seribu
	Pembangunan tanggul pada 4 (empat) pulau terdampak banjir rob di Pulau Pari, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan
Kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau	Penyediaan rumah susun sebagai upaya pemenuhan hunian layak huni dan terjangkau di Pulau Heksagon Pulau Panggang
Ketahanan pangan berbasis lingkungan, data, dan riset	Perencanaan pengembangan ekonomi biru sebagai sumber daya pangan alternatif di Kepulauan Seribu
Integrasi dan konektivitas kawasan strategis	Pengintegrasian kawasan dengan jaringan dan titik transit angkutan umum massal pada Kawasan Pesisir dan Kepulauan Seribu
Infrastruktur dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat	Pembangunan dan revitalisasi GOR dan fasilitas olahraga lainnya di Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai pusat kegiatan olahraga, seni, dan pengembangan generasi muda
	Rehabilitasi sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bidang pendidikan di Pulau Sabira, Pulau Harapan, serta Pulau Tidung
	Pengembangan Transjakarta Laut berupa armada kapal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik di Kepulauan Seribu
	Penambahan <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> (SWRO) sebagai pemenuhan air bersih untuk warga Kepulauan Seribu
	Pembangunan Pos Kesehatan Pembantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kepulauan Seribu
Kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan dengan energi baru terbarukan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kepulauan Seribu
	Perlindungan biota sebagai upaya konservasi pada Kawasan Pulau Tidung Kecil
	Pengembangan sarana edukasi berbasis lingkungan pada Kawasan Pulau Tidung Kecil
	Pengembangan budidaya biota laut pada Kawasan Pulau Tidung Kecil
	Penataan Kawasan dan peningkatan penyediaan fasilitas lingkungan Pulau Untung Jawa dan Pulau Kelapa

III.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program-program yang dijabarkan dalam sub-bab ini merupakan program prioritas sesuai dengan hasil analisis kondisi yang diperlukan untuk menjawab isu-isu strategis periode 2025-2029. Program prioritas disusun dengan menyelaraskan program kerja sesuai dengan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Misi RPJMD, yang kemudian menjadi *outcome* prioritas setiap Tujuan dan Sasaran RPJMD yang bersifat *cross-cutting* dan pencapaiannya ditunjang oleh kinerja lintas bidang urusan. Selain itu, *outcome* prioritas pembangunan juga disusun berdasarkan hasil kajian peta jalan kota global yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 294 tahun 2025, yang dikelompokkan ke dalam DKI Strategic Project (DSP) dan *Global City Project* (GCP) untuk memenuhi amanat perbaikan fundamental.



Gambar III.27 Penyelarasan Isu Strategis dan Misi RPJMD dengan Program Kerja Janji Politik Gubernur

TUJUAN	SASARAN	REKOMENDASI OUTCOME PRIORITAS	DAFTAR PROGRAM PRIORITAS
	SASARAN		
TUJUAN	SASARAN	1. Program kerja dan <i>continuity quick wins</i>	
	SASARAN	2. DKI Strategic Project (DSP)	
TUJUAN	SASARAN	3. Global City Project (GCP)	
	SASARAN		

Gambar III.28 Skematik Penentuan Program Prioritas

Adapun nomenklatur program-program prioritas tercantum telah disesuaikan dengan daftar program menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel III.19 Daftar Referensi Outcome Prioritas

IMPLEMENTASI JANJI KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		PERBAIKAN FUNDAMENTAL + PERINGKAT KOTA GLOBAL	
Implementasi 10 Program Kerja	Continuity Quick Wins 100 Hari	DKI Strategic Project (DSP)	Global City Program (GCP)
JAKARTA BELAJAR - Wajib belajar 12 tahun dengan peningkatan daya tampung sekolah negeri dan kerja sama dengan sekolah swasta - Penyesuaian penghasilan guru sesuai UMP Jakarta - Penguatan unit layanan disabilitas untuk pelatihan guru dalam mendukung murid penyandang disabilitas - Beasiswa magister, doctoral, serta pelatihan bersertifikat untuk peningkatan kompetensi guru dan dosen	2027 - Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyelenggaraan <i>Event Road to Jakarta 500</i> 2028 - RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit dengan Layanan Berstandar Internasional - Menyediakan hunian layak rumah susun dan memberdayakan ekonomi masyarakat Kampung Susun Bayam melalui Pelatihan Keterampilan dan Penyerapan Tenaga Pengelola JIS serta Pengembangan <i>Urban Farming Daycare</i> di Perkantoran Pemerintah, diperluas untuk MBR	- Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah - Pembangunan Rumah Sakit Internasional/Bertaraf Internasional - Transformasi Digital Pemerintahan - Konstruksi dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan <i>Jakarta Sewerage System</i> - Sistem Penyediaan Air Minum - Pembangunan jaringan gas perkotaan - Pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan - Perumahan/Kawasan Permukiman - Sistem Pengendali Banjir - Sistem Pengelolaan Limbah - Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan - Ruang Terbuka Hijau - Manajemen Bencana <i>Giant Sea Wall</i> - Tanggul Pantai - MRT - LRT <i>Park and Ride</i> - Pembangunan simpang tak sebidang - Pengembangan aksesibilitas angkutan barang dalam mendukung fungsi Jakarta sebagai hub perdagangan internasional - Infrastruktur digital kota	- Sistem pendidikan yang <i>future-proof</i> - Ekosistem layanan kesehatan kelas dunia - Masyarakat inklusif (GEDSI, populasi lanjut usia) - Pusat talenta masa depan - Pengembangan pesisir - Iklim usaha yang kondusif - Ekosistem infrastruktur digital yang kuat - Organisasi yang <i>agile</i> dan monitoring yang komprehensif - Perumahan terjangkau - Pengembangan lanskap ruang hijau perkotaan - Sistem pengelolaan air terpadu - Solusi <i>zero-waste</i> yang inovatif - Infrastruktur tangguh dan siap menghadapi bencana - Jaringan mobilitas perkotaan yang inklusif dan tanpa hambatan - Citra kota global yang ikonik
JAKARTA BUGAR DAN PRODUKTIF - Mempercepat waktu tunggu BPJS dan meningkatkan kualitas pelayanan - Perbaikan puskesmas dan RSUD, khususnya di wilayah padat penduduk - Tambahan rumah sakit dan klinik apung di Kepulauan Seribu <i>Hotline 24/7</i> untuk konseling kesehatan psikologis - Layanan pengembangan diri dan ketahanan mental bagi generasi muda, bekerja sama dengan universitas	2030 - Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan - Pengembangan Kawasan TOD - Gratis Transportasi Umum Massal untuk 15 Golongan Masyarakat - Penguatan JAKI sebagai <i>SuperApps</i> Pelayanan Publik <i>Home Service</i> Untuk Warga Jakarta (Pasukan Putih) <i>Mixed Use Development</i> untuk membangun hunian vertikal bagi Warga Jakarta - Penuntasan RW Kumuh - Penguatan Blok M Sebagai Sentra ASEAN - Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan - Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi - Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih <i>Security</i> CCTV di Permukiman - Ekosistem Pengendalian Banjir - Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) - Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendali Polusi - Aktivasi Taman Kota 24 Jam - Balai Latihan Kerja di Kelurahan - Menjamin <i>Supply</i> Pangan melalui <i>Contract Farming</i> - Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna - Anugerah Benyamin S (BERSIH NYAMAN Indah dan Sejahtera) <i>Award</i> untuk Peningkatan Daya Tarik Kota - Peningkatan Pariwisata Melalui Promosi Budaya Betawi - Inisiasi <i>Jakarta Collaboration Fund</i> - Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR) - Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan - Penguatan Rusun untuk Warga - Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Idul Fitri		
JAKARTA BEROLAHRAGA DAN BERBUDAYA - Standarisasi lapangan FIFA di lapangan Dispora - Revitalisasi GOR dan RPTRA sebagai pusat olahraga dan budaya - Penguatan sentra budaya Betawi <i>Jakarta Creative Hub</i> di tiap Kotamadya - Dana abadi kebudayaan untuk budayawan Jakarta			
JAKARTA BEKERJA - Informasi lowongan pekerjaan terintegrasi aplikasi JAKI - Fleksibilitas jam dan lokasi kerja untuk mengurangi kemacetan - Pelatihan bagi masyarakat putus sekolah			
JAKARTA BERKEADILAN - Tempat tinggal layak bagi kampung miskin kota - Pemberdayaan rakyat miskin dengan pelatihan dan akses modal			

IMPLEMENTASI JANJI KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		PERBAIKAN FUNDAMENTAL + PERINGKAT KOTA GLOBAL	
Implementasi 10 Program Kerja	Continuity Quick Wins 100 Hari	DKI Strategic Project (DSP)	Global City Program (GCP)
☐ Akses layanan publik inklusif bagi disabilitas dan lansia			
JAKARTA BERWISATA			
☐ Pengembangan wisata Kepulauan Seribu ☐ Revitalisasi/aktivasi obyek bersejarah dan kampanye sejarah Jakarta ☐ Pengembangan Teluk Jakarta sebagai <i>waterfront city modern</i> ☐ Kawasan wisata ruang terbuka hijau tematik ☐ Revitalisasi Pantai Marunda sebagai wisata rakyat gratis ☐ Kampanye wisata “Jakarta from North to South”			
JAKARTA BERDEDIKASI			
☐ Optimalisasi aplikasi Alpukat Betawi ☐ PBB-P2 gratis untuk hunian di bawah Rp 2 miliar ☐ Balai Rakyat di tiap kelurahan			
JAKARTA BERMUKIM			
☐ 7 lokasi <i>park and ride</i> di wilayah DKI Jakarta ☐ Pembangunan rusun			
JAKARTA BERSERI			
☐ Sumur resapan & normalisasi sungai ☐ Pengendalian polusi udara ☐ Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru ☐ Implementasi <i>roof garden</i> (taman atap) pada bangunan vertikal ☐ Jakarta Siaga Api belum mencapai target 100% <i>respond time</i>			
JAKARTA BERGERAK			
☐ Bus sekolah terintegrasi ☐ Pengembangan transportasi di Kepulauan Seribu			

III.3.1. Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan

Tabel III.20 Penentuan Program Prioritas Tujuan 1

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera		
Tujuan 1: Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan		
SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua	☐ Percepatan akses wajib belajar 13 tahun yang meliputi pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah ☐ Peningkatan kebermanfaatan dan ketepatan sasaran penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ☐ Penguatan mutu SMK melalui pembentukan BLUD dan kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan industri untuk mencetak keahlian yang relevan dan siap kerja ☐ Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan dan sertifikasi profesional	☐ Program Pengelolaan Pendidikan
Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan	☐ Peningkatan efektivitas layanan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi program JKN-BPJS dan penguatan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat rentan ☐ Penguatan layanan primer dan masterplan transformasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah ☐ Penguatan layanan kesehatan di wilayah Kepulauan Seribu ☐ Mewujudkan kesejahteraan mental masyarakat melalui penyediaan layanan <i>hotline</i> konseling 24 jam	☐ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ☐ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman ☐ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ☐ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ☐ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ☐ Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan ☐ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender	☐ Pembangunan responsif gender melalui penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) digital ☐ Penguatan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan terpadu dan terintegrasi ☐ Layanan pengembangan diri dan ketahanan mental generasi muda	☐ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ☐ Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak ☐ Program Perlindungan Perempuan ☐ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) ☐ Program Perlindungan Khusus Anak ☐ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	☐ Pengoptimalan peran perpustakaan daerah sebagai pusat informasi dan pembelajaran melalui fitur Jaklitera ☐ Pemerataan dan pengelolaan fasilitas olahraga yang berkualitas, berkeadilan, dan aksesibel ☐ Penguatan ekosistem budaya Jakarta yang inklusif, toleran, dan kolaboratif baik budaya kontemporer maupun penguatan nilai budaya betawi	☐ Program Pengembangan Kebudayaan ☐ Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ☐ Program Pengelolaan Permuseuman ☐ Program Pembinaan Perpustakaan

-
- ❑ Peningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di masyarakat melalui hibah bantuan operasional, insentif bagi pengelola, dan fasilitasi perizinan tempat ibadah
-

A. Meningkatkan Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua

Pembangunan pendidikan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan perhatian khusus untuk memastikan kesempatan pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan mengacu pada pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*) yang tidak terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga meliputi berbagai proses pembelajaran lainnya untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah meningkatkan kualitas hidup, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan peluang di masa depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerapkan berbagai strategi, seperti perluasan akses pendidikan usia dini, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, rehabilitasi serta pembangunan sarana prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri, serta mendukung program nasional dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sekolah khusus peserta didik dengan kemampuan akademik unggul. Untuk keberlangsungan program Sekolah Rakyat dalam jangka panjang perlu diselaraskan kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua inisiatif ini turut didukung oleh tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan biaya pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sejak 2018, cakupan penerima KJP Plus diupayakan tepat sasaran dan diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data lain yang telah tervalidasi. Program ini juga mencakup pendidikan non formal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga pelatihan. Pada tahun 2025, sistem penerima KJP Plus telah terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya, dengan jangkauan sebanyak 707.622 peserta didik. Evaluasi tahunan terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Sejak peluncurannya, KJP Plus telah berkontribusi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan menurunkan persentase angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperluas akses untuk pendidikan tinggi melalui KJMU. Program ini ditujukan bagi mahasiswa PTN dan PTS dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik. Bantuan yang diberikan mencakup biaya pendidikan serta biaya hidup, seperti buku, transportasi, makanan, dan perlengkapan lain. Dalam rangka meningkatkan efektivitas KJMU, pemerintah akan menjalin kerja sama dengan lebih banyak PTN dan PTS serta menyesuaikan *unit cost* berdasarkan wilayah tempat kuliah. Sejak diluncurkan pada 2016, total penerima KJMU mencapai 15.649 mahasiswa. KJMU telah berperan dalam meningkatkan keberlanjutan pendidikan tinggi bagi peserta didik kurang mampu. Hal ini ditunjukkan oleh data BPS dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di DKI Jakarta meningkat dari 40,05% pada 2021 menjadi 41,98% pada 2024.

Perluasan masa wajib belajar menjadi 13 tahun menjadi sebuah tantangan yang harus disambut dengan baik karena akan mendukung peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM). Satu tahun pra sekolah dasar penting untuk mendukung keberhasilan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Peserta didik yang sudah melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dinilai lebih siap dalam fondasi keterampilan sosial, motorik, dan kognitif anak dalam proses belajar. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sangat penting untuk peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) karena berkaitan dengan angka harapan lama sekolah (HLS) kelompok usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun. Saat ini akses PAUD holistik integratif dinilai sangat penting untuk menunjang perkembangan kognitif awal dan perlu didukung penyediaan satuan pendidikan PAUD dan tenaga pendidik PAUD yang kompeten. Target Angka partisipasi sekolah jenjang PAUD tahun 2025 sebesar 82,32% hingga tahun 2030 sebesar 95,53%. Target proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B di tahun 2025 sebesar 77,45% hingga tahun 2023 sebesar 100%. Target proporsi guru PAUD dengan kualifikasi D4/S1 di tahun 2025 sebesar 78,69 hingga tahun 2023 ditargetkan sebesar 81,79%.

Untuk menjamin kualitas hasil belajar setiap jenjang pendidikan dilaksanakan Asesmen Nasional untuk mengukur kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan pengetahuan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mencapai tujuan hidup. Kemampuan numerasi menggunakan konsep matematika secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memahami, menganalisis, menafsirkan, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan angka dan data. Asesmen Nasional ini mengadopsi konsep *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.

Peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) di tahun 2025 ditargetkan memiliki kemampuan literasi 73,95 dan kemampuan numerasi 62,23 hingga di tahun 2030 ditargetkan memiliki kemampuan literasi 86,45 dan kemampuan numerasi 76,73. Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun 2025 ditargetkan memiliki kemampuan literasi 83,13 dan kemampuan numerasi 71,62 hingga di tahun 2030 ditargetkan kemampuan literasi 88,63 dan kemampuan numerasi 79,12. Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di tahun 2025 ditargetkan memiliki kemampuan literasi 86,62 dan kemampuan numerasi 75,09 hingga di tahun 2030 ditargetkan kemampuan literasi 89,62 dan kemampuan numerasi 83,09. Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tahun 2025 ditargetkan memiliki kemampuan literasi 78,83 dan kemampuan numerasi 66,28 hingga di tahun 2030 ditargetkan kemampuan literasi 85,33 dan kemampuan numerasi 77,28. Peserta didik jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di tahun 2025 ditargetkan kemampuan literasi 40,64 dan kemampuan numerasi 48,27 hingga di tahun 2030 ditargetkan kemampuan literasi 48,64 dan kemampuan numerasi 51,27. Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di tahun 2025 ditargetkan memiliki kemampuan literasi 53,68 dan kemampuan numerasi 53,57 hingga di tahun 2030 ditargetkan kemampuan literasi 56,18 dan kemampuan numerasi 54,822. Peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di tahun 2025 ditargetkan memiliki kemampuan literasi 52,59 dan kemampuan numerasi 54,45 hingga di tahun 2030 ditargetkan kemampuan literasi 55,09 dan kemampuan numerasi 56,95.

Pemprov DKI Jakarta juga fokus meningkatkan dan memperbaiki iklim lingkungan belajar yang mencakup iklim keamanan sekolah, iklim kebhinekaan dan iklim inklusivitas, untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan untuk semua, anti perundungan/*bullying*, serta mencegah terjadinya peserta didik putus sekolah. Iklim inklusivitas satuan pendidikan merujuk pada lingkungan belajar yang mendorong semua peserta didik termasuk murid berkebutuhan khusus, dari berbagai latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda untuk merasa diterima, dihargai, didukung, dan dapat berkembang bersama tanpa hambatan. Satuan pendidikan inklusif menyediakan akses setara terhadap pembelajaran bagi semua murid, guru dan tenaga kependidikan, tidak melakukan diskriminasi, murid merasa aman, dihargai, dan dilibatkan dalam kegiatan sekolah, perbedaan dilihat sebagai kekuatan bukan sebagai masalah, kurikulum dan metode pembelajaran menyesuaikan kebutuhan beragam peserta didik, dan fasilitas fisik mendukung aksesibilitas, seperti jalur kursi roda dan toilet ramah disabilitas. Target iklim inklusivitas jenjang Sekolah Dasar (SD) di tahun 2025 sebesar 65,14% dan di tahun 2030 sebesar 77,64%, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) target 2025 sebesar 65,15% dan di tahun 2030 sebesar 77,15%, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) target 2025 sebesar 68,25% dan di tahun 2030 sebesar 75,75% dan untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) target 2025 sebesar 65,23% dan di tahun 2030 sebesar 74,43%.

Selain itu, dibutuhkan strategi pengelolaan dan manajemen satuan pendidikan yang tepat, serta tata kelola pendidik/guru yang kompeten. Penguatan kompetensi guru, akan dilakukan dengan peningkatan kualifikasi calon guru, pelatihan pedagogik, sertifikasi kompetensi, program guru magang di industri, dan pengembangan profesi berkelanjutan lainnya. Selanjutnya penguatan manajemen pendidikan dilaksanakan melalui, distribusi dan tata kelola pendidik/guru dan tenaga kependidikan yang profesional, penjaminan mutu dengan penguatan sistem akreditasi, dan evaluasi kinerja guru dan satuan pendidikan. Peningkatan kualitas layanan pendidikan juga didukung melalui, digitalisasi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi, pembaruan sistem pembelajaran mendalam (*deep learning*) sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan sains peserta didik, penguatan karakter peserta didik melalui pembiasaan “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, serta pengenalan *coding* dan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan adaptif sesuai kebutuhan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mendukung upaya Jakarta menuju kota global pada sektor pendidikan dilakukan kerja sama antara satuan pendidikan negeri dengan lembaga pendidikan asing. Bentuk kerja sama tersebut seperti implementasi kurikulum tambahan pada SMAN Unggulan MH Thamrin yang menerapkan kurikulum nasional dilengkapi dengan kurikulum Cambridge dan Olimpiade. Peningkatan mutu juga dilaksanakan pada pendidikan vokasi melalui revitalisasi pendidikan vokasi/sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk meningkatkan angka keberkerjaan lulusan SMK, dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri lokal, nasional dan internasional;
2. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk program magang peserta didik dan guru;
3. Program kecakapan hidup, penguatan *soft skills*, literasi digital, dan kewirausahaan;
4. Program revitalisasi SMK Unggulan berbasis BLUD dan pelatihan manajemen BLUD;
5. Program penguatan *teaching factory* dan kelas industri;
6. Fasilitasi sertifikasi kompetensi; dan
7. Penyelenggaraan kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan *job matching* di SMK.

Tingkat keterserapan lulusan SMK di tahun 2025 sebesar 90,83% dan di tahun 2030 ditargetkan menjadi 95,07% dengan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK di tahun 2025 sebesar 80,86% dan di tahun 2030 sebesar 83,56%. Peningkatan kebermanfaatan lulusan SMK diharapkan dapat meningkatkan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) yang merupakan salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan target 2025 sebesar 76,70% dan di tahun 2023 ditargetkan 80,59%. Salah satu strategi untuk pencapaian indikator tersebut adalah dengan memanfaatkan kewenangan pengelolaan akademi komunitas. Akademi komunitas dapat menjadi alternatif peningkatan jenjang pendidikan bagi lulusan SMK dengan percepatan masa studi dengan gelar diploma. Akademi komunitas dengan keahlian khusus dapat dibentuk untuk menyediakan SDM dengan keahlian khusus sehingga meningkatkan daya saing pekerja.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan perlu diikuti dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Berdasarkan data pokok pendidikan (DAPODIK) tahun 2025, Jakarta memiliki 113 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (SPAUDN), 1.305 SD Negeri, 293 SMP Negeri, 117 SMA Negeri, 74 SMK Negeri, 13 Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri. Berdasarkan data tersebut perlu penambahan layanan pada jenjang sekolah menengah dan sekolah luar biasa. Penambahan layanan diharapkan dapat meningkatkan daya tampung karena besarnya *gap* antara lulusan pendidikan dasar dengan daya tampung pendidikan menengah. Selain itu, revitalisasi kantin sekolah menjadi salah satu standar prasarana yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kantin sekolah bukan hanya sekedar tempat untuk jajanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan siswa yang menyediakan makanan bergizi seimbang dan higienis. Kantin Sehat di sekolah diharapkan menjadi pusat edukasi bagi warga sekolah yang memberikan pengetahuan dalam penyediaan bahan pangan lokal, pengolahan makanan sehat berbahan baku lokal, teknik penyajian makan sehat dan pendidikan kewirausahaan berbasis makanan olahan sehat. Pengetahuan pengolahan makanan sehat diharapkan menjadi bekal bagi peserta didik ketika dewasa dan menjadi orang tua sehingga dapat mengolah dan menyajikan makanan sehat di rumah masing-masing sehingga meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan asupan gizi keluarga yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan keluarga.



Gambar III.29 Implementasi Kantin Sehat Jakarta Cerdas

Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta, 2025

B. Membaiknya Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan harapan hidup warga Jakarta, serta mewujudkan kesehatan perkotaan, berbagai inovasi dilakukan secara holistik untuk membangun sistem kesehatan kota yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dengan pendekatan siklus kehidupan (*continuum of care*). Tantangan dari kondisi demografi ditandai dengan angka *fertility rate* sebesar 1,75 (sensus penduduk tahun 2020) yang mengindikasikan penurunan pertumbuhan penduduk. Apabila kondisi ini berlanjut hingga tahun 2030, Jakarta akan memasuki era *ageing population*. Hal ini akan memberi tekanan pada sektor kesehatan dengan meningkatkan faktor risiko penyakit degeneratif yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Dibutuhkan transformasi layanan di seluruh fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, dan peningkatan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan layanan kuratif dan rehabilitatif.

Saat ini, Jakarta telah memiliki kapasitas layanan kesehatan yang cukup bersaing, yang terdiri dari 18 rumah sakit tipe A, 61 rumah sakit tipe B, 85 rumah sakit tipe C, dan 26 rumah sakit tipe D. Di masa mendatang, setiap fasilitas kesehatan diharapkan mampu mengimplementasikan transformasi layanan, seperti pengembangan layanan unggulan RSD, peningkatan kapasitas tempat tidur perawatan intensif, peningkatan akreditasi paripurna bagi RSD dan puskesmas, serta pencapaian standar akreditasi nasional dan internasional bagi laboratorium kesehatan daerah.

Dalam rangka mendukung visi Jakarta sebagai kota global akan dikembangkan 1 (satu) rumah sakit daerah berstandar internasional dan penguatan pelayanan kesehatan primer/*Primary Health Care* (PHC) sesuai dengan rekomendasi WHO. Pada kondisi eksisting, layanan kesehatan primer di Jakarta tersebar di 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu di kelurahan. Peningkatan pelayanan kesehatan primer dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan pasien di rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Hingga tahun 2030, direncanakan pembangunan/rehabilitasi puskesmas dengan total sebanyak 34 puskesmas baik tingkat kecamatan maupun kelurahan, pemenuhan kebutuhan layanan ambulans, dan pengembangan sistem surveilans untuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyakit. Pengembangan layanan *home care* warga Jakarta (Pasukan Putih) juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan kesehatan primer berbasis wilayah dan menjadi solusi bagi warga yang tidak dapat datang berobat langsung ke puskesmas. Selanjutnya, transformasi layanan kesehatan akan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi untuk membangun *platform* aplikasi layanan terintegrasi (pendaftaran *online*, telekonsultasi, e-rekam medis) yang *user friendly* dan memperpendek waktu tunggu layanan. Kesiapan infrastruktur fisik juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur non fisik berupa sumber daya kesehatan berstandar internasional, sehingga ke depannya membuka peluang Jakarta menjadi destinasi wisata kesehatan dan mampu menarik investasi non-APBD di sektor kesehatan.



Gambar III.30 Pasukan Putih Puskesmas Kecamatan Cilandak

Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2025

Penanganan isu strategis kesehatan seperti Pengendalian Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) dilakukan lintas sektor dengan melibatkan masyarakat seperti, edukasi dan skrining kesehatan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan tempat kerja, pemberdayaan kader Posyandu dan kader masyarakat lainnya untuk melakukan pendampingan pengobatan dan pelacakan kontak pasien, serta sosialisasi kegiatan promotif dan preventif. Dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyakit menular (PM) yang menjadi prioritas utama, pada tahun 2023 telah dilaksanakan penuntasan kasus terduga tuberkulosis sebanyak 276.584 orang dan penanganan kasus HIV/AIDS sebanyak 5.875 kasus. Penanganan penyakit menular lainnya, di antaranya pneumonia (fokus pneumonia balita), hepatitis, malaria, demam berdarah, influenza, flu burung, serta penyakit terabaikan seperti kusta (khususnya di wilayah Kepulauan Seribu), *frambusia*, *filariasis*, dan *schistosomiasis* juga tetap menjadi fokus. Selain itu, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus, bersama dengan sistem kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB) menjadi perhatian tersendiri. Selanjutnya, penyakit tidak menular (PTM) yang menjadi penyebab utama kematian, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kanker—terutama kanker payudara dan serviks juga menjadi prioritas penanganan. Dari sisi pencegahan, akan dilakukan pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik.

Isu strategis kesehatan perkotaan lainnya yaitu menjaga kesehatan mental warga seiring dengan meningkatnya kompleksitas hidup maupun permasalahan perkotaan. Pelibatan masyarakat dalam program kesehatan mental juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme pemberdayaan individu, organisasi, hingga komunitas. Layanan *hotline* 24 jam interaktif untuk kesehatan mental telah dikembangkan dan berkontribusi menurunkan prevalensi Gangguan Mental Emosional (GME) pada usia masyarakat ≥ 15 tahun dari 9,8% pada tahun 2018 menjadi 2,3% pada tahun 2023. Program kesehatan mental juga diperkuat dengan layanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Demi menciptakan generasi emas yang berkualitas, diperlukan intervensi kesehatan dalam berbagai siklus kehidupan. Prevalensi *stunting* di Jakarta yang saat ini tercatat sebesar 17,2% ditargetkan menurun menjadi 12,3% pada tahun 2030. Percepatan penurunan *stunting* dilakukan terhadap kelompok sasaran, yang terdiri dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, remaja putri, calon pengantin, serta keluarga dan masyarakat. Setiap kelompok sasaran dipastikan menerima layanan sesuai, antara lain pemberian makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), pemberian tablet tambah darah/*Multiple Micronutrient Supplementation* (MMS) selama masa kehamilan, pemeriksaan kehamilan, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, praktik inisiasi menyusui dini, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, penambahan asupan gizi balita, skrining anemia dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, serta berbagai upaya pendampingan masing-masing kelompok sasaran lainnya. Pencegahan dan penanganan *stunting* juga membutuhkan kerja sama lintas sektor, yang terdiri dari intervensi sensitif dari sektor di luar kesehatan (70%) dan intervensi spesifik dari sektor kesehatan (30%). Beberapa bentuk intervensi sensitif yang dilakukan antara lain, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, peningkatan akses pangan bergizi, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), gerakan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan pemberian bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*, serta upaya intervensi sensitif lainnya.

Jaminan kesehatan warga terus diperkuat melalui peningkatan *Universal Health Coverage* (UHC) dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditargetkan meningkat dari 98,34% pada tahun 2024 menjadi 99,05% pada tahun 2030. Selain cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, cakupan layanan kesehatan yang komprehensif atau *UHC Service Coverage Index* (UHC SCI) meliputi kesehatan ibu, anak, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi, penanganan penyakit menular, penanganan penyakit tidak menular, serta kapasitas pelayanan kesehatan juga ditargetkan meningkat dari 79,46% pada tahun 2024 menjadi 86,81% pada tahun 2030. Kedua indikator tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Manfaat jaminan kesehatan Jakarta juga diperluas dengan layanan seperti, ambulans gawat darurat, layanan dan visum bagi korban kekerasan, pengelolaan darah PMI, dan pemeriksaan kesehatan bagi kelompok sasaran tertentu (tokoh agama, pengemudi JakLingko, dan sasaran lainnya sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kebijakan khusus juga diberikan untuk wilayah Kepulauan Seribu yang selama ini masih memiliki keterbatasan layanan melalui, pembangunan puskesmas pembantu di kelurahan yang belum memiliki puskesmas, perbaikan infrastruktur pada puskesmas tingkat kecamatan, peningkatan aksesibilitas kapal pelayanan kesehatan dan ambulans kapal, serta pengembangan Rumah Sakit Daerah.



Gambar III.31 Ambulans Unit Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Terpadu (PK3D)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Upaya perbaikan kesehatan perkotaan juga didukung oleh sektor lainnya. Menurut WHO, kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan, bukan sekedar bebas dari penyakit. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus mempertimbangkan perspektif yang lebih luas, termasuk psikologis dan olah raga. Pengembangan budaya olah raga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang membutuhkan ruang serta fasilitas yang memadai untuk membangun gaya hidup sehat. Pemenuhan prasarana olah raga bagi masyarakat dilaksanakan untuk memudahkan akses terhadap pusat kebugaran jasmani yang esensial. Ke depan, Gedung Olahraga (GOR) dan Gelanggang Remaja (GR) juga tidak hanya berfungsi sebagai pusat olahraga, namun dikembangkan sebagai ruang kreatif untuk beragam aktivitas seni dan budaya. Aktivasi Balai Rakyat yang melibatkan Karang Taruna akan dilaksanakan dengan memanfaatkan Gelanggang Remaja sebagai fasilitas yang selama ini menjadi daya tarik bagi anak muda untuk berkumpul, berekspresi, dan mengeksplorasi minat serta bakat.

Pemerintah turut memastikan seluruh *venue* dan fasilitas olahraga memenuhi standar internasional dan ramah bagi penyandang disabilitas. Jakarta International Stadium (JIS) merupakan stadion berkonsep *green building* pertama di Indonesia yang memenuhi standar FIFA dan ke depannya akan dioptimalkan manfaatnya sebagai *venue* kegiatan olahraga, seni budaya, bisnis, dan keagamaan skala lokal, nasional, dan internasional. Kawasan stadion ini akan terintegrasi dengan moda transportasi publik BRT dan LRT, serta rencana pengembangan akses dari stasiun KRL JIS. Beberapa lapangan sepak bola lainnya yang telah direvitalisasi dengan standar FIFA, yaitu Serdang, Muara Angke, Kemanggisan, Jagakarsa, dan Klender, akan terus diikuti dengan pembangunan lebih lanjut di lokasi lain. Untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses, seluruh fasilitas olahraga milik pemerintah kini dapat dipesan secara daring, dengan sistem pemesanan yang terus disempurnakan.



Gambar III.32 Lapangan Ingub Serdang Berstandar FIFA

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, 2025

Potensi ekonomi dari sektor olahraga telah terbukti melalui penyelenggaraan *mega event* Asian Games yang berhasil menarik kunjungan mancanegara dan membuka peluang kerja baik sebelum, saat, dan setelah acara. Oleh karena itu, perencanaan *event* serupa terus didorong guna membangun citra kota yang mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional. Infrastruktur yang telah dibangun juga akan dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mendukung aktivitas seperti festival olahraga masyarakat. Festival ini dirancang agar dapat berlangsung secara efektif dan kontinu setiap tahun dengan tujuan meningkatkan interaksi sosial dan membangun kebiasaan berolahraga yang berkelanjutan.

Selain pembudayaan olahraga, pembinaan prestasi olahraga juga dilakukan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Sesuai Perpres 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), pembinaan atlet berbakat dilakukan sejak usia dini melalui berbagai tahapan, mulai dari sekolah dasar hingga pemusatan latihan daerah. Pemanfaatan *sport science* juga menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pengembangan olahraga, peningkatan prestasi atlet, serta daya saing di tingkat nasional dan internasional. Dengan strategi ini, Jakarta diharapkan dapat terus menghasilkan atlet berprestasi dan memperkuat perannya sebagai pusat olahraga nasional.

C. Meningkatkan Kontribusi Generasi Muda dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender

Pembangunan yang inklusif mensyaratkan pelibatan aktif serta pemenuhan hak seluruh lapisan masyarakat; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan hak dasar terpenuhi, akses terhadap peluang diperluas, pemberdayaan berkelanjutan terwujud, serta partisipasi bermakna bagi setiap warga terjamin. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok strategis perempuan, anak, dan pemuda yang kontribusi dan kesejahteraannya merupakan pilar utama kemajuan kota, namun kerap belum optimal dan merata merasakan manfaat pembangunan. Data terkini mengindikasikan adanya disparitas partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kunci di Jakarta. Dalam aspek ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan representasi perempuan pada posisi kepemimpinan, baik di sektor publik maupun swasta, belum sepadan dengan potensi yang dimiliki. Meskipun capaian Indeks Ketimpangan Gender membaik di tahun 2024 sebesar 0,147 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,256, namun demikian tetap perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan kesetaraan.

Perluasan akses informasi dan edukasi kepada perempuan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam persiapan memasuki dunia kerja. Selain itu, berbagai program pelatihan keterampilan dan pendampingan oleh tenaga profesional diperlukan untuk meningkatkan daya saing perempuan. Pelatihan yang dilakukan menyasar langsung keluarga didukung kemitraan dengan lembaga *profit/non-profit* serta organisasi masyarakat. Pengembangan pelatihan disertai survei evaluatif dan analisis berbasis kebutuhan, guna meningkatkan efektivitas program. Selain itu, pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan serta memastikan distribusi manfaat yang setara, melalui pelibatan aktif pemuda dan integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan program pelatihan.

Kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi menghambat akses mereka terhadap keadilan dan rasa aman, yang merupakan aspek fundamental dalam pembangunan inklusif. Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Jakarta, misalnya, menyerupai fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang terjadi diestimasi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Seiring dengan meningkatnya keterbukaan akses pelaporan, keberanian korban, serta keyakinan terhadap penyelesaian kasus, jumlah laporan diproyeksikan akan meningkat dan memudahkan penanganan kasus yang selama ini tidak terdeteksi. Sebagai respons, edukasi dan diseminasi informasi mengenai pencegahan serta layanan penanganan tindak kekerasan terus digencarkan. Upaya optimalisasi penanganan diwujudkan melalui penyediaan layanan komprehensif bagi korban KtP/A. Layanan pengaduan yang bisa diakses antara lain, melalui pengaduan langsung ke Kantor Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), pengaduan melalui telepon/WA/SMS, Jakarta Siaga 112, pos pengaduan yang tersebar di 44 kecamatan, atau melalui rujukan dari mitra kerja PPPA. Layanan yang diberikan, meliputi penerimaan pengaduan, informasi, komunikasi, edukasi (KIE), pendampingan hukum, layanan psikososial, hingga rujukan pelayanan kesehatan dan rumah aman. Pada tahun 2025, direncanakan pembangunan rumah perlindungan sementara di dua lokasi guna memperluas akses penampungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan. Layanan terpadu satu atap (*one-stop service*) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terus diperkuat agar 100% korban kekerasan memperoleh penanganan cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Lebih jauh, kesetaraan gender dalam relasi keluarga juga menjadi fondasi utama ketahanan keluarga, di mana kolaborasi berkelanjutan antar berbagai pihak menjadi kunci. Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) dirancang sebagai *platform* pelayanan keluarga satu pintu berbasis digital, didukung data Tim Penggerak PKK melalui kader dasa wisma, yang menyediakan informasi, edukasi, hingga layanan konseling demi mewujudkan keluarga Jakarta yang bahagia dan berketahanan. Layanan-layanan digital PUSPA yang dapat diakses melalui laman puspa.jakarta.go.id, antara lain layanan informasi keluarga, tele-konsultasi, tim pendamping keluarga, Jakpreneur, Pusat Pembelajaran Perempuan (Putaran), kampanye edukasi dan lapor tindak kekerasan. Layanan konsultasi PUSPA dirancang secara inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan juru bicara isyarat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian PPPA untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dalam bentuk kampanye dan sosialisasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam konteks ini, pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang optimal, pendidikan berkualitas, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan menjadi prioritas yang tak terpisahkan.

Sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, optimalisasi potensi pemuda perlu menjadi intervensi kolektif. Kelompok pemuda di Jakarta, sebagai agen perubahan dan penerus pembangunan, menghadapi serangkaian tantangan tersendiri. Angka pengangguran terbuka di kalangan pemuda (usia 15–24 tahun) kerap lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain, mengindikasikan ketidakselarasan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya di era Industri 4.0. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan belum merata sepenuhnya, dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan serta ruang publik yang konstruktif juga perlu terus didorong agar aspirasi dan inovasi mereka terakomodasi secara optimal. Kompleksitas tantangan ini menggarisbawahi sifat lintas sektor isu kepemudaan, yang dampaknya merambat ke berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai dari isu kesehatan mental, akses layanan kesehatan reproduksi, keterpaparan risiko penyalahgunaan narkoba, partisipasi dalam menjaga ketertiban umum, hingga peran dalam pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim dengan intervensi serta kolaborasi yang melibatkan praktisi, komunitas pemuda serta perguruan tinggi dalam pelaksanaannya.



Gambar III.33 Konsep Pembangunan Pemuda Holistik

Sumber: Bappenas, 2025

Pemberdayaan pemuda yang holistik memerlukan kerangka kerja kolaboratif dan sinergi antar Perangkat Daerah mencakup bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga komunikasi dan informatika. Pendekatan lintas sektor ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan program komprehensif, memastikan setiap kebijakan pembangunan di Jakarta mempertimbangkan dampaknya terhadap pemuda dan secara aktif membuka ruang bagi kontribusi mereka. Pemenuhan hak pemuda juga merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan

dalam upaya memastikan *ageing population* Jakarta dalam beberapa periode ke depan tidak menjadi beban, melainkan aset. Investasi pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi pemuda saat ini akan menghasilkan generasi dewasa yang produktif, inovatif, dan mampu menopang populasi yang lebih tua. Pemenuhan hak pemuda dalam konteks ini perlu diupayakan sebagai bentuk strategi demografi dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berdaya di masa depan. Untuk mewujudkan visi pembangunan inklusif ini, Pemerintah Provinsi DKI Indonesia berkomitmen penuh memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak, dan pemuda sebagai kelompok penduduk dengan kebutuhan spesifik. Pendekatan yang responsif gender, berfokus pada pemenuhan hak anak, dan memberdayakan pemuda menjadi landasan untuk menjamin kualitas hidup, keadilan, serta keterlibatan yang bermakna dari setiap individu dalam setiap denyut pembangunan kota.



Gambar III.34 Kerja Sama Jakarta Internasional Youth Program

Sumber: Berita Jakarta, 2025

D. Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat

Pembangunan kota harus diiringi pembangunan manusia dengan kearifan budaya lokal agar kebijakan prioritas yang diterapkan memiliki nilai yang lebih kaya dan bermakna. Pembangunan manusia yang merupakan pelaku utama pembangunan dengan perspektif nilai budaya bertujuan untuk memperluas pilihan hidup, memecahkan masalah, menghasilkan inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Dengan nilai, norma, dan ekspektasinya, budaya dapat mempengaruhi cara individu dan kelompok masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan peluang, termasuk pilihan karir, peluang kerja, dan akses terhadap sumber daya.

Warisan budaya memainkan peran penting dalam merehabilitasi, merevitalisasi, serta menghidupkan kembali aktivitas di kawasan perkotaan. Pemprov DKI Jakarta telah cukup giat untuk melakukan aktivasi perkotaan melalui pemajuan kebudayaan, seperti pembangunan pusat-pusat pengembangan seni dan kebudayaan, penetapan cagar budaya, pengembangan praktik budaya yang mulai redup, pemanfaatan sarana budaya, pembinaan komunitas budaya, pelestarian warisan tak benda, pengembangan ruang publik yang ramah anak, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak seperti perhotelan maupun komunitas seni budaya.

Kebudayaan memiliki peran krusial dalam pembangunan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang mengacu pada konsep *culture development indicators* (CDIs) dari UNESCO. Konsep ini mengukur kontribusi budaya terhadap pembangunan di berbagai sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, literasi, kesetaraan gender, dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan. IPK memiliki tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender. Dimensi-dimensi ini menggambarkan luasnya cakupan pembangunan budaya yang melibatkan berbagai sektor. Pada tahun 2023, skor IPK Provinsi DKI Jakarta tercatat di bawah skor nasional, yaitu 55,96, sementara skor nasional berada di angka 57,13. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan di Jakarta masih rendah, terutama pada dimensi ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya. Ini mengindikasikan masih adanya hambatan bagi masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreativitas, meski terdapat potensi besar yang dapat menjadi sumber daya berharga untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Selaras dengan Visi Pemajuan Kebudayaan tahun 2045 dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang RIPK (Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan), Pembangunan kebudayaan dicapai dengan menerapkan delapan strategi, yaitu:

1. **Dimensi Pendidikan.** Upaya pendidikan kebudayaan yang inklusif, menyeluruh, berkualitas, dan setara, antara lain melalui penyelenggaraan ajang seni budaya secara berjenjang dan berkelanjutan pada satuan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan formal seni budaya kontekstual, fasilitasi pengembangan program dan bantuan dana operasional bagi organisasi seni budaya penyelenggara pembibitan talenta (lembaga, komunitas, dan sanggar) secara berkelanjutan, perluasan satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum seni budaya kontekstual yang dikembangkan, pengembangan model pembelajaran yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus-anak yang bekerja-bersahabat dengan hukum-terlantar dan berada pada daerah rawan bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas institusi pendidikan kebudayaan serta pelibatan pelaku budaya dalam pendidikan.
2. **Budaya Literasi.** Budaya literasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk dapat menganalisis informasi secara cermat, memahami isu-isu politik, dan mengemukakan pendapat secara konstruktif. Bagi pemajuan kebudayaan, literasi berfungsi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan mengapresiasi berbagai bentuk informasi dan ekspresi budaya, sehingga lebih mampu menghargai keberagaman, dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni budaya. Untuk menciptakan masyarakat literat yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan budaya, diperlukan fokus investasi pada pembangunan budaya literasi. Untuk menumbuhkan minat baca sejak dini, dilakukan perbaikan akses dan layanan untuk menciptakan ruang-ruang yang mendukung literasi seperti perpustakaan keliling, perpanjangan jam layanan perpustakaan umum, serta peningkatan partisipasi digital masyarakat dalam literasi. Pemanfaatan fitur Jaklitera dapat menjadi jembatan antara literasi, teknologi, dan kebudayaan, dengan menyediakan akses digital ke buku, arsip, serta informasi budaya Jakarta. Kehadiran Jaklitera mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih aktif membaca, belajar, sekaligus mengenali warisan budaya kotanya melalui media yang relevan dengan era digital.



Gambar III.35 Layanan Perpustakaan Keliling

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

3. **Gender.** Untuk memastikan setiap individu merasa dihargai, aman, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dilakukan upaya pendekatan inklusi yang memperhitungkan keberagaman dan mendorong budaya kesetaraan. Upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain, pembentukan kebijakan yang mendukung penegakan kesetaraan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan kerja; peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan pada perempuan dan kelompok rentan; serta penjaminan perluasan, pemerataan, dan pengelolaan yang adil terhadap sarana dan prasarana kebudayaan di seluruh wilayah.

4. **Ketahanan sosial budaya.** Generasi muda-produktif membutuhkan lingkungan dengan ketahanan sosial budaya yang kuat agar dapat berjejaring secara global serta berkontribusi pada demokrasi dan pembangunan lintas batas. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung program-program pemerintah daerah yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok muda-produktif. Program-program tersebut menjadi upaya kolaboratif berbasis komunitas dalam menjaga dan meningkatkan toleransi, kerukunan, dan mewujudkan persatuan serta masyarakat yang berbhineka. Dengan upaya, antara lain: a) reaktivasi GOR dan RPTRA sebagai pusat olahraga dan budaya yang menciptakan ruang interaksi dan menguatkan identitas bersama; b) penyelenggaraan program yang menghadirkan interaksi budaya lintas kelompok dan daerah; c) penyelenggaraan program-program edukatif dan partisipatif yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai toleransi, persatuan, dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat multikultural; d) pengawasan pengelolaan mental spiritual; e) pemanfaatan ruang publik sebagai wadah aktivitas ekonomi kreatif dan seni budaya berjenjang; serta f) reformasi regulasi yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Semua upaya tersebut diarahkan dan diintegrasikan dalam program lintas perangkat daerah serta *stakeholder* terkait untuk menciptakan suasana di mana semua orang merasa dihargai dan hidup berdampingan secara harmonis. Tumbuhnya hubungan harmonis antar kelompok masyarakat dapat berkontribusi langsung pada penanganan persoalan sosial, seperti menurunnya diskriminasi, intoleransi, perundungan, konflik tawuran, dan sebagainya.
5. **Warisan budaya.** Betawi sebagai ciri khas dan jati diri Jakarta menghadapi tantangan akibat modernisasi dan peran Jakarta sebagai pertemuan budaya nusantara dan internasional. Budaya Betawi yang tercermin dalam keramahan, saling menghormati, dan kebersamaan, dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun interaksi sosial yang positif di tengah keberagaman. Hal ini adalah contoh warisan budaya, yang jika dikelola dan dipromosikan dengan baik, berpotensi besar untuk memajukan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan global. Warisan budaya yang saat ini masih belum banyak digali, kaya akan nilai, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang dapat menjadi sumber inspirasi dan inovasi di berbagai bidang. Terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Jakarta yang sangat potensial untuk dikembangkan, terutama jika generasi muda dapat mengembangkan riset dan ilmu pengetahuan yang berbasis pada pemajuan kebudayaan.

Untuk memajukan kebudayaan Betawi dan warisan budaya di Jakarta, diperlukan strategi antara lain penguatan sentra budaya Betawi, optimalisasi potensi museum dan cagar budaya untuk menjaga warisan sejarah bangsa, peningkatan apresiasi film-musik-museum-dan-cagar budaya, pelestarian perhelatan seni budaya Betawi, peningkatan kolaborasi budaya Betawi dengan budaya modern, peningkatan layanan informasi warisan dan cagar budaya, peningkatan efektivitas mekanisme penetapan warisan budaya tak benda, penyelenggaraan wisata edukasi budaya dan sejarah, pelestarian lomba dan permainan tradisional, peningkatan jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ditetapkan, peningkatan program kerja sama pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya, peningkatan kualitas pengelolaan koleksi-cagar budaya-dan warisan budaya, serta pengintegrasian kurikulum dengan kebudayaan Betawi.



Gambar III.36 Lebaran Betawi di Kawasan Monumen Nasional

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2025

6. **Ekspresi budaya.** Dalam memperkuat ekspresi budaya, diperlukan upaya-upaya antara lain penguatan jaminan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai serta ekspresi budaya bagi setiap individu, pembangunan layanan aduan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak kebebasan masyarakat dalam berkebudayaan yang efektif, peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia bidang kebudayaan, pemberian ruang dan wadah untuk berbicara dan berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan partisipatif, penyelenggaraan program-program pembinaan dan pelatihan kepemimpinan, serta pemberian dukungan untuk program yang memobilisasi dan memberdayakan, untuk membuat generasi muda-produktif dapat merasa lebih dihargai, didengar, dan merasakan kepemilikan yang lebih besar terhadap proses pembangunan.
7. **Ekonomi budaya.** Pengembangan ekonomi budaya membutuhkan desain lingkungan yang membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berani berwirausaha, di antaranya (1) Penciptaan peluang bisnis berbasis budaya seperti pusat oleh-oleh Jakarta, pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya, dan penyelenggaraan event budaya berskala lokal dan internasional, (2) Pengembangan inovasi kreatif melalui antara lain, pengembangan *platform* digital untuk mendukung promosi karya budaya dan tumbuhnya industri berbasis budaya, dukungan terhadap acara atau festival yang dapat meningkatkan daya saing, serta (3) Penguatan identitas daerah yang dapat menarik wisatawan dan investor melalui antara lain penguatan fungsi *creative hub*, promosi budaya Betawi, aktivasi objek bersejarah dan kampanye sejarah Jakarta, peningkatan inisiatif pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka diplomasi budaya, peningkatan promosi perfilman, dan peningkatan sarana prasarana museum melalui pengembangan teknologi.
8. **Tata kelola.** Pembangunan kebudayaan memerlukan penguatan tata kelola yang mencakup aspek kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan. Hal ini mencakup inisiasi Dana Abadi Kebudayaan, penyusunan regulasi perlindungan kekayaan intelektual dan seni, serta perbaikan tata kelola museum dan cagar budaya. Selain itu, penguatan SDM dan lembaga kebudayaan, kemitraan strategis, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem kebudayaan. Upaya lainnya meliputi peningkatan kapasitas ASN dan tenaga kebudayaan, pengembangan talenta seni, serta perbaikan tata kelola dan anggaran lembaga kebudayaan secara transparan dan akuntabel. Untuk mendukung kebijakan yang tepat, perlu disediakan sistem pendataan kebudayaan yang terpadu dan mudah diakses, serta disusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

Jakarta telah memiliki beberapa pusat kebudayaan, seperti Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) dan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan, yang berfungsi sebagai pusat seni dan edukasi budaya sekaligus ruang interaksi masyarakat. Selain itu, Jakarta memiliki beberapa lokasi lain yang potensial, seperti Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjith, Gedung Wayang Orang Bharata, Gedung Budaya Condet, dan Taman Benyamin Sueb. Upaya pendayagunaan dan apresiasi terhadap warisan budaya terus dilakukan melalui revitalisasi dan aktivasi cagar budaya melalui konsep *adaptive reuse* yang diterapkan untuk menghidupkan kembali fungsi ruang dengan tujuan konservasi. Selain perbaikan infrastruktur kebudayaan, diperlukan pula dukungan terhadap acara atau festival yang dapat meningkatkan daya saing Jakarta di sektor wisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif. *Event-event* kebudayaan perlu dirancang dengan kreatif agar mampu menarik audiens yang lebih luas. Kebudayaan dapat menjadi aset utama dalam pariwisata, asalkan didukung dengan promosi serta pengelolaan yang tepat sehingga mampu menarik minat wisatawan global.



Gambar III.37 Integrasi Gedung Cagar Budaya AA Maramis dengan Lapangan Banteng

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, Jakarta merefleksikan keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, ras, dan golongan. Heterogenitas ini menjadikan Jakarta rentan terhadap potensi konflik, sehingga diperlukan intervensi kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan penguatan nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan melalui pembinaan ideologi kebangsaan, peningkatan kerukunan antarumat beragama, serta penguatan kewaspadaan sosial. Dalam konteks kinerja demokrasi, Jakarta telah berhasil mencapai kategori “tinggi”. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Indeks Demokrasi Provinsi sebesar 89,13 pada tahun 2030. Adapun beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target tersebut, antara lain pemenuhan hak-hak pekerja, penegakan prinsip anti-monopoli sumber daya ekonomi, pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi.

Dalam hal pengelolaan keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat moderasi beragama dan harmoni sosial melalui pembinaan kehidupan beragama, pemberian dukungan hibah operasional tempat ibadah, penyederhanaan perizinan pendirian rumah ibadah, serta dukungan festival keagamaan sebagai sarana mempererat persaudaraan. Sementara itu, penguatan demokrasi ditempuh melalui pendidikan politik, penguatan etika dan budaya politik, peningkatan peran partai politik, serta optimalisasi kapasitas legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, demokrasi dan kebhinekaan di Jakarta diharapkan semakin kokoh, sehingga terwujud masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

III.3.2. Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan

Tabel III.21 Penentuan Program Prioritas Tujuan 2.1

Misi 2: Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata		
Tujuan 2.1: Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan		
SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi	☐ Implementasi prinsip ekonomi sirkular pada sektor usaha terutama industri dengan pemanfaatan sumber daya alam tinggi ☐ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau dan biru sebagai konsep pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru ☐ Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ☐ Percepatan transisi teknologi ramah lingkungan yang bersih, efisien, dan terbarukan pada industri dan manufaktur ☐ Revitalisasi pasar sebagai kawasan <i>mixed-use</i> ☐ Pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah ☐ Pengembangan kawasan industri ☐ Penguatan rantai pasok antara Industri Kecil Menengah dan Industri Besar	☐ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ☐ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ☐ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ☐ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ☐ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ☐ Program Penyuluhan Pertanian ☐ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ☐ Program Pengembangan Ekspor ☐ Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	☐ Perbaikan dukungan pemerintah terhadap ekosistem riset	☐ Program Riset dan Inovasi Daerah ☐ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

	☐ Pemanfaatan hasil riset untuk penyelesaian permasalahan perkotaan ☐ Peningkatan iklim investasi dan penanaman modal yang kompetitif melalui reformasi perizinan dan efisiensi birokrasi ☐ Penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui inventarisasi dan pemetaan pelaku, pengembangan potensi tematik, dan pembentukan zona percontohan sebagai wadah kolaborasi dan sinergi ☐ Penguatan kolaborasi antar sektor pemerintah, swasta, komunitas, serta masyarakat ☐ Penguatan tim investasi Jakarta	☐ Program Promosi Penanaman Modal ☐ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ☐ Program Penataan Organisasi
Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik	☐ Pelestarian warisan Jakarta melalui <i>adaptive reuse</i> bangunan-bangunan bersejarah untuk menciptakan identitas dan ruang publik yang unik ☐ Peningkatan daya tarik dan kualitas pengalaman wisata melalui revitalisasi objek wisata potensial ☐ Pengembangan wisata pesisir Jakarta, khususnya Kepulauan Seribu, melalui penyelenggaraan festival dan pengembangan SDM pariwisata ☐ Peningkatan citra Jakarta sebagai kota global melalui pengembangan daya tarik wisata dan industri kreatif ☐ Terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan ☐ Berkembangnya pariwisata MICE di Jakarta	☐ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ☐ Program Pemasaran Pariwisata ☐ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ☐ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

A. Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi

Di tengah laju globalisasi, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi yang menuntut respons kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Jakarta perlu membangun ekosistem ekonomi yang lebih produktif mendorong sektor usaha bernilai tambah tinggi dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip ekonomi berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi sumber daya, inovasi industri, dan stabilitas pasar. Inisiatif yang dirancang bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal, memastikan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kebijakan ini juga mengarah pada stabilisasi harga serta perlindungan terhadap UMKM dan IKM. Berbagai program lintas sektor telah dirumuskan untuk merespons tantangan dan mengoptimalkan peluang pertumbuhan di sektor-sektor strategis seperti industri, perdagangan, pertanian, dan perikanan.

Di sektor industri, Jakarta menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing di tingkat global. Untuk menjawab tantangan ini, kebijakan pembangunan industri difokuskan pada penguatan rantai pasok melalui hilirisasi, digitalisasi sistem produksi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Jakarta memiliki sejumlah kawasan industri yang strategis untuk dikembangkan, antara lain Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sebagai pemilik saham mayoritas JIEP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah pengembangan industri yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan kota. Langkah ini juga diharapkan dapat memperluas peluang kerja dan memperkuat sektor industri berdaya saing tinggi.

Sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem industri, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menjadi aspek krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sejalan dengan sinergi antara industri besar dan IKM, transformasi hijau perlu dipercepat di kawasan industri strategis seperti KBN dan JIEP, dengan potensi pengembangannya menuju kota mandiri. Terlepas dari hal tersebut, keberhasilan transisi menuju industri ramah lingkungan bergantung pada beberapa faktor utama diantaranya inovasi dan teknologi hijau, dukungan kelembagaan dan regulasi, integrasi praktik digital dan manajemen *lean*, dan modal manusia dan perubahan organisasional.

Selain berfokus pada pengembangan industri berskala besar, Jakarta secara aktif memperkuat ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan mendorong kapasitas usaha melalui program inkubasi dan membangun rantai pasok yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup penguatan fungsi *creative hub* pada tiap kota administrasi serta kemitraan antara industri besar dan IKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM dengan memberikan akses lebih luas terhadap bahan baku berkualitas, teknologi modern, serta pasar yang terjamin. Selain itu, sinergi antara industri besar dan IKM juga diharapkan dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, menciptakan inovasi bersama, dan meningkatkan nilai tambah produk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong dialog dan kolaborasi antara kedua belah pihak, serta pengembangan *platform* dan mekanisme yang kondusif bagi terjalannya kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, pengembangan industri di Jakarta dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan, memberdayakan seluruh pelaku usaha dari skala besar hingga kecil.

Sebagai pusat bisnis dan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia, Jakarta menghadapi tekanan besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks. Urbanisasi masif dan ekspansi ekonomi telah meningkatkan permintaan akan sumber daya alam, energi, dan infrastruktur. Hal ini akan memperburuk masalah lingkungan seperti polusi udara, banjir, dan penurunan kualitas air. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang memicu ketidakstabilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terukur dan sistematis. Beberapa instrumen yang digunakan adalah Indeks Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu wilayah atau negara mampu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam aktivitas ekonominya. Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan target Indeks Ekonomi Hijau DKI Jakarta sebesar 49,45 pada tahun 2030, dengan *baseline* tahun 2025 sebesar 44,88. Target ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam kebijakan pembangunan kota, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan.

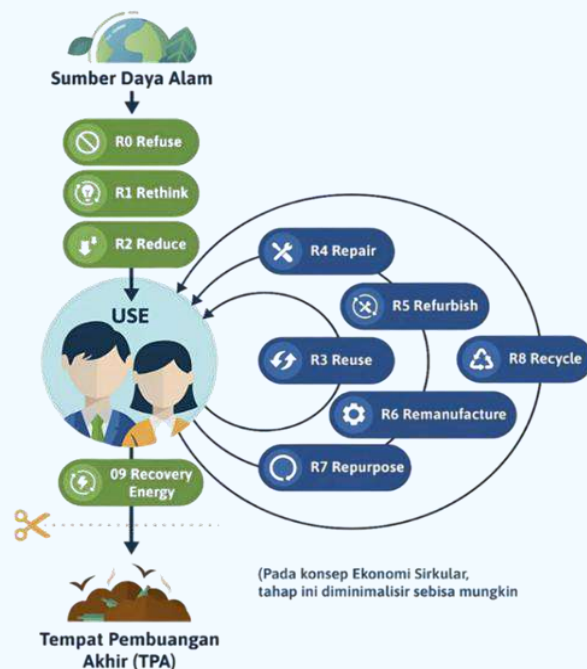


Gambar III.38 Pilar dan Indikator Indeks Ekonomi Hijau

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Pengembangan ekonomi sirkular menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan di Jakarta. Ekonomi sirkular berperan dalam mendorong pengurangan limbah serta peningkatan nilai tambah melalui prinsip penggunaan dan daur ulang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginisiasi langkah awal melalui regulasi seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah. Meskipun konsep ini telah mulai diterapkan, pengembangan lebih lanjut masih diperlukan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat mengadopsi prinsip sirkular dengan optimal. Hal ini menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem yang mampu berjalan secara mandiri tanpa intervensi yang berlebihan.

Untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular, intervensi terhadap sektor industri menjadi langkah awal yang strategis. Dalam Peta Jalan Jakarta Menuju Kota Global (Jakarta Rise#20), disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran kunci dalam menegakkan regulasi pengelolaan limbah, meningkatkan akuntabilitas korporasi, serta mendorong implementasi ekonomi sirkular secara menyeluruh. Sebagai pembanding, Singapura telah menerapkan kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR), yang mewajibkan produsen dan jaringan ritel dengan omset tahunan lebih dari USD 10 juta untuk melaporkan data kemasan serta menyusun rencana pengurangan, penggunaan ulang, atau daur ulang kemasan.



Gambar III.39 Prinsip 9R pada Ekonomi Sirkular

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Low Carbon Development Indonesia

Dalam era globalisasi dan keterbukaan pasar dunia, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan ekspor. Berbagai upaya strategis telah diinisiasi dan akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Adapun ekspor bukan hanya menjadi sarana untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional, tetapi juga merupakan motor penggerak bagi peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri. Jakarta secara aktif memfasilitasi pelaku usaha melalui program *business matching* yang mempertemukan produsen lokal dengan potensi pembeli dari dalam dan luar negeri. Selain itu, partisipasi dalam berbagai bazar berskala nasional maupun internasional terus didorong untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk Jakarta. Ajang Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) juga akan dioptimalkan sebagai *platform* terpadu untuk promosi investasi, perdagangan, pariwisata, dan produk UMKM, sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan.



Gambar III.40 Kegiatan Business Matching Batch di Balai Kota

Sumber: Berita Jakarta, 2025

Revitalisasi pasar tradisional menjadi kawasan *mixed-use* merupakan salah satu strategi dalam peningkatan sektor perdagangan melalui optimalisasi properti perpasaran dan perkulakan ritel sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar akan dioptimalkan sebagai pusat komunitas yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung kebutuhan masyarakat seperti area komersial, ruang kreatif, ruang komunitas, sarana olahraga, dan hunian vertikal. Dari total 27 pasar *mixed-use* yang direncanakan, dua diantaranya telah direvitalisasi menjadi kawasan *mixed-use*. Kedua pasar tersebut adalah Pasar Senen Blok III yang kini memiliki fasilitas pasar dan hotel, serta Pasar Rumput yang memiliki fasilitas pasar dan rumah susun. Adapun konsep digitalisasi pasar juga diterapkan dalam rangka menciptakan ekosistem yang saling mendukung bagi pelaku usaha dan komunitas sekitar, serta memperkuat daya saing pasar tradisional dalam menghadapi persaingan global.

Pada era modern dengan kebutuhan pendanaan yang kompleks, ekonomi dan keuangan syariah tampil sebagai alternatif strategis yang relevan. Selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan amanat Asta Cita, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi, guna memantapkan potensi Jakarta sebagai pusat industri halal dan keuangan syariah terkemuka. Untuk mencapai visi tersebut, strategi utama difokuskan pada penguatan industri halal, dengan memprioritaskan sektor unggulan seperti industri makanan dan minuman, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, serta pengembangan pusat *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) berbasis syariah. Kunci dari penguatan ini adalah pemberdayaan UMKM melalui percepatan sertifikasi halal dan digitalisasi untuk memperluas akses pasar. Kinerja pilar ini akan diukur melalui indikator jumlah produk tersertifikasi halal, dengan target 140.695 produk tersertifikasi halal pada tahun 2025 dan total 700.608 produk selama 5 tahun sampai dengan tahun 2029 untuk seluruh jenis usaha di Jakarta.

Pilar industri halal tersebut akan didukung oleh sektor keuangan syariah yang kokoh. Dengan modal sebagai pusat perbankan syariah yang menguasai lebih dari 50% aset nasional, Jakarta menargetkan peningkatan signifikan pada rasio aset perbankan syariah terhadap PDRB, yaitu dari 18,88% pada tahun 2024 menjadi 19,36% pada tahun 2025, dan mencapai 22,66% pada tahun 2029. Di sisi sosial, optimalisasi dana sosial syariah (ZISWAF) akan diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan, yang keberhasilannya dipantau melalui indeks zakat nasional dengan target 0,85 pada tahun 2025 dan 0,87 pada tahun 2029. Keberhasilan seluruh pilar strategis ini akan ditopang oleh fondasi kebijakan yang kuat, mencakup penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah khususnya bagi kaum urban dan milenial, akselerasi digitalisasi, serta sinergi kolaborasi antara Pemerintah Daerah, BUMD, pelaku industri, dan swasta demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain pengembangan ekonomi syariah, peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, di antaranya pelaku UMKM, merupakan komitmen Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada penguatan ekosistem digital, pemberdayaan UMKM, dan percepatan akses keuangan daerah. Akses keuangan yang inklusif, memadai, dan merata adalah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Keputusan Gubernur Nomor 2299 Tahun 2017 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mencapai target inklusi keuangan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan berpedoman pada kebijakan dan indikator yang bersifat imperatif. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 97,55% pada tahun 2025 dan 98,26% pada tahun 2030. Sementara itu, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) ditetapkan sebagai berikut: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 4,64 pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 4,80 pada tahun 2030; Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 7,46 pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 7,49 pada tahun 2030; Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 6,51 pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 6,58 pada tahun 2030; Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 6,51 pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 6,58 pada tahun 2030; Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 7,14 pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 7,19 pada tahun 2030; serta Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 6,28 pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 6,35 pada tahun 2030.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, Jakarta berambisi untuk memperkuat akses keuangan regional melalui pendalaman dan intermediasi sektor keuangan yang signifikan. Target yang ditetapkan meliputi peningkatan rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB menjadi 152,85%, serta peningkatan aset dana pensiun terhadap PDRB hingga mencapai 10,3%. Di samping itu, nilai transaksi saham per kapita diperkirakan akan meningkat tajam menjadi Rp 407.599.461,14, dengan total kredit terhadap PDRB mencapai 141,5%. Peningkatan inklusi keuangan juga diprioritaskan, dengan target mencapai 98,12%.

Sementara itu, dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah, Jakarta mengimplementasikan strategi komprehensif yang dikenal dengan pendekatan 4K. Pendekatan ini mencakup empat pilar utama, yaitu: 1) ketersediaan pasokan melalui pemantauan stok secara berkala, identifikasi potensi kekurangan pasokan, dan modernisasi penyimpanan stok pangan; 2) keterjangkauan harga; 3) kelancaran distribusi melalui upaya meminimalkan hambatan dalam rantai distribusi melakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD), serta memperbaiki infrastruktur logistik; dan 4) komunikasi efektif informasi mengenai ketersediaan pasokan, perkembangan harga, serta kebijakan pemerintah yang transparan.

Pada sektor pertanian, *urban agriculture* menjadi salah satu strategi kunci dalam pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan. Mengacu pada Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta 2008-2030, pengembangan sektor pertanian tidak hanya terbatas pada pemanfaatan lahan tradisional seperti sawah dan kebun. Konsep ini meluas hingga mencakup optimalisasi ruang yang belum digunakan, termasuk lahan kosong, fasilitas sosial dan umum, pekarangan rumah, area gang, gedung, rumah susun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), institusi pendidikan, hingga wilayah perairan seperti laut. *Urban farming* telah menjadi bagian integral dalam strategi pengelolaan ruang kota secara produktif di Jakarta, sebagaimana terbukti dari implementasinya di 266 lokasi yang tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten. Pada Maret 2025, panen raya *urban farming* dengan melibatkan sekitar 1.300 pelaku *urban farming* yang secara efektif memanfaatkan lahan terbatas berhasil menghasilkan 20 ton produk hortikultura, seperti cabai, terung, bawang merah, kangkung, bayam, dan tomat. Pencapaian ini tidak sekadar menjadi laporan capaian, tetapi memberikan pijakan strategis untuk pengembangan model implementasi *urban farming* di masa depan.



Gambar III.41 Kawasan Urban Farming ‘Pegangsaan Dua Menanam’

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, 2025

Urban farming tidak hanya menjadi alat untuk ketahanan pangan, tetapi juga sebagai dasar transformasi sosial-ekonomi di wilayah perkotaan. Inisiatif ini tidak hanya memberikan peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan di Jakarta menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, proporsi pengeluaran untuk pangan mencapai 40%, menurun menjadi 38% pada tahun 2023, dan lebih lanjut turun menjadi 36% pada tahun 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan dampak positif pertanian perkotaan, dimana masyarakat mulai menghasilkan kebutuhan pangan mereka sendiri, yang pada akhirnya mengalihkan sebagian pengeluaran ke sektor non-pangan. Beberapa prinsip penting yang perlu diterapkan dalam *urban farming*, di antaranya:

1. Optimalisasi Ruang Terbatas: *Urban farming* dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang seperti pekarangan rumah, atap gedung, dinding vertikal, dan lahan kosong lainnya, serta integrasi ruang hijau produktif dalam lanskap perkotaan.
2. Peningkatan Teknologi Pertanian: Implementasi *urban farming* yang didukung oleh teknologi modern, seperti sistem irigasi otomatis, pemantauan pertumbuhan tanaman berbasis aplikasi, dan penggunaan pupuk organik. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian dalam skala kecil.
3. Pemberdayaan Komunitas Lokal: *Urban farming* tidak hanya sekadar menghasilkan produk pangan, tetapi juga harus menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Pelibatan komunitas lokal, seperti kader PKK, pegiat *urban farming*, dan warga sekitar, dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
4. Edukasi dan Agrowisata: *Urban farming* dapat difungsikan sebagai ruang edukasi dan interaksi publik. Pengembangan kebun bibit, misalnya, dapat menjadi wahana belajar bagi masyarakat dan destinasi agrowisata yang edukatif.
5. Kontribusi pada Ketahanan Pangan: *Urban farming* terus diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, sebagaimana bagian dari upaya pengurangan ketergantungan pada pasokan pangan luar kota.



Gambar III.42 Lahan Pertanian di Jakarta Utara

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, 2025

Sebagai salah satu penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan, ekonomi berbasis laut atau yang dikenal dengan ekonomi biru juga didorong pengembangannya, karena potensi sumber daya laut yang sangat besar di perairan Jakarta. Indeks Ekonomi Biru (IEB) telah ditetapkan sebagai indikator utama untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ekonomi biru secara nasional. IEB dirancang sebagai kerangka kerja komprehensif yang mencakup tiga pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Ketiga pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tiga target utama, yaitu persentase lingkungan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP), kontribusi PDRB sektor maritim, dan lapangan kerja di sektor maritim. Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan target IEB Jakarta sebesar 32,55 pada tahun 2030 dari baseline IEB tahun 2023 sebesar 20,95.

Dalam hal pengembangan ekonomi biru, diperlukan adanya riset kemaritiman yang terintegrasi dengan dunia usaha khususnya melalui penerapan inovasi dan teknologi. Fokus utama dari integrasi ini mencakup pemantauan kualitas lingkungan laut, pengelolaan data spasial kelautan, serta penyusunan sistem informasi kelautan yang terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang tepat. Riset ini berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal, khususnya di wilayah pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu sebagai kawasan strategis pengembangan ekonomi biru Jakarta yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah dari berbagai

aktivitas ekonomi kelautan. Aktivitas tersebut meliputi sektor-sektor kunci seperti perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya laut, hingga penyediaan jasa lingkungan yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Dalam hal ini, peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata bahari menjadi salah satu pendorong utama. Pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi, peningkatan infrastruktur ramah lingkungan, dan promosi wisata berkelanjutan menjadi strategi yang diarahkan untuk menjadikan Kepulauan Seribu sebagai tujuan wisata bahari.

Pengembangan ekonomi biru di Jakarta memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor transportasi laut dan industri perkapalan. Keberadaan wilayah pesisir serta Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia menjadikan Jakarta sebagai simpul maritim penting dalam sistem logistik nasional. Konektivitas maritim yang andal berperan penting dalam memperkuat rantai pasok industri. Selain sektor transportasi dan perkapalan, industri pengolahan hasil laut juga memiliki prospek besar untuk dikembangkan di Jakarta. Potensi tersebut mencakup sektor seperti pengolahan rumput laut, makanan laut olahan, serta produk turunan lainnya. Dengan penerapan teknologi dan pengelolaan yang efisien, industri ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan, sekaligus mendukung ketahanan pangan laut dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

Pada sektor perikanan, pengelolaan budi daya yang ramah lingkungan menjadi prioritas utama guna meningkatkan produksi sebesar 30% dalam lima tahun mendatang sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Perikanan tangkap di Jakarta masih didominasi oleh nelayan skala kecil yang menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sarana produksi. Langkah ini sejalan dengan visi ekonomi biru (*blue economy*), yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai aktor utama dalam sektor ini. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk membangun sentra-sentra perikanan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi pusat kesejahteraan bagi komunitas nelayan. Infrastruktur utama seperti pelabuhan perikanan, *breakwater*, dermaga, *docking* kapal, kolam labuh, *cold storage*, dan fasilitas penunjang lainnya direncanakan secara terintegrasi dengan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta.



Gambar III.43 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Ayu Bahari Binaan Sudin KPKP Kepulauan Seribu

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Dalam konteks perikanan budidaya, keterbatasan lahan di Jakarta membuat proporsi perikanan budidaya laut lebih menonjol dibandingkan dengan budidaya air tawar. Perairan Kepulauan Seribu memiliki daya tampung yang memadai untuk pengembangan komoditas bernilai tinggi seperti kerapu, bawal bintang, udang vaname, serta ikan hias laut. Teknologi seperti karamba jaring apung (KJA) telah menjadi inovasi kunci, memberikan efisiensi dalam penyortiran ikan dan mempercepat proses panen, sehingga mendukung peningkatan produksi secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya memanfaatkan lahan secara optimal, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, untuk memperkuat sektor budidaya air tawar, pemerintah mengembangkan program *urban fish farming* yang melibatkan masyarakat perkotaan. Salah satu metode pembudidayaan ikan air tawar adalah bioflok, yaitu sistem budidaya ikan dengan sistem kolam tertutup yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah limbah organik (seperti kotoran ikan) menjadi pakan alami. Jakarta memiliki balai-balai benih ikan tersertifikasi yang mampu memenuhi kebutuhan benih, baik untuk ikan laut, air tawar, maupun ikan hias. Inisiatif ini menjadi stimulan bagi masyarakat untuk terlibat dalam usaha budidaya ikan yang nilai tambah sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah pada produk perikanan, aktivitas pengolahan hasil tangkap dan budidaya masih didominasi oleh penggunaan teknologi tradisional. Namun, langkah-langkah transformasi akan terus dioptimalkan melalui perbaikan kualitas sanitasi, kebersihan, serta standar pengemasan produk. Fasilitas pengolahan yang memenuhi standar tetap menjadi kebutuhan utama yang telah disalurkan secara bertahap guna mendukung peningkatan daya saing serta kesejahteraan para pelaku usaha. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha yang lebih produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengolah tradisional. Selain itu, akses yang lebih luas terhadap sumber modal dan jaringan pemasaran terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan usaha di sektor ini.

Selanjutnya untuk memastikan produktivitas sektor peternakan dan pertanian, dilaksanakan pendekatan strategis melalui pengendalian kesehatan hewan serta mitigasi bencana di sektor pertanian. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor agribisnis dan peternakan, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem produksi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, epidemi penyakit, serta bencana alam pertanian. Kesehatan hewan merupakan elemen kunci dalam mendukung produktivitas subsektor peternakan, yang berperan penting dalam ekosistem pangan nasional. Penyakit hewan, baik yang menular maupun tidak menular, dapat berdampak langsung pada penurunan produktivitas, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi signifikan. Peningkatan kesadaran akan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan mendorong kebutuhan ketersediaan Rumah Sakit Hewan (RSH) yang memadai yang sesuai standar. RSH sangat penting karena memberikan layanan kesehatan yang komprehensif untuk hewan, mulai dari pemeriksaan dan diagnosis penyakit hingga pencegahan penyakit yang dapat menurunkan angka kematian ternak. Di samping itu, untuk meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap kesehatan hewan akan dikembangkan juga Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dengan memanfaatkan lahan Balai Penyuluh Pertanian dan aset potensial lain yang dapat dikerjasamakan.

B. Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi

Jakarta menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di tengah perubahan global serta kompleksitas pembangunan yang terus berkembang. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian dan pengembangan (litbang) daerah memiliki peran penting dalam menyediakan solusi berbasis bukti yang tidak hanya tepat sasaran tetapi juga strategis. Litbang menjalankan tiga fungsi utama dalam manajemen strategis, yaitu perencanaan berbasis riset (*planning by research*), penyusunan kebijakan (*formulating policy*), dan pengendalian (*controlling*). Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, litbang menjadi instrumen penting dalam mendorong inovasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, Jakarta merancang strategi pembangunan yang sistemik dan terintegrasi, dengan fokus pada penguatan riset inovasi, kolaborasi, dan daya saing daerah sebagai rangkaian langkah yang saling berkaitan dalam mendorong pembangunan inovasi.

Langkah awal penguatan ekosistem riset inovasi dilakukan melalui peningkatan dukungan pemerintah terhadap riset dan pengembangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan landasan regulasi, dukungan fiskal, serta kelembagaan yang memadai untuk mendorong riset dan inovasi secara luas. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan riset inovasi, alokasi anggaran melalui APBD, dan pendanaan program riset kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan. Dukungan kebijakan dan fiskal ini menjadi dasar kuat lahirnya inovasi yang relevan dan berdampak nyata. Selanjutnya, dilaksanakan pembangunan infrastruktur riset inovasi dan kolaborasi, baik fisik maupun digital, seperti lembaga riset inovasi, inkubator teknologi, laboratorium terbuka, dan *platform* daring. Infrastruktur tersebut menjadi wadah interaksi pelaku riset dan mempercepat proses penciptaan serta penyebaran riset inovasi di masyarakat.

Seluruh proses ini didukung oleh penguatan sistem data dan monitoring riset dan inovasi daerah. Pengumpulan, integrasi, dan penyediaan data secara *real-time* dan terbuka menjadi tahapan penting untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, evaluasi program, dan perencanaan kolaboratif. Instrumen seperti *dashboard* riset dan inovasi, sistem informasi penelitian, dan *platform* data terbuka digunakan sebagai media koordinasi dan akuntabilitas antar pemangku kepentingan. Sebagai penopang seluruh proses, pemerintah juga memperkuat tata kelola dan kebijakan yang mendukung inovasi terbuka dan kolaboratif. Hal ini meliputi penyusunan dokumen strategis seperti Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan produk hukum relevan lainnya, serta pembentukan struktur kelembagaan yang fleksibel dan adaptif. Tata kelola ini menjadi kerangka formal untuk menjamin sinergi lintas sektor dan keberlanjutan agenda inovasi lintas periode pemerintahan.

Dengan rangkaian strategi yang terintegrasi tersebut, Jakarta membangun fondasi yang kokoh mulai dari kebijakan dan infrastruktur, penguatan kolaborasi dan budaya inovasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga tata kelola yang inklusif dan terbuka. Harapannya, semua langkah ini mampu mendorong transformasi Jakarta menjadi kota yang inovatif, berdaya saing tinggi, serta mampu merespon tantangan masa depan. Inisiasi penguatan riset, inovasi dan kolaborasi lainnya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah pengembangan *urban knowledge hub* yang berfungsi sebagai ruang kolaboratif pengembangan pengetahuan, pertukaran ide, penelitian bersama, dan inkubasi inovasi yang berfokus pada isu perkotaan, khususnya Jakarta. *Hub* ini menjadi titik temu bagi pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku industri, dan warga kota untuk berdiskusi, berbagi data, hingga merancang solusi berbasis kolaborasi. *Urban knowledge hub* dirancang berkualitas dengan ruangan yang mengaktivikasi kreativitas dan inovasi, yaitu:

- ❑ Ruang diskusi dan forum ide kolaboratif: *platform* strategis bagi aktor-aktor kota — pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat — untuk membahas berbagai isu perkotaan secara partisipatif.
- ❑ Pusat Data, Informasi, dan Pengetahuan Urban. Fungsi ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memfasilitasi riset, kajian, dan pengembangan inovasi urban yang responsif terhadap tantangan perkotaan.
- ❑ Inkubator kolaborasi proyek lintas sektor. Inkubator ini menjadi ruang pertemuan ide dan aksi, mulai dari ide awal, *prototyping*, hingga *pilot project* di ruang kota.
- ❑ Wadah edukasi publik tentang isu perkotaan. Edukasi dilakukan melalui berbagai medium seperti diskusi publik, pameran, *urban storytelling*, hingga kampanye kolaboratif.

Ke depannya, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada Jakarta Urban Knowledge Hub, di antaranya *Urban Talk Series*, *Urban Data Lab*, *City Lab/Urban Prototype Workshop*, *Urban Film and Storytelling Night*, *Urban Green Action*, *City Partnership Clinic*, *Urban Knowledge Exhibition*, serta *Young Urban Innovators Pitch*.

Keberhasilan inovasi dan kolaborasi di Jakarta tidak terlepas dari penerapan pendekatan *pentahelix* yang melibatkan lima elemen penting, mencakup pemerintah, akademisi, komunitas, sektor bisnis, dan media. Sinergi antar elemen tersebut membentuk kluster inovasi di berbagai sektor, seperti teknologi, pendidikan, dan lingkungan. Kolaborasi *pentahelix* ini menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat serta pengembangan solusi kreatif berbasis riset. Dengan integrasi program litbang, kluster-kluster inovasi ini mendapatkan dukungan data dan rekomendasi yang relevan dan terarah, sehingga inovasi yang dihasilkan dapat lebih efektif dan berdampak.

Jakarta juga aktif memperluas jejaring kemitraan global melalui kerja sama dengan kota-kota besar dunia lewat program *sister city* serta kolaborasi dengan berbagai organisasi internasional dan perguruan tinggi luar negeri. Kerja sama ini meliputi pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta transfer teknologi di bidang strategis seperti transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, ketahanan iklim, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Melalui kemitraan internasional Jakarta memperoleh akses *best practices* dari kota-kota maju dan lembaga riset global, sekaligus memperkuat ekosistem riset dan inovasi dengan standar internasional. Peran aktif Jakarta dalam berbagai forum global diantaranya U20 (Urban 20), C40 Cities, UCLG ASPAC, dan ASEAN Smart Cities Network memperkokoh posisi Jakarta sebagai entitas global yang terbuka, progresif, dan berkomitmen pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kolaborasi internasional ini menjadi bagian dari diplomasi perkotaan untuk membangun kota yang tangguh, inovatif, dan inklusif.



Gambar III.44 Partisipasi Jakarta dalam UN High Level Political Forum terkait SDGs

Sumber: Berita Jakarta, 2025

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan urbanisasi di Jakarta, permasalahan investasi menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian mendalam. Salah satu tantangan utama adalah minimnya akses yang transparan dan terarah bagi calon investor terkait informasi peluang penanaman modal. Hal ini sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan proyek strategis daerah, terutama di sektor yang membutuhkan modal besar seperti infrastruktur, teknologi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tanpa adanya data yang dapat diakses secara mudah dan komprehensif, potensi investasi di Jakarta berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, daya saing Jakarta sebagai tujuan investasi masih menghadapi persaingan ketat dari kota-kota besar lainnya di tingkat regional maupun global. Berdasarkan data *Oxford Economics*, pada tahun 2025 realisasi investasi asing di Jakarta berada pada angka USD 1,4 miliar. Angka ini masih lebih rendah dari *Foreign Direct Investment* (FDI) pada kota-kota regional Asia Tenggara dimana Bangkok mencapai USD 164 miliar dan Kuala Lumpur mencapai USD 9,8 miliar.

Untuk mendorong realisasi investasi, penguatan tim investasi Jakarta dirasa cukup mendesak. Tim ini akan berfungsi sebagai motor penggerak percepatan investasi dan merumuskan arah kebijakan serta langkah strategis guna mengakselerasi peningkatan investasi, melaksanakan koordinasi lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaannya. Dalam memperkuat daya saing Jakarta sebagai pusat ekonomi regional dan global, Jakarta Investment Forum (JIF), menjadi langkah strategis untuk memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha dari sektor publik maupun swasta. Forum ini dirancang sebagai wadah diskusi, promosi, dan kemitraan bagi *stakeholders* yang memiliki minat terhadap investasi di Jakarta, sekaligus *platform* untuk menampilkan potensi strategis kota.



Gambar III.45 Forum Internasional Investasi Tahunan Jakarta

Sumber: [Invest.jakarta.go.id](https://invest.jakarta.go.id), 2024

Selain itu, partisipasi Jakarta dalam forum global, seperti World Expo, G20, dan ASEAN Forum menjadi peluang untuk mempromosikan potensi investasi kota ini di tingkat internasional. Partisipasi tersebut mencerminkan komitmen Jakarta untuk bersaing secara global dengan memanfaatkan platform strategis guna menjaring mitra investasi potensial. Forum ini tidak hanya sekadar memperkenalkan proyek strategis Jakarta, tetapi turut menjadi ajang untuk menunjukkan inovasi dan keberlanjutan sebagai daya tarik utama dalam pembangunan kota. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Jakarta dapat memperkuat daya saingnya sebagai pusat investasi yang inovatif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung capaian secara lebih menyeluruh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target peningkatan efisiensi investasi, yang menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang ditanamkan dapat memberikan hasil ekonomi yang optimal. Dalam lima tahun ke depan, Jakarta menargetkan peningkatan efisiensi investasi yang signifikan, tercermin dari penurunan rasio *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) secara bertahap. Dimulai dari kondisi awal 7,78–7,63, target ICOR diharapkan mencapai 6,67–5,73 pada tahun 2030, dimana menunjukkan bahwa setiap unit investasi akan menghasilkan output ekonomi yang lebih besar dan lebih efisien. Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan ICOR Provinsi DKI Jakarta adalah dengan peningkatan realisasi investasi dari 241,97 triliun Rupiah pada tahun 2024 menjadi 316,54 triliun Rupiah pada tahun 2030.

Investasi hijau menjadi strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan urbanisasi. Investasi hijau mencakup proyek-proyek seperti energi terbarukan, transportasi rendah emisi, bangunan hijau, pengelolaan limbah, serta pengembangan ruang terbuka hijau. Jenis investasi ini dinilai lebih tahan terhadap risiko iklim dan menjanjikan keberlanjutan finansial jangka panjang. Namun, realisasi investasi hijau masih rendah, baru mencapai 3,18% dari total investasi pada periode 2020–2023. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, promosi proyek hijau, dan integrasi sistem digital yang efektif. Sebagai upaya awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan PIN Greenvest, sebuah sistem berbasis prinsip *Environmental, Social, Governance (ESG)* yang dirancang untuk meningkatkan transparansi proyek hijau. Kolaborasi dengan swasta melalui skema KPBU serta insentif fiskal dan non-fiskal terus diperkuat. Harapannya dengan langkah ini Jakarta tidak hanya meningkatkan realisasi investasi hijau, namun juga mencapai target penurunan emisi GRK menuju *net-zero emission* di tahun 2050.

C. Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik

Berdasarkan Peta Jalan Jakarta Menuju Kota Global (Jakarta Rise #20), pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang perlu dikembangkan untuk mendukung kehadiran dan visibilitas Jakarta di mata dunia, termasuk di dunia maya. Jakarta memiliki potensi kuat sebagai destinasi perjalanan melalui wisata urban yang meliputi wisata berbasis *meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE)*, sejarah, budaya, kuliner, rekreasi, olahraga, religi, maupun alam. Pariwisata Jakarta akan dipasarkan baik di tingkat nasional maupun internasional, didukung dengan pengembangan sektor ekonomi kreatif. Publikasi berkala terkait informasi acara, festival, event budaya, dan *milestone* kota dibutuhkan untuk meningkatkan tidak hanya citra kota namun juga *online presence* dan konten informasi tentang Jakarta. *Website* resmi kota harus memanfaatkan *search engine optimization, mobile-friendly*, multi lingual, dengan struktur informasi jelas, dan dapat berfungsi sebagai direktori digital berbagai layanan untuk pengunjung.

Pada aspek sumber daya manusia, peningkatan kompetensi SDM hulu-hilir pariwisata dan ekonomi kreatif difokuskan pada pelatihan berbasis keterampilan industri, sertifikasi kompetensi, inkubasi wirausaha kreatif, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pelaku usaha untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Pemanfaatan teknologi secara terpadu menjadi langkah kunci untuk memberikan informasi *real-time* terkait atraksi wisata, rute perjalanan, dan rekomendasi kuliner serta akomodasi, sehingga memudahkan perjalanan dan mobilitas wisatawan. Analisis terhadap web dan *search console* dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi minat pengunjung berdasarkan kata kunci yang sering dicari pengguna dan memantau tren pencarian kota. Evaluasi secara berkala terhadap *big data* tersebut dapat menjadi input perbaikan performa pariwisata. Sedangkan pada aspek infrastruktur pendukung diperlukan peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur yang menunjang pengalaman wisatawan secara menyeluruh. Terkait aksesibilitas fisik, investasi diarahkan pada perbaikan konektivitas menuju destinasi wisata melalui peningkatan kualitas jalan raya, dermaga, jalur pedestrian, serta integrasi antar moda transportasi. Fasilitas akomodasi juga ditingkatkan agar memenuhi standar perhotelan internasional, termasuk mendorong sertifikasi layanan, peremajaan hotel non-bintang, dan pembangunan hotel baru di wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi. Selain itu, pengembangan amenities penunjang seperti restoran, kafe, pusat kuliner, dan festival makanan di koridor-koridor strategis menjadi pengungkit daya tarik wisata urban. Dengan memperkuat fasilitas pendukung ini, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota tujuan wisata yang nyaman, informatif, dan berdaya saing global.

Selain optimalisasi dan revitalisasi destinasi wisata yang sudah ada, pemerintah juga terus memperluas titik-titik destinasi wisata baru. Beberapa kawasan wisata dalam koridor '*north to south*' seperti Kota Tua–Glodok, Pelabuhan Sunda Kelapa, Ancol, Jakarta International Stadium (JIS), Blok M, Pantai Marunda, Cipete, serta kawasan lain, seperti Cikini, Pasar Baru, Anjungan DKI Jakarta di TMII memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Aktivasi kawasan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya, pameran seni, *sport tourism* berskala nasional maupun internasional, serta kolaborasi dengan komunitas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berwisata, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Sebagai kota metropolitan dengan beragam budaya dan sejarah, serta dinamika perkotaan, Jakarta menawarkan pengalaman wisata *urban* yang memadukan kreativitas, keberagaman, dan keberlanjutan. Strategi pengembangan wisata *urban* dilaksanakan dengan optimalisasi kawasan ikonik (di antaranya Blok M, Kota Tua, Kemang, dan Tebet), aktivitas kreatif, pusat perbelanjaan baik modern maupun tradisional, kawasan komersial, pusat kuliner, objek budaya, serta hiburan yang terintegrasi. Blok M diarahkan menjadi pusat gaya hidup *urban* melalui aktivasi ruang publik terintegrasi, dukungan transportasi publik, serta aktivasi kegiatan dengan festival, konser, dan bazar malam. Wisata berbasis komunitas, tur tematik, dan pemberdayaan ekonomi kreatif lokal mendorong terciptanya destinasi kota yang hidup 24 jam dan memberi ruang partisipasi masyarakat yang maksimal.



Gambar III.46 Revitalisasi Blok M Hub

Sumber : Berita Jakarta, 2025

Destinasi wisata unggulan di Jakarta, di antaranya Kota Tua dan Kepulauan Seribu, juga terus dikembangkan melalui berbagai inisiatif strategis. Pengelolaan Kawasan Kota Tua diarahkan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penguatan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas. Revitalisasi bangunan bersejarah dengan konsep *adaptive reuse*, perbaikan infrastruktur di sekitar kawasan stasiun dan sistem perparkiran, serta penyelenggaraan berbagai *event* berbasis atraksi menjadi langkah utama dalam meningkatkan daya tarik Kawasan Kota Tua. Sementara itu, pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu dilakukan melalui strategi *branding* dan promosi yang menonjolkan keindahan laut, ekowisata, dan wisata bahari, penyelenggaraan festival, serta pelatihan bagi tenaga kerja lokal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, upaya penguatan konektivitas dari daratan utama menuju pulau-pulau wisata serta antar pulau wisata terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu diarahkan menjadi contoh destinasi pariwisata bahari ekologis yang modern, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan prinsip ekonomi biru.



Gambar III.47 Kota Tua Sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2025

Sebagai salah satu pusat bisnis terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata MICE. Berdasarkan data BPS tahun 2024, tercatat sebanyak 2.535.569 wisatawan mancanegara berkunjung ke Jakarta, dengan salah satu tujuan utama adalah perjalanan bisnis, termasuk MICE. Penyelenggaraan *event* MICE memiliki *multiplier effect* yang tinggi, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi lokal. Untuk mendukung pengembangan wisata MICE, akan diluncurkan regulasi mengenai penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Ke depannya, Pemerintah juga mendukung kebijakan insentif untuk pengembangan MICE serta mempersiapkan dukungan regulasi dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendorong pariwisata MICE Jakarta agar dapat bersaing serta menjadi pusat konferensi di kancah regional (ASEAN) maupun global.

Pemasaran pariwisata Jakarta menjadi elemen krusial dalam memperkenalkan kota ini sebagai destinasi unggulan. Narasi kota akan diperkuat melalui *storytelling* visual, testimoni pengunjung, serta aktivasi promosi dalam *event* internasional. Dengan pendekatan ini, Jakarta tidak hanya dipromosikan sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kota kreatif dan pusat pertumbuhan ekonomi regional yang menarik untuk dikunjungi, dijelajahi, dan dijadikan tujuan investasi. Strategi pemasaran juga dilakukan melalui partisipasi dalam berbagai pameran wisata nasional maupun internasional, serta melalui iklan di media cetak dan digital. Jakarta juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam pemasaran destinasi, pemesanan layanan, dan penyajian informasi pariwisata melalui aplikasi dan *platform* digital yang mudah diakses wisatawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan tetapi juga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota cerdas (*smart city*) yang adaptif terhadap kebutuhan wisatawan modern. Selain itu, dalam mendukung Jakarta sebagai kota Global, Jakarta juga terus menyebarluaskan *city branding* secara masif untuk menarik kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Pengembangan sektor pariwisata juga tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Jakarta. Sebagai kota yang menjadi *melting pot* keberagaman budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Jakarta memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif. Menurut data tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ekonomi kreatif menyumbang 10,51% dari total PDRB DKI Jakarta. Untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Terdapat 17 subsektor dalam ekonomi kreatif yang dikembangkan di Jakarta, antara lain kuliner, televisi dan radio, penerbitan, fesyen, aplikasi, pengembangan permainan (*game developer*), kriya, periklanan, arsitektur, musik, seni pertunjukan, fotografi, film animasi dan video, desain produk, desain interior, seni rupa, serta desain komunikasi visual. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, termasuk penyelenggaraan *event* kreatif, seperti aktivasi Cikini sebagai destinasi *urban*, Jakarta Biennale, Jakarta Film Week, dan Pop Art Jakarta 2024. Jakarta juga resmi ditetapkan sebagai *City of Literature* oleh UNESCO dan bergabung dalam jaringan UNESCO *Creative City Network* (UCCN). Jakarta telah menyusun *grand design* ekonomi kreatif untuk menjadi acuan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Jakarta dengan mengembangkan zona ekonomi kreatif, membangun direktori ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan berbagai program seperti inkubator industri pariwisata, *event* kemitraan, dan mendorong Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan strategi yang terarah dan berkelanjutan melalui dorongan terhadap ekonomi sirkular, penggunaan material ramah lingkungan, dan model bisnis berbasis komunitas, Jakarta diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing global serta memberikan dampak positif bagi kota berkelanjutan.

III.3.3. Tercapainya Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak

Tabel III.22 Penentuan Program Prioritas Tujuan 2.2

Misi 2: Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata		
Tujuan 2.2: Tercapainya Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak		
SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja	☐ Penciptaan peluang kerja baru, wirausaha sosial, dan berbagai mata pencaharian berkelanjutan (<i>green jobs</i>) ☐ Peningkatan akses informasi pasar kerja melalui sistem teknologi informasi dan aplikasi pencari kerja, serta <i>job fair</i> secara berkala ☐ Peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan mendorong ekosistem <i>flexible work</i> dan penyediaan fasilitas publik pendukung, seperti tempat penitipan anak (<i>daycare</i>) ☐ Peningkatan perlindungan sosial tenaga kerja	☐ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ☐ Program Penempatan Tenaga Kerja ☐ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ☐ Program Pengembangan UMKM ☐ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ☐ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

	☐ Penguatan <i>branding</i> produk Jakarta di tingkat global melalui <i>Jakpreneur</i> dan festival Kewirausahaan ☐ Pembinaan dan peningkatan produktivitas kewirausahaan ☐ Pengoptimalan pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan UMKM melalui penataan yang strategis dan profesional ☐ Peningkatan produktivitas koperasi	
Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	☐ Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk ketepatan sasaran penerima bantuan sosial ☐ Penguatan ketahanan pangan ☐ Penguatan kestabilan, ketersediaan, dan akses bahan pokok di Kepulauan Seribu melalui pasar terpadu	☐ Program Rehabilitasi Sosial ☐ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ☐ Program Pemberdayaan Sosial ☐ Program Penanganan Bencana ☐ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ☐ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mewujudkan inklusivitas pembangunan dan penghidupan yang layak pada periode pembangunan tahun 2025-2029. Dalam pencapaian kinerja tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tiga target utama pada tahun 2030. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 1,82-2,91% pada tahun 2030. Kedua, menghapus kemiskinan ekstrem hingga ke angka 0% pada tahun 2030. Ketiga, menurunkan Rasio Gini ke angka 0,415-0,419. Penetapan target tersebut sejalan dengan agenda pembangunan global (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs) Tahun 2030.

Inklusivitas pembangunan dan penghidupan yang layak bersifat multidimensi, mencakup ekonomi, sosial, hingga budaya. Oleh karenanya, dibutuhkan intervensi kebijakan yang menyasar baik aspek struktural maupun spasial. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, terdapat empat prasyarat utama, meliputi: 1) integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat; 2) penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan sosial dan ekonomi; 3) optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar serta teknologi; serta 4) komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan inklusivitas pembangunan dan penghidupan yang layak di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, serta kesempatan kerja layak dan resiliensi tenaga kerja sebagai motor penggerak untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengurangan ketimpangan. Untuk mencapai kinerja yang signifikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 4 (empat) strategi utama sebagai *critical success factor* dalam upaya mencapai inklusivitas pembangunan dan penghidupan yang layak.

Strategi pertama adalah menyediakan akses pekerjaan layak dan inklusif bagi penduduk miskin dan rentan. Kebijakan pada strategi ini mencakup: Meningkatkan proporsi tenaga kerja formal pada angkatan kerja dari kelompok penduduk miskin dan rentan; Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dari kelompok penduduk miskin dan rentan; Meningkatkan budaya kemandirian di kalangan masyarakat miskin dan rentan; Meningkatkan etos kerja maupun mentalitas berwirausaha pada kalangan masyarakat miskin dan rentan; Meningkatkan persentase pelaku usaha mikro dan kecil dari kelompok penduduk miskin dan rentan; Meningkatkan proporsi penduduk dari kelompok masyarakat miskin dan rentan lulusan SMA/ sederajat dan Pendidikan Tinggi yang bekerja; Menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar yang inklusif bagi pekerja anak; Meningkatkan cakupan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia dalam lingkungan pekerjaan; Menyiapkan kebijakan terkait penyesuaian untuk batasan usia bekerja; serta Melakukan perluasan layanan pengasuhan (*daycare*) bagi pekerja dengan anggota keluarga yang memerlukan pengasuhan khusus (anak, penyandang disabilitas, dan lansia).

Strategi kedua, yakni mewujudkan akses pelayanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan. Kebijakan pada strategi ini mencakup sejumlah sektor. Pertama, kebijakan di sektor pangan meliputi: Meningkatkan ketahanan pangan bagi penduduk miskin dan rentan; dan Menjamin stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan pokok yang terjangkau bagi penduduk miskin dan rentan. Kedua, kebijakan di sektor pendidikan meliputi Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini bagi kelompok penduduk miskin dan rentan; Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah dasar hingga menengah dari kelompok penduduk miskin dan rentan selaras dengan Program Sekolah Rakyat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Menyediakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkeadilan; Meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan Meningkatkan akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dari kelompok masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, kebijakan di sektor kesehatan yakni Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Keempat, kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yakni Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Kelima, kebijakan di sektor layanan mobilitas, yakni Meningkatkan aksesibilitas moda transportasi yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan. Keenam, kebijakan di sektor air minum dan sanitasi meliputi Meningkatkan cakupan akses air minum layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan Meningkatkan cakupan akses sanitasi layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Ketujuh, kebijakan di sektor sosial yakni Mengoptimalkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial yang berorientasi pada graduasi sejahtera bagi penduduk miskin dan rentan yang potensial. Dan kedelapan, kebijakan di sektor ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yakni Melakukan penegakan perda terhadap segala bentuk penyimpangan dan/atau penyalahgunaan program optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Strategi ketiga, yakni mewujudkan akses ke perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif sepanjang hayat bagi penduduk miskin dan rentan. Kebijakan pada strategi ketiga ini meliputi Memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dari kelompok penduduk miskin dan rentan; Memperkuat ketangguhan bencana dan adaptabilitas program dalam kondisi bencana alam dan non-alam, serta perubahan iklim; Meningkatkan konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial yang berorientasi pada graduasi sejahtera; Mengoptimalkan tata kelola registrasi warga (khususnya pendatang/migran) untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; Mengoptimalkan integrasi dan peran kewenangan kader dan pendamping masyarakat dalam memberikan pendampingan secara terpadu bagi kelompok penduduk miskin dan rentan; Meningkatkan kualitas dan desain program perlindungan sosial berbasis siklus kehidupan dan karakteristik kerentanan penduduk; serta Mengoptimalkan tata kelola kemitraan dan/atau kerja sama dengan K/L dan nonpemerintah untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Strategi keempat, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pada strategi ini meliputi Mengoptimalkan kinerja makro ekonomi daerah yang inklusif dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan; Mengoptimalkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan; Mengoptimalkan tata kelola anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan literasi dan kompetensi ASN dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; Menyiapkan dan mengarusutamakan upaya mitigasi risiko dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan; Mengoptimalkan integrasi layanan pengaduan dan rujukan bagi masyarakat untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; serta Mengoptimalkan tata kelola data sasaran terpadu yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan.

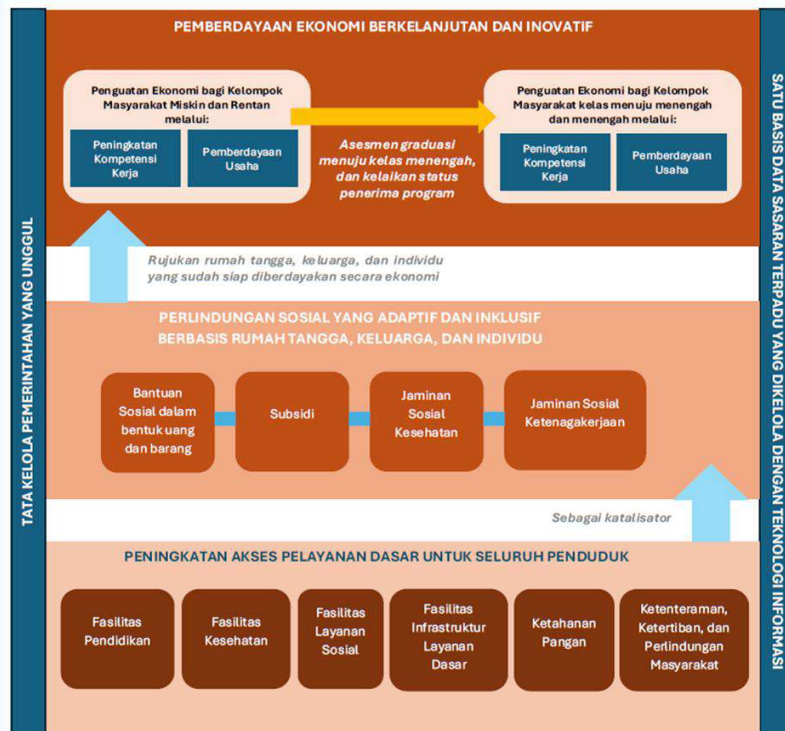
Kebijakan dalam setiap strategi tersebut dijabarkan dalam program-program prioritas yang berperan sebagai intervensi kunci, katalisator, dan kondisi perlu untuk mencapai target pada tujuan ini. Identifikasi program-program prioritas tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar III.48 Intervensi Kunci dalam Mewujudkan Inklusivitas Pembangunan dan Penghidupan yang Layak

Sumber: TKPK Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Kerangka regulasi dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja dalam mencapai inklusivitas pembangunan dan penghidupan yang layak meliputi, antara lain: penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten, pengelolaan satu basis data sasaran terpadu yang dikelola berbasis sistem informasi, integrasi pengelolaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada graduasi sejahtera, dan pengelolaan kemitraan antara pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Upaya mencapai target kinerja tujuan tersebut berorientasi pada graduasi keluarga miskin dan rentan hingga naik menjadi kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, perlu dilakukan upaya untuk menjaga agar keluarga yang telah berada pada kelompok kesejahteraan lebih tinggi, tidak turun kelas. Adapun skema graduasi keluarga miskin dan rentan tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar III.49 Skema Gradulasi Keluarga Miskin dan Rentan Menuju Kesejahteraan Lebih Tinggi

Sumber: Diadaptasi dari Kerangka Logis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Absolut RPJMN 2025-2029

A. Meningkatnya Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja

Dalam era percepatan ekonomi yang dipengaruhi oleh globalisasi dan transformasi teknologi, membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh dan inklusif telah menjadi langkah penting. Dengan terus meningkatnya populasi usia produktif, perencanaan tenaga kerja menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Upaya ini sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja terkini sekaligus merancang proyeksi tren yang akan datang, guna memastikan kesiapan menghadapi perubahan dinamis di dunia kerja. Data tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 65,10%, mengindikasikan peran signifikan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih mencapai 6,21% menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Mengurangi pengangguran memerlukan strategi yang menasar kepada sisi permintaan dan juga sisi penawaran tenaga kerja. Pada sisi permintaan kerja, strategi utama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara memperluas lapangan pekerjaan yang bersifat berkelanjutan dalam rangka menghadapi tiga krisis pembangunan (*triple planetary crisis*). Kesadaran pembangunan ekonomi berkelanjutan mempunyai implikasi pada munculnya peluang pekerjaan hijau (*green jobs*). Menurut International Labour Organization (ILO), pekerjaan hijau adalah pekerjaan layak yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dengan memiliki kriteria antara lain meningkatkan efisiensi konsumsi energi dan bahan baku, membatasi emisi gas rumah kaca, mengurangi sampah dan limbah, melindungi dan merestorasi ekosistem, dan mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Hambatan dalam mendapatkan pekerjaan antara lain karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan kekurangan informasi mengenai peluang kerja yang tersedia. Banyak pencari kerja yang tidak mengetahui secara jelas jenis pekerjaan yang dibutuhkan, kualifikasi yang diharapkan, serta keterampilan yang tengah dicari oleh dunia usaha dan industri. Sebaliknya, pemberi kerja juga kerap mengalami kesulitan dalam menemukan kandidat yang sesuai karena terbatasnya akses terhadap data tenaga kerja yang tersedia. Ketimpangan informasi ini mengakibatkan ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan atau pelatihan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan riil di lapangan.



Gambar III.50 Pelaksanaan Job Fair di Gelanggang Olahraga

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, 2025

Dalam konteks ini, perencanaan tenaga kerja (PTK) menjadi landasan strategis untuk mengelola perubahan pasar tenaga kerja dan memastikan kesiapan SDM menghadapi dinamika permintaan sektor industri. Dengan memahami kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, dapat dipetakan kebutuhan sektor industri masa depan dan mengintegrasikan strategi pendidikan serta pelatihan kerja ke dalamnya. Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja, sejumlah langkah strategis dirancang sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan

Upaya dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan yang terintegrasi sebagai fondasi ekosistem digital ketenagakerjaan. Ekosistem ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah akses informasi tenaga kerja, tetapi juga untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan data, pelayanan, dan pengembangan tenaga kerja di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mereaktivasi *platform karir.jakarta.go.id* pada tahun 2024. *Platform* yang terintegrasi dengan JAKI ini menjadi bagian dari strategi penguatan transformasi digital sektor ketenagakerjaan yang diarahkan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan keterhubungan antara pencari kerja dan pemberi kerja, serta menurunkan angka pengangguran terbuka. *Platform* ini menyediakan fitur-fitur utama yang mencakup informasi lowongan kerja (termasuk untuk penyandang disabilitas), lowongan unggulan, layanan konsultasi karir, dan informasi pelatihan berbasis kompetensi oleh Pusat Pelatihan Kerja.

Rencana ke depan *platform* ini juga akan mencakup implementasi fitur *job fair* secara virtual sebagai alternatif penyelenggaraan kegiatan antar kerja yang lebih efisien, adaptif dan inklusif. Sebagai bagian dari penguatan sistem layanan ketenagakerjaan yang terpadu, *karir.jakarta.go.id* telah terintegrasi dengan Sistem SIAPkerja (Karirhub) milik pemerintah pusat. Integrasi ini bertujuan untuk menambah variasi dan cakupan lowongan kerja yang tersedia pada *platform*, sekaligus mendukung interoperabilitas data antar lembaga serta sinkronisasi kebijakan antar tingkat pemerintahan. Dengan demikian, *platform* ini diharapkan mampu memperkuat fungsi intermediasi pasar kerja secara digital, mempercepat proses penempatan kerja yang berbasis data, serta meningkatkan efisiensi layanan ketenagakerjaan di daerah.

2. Transformasi Pusat Pelatihan Kerja

Reposisi dan refungsionalisasi Pusat Pelatihan Kerja dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan konsep *Jakarta Skill for Future* untuk menjadikannya pusat unggulan dalam pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Pengembangan kompetensi juga menyasar masyarakat miskin, warga putus sekolah, dan penyandang disabilitas. Langkah ini mencakup pengembangan kompetensi baru melalui pembaruan kurikulum berstandar internasional serta penerapan kebijakan *triple skilling*, yang mencakup pelatihan dasar keterampilan (*skilling*), peningkatan keterampilan baru (*re-skilling*), dan penguatan keterampilan lanjutan (*up-skilling*), dilengkapi pelatihan kemampuan Bahasa Inggris bagi seluruh peserta. Selain itu, upaya revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk memodernisasi fasilitas pelatihan, melengkapi peralatan dengan teknologi terkini, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan

inklusif. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang, sekaligus menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan inovatif. Untuk memenuhi pelayanan pelatihan tenaga kerja, selain penyelenggaraan pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja, Pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan melalui *Mobile Training Unit* (MTU) dengan area layanan di seluruh kelurahan. Perluasan layanan pelatihan ini diharapkan mendukung pembentukan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta mempermudah akses dan mengurangi biaya transportasi peserta pelatihan karena mendekatkan layanan kepada masyarakat.



Gambar III.51 Mobile Training Unit Desain Grafis dan Operator Komputer

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, 2025

3. Integrasi Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Tenaga Kerja (*Link and Match* Ketenagakerjaan)

Langkah strategis ini bertujuan untuk membangun konektivitas yang solid antara pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja. Proses ini didukung melalui pengembangan jejaring kelembagaan serta pembinaan pelatihan yang dirancang secara berjenjang dan responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Dengan pendekatan berbasis permintaan (*demand-driven approach*), integrasi ini memastikan bahwa tenaga kerja dapat langsung terserap ke dalam industri yang relevan. Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan *job fair* di setiap kecamatan dan berkolaborasi dengan satuan pendidikan dan perguruan tinggi. *Job fair* membantu mempertemukan calon pekerja dengan pemberi kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan *job fair* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dan mempunyai prinsip non diskriminasi.

4. Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja tidak hanya dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi juga melalui pengembangan kewirausahaan yang efektif. Upaya ini diarahkan untuk membentuk wirausaha yang mampu berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan ekosistem kerja yang resilien dan inovatif.

5. Pengembangan Hubungan Industrial Berkualitas

Hubungan industrial yang berkualitas dan berkeadilan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Langkah ini berorientasi pada peningkatan kualitas hubungan antara pelaku usaha dan tenaga kerja, dengan fokus pada kesejahteraan yang berkelanjutan. Pengembangan hubungan industrial ini dirancang untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil dan inklusif.

6. Reformasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan yang efektif merupakan elemen penting dalam memastikan pelaksanaan hukum dan peraturan secara konsisten. Reformasi sistem pengawasan diarahkan untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas mekanisme pengawasan, dengan mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi oleh tenaga pengawas ketenagakerjaan.

7. Penerapan *Flexible Work* dan Fasilitas Publik Pendukung Produktivitas Tenaga Kerja

Tidak hanya berfokus pada pengangguran, kebijakan ketenagakerjaan juga perlu memperkuat ekosistem dalam bekerja, seperti penerapan *flexible work* dan fasilitas publik yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Konsep *flexible work* mengacu pada pengaturan kerja fleksibel, baik dari segi waktu, lokasi, maupun pola kerja, yang memungkinkan tenaga kerja untuk menyesuaikan aktivitas profesional dengan kebutuhan personal, sehingga meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja (*work-life balance*) serta produktivitas. Konsep tersebut perlu didukung oleh fasilitas pendukung produktivitas tenaga kerja seperti *daycare*, *co-working space*, transportasi terintegrasi, ketersediaan *charging station* untuk perangkat digital, dan layanan publik berbasis teknologi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sentral dalam resiliensi perekonomian, menjadikannya salah satu sektor strategis dalam upaya pengurangan pengangguran terbuka dan pembangunan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, UMKM menjadi motor utama dalam menopang stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di tengah persaingan pasar kerja yang semakin dinamis. Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang tangguh dan inklusif, upaya untuk memperluas ruang usaha terus menjadi prioritas strategis. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan *platform* yang mendukung para pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam mempromosikan produk mereka serta memperluas akses ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya ruang usaha yang terintegrasi dan strategis, produk lokal dapat lebih mudah dikenali oleh masyarakat, baik di tingkat domestik maupun global. Selain menyediakan fasilitas fisik seperti galeri usaha atau pusat pameran, strategi ini juga mencakup penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan promosi. Pengembangan *marketplace* berbasis digital yang dapat diakses oleh peserta program kewirausahaan menjadi salah satu inisiatif penting.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui program kewirausahaan terpadu, mengambil langkah strategis untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini merupakan kebijakan untuk menumbuhkembangkan wirausaha melalui antara lain pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan dan pemasaran. Program ini tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dalam kerangka keberlanjutan, seluruh kebijakan bersinergi menciptakan ekosistem menuju wirausaha naik kelas, baik dari segi omset, aset dan penyerapan tenaga kerja, serta kapasitas ekspor.

Selain pengembangan UMKM, koperasi juga menjadi prioritas dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat koperasi sebagai pilar strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan data tahun 2024, dari 11.008 koperasi yang tercatat di Jakarta, 5.756 di antaranya koperasi aktif. Program-program seperti penyuluhan, pembinaan, revitalisasi koperasi binaan, transformasi digital, serta pengawasan berkala dirancang untuk memastikan koperasi dapat berkembang secara sehat dan berkontribusi signifikan dalam membangun ekonomi rakyat. Koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk mengoptimalkan kontribusi koperasi, berbagai program strategis telah dilaksanakan guna mendorong pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Upaya tersebut antara lain:

1. Penyuluhan dan Pembinaan Koperasi: Dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.
2. Fasilitasi Pameran dan Akta Pendirian Koperasi: Ditujukan untuk memberikan akses promosi kepada anggota koperasi serta kemudahan administratif dalam pendirian koperasi.
3. Revitalisasi Koperasi Binaan: Dilaksanakan guna meningkatkan kinerja koperasi yang berada di bawah pembinaan provinsi agar lebih produktif dan berdaya saing.
4. Klinik Konsultasi Koperasi: Menyediakan layanan konsultasi sebagai bentuk pendampingan teknis dan manajerial untuk koperasi, terutama dalam menghadapi tantangan pasar.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang sistematis, diharapkan SDM koperasi memiliki kompetensi yang mampu mendorong pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan.
6. Peningkatan Kepatuhan dan Pengawasan: Koperasi diawasi secara berkala untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pendekatan strategis pada sasaran ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berkomitmen untuk menangani isu pengangguran dan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dengan sinergi antara teknologi, kewirausahaan, dan koperasi.

B. Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial merupakan langkah fundamental yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta secara holistik. Inisiatif ini tidak hanya menjadi penentu dalam mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga berfungsi sebagai penopang bagi kelompok masyarakat rentan agar dapat menghadapi dan keluar dari tekanan sosial-ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki mandat strategis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh individu tanpa diskriminasi, yang mencakup akses terhadap pangan, perlindungan ekonomi, serta sistem jaminan sosial yang berkelanjutan. Hak atas kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, bukan hanya elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga fondasi dalam memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya di sektor pangan dan gizi dilakukan salah satunya melalui jaminan ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Berdasarkan data BPS, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jakarta meningkat dari 86,3 pada tahun 2021 menjadi 91,31 pada tahun 2024. Hal tersebut mencerminkan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Meski demikian, terdapat tantangan dalam memastikan suplai, akses dan keamanan terhadap pangan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, yang tergambar pada Indeks Ketahanan Pangan dengan capaian 71,2 pada tahun 2024. Ke depannya, strategi ketahanan pangan dan gizi dilakukan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dan gizi serta penguatan kelembagaan dan tata kelola.

Peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui antara lain , pemenuhan pangan strategis melalui kerja sama pangan antar daerah dan ketersediaan cadangan pangan di antaranya dengan *contract farming*, pengembangan *urban farming*, pengembangan sentra produksi, pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, peningkatan kerja sama dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan, pengembangan *smart farming* untuk mengurangi *food loss*, termasuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Adapun peningkatan keterjangkauan pangan dilakukan melalui, antara lain operasi pasar/pangan murah, pengawasan lapangan terhadap stok pasokan dan harga pangan, pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan untuk memantau kebutuhan dan suplai pangan pada 11 komoditas di daerah produsen dan pasar swalayan, serta pembinaan UMKM/Koperasi dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL).



Gambar III.52 Kerja Sama Pangan Antar Daerah

Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya, 2025

Pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi dilakukan melalui perluasan advokasi panganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), peningkatan implementasi Pedoman Gizi Seimbang (PGS) di sekolah, peningkatan sosialisasi pentingnya informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji, peningkatan cakupan ASI

eksklusif, peningkatan pemanfaatan MP-ASI, peningkatan keamanan dan mutu pangan jajanan anak sekolah, serta perluasan suplementasi gizi (makanan tambahan, Tablet Tambah Darah dan kapsul vit. A). Pemerintah juga telah melakukan pengawasan untuk menjamin keamanan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Melalui peningkatan dan pengawasan mutu pangan, 90% hasil tanaman pangan dan hortikultura, 95% hasil perikanan, dan 95% produk hewan (kesmavet) diyakini baik/aman konsumsi. Dari sisi kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi dapat diperkuat melalui antara lain perjanjian kerja sama dengan sektor swasta, industri, dan/atau perdagangan pangan terkait pengelolaan *food waste*, kampanye pola konsumsi sehat (*healthy food*), penerbitan regulasi pengelolaan *food waste*, dan pengembangan riset terkait pangan dan gizi.

Dalam konteks perlindungan sosial, akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat, program perlindungan sosial dan program pemberdayaan, jaminan sosial ketenagakerjaan, responsivitas bantuan sosial pada kondisi darurat, kebencanaan, dan perubahan iklim menjadi tantangan bagi Jakarta untuk menyediakan sistem perlindungan sosial yang efektif dan menyeluruh. Kebijakan perlindungan sosial diarahkan kepada sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif serta berorientasi pada graduasi sejahtera melalui integrasi multi layanan (khususnya pemberdayaan ekonomi). Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, menjadi salah satu elemen penting dari upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif tersebut diselenggarakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan inklusif berbasis pada satu basis data sasaran terpadu dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Sebagai bagian dari langkah penanganan, pemerintah telah mengimplementasikan beragam program perlindungan sosial yang mencakup pemberian bantuan tunai dan non-tunai, pengembangan ekonomi lokal, serta program-program perlindungan sosial yang bersumber dari APBD maupun pendanaan lainnya. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah memungkinkan penggalangan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai program-program tersebut. Model kolaborasi ini tidak hanya memperluas cakupan program, tetapi juga memperkuat efektivitas implementasinya melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain memberikan perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan yang bersifat langsung, Pemerintah juga meluncurkan berbagai program pengembangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat miskin dan rentan. Langkah ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga dukungan pemasaran produk lokal. Dengan strategi ini, kelompok masyarakat rentan tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan produktif yang berkontribusi pada perekonomian Jakarta secara keseluruhan.

Penjaminan penghidupan yang layak juga tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan secara inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti disabilitas dan lansia yang memiliki potensi lebih besar menjadi miskin. Terhadap kelompok disabilitas, Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya memberikan layanan pembangunan inklusif pembangunan seperti integrasi data penyandang disabilitas, layanan ‘jemput bola’ administrasi kependudukan, pelibatan dalam forum perencanaan pembangunan, layanan bantuan hukum, layanan rehabilitasi dan rehabilitasi, sosialisasi rekrutmen pegawai disabilitas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Upaya pembangunan inklusif disabilitas akan terus dilakukan dengan mengacu tujuh sasaran strategis yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang mencakup pendataan dan perencanaan inklusif, penyediaan lingkungan tanpa hambatan, perlindungan hak dan akses politik dan keadilan, pemberdayaan dan kemandirian, ekonomi inklusif, pendidikan serta keterampilan dan akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas adalah prasyarat mutlak dalam pembangunan kota yang inklusif.

Selain kelompok disabilitas, pertumbuhan penduduk lansia yang akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Susenas Tahun 2023, jumlah penduduk lansia di Jakarta sebesar 10,18% dari populasi. Penuaan penduduk (*ageing population*) Jakarta perlu dipersiapkan baik dari sisi finansial dan non finansial agar dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia yang sehat, aktif, dan produktif. Penanganan penduduk lansia di Jakarta mengacu pada Strategi Nasional Kelanjutan terutama dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung perwujudan penduduk lansia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. Pemerintah DKI Jakarta terus berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan ramah lansia dengan pemberian layanan kesehatan melalui posyandu lansia dan pelayanan *home service* gratis bagi warga Jakarta, pemberian bantuan sosial bagi lansia terkategori miskin, pemberdayaan lansia melalui sekolah lansia sebagai bagian program bina keluarga lansia serta layanan gratis transportasi umum bagi lansia. Perlu adanya penguatan dan optimalisasi dari sektor –

sektor lainnya seperti akses jaminan sosial, ketenagakerjaan untuk membuka kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal, kesempatan pengembangan diri bagi lansia, dan pemberdayaan masyarakat di lingkup terkecil seperti RT/RW. Selain itu, lansia perlu dilibatkan dalam pembangunan, sehingga dapat turut berkontribusi untuk menyumbang gagasan pembangunan ramah lansia di Jakarta.

III.3.4. Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern

Tabel III.23 Penentuan Program Prioritas Tujuan 3

Misi 3: Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal		
Tujuan 3: Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern		
SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah	☐ Terwujudnya kelembagaan yang <i>agile</i> dan adaptif ☐ Peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas penyelenggaraan pemerintah ☐ Opini laporan keuangan dengan predikat WTP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan predikat Baik ☐ Optimalisasi sistem perpajakan daerah melalui penerapan teknologi digital, pembaruan data objek pajak, dan pendataan wajib pajak ☐ Optimalisasi pemanfaatan aset daerah ☐ Pengembangan <i>Jakarta Asset Management Center</i> ☐ Peningkatan kinerja BUMD melalui transformasi dan proses IPO BUMD ☐ Pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui obligasi dan konsep <i>endowment fund</i>	☐ Program Penataan Organisasi ☐ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ☐ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ☐ Program Perekonomian dan Pembangunan ☐ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berkembangnya Kapasitas dan Profesionalitas Kerja Aparatur	☐ <i>Roadmap</i> pengelolaan tenaga non-ASN serta redistribusi dan penilaian kinerja berbasis sistem ☐ Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda, dan Indeks Meritokrasi	☐ Program Kepegawaian Daerah ☐ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi	☐ Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan perkotaan ☐ Pemanfaatan pusat data daerah melalui komputasi awan (<i>cloud computing</i>) ☐ Pengembangan sistem keamanan informasi daerah berdasarkan evaluasi penerapan kebijakan TIK ☐ Pengembangan arsitektur SPBE ☐ Perbaikan akses, literasi, dan partisipasi digital masyarakat ☐ Penguatan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat dengan memperhatikan efektivitas, responsivitas, dan transparansi ☐ Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data kependudukan	☐ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ☐ Program Pelayanan Penanaman Modal ☐ Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

-
- ☐ Penyederhanaan prosedur, percepatan waktu proses, dan automasi (elektronifikasi) perizinan dan non perizinan
 - ☐ Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko
-

A. Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah

Dalam mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang *agile* dan adaptif dibutuhkan transformasi organisasi yang mampu merespon perubahan secara cepat dan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan khusus kelembagaan termasuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan, sehingga tipe, jumlah, dan susunan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan Jakarta. Strategi yang dilaksanakan antara lain, adopsi teknologi, penyederhanaan proses untuk meningkatkan kecepatan kerja, perubahan *mindset* untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, serta orientasi pada peningkatan kepuasan penerima layanan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan prinsip fundamental tata kelola pemerintahan, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. AKIP mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja pada tingkat instansi dan unit kerja. Evaluasi dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif, yang menghasilkan rekomendasi perbaikan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2030, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan nilai AKIP sebesar 90,10 dengan predikat “AA”. Untuk mencapai target tersebut, langkah strategis yang akan dilakukan adalah menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Kementerian PANRB terkait evaluasi AKIP, di antaranya:

1. Mengoptimalkan penetapan sasaran khusus pada perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang berorientasi *outcome* dengan indikator kinerja yang relevan;
2. Memperbaiki kualitas pohon kinerja Perangkat Daerah dengan memastikan level operasional menguraikan kondisi kinerja yang logis sesuai dengan *critical success factors* (CSF) dari level kinerja di atasnya sehingga pada level operasional akan tergambar kondisi yang sesuai;
3. Mendorong perencanaan kinerja individu untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dengan cara memastikan rencana hasil kinerja individu adalah tindak lanjut dari penjenjangan kinerja dengan ukuran keberhasilan yang relevan untuk mengukur pencapaian hasil dari rencana kinerja individu yang ditetapkan;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada aplikasi sakup.jakarta.go.id dengan memastikan penetapan target kinerja yang berjenjang dapat di-*breakdown* secara triwulan dengan tepat sehingga relevan dengan konteks kinerja yang akan diukur;
5. Mendorong komitmen pimpinan perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dengan memberikan *feedback* pada setiap pencapaian kinerja sehingga pencapaian kinerja organisasi dapat terjaga;
6. Memastikan analisis pada laporan kinerja pada seluruh perangkat daerah memadai dan disertai upaya-upaya perbaikan kinerja yang detail per kinerja;
7. Memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya; dan
8. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi yang menyajikan temuan dan rekomendasi per komponen evaluasi AKIP internal sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat terakselerasi.

Mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Efektivitas penyelenggaraan SPIP dilihat dari tingkat kematangan (maturitas) dalam mencapai tujuan pengendalian meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan evaluasi penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 3,80.

Pemprov DKI Jakarta juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan meningkatkan integritas di tingkat individu, organisasi, dan pemerintahan. Survei Penilaian Integritas (SPI) digunakan untuk memetakan risiko korupsi dan mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Nilai Indeks SPI Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 72,50 dengan kategori “rentan” dan ditargetkan pada tahun 2030 meningkat menjadi 80,75 dengan kategori “terjaga”. Beberapa upaya ke depan yang dapat dilakukan dalam mendorong peningkatan integritas Pemerintah Daerah, di antaranya: 1) Penguatan *whistleblowing system* untuk meningkatkan partisipasi dan memastikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi; 2) Pengembangan internalisasi anti korupsi secara sistemik dalam program pendidikan dan pengembangan karir pegawai; 3) Memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasi termasuk internalisasi pengawasan/penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas.

Sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, Jakarta berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hingga tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Pada periode lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan untuk secara konsisten mempertahankan opini WTP yang akan dicapai melalui tindak lanjut menyeluruh atas temuan audit BPK, perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk memastikan keberlanjutan tata kelola keuangan yang prima. Selain itu, komitmen terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tinggi juga diperkuat dengan target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang konsisten dalam kategori 'Baik' selama lima tahun ke depan. IPKD, sebagaimana diukur berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, mencakup enam dimensi kunci: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD. Dengan mempertahankan IPKD yang baik, Jakarta menunjukkan dedikasi terhadap pengelolaan keuangan yang optimal dan bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi aset yang dilaksanakan Badan Pengelola Aset Daerah tahun 2024, total nilai aset daerah, mencapai kurang lebih 593,478 triliun Rupiah, yang mencakup tanah, bangunan, infrastruktur, peralatan, dan aset tetap lainnya. 89% dari aset tersebut berwujud tanah, selanjutnya berupa infrastruktur jalan dan jaringan, serta gedung dan bangunan. Target pendapatan dari pemanfaatan aset diproyeksikan mengalami peningkatan, dari Rp 445.521.073.277 pada tahun 2025 menjadi Rp 618.591.281.522 pada tahun 2030. Namun demikian, pengelolaan aset-aset tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya data yang akurat, tumpang tindih kepemilikan, akuisisi aset oleh pihak ketiga, serta rendahnya pemanfaatan aset secara produktif. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong strategi optimalisasi aset melalui inventarisasi dan penertiban administrasi aset, peningkatan legalitas atau sertifikasi, dan pengamanan aset. Langkah-langkah tersebut diperkuat dengan kebijakan reformasi tata kelola aset daerah, penyusunan rencana induk pemanfaatan aset, serta pembangunan sistem informasi manajemen dan pemetaan aset yang terintegrasi berbasis geospasial.

Terkait dengan pemanfaatan aset, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Jakarta Asset Management Centre (JAMC) berbentuk BLUD yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pemanfaatan aset, mengelola, mengoptimalkan, dan mengakselerasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah secara profesional, transparan, baik untuk kepentingan publik maupun berorientasi nilai tambah. JAMC diharapkan menjadi katalisator dalam membangun ekosistem pengelolaan aset daerah yang profesional dan berkelanjutan, sehingga aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara optimal bagi masyarakat. Ke depan, diharapkan aset daerah tidak hanya menjadi beban biaya pemeliharaan, tetapi juga menjadi sumber daya produktif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung investasi pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif, baik dari sisi ekonomi maupun fungsi sosial.

Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kemandirian finansial BUMD melalui beberapa strategi, antara lain optimalisasi pengelolaan aset produktif, transformasi kelembagaan, dan penguatan struktur keuangan. Strategi menuju kemandirian finansial dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendanaan alternatif yang potensial dan berkelanjutan untuk mengurangi beban APBD, seperti pembiayaan utang, penerbitan obligasi, *modal venture*, *private equity*, serta termasuk *initial public offering* (IPO). Untuk mendorong optimalisasi aset produktif BUMD, Pemprov DKI Jakarta berfokus pada transformasi manajemen yang lebih profesional, implementasi tata kelola perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab, dan pemanfaatan teknologi serta inovasi untuk menggali potensi pendapatan dan nilai ekonomi aset BUMD yang maksimal.

BUMD harus terus menjalankan peran strategisnya dalam menyediakan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta mendorong BUMD yang telah memenuhi kriteria kesehatan keuangan dan kesiapan tata kelola untuk melaksanakan *initial public offering* (IPO) dimana ditargetkan 2 (dua) BUMD untuk melaksanakan IPO hingga tahun 2030. Pemprov DKI Jakarta melihat IPO sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja BUMD. Transformasi dan *initial public offering* pada BUMD diharapkan dapat berkembang menjadi perusahaan yang lebih mandiri, profesional dan akuntabel di antaranya dengan memperkuat permodalan dan memperluas akses pembiayaan non-APBD. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan investasi di Jakarta. IPO merupakan langkah besar yang tidak hanya bergantung pada kesiapan internal perusahaan, namun juga memerlukan persiapan matang, antara lain melalui penetapan target dan *roadmap* IPO yang jelas, memperkuat kebijakan dan regulasi, serta perlu memperhatikan secara cermat kondisi pasar saham secara keseluruhan guna menghindari potensi kerugian negara.

Transformasi ini diarahkan untuk mewujudkan BUMD yang sehat serta mampu berkembang menjadi entitas bisnis yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Upaya tersebut mencakup pembenahan tata kelola perusahaan sesuai prinsip *good corporate governance*, seleksi dan penempatan sumber daya manusia yang profesional, pengembangan model bisnis yang inovatif, digitalisasi operasional, serta peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas BUMD, dengan sektor swasta maupun BUMN, guna memperkuat rantai nilai dan membangun ekosistem usaha yang saling mendukung. Selain itu, BUMD yang belum berkinerja optimal akan diarahkan untuk proses restrukturisasi dan konsolidasi melalui langkah-langkah seperti penataan kembali struktur keuangan, penggabungan usaha, atau perubahan bentuk badan hukum agar lebih fokus dan efisien dalam menjalankan misinya. Melalui strategi transformasi menyeluruh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong BUMD mampu menjadi lokomotif pembangunan daerah, penyedia layanan publik yang andal, serta kontributor signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Jakarta secara inklusif dan berkelanjutan.

B. Berkembangnya Kapasitas dan Profesionalitas Kerja Aparatur

Pemerintah Provinsi DKI menerapkan manajemen ASN berbasis merit dalam seluruh aspek, mulai dari perencanaan hingga pengembangan karir dan kompetensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang berlaku secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Capaian Indeks Sistem Merit pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 sebesar 290 (kategori baik) menjadi 350,5 (sangat baik) pada tahun 2024. Adapun target indeks sistem merit provinsi DKI Jakarta pada tahun 2030 sebesar 400 (kategori sangat baik). Dalam mendorong peningkatan kualitas penerapan sistem merit di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, langkah-langkah yang akan dilakukan sebagaimana rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara antara lain:

1. Melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mutasi masuk pegawai dengan tahapan seleksi sesuai dengan peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan pengembangan kompetensi teknis bidang dan evaluasi pasca pelatihan dasar kepada seluruh CPNS yang dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Mengakselerasi penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jabatan pegawai;
4. Mengakselerasi asesmen kepada seluruh pegawai secara bertahap sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan menyusun profil kompetensi pegawai berdasarkan kompetensi/talenta dan diperbarui secara berkala;
5. Menyusun peta talenta dan rencana suksesi seluruh pegawai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
6. Menganalisis kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seluruh pegawai secara berkala;
7. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui praktik kerja, pertukaran pegawai, *coaching* dan *mentoring* secara terjadwal dan dievaluasi;
8. Menerapkan dialog kinerja tentang permasalahan kinerja secara konsisten dan menganalisis permasalahan kinerja pegawai secara terstruktur serta menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan kinerja tersebut;
9. Melaksanakan internalisasi kode etik dan kode perilaku ASN secara berkala;
10. Optimalisasi pelaksanaan berbagai program bantuan perlindungan kepada pegawai secara rutin;
11. Akselerasi seluruh pelayanan administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan sistem informasi yang terhubung dengan sistem *dashboard* pimpinan.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas ASN, Pemprov DKI mengimplementasikan Sistem Manajemen Talenta dalam promosi, rotasi, dan mutasi jabatan melalui tahapan persiapan (penyusunan standar kompetensi dan kebijakan manajemen talenta), pelaksanaan (sosialisasi dan uji coba), serta evaluasi (*monitoring* dan penyempurnaan). Tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2020 dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta. Manajemen talenta dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah mengintegrasikan sistem informasi manajemen talenta ke dalam sistem informasi *talent pool* dengan menerapkan prinsip mutakhir dan lengkap. Peraturan Gubernur tersebut juga menjadi pedoman dalam menemukan, mempersiapkan, dan memastikan ketersediaan talenta terbaik yang tepat untuk mengisi jabatan sesuai tujuan strategis, misi, dan visi organisasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dan terus berkomitmen untuk menerapkan manajemen talenta secara konsisten dan akuntabel, dengan berpedoman pada prinsip sistem merit. Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta secara konsisten mengutamakan pengembangan dan pengelolaan talenta dari lingkungan internal PNS Pemprov DKI Jakarta yang memiliki rekam jejak unggul, profesional, dan berintegritas. Langkah ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan peran aktif PNS dalam mendukung peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat kualitas pengelolaan sumber daya manusia, guna mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berdaya saing tinggi, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta.

Terkait dengan pola karir Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 826 Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan pola karir PNS dengan prinsip kepastian, integritas, profesionalitas, transparan, keadilan, nasional, dan rasional. Adapun bentuk pola karir yang diterapkan, yaitu pola karir horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola karir horizontal berfokus pada perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan. Pola karir vertikal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi. Sementara itu, pola karir diagonal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi berdasarkan garis lini, melalui promosi, atau mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Dengan adanya pola karir tersebut diharapkan adanya kesinambungan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan.

Dalam aspek pelayanan publik, Pemprov DKI memanfaatkan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mendukung berbagai layanan seperti kebersihan, pemakaman, pengendalian lalu lintas, dan ketertiban umum. Seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja PJLP, Pemprov DKI melakukan penataan dan pengendalian pemanfaatan tenaga kerja PJLP melalui penyusunan pedoman analisis pekerjaan dan beban kerja, mekanisme verifikasi dan validasi kebutuhan tenaga kerja, serta pengembangan sistem informasi PJLP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan anggaran. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, Pemprov DKI juga menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi dan sertifikasi ASN yang mendukung pencapaian tujuan Jakarta sebagai kota global, termasuk pelatihan manajerial, kepemimpinan, transformasi digital, serta peningkatan infrastruktur kediklatan. Keberadaan Jakarta Public Policy Center (JPPC) berperan sebagai pusat pengembangan kebijakan publik dan kompetensi ASN maupun non-ASN. JPPC mengadakan berbagai program prioritas, seperti pelatihan kebijakan publik, pengembangan kompetensi teknis, kerja sama nasional dan internasional, fasilitasi studi banding, seminar/webinar, jasa konsultasi, riset, serta publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Ke depannya JPPC, selaku institusi yang melahirkan *agent of change* Jakarta, akan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN dengan standar internasional di antaranya dengan bekerjasama dengan *top rank universities* ataupun *global institution* dalam berbagai bidang akademik.

C. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi membawa peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan kota Jakarta. Kompleksitas permasalahan perkotaan menuntut solusi yang cepat, efektif, dan efisien. Salah satu aspek penting dalam peningkatan dimensi pertukaran informasi dalam parameter *Global City Index* adalah infrastruktur digital perkotaan atau *city wide digital infrastructure*, yang menjadi fondasi bagi ekosistem digital serta konsep kota cerdas. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan melalui perencanaan yang menyeluruh dan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor guna menghasilkan *masterplan city wide digital infrastructure* yang berkualitas. Keberhasilan Jakarta 4.0 dapat

diukur melalui realisasi tujuh pilar kota cerdas, yaitu *smart government*, *smart mobility*, *smart living*, *smart environment*, *smart economy*, *smart people*, dan *smart branding*. Dari ketujuh pilar tersebut, *smart people* menjadi aspek utama yang perlu ditingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai sumber, penerima, dan pelaku informasi. Oleh karena itu, penguasaan teknologi serta literasi digital menjadi kebutuhan mendesak, terutama pasca pandemi yang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.

Berdasarkan analisis kualitas pelayanan internet tahun 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta menempati peringkat kelima secara nasional dalam kecepatan internet dengan rata-rata *download* 56,16 Mbps dan rata-rata *upload* sebesar 21,50 Mbps. Dalam mendukung peningkatan kecepatan internet tersebut diperlukan penggelaran infrastruktur digital di Jakarta. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, di antaranya:

1. Proses perizinan yang kompleks karena proses identifikasi, negosiasi, dan pengurusan lahan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang panjang dan lama;
2. Biaya sewa lahan/infrastruktur pasif yang kurang wajar;
3. Penolakan masyarakat pada pembangunan infrastruktur digital dan pungutan liar oleh kelompok masyarakat;
4. Adanya gangguan vandalisme berupa pencurian kabel atau besi/material infrastruktur digital; dan
5. Keterbatasan energi berupa jaringan listrik PLN dan energi terbarukan.

Percepatan pembangunan infrastruktur digital di Jakarta tidak dapat lepas dari peran utama kementerian/lembaga khususnya dalam dukungan regulasi serta mendukung pembangunan infrastruktur *mobile* dan *fixed broadband* di daerah komersial. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas akses internet melalui program JakWifi, yang menyediakan layanan internet gratis bagi masyarakat, khususnya di fasilitas layanan dasar dan daerah pemukiman padat. Tujuan jangka panjangnya adalah diharapkan warga Jakarta terhubung secara digital dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Dari segi infrastruktur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya mengelola jaringan utilitas perkotaan dengan lebih baik, termasuk migrasi jalur distribusi listrik dan telekomunikasi dari udara ke bawah tanah (*underground*). Hal ini dilakukan melalui pembangunan jalur *ducting* untuk memastikan penataan infrastruktur yang lebih rapi dan efisien. Untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan kota, implementasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *machine learning*, *big data*, dan *real-time communication* semakin dioptimalkan. Salah satu contoh penerapan IoT adalah sistem pengendalian banjir, yang memanfaatkan sensor guna memantau kecepatan arus dan ketinggian muka air sungai secara *real-time*. Data ini kemudian dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi banjir. Ke depannya, pemanfaatan teknologi digital akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

Dalam pengelolaan data, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai beralih ke komputasi awan (*cloud computing*) sebagai sistem penyimpanan data. Perubahan dari *server* fisik ke *government cloud* membawa berbagai keuntungan, seperti fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan layanan publik, akses data yang lebih cepat, peningkatan keamanan dari ancaman siber, serta efisiensi penggunaan kapasitas penyimpanan. *Data center* kota berfungsi sebagai jantung digital kota pintar untuk menjamin data terlindungi dan memiliki *backup/disaster recovery* agar layanan kota tetap berjalan. Kehadiran pusat data mendukung fungsi keterbukaan data kepada publik (*open data*) yang mendorong keterlibatan warga dalam pengawasan, inovasi, dan solusi berbasis data. Selanjutnya, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, pemerintah juga tengah mengembangkan identitas digital (Digital ID) bagi seluruh warga Jakarta. Data ini akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan diintegrasikan dalam *master data management*, sehingga dapat digunakan untuk verifikasi serta autentikasi dalam berbagai layanan publik.

Hal lainnya dalam mendukung transformasi digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menargetkan pembangunan sistem pengawasan wilayah yang komprehensif, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika kota metropolitan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi *Closed-Circuit Television* (CCTV). Tujuan dari pengembangan pemanfaatan teknologi tersebut salah satunya untuk meningkatkan keamanan wilayah di permukiman atau daerah rawan kriminalitas. Selanjutnya, untuk memastikan pengembangan sistem pemanfaatan teknologi pengawasan secara berkelanjutan dan terarah hingga tahun 2030, Pemprov DKI Jakarta akan menyusun *Grand Design* CCTV sebagai pedoman jangka menengah dan jangka panjang yang memuat kebutuhan, lokasi prioritas, sistem integrasi, dan skema operasionalisasi.



Gambar III.53 Penambahan CCTV Keamanan Warga

Sumber: Berita Jakarta, 2025

Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Keputusan Gubernur Nomor 866 Tahun 2024 mengenai Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, Jakarta aktif mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan ETPD tidak hanya mempertahankan status Jakarta sebagai Pemda Digital, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan Indeks ETPD. Salah satu implementasinya adalah digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi melalui transaksi non-tunai, menggantikan metode konvensional di loket pembayaran. Selain itu, transaksi non-tunai juga diperluas ke sektor bisnis dan masyarakat melalui pembayaran menggunakan QR Code, kartu elektronik, serta aplikasi digital. Di sisi lain, perluasan implementasi *Retail Payment System* (RPS) dan akselerasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terus didorong.

Optimalisasi sistem perpajakan daerah melalui penerapan teknologi digital adalah langkah krusial dalam melengkapi digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek perpajakan. Langkah-langkah ini mencakup pembaruan digital data objek pajak untuk identifikasi dan penilaian yang akurat dan efisien, serta optimalisasi pendataan wajib pajak melalui *platform* digital yang mempermudah registrasi, pelaporan, dan kepatuhan. Digitalisasi sistem perpajakan diharapkan mampu mendorong peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dari 1,31 pada tahun 2025 menjadi 1,46 pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung ekosistem digital semakin berkembang, diperlukan peningkatan akses, literasi, dan partisipasi digital, terutama bagi angkatan kerja agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan global. Untuk itu, disusun *blueprint* transformasi digital pendidikan, yang memastikan integrasi data pendidikan dan pengembangan aplikasi pembelajaran yang lebih efisien serta berbasis satu data.

Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan utama SPBE adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Implementasinya mencakup evaluasi kebijakan TIK, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, audit teknologi, pembangunan pusat data daerah, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam proses bisnis pemerintahan. Terkait dengan Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintah Digital sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional 2025–2045. Hal tersebut juga diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang menyatakan bahwa penerapan indikator baru Indeks Pemerintah Digital dilakukan pada tahun 2026 dengan periode evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) tahun.

Beberapa aspek penerapan pemerintah digital yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yaitu: 1) Penguatan tata kelola pemerintah digital; 2) Penguatan teknologi pemerintah digital; 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN; 4) Transformasi digital layanan publik prioritas; serta 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Dengan dilaksanakannya pemerintah digital diharapkan dapat mengungkit pembangunan tahun 2025–2029 dengan sasaran, yaitu:

- a. Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu sehingga pengelola program perlindungan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut didukung oleh kebijakan satu data Indonesia untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang membutuhkan secara efisien;
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi. Misalnya, proses perizinan yang transparan, cepat dan akurat untuk mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat;
- c. Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- d. Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak; serta
- e. Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat melalui pengembangan *platform* layanan publik terpadu dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan sistem yang terintegrasi ini memastikan layanan lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh perangkat daerah yang diharapkan menciptakan fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik dengan dukungan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi serta layanan publik yang modern. Dengan demikian, pemerintah digital dapat memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas layanan pengaduan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola sistem *Citizen Relation Management* (CRM), yang mengintegrasikan 14 kanal pengaduan, termasuk aplikasi JAKI, media sosial resmi pemerintah, *email*, SMS, serta kantor pelayanan publik. Berbagai layanan publik juga dikembangkan dalam bentuk *super-apps*, yang mencakup administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, kesehatan, transportasi, hingga dompet digital. Untuk memperkuat sistem pengaduan masyarakat, dibutuhkan *command center*, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pemantauan lintas sektor dalam menangani pengaduan darurat serta penyebaran informasi publik.

Transformasi digital menciptakan peluang baru, namun juga menambah risiko keamanan siber yang harus diperhatikan secara serius. Keamanan siber (*cybersecurity*) menjadi fondasi penting bagi transformasi digital untuk memastikan keamanan sistem dan melindungi data dari ancaman serangan siber. Langkah-langkah pengamanan siber menjadi krusial mengingat semakin banyaknya layanan publik yang diselenggarakan secara digital. Adapun beberapa upaya pengamanan siber yang dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta, antara lain:

- a. Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) melalui standar keamanan informasi seperti ISO 27001 untuk mengelola dan melindungi data serta sistem informasi milik pemerintah daerah;
- b. Membangun Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS)/*Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang bertugas memantau lalu lintas data, mendeteksi serangan, serta merespon insiden keamanan secara *real time*;
- c. Membentuk dan mengelola pusat operasi keamanan siber;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber;
- e. Melakukan peningkatan literasi keamanan siber pegawai melalui edukasi kesadaran keamanan siber;
- f. Penerapan manajemen risiko keamanan siber sebagai bagian dari manajemen risiko SPBE;
- g. Penerapan standar teknis dan prosedur keamanan sistem elektronik serta pengujian fungsi keamanan terhadap aplikasi dan infrastruktur sistem elektronik;
- h. Melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, dan pihak-pihak lain dalam rangka penguatan keamanan siber;
- i. Melakukan *backup* dan *disaster recovery* setiap data penting yang disimpan secara berkala ke *server* terpisah untuk memastikan bisa dipulihkan jika terjadi peretasan atau gangguan sistem;
- j. Melakukan penguatan infrastruktur keamanan siber; dan
- k. Menerapkan sertifikat elektronik dalam rangka menjaga aspek integritas, keaslian dan kenirsangkalan dokumen digital.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Layanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, serta administrasi oleh instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan publik. Setiap Perangkat Daerah yang menyediakan layanan publik diwajibkan untuk memberikan pelayanan

yang optimal. Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk bidang perizinan, Pemprov DKI Jakarta telah menyederhanakan prosedur, mempercepat proses, serta menerapkan sistem digital guna memastikan seluruh layanan perizinan berbasis elektronik. Penerapan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas didukung oleh transformasi digital untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terhubung dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelayanan publik digital perlu menitikberatkan pada *city based services* (layanan berbasis kota) yang mengedepankan integrasi seluruh layanan publik yang fokus pada kebutuhan spesifik masyarakat kota dan menitikberatkan masyarakat sebagai subjek layanan. Desain layanan bertujuan membangun kepercayaan dan kepuasan warga, serta adanya umpan balik yang adaptif dan cepat tanggap dari pemerintah daerah.



Gambar III.54 Layanan Alpukat Betawi Jakarta

Sumber: alpukat-dukcapi.jakarta.go.id, diakses Juni 2025

Pelaksanaan optimalisasi pengelolaan data kependudukan dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat (Alpukat) Betawi Jakarta. Alpukat Betawi merupakan sebuah kanal pelayanan yang memberikan akses langsung kepada penduduk khususnya warga Jakarta untuk mengajukan pelayanan administrasi kependudukannya. Melalui aplikasi ini, penduduk dapat mengajukan permohonan layanan, penjadwalan pelayanan, dan memonitor pelayanan yang diajukannya. Adapun pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan, yaitu pemenuhan cakupan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el, KK, KIA) dan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akta perceraian). Jumlah pengguna Alpukat Betawi sejak tahun 2019–2024 telah mencapai 1.185.094 pengguna. Ke depannya pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan *online platform* khususnya aplikasi Alpukat Betawi akan lebih ditingkatkan. Beberapa strategi yang dilakukan, di antaranya:

- Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat misalnya dengan melibatkan *influencer* dan komunitas di kelurahan untuk mempromosikan aplikasi tersebut;
- Mengoptimalkan waktu pemrosesan dengan memprioritaskan kecepatan dan efisiensi pengurusan dokumen kependudukan;
- Peningkatan kemudahan akses oleh semua kalangan masyarakat khususnya disabilitas; dan
- Merespon cepat keluhan dan menindaklanjuti umpan balik pengguna dengan cepat dan tepat.

III.3.5. Terbangunnya Infrastruktur Kota yang Layak

Tabel III.24 Penentuan Program Prioritas Tujuan 4.1

Misi 4: Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan		
Tujuan 4.1: Terbangunnya Infrastruktur Kota yang Layak		
SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	☐ Peningkatan infrastruktur air bersih melalui akses perpipaan, penurunan tingkat kebocoran <i>non-revenue water</i> , dan pembangunan SPAM, serta penguatan tata kelola ☐ Pembangunan <i>Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan 6</i> ☐ Penanganan sampah rumah tangga (pengurangan sampah di sumber) melalui pelayanan pilah terjadwal, pengelolaan sampah pada kawasan mandiri, dan peningkatan TPS/TPS-3R/ <i>recycling center</i> ☐ Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) dan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi modern yang ramah lingkungan	☐ Program Pengelolaan Persampahan ☐ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ☐ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Tersedianya Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak	☐ Pembangunan rumah susun dan fasilitas kepemilikan rumah ☐ Peningkatan kualitas kawasan permukiman ☐ Penyelesaian administrasi dan sertifikasi tanah di kawasan permukiman ☐ Konsolidasi tanah vertikal dan horizontal untuk pembangunan hunian layak	☐ Program Pengembangan Perumahan ☐ Program Kawasan Permukiman ☐ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ☐ Program Penatagunaan Tanah

A. Meningkatkan Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Jakarta, sebagai salah satu megapolitan terbesar di belahan selatan bumi, masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar infrastruktur dan pelayanan dasar agar setara dengan kota-kota global lainnya. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan berupa layanan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan baik melalui skema pembangunan tahun tunggal atau tahun jamak dengan pembiayaan yang dapat berasal dari APBD, APBN, Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), maupun sumber pendanaan lainnya. Untuk mendukung keberlanjutan dan kedaulatan pengelolaan air, dilakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi sumber daya air, pengurangan kebocoran, pemanfaatan kembali air, serta pembangunan fasilitas penampungan air sebagai alternatif sumber air baku, dengan memperhatikan siklus hidrologi.

Air minum aman merupakan air yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang mencakup parameter mikrobiologi, fisik, dan kimia. Pada tahun 2024, cakupan layanan air minum aman perpipaan baru menjangkau 70,03%, dengan jumlah pelanggan sebesar 948.594 sambungan rumah, panjang pipa terbangun 12.195 km, tingkat kebocoran air atau *non revenue water* (NRW) sebesar 45,88%, dan air terdistribusi 20.935 liter per detik (lps). Dalam periode lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengupayakan berbagai strategi untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan layanan air minum aman di Jakarta melalui peningkatan suplai air, pengendalian tingkat kebocoran air (NRW), peningkatan jumlah pelanggan, dan peningkatan tata kelola air.



Gambar III.55 SPAM Mookervart Jakarta Barat

Sumber: Galeri Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta

Terkait dengan upaya peningkatan suplai air minum, pemerintah akan melakukan berbagai langkah strategis guna memperluas jangkauan layanan dan menjamin ketersediaan air bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur guna menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Upaya peningkatan suplai air lainnya dilakukan melalui:

1. Pembangunan SPAM, di antaranya adalah SPAM Regional Jatiluhur (4.000 lps), SPAM Regional Karian-Serpong (3.200 lps), SPAM Buaran III (3000 lps), SPAM Pesanggrahan (750 lps), dan SPAM Ciliwung (200 lps);
2. Optimalisasi distribusi air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) eksisting seperti IPA Pejompongan, IPA Buaran, IPA Pulo Gadung, IPA Cilandak, IPA Taman Kota, IPA Citra Hutan Kota, termasuk suplai air Distribution Center (DCR) dari PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Tangerang;
3. Pembangunan 14 reservoir komunal pada area krisis air, penguatan pelayanan yang berkesinambungan, pengembangan sumber air baku alternatif seperti program pemanenan air hujan di atap-atap bangunan, serta penguatan inisiatif *reduce, reuse, recycle* (3R) untuk pemanfaatan ulang air bekas pakai domestik secara aman;
4. Fokus khusus juga diberikan pada daerah krisis air di pesisir utara Jakarta dan wilayah Kepulauan Seribu, khususnya pulau-pulau berpenduduk melalui pemanfaatan teknologi, yang termasuk namun tidak terbatas pada, *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) serta pemberian subsidi yang mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah.



Gambar III.56 Instalasi Pengolahan Air Buaran III

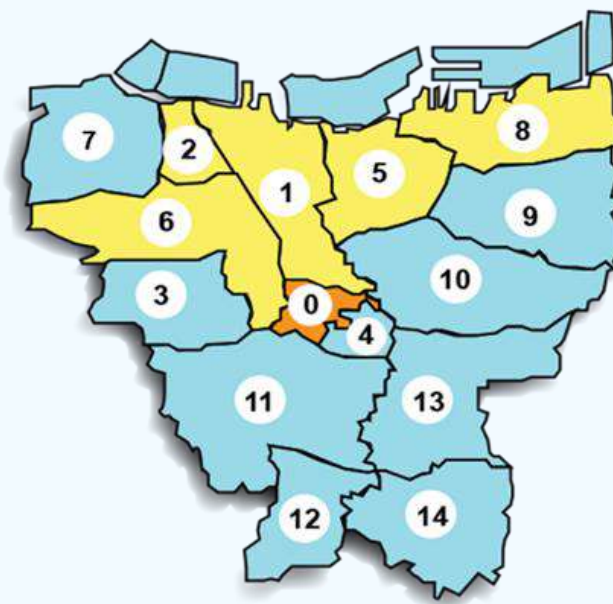
Sumber: Dinas Sumber Daya Air, 2025

Tingkat kebocoran air merupakan perbedaan antara jumlah air yang diproduksi oleh fasilitas penyediaan air dengan jumlah air yang dibayar oleh pelanggan. Penghitungan NRW mencakup berbagai jenis kehilangan air baik fisik seperti kebocoran pipa dan kerusakan infrastruktur, maupun non-fisik seperti pencurian air dan kesalahan pengukuran. Angka NRW juga dihitung dari perbandingan air yang terdistribusi dan terjual sehingga hasilnya sangat fluktuatif. Upaya menurunkan tingkat kebocoran dilakukan melalui penghematan air (*water saving*) sebesar ± 4.000 lps dengan beberapa strategi diantaranya, penambahan dan penyempurnaan sistem *monitoring* pada area prioritas (PA) maupun *district meter area* (DMA), pembangunan dan penyempurnaan DMA, rehabilitasi jaringan distribusi, rehabilitasi sambungan pipa dinas, dan penggantian meter dan *decommissioning* pipa.

Peningkatan sekitar 1 juta pelanggan baru akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2030. Seiring dengan adanya dukungan regulasi, penyesuaian terhadap segmentasi pelanggan dan tarif juga dilakukan. Selain itu, pembiayaan didukung melalui berbagai alternatif yang sah. Upaya peningkatan tata kelola turut dilakukan melalui pembangunan sentra pelayanan PAM JAYA, penyediaan sentra dan *mobile laboratorium*, optimalisasi area bisnis, inovasi air layak minum, serta perbaikan tata kelola air secara menyeluruh. Melalui berbagai upaya yang dimaksud, diharapkan cakupan layanan air minum aman perpipaan dapat mencapai 100% dengan jumlah pelanggan mencapai 2 juta sambungan rumah. Distribusi air ditargetkan meningkat hingga ± 32.000 lps dan angka NRW ditargetkan turun hingga mencapai 30% pada 2030. Target ini selaras dengan Visi Nasional Indonesia Emas 2045 yang menetapkan 100% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap air bersih. Selain itu, target ini juga mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-6 yang berfokus pada akses air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Sanitasi yang aman merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kota, karena berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga Jakarta yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman telah mencapai 23,83%. Angka ini melebihi capaian nasional yang berada pada 14,10% (BPS, 2024). Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (DSDA) tahun 2024, debit air limbah yang diolah mencapai $1.666 \text{ m}^3/\text{hari}$ dan kapasitas pengolahan SPALD terpusat skala permukiman mencapai $2.550 \text{ m}^3/\text{hari}$. Hal ini didukung dengan infrastruktur air limbah domestik yang mencapai 197 unit serta fasilitas individual (tangki septik) rumah tangga yang mencapai 1.650 rumah tangga. Namun demikian, masih terdapat sekitar 5% warga Jakarta, atau sekitar 533.605 orang, yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Fenomena ini perlu perhatian khusus untuk menerapkan pembangunan kota yang sehat dan layak huni. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang akan berfokus pada peningkatan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan. Pendekatan *City-Wide Inclusive Sanitation* (CWIS) diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses layanan sanitasi yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Peningkatan layanan dilakukan diantaranya melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu *Jakarta Sewerage System* (JSS), pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) skala permukiman, dan revitalisasi tangki septik. JSS zona 1 direncanakan beroperasi awal 2027, sedangkan JSS zona 6 fase 1 direncanakan untuk dimulai pembangunannya dan akan dilanjutkan dengan rencana pengembangan JSS zona 6 fase 2 sampai dengan 4. Selain itu, akan dilaksanakan proses perencanaan serta pendanaan untuk JSS zona 2, 5, dan 8 yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Dilakukan pula upaya pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah (SPALD) skala permukiman sebanyak ± 500 unit termasuk dukungan pengadaan tanah, peningkatan fasilitas individu melalui revitalisasi tangki septik sebanyak ± 17.000 rumah tangga, dan peningkatan layanan lumpur tinja terjadwal. Penguatan tata kelola dan alih kelola ke PD PAL JAYA juga dilakukan antara lain melalui penetapan tarif yang jelas, dukungan regulasi, pengembangan pemanfaatan pengelolaan air limbah untuk air baku, serta dukungan lainnya yang terus dilakukan dalam rangka percepatan akses sanitasi aman, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah yang baik serta penyelenggaraan program sanitasi berbasis masyarakat juga menjadi prioritas untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan standar pembuangan air limbah yang mempertimbangkan dampak pada badan air disertai dengan inspeksi berkala, khususnya bagi entitas industri dan komersial.



Zona	Lokasi IPAL
0	Waduk Setiabudi
1	Waduk Pluit
2	Muara Angke
3	Hutan Kota Srengseng
4	Transfer ke IPAL Zona 10
5	Hutan Kota Waduk Sunter Utara
6	Duri Kosambi
7	Kamal-Pegadungan
8	Rencana Waduk Marunda
9	Rencana Situ Rawa Rorotan
10	Pulo Gebang
11	Taman Bendi & Rencana Waduk Ulujami
12	Kebun Binatang Ragunan
13	Rencana Waduk Kampung Dukuh
14	Rencana Waduk RW 05 Ceger

Gambar III.57 Rencana Zona Jakarta Sewerage System

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Cakupan layanan air limbah aman pada tahun 2030 ditargetkan meningkat menjadi 41,51%, dengan jumlah infrastruktur air limbah terbangun menjadi ±700 unit, revitalisasi ±18.000 tangki septik skala rumah tangga, peningkatan debit air terolah menjadi ±125.000 m³/hari, dan peningkatan kapasitas SPALD terpusat skala permukiman menjadi ±20.000 m³/hari. Hal ini sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-6 untuk mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, serta memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan dan kelompok masyarakat rentan. Implementasi peningkatan akses sanitasi mendukung secara langsung Visi Indonesia Emas 2045, yaitu 70% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap sanitasi aman, dimana Jakarta menjadi salah satu kota percontohan nasional yang menerapkan 100% akses sanitasi aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, persentase pengelolaan sampah telah mencapai 99,65% dengan komposisi persentase penanganan sampah menurun menjadi 71,59% dan persentase pengurangan sampah meningkat menjadi 28,06%. Peningkatan pengurangan sampah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup berhasil dalam menggerakkan pengelolaan sampah ke arah yang positif namun kapasitas tempat pembuangan akhir kota saat ini masih belum cukup untuk menampung sampah padat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, volume timbulan sampah di Jakarta mencapai 3.171.247,45 ton/tahun, dengan 7.734,97 ton per harinya dikirim ke TPST Bantargebang yang sudah hampir melebihi kapasitas. Tingginya timbulan sampah masih menjadi tantangan utama, terutama karena belum optimalnya upaya pengurangan dan pemilahan dari sumbernya. Untuk mendorong hal tersebut, persentase pengelolaan sampah ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2030.

Pada prinsipnya, upaya penanganan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penjadwalan pengangkutan sampah rumah tangga di seluruh RW, pengolahan sampah organik untuk mengurangi sampah makanan (*food waste*), pembangunan saringan sampah di wilayah perbatasan Jakarta guna mendukung penanganan drainase makro di 13 sungai, penyediaan dan pengoperasian 17 unit TPS-3R di tingkat kecamatan, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan disertai kajian komprehensif yang berkelanjutan, pengadaan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah, serta optimalisasi TPST Bantargebang guna memperpanjang masa operasional melalui, implementasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), *Refuse Derived Fuel* (RDF), *landfill mining*, pengelolaan lindi pada Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) serta pengadaan truk *compactor* yang dapat meminimalisir bau di sepanjang rute pengangkutan sampah.



Gambar III.58 Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant Rorotan

Sumber: Berita Jakarta, 2025

Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah (*reduce*), penggunaan kembali sampah (*reuse*), dan pendaur ulangan sampah (*recycle*). Pemerintah DKI Jakarta mendorong pendekatan ramah lingkungan yang mendukung ekonomi sirkular dan berorientasi pada konversi sampah menjadi sumber energi alternatif. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah melalui insentif dan disinsentif seperti penerapan *polluter pays principle* dengan mendorong *Extended Producer Responsibility* (EPR). Upaya ini perlu diselaraskan dengan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan tanggung jawab produsen maupun pelaku usaha dan memperkuat solusi *zero-waste* yang inovatif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan didorong melalui penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di skala lingkungan (Bank Pengelolaan Sampah/BPS RW). Potensi kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta seperti *start-up* dapat digali untuk terus dikembangkan.

Selain itu, kebijakan penghentian polusi plastik membutuhkan komitmen dan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen, serta masyarakat. Pemerintah pusat memiliki ruang lingkup yang mencakup pengaturan tata laksana pengurangan sampah plastik, kewajiban produsen, serta pemberdayaan dan edukasi publik. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyusun kebijakan lokal yang mendorong pemilahan dan pengurangan sampah di berbagai sektor, menyelenggarakan kampanye dan edukasi publik secara berkelanjutan, serta mendorong pelibatan dunia usaha dalam pengurangan serta penarikan kembali (*take-back*) sampah kemasan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan produsen untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah plastik dan menyediakan sistem penanganan sampah kemasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, usaha pengurangan sampah dilakukan melalui beberapa aksi, seperti kampanye Jakarta Sadar Sampah, kolaborasi *pentahelix*, penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, redistribusi makanan berlebih dari sektor hotel, restoran, dan katering (*horeka*), pembentukan dan reaktivasi bank sampah, pemantauan aliran sampah hingga TPS/TPA/TPST, serta penyelenggaraan Benyamin S Award pada kategori Bersih sebagai bentuk apresiasi praktik terbaik pengurangan sampah.

Pada tahun 2024, telah dilakukan pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) sebanyak 21 fasilitas dengan total kapasitas penanganan persampahan mencapai 3.270 ton/hari yang terdiri dari TPS-3R, saringan sampah TB Simatupang, *landfill mining* dan RDF Bantargebang, PLTSa Merah Putih, dan Jakarta Recycle Center Pesanggrahan. Pembangunan FPSA pada tahun 2030, ditargetkan bertambah menjadi 31 fasilitas dengan target total kapasitas 6.050 ton/hari. Pembangunan FPSA perlu dilandasi dengan kajian komprehensif yang mendalam dan juga dapat mengacu pada beberapa contoh penanganan sampah dari kota global lain yang memiliki performa berkelanjutan.

B. Tersedianya Hunian Terjangkau dan Permukiman Layak

Dalam rangka mewujudkan penyediaan hunian layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak. Amanat tersebut dijalankan melalui penyelenggaraan berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta mendukung pemenuhan hak atas perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan yang memiliki keterbatasan daya beli. Komitmen ini juga sejalan dengan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan kebijakan strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

Backlog hunian di Jakarta saat ini sekitar 400 ribu unit dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 20 tahun ke depan. Detail proyeksi jangka panjang *backlog* hunian Provinsi DKI Jakarta dijabarkan melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2025-2045. Tantangan lain dalam meningkatkan akses terhadap hunian layak dan mengurangi *backlog* perumahan di Jakarta adalah keterbatasan intervensi pada lahan-lahan privat, mekanisme pasar, dan kebutuhan regulasi pendukung yang membuat Pemerintah harus mencari solusi yang lebih inovatif dan kolaboratif. Menurut indikator Badan Pusat Statistik, hunian layak didefinisikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni: (1) luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita, (2) akses terhadap air minum yang layak, (3) akses terhadap sanitasi yang memadai, dan (4) ketahanan struktur bangunan, termasuk komponen atap, lantai, dan dinding. Saat ini hanya 39% rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses hunian layak. Masih besarnya persentase rumah tidak layak huni (RTLH) disebabkan oleh penggunaan atap asbes yang tidak memenuhi standar kesehatan. Adapun upaya penggunaan dan peredaran atap asbes membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diantaranya seperti sektor konstruksi, kesehatan, perdagangan, dan perindustrian. Pada tahun 2029, Bappenas menargetkan akses hunian layak di Jakarta sebesar 42,22%.

Dalam pemenuhan penyediaan hunian layak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pembangunan rumah susun (baik sewa maupun milik) yang dilaksanakan melalui skema pembangunan tahun jamak (*multi years*). Pada tahun 2024, tingkat keterhunian unit rumah susun sewa yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 86,9% dengan tingkat kepuasan terhadap layanan rusun sebesar 86,32%. Untuk memenuhi keterhunian dan meningkatkan kepuasan layanan, lokasi pembangunan rusun dirancang dengan mempertimbangkan kedekatan terhadap pusat kegiatan warga dan keterhubungan dengan transportasi umum dan Kawasan Berorientasi Transit/*Transit Oriented Development* (TOD). Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang layak, serta peluang pembangunan hunian *mixed-use* (misalnya pembangunan rumah susun di atas lahan aset pasar, gelanggang olahraga, kantor kecamatan, dan lainnya) juga menjadi pertimbangan lainnya. Target penyediaan hunian layak tidak hanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saja tetapi juga Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), diantaranya adalah para pekerja maupun warga yang memiliki keterbatasan daya beli dalam kepemilikan rumah. Dalam penerapannya, penyediaan hunian layak perlu berbagai bentuk pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi, utamanya untuk mempersiapkan warga penghuni rusun dalam memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.



Gambar III.59 Rusunawa Jagakarsa

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2025

Pemerintah Provinsi DKI juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menerapkan skema *housing career*, di mana rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai ruang bagi keluarga untuk bertumbuh, berkembang, dan membangun kemandirian ekonomi demi kehidupan yang lebih baik. Hal ini diperkuat dengan upaya transformasi Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) menjadi BLUD untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah melalui program Hunian Terjangkau Milik (HTM) dan skema Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Masyarakat yang memenuhi syarat dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank tanpa membayar uang muka, dengan tenor dan suku bunga yang terjangkau. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan HTM dan skema Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi MBR dan MBT, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha melalui mekanisme KPBU, kolaborasi dengan BUMN/BUMD, maupun kerja sama antar perusahaan (*business-to-business*). Selain itu, dibutuhkan juga penguatan kebijakan-kebijakan yang relevan, antara lain seperti penetapan batas harga jual rumah yang dapat diakses melalui FPPR, kerja sama dengan bank pelaksana, serta pembentukan BLUD yang bertugas mengelola dana perumahan dalam skema HTM.

Kualitas permukiman juga merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam lima tahun mendatang. Hingga tahun 2024, terdapat sekitar 6,46% dari total luas wilayah Jakarta yang masih perlu ditata. Peningkatan dan/atau perbaikan kualitas kawasan permukiman mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hasil identifikasi BPS DKI Jakarta pada tahun 2017 terdapat 445 RW kumuh di Jakarta. Sejak tahun 2018 hingga 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan intervensi pada 281 RW kumuh dengan luasan 6.398,86 ha. Selanjutnya, dalam periode tahun 2025–2030, Pemerintah akan sekurang-kurangnya melakukan penanganan pada 159 RW kumuh dengan luasan sekitar 4.166,49 ha.

Tabel III.25 Rencana Penanganan RW Kumuh Jakarta 2025-2030

No	Suku Dinas PRKP	RW Kumuh	Luas (ha)	Penanganan 2018-2024	Luas (ha)	Rencana Penanganan 2025-2030	Luas (ha)	Lokasi Tidak Ditangani	Luas (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jakarta Pusat	98	701,49	50	267,45	48	434,04	-	-
2.	Jakarta Utara	80	3.789,64	60	2.710,29	20	1.079,35	-	-
3.	Jakarta Barat	92	2.552,28	75	1.444,38	16	1.102,36	1	5,54
4.	Jakarta Selatan	90	1.669,03	43	828,13	45	823,19	2	17,70
5.	Jakarta Timur	78	1.955,48	46	1.105,42	30	721,39	2	128,67
6.	Kepulauan Seribu	7	49,34	7	43,18	-	6,16	-	-
Total		445	10.717,26	281	6.398,86	159	4.166,49	5	151,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Dalam upaya meningkatkan penataan kawasan permukiman perkotaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan tiga pola penataan aspek fisik lingkungan, antara lain:

1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Permukiman menjadi Permukiman yang layak huni, seperti peningkatan dan/atau perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi unit rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman, seperti penataan kawasan padat penduduk melalui reforma agraria dan konsolidasi tanah baik vertikal maupun horizontal.
3. Permukiman kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi permukiman yang terdapat kondisi kekumuhan yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana, seperti pembangunan rumah susun.

Untuk mewujudkan penataan kawasan permukiman, kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan. Dalam proses ini, Pemerintah tetap mengedepankan hak dan kewajiban pemilik tanah maupun warga yang telah lama menghuni kawasan tersebut. Dukungan sektor pertanahan menjadi elemen penting dalam penyediaan infrastruktur dan layanan dasar kota. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Sejalan dengan itu, berbagai upaya dilakukan, termasuk peningkatan sertifikasi tanah di kampung kota, inventarisasi serta fasilitasi penyelesaian administrasi pertanahan, penataan aset, dan sinkronisasi rencana pemanfaatan tanah oleh masyarakat, serta penyelenggaraan Benyamin S Award kategori Nyaman yang menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan dalam terwujudnya kawasan yang bebas kumuh.

III.3.6. Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan

Tabel III.26 Penentuan Program Prioritas Tujuan 4.2

Misi 4: Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan		
Tujuan 4.2: Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan		
SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	☐ Penambahan luas RTH, populasi vegetasi, dan RTB yang didukung dengan peningkatan sistem basis data dan sistem spasial ☐ Pengembangan kawasan Kepulauan Seribu dengan pembangunan pusat konservasi ekologi dan peningkatan daya listrik ☐ Penurunan emisi GRK dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan ☐ Penguatan ketahanan energi yang berwawasan lingkungan ☐ Penerapan kaidah bangunan gedung hijau ☐ Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	☐ Program Penataan Bangunan Gedung ☐ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ☐ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ☐ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ☐ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat ☐ Program Pengelolaan Hutan ☐ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil ☐ Program Pengelolaan Energi Terbarukan
Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	☐ Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui pembangunan tanggul pengaman pantai ☐ Optimalisasi dan revitalisasi kali/sungai, Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) dengan naturalisasi/normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pemanenan air hujan (PAH), dan sumur resapan ☐ Mitigasi dan adaptasi bencana iklim melalui pengendalian pencemaran udara, pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas polder, dan pengendalian ekstraksi air tanah ☐ Peningkatan mitigasi dan kewaspadaan kebakaran wilayah perkotaan	☐ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ☐ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ☐ Program Pengelolaan Aspek Kegeologian ☐ Program Penanggulangan Bencana ☐ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

A. Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon

Jakarta turut berperan aktif dalam mendukung pencapaian target pengendalian perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD), yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% (target ambisius sebesar 50%) pada tahun 2030, serta mencapai *net-zero emission* pada tahun 2050. Upaya penurunan emisi GRK terus dilakukan secara konkret melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui skema pembangunan tahun tunggal maupun tahun jamak. Upaya-upaya tersebut merupakan kontribusi Jakarta terhadap target global sebagaimana tercantum dalam *Paris Agreement*.

Merespon komitmen terkaitantisipasi bencana iklim tersebut, akan dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lintas sektor, dengan fokus penurunan emisi GRK diantaranya melalui upaya:

- Sektor energi: Penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, *retrofitting* pada bangunan gedung, pembangunan PLTS atap di aset pemerintah daerah, pengurangan konsumsi bahan bakar fosil, peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan mobilitas lainnya yang ramah lingkungan, elektrifikasi armada Transjakarta, mendorong Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta replikasi Low Emission Zone (LEZ) Kawasan Kota Tua di kawasan lain.
- Sektor AFOLU: Penghijauan dan optimalisasi RTH, pengembangan ekosistem *mangrove*, pertanian perkotaan, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
- Sektor limbah: pengurangan sampah dari sumber, pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, pengurangan jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan, dan pengembangan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan.
- Sektor Industrial Process and Product Use (IPPU): penggunaan energi ramah lingkungan dengan mengubah bahan bakar industri ke alternatif yang lebih bersih dan pengawasan sumber emisi tidak bergerak untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- Sektor lainnya: publikasi hasil inventarisasi emisi GRK, kerja sama dengan sektor swasta dan wilayah sekitar Jakarta melalui MoU/PKS untuk pengendalian pencemaran lingkungan lintas wilayah, penerapan *climate budget tagging* (CBT) dalam perencanaan pembangunan rendah karbon, serta pengembangan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) untuk mengurangi emisi berbagi sektor dalam suatu kawasan.



Gambar III.60 Armada Bus Listrik (BRT) Transjakarta

Sumber: Jakarta Smart City, 2024

Selain itu, dilakukan akselerasi implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui berbagai skema seperti perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan mekanisme lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dirumuskan pula peta jalan (*roadmap*) dan tata kelola yang bertujuan untuk mengakselerasi keterlibatan Jakarta dalam perdagangan emisi dan pasar karbon di tingkat nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan global, yakni pembentukan pasar karbon bagi para pelaku usaha untuk menekan emisi khususnya pada sektor industri, transportasi, dan bangunan gedung.

Selain itu, adaptasi perubahan iklim juga meliputi penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, edukasi masyarakat seperti Program Kampung Iklim (Proklam) dan Sekolah Adiwiyata, pengelolaan air limbah domestik, air resapan tanah, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, manajemen energi, ketahanan pangan, penyediaan perumahan dan infrastruktur tahan iklim. Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dipantau secara berkala dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca tahunan dan kumulatif yang diharapkan mencapai target sebesar 32% dan 18,86% pada tahun 2030 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditargetkan mencapai 55,01 pada tahun yang sama.



Gambar III.61 Kampung Sadar Lingkungan di Cempaka Putih

Sumber: Berita Jakarta, 2025

Salah satu dampak perubahan iklim yang terjadi di wilayah perkotaan adalah fenomena suhu di pusat kota yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan sekitarnya atau disebut juga sebagai *Urban Heat Island* (UHI). RTH memegang peranan penting dalam memperbaiki kualitas udara, mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga ekosistem alami dan keanekaragaman hayati, kenyamanan suhu, meningkatkan daya dukung lingkungan, serta meningkatkan Indeks Kualitas Lahan. Pada tahun 2024, persentase luas RTH sebesar 5,209% dan pada tahun 2030 ditargetkan mencapai 5,642%.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten terus berupaya menambah RTH melalui pengadaan lahan serta peningkatan kualitasnya, termasuk taman kota, hutan kota, jalur hijau, kebun bibit, Taman Margasatwa Ragunan, makam, serta ruang-ruang lainnya. Upaya tersebut didukung pula dengan pengembangan kawasan wisata ruang terbuka hijau tematik, seperti *pocket park* dan Taman Grande. Pemprov DKI Jakarta juga memaksimalkan lahan hijau seperti pemakaman untuk dapat berfungsi ekologis dan mendukung upaya penghijauan kota. Selanjutnya pada pelayanan pemakaman, pemerintah akan berfokus pada strategi peningkatan tata kelola melalui penerapan makam tumpang, penyediaan petak makam, dan menggali potensi penyediaan lahan pemakaman yang berlokasi di wilayah sekitar Jakarta. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat sejalan dengan strategi kota global dalam melestarikan kota melalui penanaman pohon secara ekstensif untuk meningkatkan fungsi ekologis sosial, ekonomi, estetika, dan hidrologis.

Upaya meningkatkan luasan RTH juga disinergikan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka biru yang menciptakan infrastruktur hijau-biru yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan konsep Indeks Hijau Biru Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH. Integrasi ruang hijau-biru menerapkan konsep *Nature-based Solution* (NBS) melalui pengembangan *mangrove* yang mendukung ekosistem pesisir, drainase vertikal, kolam retensi, *bioswale*, dan taman hujan di berbagai area hijau kota yang dapat mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.



Gambar III.62 Integrasi Ruang Terbuka Hijau dan Biru di Taman Setu Biru Cipayung

Sumber: Berita Jakarta, 2025

Selanjutnya, pemerintah menargetkan basis data pohon dan RTH yang lebih akurat dan mutakhir untuk mendukung pengambilan kebijakan. Pemerintah juga akan menggiatkan aktivitas taman kota pasca-pandemi melalui *platform* digital guna menarik lebih banyak pengunjung, disertai publikasi dan edukasi masyarakat. Diharapkan, RTH dapat menjadi tempat berolahraga, rekreasi, pengembangan hobi, serta interaksi sosial warga Jakarta melalui optimalisasi waktu operasional taman dalam mendukung aktivitas warga dan sosial ekonomi. Hal ini mendukung penataan lingkungan wilayah pada kategori Indah yang turut menjadi kriteria dalam Benyamin S Award.



Gambar III.63 Pembukaan Taman Kota 24-Jam

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2025

Perbaikan lanskap ruang hijau perkotaan juga dapat dicapai melalui penghijauan infrastruktur kota, seperti tiang-tiang kereta dan ruang di bawah jalan layang, taman atap (*roof garden*), *green wall*, maupun strategi-strategi penghijauan skala mikro lainnya. Selain pendekatan fisik, penguatan regulasi dan keterlibatan masyarakat juga terus dikembangkan. Jakarta telah memiliki regulasi terkait RTH, diantaranya Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2022 tentang RTH, Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman, dan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon, yang memuat panduan lengkap mengenai pengelolaan serta peluang kolaborasi pengembangan RTH dengan masyarakat.



Gambar III.64 Tebet Eco Park

Sumber: Archdaily

Dalam mencapai target pembangunan rendah karbon, Pemerintah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH)/*green building* dan ramah disabilitas, *retrofitting* bangunan, pemasangan PLTS atap, pengembangan energi baru terbarukan, dan program kampung iklim, disertai pusat konsultasi warga untuk berbagi informasi dan praktik terbaik. Pada tahun 2024, persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau mencapai 9,1%, angka capaian ini meningkat 0,8% dari tahun 2023. Dalam upaya peningkatan capaian tersebut, aset-aset bangunan milik Pemerintah, seperti gedung kantor, rumah susun, sekolah, rumah sakit, dan lainnya akan diarahkan mengikuti prinsip *green building*, mengingat kondisi area terbangun Jakarta yang tinggi dan minim ketersediaan RTH. Penerapan prinsip *green building* bertujuan agar bangunan gedung dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, melalui penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) dan Konsumsi Air pada bangunan gedung. Selain aset-aset bangunan milik Pemerintah, Pemerintah juga mendorong pemenuhan kaidah prinsip *green building* pada bangunan milik privat melalui penerapan insentif dan disinsentif dalam bentuk fiskal dan non fiskal. Diharapkan pada tahun 2030 persentase bangunan gedung yang memenuhi prinsip bangunan gedung hijau mencapai 50%.

Selain itu, upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan dengan pengurangan polusi udara. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), pemerintah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) dan sensor pemantauan lainnya, kerja sama pemantauan emisi dengan wilayah sekitar Jakarta, penanaman vegetasi pengendali polusi dan penyerap karbon yang bertajuk lebar, serta pelaksanaan uji emisi yang terintegrasi dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Ditargetkan pada tahun 2030 IKU dapat mencapai nilai 53,93.

Komitmen pelestarian lingkungan juga menysar kawasan perairan dan kepulauan, khususnya Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah pesisir dan kelautan didorong untuk menggali potensi pemanfaatan *blue carbon* yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan bakau, padang lamun, dan rawa garam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah. Konservasi laut juga penting agar ekosistem dan biota laut tetap terjaga.

Pada sektor energi, Jakarta menghadapi tantangan terkait kebutuhan energi yang besar di tengah keterbatasan sumber daya internal dan tantangan pelestarian lingkungan. Untuk menjawab hal tersebut, pembangunan sektor energi di Jakarta difokuskan pada efisiensi penggunaan energi sekaligus peningkatan kualitas energi secara merata di seluruh wilayah melalui implementasi energi baru terbarukan. Sebagai langkah untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2023-2050 dalam rangka meningkatkan ketahanan, kemandirian, keamanan energi, mempercepat transisi energi berkelanjutan,

mengelola infrastruktur energi secara efisien, serta merespons peningkatan kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi, ekonomi, infrastruktur, dan peran Jakarta sebagai pusat perekonomian dan bisnis. Pada peraturan tersebut, disebutkan target pemakaian energi baru terbarukan sebesar 2,14 *Million tonnes of oil equivalent* (Mtoe) pada tahun 2050 atau sama dengan 7,5% dari total bauran energi primer.

Tantangan yang dihadapi pada sektor energi adalah pemerataan akses energi, terkhusus pada pemenuhan elektrifikasi di seluruh pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan kabel laut, peningkatan jaringan transmisi, distribusi listrik, gardu induk, gardu distribusi, dan *ducting* utilitas terpadu. Pengembangan infrastruktur juga mencakup distribusi gas bumi untuk sektor rumah tangga, komersial, transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *database* sektor energi di level Provinsi DKI Jakarta dapat dipertajam sebagai landasan untuk perencanaan dan pengelolaan energi di Jakarta. Langkah strategis lainnya adalah mempersiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor energi yang kuat dan berfokus pada keberlanjutan dengan tujuan mendorong efisiensi dan penghematan energi, serta memberikan kontribusi ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Jakarta.

Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dan efisiensi energi menjadi bagian dari upaya penurunan GRK. Salah satu kontributor GRK adalah penggunaan energi fosil yang masih tinggi di Jakarta. Hal ini juga yang menjadi penghambat dalam penerapan ekonomi hijau, sehingga transisi energi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Strategi pengurangan emisi karbon di sektor energi dan ketenagalistrikan dijalankan melalui pemanfaatan EBT seperti PLTS, PLTSa, dan menggali potensi sumber EBT lainnya seperti air, surya, bayu, hidrogen, dan kinetik. Selain itu, dilakukan pula upaya efisiensi energi dan air, peralihan bahan bakar ramah lingkungan, konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, audit energi gedung pemerintah dan gedung swasta, serta penyediaan infrastruktur kendaraan listrik. Pada tahun 2024, bauran EBT Jakarta baru mencapai 0,66%, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga keuangan sangat diperlukan. Salah satunya untuk menjamin pemenuhan pasokan listrik di Kawasan Kepulauan Seribu melalui pembangunan PLTS, terutama untuk pulau-pulau yang belum terjangkau listrik.

B. Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Jakarta merupakan wilayah dataran rendah yang sebagian besar areanya berada di bawah permukaan laut, terletak di muara daerah aliran sungai, dan dilintasi oleh 13 sungai utama. Dengan kondisi geografis tersebut, ditambah dengan tingginya kepadatan penduduk serta pesatnya pembangunan, Jakarta menghadapi kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, penurunan muka tanah, gempa bumi, kebakaran, serta kerawanan konflik sosial lainnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027, terdapat 10 jenis ancaman bencana di Provinsi DKI Jakarta, antara lain: banjir, gempa bumi, likuefaksi, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran di wilayah perkotaan. Dari seluruh jenis ancaman tersebut, banjir, gempa bumi, dan kebakaran wilayah perkotaan ditetapkan sebagai ancaman bencana prioritas pertama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kota yang tangguh harus mampu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui pengelolaan risiko bencana secara komprehensif dan signifikan, termasuk menekan angka kematian, jumlah warga terdampak, serta kerugian ekonomi akibat bencana. Prinsip ini sejalan dengan kerangka kerja internasional, yakni *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015–2030.

Berdasarkan data BPBD Jakarta, Indeks Bahaya Banjir pada tahun 2024 tercatat pada angka 2,0041 dengan kategori tinggi dengan rata-rata jumlah warga terdampak bencana banjir pada periode 2020–2024 mencapai 36.047 jiwa per tahun, sedangkan total luas wilayah yang tergenang banjir sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 966,42 ha. Upaya peningkatan kapasitas ketahanan kota terhadap bencana banjir akibat perubahan iklim dapat dilakukan diantaranya dengan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul pantai, sistem polder, waduk, dan normalisasi kali/sungai yang telah menjadi komitmen dan prioritas penanganan Pemerintah Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2024 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), baik melalui skema pembangunan tahun tunggal atau tahun jamak.

Peningkatan ketahanan terhadap bencana banjir, diantaranya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk/situ/embung, polder/sistem pompa/kolam retensi, prasarana dan sarana kali/sungai, penataan sistem drainase, pengerukan sedimentasi, dengan pengadaan tanah termasuk untuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul

pantai, serta pendekatan *nature-based solution* (NBS) seperti optimalisasi RTH dan sumur resapan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Kajian *Roadmap* Pengembangan Infrastruktur Pengendalian Banjir 2024 yang memuat analisa, rencana optimalisasi, dan kebutuhan serta rencana pembangunan sistem polder di Jakarta. Pada tahun 2030, target polder yang telah terbangun sejumlah 14 polder dengan persentase luas kawasan/sistem polder yang memadai sebesar 38,846%, meningkat dari kondisi eksisting pada tahun 2024 sejumlah 5 polder dengan persentase luas kawasan/sistem polder yang memadai hanya sebesar 8,976%.



Gambar III.65 Pembersihan Badan Air dan Pengerukan Kali

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, 2025

Pembangunan waduk dan sarana/prasarana kali/sungai sebagai upaya penanggulangan banjir dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran di wilayah Jakarta. Penanggulangan banjir secara menyeluruh di wilayah DAS Ciliwung-Cisadane memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bodetabekpunjur. Dalam rangka percepatan penanganan banjir DAS Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat mendukung pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung. Selain itu, pendekatan *nature-based solution* (NBS) dan penerapan *water adaptive city* dilakukan dengan integrasi ruang terbuka hijau-biru di daerah cekungan, revitalisasi dan pembangunan sumur resapan, pengembangan sistem Panen Air Hujan (PAH), serta penataan kawasan sempadan berbasis pelestarian sumber daya air. Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi ditargetkan meningkat dari 1,53 km pada tahun 2024 menjadi sepanjang 37,5 km pada tahun 2030. Adapun, jumlah embung dan penampung air lainnya juga akan ditingkatkan, dari 7 unit pada tahun 2024 menjadi 24 unit pada tahun 2030.



Gambar III.66 Embung Pekayon

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, 2025

Dalam rangka perlindungan kawasan pesisir utara Jakarta terhadap kenaikan muka air laut akibat dari dampak perubahan iklim global, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan tanggul pantai pada area kritis sepanjang 33 km bersama pemerintah pusat. Pada beberapa segmen dilakukan strategi pembangunan tanggul mitigasi untuk meminimalisir dampak sosial, melakukan secara periodik pemantauan penurunan muka tanah akibat dari ekstraksi air tanah, mendorong percepatan akses air minum dan sanitasi aman, serta mendorong pembangunan/peningkatan sistem polder sampai dengan tahun 2030. Lebih lanjut, pemerintah pusat sedang menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di pesisir Jakarta melalui pembangunan tanggul laut terintegrasi (*giant sea wall*). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya pemerintah pusat tersebut sebagai solusi terintegrasi penataan kawasan pesisir yang berorientasi pada konsep kota tepi laut (*waterfront city*) dan memperkuat ketahanan kota di pesisir utara Jakarta.



Gambar III.67 Proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) Jakarta

Sumber : Galeri Dinas Sumber Daya Air

Terkait pengelolaan aspek kegeologian untuk mengendalikan penurunan muka tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen mengurangi ekstraksi air tanah melalui kebijakan penetapan dan perluasan Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT), pengendalian pemakaian air tanah dengan instrumen perpajakan, perizinan dan penegakan hukum, serta penetapan sistem *monitoring* penggunaan air tanah. Penerapan kebijakan dan perluasan ZOBAT ditargetkan agar area zona bebas air tanah meningkat dari 23 kelurahan pada tahun 2024 menjadi 261 kelurahan pada akhir tahun 2030. Pengadaan alat pengukur penurunan muka tanah juga dilakukan guna mempermudah evaluasi, disertai penerapan prinsip *zero run-off* pada setiap bangunan. Pemerintah menargetkan penurunan muka tanah dapat ditekan dari rata-rata 9,1 cm per tahun pada 2025 menjadi rata-rata 8,6 cm per tahun pada akhir 2030.

Optimalisasi infrastruktur pengendalian banjir, pemulihan daya dukung lingkungan, serta pengendalian penurunan muka tanah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim. Diharapkan pada tahun 2030, Indeks Bahaya Banjir dapat diturunkan ke angka 1,9534 (kategori sedang) dan luasan daerah tergenang dapat dikurangi hingga 460,10 ha, sehingga Jakarta dapat tumbuh sebagai kota yang tangguh dan berkelanjutan.

Kepadatan penduduk turut menjadi faktor utama yang memperbesar potensi bencana, terutama karena keterbatasan lahan di perkotaan yang mendorong konversi kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau menjadi area permukiman, termasuk di wilayah rawan bencana. Akibatnya, daerah resapan air menyempit, memperbesar aliran permukaan, dan meningkatkan potensi banjir. Permasalahan lain yang kerap terjadi akibat tingginya kepadatan penduduk adalah kebakaran dan kegagalan teknologi seperti runtuhnya bangunan. Kebakaran umumnya terjadi di permukiman padat dengan struktur bangunan yang tidak tertata dan tidak memperhatikan standar keamanan. Penyebab utamanya meliputi korsleting listrik, ledakan kompor, kelalaian dalam penggunaan alat penerangan, dan api rokok. Selain kebakaran, kepadatan penduduk juga memicu tingginya risiko epidemi penyakit serta konflik sosial akibat interaksi dan mobilitas yang tinggi antar individu, sehingga penyebaran penyakit dan informasi provokatif pun meningkat.



Gambar III.68 Apel Gabungan Siaga Bencana

Sumber: Berita Jakarta, 2025

Melihat beragam risiko bencana, stabilitas dan ketahanan kota menjadi hal yang sangat penting untuk dibangun. Ketahanan kota mencerminkan kesiapan individu, komunitas, sektor swasta, dan sistem kota dalam menghadapi, beradaptasi, serta bangkit dari berbagai tekanan dan guncangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan risiko bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, upaya pengurangan risiko bencana dilakukan melalui identifikasi dan pemantauan risiko, perencanaan partisipatif, pengembangan budaya sadar bencana, penguatan komitmen pemangku kepentingan, serta penerapan upaya fisik, non fisik, dan regulasi dalam manajemen penanggulangan bencana. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, pemerintah telah merancang sejumlah langkah konkret. Langkah-langkah tersebut mencakup pembangunan kesiapsiagaan melalui penyusunan kajian, penyusunan rencana kontingensi untuk setiap jenis bencana prioritas, pemanfaatan Pusat Literasi Bencana, pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana secara rutin, perhitungan kerugian ekonomi akibat bencana setiap tahun, penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana, serta pemenuhan fasilitas ramah disabilitas pada bangunan gedung. Hasil kajian risiko bencana juga akan diintegrasikan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta. Dalam Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta, telah disusun sejumlah rekomendasi dan kebijakan strategis guna meningkatkan ketahanan daerah. Rekomendasi tersebut mencakup tujuh fokus prioritas, yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, serta logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Upaya dalam pengelolaan data dan teknologi informasi kebencanaan juga menjadi prioritas, termasuk pengembangan sistem *e-bufferstock* dan sistem pemetaan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu, pengembangan budaya sadar bencana akan diperkuat melalui program kelurahan, keluarga, sekolah/madrasah tangguh bencana, dan peningkatan peran serta perlindungan perempuan dan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Di sisi kesiapsiagaan operasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan kapasitas respons cepat melalui pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas dalam fase tanggap darurat.



Gambar III.69 Jakarta Fire Fighter Challenge 2025

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

Khusus ancaman kebakaran wilayah perkotaan ditangani melalui pendekatan mitigasi secara sistematis dan terarah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini merupakan salah satu pilar utama dalam strategi kesiapsiagaan. Implementasi dari prinsip ini diwujudkan melalui pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023. Regulasi tersebut tidak hanya mendorong keterlibatan warga, tetapi juga mengamankan penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi Redkar sampai dengan tingkat RT. Sebagai bagian dari pemenuhan infrastruktur kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menginisiasi program pembangunan hidran mandiri serta pembangunan dan rehabilitasi sektor/pos pemadam. Pada upaya mitigasi struktural, pemerintah juga menyusun Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan teknis dan spasial yang berorientasi pada pengurangan risiko kebakaran secara komprehensif. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas petugas, pemetaan wilayah rawan kebakaran, sosialisasi pencegahan kepada masyarakat diantaranya melalui implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR), inspeksi gedung dan bangunan, serta dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang memenuhi standar keselamatan kebakaran. Seluruh langkah tersebut mendukung implementasi program Jakarta Siaga Api untuk memenuhi target *respond time* yang optimal sehingga meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalkan kerugian akibat kebakaran.

III.3.7. Terwujudnya Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perkotaan Berbasis Transit

Tabel III.27 Penentuan Program Prioritas Tujuan 5

Misi 5: Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
Tujuan 5: Terwujudnya Mobilitas dan Aktivitas Masyarakat Perkotaan Berbasis Transit		
SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
Optimalnya Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi	☐ Pengembangan cakupan layanan angkutan umum massal berbasis jalan (BRT), dan rel (MRT, LRT) ☐ Peningkatan mobilitas perkotaan melalui fasilitas integrasi moda yang representatif di simpul transportasi dan integrasi tarif ☐ Peningkatan konektivitas masyarakat pesisir dan Kepulauan Seribu melalui penyediaan transportasi perairan, serta pembangunan dan revitalisasi dermaga dan pelabuhan ☐ Pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan pribadi melalui penerapan kebijakan ganjil genap, <i>Electronic Road Pricing (ERP)</i> , dan pemutakhiran regulasi perparkiran ☐ Pengembangan fasilitas <i>park and ride</i> dan terminal yang terintegrasi ☐ Pengembangan lingkungan perkotaan untuk mendorong masyarakat bermobilitas aktif melalui penyediaan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan berkualitas ☐ Perwujudan visual kota yang rapi, estetik, dan modern melalui pengoperasian Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) ☐ Pengembangan sistem jaringan logistik yang efisien terintegrasi	☐ Program Penyelenggaraan Jalan ☐ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ☐ Program Pengelolaan Pelayaran ☐ Program Pengelolaan Perkeretaapian
Meningkatnya Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit	☐ Penetapan dan peninjauan kembali instrumen perencanaan dan perancangan perkotaan dan sinkronisasi Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan ☐ Penyelesaian infrastruktur prioritas sesuai dengan Panduan Rancang Kota oleh pengelola Kawasan TOD	☐ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

A. Optimalnya Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi

Transportasi memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jakarta sebagai salah satu kota metropolitan dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola mobilitas yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian dari Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) Fase 2 tahun 2019, tercatat bahwa total perjalanan harian di wilayah Jabodetabek mencapai 34,2 juta perjalanan per hari. Dari jumlah tersebut, 31 juta perjalanan per hari terjadi di dalam wilayah Jakarta, sementara 3,2 juta perjalanan per hari merupakan perjalanan dari kawasan Bodetabek menuju Jakarta. Guna menjawab tantangan tersebut, berbagai langkah telah diambil dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik, dimulai dengan pergeseran paradigma penataan ruang menjadi berbasis transit, pembangunan infrastruktur transportasi umum yang terintegrasi, penyediaan fasilitas yang aman, mudah diakses, terjangkau, dan berkelanjutan bagi semua serta pembangunan infrastruktur yang mendorong masyarakat untuk bermobilitas secara aktif (*active mobility*).

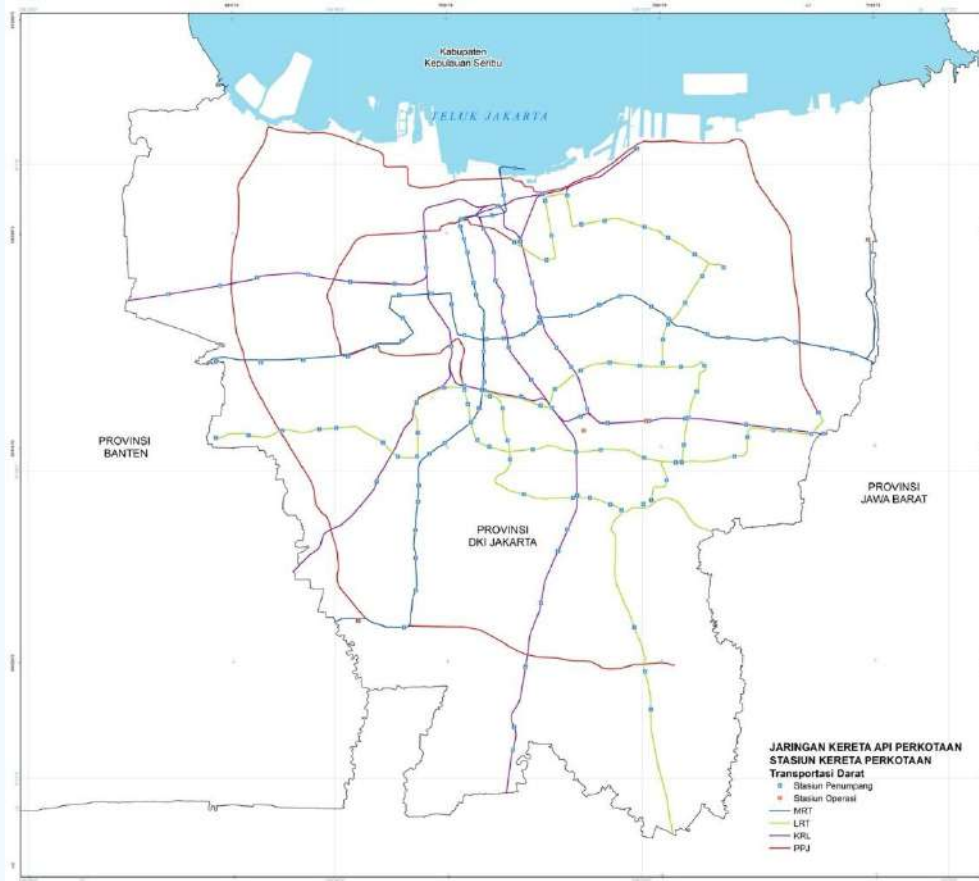
Populasi penduduk Jakarta saat ini telah mencapai 11 juta jiwa, sementara wilayah aglomerasi Jabodetabek secara keseluruhan mencapai angka yang jauh lebih besar, yaitu 32,24 juta jiwa. Fakta ini menggarisbawahi betapa pentingnya sistem transportasi umum massal yang efisien dan terintegrasi di wilayah metropolitan Jakarta. Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2024, tingkat penggunaan transportasi umum di Jakarta yang saat ini baru mencapai 22,19% masih tergolong rendah. Angka ini cukup tertinggal di bawah kota-kota besar lain di Asia seperti Singapura, Seoul, dan Tokyo dengan persentase tingkat penggunaan transportasi umum di atas 50%. Sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan tingkat pengguna transportasi umum meningkat menjadi 55% pada tahun 2044, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044. Untuk mencapai target tersebut, strategi Transportation Demand Management (TDM) diterapkan melalui pendekatan *push and pull strategy*. *Push strategy* berfokus pada pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi, sementara *pull strategy* bertujuan meningkatkan preferensi dalam penggunaan transportasi umum.

Salah satu kebijakan utama dalam *pull strategy* yaitu mengintegrasikan sistem transportasi baik secara fisik maupun non fisik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya mengoptimalkan layanan transportasi umum melalui kerja sama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Bodetabekjur, antara lain melalui pengembangan layanan angkutan berbasis jalan (BRT) yang saat ini sudah melayani jutaan penumpang setiap harinya. Pengembangan layanan BRT mencakup optimalisasi rute, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke wilayah sekitar, integrasi layanan berbagai jenis bus termasuk bus listrik, serta pembangunan fasilitas integrasi antar moda pada simpul transportasi, termasuk penataan kawasan integrasi. Selain itu untuk mengakomodir mobilitas pelajar, dilaksanakan peningkatan layanan bus sekolah.

Selanjutnya, *pull strategy* diperkuat secara signifikan oleh moda transportasi berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Tidak hanya simbol modernisasi, tetapi MRT dan LRT menjadi solusi nyata untuk mengurangi beban lalu lintas jalan raya. Melalui ekspansi jalur, pemerintah berharap mampu menjangkau lebih banyak wilayah strategis dan memberikan alternatif mobilitas yang andal dan nyaman. Dalam upaya peningkatan konektivitas wilayah Utara dan Selatan Jakarta sejak tahun 2019 telah dioperasikan MRT Jalur Utara-Selatan Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI). Saat ini, pembangunan MRT Jalur Utara-Selatan Fase 2A (Bundaran HI - Kota) masih berlangsung, dengan target operasional penuh pada 2029, yang akan dilanjutkan dengan Fase 2B (Kota - Ancol). Perluasan jalur MRT Utara-Selatan hingga Kota Tangerang Selatan juga masuk dalam perencanaan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas antara Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Untuk menghubungkan wilayah timur dan barat Jakarta, saat ini sedang dilakukan pembangunan MRT Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria) dan direncanakan Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang). Kedua fase ini merupakan bagian dari rencana pengembangan MRT Jalur Timur-Barat (Cikarang-Balaraja) yang melintasi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, yang memiliki tingkat permintaan tinggi dan memerlukan persiapan pembangunan yang matang, seperti pemenuhan pembiayaan, pengadaan lahan, dan aspek-aspek lainnya. Di masa depan, sistem MRT Jakarta akan semakin terintegrasi dan optimal dalam mendukung mobilitas perkotaan.

Di samping pengembangan moda MRT, pembangunan LRT juga terus diintensifkan. LRT Jakarta Fase 1 (Kelapa Gading - Velodrome) telah beroperasi sejak tahun 2019. Saat ini, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome - Manggarai) sedang berlangsung dengan target operasional pada tahun 2026. Perluasan jalur LRT (*looptline*) di wilayah Jakarta juga telah direncanakan, mencakup Fase 1C (Manggarai - Dukuh Atas), Fase 2A (Kelapa Gading - JIS), Fase 2B (Velodrome - Klender), Fase 3A (JIS - Rajawali), Fase 3B (Klender - Halim), serta rencana trase lainnya yang termuat dalam RTRW 2024-2044 dan rancangan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta.



Gambar III.70 Rencana Jaringan Kereta Api Perkotaan

Sumber: RTRW DKI Jakarta Tahun 2024-2044 (diolah)

Selain itu, pengembangan fasilitas *park and ride* yang terintegrasi dengan moda transportasi umum bertujuan untuk mengoptimalkan integrasi antar moda transportasi, mengurangi volume kendaraan pribadi yang masuk ke dalam kota, serta memberikan alternatif mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. Fasilitas ini ditempatkan di lokasi yang berdekatan dengan simpul transportasi umum, seperti stasiun MRT, LRT, KRL, halte BRT, serta terminal angkutan umum, sehingga memudahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum. Selain itu, pengembangan fasilitas *park and ride* ke depannya akan diperkuat melalui kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah wilayah aglomerasi Bodetabek, BUMN, maupun pihak swasta lainnya terutama dalam mengatasi permasalahan *first and last mile*.

Integrasi tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga non fisik melalui integrasi tarif dan sistem pembayaran. Integrasi tarif layanan BRT, MRT dan LRT telah diimplementasikan dengan mempertimbangkan evaluasi pengeluaran subsidi berbasis kinerja dan rute layanan transportasi umum di Jakarta secara menyeluruh. Pemerintah juga menerapkan subsidi transportasi umum yang tepat sasaran bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip inklusivitas. Inisiatif ini bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi. Pengkajian formulasi kebijakan subsidi transportasi yang tepat dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran subsidi, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatan program tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap kapasitas fiskal daerah.

Dalam mendukung operasional transportasi umum massal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkala mengalokasikan dukungan pendanaan melalui pemberian *Public Service Obligation* (PSO) kepada BUMD transportasi. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mendorong BUMD transportasi agar dapat meningkatkan pendapatan *non farebox* untuk mengurangi beban fiskal pemberian PSO. Pengkajian formulasi kebijakan PSO transportasi yang tepat dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran, sehingga dapat memastikan keberlanjutan operasional transportasi umum massal.

Cakupan layanan transportasi perkotaan di Jakarta saat ini telah mencapai 91% yang meliputi berbagai macam moda transportasi termasuk di dalamnya angkutan lingkungan/*feeder*, BRT, LRT dan MRT. Cakupan layanan ini terus dioptimalkan melalui penyediaan dan perbaikan akses *first and last mile* untuk memudahkan masyarakat mengakses dari dan menuju simpul moda transportasi umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen dalam mewujudkan transportasi umum yang inklusif dengan menyediakan layanan transportasi umum gratis (Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta) bagi 15 golongan masyarakat tertentu sesuai yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Selain itu dalam upaya mewujudkan mobilitas yang berkelanjutan dan berkeadilan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan konsep *complete street*. Konsep ini merupakan pendekatan perancangan dan pengelolaan jalan yang holistik, tidak hanya berfokus pada kendaraan bermotor, tetapi juga memperhatikan kebutuhan seluruh pengguna jalan. Melalui *complete street*, ruang jalan dibagi secara proporsional dan fungsional, mengakomodir pejalan kaki dengan trotoar yang lebar dan nyaman, jalur sepeda yang aman dan terintegrasi, serta prioritas bagi transportasi umum. Prioritas ini diberikan sebagai bentuk komitmen Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup warganya dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, serta mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, dengan target *mode share* transportasi umum sebesar 55% pada tahun 2044.



Gambar III.71 Penerapan Konsep Complete Street

Sumber: Dinas Bina Marga, 2025

Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sistem mobilitas terintegrasi, jalur sepeda memainkan peran dalam mendukung mobilitas aktif. Dengan panjang jalur yang telah mencapai 318,58 km pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menguatkan penyediaan infrastruktur yang aman, nyaman, dan terkoneksi dengan baik. Pengembangan jalur sepeda tidak hanya sejalan dengan prinsip transportasi berkelanjutan, tetapi turut menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan mendukung pola mobilitas aktif. Lebih jauh, integrasi jalur sepeda membuka peluang bagi masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih efisien dan rendah emisi.

Pada tahun 2024 penambahan luas jalur pejalan kaki mencapai 68.519,58 m², dan rasio jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung mencapai 6,64%. Peningkatan capaian tersebut terus dilakukan dalam rangka penguatan konektivitas antar moda di kawasan berorientasi transit serta meningkatkan mobilitas ramah lingkungan. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan dan revitalisasi trotoar sepanjang ±600 km, peningkatan persentase pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sebesar ±2,80%, penerangan jalan umum dengan lampu hemat energi berbasis teknologi *smart system* sebanyak ±200.000 unit, serta pembangunan halte dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Untuk mendukung keberlanjutan program ini, akan dikembangkan pula skema pembiayaan alternatif dan inovatif yang melibatkan kolaborasi dan teknologi. Hal ini sejalan dengan kebijakan penerapan *complete street* di beberapa kota global lainnya. Diharapkan pada tahun 2030, penambahan luas jalur pejalan kaki secara kumulatif dapat mencapai angka ±500.000 m², serta rasio jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung dapat mencapai angka ±9.84%.

Dalam upaya mengoptimalkan sistem mobilitas kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menerapkan berbagai *push strategy* yang bertujuan untuk mengendalikan volume kendaraan pribadi dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Salah satu kebijakan utama adalah pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi yang diantaranya dilaksanakan melalui sistem ganjil-genap, rencana operasional jalan berbayar elektronik (*Electronic Road Pricing/ERP*), serta pemutakhiran regulasi parkir.

Sejalan dengan transformasi sistem transportasi, digitalisasi layanan transportasi umum juga terus dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fitur layanan. Inovasi ini bertujuan mempermudah akses informasi terkait estimasi jadwal keberangkatan, sistem pembayaran dan pembelian tiket elektronik, dan fitur pendukung lainnya. Transformasi digital ini diterapkan dengan memperhatikan asas keterpaduan antar moda transportasi umum, sehingga masyarakat dapat beralih ke transportasi umum dengan lebih nyaman dan mudah.

Selain itu, upaya pengembangan sistem transportasi juga tidak terlepas dari upaya perbaikan kinerja jaringan jalan. Dengan fokus utama meningkatkan persentase jalan dengan kondisi mantap. Pada tahun 2024, persentase jalan dengan kondisi mantap di Jakarta mencapai 97,3%. Capaian ini menjadi *baseline* untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung layanan angkutan umum massal, khususnya BRT. Upaya peningkatan kualitas jaringan jalan dilaksanakan melalui pemeliharaan jalan rutin sepanjang 1.423,59 km, pemeliharaan jalan berkala sepanjang 2.321 km, penambahan jalan baru sepanjang 2.4 km, serta pembangunan perlintasan tidak sebidang berupa 3 unit *flyover*. Hal ini sejalan dengan Peta Jalan Jakarta Menuju Kota Global (Jakarta Rise #20) yang mengintegrasikan pembangunan BRT dengan peningkatan kualitas jalan. Dalam pelaksanaannya, upaya ini juga perlu didukung oleh pengadaan lahan, skema pelaksanaan proyek (tahun tunggal maupun jamak), serta pembiayaan alternatif dan inovatif guna mengoptimalkan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan. Diharapkan pada tahun 2030, persentase jalan dengan kondisi mantap di DKI Jakarta dapat mencapai angka 97,4%.

Selain aspek transportasi umum, peningkatan infrastruktur jalan yang mendukung pergerakan angkutan massal barang atau logistik juga menjadi perhatian utama dalam mewujudkan sistem mobilitas yang terintegrasi. Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelancaran distribusi barang di tengah kepadatan lalu lintas dan keterbatasan kapasitas jalan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung kelancaran distribusi logistik, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem distribusi yang diharapkan dapat menekan biaya ekonomi tinggi atas berbagai barang kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah optimalisasi sistem angkutan barang berbasis rel, yang berfungsi untuk mengurangi beban jalan serta mendukung pergeseran moda transportasi ke arah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dalam mendukung konektivitas antar wilayah, terutama ke kawasan Kepulauan Seribu, dilaksanakan modernisasi pelabuhan, infrastruktur pendukung, dan dermaga yang representatif, terutama di pulau-pulau besar untuk memudahkan mobilisasi penumpang dan logistik. Selain aspek infrastruktur, keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama dalam pengembangan transportasi di Kepulauan Seribu, sehingga penambahan dan optimalisasi armada kapal diarahkan untuk lebih efisien dan ramah lingkungan. Optimalisasi tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut serta menekan emisi karbon dari sektor transportasi laut. Diharapkan dengan konektivitas yang meningkat akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pesisir, serta memperkuat sektor pariwisata.



Gambar III.72 Dermaga Pelabuhan Muara Angke

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

B. Meningkatnya Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit

Mobilitas perkotaan yang terintegrasi dan efisien tidak hanya tentang menyediakan transportasi umum yang baik, tetapi juga mengelola ruang perkotaan secara strategis. Konsep ruang kota berbasis transit menjadi salah satu tujuan jangka panjang penataan ruang Jakarta, sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044 dan penjabarannya sebagaimana tertuang dalam RDTR Provinsi DKI Jakarta. Tujuan tersebut didukung oleh kebijakan dan strategi di berbagai sektor untuk mencapai 70% pemusatan kegiatan penduduk di sekitar titik transit, 55% perjalanan penduduk menggunakan transportasi umum (*public transport mode-share*), dan lebih dari 95% penduduk Jakarta terlayani rute angkutan umum (*coverage service*) yang terintegrasi pada tahun 2044.

Jakarta menghadapi tekanan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan ruang, mobilitas, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Di tengah dinamika ini, pengelolaan kawasan strategis dan penerapan konsep pembangunan berorientasi transit (*Transit-Oriented Development/TOD*) menjadi solusi relevan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menciptakan kota yang kompak, terpadu, dengan penggunaan lahan yang efisien. Konsep TOD menghadirkan pendekatan berbasis integrasi transportasi dengan kawasan yang dirancang agar warga bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan sehari-harinya tanpa harus bepergian jauh atau dalam radius berjalan kaki (400-800 meter). Titik-titik TOD ini akan menjadi kawasan strategis yang memiliki peran vital dalam merespons kebutuhan ruang masyarakat, baik dari hunian, pekerjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perdagangan, rekreasi, dan ruang terbuka. Ke depan, penguatan prinsip pengembangan kawasan berbasis *Transit-Oriented Development* (TOD) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021, akan menjadi prioritas utama dalam membangun sistem kota yang berkelanjutan.

Akselerasi perwujudan kota berorientasi transit juga dilaksanakan melalui penetapan sistem pusat-pusat pelayanan pada simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi titik-titik kawasan TOD; dengan karakteristik utama diantaranya kawasan *mixed-use* dengan densitas tinggi, terdapat *intermodal interchange facilities* yang terpadu dengan hunian, ruang hijau yang memadai, dan berbagai elemen pendukung lainnya, seperti contohnya di Kawasan Bundaran HI, Tanah Abang, dan Jakarta International Stadium. Secara lebih rinci kawasan-kawasan TOD tersebut akan dikembangkan dengan mengacu pada dokumen Panduan Rancang Kota (PRK) serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengelola Kawasan TOD sesuai penugasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan dokumen PRK untuk masing-masing Kawasan TOD bertujuan untuk memastikan keterwujudan prasarana minimum pendukung fungsi kawasan strategis antara lain jalur pejalan kaki, jalur sepeda, penyediaan RTH dan badan air, penyediaan ruang publik, penerapan *zero run-off*, dan pemanfaatan ruang campuran. Selain itu, perwujudan Kawasan TOD juga didorong melalui penerapan zona insentif/zona bonus, pengalihan hak membangun (*Transfer Development Rights*), konsolidasi tanah, atau perangkat penunjang lainnya.

Hingga saat ini, telah dikembangkan 6 lokasi kawasan TOD di berbagai titik strategis diantaranya Lebak Bulus, Dukuh Atas, Fatmawati, Blok M–Sisingamangaraja, dan Istora Senayan. Pengembangan kawasan strategis berbasis TOD ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas hunian dan efisiensi mobilitas, tetapi juga memperkuat daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi dan investasi.

Dukuh Atas merupakan kawasan *Transit-Oriented Development* (TOD) pertama di Jakarta yang menjadi pusat integrasi berbagai moda transportasi publik. Kawasan ini dirancang untuk menghubungkan lima jenis transportasi, yaitu MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL (*Commuter Line*), kereta bandara, dan BRT Transjakarta. Salah satu inovasi utama di Dukuh Atas adalah pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM), yang dikenal sebagai "Serambi Temu Dukuh Atas." Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar moda transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang inklusif. Fasilitas seperti akses sepeda, *lift*, eskalator, dan gerai komersial menjadikan JPM sebagai tempat transit sekaligus rekreasi. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan Transport Hub Simpang Temu Dukuh Atas, yang mengoptimalkan konektivitas antar moda transportasi. Transport Hub ini dirancang dengan konsep *smart building* dan *mixed-use property*, termasuk halte bus, area ojek daring, gerai retail, dan ruang perkantoran.



Gambar III.73 Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) "Serambi Temu" Dukuh Atas

Sumber: PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITI)

Sebagai salah satu kawasan strategis di Jakarta, Blok M—Sisingamangaraja merupakan fokus lainnya dari penerapan konsep TOD. Dengan mengintegrasikan transportasi publik, ruang publik yang fungsional, dan prinsip keberlanjutan, kawasan yang direncanakan menjadi sentra ASEAN ini diharapkan mampu meningkatkan performanya sekaligus menjadi model kawasan kompak mandiri berorientasi transit. Salah satu inovasi utama yang diterapkan adalah pengembangan konsep *Green Creative Hub*, yang menjadi landasan untuk mewujudkan kawasan yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan. *Green Creative Hub* dirancang sebagai ruang multifungsi yang memadukan ruang hijau, fasilitas kerja kreatif seperti *coworking space*, dan ruang kolaborasi sosial.

Dengan tantangan kompleksitas urbanisasi, kebutuhan ruang yang terus meningkat, penting bagi DKI Jakarta untuk menghadirkan strategi yang terarah dalam pengelolaan tata ruang. Penataan kawasan strategis dan kawasan berorientasi transit tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemacetan dan kepadatan penduduk, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan kota yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan inklusivitas, serta kohesi sosial.



Gambar III.74 Blok M—Sisingamangaraja: Green Creative Hub di Jakarta

Sumber : PT MRT Jakarta

Tabel III.28 Program Prioritas Daerah Disertai Pagu Indikatif

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1-1	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MEGAPOLITAN	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,62	0,66	21.963.702	0,67	23.091.893	0,68	24.212.310	0,69	25.313.427	0,7	26.349.206	0,7	120.930.539	
1-1-1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA	Indeks Dimensi Pendidikan	Indeks	0,670	0,704	8.691.390	0,712	9.393.158	0,720	10.092.735	0,728	10.788.448	0,739	11.419.427	0,739	50.385.160	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	79,95	81,23	8.691.390	81,87	9.393.158	82,51	10.092.735	83,16	10.788.448	83,8	11.419.427	83,8	50.385.160	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	47,84	51,03		52,63		54,22		55,82		57,42		57,42		
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	Persentase	79,62	85,24		88,16		90,95		93,35		95,53		95,53		
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,98	99,35		99,49		99,63		99,69		99,74		99,74		
		Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persentase	18,37	26,68		30,84		35,06		39,17		43,26		43,26		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	Persentase	41,99	42,5		42,7		42,9		43,1		43,3		43,3		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	89,98	91,68		92,53		93,38		94,22		95,07		95,07		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	85,88	85,9		86		86,3		86,5		86,7		86,7		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	78,19	78,5		78,7		78,9		79,1		79,3		79,3		
1-1-2	MEMBAIKNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT PERKOTAAN	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,99	76,31	12.862.730	76,54	13.255.843	76,82	13.647.141	77,14	14.036.426	77,51	14.422.513	77,51	68.224.653	
		Prevalensi Stunting	Persen	17,2	15		14,2		13,5		12,8		12,3		12,3		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	4	6.445.037	4	6.654.065	4	6.863.094	4	7.072.122	4	7.281.771	4	34.316.089	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	37,86	33	3.771.943	32	3.893.724	31	4.015.470	30	4.137.175	29	4.258.057	29	20.076.369	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
		Angka Kematian Balita	Rate	14,5	14		13		12		11		10		10		
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	%	8,5	8,1		7,9		7,6		7,3		7		7		
		Prevalensi Underweight pada Balita	%	15,9	15		14,5		14		13,5		13		13		
		Persentase Pemenuhan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	91	92		93		94		95		96		96		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	80	87		88		89		90		90		90		
		Persentase Orang dengan HIV Viral Load Tersupresi	%	71	72		73		74		75		76		76		
		Persentase Penyandang Hipertensi Terkendali Tekanan Darahnya	%	22,73	25		30		35		40		50		50		
		Persentase Penyandang Diabetes Melitus Terkendali Gula Darahnya	%	0	15		18		22		25		30		30		
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92,19	92		93		94		95		96		96		
		Persentase pelaksanaan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	0	70		75		80		85		90		90		
		Persentase Surveilans Kematian Sesuai Standar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta	%	0	80		82		85		87		90		90		
		Persentase kejadian Obesitas pada usia lebih dari sama dengan 18 tahun	%	33,41	33,41		33,41		33,41		33,41		33,41		33,41		
		Jumlah Kabupaten/kota Memenuhi Syarat Kualitas Lingkungan	Kabupaten/ Kota	6	6		6		6		6		6		6		
		Persentase Kasus Kematian Infeksi Dengue	%	0,31	0,3		0,25		0,2		0,15		0,1		0,1		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	0	80		85		90		95		100		100		
		Persentase Pelaksanaan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan Perseorangan Sesuai Standar	%	0	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,34	98,65		98,7		98,75		99		99,05		99,05		
		Persentase Rumah Sakit yang memenuhi layanan prioritas sesuai kompetensi layanan	%	0	20		40		60		80		100		100		
		Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	40		50		60		70		75		75		
		Prevalensi Depresi pada Usia lebih dari sama dengan 15 Tahun	%	1,5	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
		Persentase Penanggulangan Program Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar	%	0	100		100		100		100		100		100		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	Persen	75,8	78	1.617.014	80	1.669.457	82	1.721.901	84	1.774.345	85	1.826.947	85	8.609.664	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
		Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	per 1000 Penduduk	5	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5				
		Nilai indeks BerAKHLAK Dinas Kesehatan	%	61,1	61,5		62		62,5		64		65		65		

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cabang Distribusi Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	%	100	100	3.247	100	3.352	100	3.457	100	3.563	100	3.668	100	17.286	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100		100		100		100		100				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	0	85	3.596	87	3.956	90	4.352	93	4.787	95	5.266	95	21.957	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	61,6	65	3.932	66,7	4.336	68,4	4.782	70,1	5.273	70,2	5.816	70,2	24.139	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Lansia Berdaya	indeks	51,45	54,85		55,36		55,85		56,33		56,4				
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	indeks	90,53	91,48		91,92		92,34		92,74		92,76				
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persentase	97,75	97,75	1.017.962	97,75	1.026.953	97,75	1.034.086	97,75	1.039.161	97,75	1.040.988	97,75	5.159.149	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1-1-3	MENINGKATNYA KONTRIBUSI GENERASI MUDA DAN DISTRIBUSI MANFAAT PENGEMBUNGAN TANPA KESENJANGAN GENDER	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,147	0,140	96.621	0,137	106.720	0,134	118.136	0,132	130.642	0,129	144.768	0,129	596.887	
		Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	64,02	71,03		73,57		76,30		79,31		81,68				
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0	4,9	3.537	5,5	3.869	6,1	4.254	6,7	4.677	7,3	5.142	7,3	21.478	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	18.802	100	17.188	100	23.115	100	21.145	100	28.646	100	108.897	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	100	48	100	53	100	58	100	64	100	71	100	294	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dalam upaya pemenuhan hak dasar anak	%	0	16,67	2.788	16,67	3.098	33,33	3.443	33,33	3.826	50	4.253	50	17.408	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan perlindungan melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80	81	13.966	83	19.313	85	17.777	87	24.522	89	22.638	89	98.215	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang memberikan dampak positif setelah mengikuti pelatihan dan pembinaan	Persen	0	50	57.481	51	63.199	52	69.489	53	76.408	54	84.018	54	350.594	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1-1-4	MENGUATNYA NILAI BUDAYA, DEMOKRASI, DAN KEBHINEKAAN MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,96 (2023)	57,91	312.961	58,52	336.172	59,1	354.298	59,69	357.911	60,48	362.498	60,48	1.723.839	
		Indeks Demokrasi	Indeks	84,60 (2024)	85,78		86,85		87,93		89,00		89,13		89,13		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang ditetapkan	Persen	80	82	117.913	85	132.103	86	134.665	87	144.681	89	152.316	89	681.677	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	47	52		55		58		59		61		61		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	Persen	63	64	5.022	65	19.201	66	19.804	67	20.406	68	21.009	68	85.442	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
		Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik	Persen	70	71		72		73		74		75		75		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah pengunjung museum di Jakarta	Orang	1.300.000	1.310.000	105.192	1.320.000	96.005	1.330.000	106.940	1.340.000	95.910	1.350.000	88.238	1.350.000	492.284	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persentase	25,25	25,5	84.834	25,75	88.863	26	92.890	26,25	96.914	26,5	100.935	26,5	464.436	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0667	0,0714		0,0825		0,08845		0,09419		0,09988		0,09988		
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persentase	11,4	20		28,6		37,2		45,8		54,4		54,4		
2-1	TERBANGUNNYA PUSAT EKONOMI DAN BISNIS YANG INOVATIF DENGAN PRINSIP EKONOMI BERKELANJUTAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,90	5.10-6.00	398.566	5.20-6.50	454.156	5.30-7.00	479.305	5.40-7.40	503.047	5.50-7.70	526.055	5.50-7.70	2.361.128	
		Indeks Ekonomi Hijau	indeks	56,42 (2023)	45,37		46,5		48,15		48,88		49,45		49,45		
		Indeks Ekonomi Biru	Indeks	20,95 (2023)	24,69		26,54		28,48		30,65		32,55		32,55		
2-1-1	TUMBUHNYA SEKTOR USAHA PRODUKTIF, KOMPETITIF, DAN BERNILAI TAMBAH TINGGI	Total PDRB	Triliun Rupiah	3.679,36	4.106,64-4.153,64	148.572	4.320.19-4.423,63	154.949	4.549,16-4.733,28	167.029	4.806,19-5.083,55	177.932	5.084,94-5.474,98	188.072	5.084,94-5.474,98	836.554	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190.671	194.484	13.275	198.374	11.460	202.341	13.445	206.388	14.080	210.516	12.215	210.516	64.475	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.210.75	5.210,75	9.888	5.314,96	10.258	5.421,26	10.980	5.529,69	11.223	5.640,28	12.078	5.640,28	54.425	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahahan Hasil Perikanan	Ton	24.839	24.870	7.750	24.900	7.850	24.930	7.950	24.955	7.950	24.980	8.250	24.980	39.750	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	23,67	23,74		23,89		23,97		24,1		24,25		24,25		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	Persen	58	60	17.124	65	15.504	70	15.910	75	13.350	80	11.883	80	73.771	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Persen	0	10	7.879	20	8.716	30	8.289	40	10.717	50	11.927	50	47.529	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Nilai	14	14	35	14	35	14	35	14	35	14	35	14	175	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Provinsi DKI Jakarta	Juta USD	13.534,67	14.076,06	7.433	14.639,10	7.627	15.224,66	7.825	15.833,65	8.029	16.467,00	8.237	16.467,00	39.150	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai transaksi yang terjadi pada pemasaran produk dalam negeri oleh pelaku usaha binaan yang terfasilitasi	Rupiah	907.000.000	1.000.000.000	24.147	1.000.000.000	24.854	1.000.000.000	25.583	1.000.000.000	26.337	1.000.000.000	27.114	1.000.000.000	128.036	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	Persen	36,51	10	61.042	10	68.646	10	77.011	10	86.212	10	96.333	10	389.243	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
		Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan Industri yang Memiliki Sertifikat TKDN	Persen	76,46	50		50		50		50		50		50		PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2-1-2	MENGUATNYA INOVASI, KOLABORASI, DAN DAYA TARIK INVESTASI	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,09	4,11	105.910	4,12	145.162	4,13	151.715	4,14	158.237	4,15	165.510	4,15	726.535	
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	34,11	34,32 - 34,44		34,35 - 34,54		34,37 - 34,64		34,46 - 34,72		34,46 - 34,72		34,46 - 34,72		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kemudahan investasi	Nilai	75,3	78,5	8.587	79,5	9.263	80,5	10.372	81,5	11.208	82,5	12.530	82,5	51.960	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	%	100	100	14.241	100	15.665	100	17.231	100	18.955	100	20.850	100	86.942	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, BUMN dan Swasta	%	100	100		100		100		100		100		100		PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	0	20	6.494	22	7.143	24	7.857	27	8.643	30	9.507	30	39.645	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kerjasama yang Terimplementasi	Persentase	100	100	32.915	100	34.456	100	35.150	100	35.859	100	36.582	100	174.962	PD SEKRETARIAT DAERAH
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan	Persen	0	80	43.673	85	78.636	90	81.104	95	83.572	100	86.041	100	373.026	PD PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2-1-3	HADIRNYA KOTA DESTINASI DUNIA DENGAN RAGAM AMENITAS DAN AKTIVITAS YANG MENARIK	PDRB Ekraf	persen	10,63	10,87	144.083	11	154.044	11,12	160.561	11,25	166.879	11,36	172.473	11,36	798.040	
		Jumlah Tamu Mancanegara	orang	1.273.358	1.289.257		1.594.162		1.848.874		2.105.833		2.332.494		2.332.494		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Nilai	86,65	87	65.433	88	71.359	89	73.040	90	76.168	91	77.718	91	363.718	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Usaha Pariwisata	20.882	2.000		2.000		2.000		2.000		30.882				
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	0	1,25		23,65		15,98		13,9		10,76		10,76		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pengunjung E-Tourism	Pengunjung Website dan Medsos	33.876.617	40.990.707	35.727	45.089.778	37.615	49.598.755	39.448	54.558.631	40.573	60.014.494	42.204	284.128.982	195.568	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Jumlah Event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang Diadakan di Jakarta	Event	15	24		28		30		32		34		163		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.	Produk	300	300	30.379	300	31.898	300	33.893	300	35.187	300	36.703	1800	168.060	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Jumlah Event Kreatif	Event	31	75		80		82		84		86		438		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Orang	4.688	900	12.544	900	13.172	900	14.180	900	14.950	900	15.848	9.188	70.694	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2-2	TERCAPAINYA INKLUSIVITAS PEMBANGUNAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,30	3,80-3,90	2.874.129	3,37-3,695	3.108.876	2,94-3,49	3.170.599	2,08-3,08	3.257.046	1,82-2,91	3.321.034	1,82-2,91	15.731.685	
		Rasio Gini	koefisien	0,423	0,410-0,422		0,422-0,427		0,420-0,425		0,417-0,421		0,415-0,419		0,415-0,419		
2-2-1	MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA LAYAK DAN RESILIENSI TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,21	5,92-6,01	217.774	5,90-6,00	205.739	5,78-5,90	217.834	5,64-5,78	235.440	5,49-5,64	253.811	5,49-5,64	1.130.598	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Persen	90,92	91	122.627	91,5	121.385	92	126.517	92,5	134.176	93	141.613	92	646.319	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Tenaga Kerja	421.130.119	430.858.201		443.783.947		457.097.465		470.810.389		484.934.701		484.934.701		PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan	Persen	90	90	44.179	90,5	40.680	91	43.457	91,5	48.803	92	54.683	92	231.802	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri pada sektor formal	Orang	32.895	20.000		20.500		21.000		21.500		22.000		137.895		
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif yang SDMnya Mendapatkan Pendidikan dan Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	60	70	1.096	70	1.150	70	1.208	70	1.268	70	1.332	70	6.053	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mengalami Peningkatan Volume Usaha/Aset	Persen	1,7	1,8	875	1,9	921	2	968	2,1	1.019	2,2	1.073	2,2	4.856	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase Koperasi Konvensional yang Bertransformasi Digital	Persen	0,506	0,6		0,674		0,758		0,842		0,927		0,927		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Wirausaha Baru yang Tangguh dan Mandiri	Persen	3,27	3,34	48.601	3,4	41.168	3,47	45.205	3,54	49.646	3,61	54.530	3,61	239.149	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang Aktif Secara Keuangan Digital	Persen	28,49	29	396	29,5	436	30	479	30,5	527	31	580	31	2.418	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2-2-2	TERJAMINNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial	indeks	59,77	62,36	2.656.355	64,94	2.903.137	67,52	2.952.765	70,10	3.021.606	72,47	3.067.223	72,47	14.601.087	
		Indeks Ketahanan Pangan	persen	71,2***	72,84		74,86		77,52		80,30		83,20		83,20		
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	0,35	0-0,175		0-0,135		0-0,100		0		0		0		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	83,97	84	19.845	84,4	19.902	84,8	20.487	85,3	21.110	85,7	21.764	85,7	103.108	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	Indeks	99,61	100	370.469	100	460.744	100	433.351	100	450.408	100	430.241	100	2.145.214	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	Persen	100	100	862.642	100	861.104	100	864.000	100	864.000	100	867.040	100	4.318.785	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Pencapaian SPM Bencana	Indeks	99,83	100	45.397	100	45.058	100	55.496	100	61.949	100	67.113	100	275.013	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	852.291	100	994.229	100	1.040.943	100	1.069.263	100	1.109.799	100	5.066.526	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	93,68	94,14	505.712	94,34	522.100	94,55	538.488	94,75	554.877	94,95	571.265	94,95	2.692.442	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3-1	TERCAPAINYA REFORMASI MANAJEMEN DAN LAYANAN KOTA MODERN	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	93,72	95	2.087.033	96	2.028.756	98	2.014.425	99	1.996.791	101	2.014.364	101	10.141.370	
3-1-1	OPTIMALNYA MANAJEMEN, AKUNTABILITAS KEUANGAN, DAN PERFORMA KINERJA PEMERINTAH	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	A (81,66)	A (82,57)	1.217.736	A (83,22)	1.168.920	A (83,97)	1.180.773	A (84,62)	1.202.238	AA (90,10)	1.228.469	AA (90,10)	5.998.137	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	B	A		A		A		A		A				
		Indeks Integritas Daerah	Indeks	72,5	77,60		78,38		79,17		79,96		80,75		80,75		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang berada pada tingkat kematangan minimal Sedang	Persen	0	20	6.948	40	7.650	60	9.075	80	10.686	100	11.913	100	46.272	PD SEKRETARIAT DAERAH
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rata-rata nilai ROE	Persen	4	5	7.106	6	8.193	7	9.277	8	9.958	9	11.037	9	45.571	PD SEKRETARIAT DAERAH-

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pertumbuhan Laba Bersih	Persen	6	7		8		9		10		11		11		-BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
		Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Persen	5	6		7		8		9		10		11		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyelesaian dokumen APBD	%	0	100	905.141	100	865.238	100	880.538	100	895.750	100	910.901	100	4.457.569	PD KEUANGAN
		Persentase Pelaksanaan APBD	%	0	100		100		100		100		100				
		Persentase Penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	%	0	100		100		100		100		100				
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100				
		Indeks Kepuasan Layanan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	0	4		4		4		4		4				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks penyediaan referensi harga untuk penyusunan APBD/Perubahan APBD	Indeks	0	4	66.067	4	71.001	4	77.140	4	79.653	4	88.426	4	382.287	PD KEUANGAN- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase pemanfaatan BMD	%	29,84	31,33		32,9		34,54		36,27		38,08		38,08		PD KEUANGAN- BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset	Indeks	4	4		4		4		4		4				
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	%	100	100		100		100		100		100				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	%	98,69	100	232.473	100	216.838	100	204.743	100	206.192	100	206.192	100	1.066.437	PD KEUANGAN
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	%	106,19	100		100		100		100		100				
3-1-2	BERKEMBANGNYA KAPASITAS DAN PROFESIONALITAS KERJA APARATUR	Indeks Sistem Merit	Indeks	350,5	355,03	103.783	355,03	111.232	360,5	114.514	360,5	120.638	400	127.619	400	577.786	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan	Nilai	40	40	43.600	40	48.565	40	49.955	40	53.676	40	58.371	40	254.166	PD KEPEGAWAIAN
		Nilai Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada Aspek Pengadaan	Nilai	32	32		32		32		32		32				
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Sistem Informasi	Nilai	22	22		22		22		22		22				
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	16	16		16		16		16		16				
		Nilai Sub Aspek 1 s.d 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	37,5	37,5		37,5		37,5		37,5		40		40		
		Nilai Sub Aspek 1,2,3,4,5,6 dan 10 pada Aspek Pengembangan Karir	Nilai	59,53	64,03		64,03		69		69		95,43		95,43		
		Nilai Sub Aspek 1 s.d 5 pada Aspek Manajemen Kinerja	Nilai	75	75		75		75		75		77,5		77,5		
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	37,5	37,5		37,5		37,5		37,5		40		40		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	Persen	80,56	81	60.184	82	62.668	83	64.558	84	66.962	85	69.248	85	323.620	PD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3-1-3		Indeks SPBE/Pemerintahan Digital*	Indeks	4,46	1.7*	765.514	1.7*	748.604	2.0*	719.139	2.0*	673.915	2.2*	658.276	2.2*	3.565.447	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	TERAKSELERASINYA TRANSFORMASI DIGITAL DAN LAYANAN KOTA BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.53	4.55 (Prima)		4.56 (Prima)		4.57 (Prima)		4.58 (Prima)		4.8 (Prima)		4.8 (Prima)		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Persepsi	0	3	592.799	3	572.987	3	540.494	4	492.106	4	473.155	4	2.671.541	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin dan non izin yang Berkualitas	%	85	85	146.536	88	148.915	91	151.409	94	154.028	97	156.784	97	757.673	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	Indeks	93,5	93,5	26.178	93,65	26.702	93,8	27.236	94	27.781	94,2	28.336	94,2	136.233	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4-1	TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG LAYAK	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	77,66	78,47	3.149.004	78,88	3.249.839	79,30	3.457.915	79,71	3.510.657	80,13	3.602.192	80,13	16.969.607	
4-1-1	MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	Persen	96,99	97,38	1.869.869	97,58	1.919.674	97,70	2.064.298	97,75	2.071.854	97,84	2.118.364	97,84	10.044.060	
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	indeks	65,88	71,94		74,05		76,15		78,26		80,37		80,37		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	Liter/Detik	21.371	25.363	36.687	28.878	43.002	31.028	44.089	31.978	46.220	33.228	24.123	33.228	194.121	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Debit air limbah yang terolah	m³/hari	1.666	18.704	510.518	120.304	450.852	121.904	473.281	123.504	371.319	125.104	352.301	125.104	2.158.271	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang didaur ulang	%	0,33	0,34	1.322.664	0,35	1.425.820	0,36	1.546.929	0,37	1.654.315	0,37	1.741.940	0,37	7.691.668	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Peningkatan Kapasitas Sistem Pengolahan Persampahan	%	30	62		66		68		98		100		100		
4-1-2	TERSEDIAANYA HUNIAN TERJANGKAU DAN PERMUKIMAN LAYAK	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Persen	39	40,22	1.279.134	40,88	1.330.165	41,55	1.393.617	42,22	1.438.803	42,89	1.483.828	42,89	6.925.547	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	1,34	1,39	812.351	1,4	936.864	1,49	877.083	1,72	1.041.105	2	1.139.692	2	4.807.095	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Unit yang Terhuni	Unit	24.897	26.435		27.516		28.273		31.168		36.276		36.276		
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun	Indeks	86,32	86,5		87		87,5		88		88,5		88,5		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang Terselenggara	%	81,18	81,335	150.937	81,586	11.500	81,787	450.050	82,038	10.600	82,239	62.050	82,239	685.137	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luasan Kawasan Permukiman Kumulatif yang ditingkatkan	Ha	6.398,86	8.551,6	313.493	8.947,16	379.371	9.410,23	63.978	10.144,06	384.516	10.565,35	279.428	10.565,35	1.420.787	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Bidang Tanah Milik Masyarakat yang Terfasilitasi dalam rangka Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase	0	20	2.353	40	2.429	60	2.506	80	2.582	100	2.658	100	12.528	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
4-2	TERCAPAINYA EKOSISTEM KOTA YANG BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	Persen	25,9	27,12	4.665.262	28,34	4.792.021	29,56	4.855.075	30,78	5.196.555	32	5.207.478	32	24.716.392	
4-2-1	MENINGKATNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,6 (rumus baru)	53,87	1.469.384	54,05	1.531.084	54,32	1.559.735	54,63	1.571.684	55,01	1.632.813	55,01	7.764.700	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Kelaikan	Persentase	0	65	315.105	71	319.170	77	322.005	83	323.563	90	324.398	90	1.604.241	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas	Persentase	0	20		25		30		40		50		50		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase parameter lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu	%	76,69	77,3	92.966	77,6	117.188	77,9	125.441	78,2	114.046	78,5	152.089	78,5	601.731	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	979.685	100	1.004.202	100	1.020.537	100	1.037.148	100	1.054.040	100	5.095.612	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Terkelola	%	0,23	0,26	7.356	0,43	7.871	0,46	8.422	0,65	9.011	0,83	9.642	0,83	42.302	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	93	97	17.603	99	19.796	101	20.154	103	22.621	105	24.236	105	104.410	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Persen	18,52	18,6	6.453	18,7	8.600	18,8	6.970	18,9	7.640	19	9.310	19	38.973	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Persen	100	100	42.246	100	46.471	100	47.632	100	48.823	100	50.044	100	235.216	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan EBT	Ton CO ₂	1.400	932,88	7.970	1.405,2	7.786	1.877,52	8.574	2.349,84	8.831	2.822,16	9.053	2.822,16	42.215	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4-2-2	MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN KOTA TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	Indeks Risiko Bencana	Indeks	59,29	52,51	3.195.878	52,09	3.260.937	51,67	3.295.340	51,25	3.624.871	50,85	3.574.666	50,85	16.951.692	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Volume Kapasitas Tampung Air	m³	416.238	707.138	1.320.701	765.138	1.229.477	806.938	1.346.652	835.738	1.424.596	995.738	1.415.662	995.738	6.737.088	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang memadai	Persen	8,976	8,976		18,246		26,986		32,296		38,846		38,846		
		Persentase pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	Persen	66,87	70,08		71,31		72,55		73,78		75,02		75,02		
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	Persen	50	53		59		69		78		85		85		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Persen	85,77	87	1.368.210	88	1.561.317	89	1.566.827	90	1.655.830	91	1.752.789	91	7.904.973	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	1	1,08	40.605	2,06	41.754	2,12	43.033	3	42.962	3,08	42.701	3,08	211.055	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	Persen	39,91	52,51	454.844	57,11	414.389	61,73	324.828	66,53	486.483	71,13	348.513	71,13	2.029.058	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah	Persen	0	8	11.518	6	14.000	4	14.000	2	15.000	0	15.000	0	69.518	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5-1	TERWUJUDNYA MOBILITAS DAN AKTIVITAS MASYARAKAT PERKOTAAN BERBASIS TRANSIT	Public Transport Mode Share	Persen	22,19	23,4	7.202.510	24,38	7.526.270	25,34	7.774.809	26,12	8.039.793	27,06	8.311.618	27,06	38.855.001	
5-1-1	OPTIMALNYA LAYANAN TRANSPORTASI UMUM DAN SISTEM MOBILITAS TERINTEGRASI	Cakupan Layanan Angkutan Umum Massal	Persen	87,97	90,01	7.138.390	91,03	7.458.955	92,05	7.704.139	93,07	7.965.601	94,09	8.233.727	94,09	38.500.812	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kinerja pelayanan jalan dan kelengkapannya	Indeks	4	4	1.793.944	4	1.848.144	4	1.897.527	4	1.944.728	4	1.989.849	4	9.474.193	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan umum yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Indeks	0	0	5.054.049	0	5.372.944	0	5.580.799	0	5.899.062	0	6.181.183	0	28.088.037	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Kapasitas layanan/angkut angkutan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penumpang /jam/arah	8.126	8.245		8.388		8.457		8.518		8.742				
		Jumlah titik integrasi antar moda yang dikembangkan	Titik	24	4		7		3		2		7		47		
		Jumlah titik/segmen jalan penerapan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas atau pengelolaan permintaan perjalanan penumpang/barang	Titik/Segmen jalan	89	3		4		3		4		1		104		
		Kecepatan rata-rata ruas jalan yang dikenakan pengendalian lalu lintas di DKI Jakarta	km/jam	27,47	29,39		30,12		30,85		31,58		32,31		32,31		
		Jumlah trayek/lintasan angkutan umum pada wilayah yang belum terlayani (blankspot)	Trayek/ Lintasan	10	1		4		3		3		5		26		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	7	1	289.176	1	237.073	1	222.351	1	121.017	0	60.291	11	929.907	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Persen	45,92	70,47		81,9		93,33		100		100		100		
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Dokumen	4	2	1.221	2	794	2	3.463	2	794	2	2.404	14	8.675	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
5-1-2	MENINGKATNYA PERFORMA KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN KOMPAK MANDIRI BERORIENTASI TRANSIT	People Near Transit	persen	37,18	37,18	63.896	38,15	67.091	38,15	70.446	38,15	73.968	39,09	77.666	39,09	353.067	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	Persentase	80	80,2	63.896	80,3	67.091	80,4	70.446	80,5	73.968	80,6	77.666	80,6	353.067	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase	79,91	80,1		80,2		80,3		80,4		80,5		80,5		



BAB

4

**PROGRAM PERANGKAT
DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

IV.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Muatan program sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan bersifat indikatif.

Tabel Program Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2026 – 2030 selengkapnya tergambar sebagai berikut.

Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYAN DASAR																
1.1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks	4	4	8.757.518	4	8.621.206	4	8.487.084	4	8.356.826	4	8.291.303	4	42.513.937	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Outcome: Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	79,95	81,23	8.691.390	81,87	9.393.158	82,51	10.092.735	83,16	10.788.448	83,8	11.419.427	83,8	50.385.160	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	47,84	51,03		52,63		54,22		55,82		57,42		57,42		
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	Persentase	79,62	85,24		88,16		90,95		93,35		95,53		95,53		
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,98	99,35		99,49		99,63		99,69		99,74		99,74		
		Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persentase	18,37	26,68		30,84		35,06		39,17		43,26		43,26		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	Persentase	41,99	42,5		42,7		42,9		43,1		43,3		43,3		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	89,98	91,68		92,53		93,38		94,22		95,07		95,07		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	85,88	85,9		86		86,3		86,5		86,7		86,7		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	78,19	78,5		78,7		78,9		79,1		79,3		79,3		
1.1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terselenggaranya Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	4	6.445.037	4	6.654.065	4	6.863.094	4	7.072.122	4	7.281.771	4	34.316.089	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Outcome: Terselenggaranya Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	37,86	33	3.898.902	32	3.893.724	31	4.015.470	30	4.137.175	29	4.258.057	29	20.076.369	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
		Angka Kematian Balita	Rate	14,5	14		13		12		11		10		10		
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	%	8,5	8,1		7,9		7,6		7,3		7		7		
		Prevalensi Underweight pada Balita	%	15,9	15		14,5		14		13,5		13		13		
		Persentase Pemenuhan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	91	92		93		94		95		96		96		
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	80	87		88		89		90		90		90		
		Persentase Orang dengan HIV Viral Load Tersupresi	%	71	72		73		74		75		76		76		
		Persentase Penyandang Hipertensi Terkendali Tekanan Darahnya	%	22,73	25		30		35		40		50		50		
		Persentase Penyandang Diabetes Melitus Terkendali Gula Darahnya	%	0	15		18		22		25		30		30		
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92,19	92		93		94		95		96		96		
		Persentase pelaksanaan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	0	70		75		80		85		90		90		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Surveilans Kematian Sesuai Standar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta	%	0	80		82		85		87		90		90		
		Persentase kejadian Obesitas pada usia lebih dari sama dengan 18 tahun	%	33,41	33,41		33,41		33,41		33,41		33,41				
		Jumlah Kabupaten/kota Memenuhi Syarat Kualitas Lingkungan	Kabupaten/ Kota	6	6		6		6		6		6				
		Persentase Kasus Kematian Infeksi Dengue	%	0,31	0,3		0,25		0,2		0,15		0,1				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	0	80		85		90		95		100		100		
		Persentase Pelaksanaan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan Perseorangan Sesuai Standar	%	0	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,34	98,65		98,7		98,75		99		99,05		99,05		
		Persentase Rumah Sakit yang memenuhi layanan prioritas sesuai kompetensi layanan	%	0	20		40		60		80		100		100		
		Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	40		50		60		70		75		75		
		Prevalensi Depresi pada Usia lebih dari sama dengan 15 Tahun	%	1,5	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
		Persentase Penanggulangan Program Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar	%	0	100		100		100		100		100		100		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Outcome: Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	Persen	75,8	78	1.617.014	80	1.669.457	82	1.721.901	84	1.774.345	85	1.826.947	85	8.609.664	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
		Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	per 1000 Penduduk	5	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5				
		Nilai indeks BerAKHLAK Dinas Kesehatan	%	61,1	61,5		62		62,5		64		65				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Outcome: Terselenggaranya Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cabang Distribusi Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	%	100	100	3.247	100	3.352	100	3.457	100	3.563	100	3.668	100	17.286	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100		100		100		100		100				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Outcome: Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	0	85	3.596	87	3.956	90	4.352	93	4.787	95	5.266	95	21.957	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	748.261	4	760.241	4	777.039	4	796.018	4	817.077	4	3.898.636	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-DINAS BINA MARGA
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	887.219	4	951.828	4	930.444	4	976.162	4	1.053.563	4	4.799.216	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	4	307.949	4	323.346	4	339.514	4	356.489	4	374.314	4	1.701.612	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Outcome: Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Volume Kapasitas Tampungan Air	m³	416.238	707.138	1.320.701	765.138	1.229.477	806.938	1.346.652	835.738	1.424.596	995.738	1.415.662	995.738	6.737.088	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang memadai	Persen	8,976	8,976		18,246		26,986		32,296		38,846				
		Persentase pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	Persen	66,87	70,08		71,31		72,55		73,78		75,02				
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	Persen	50	53		59		69		78		85				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	Liter/Detik	21.371	25.363	36.687	28.878	43.002	31.028	44.089	31.978	46.220	33.228	24.123	33.228	194.121	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Debit air limbah yang terolah	m³/hari	1.666	18.704	510.518	12.0304	450.852	121.904	473.281	123.504	371.319	125.104	352.301	125.104	2.158.271	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Outcome: Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Persen	85,77	87	1.368.210	88	1.561.317	89	1.566.827	90	1.655.830	91	1.752.789	91	7.904.973	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Outcome: Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Kelaikan	Persentase	0	65	315.105	71	319.170	77	322.005	83	323.563	90	324.398	90	1.604.241	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas	Persentase	0	20		25		30		40		50		50		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Outcome: Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat kinerja pelayanan jalan dan kelengkapannya	Indeks	4	4	1.793.944	4	1.848.144	4	1.897.527	4	1.944.728	4	1.989.849	4	9.474.193	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Outcome: Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Lulus Pembinaan	Orang	0	5.000	2.957	5.000	2.658	5.000	2.658	5.000	2.959	5.000	2.959	25.000	14.191	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	Persentase	80	80,2	63.896	80,3	67.091	80,4	70.446	80,5	73.968	80,6	77.666	80,6	353.067	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase	79,91	80,1		80,2		80,3		80,4		80,5		80,5		
1.1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	247.019	4	258.408	4	257.375	4	274.609	4	292.004	4	1.329.415	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Outcome: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	1,34	1,39	812.351	1,4	936.864	1,49	877.083	1,72	1.041.105	2	1.139.692	2	4.807.095	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Unit yang Terhuni	Unit	24.897	26.435		27.516		28.273		31.168		36.276		36.276		
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun	Indeks	86,32	86,5		87		87,5		88		88,5		88,5		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Outcome: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang Terselenggara	%	81,18	81,335	150.937	81,586	11.500	81,787	450.050	82,038	10.600	82,239	62.050	82,239	685.137	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Luasan Kawasan Permukiman Kumulatif yang ditingkatkan	Ha	6.398,86	8.551,6	313.493	8.947,16	379.371	9.410,23	63.978	10.144,1	384.516	10.565,4	279.428	10.565,4	1.420.787	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya kepuasan terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD/UKPD Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	977.088	4	1.008.205	4	1.040.170	4	1.071.860	4	1.103.267	4	5.200.590	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	793.937	4	875.671	4	1.005.731	4	884.565	4	1.063.033	4	4.622.937	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT-DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya kepuasan terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD/UKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Persepsi	4	4	38.594	4	39.165	4	40.342	4	41.184	4	41.184	4	200.468	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	95,5	96	286.052	96,5	295.869	97	304.837	97,5	314.081	98	323.607	98	1.524.445	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penanganan tanggap darurat bencana, serta layanan penanganan pascabencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	1	1,08	40.605	2,06	41.754	2,12	43.033	3	42.962	3,08	42.701	3,08	211.055	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100		100		100		100		100				
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100		100		100		100		100				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Outcome: Meningkatnya Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	Persen	39,91	52,51	454.844	57,11	414.389	61,73	324.828	66,53	486.483	71,13	348.513	71,13	2.029.058	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	444.276	4	441.178	4	471.613	4	486.791	4	528.079	4	2.371.937	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	4	4		4		4		4		4				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Outcome: Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	83,97	84	19.845	84,4	19.902	84,8	20.487	85,3	21.110	85,7	21.764	85,7	103.108	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Outcome: Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Difasilitasi	Persen	0	0	0	100	29	100	29	100	29	100	29	100	115	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Outcome: Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	Indeks	99,61	100	370.469	100	460.744	100	433.351	100	450.408	100	430.241	100	2.145.214	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Outcome: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	Persen	100	100	862.642	100	861.104	100	864.000	100	864.000	100	867.040	100	4.318.785	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Outcome: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Indeks Pencapaian SPM Bencana	Indeks	99,83	100	45.397	100	45.058	100	55.496	100	61.949	100	67.113	100	275.013	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Outcome: Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMPN dan MPN yang dikelola sesuai standar yang ditetapkan	Persen	0	0	0	0	0	100	1.218	100	1.295	100	1.359	100	3.872	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	240.891	4	259.841	4	264.971	4	265.105	4	264.613	4	1.295.421	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Outcome: Terkelolanya Pembangunan Tenaga Kerja yang Terpadu dan Komperhensif	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	99,46	90	1.327	90	1.327	90	1.327	90	1.327	90	1.327	90	6.637	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Outcome: Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Persen	90,92	91	122.627	91,5	121.385	92	126.517	92,5	134.176	93	141.613	92	646.319	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/ Tenaga Kerja	421.130.119	430.858.201		443.783.947		457.097.465		470.810.389		484.934.701		484.934.701		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Outcome: Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.	Persen	90	90	44.179	90,5	40.680	91	43.527	91,5	48.803	92	54.683	92	231.802	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri pada sektor formal	Orang	32.895	20.000		20.500		21.000		21.500		22.000		13.7895		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Outcome: Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	Persen	72,5	72,5	2.481	73	2.729	73,5	3.002	74	3.302	74,5	3.632	74,5	15.145	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Outcome: Meningkatnya Keterlindungan Hak-Hak Pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen	80	80	4.934	80,5	3.942	81	4.090	81,5	4.106	82	4.400	82	21.471	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Outcome: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0	4,9	3.537	5,5	3.869	6,1	4.254	6,7	4.677	7,3	5.142	7,3	21.478	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Outcome: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	18.802	100	17.188	100	23.115	100	21.145	100	28.646	100	108.897	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Outcome: Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang terlayani secara komprehensif sesuai kebutuhannya pada layanan digital konseling keluarga	%	0	80	1.508	82	1.663	84	1.829	85	2.012	87	2.213	87	9.226	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Outcome: Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	100	48	100	53	100	58	100	64	100	71	100	294	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Outcome: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Kota/Kabupaten yang memperoleh peringkat utama dalam upaya pemenuhan hak dasar anak	%	0	16,67	2.788	16,67	3.098	33,33	3.443	33,33	3.826	50	4.253	50	17.408	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Outcome: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan perlindungan melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80	81	13.966	83	19.313	85	17.777	87	24.522	89	22.638	89	98.215	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	225.476	4	221.496	4	212.772	4	222.417	4	219.817	4	1.101.978	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Outcome: Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	852.291	100	994.229	100	1.040.943	100	1.069.263	100	1.109.799	100	5.066.526	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Outcome: Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	Persen	100	95,45	80	95,45	84	95,45	88	95,45	92	95,45	97	95,45	441	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Outcome: Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	Persen	99,8	98	2.439	98,25	2.673	98,5	2.926	98,75	3.205	99	3.511	98,5	14.753	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Outcome: Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Persentase Bidang Tanah Milik Masyarakat yang Terfasilitasi dalam rangka Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase	0	20	2.353	40	2.429	60	2.506	80	2.582	100	2.658	100	12.528	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	1.276.521	4	1.304.245	4	1.261.751	4	1.250.445	4	1.210.237	4	6.303.200	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu	%	76,69	77,3	92.966	77,6	117.188	77,9	125.441	78,2	114.046	78,5	152.089	78,5	601.731	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	979.685	100	1.004.202	100	1.020.537	100	1.037.148	100	1.054.040	100	5.095.612	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Outcome: Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Terkelola	%	0,23	0,26	7.356	0,43	7.871	0,46	8.422	0,65	9.011	0,83	9.642	0,83	42.302	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Outcome: Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	15,78	16	5.899	16,3	6.312	16,75	6.753	17,2	7.226	17,8	7.732	17,8	33.921	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	93	97	17.603	99	19.796	101	20.154	103	22.621	105	24.236	105	104.410	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	100	100	575	100	615	100	658	100	704	100	754	100	3.307	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase sampah yang didaur ulang	%	0,33	0,34	1.322.664	0,35	1.425.820	0,36	1.546.929	0,37	1.654.315	0,37	1.741.940	0,37	7.691.668	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Peningkatan Kapasitas Sistem Pengolahan Persampahan	%	30	62		66		68		98		100		100		
2.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	258.978	4	269.024	4	276.377	4	286.068	4	293.197	4	1.383.644	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99,94	99,94	68.180	99,94	68.768	99,94	72.037	99,95	72.956	99,95	76.424	99,95	358.366	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	99,98	99,98	6.503	99,98	6.699	99,98	6.900	99,98	7.107	99,98	7.320	99,98	34.528	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai Kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai Persepsi	0	4	6.561	4	6.758	4	6.961	4	7.170	4	7.385	4	34.835	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Akses Data Profil Kependudukan	Nilai Kepuasan Layanan Akses Data Profil Kependudukan	Nilai Persepsi	0	4	344	4	354	4	365	4	376	4	387	4	1.826	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	93,68	94,14	505.712	94,34	522.100	94,55	538.488	94,75	554.877	94,95	571.265	94,95	2.692.442	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Tereleaksainkannya penunjang urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	202.382	4	175.530	4	154.921	4	145.442	4	141.967	4	820.241	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Outcome: Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	indeks	66,2	67,2	11.219	67,7	8.828	68,2	9.720	68,6	10.699	68,7	11.775	68,7	52.242	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	97,72	98		98		98		98		98				
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan	%	19,06	18,35	14.462	18,02	15.859	17,7	17.472	17,39	19.251	17,35	21.210	17,35	88.254	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>proportion of demand satisfied by modern methods</i>)	%	71,33	73,33		74,3		75,29		76,3		76,4		76,4		
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	7,8	6,59		6,59		6,59		6,59		6,59				
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	61,6	65	3.932	66,7	4.336	68,4	4.782	70,1	5.273	70,2	5.816	70,2	24.139	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Lansia Berdaya	indeks	51,45	54,85		55,36		55,85		56,33		56,4		56,4		
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	indeks	90,53	91,48		91,92		92,34		92,74		92,76		92,76		
2.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	958.465	4	912.571	4	937.238	4	943.445	4	940.896	4	4.692.615	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan umum yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Indeks	0	0	5.054.049	0	5.372.944	0	5.580.799	0	5.899.062	0	6.181.183	0	28.088.037	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Kapasitas layanan/angkut angkutan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penumpang/ jam/arah	8.126	8.245		8.388		8.457		8.518		8.742		8.742		
		Jumlah titik integrasi antar moda yang dikembangkan	Titik	24	4		7		3		2		7		47		
		Jumlah titik/segmen jalan penerapan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas atau pengelolaan permintaan perjalanan penumpang/barang	Titik/Segmen jalan	89	3		4		3		4		1		104		
		Kecepatan rata-rata ruas jalan yang dikenakan pengendalian lalu lintas di DKI Jakarta	km/jam	27,47	29,39		30,12		30,85		31,58		32,31		32,31		
		Jumlah trayek/lintasan angkutan umum pada wilayah yang belum terlayani (<i>blank spot</i>)	Trayek/ Lintasan	10	1		4		3		3		5		26		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	7	1	289.176	1	237.073	1	222.351	1	121.017	0	60.291	11	929.907	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Persentase badan usaha jasa terkait angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Persen	45,92	70,47		81,9		93,33		100		100		100		
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Dokumen	4	2	1.221	2	794	2	3.463	2	794	2	2.404	14	8.675	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	132.795	4	170.677	4	220.086	4	284.271	4	317.738	4	1.125.567	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Kepuasan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Persepsi	0	3	69.475	3	77.171	3	86.019	3	95.987	3	107.236	3	435.889	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Persepsi	0	3	592.799	3	572.987	3	540.494	4	492.106	4	473.155	4	2.671.541	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi- fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	180.459	4	192.154	4	191.602	4	189.792	4	186.599	4	940.607	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI Outcome: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	57	30	8	32	8	35	8	37	8	40	8	40	38	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Outcome: Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif yang SDM-nya Mendapatkan Pendidikan dan Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	60	70	1.096	70	1.150	70	1.208	70	1.268	70	1.332	70	6.053	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Outcome: Meningkatkan produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Mengalami Peningkatan Volume Usaha/Aset	Persen	1,7	1,8	875	1,9	921	2	968	2,1	1.019	2,2	1.073	2,2	4.856	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase Koperasi Konvensional yang Bertransformasi Digital	Persen	0,506	0,6		0,674		0,758		0,842		0,927		0,927		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Tangguh dan Mandiri	Persen	3,27	3,34	48.601	3,4	41.168	3,47	45.205	3,54	49.646	3,61	54.530	3,61	239.149	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Outcome: Meningkatkan daya saing UMKM	Persentase UMKM yang Aktif Secara Keuangan Digital	Persen	28,49	29	396	29,5	436	30	479	30,5	527	31	580	31	2.418	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi- fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	578.629	4	598.276	4	617.157	4	635.947	4	653.851	4	3.083.860	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai kemudahan investasi	Nilai	75,3	78,5	8.587	79,5	9.263	80,5	10.372	81,5	11.208	82,5	12.530	82,5	51.960	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Outcome: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	%	100	100	14.241	100	15.665	100	17.231	100	18.955	100	20.850	100	86.942	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, BUMN dan Swasta	%	100	100		100		100		100		100				
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Outcome: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penerbitan Izin dan non izin yang Berkualitas	%	85	85	146.536	88	148.915	91	151.409	94	154.028	97	156.784	97	757.673	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	0	20	6.494	22	7.143	24	7.857	27	8.643	30	9.507	30	39.645	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	Indeks	93,5	93,5	26.178	93,65	26.702	93,8	27.236	94	27.781	94,2	28.336	94,2	136.233	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan bidang urusan pemuda dan olahraga	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	293.840	4	307.127	4	321.667	4	337.600	4	356.050	4	1.616.285	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	0	4		4		4		4		4				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Outcome: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang memberikan dampak positif setelah mengikuti pelatihan dan pembinaan	Persen	0	50	57.481	51	63.199	52	69.489	53	76.408	54	84.018	54	350.594	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Outcome: Meningkatnya daya saing dan pembudayaan keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persentase	97,75	97,75	1.017.962	97,75	1.026.953	97,75	1.034.086	97,75	1.039.161	97,75	1.040.988	97,75	5.159.149	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Outcome: Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persentase	2,24	2,49	6.285	2,52	6.663	2,55	7.074	2,58	7.521	2,6	8.007	2,6	35.550	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Kepuasan Layanan Statistik Sektoral	Nilai Persepsi	0	3	6.842	3	7.063	3	7.285	4	7.507	4	7.729	4	36.426	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
		Nilai Kepuasan Layanan Portal Satu Data Jakarta	Nilai Persepsi	0	3		3		3		4		4		4		
2.2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Nilai Kepuasan Layanan Siber dan Sandi	Nilai Persepsi	3	3	14.720	3	15.197	3	15.674	4	16.151	4	16.628	4	78.372	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Peningkatan Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	134.912	4	132.487	4	129.912	4	140.804	4	151.265	4	689.380	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang ditetapkan	Persen	80	82	117.913	85	132.103	86	134.665	87	144.681	89	152.316	89	681.677	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	47	52		55		58		59		61		61		
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	Persen	0	0	6.695	45,92	3.072	51,02	3.961	56,12	4.898	61,22	5.883	61,22	24.508	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase narasi sejarah kawasan yang dipublikasikan pada lokasi yang telah ditetapkan	Persen	0	0	2.232	36	1.152	63	792	81	1.428	100	1.471	100	7.075	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Outcome: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	Persen	63	64	5.022	65	19.201	66	19.804	67	20.406	68	21.009	68	85.442	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
		Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik	Persen	70	71		72		73		74		75		75		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Outcome: Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah pengunjung museum di Jakarta	Orang	1.300.000	1.310.000	105.192	1.320.000	96.005	1.330.000	106.940	1.340.000	95.910	1.350.000	88.238	1.350.000	492.284	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Outcome: Penguatan Literasi budaya dan kewargaan dalam mendukung demokrasi dan pemajuan kebudayaan di Jakarta	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persentase	25,25	25,5	84.834	25,75	88.863	26	92.890	26,25	96.914	26,5	100.935	26,5	464.436	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0667	0,0714		0,0825		0,08845		0,09419		0,09988				
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persentase	11,4	20		28,6		37,2		45,8		54,4				
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Outcome: Penguatan Literasi budaya dan kewargaan dalam mendukung demokrasi dan pemajuan kebudayaan di Jakarta	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persentase	30	32,5	1.527	35	1.593	37,5	1.661	40	1.732	42,5	1.806	42,5	8.319	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
		Persentase Capaian naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persentase	0	20		40		60		80		100				
2.2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Peningkatan Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	108.850	4	114.141	4	113.318	4	120.891	4	117.986	4	575.186	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Outcome: Perbaikan akses, literasi, dan partisipasi digital masyarakat	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	43,21	70,74	11.457	70,8	11.371	70,86	12.194	70,92	12.428	70,98	12.730	70,98	60.179	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Outcome: Perbaikan akses, literasi, dan partisipasi digital masyarakat	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase	0	100	1.223	100	1.263	100	1.302	100	1.342	100	1.382	100	6.512	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3.3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Outcome: Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Persen	18,52	18,6	6.453	18,7	8.600	18,8	6.970	18,9	7.640	19	9.310	19	38.973	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190.671	194.484	13.275	198.374	11.460	202.341	13.445	206.388	14.080	210.516	12.215	210.516	64.475	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.210,75	5.210,75	9.888	5.314,96	10.258	5.421,26	10.980	5.529,69	11.223	5.640,28	12.078	5.640,28	54.425	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Outcome: Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	0	72	1.324	73	1.775	74	1.385	75	1.566	76	1.415	76	7.465	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Outcome: Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	24.839	24.870	7.750	24.900	7.850	24.930	7.950	24.955	7.950	24.980	8.250	24.980	39.750	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	23,67	23,74		23,89		23,97		24,1		24,25				
3.3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	208.982	4	210.463	4	215.388	4	220.512	4	226.359	4	1.081.704	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Outcome: Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Nilai	86,65	87	65.433	88	71.359	89	73.040	90	76.168	91	77.718	91	363.718	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Usaha Pariwisata	20.882	2.000		2.000		2.000		30.882						
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	0	1,25		23,65		15,98		13,9		10,76		10,76		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Outcome: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Pengunjung E-Tourism	Pengunjung Website dan Medsos	33.876.617	40.990. 707	35.727	45.089. 778	37.615	49.598. 755	39.448	54.558. 631	40.573	60.014. 494	42.204	284.128. 982	195.568	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Jumlah Event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang Diadakan di Jakarta	Event	15	24		28		30		32		34		163		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.	Produk	300	300	30.379	300	31.898	300	33.893	300	35.187	300	36.703	1.800	168.060	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Jumlah Event Kreatif	Event	31	75		80		82		84		86		438		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Orang	4.688	900	12.544	900	13.172	900	14.180	900	14.950	900	15.848	9188	70.694	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen	76	76	9.435	77	11.340	78	12.472	79	13.704	80	15.048	80	61.999	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	Persen	58	60	17.124	65	15.504	70	15.910	75	13.350	80	11.883	80	73.771	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	100	100		100		100		100		100				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Outcome: Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)	Persen	100	100	2.350	100	2.350	100	2.350	100	2.350	100	2.350	100	11.750	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	82,43	89		89,5		89,8		90		90,5		90,5		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	12,5	13		14		15		16		17		17		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Outcome: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Area Lahan yang Terkendali	Persen	87	88	1.040	89	1.144	90	1.259	91	1.385	92	1.523	90	6.351	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Persen	0	10	7.879	20	8.716	30	8.289	40	10.717	50	11.927	50	47.529	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	490.731	4	539.804	4	553.299	4	567.132	4	581.310	4	2.732.276	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Outcome: Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	Persen	100	100	42.246	100	46.471	100	47.632	100	48.823	100	50.044	100	235.216	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Outcome: Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Tumbuhan/Satwa liar yang diselamatkan/dilepasliarkan	Persen	0	100	193	100	202	100	213	100	223	100	234	100	1.065	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Outcome: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Persen	86,49	86	777	86	816	86	857	86	900	86	945	86	4.295	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) Outcome: Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	2	4	400	5	420	6	441	6	463	6	486	6	2.210	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3.3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Outcome: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah	Persen	0	8	11.518	6	14.000	4	14.000	2	15.000	0	15.000	0	69.518	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN Outcome: Peningkatan penggunaan daya yang bersumber dari energi baru terbarukan	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan EBT	Ton CO ₂	1.400	932,88	7.970	1.405,2	7.786	1.877,52	8.574	2.349,84	8.831	2.822,16	9.053	2.822,16	42.215	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Outcome: Terpenuhinya kebutuhan daya listrik masyarakat	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	Persen	100	100	10.558	100	11.342	100	11.155	100	11.499	100	11.877	100	56.431	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Persentase jumlah badan usaha yang memiliki instalansi Tegangan Menengah dan/ atau Tegangan Rendah yang tersosialisasikan	Persen	0	20		20		20		20		100				
		Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	Persen	63	63		63,5		64		64,5		65		65		
3.3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Outcome: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Rekomendasi Teknis dan Non-perizinan di sektor Perdagangan yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	84	75	160	76	160	77	160	78	160	79	160	79	800	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		Persentase Pemanfaatan SKA	Persen	70	65		65		70		70		70		70		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Nilai	14	14	35	14	35	14	35	14	35	14	35	14	175	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Provinsi DKI Jakarta	Juta USD	13.534,67	14.076,06	7.433	14.639,10	7.627	15.224,66	7.825	15.833,65	8.029	16.467	8.237	16.467	39.150	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Outcome: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Nilai Dimensi Perilaku Komplain pada Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	55,75	55,76	17.171	55,77	17.520	55,78	17.842	55,79	18.136	55,8	18.401	55,8	89.071	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		Nilai Dimensi Perilaku Pembelian pada Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	65,43	65,43		65,45		65,46		65,47		65,48		65,48		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Outcome: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai transaksi yang terjadi pada pemasaran produk dalam negeri oleh pelaku usaha binaan yang terfasilitasi	Rupiah	907.000.000	1.000.000.000	24.147	1.000.000.000	24.854	1.000.000.000	25.583	1.000.000.000	26.337	1.000.000.000	27.114	1.000.000.000	128.036	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Outcome: Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	Persen	36,51	10	61.042	10	68.646	10	77.011	10	86.212	10	96.333	10	389.243	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
		Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan Industri yang Memiliki Sertifikat TKDN	Persen	76,46	50		50	50	50		50	50					
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Outcome: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Industri Tertib Perizinan	Persen	60	65	40	70	44	75	48	80	52	85	57	85	242	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Outcome: Peningkatan Kesejahteraan Transmigran untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Persentase transmigran yang menetap minimal 1 tahun	Persen	0	70	455	70	501	70	501	80	601	80	666	74	2.723	PD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH																
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya kepuasan terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	971.715	4	993.655	4	1.034.577	4	1.080.837	4	488.067	4	4.568.852	PD SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	Indeks	4	4		4		4		4		4				
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Indeks	4	4		4		4		4		4				
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dukungan administrasi dan pelayanan internal pemerintah provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	117.230	4	113.112	4	115.664	4	121.377	4	122.444	4	589.827	PD SEKRETARIAT DAERAH-BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dukungan administrasi dan pelayanan internal pemerintah provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	33.272	4	33.495	4	33.719	4	34.346	4	34.576	4	169.408	PD SEKRETARIAT DAERAH-BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Outcome: Meningkatnya tata kelola kelembagaan Biro Kerja Sama Daerah yang adaptif, akuntabel, dan efektif sebagai motor penggerak kemitraan strategis serta peningkatan daya saing daerah dalam mewujudkan visi Jakarta 50 Top Global City.	Persentase Kerjasama yang Terimplementasi	Persentase	100	100	32.915	100	34.456	100	35.150	100	35.859	100	36.582	100	174.962	PD SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Outcome: Meningkatkan kematangan perangkat daerah menuju perangkat daerah yang modern	Persentase Perangkat Daerah yang berada pada tingkat kematangan minimal Sedang	Persen	0	20	6.948	40	7.650	60	9.075	80	10.686	100	11.913	100	46.272	PD SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Upaya Fasilitas, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase	0	90	233.983	91	250.523	92	255.638	93	260.793	94	266.084	94	1.267.022	PD SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Persentase	0	100		100		100		100		100				
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas	Indeks	4	4		4		4		4		4				
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks efektivitas fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Indeks	4	4	362.517	4	362.517	4	362.517	4	362.517	4	362.517	4	1.812.585	PD SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks efektivitas fasilitas, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Indeks	4	4		4		4		4		4				
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Outcome: Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persentase	0	60	3.327	62	4.004	63	3.904	64	4.489	65	4.462	65	20.186	PD SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100		100		100		100		100				
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian, keuangan dan pembangunan	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	Persentase	100	100	145	100	159	100	175	100	193	100	212	100	884	PD SEKRETARIAT DAERAH
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Outcome: Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan BUMD	Rata-rata nilai ROE	Persen	4	5	7.106	6	8.193	7	9.277	8	9.958	9	11.037	9	45.571	PD SEKRETARIAT DAERAH BADAN-PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
		Pertumbuhan Laba Bersih	Persen	6	7		8		9		10		11				
		Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Persen	5	6		7		8		9		10				
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	Persentase	90	92,5	5.632	92,75	5.865	93	6.038	93,25	6.140	93,5	6.305	93,5	29.980	PD SEKRETARIAT DAERAH- BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sesuai dengan Peraturan	Persentase	100	100	826	100	840	100	856	100	873	100	892	100	4.287	PD SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persen	96,27	96,3		96,4		96,5		96,6		96,7				
		Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Persen	35,82	45		47		48		50		52				
4.4.02	SEKRETARIAT DPRD																
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	405.139	4	408.489	4	399.748	4	472.233	4	426.922	4	2.112.532	PD SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Kepuasan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Persepsi	4	4	412.113	4	308.953	4	340.215	4	290.249	4	358.080	4	1.709.610	PD SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5.5.01	PERENCANAAN																	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana kelembagaan yang terkendali dan efisien	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bappeda	Nilai	0	85,82	145.697	86,22	150.067	86,63	154.569	87,03	157.674	87,44	162.381	87,44	770.388	PD PERENCANAAN	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Outcome: Meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan lingkup provinsi	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persen	0	90	22.121	91	22.785	92	23.468	93	25.705	94	26.499	94	120.578	PD PERENCANAAN	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Outcome: Meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan lingkup Perangkat Daerah	Persentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	0	80	11.117	80,5	11.450	81	11.794	81,5	12.147	82	12.512	82	59.020	PD PERENCANAAN	
		Persentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang perekonomian dan SDA	Persen	0	80		80,5		81		81,5		82		82			
		Persentase keselarasan kegiatan Renja PD dengan Renstra PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	0	80		80,5		81		81,5		82		82			
5.5.02	KEUANGAN																	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	123.429	4	123.625	4	126.788	4	130.035	4	133.339	4	637.215	PD KEUANGAN-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	292.805	4	299.241	4	304.775	4	313.940	4	316.849	4	1.527.611	PD KEUANGAN-BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	1.222.996	4	1.284.013	4	1.317.311	4	1.349.611	4	1.350.284	4	6.524.215	PD KEUANGAN-BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Outcome: Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase penyelesaian dokumen APBD	%	0	100	905.141	100	865.238	100	880.538	100	895.750	100	910.901	100	4.457.569	PD KEUANGAN	
		Persentase Pelaksanaan APBD	%	0	100		100		100		100		100					
		Persentase Penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	%	0	100		100		100		100		100					
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100					
		Indeks Kepuasan Layanan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	0	4		4		4		4		4					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Outcome: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks penyediaan referensi harga untuk penyusunan APBD/Perubahan APBD	Indeks	0	4	2.339	4	2.432	4	2.529	4	2.631	4	2.736	4	12.667	PD KEUANGAN- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Outcome: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase pemanfaatan BMD	%	29,84	31,33	63.728	32,9	68.569	34,54	74.611	36,27	77.022	38,08	85.690	38,08	369.620	PD KEUANGAN- BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset	Indeks	4	4		4		4		4		4				
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	%	100	100		100		100		100		100				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Outcome: Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	%	98,69	100	232.473	100	216.838	100	204.743	100	206.192	100	206.192	100	1.066.437	PD KEUANGAN
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	%	106,19	100		100		100		100		100				
5.5.03	KEPEGAWAIAN																
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	173.067	4	181.605	4	193.717	4	203.499	4	212.306	4	964.194	PD KEPEGAWAIAN
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan	Nilai	40	40	43.600	40	48.565	40	49.955	40	53.676	40	58.371	40	254.166	PD KEPEGAWAIAN
		Nilai Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada Aspek Pengadaan	Nilai	32	32		32		32		32		32				
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Sistem Informasi	Nilai	22	22		22		22		22		22				
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	16	16		16		16		16		16				
		Nilai Sub Aspek 1 s.d 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	37,5	37,5		37,5		37,5		40		40				
		Nilai Sub Aspek 1,2,3,4,5,6 dan 10 pada Aspek Pengembangan Karir	Nilai	59,53	64,03		64,03		69		69		95,43		95,43		
		Nilai Sub Aspek 1 s.d 5 pada Aspek Manajemen Kinerja	Nilai	75	75		75		75		77,5		77,5				
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	37,5	37,5		37,5		37,5		40		40				
5.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	77.222	4	86.933	4	89.607	4	92.030	4	94.295	4	440.088	PD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Outcome: Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	Persen	80,56	81	60.184	82	62.668	83	64.558	84	66.962	85	69.248	85	323.620	PD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Outcome: Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi pemerintah daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan	Persen	0	80	43.673	85	78.636	90	81.104	95	83.572	100	86.041	100	373.026	PD PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6.6.01	INSPEKTORAT DAERAH																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	83.538	4	86.246	4	88.953	4	91.660	4	94.367	4	444.763	PD INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Outcome: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal	%	92	93	60.848	93,5	62.820	94	64.792	94,5	66.763	95	68.735	95	323.958	PD INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Outcome: Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	7.874	3	8.129	3	8.385	3	8.640	4	8.895	4	41.923	PD INSPEKTORAT DAERAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI																
7.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	150.346	4	166.484	4	167.218	4	174.182	4	172.690	4	830.920	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
7.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	169.735	4	179.664	4	185.223	4	196.519	4	194.982	4	926.123	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
7.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	319.245	4	341.797	4	362.548	4	383.408	4	403.760	4	1.810.758	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
7.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	320.557	4	327.454	4	332.977	4	337.053	4	339.606	4	1.657.647	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	414.282	4	450.827	4	462.022	4	471.813	4	480.238	4	2.279.182	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
7.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	Nilai Persepsi	4	4	10.456	4	10.850	4	11.175	4	12.952	4	11.906	4	57.339	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	223.931	4	227.997	4	245.939	4	258.550	4	279.618	4	1.236.035	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	318.374	4	328.472	4	344.282	4	328.791	4	353.140	4	1.673.057	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	320.389	4	329.971	4	339.846	4	350.008	4	360.480	4	1.700.694	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	372.148	4	391.824	4	412.540	4	434.351	4	457.316	4	2.068.178	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	385.905	4	385.949	4	405.116	4	425.346	4	446.587	4	2.048.903	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Nilai Persepsi	4	4	31.135	4	32.904	4	34.739	4	35.119	4	38.317	4	172.214	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	91.572	4	93.640	4	96.198	4	97.855	4	99.513	4	478.778	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	104.185	4	109.832	4	114.133	4	143.620	4	146.500	4	618.271	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	157.239	4	157.239	4	157.427	4	157.239	4	157.239	4	786.385	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	129.636	4	136.118	4	142.924	4	150.070	4	157.574	4	716.323	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	153.469	4	154.355	4	161.464	4	168.911	4	176.712	4	814.911	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Terwujudnya program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Nilai Persepsi	4	4	10.330	4	10.505	4	10.683	4	10.865	4	11.051	4	53.434	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	3.063	4	3.540	4	4.018	4	4.496	4	4.973	4	20.090	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	1.710	4	1.767	4	1.827	4	1.897	4	1.935	4	9.136	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	2.973	4	2.973	4	2.984	4	2.973	4	2.973	4	14.874	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	4.261	4	4.474	4	4.698	4	4.933	4	5.179	4	23.544	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	7.140	4	7.283	4	7.429	4	7.577	4	7.729	4	37.159	PD KECAMATAN ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Terwujudnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang optimal	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Nilai Persepsi	4	4	640	4	653	4	666	4	680	4	693	4	3.333	PD KECAMATAN ADMINISTRASI- KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
7.7.02	KOTA ADMINISTRASI																
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	83	85,6	363.054	86,3	368.632	88,66	373.493	90,72	378.354	92,78	382.839	88,812	1.866.374	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	95	96	342.014	96	346.333	97	350.942	97	355.491	98	360.120	98	1.754.900	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	57,66	65,77	349.640	68,47	356.044	71,17	362.626	72,97	369.041	74,77	375.635	74,77	1.812.987	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	90	92	437.623	93	445.420	94	453.277	95	461.114	95	468.933	95	2.266.366	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	56	60	465.016	62	473.531	64	482.025	66	490.209	68	499.388	68	2.410.169	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI Outcome: Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai Persepsi	4	4	3.550	4	4.870	4	5.455	4	6.040	4	7.001	4	26.916	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI Outcome: Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai Persepsi	4	4	2.160	4	2.514	4	2.577	4	2.700	4	2.744	4	12.695	PD KOTA ADMINISTRASI PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI Outcome: Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai Persepsi	4	4	3.392	4	3.647	4	3.647	4	3.814	4	3.802	4	18.301	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI Outcome: Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai Persepsi	4	4	5.767	4	5.857	4	5.887	4	5.938	4	6.005	4	29.453	PD KOTA ADMINISTRASI PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI Outcome: Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai Persepsi	4	4	3.798	4	3.994	4	4.211	4	4.739	4	4.270	4	21.012	PD KOTA ADMINISTRASI-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI																
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	Persen	53,57	75	66.221	78,57	69.023	82,14	70.757	85,71	72.570	89,29	74.278	89,29	352.849	PD KABUPATEN ADMINISTRASI
		Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN KABUPATEN ADMINISTRASI Outcome: Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai Persepsi	4	4	3.785	4	3.808	4	4.043	4	4.181	4	4.326	4	20.144	PD KABUPATEN ADMINISTRASI
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	Nilai Persepsi	4	4		4		4		4		4				
7.03.04	PROGRAM PELIMPAHAN KEWENANGAN KABUPATEN ADMINISTRASI Outcome: Terwujudnya Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Persentase Penyelesaian Masalah Pelimpahan Kewenangan	Persen	0	80	32.675	80	32.530	80	33.240	80	33.969	80	34.796	80	167.211	PD KABUPATEN ADMINISTRASI
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Outcome: Meningkatkan kepuasan terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SKPD/UKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	0	4	76.821	4	80.629	4	83.640	4	86.251	4	90.262	4	417.603	PD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Outcome: Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	0	87,5	39.166	88,33	51.647	89,16	54.097	90	56.548	90,83	58.998	90,83	260.456	PD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Outcome: Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, serta Peningkatan Peran Partai Politik	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	100	100	93.491	100	93.575	100	598.558	100	850.642	100	95.726	100	1.731.991	PD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Outcome: Meningkatkan pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait peran Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	0	67	5.893	68	6.034	69	6.175	70	6.315	71	6.456	71	30.874	PD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Outcome: Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan	Persen	0	87,5	34.253	88,33	34.842	89,16	35.430	90	36.019	90,83	36.607	90,83	177.152	PD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Outcome: Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik Sosial, dan Pemantauan Orang Asing	Persentase Tingkat Penyelesaian Masalah Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Persen	0	87,5	24.433	88,33	25.344	89,16	26.354	90	27.265	90,83	28.176	90,83	131.572	PD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IV.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini akan disampaikan penjabaran mengenai tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Daftar indikator yang termuat bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dari akumulasi hasil pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator yang saling berkaitan (kausalitas indikator) dengan tetap mempertimbangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra PD.

IV.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja strategis yang relevan dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD serta Visi dan Misi Kepala Daerah. Target yang tercantum berlaku dari tahun 2025-2030; dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah pada periode selanjutnya. IKU dievaluasi setiap tahun untuk menjadi dasar penetapan perjanjian kinerja organisasi. Lebih lanjut penetapan IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Modal Manusia	indeks	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7
2	Indeks Dimensi Pendidikan	indeks	0,696	0,704	0,712	0,720	0,728	0,739
3	Usia Harapan Hidup	tahun	76,15	76,31	76,54	76,82	77,14	77,51
4	Prevalensi Stunting	persen	15,8	15	14,2	13,5	12,8	12,3
5	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	65,18	71,03	73,57	76,30	79,31	81,68
6	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,143	0,140	0,137	0,134	0,132	0,129
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	57,29	57,91	58,52	59,1	59,69	60,48
8	Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	84,70	85,78	86,85	87,93	89,00	89,13
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.00-5.30	5.10-6.00	5.20-6.50	5.30-7.00	5.40-7.40	5.50-7.70
10	Indeks Ekonomi Biru	indeks	22,89	24,69	26,54	28,48	30,65	32,55
11	Indeks Ekonomi Hijau	indeks	44,80	45,37	46,50	48,15	48,88	49,45
12	Total PDRB	triliun rupiah	3,907.37- 3,918.53	4,106.64- 4,153.64	4,320.19- 4,423.63	4,549.16- 4,733.28	4,806.19- 5,083.55	5,084.94- 5,474.98
13	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen	34,3	34,32- 34,44	34,35- 34,54	34,37- 34,64	34,64- 34,72	34,46- 34,72
15	PDRB Ekraf	persen	10,75	10,87	11	11,12	11,25	11,36
16	Jumlah Tamu Mancanegara	orang	1.286.092	1.289.257	1.594.162	1.848.874	2.105.833	2.332.494
17	Tingkat Kemiskinan	persen	3.96-4.15	3.80-3.90	3.37-3.965	2.94-3.49	2.08-3.08	1.82-2.91
18	Rasio Gini	koefisien	0,425- 0,430	0,410- 0,422	0,422- 0,427	0,420- 0,425	0,417- 0,421	0,415- 0,419
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,10	5,92-6,01	5,90-6,00	5,78-5,90	5,64-5,78	5,49-5,64
20	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	0.175- 0,263	0-0.175	0-0.135	0-0.100	0	0
21	Indeks Kesejahteraan Sosial	indeks	59,77	62,36	64,94	67,52	70,10	72,47
22	Indeks Ketahanan Pangan	persen	71,71	72,84	74,86	77,52	80,30	83,20
23	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	94	95	96	98	99	101
24	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	predikat	A (82,14)	A (82,57)	A (83,22)	A (83,97)	A (84,62)	AA (90,10)
25	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	A	A	A	A	A	A
26	Indeks Integritas Daerah	indeks	76,82	77,60	78,38	79,17	79,96	80,75
27	Indeks Sistem Merit	indeks	350,5	355,03	355,03	360,5	360,5	400
28	Indeks SPBE / Pemerintahan Digital*	indeks	4,46	1,7*	1,7*	2,0*	2,0*	2,2*
29	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,54 (Prima)	4,55 (Prima)	4,56 (Prima)	4,57 (Prima)	4,58 (Prima)	4,8 (Prima)
30	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	persen	78,06	78,47	78,88	79,30	79,71	80,13
31	Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	persen	97,13	97,38	97,58	97,70	97,75	97,84
32	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	indeks	69,83	71,94	74,05	76,15	78,26	80,37
33	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	persen	39,55	40,22	40,88	41,55	42,22	42,89

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
34	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	persen	25,90	27,12	28,34	29,56	30,78	32,00
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	53,72	53,87	54,05	54,32	54,63	55,01
36	Indeks Risiko Bencana	indeks	52,93**	52,51	52,09	51,67	51,25	50,85
37	Public Transport Mode Share	persen	23,01	23,4	24,38	25,34	26,12	27,06
38	Cakupan Layanan angkutan Umum Massal	persen	88,99	90,01	91,03	92,05	93,07	94,09
39	<i>People Near Transit</i>	persen	37,18	37,18	38,15	38,15	38,15	39,09

*Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target daerah disesuaikan sebagaimana Perpres 12 Tahun 2025 Lampiran 1 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan data baseline masih menggunakan metode pengukuran yang lama sehingga datanya lebih tinggi dari data target.

**Adanya perubahan metode perhitungan pada indikator IRBI tahun 2025 sehingga angka pada tahun 2024 tidak bisa diperbandingkan dengan angka tahun 2025.

IV.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

IKD meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, daftar indikator yang termuat bersumber dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan indikator makro relevan lainnya hasil penyelarasan dengan pemerintah pusat. Pada aspek pelayanan umum, daftar indikator yang termuat merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing urusan pemerintah daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sama halnya dengan IKU, IKD berlaku dari tahun 2025-2030; dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Lebih lanjut penetapan IKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Periode 2025-2030

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	3614	4729	5844	6959	8074	9189
2	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	14,65	12,67	16,60	19,91	22,01	23,26
3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	Persen	15,26	15,83	16,49	17,23	18,02	18,86
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,21	0,12	0,04	-0,05	-0,1	-0,12
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PDRB per Kapita	Juta rupiah	362.15-362.49	384.89-389.29	405.30-415.00	427.28-444.57	452.03-478.12	478.97-515.71

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	60,63	62,65	64,67	66,68	68,70	70,72
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,44	76,80	77,16	77,51	77,87	78,07
4	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	27	30	32	35	38	40
5	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	2	3	5	6	7	8
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62-13,63	13,63 - 13,64	13,64 - 13,67	13,67 - 13,87	13,87-13,89	13,89 - 13,95
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Tingkat Inflasi	Persen	2,15	2,4	2,65	2,9	3,15	3,25
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	11,87	11,64	11,40	11,17	10,93	10,70
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	4,92	5,00	5,15	5,22	5,3	5,38
4	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	7,4	7,71	8,03	8,34	8,65	8,96
5	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	7,68	7,74	7,79	7,85	7,90	7,96
6	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	14,80-14,81	14,82-14,84	14,88-14,92	14,90-14,95	14,93-14,99	14,96-15,03
7	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,46
8	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,50	3,08	3,65	4,23	4,80	5,38
9	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	Nilai	7,78-7,63	7,55-7,14	7,39-6,71	7,23-6,33	6,89-5,98	6,67-5,73
10	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persen	3,73	3,8	3,87	3,94	4,01	4,08
11	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	47	47,5	48	48,5	49	50
12	Tingkat Penguasaan IPTEK (Pengeluaran IPTEK dan Inovasi)	% APBD	0,02	0,069	0,118	0,167	0,216	0,265
13	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Persen	9,4	9,25	9,1	8,95	8,8	8,65
14	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Persen	24,63	24,8	24,97	25,14	25,31	25,48
15	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	125,52	132,35	139,19	146,02	152,85	159,68
16	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	9,31	9,56	9,81	10,05	10,30	10,55
17	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	273.009.547,6	306.657.025,6	340.304.503,6	373.951.981,6	407.599.459,6	441.246.937,6
18	Total Kredit/PDRB	Persen	113,6	120,575	127,55	134,525	141,5	148,475
19	Inklusi Keuangan	Persen	97,55	97,6925	97,835	97,9775	98,12	98,2625
20	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,618	0,62075	0,6235	0,62625	0,629	0,63175

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Jumlah Kerja Sama Provinsi (Sister City)	Provinsi	22	22	22	22	22	22
22	Intensitas energi primer	SBM/ Rp milyar	70,734	69,518	68,303	67,088	65,873	64,657
D. ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	70,375	70,75	71,125	71,5	71,875
2	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	70	71,425	72,85	74,275	75,7	77,125
3	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	Persen	45	45,75	46,5	47,25	48	48,75
4	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	Nilai	70	73,75	77,5	81,25	85	88,75
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	21,358	22,474	28,800	30,251	32,050	33,006
E. INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1. PENDIDIKAN								
1.1	Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	76,70	77,82	78,71	79,43	80,05	80,59
1.2	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	19,08	19,20	19,50	20,10	21,52	21,60
1.3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	Persen	83,33	83,33	83,33	83,33	100,00	100,00
1.4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persen	66,67	66,67	66,67	83,33	83,33	83,33
1.5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	Persen	86,17	86,20	86,50	87,06	89,56	89,58
1.6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persen	77,63	78,40	78,60	78,73	81,23	81,25
2. KESEHATAN								
2.1	Usia Harapan Hidup Sehat (HALE)	Tahun	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50
2.2	Universal Health Coverage Service Coverage Index (UHC SCI)	Indeks	79,46	85,08	85,51	85,90	86,33	86,81
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	37,86	33,00	32,00	31,00	30,00	29,00
2.4	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	91	92	93	94	95	96

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	Persen	80	87	88	89	90	90
2.6	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,34	98,65	98,70	98,75	99,00	99,05
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap	Persen	97,303	97,36	97,37	97,38	97,39	97,40
3.2	Persentase jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung	Persen	6,64	7,47	8,02	8,59	9,20	9,84
3.3	Persentase Keterwujudan Prasarana Minimum pada Kawasan Strategis	Persen	50,00	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50
3.4	Persentase Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Gedung	Persen	-	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50
3.5	Persentase Penurunan Konsumsi Air pada Bangunan Gedung	Persen	-	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50
3.6	Persentase Keterwujudan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis	Persen	60,00	60,10	60,20	60,30	60,40	60,50
3.7	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Prinsip Bangunan Gedung Hijau	Persen	-	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00
3.8	Persentase Akses Layanan Air Minum Aman Perpipaan	Persen	70,03	77,21	83,93	88,95	93,03	100,00
3.9	Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman	Persen	23,83	26,60	34,00	35,63	39,15	41,51
3.10	Indeks Bahaya Banjir	Skor	2,0041	1,9998	1,9829	1,9761	1,971	1,9534
3.11	Persentase Peningkatan Akses Layanan Air Minum Aman Perpipaan	Persen	3,30	3,74	6,73	5,01	4,08	6,97
3.12	Persentase Peningkatan Akses Layanan Air Limbah Aman	Persen	2,05	1,16	7,40	1,63	3,52	2,36
3.13	Luasan Daerah Tergenang	Ha	966,41	946,63	693,73	594,54	518,10	460,10
3.14	Volume Kapasitas Tampung Air	m ³	416.238	707.138	765.138	806.938	835.738	995.738
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
4.1	Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Ha	37,80	39,54	41,00	42,76	45,53	47,26
4.2	% Jumlah Unit Hunian Layak yang Terhuni	Persen	86,90	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
4.3	% Lingkungan Permukiman yang Tertata	Persen	23,59	31,52	32,98	34,69	37,40	38,95
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,61	0,65	0,68	0,72	0,74	0,76
5.2	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
5.3	Indeks Ketangguhan Kebakaran	Indeks	59	64	65	66	67	68

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.4	Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	Persen	99,99	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Penurunan Jumlah Titik Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	80	70	60	50	40
5.6	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100
6.	SOSIAL							
6.1	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas	Indeks	46,80	48,83	50,85	52,87	54,89	56,74
6.2	Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia	Indeks	65,50	68,34	71,17	74,00	76,83	79,42
6.3	Persentase (%) Penerima Bantuan Sosial Bersyarat yang Tergraduasi	Persen	--	2,42	3,14	3,92	4,76	4,97
6.4	Indeks Peranan Sosial	Indeks	56,67	59,13	61,58	64,03	66,47	68,71
6.5	Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks	62,68	65,40	68,10	70,81	73,52	75,99
7.	TENAGA KERJA							
7.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	93,79	94,18	94,34	94,48	94,60	94,70
7.2	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persen	3,48	3,73	3,93	4,18	4,48	4,83
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
8.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,50	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75
8.2	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	70,11	71,54	72,97	74,40	75,83	77,26
8.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	52,27	52,53	52,79	53,05	53,31	53,57
8.4	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	18,91	18,34	18,34	17,26	17,26	16,24
8.5	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Persen	36,59	36,59	34,43	34,43	32,39	32,39
9.	PANGAN							
9.1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	91,31	91,31	91,58	91,86	92,13	92,41
9.2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Nilai	2,5	2,43	2,36	2,29	2,22	2,15
10.	PERTANAHAN							
10.1	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Persen	-	10	20	30	40	50
10.2	Persentase Bidang Tanah di Kawasan Permukiman yang terselesaikan Administrasinya	Persen	-	15	30	45	60	75
11.	LINGKUNGAN HIDUP							
11.1	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	99,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,85	55,35	55,60	56,10	56,60	57,30
11.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	52,73	52,93	53,13	53,33	53,63	53,93
11.4	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	78,84	78,89	78,94	78,99	79,04	79,09
11.5	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	89,00	93,50	95,00	96,50	98,00	100,00
11.6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	26	54	57	58	85	87
11.7	Persentase Status Indeks Pencemar (IP)	Persen	70,30	70,40	70,60	70,90	71,30	71,80
11.8	Persentase Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	Persen	75,68	76,44	76,71	77,81	78,90	80,00
11.9	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,209	5,606	5,615	5,624	5,633	5,642
11.10	Persentase RTH Taman Inklusi	Persen	84,57	85,27	85,98	86,68	87,39	88,09
11.11	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	Persen	30,34	34,83	37,08	39,33	41,57	43,82
12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
12.1	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
12.2	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,96	99,96	99,96	99,96	99,97	99,97
13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
13.1	Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persen	71	77	80	83	86	89
13.2	Persentase Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	Persen	56	62	65	68	71	74
14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
14.1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	42,4	42,51	42,61	42,7	42,80	42,89
14.2	Total Fertility Rate	Rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
15. PERHUBUNGAN								
15.1	Rasio konektivitas provinsi	Rasio	0,783	0,794	0,806	0,815	0,824	0,843
15.2	Jumlah penumpang tahunan angkutan umum yang menjadi	Penumpang per Tahun	539.324.890	594.338.148	656.298.087	726.455.334	784.124.150	867.791.439

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta							
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
16.1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	98,24	98,25	98,26	98,27	98,28	98,29
16.2	Indeks SPBE/Pemerintahan Digital	Indeks	4,46	1,70	1,70	2,00	2,00	2,20
16.3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	84,29	84,30	84,31	84,32	84,33	84,34
16.4	Jumlah Layanan Publik yang Terintegrasi pada Portal Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	111	1	1	1	1	1
17.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							
17.1	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,57	3,58	3,60	3,61	3,65	3,66
17.2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,040	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045
17.3	Persentase UMKM Binaan yang Mengalami Peningkatan Omzet	Persen	2,24	2,28	2,33	2,37	2,41	2,46
17.4	Persentase Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Non- pertanian	Persen	30,38	30,40	30,45	30,5	30,55	30,60
17.5	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	21,90	22,38	22,87	23,36	23,84	24,33
18.	PENANAMAN MODAL							
18.1	Realisasi Nilai Investasi	Triliun	228,50	268,4	283,32	299,33	316,54	316,54
18.2	Presentase Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Merealisasikan Investasi	Persen	--	10	10	10	10	10
18.3	Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	--	86	87	88	89	90
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
19.1	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,384	0,396	0,408	0,417	0,428	0,439
19.2	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	0,233	0,275	0,286	0,298	0,309	0,317
19.3	Skor Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Indeks	8,33	9,23	9,57	9,90	10,25	10,62
20.	STATISTIK							
20.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0
20.2	Indeks Domain Kualitas Data	Indeks	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0
20.3	Indeks Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0
21.	PERSANDIAN							
21.1	Persentase Tingkat Kematangan Siber dan Sandi	Persen	90,52	90,52	90,63	90,63	91,07	91,07
21.2	Persentase Insiden Siber yang direspon sesuai rekomendasi	Persen	-	100	100	100	100	100
22.	KEBUDAYAAN							

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
22.1	Rata-rata Nilai Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi, dan Dimensi Warisan Budaya dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	28,14	31.29	32.64	33.93	35.17	35.50
22.2	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	18,00	18.97	19.76	20.43	21.00	21.20
22.3	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	21,79	22.42	22.97	23.45	23.87	24.10
22.4	Nilai Dimensi Warisan Budaya dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	48,56	52.48	55.20	57.92	60.65	60.85
23. PERPUSTAKAAN								
23.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72,93	73,93	74,43	74,93	75,43	75,93
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	73,58	74,01	74,26	74,51	74,76	75,01
24. KEARSIPAN								
24.1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	93,11	93,61	94,11	94,61	95,11	95,61
24.2	Tingkat Pengelolaan Arsip	Persen	67,32	92,59	93,09	93,59	94,09	94,59
25. KELAUTAN DAN PERIKANAN								
25.1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	--	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
25.2	Indeks Kesehatan Laut di Wilayah Kewenangan Provinsi	Indeks	69,65	69,69	70,00	70,50	71,00	71,50
25.3	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	219.204	224.337	228.307	232.354	236.477	240.681
25.4	Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik	Persen	36,59	36,60	36,61	36,62	36,63	36,64
26. PARIWISATA								
26.1	Persentase Proporsi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	4,81	5,02	5,11	5,19	5,27	5,35
26.2	Persentase Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta	Persen	10,51	10,87	11,00	11,12	11,24	11,36
26.3	Jumlah festival dan event internasional di Jakarta	Festival / Event	38	40	43	44	45	46
26.4	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	1.167.869	1.191.402	1.203.316	1.208.129	1.214.170	1.221.455
27. PERTANIAN								
27.1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persen	26,49	28,99	31,49	33,99	36,49	38,99
27.2	Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura	Persen	25,46	28,00	30,50	33,00	35,50	38,00
27.3	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	27,52	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00
28. KEHUTANAN								

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
28.1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	34,38	34,45	34,52	34,59	34,66	34,73
28.2	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Persen	77,09	79,58	80,74	81,9	83,06	84,22
29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
29.1	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah Rata-Rata	cm	3,60	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10
29.2	Jumlah Area dan Kawasan Pengendalian Zona Konservasi Air Tanah yang telah dilayani Jaringan Perpipaan Secara Optimal	Kelurahan	21	73	160	214	224	261
29.3	Persentase Bauran Energi Terbarukan	Persen	0,66	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
29.4	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	MegaWatt	34,38	34,38	34,50	34,80	35,10	35,40
30. PERDAGANGAN								
30.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,87	6,00	6,10	6,20	6,30	6,40
30.2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	343.770	364.396	364.740	365.084	365,428	365.771
31. PERINDUSTRIAN								
31.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persen	1,14	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35
31.2	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas	Persen	21,97	20	20	20	20	20
31.3	Persentase Peningkatan Jumlah Industri di Provinsi DKI Jakarta	Persen	53,08	10	10	10	10	10
32. TRANSMIGRASI								
32.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	93.79	94.18	94.34	94.48	94.78	94.60
32.2	Persentase Transmigran yang mengalami Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi di Wilayah Penempatan Transmigrasi	Persen	--	70	71	72	73	74
33. SEKRETARIAT DAERAH								
33.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	86,22	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25
33.2	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	4	4	4	4	4	4
33.3	Return On Asset (ROA) BUMD	Persen	1,09	1,27	1,47	1,70	1,96	2,24
33.4	Tingkat Kesehatan BUMD	Persen	100	100	100	100	100	100
33.5	Persentase BUMD dengan penilaian GCG Sangat Baik	Persen	50	57	64	66	73	80
33.6	Nilai Dividen dan Pajak Daerah yang Disetor	Miliar Rupiah	1,18	1,28	1,30	1,38	1,48	1,59
33.7	Jumlah BUMD yang Melakukan IPO	BUMD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
33.8	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
33.9	Nilai Efektivitas Kerjasama Daerah (NEKD)	Nilai	--	4	4	5	5	5
33.1	Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100
33.11	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100
33.12	Persentase Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Persen	--	100	100	100	100	100
33.13	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	58,43	63,00	67,00	71,00	75,00	80,00
33.14	Skor Rencana Aksi Pembangunan RB	Skor	6,19	6,25	6,30	6,35	6,40	6,45
33.15	Skor Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Skor	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
33.16	Skor Indeks BerAkhlak	Skor	80,09	80,50	81,00	81,50	82,00	83,00
33.17	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Opini	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
33.18	Persentase Kerjasama Terimplementasi	Persen	100	100	100	100	100	100
33.19	Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	Persen	100	100	100	100	100	100
33.20	Evaluasi Kerja Sama dan Kolaborasi yang Terimplementasi	Persen	--	100	100	100	100	100
34.	SEKRETARIAT DPRD							
34.1	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Provinsi secara efektif dan akuntabel	Persen	36,84	36,9	36,95	37,00	37,00	37,10
34.2	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100
35.	PERENCANAAN							
35.1	Kinerja Efektivitas Program Prioritas Pembangunan	Persen	88,14	89,21	90,28	91,34	92,39	93,43
35.2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	80,5	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00
36.	KEUANGAN							
36.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Persen	80,43	80,93	81,43	81,93	82,43	82,93

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
36.2	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	98,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36.3	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4
36.4	Rasio Utilisasi Terhadap Total Aset	Persen	4,40	4,62	4,85	5,09	5,35	5,62
36.5	Jumlah Realisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	450.921.073.277	496.819.342.340	516.322.250.432	569.108.842.702	596.589.284.837	626.073.749.079
36.6	Opini Laporan Keuangan Daerah	Nilai	3	3	3	3	3	3
36.7	Indeks Unsur Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	--	5	5	5	5	5
37. KEPEGAWAIAN								
37.1	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BKD	Nilai	320,00	324,03	324,03	329,00	329,00	362,93
37.2	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	110	110	110	110
37.3	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	Nilai	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	40,00
37.4	Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	Nilai	59,53	64,03	64,03	69,00	69,00	95,43
37.5	Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	Nilai	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	117,50
38. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
38.1	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Nilai	30,5	31,0	31,0	31,5	31,5	37,07
38.2	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Nilai	8	8	8	8	8	8
38.3	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10	10	10	10	10	10
38.4	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	Nilai	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9,57
38.5	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	9,5
39. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
39.1	Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah	Persen	78,52	78,99	79,92	80,86	81,79	82,73

No.	Aspek/ Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
39.2	Persentase riset yang dipublikasikan	Persen	68	70	73	76	78	80
39.3	Persentase kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Persen	74	74	76	78	80	82
40.	INSPEKTORAT DAERAH							
40.1	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85	3,86
40.2	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3,513	3,530	3,540	3,550	3,560	3,570
40.3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3,49	3,53	3,54	3,55	3,56	3,57
41	KECAMATAN ADMINISTRASI							
41.1	Nilai Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
41.2	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
41.3	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
41.4	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
42.	KOTA ADMINISTRASI							
42.1	Nilai Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
42.2	Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
43.	KABUPATEN ADMINISTRASI							
43.1	Nilai Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
43.2	Nilai Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
43.3	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Nilai Persepsi	4	4	4	4	4	4
44.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
44.1	Nilai Aspek Kebebasan dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	90,66	91,28	91,82	92,35	92,89	92,96
44.2	Indeks Harmoni Indonesia	Skor	6,72	6,76	6,80	6,84	6,88	6,92
44.3	Nilai empat indikator pada Aspek Kebebasan dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	96,28	96,29	96,30	96,31	96,32	96,33
44.4	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	68,35	68,45	68,55	68,65	68,75	68,85



BAB

5

PENUTUP

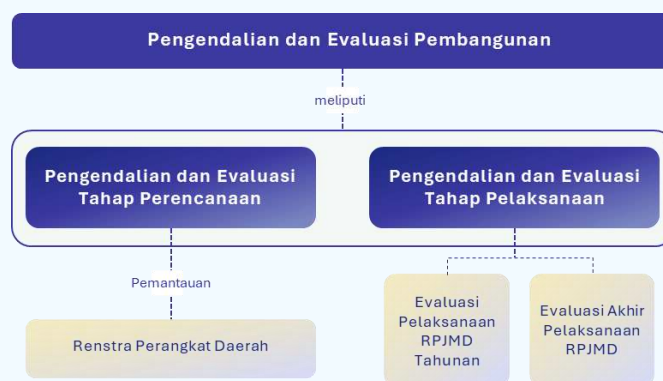
V. PENUTUP

V.1. Kaidah Pelaksanaan dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagai instrumen perencanaan yang bersifat komprehensif dan integratif, RPJMD memiliki peran sentral dalam mengarahkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Prioritas dan fokus pembangunan tahunan dalam RKPD diselaraskan dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tercipta kesinambungan dan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan.

Perangkat Daerah turut berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra memuat uraian mengenai dukungan dan kontribusi masing-masing PD terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan merupakan proses penting dalam mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup kegiatan pemantauan terhadap penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, proses ini juga melibatkan penilaian atas realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target pembangunan secara efisien dan efektif.

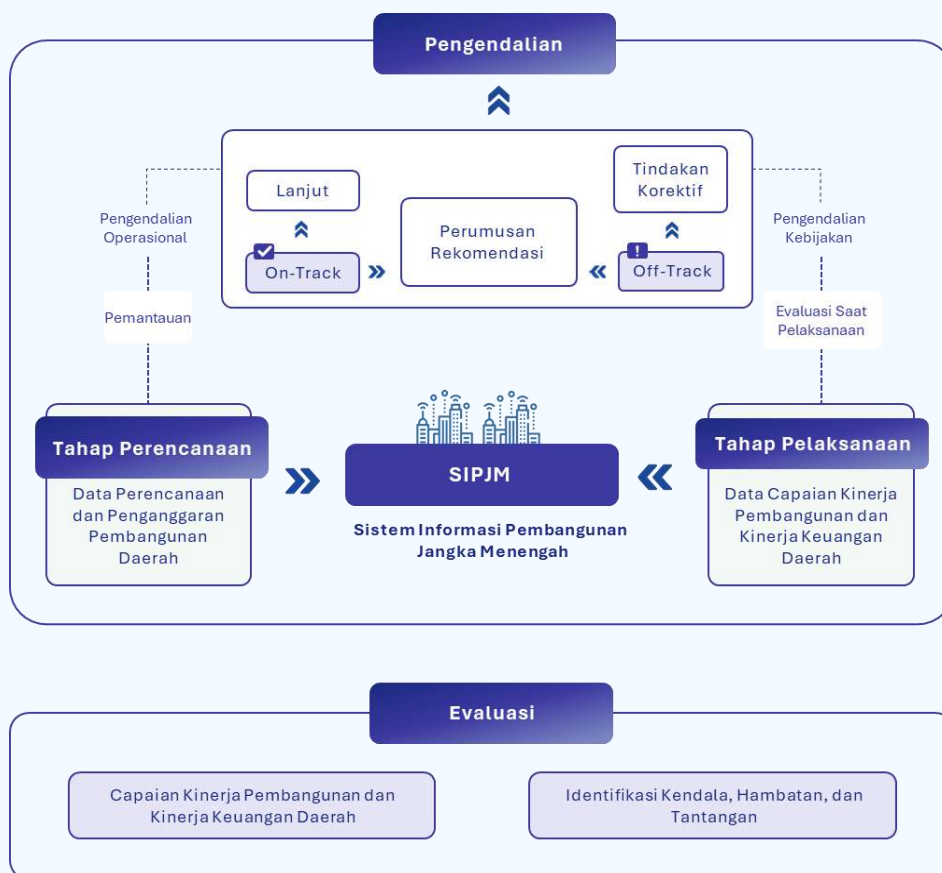


Gambar V.1 Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen tersebut telah dirumuskan dan diimplementasikan secara konsisten dalam dokumen perencanaan tahunan. Pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD telah dijadikan pedoman dalam penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah telah dijabarkan secara sistematis ke dalam rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari proses pemantauan digunakan sebagai dasar evaluasi untuk memastikan bahwa arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan, serta program Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara efektif melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara menyeluruh dengan mencakup dua aspek utama, yaitu kinerja keuangan daerah dan capaian program perangkat daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan RPJMD serta memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya. Proses evaluasi dilakukan melalui dua tahapan, yakni (a) evaluasi tahunan dan (b) evaluasi akhir periode. Evaluasi tahunan dilaksanakan melalui penelaahan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Tujuan dari evaluasi tahunan adalah untuk mengukur tingkat ketercapaian target kinerja RPJMD pada tahun berjalan, sekaligus menyediakan data dan informasi yang relevan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Dengan demikian, evaluasi tahunan berperan penting dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui perbaikan strategi dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, evaluasi akhir RPJMD dilaksanakan pada penghujung periode lima tahunan untuk menilai secara menyeluruh capaian pembangunan daerah selama masa pelaksanaan RPJMD. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat disusun rekomendasi strategis yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD pada periode selanjutnya dalam kerangka RPJPD 2025–2045.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan dan partisipatif dengan memanfaatkan Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM). SIPJM merupakan sistem informasi yang dikelola secara resmi oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung proses penyusunan, supervisi, pengendalian, serta evaluasi terhadap data kinerja pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai platform integratif, SIPJM dirancang untuk mengakomodasi konsolidasi data lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah secara sistematis. Sistem ini memungkinkan konsolidasi data lintas sektor dan Perangkat Daerah, seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pemanfaatan SIPJM dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan tidak hanya memperkuat aspek akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD.



Gambar V.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

V.2. KESIMPULAN

Dari pelabuhan tradisional ke metropolitan global, Jakarta telah bertransformasi dari pelabuhan kecil menjadi ibu kota nasional dan kota global dengan peran sentral dalam politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Jakarta akan tercermin dari kualitas manusianya, kemajuan ekonomi kotanya, integritas birokrasinya, layak dan lestari lingkungannya, serta kesempatan untuk terhubung dengan dunia internasional.

RPJMD bukan sekadar melanjutkan pekerjaan yang telah ada atau *business as usual*, melainkan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan melalui pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Jakarta semakin mendekati pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu "Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan" dan mampu berperan sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara dan setara dengan kota-kota besar di dunia.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

PRAMONO ANUNG



Jakarta
a city of collaboration

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS (IBUKOTA) JAKARTA

BALAIKOTA PROVINSI DKI JAKARTA, GRHA ALI SADIKIN
JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO 8-9 | JAKARTA 10110
WWW.BAPPEDA.JAKARTA.GO.ID